



SALINAN

WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG

NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KOTA SEMARANG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SEMARANG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 139);
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 144);
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 146);
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 147);
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 153);

22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
26. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 143);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
32. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2024, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Semarang untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada 1 Januari 2024 dan berakhir pada 31 Desember 2024.

Pasal 2

RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam:

- a. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024;
- b. penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024; dan
- c. pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

Pasal 3

RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN;
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
- c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
- d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
- e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
- f. BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; dan
- g. BAB VII : PENUTUP.

Pasal 4

Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Juli 2023
WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 12 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn
Pembina Tingkat I
NIP. 196710231994012001

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 43 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SEMARANG TAHUN 2024

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SEMARANG TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana pembangunan tahunan daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai perencanaan pembangunan daerah lima tahunan dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, untuk menjamin kualitas perencanaan pembangunan, maka dalam proses penyusunan RKPD menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Selain itu, juga berorientasi substansi menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 merupakan perencanaan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026 yang diarahkan pada "Pemantapan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat yang Didukung Oleh Penguatan Struktur yang Mendukung Berkelanjutan". RKPD Tahun 2024 memuat permasalahan dan isu strategis, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, sasaran pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan disertai pagu indikatif pendanaan kegiatan semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

RKPD Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Semarang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dimana akan menjadi landasan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024. Proses penyusunan RKPD Tahun 2024 digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. 1
Proses Penyusunan RKPD Tahun 2024

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
23. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
24. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
29. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);

30. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
31. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
32. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
33. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 143);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dalam rangka menjamin keberlanjutan perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah menyusun beberapa dokumen perencanaan yang saling terkait. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan tidak menyimpang dari tujuan pembangunan jangka panjang yang termaktub dalam RPJPD dimana di dalamnya menjelaskan terkait visi, misi, arah, dan sasaran pembangunan daerah selama 20 tahun. Selanjutnya, RPJPD ditorehkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah atau 5 tahunan pada RPJMD yang kemudian dijabarkan kedalam tahapan pelaksanaan tujuan dan sasaran tahapan dalam bentuk RKPD. Sehingga konsistensi antar dokumen perencanaan dapat terjaga. RKPD juga diselaraskan dengan RKP yang diperoleh dari forum Musrenbang Nasional. RKPD selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan Renja PD yang menjadi pedoman penyusunan dokumen KUA dan PPAS. Berikutnya, dokumen KUA dan PPAS yang telah disepakati Wali Kota dan DPRD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA-PD yang menjadi bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Semarang.

Penyusunan RKPD Tahun 2024 Kota Semarang diperlukan untuk menjamin keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam sistem pembangunan daerah antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang berdasarkan pada evaluasi capaian sampai dengan tahun 2022. Secara umum, keterkaitan antar dokumen perencanaan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Untuk menjamin akuntabilitas dan keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran, Pemerintah Kota Semarang menggunakan sistem berbasis *website* yang saling terintegrasi mulai dari perencanaan dan penganggaran, dan sistem informasi lain yang terkait di Kota Semarang.

Penyusunan RKPD Tahun 2024 mempedomani Rancangan Akhir RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dan hasil fasilitasi terhadap Rancangan Akhir Peraturan Wali Kota Semarang tentang RKPD Tahun 2024 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dimaksudkan dalam rangka sinkronisasi kebijakan dan penyelarasan kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang. Penyusunan RKPD ini mengacu juga kepada nomenklatur pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah.

Penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 juga harus memperhatikan berbagai dokumen perencanaan pembangunan sektoral nasional maupun daerah, antara lain Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, Dan Kawasan Brebes Tegal - Pemalang; *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025; serta Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025.



Gambar 1. 2
Hubungan Antar Dokumen Terhadap RKPD Tahun 2024

Selanjutnya dokumen perencanaan multisektor di tingkat Kota Semarang yang terkait dengan RKPD tahun 2024 antara lain: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031; Rencana Induk Semarang Kota Cerdas; *Roadmap* Sistem Inovasi Daerah (SIDa); Rencana Aksi Daerah Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah; Rencana Aksi Daerah Penurunan Angka Kematian Ibu/Bayi; *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK); Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Semarang; serta dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / *Sustainable Development Goals* (SDGs) Kota Semarang. Sinkronisasi antar dokumen dilakukan dalam rangka penentuan tema pembangunan di tahun 2024.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dimaksudkan untuk menjadi pedoman arah kebijakan pembangunan daerah, serta sebagai upaya perwujudan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah pada tahun 2024. Sedangkan tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Semarang Tahun 2024 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang Tahun 2024;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2024; dan
4. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

1.5. KAIDAH PELAKSANAAN

Tujuan dari kaidah pelaksanaan pada bab ini adalah sebagai pedoman kepada seluruh *stakeholder* khususnya dalam menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan, perubahan rencana pembangunan yang disebabkan oleh kondisi-kondisi tertentu, serta pemutakhiran nomenklatur program, kegiatan, dan

sub kegiatan yang diperlukan sesuai peraturan perundangan. Kaidah pelaksanaan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. RKPD Tahun 2024 merupakan rencana kerja pemerintah daerah selama satu tahun yang disusun dengan mendasarkan kepada tema pembangunan, permasalahan, isu strategis, potensi, prioritas dan target yang telah ditetapkan. RKPD Kota Semarang juga disinkronkan dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah dan RKP Nasional. Prioritas pada RKPD Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan pada RPJMD Tahun 2021-2026.
2. RKPD Tahun 2024 menjadi acuan seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja PD) Tahun 2024, serta menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024.
3. Perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dalam pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. RKPD Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan peraturan terbaru tentang hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan.

1.6. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Dokumen RKPD Kota Semarang 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, kaidah pelaksanaan, maksud dan tujuan serta sistematika RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat kondisi umum daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2022 dan realisasi capaian terhadap target RPJMD 2021-2026, serta permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang dihadapi.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi sampai dengan tahun 2022 serta perkiraan tahun 2023-2024, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

- BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Memuat prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2022, keterkaitannya dengan RPJMD dan RPJPD, serta identifikasi prioritas pembangunan di tingkat nasional dan daerah.
- BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.
- BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).
- BAB VII PENUTUP

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

Sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah sekaligus sebagai kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan, Kota Semarang berkembang secara pesat. Selain banyak dampak positif yang dimunculkan, perkembangan ini juga menimbulkan keadaan-keadaan yang memerlukan perhatian lebih serius dari Pemerintah Kota Semarang. Kondisi umum daerah Kota Semarang dapat dilihat melalui aspek-aspek sebagai berikut:

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Analisis pada aspek geografi di Kota Semarang dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan gambaran kondisi demografi mencakup antara lain perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu di Kota Semarang.

2.1.1.1. Karakteristik Wilayah

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Semarang memiliki luas wilayah sebesar 373,70 km² dan merupakan 1,15% dari total luas daratan Provinsi Jawa Tengah dengan batasan wilayah:

sebelah barat : Kabupaten Kendal
sebelah timur : Kabupaten Demak
sebelah selatan : Kabupaten Semarang
sebelah utara : Laut Jawa

Secara administrasi Kota Semarang terbagi atas 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Secara rinci luas masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Luas Wilayah Kota Semarang

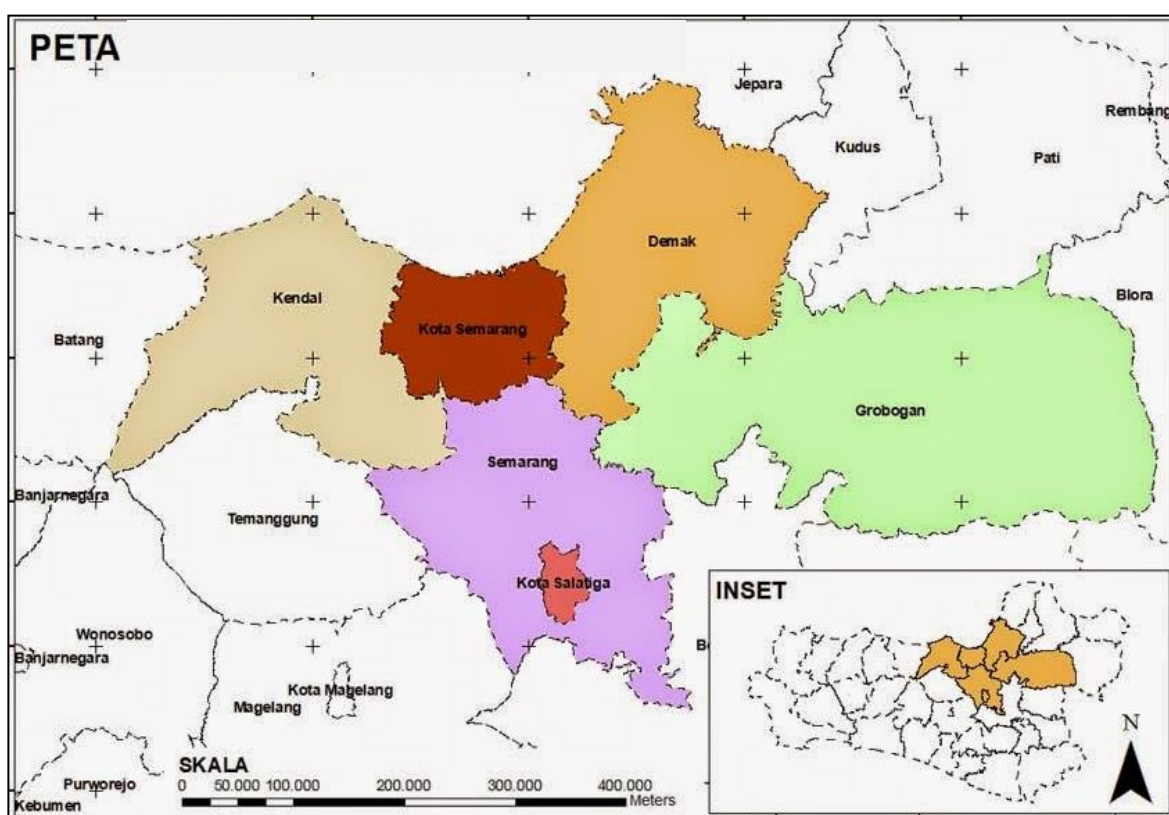
No	Kecamatan	Jml Kelurahan	Luas (km ²)
1	Mijen	14	57,55
2	Gunungpati	16	54,11
3	Banyumanik	11	25,69
4	Gajahmungkur	8	9,07
5	Semarang Selatan	10	5,93
6	Candisari	7	6,54
7	Tembalang	12	44,20
8	Pedurungan	12	20,72
9	Genuk	13	27,39
10	Gayamsari	7	6,18
11	Semarang Timur	10	7,70
12	Semarang Utara	9	10,97

No	Kecamatan	Jml Kelurahan	Luas (km2)
13	Semarang Tengah	15	6,14
14	Semarang Barat	16	21,74
15	Tugu	7	31,78
16	Ngaliyan	10	37,99
	TOTAL	177	373,70

Sumber: BPS Kota Semarang, 2023

b. Letak dan Kondisi Geografis

Kota Semarang terletak pada garis 6° 50' – 7° 10' Lintang Selatan dan garis 109° 35' – 110° 50' Bujur Timur. Kota Semarang juga memiliki posisi geostrategis karena berada pada jalur lalu lintas ekonomi Pulau Jawa, dan merupakan koridor pembangunan Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang yakni koridor Pantai Utara; koridor selatan ke arah kota-kota dinamis seperti Kabupaten Magelang dan Kota Surakarta yang dikenal dengan koridor Merapi-Merbabu; koridor timur ke arah Kabupaten Demak/Kabupaten Grobogan; dan koridor barat menuju Kabupaten Kendal.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Gambar 2.1

Peta Kota Semarang dan Sekitarnya

Jika dilihat secara kewilayahan, Kota Semarang termasuk ke dalam wilayah Kedungsepur (Kab. Kendal-Kab. Demak-Kab. Semarang-Kota Semarang-Kota Salatiga-Kab. Grobogan) yang total mencakup 85 (delapan puluh lima) kecamatan, dengan wilayah Kota Semarang terdiri dari 16 kecamatan. Dalam perkembangan dan pertumbuhan Jawa Tengah, Kota Semarang sangat berperan terutama dengan adanya pelabuhan, jaringan transportasi darat (jalur kereta api dan jalan) serta transport udara yang merupakan potensi bagi simpul transportasi Regional Jawa Tengah dan Kota Transit Regional Jawa Tengah. Posisi lain yang tak kalah

pentingnya adalah kekuatan hubungan dengan luar Jawa, secara langsung sebagai pusat wilayah nasional bagian tengah.

c. Topografi

Secara topografis Kota Semarang terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah dan daerah pantai, dengan demikian topografi Kota Semarang menunjukkan adanya berbagai kemiringan dan tonjolan. Daerah pantai 65,22% wilayahnya adalah dataran dengan kemiringan 25% dan 37,78% merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan 15-40%. Kondisi lereng tanah Kota Semarang dibagi menjadi 4 jenis kelerengan antara lain :

- Lereng I (0-2%) meliputi Kecamatan Genuk, Pedurungan, Gayamsari, Semarang Timur, Semarang Utara dan Tugu, serta sebagian wilayah Kecamatan Tembalang, Banyumanik dan Mijen.
- Lereng II (2-5%) meliputi Kecamatan Semarang Barat, Semarang Selatan, Candisari, Gajahmungkur, Gunungpati dan Ngaliyan.
- Lereng III (15-40%) meliputi wilayah di sekitar Kaligarang dan Kali Kreo (Kecamatan Gunungpati), sebagian wilayah Kecamatan Mijen (daerah Wonoplumbon) dan sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik, serta Kecamatan Candisari.
- Lereng IV (> 50%) meliputi sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik (sebelah tenggara), dan sebagian wilayah Kecamatan Gunungpati, terutama disekitar Kali Garang dan Kali Kripik. Kota Bawah yang sebagian besar tanahnya terdiri dari pasir dan lempung.

Pemanfaatan lahan lebih banyak digunakan untuk jalan, permukiman atau perumahan, bangunan, halaman, kawasan industri, tambak, empang dan persawahan. Kota Bawah sebagai pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan, perindustrian, pendidikan dan kebudayaan, angkutan atau transportasi dan perikanan. Berbeda dengan daerah perbukitan atau Kota Atas yang struktur geologinya sebagian besar terdiri dari batuan beku.

Wilayah Kota Semarang berada pada ketinggian antara 0 sampai dengan 348,00 meter dpl (di atas permukaan air laut). Secara topografi terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan, sehingga memiliki wilayah yang disebut sebagai kota bawah dan kota atas. Pada daerah perbukitan mempunyai ketinggian 90,56 - 348 mdpl yang diwakili oleh titik tinggi yang berlokasi di Jatingaleh dan Gombel, Semarang Selatan, Tugu, Mijen, dan Gunungpati, dan di dataran rendah mempunyai ketinggian 0,75 mdpl. Kota Bawah merupakan pantai dan dataran rendah yang memiliki kemiringan antara 0% sampai 5%, sedangkan di bagian Selatan merupakan daerah dataran tinggi dengan kemiringan bervariasi antara 5%-40%.

Kota Semarang sangat dipengaruhi oleh keadaan alamnya yang membentuk suatu kota yang mempunyai ciri khas yaitu terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah dan daerah pantai. Dengan demikian topografi Kota Semarang menunjukkan adanya berbagai kemiringan tanah berkisar antara 0% - 40% (curam) dan ketinggian antara 0,75 - 348,00 mdpl.

d. Geologi

Kondisi geologi Kota Semarang berdasarkan struktur geologinya terdiri atas tiga bagian yaitu struktur *joint* (kekar), patahan (*fault*), dan lipatan. Daerah patahan tanah bersifat erosif dan mempunyai porositas tinggi, struktur lapisan batuan yang diskontinyu (tak teratur), heterogen, sehingga mudah bergerak atau longsor. Daerah patahan tersebut antara lain daerah sekitar aliran Kaligarang yang merupakan patahan Kali Garang membujur dari arah utara sampai selatan, di sepanjang Kaligarang yang berbatasan dengan Bukit Gombel. Daerah patahan lainnya adalah

Meteseh, Perumahan Bukit Kencana Jaya, dengan arah patahan melintas dari arah utara ke selatan.

Wilayah Kota Semarang yang berupa dataran rendah memiliki jenis tanah berupa struktur pelapukan, endapan, dan lanau yang dalam. Jenis tanah di Kota Semarang meliputi kelompok mediteran coklat tua, latosol coklat tua kemerahan, asosiasi alluvial kelabu, Alluvial Hidromorf, Grumosol Kelabu Tua, Latosol Coklat dan Komplek Regosol Kelabu Tua. Kurang lebih sebesar 25% wilayah Kota Semarang memiliki jenis tanah mediteranian coklat tua, sedangkan kurang lebih 30% lainnya memiliki jenis tanah latosol coklat tua. Jenis tanah lain yang ada di wilayah Kota Semarang memiliki geologi jenis tanah asosiasi kelabu dan alluvial coklat kelabu dengan luas keseluruhan kurang lebih 22% dari seluruh luas Kota Semarang. Sisanya merupakan jenis tanah alluvial hidromorf dan grumosol kelabu tua.

e. Hidrologi

Kondisi hidrologi potensi air di Kota Semarang bersumber pada sungai-sungai yang mengalir di Kota Semarang yang terbagi kedalam 4 sistem besar drainase, yaitu:

1. *Sistem Drainase Mangkang,*

terdiri atas 2 (dua) sub sistem meliputi: Sub Sistem Sungai Mangkang (Sungai Mangkang Kulon, Mangkang Wetan dan Plumbon); dan Sub Sistem Sungai Bringin (Sungai Bringin, Sungai Randugarut, Sungai Karanganyar dan Sungai Tapak).

2. *Sistem Drainase Semarang Barat,*

terdiri dari 4 (empat) sub sistem: Sub Sistem Sungai Tugurejo (Sungai Jumbleng, Sungai Buntu, Sungai Tambakharjo dan Sungai Tugurejo); Sub Sistem Sungai Silandak; Sub Sistem Sungai Siangker (meliputi saluran Madukoro, Sungai Tawang, Sungai Karangayu, Sungai Ronggolawe dan Sungai Siangker); dan Sub Sistem Bandar Udara Ahmad Yani (Saluran Lingkaran Selatan Barat yang meliputi Sungai Selinga, Sungai Simangu, Sungai Tawang dan Sungai Banteng).

3. *Sistem Drainase Semarang Tengah,*

terdiri dari 8 (delapan) sub sistem meliputi: Sub Sistem Sungai Banjir Kanal Barat (Sungai Kripik, Sungai Kreo dan Sungai Garang), Sub Sistem Sungai Bulu (Saluran Jl. Hasanudin, Saluran Jl. Brotojoyo, Saluran Panggung Kidul dan Saluran Bulu Lor), Sub Sistem Sungai Semarang, Sub Sistem Sungai Simpang Lima, Sub Sistem Sungai Banger, Sub Sistem Sungai Bandarharjo, Sub Sistem Sungai Asin, Sub Sistem Sungai Baru.

4. *Sistem Drainase Semarang Timur,*

terdiri dari 5 (lima) sub sistem meliputi: Sub Sistem Banjir Kanal Timur (Sungai Candi, Sungai Bajak, Sungai Kedungmundu dan Saluran Bulu Lor), Sub Sistem Sungai Tenggang, Sub Sistem Sungai Sringin, Sub Sistem Sungai Babon (Sungai Gede, Sungai Meteseh, Sungai Jetak dan Sungai Sedor), Sub Sistem Sungai Pedurungan.

f. Klimatologi

Secara klimatologi, Kota Semarang seperti kondisi umum di Indonesia, mempunyai iklim tropik basah yang dipengaruhi oleh angin monsun barat dan monsun timur. Dari bulan November hingga Mei, angin bertiup dari arah Utara Barat Laut (NW) menciptakan musim hujan dengan membawa banyak uap air dan hujan. Sifat periode ini adalah curah hujan sering dan berat, kelembapan relatif tinggi dan mendung. Lebih dari 80% dari curah hujan tahunan turun di periode ini. Dari Juni hingga Oktober angin bertiup dari Selatan Tenggara (SE) menciptakan musim

kemarau, karena membawa sedikit uap air. Sifat periode ini adalah sedikit jumlah curah hujan, kelembapan lebih rendah, dan jarang mendung.

Curah hujan di Kota Semarang mempunyai sebaran yang tidak merata sepanjang tahun, dengan total curah hujan rata-rata 9.891 mm per tahun. Ini menunjukkan curah hujan khas pola di Indonesia, khususnya di Jawa, yang mengikuti pola angin muson SENW yang umum. Suhu minimum rata-rata yang diukur di Stasiun Klimatologi Semarang berubah-ubah dari 21,1°C pada September ke 24,6°C pada bulan Mei, dan suhu maksimum rata-rata berubah-ubah dari 29,9°C ke 32,9°C. Kelembapan relatif bulanan rata-rata berubah-ubah dari minimum 61% pada bulan September ke maksimum 83% pada bulan Januari. Kecepatan angin bulanan rata-rata di Stasiun Klimatologi Semarang berubah-ubah dari 215 km/hari pada bulan Agustus sampai 286 km/hari pada bulan Januari. Lamanya sinar matahari, yang menunjukkan rasio sebenarnya sampai lamanya sinar matahari maksimum hari, bervariasi dari 46% pada bulan Desember sampai 98% pada bulan Agustus.

Perubahan iklim yang disebabkan pemanasan global berdampak pada kehidupan makhluk hidup, terjadinya bencana alam, wabah penyakit, serta fenomena lainnya. Kota Semarang pada tahun 2018 telah menyusun Rencana Aksi Daerah Mitigasi Perubahan Iklim, serta Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim pada tahun 2019.

Berdasarkan hasil perhitungan, emisi GRK Kota Semarang selama 5 tahun terakhir menunjukkan tren positif yaitu selalu mengalami penurunan, dari tahun 2016 sebesar 5.937,63 ton CO₂e menurun menjadi 3.626,26 ton CO₂e pada tahun 2020 dimana besaran emisi tersebut tidak memperhitungkan emisi dari penggunaan listrik, karena di Kota Semarang listrik merupakan aktivitas tidak langsung penghasil emisi.

2.1.1.2. Zonasi Pola Ruang Kota Semarang

Mendasarkan pada Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 sebagaimana perubahan atas Perda Kota Semarang No. 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031, zona wilayah Kota Semarang meliputi kawasan antara lain:

a. Kawasan Peruntukan Lindung

Merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Kawasan tersebut mencakup:

- Kawasan Lindung yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
- Kawasan Perlindungan Setempat
- Ruang Terbuka Hijau
- Kawasan Cagar Budaya
- Kawasan Rawan Bencana Alam, meliputi:
 - o Kawasan Rawan Bencana Rob disebabkan karena kondisi DAS yang tidak tertata, penurunan tanah (*land subsidence*) 6-10 cm dan penampang sungai yang mengecil karena sedimentasi, sampah serta drainase kota dan sanitasi yang belum sepenuhnya dibangun dan dikelola dengan baik.
 - o Kawasan Rawan Bencana Abrasi, adalah kawasan yang ditetapkan dengan kriteria pantai yang berpotensi dan/atau pernah mengalami abrasi.
 - o Kawasan Rawan Bencana Banjir, adalah tempat-tempat yang secara rutin setiap musim hujan mengalami genangan lebih dari enam jam pada saat hujan turun dalam keadaan musim hujan normal.

- Kawasan Bencana Gerakan Tanah dan Longsor, adalah Wilayah yang kondisi permukaan tanahnya mudah longsor karena terdapat zona yang bergerak akibat adanya patahan atau pergeseran batuan induk pembentuk tanah.
- Kawasan Bencana Angin Topan, adalah Wilayah Kota Semarang yang terkena bencana angin topan yang dulunya merupakan garis pantai Kota Semarang.

b. Kawasan Budidaya

Adalah wilayah yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian. Kawasan budidaya ini mencakup:

- Kawasan Hutan Produksi
- Kawasan Perumahan
- Kawasan Perdagangan dan Jasa
- Kawasan Perkantoran
- Kawasan Pendidikan
- Kawasan Peruntukan Industri
- Kawasan Olah Raga
- Kawasan Wisata
- Kawasan Transportasi
- Kawasan Pertahanan Keamanan
- Kawasan Pertanian
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Pertambangan dan Energi
- Kawasan Kesehatan
- Kawasan Peribadatan
- Kawasan Campuran
- Ruang Terbuka Non Hijau , yang merupakan ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori

c. Kawasan Strategis

- Pengembangan kawasan Segitiga Peterongan – Tawang – Siliwangi
- Pengembangan kawasan Pelabuhan Tanjung Emas
- Pengembangan kawasan Waduk Jatibarang
- Pengembangan kawasan Reklamasi Pantai
- Peningkatan kawasan Masjid Agung Semarang
- Peningkatan kawasan Masjid Agung Jawa Tengah
- Peningkatan kawasan pendidikan
- Peningkatan kawasan Gedong Batu
- Pengembangan kawasan Kota Lama

Agar tetap terjaga keterpaduan pembangunan lintas sektor, lintas wilayah dan antar pemerintah, swasta dan masyarakat, serta hasil pembangunan tidak semakin mempertajam kesenjangan antar wilayah dan menyebabkan alih fungsi lahan yang tidak terkendali, maka perlu kiranya keselarasan rencana program pembangunan dengan rencana penataan ruang, sehingga pembangunan dapat berkelanjutan baik dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

2.1.1.3. Demografi

Secara administratif jumlah penduduk Kota Semarang pada tahun 2021 berjumlah 1.688.981 jiwa, terdiri dari 835.4754 jiwa (49,48%) penduduk laki-laki dan penduduk perempuan sejumlah 853.227 jiwa (50,52%). Jika dibandingkan dengan

penduduk tahun 2021 (1.687.222 jiwa), terdapat penambahan sejumlah 1.759 jiwa atau tumbuh sebesar 0,10%.

Dari sebaran penduduk per kecamatan dan luas wilayah Kota Semarang sebesar 373,70 km², kepadatan penduduk tertinggi berada di wilayah Candisari dengan kepadatan penduduk sebesar 11.946 jiwa/km², sedangkan wilayah kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Tugu dengan kepadatan penduduk sebesar 1.074 jiwa/km². Secara rinci, jumlah penduduk dengan data pilah laki-laki dan perempuan terkait dengan sex rasio per wilayah serta kepadatan penduduk terlihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2022

NO	KECAMATAN	PENDUDUK			%	SEX RATIO (%)	KEPADATAN PENDUDUK (Jiwa/km ²)
		LAKI-LAKI (orang)	PEREMPUAN (orang)	JUMLAH (orang)			
1	Semarang Tengah	27.840	30.120	57.960	3,43	92,43	9.440
2	Semarang Barat	75.964	78.387	154.351	9,14	96,91	7.100
3	Semarang Utara	58.941	60.380	119.321	7,06	97,62	10.877
4	Semarang Timur	34.087	35.972	70.059	4,15	94,76	9.099
5	Gayamsari	35.889	36.647	72.536	4,29	97,93	11.743
6	Gajah Mungkur	28.648	29.581	58.229	3,45	96,85	6.420
7	Genuk	62.516	62.118	124.634	7,38	100,64	4.550
8	Pedurungan	97.668	99.457	197.125	11,67	98,20	9.514
9	Candisari	38.481	39.8647	78.128	4,63	97,06	11.946
10	Banyumanik	71.043	72.910	143.953	8,52	97,44	5.603
11	Gunungpati	49.606	49.751	99.357	5,88	99,71	1.836
12	Tembalang	94.455	95.234	189.689	11,23	99,18	4.292
13	Tugu	17.110	17.026	34.136	2,02	100,49	1.074
14	Ngaliyan	71.086	71.759	142.845	8,46	99,06	3.760
15	Mijen	39.946	40.079	80.025	4,74	99,67	1.391
16	Semarang Selatan	32.474	34.159	66.633	3,95	95,07	11.240
	TAHUN 2022	835.754	853.227	1.688.981	-	97,69	4.520
	TAHUN 2021	835.404	851.818	1.687.222	-	98,07	4.515
	TAHUN 2020	835.138	850.771	1.685.909	-	98,16	4.511
	TAHUN 2019	828.848	845.510	1.674.358	-	98,03	4.480
	TAHUN 2018	825.992	841.139	1.667.131	-	98,20	4.461
	TAHUN 2017	823.173	835.379	1.658.552	-	98,54	4.438

Sumber: Dispendukcapil (data diolah), 2023

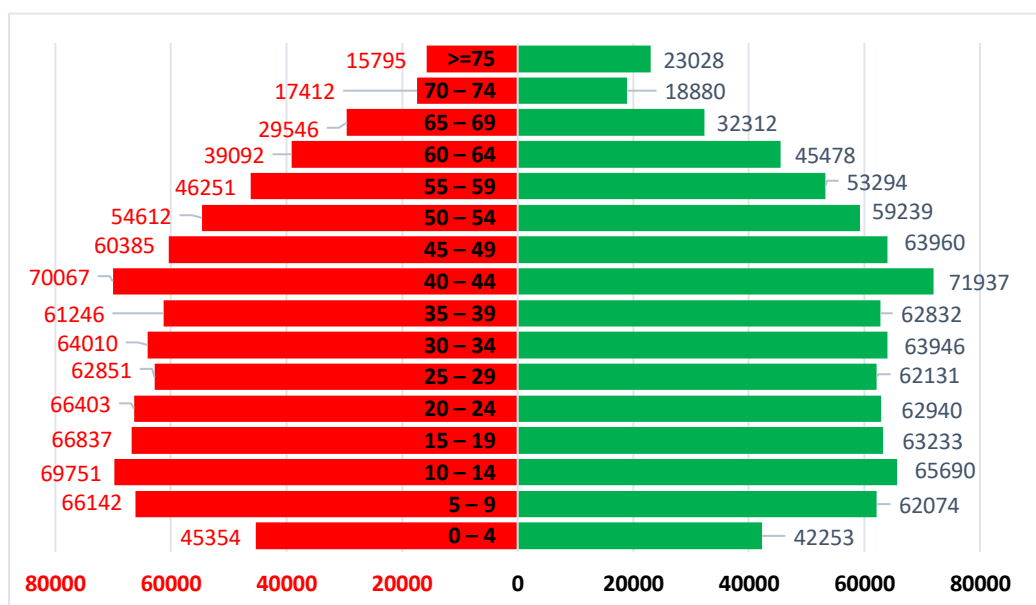
Jika dilihat dari sebaran penduduk berdasarkan kelompok umurnya, jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) di tahun 2021 sejumlah 1.200.744 jiwa (71,09%), dan jumlah penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas) sejumlah 488.237 jiwa (28,91%). Dengan membandingkan antara jumlah penduduk tidak produktif dengan penduduk yang produktif dikalikan dengan 100, maka akan dapat diketahui Rasio Beban Ketergantungan (dependency ratio). Rasio beban ketergantungan Kota Semarang pada tahun 2022 adalah sebesar 40,66%.

Artinya setiap 10.000 penduduk produktif menanggung sebanyak 4.066 penduduk yang tidak produktif. Secara rinci, jumlah penduduk Kota Semarang pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2022

KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH (JIWA)	(%)
0 – 4	45.354	42.253	87.607	5,19
5 – 9	66.142	62.074	128.216	7,59
10 – 14	69.751	65.690	135.441	8,02
15 – 19	66.837	63.233	130.070	7,70
20 – 24	66.403	62.940	129.343	7,66
25 – 29	62.851	62.131	124.982	7,40
30 – 34	64.010	63.946	127.956	7,58
35 – 39	61.246	62.832	124.078	7,35
40 – 44	70.067	71.937	142.004	8,41
45 – 49	60.385	63.960	124.345	7,36
50 – 54	54.612	59.239	113.851	6,74
55 – 59	46.251	53.294	99.545	5,89
60 – 64	39.092	45.478	84.570	5,01
65 – 69	29.546	32.312	61.858	3,66
70 – 74	17.412	18.880	36.292	2,15
>=75	15.795	23.028	38.823	2,30
Jumlah	835.754	853.227	1.688.981	100

Sumber: Dispendukcapil, 2023



Gambar 2.2
Penduduk Kota Semarang Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2022

Berdasarkan tingkat pendidikannya, komposisi penduduk Kota Semarang dengan persentase terbesar adalah penduduk yang tidak/belum sekolah sebesar 27,31%, disusul dengan penduduk SLTA/MA sederajat sebesar 26,96 %. Sedangkan penduduk yang menamatkan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi jumlahnya

hanya sekitar 14,04 %, yang terdiri dari Diploma I/II sebesar 0,33%, Akademi/Diploma III/Sarjana sebesar 3,17%, Diploma IV/Strata I sebesar 9,50%, Strata II sebesar 0,95% dan S3 sebesar 0,09%. Berikut ini tabel penduduk Kota Semarang dirinci berdasar tingkat pendidikan formal.

Tabel 2.4.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tahun 2022

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (JIWA)	PERSENTASE (%)
1	Tidak / belum sekolah	461.370	27,32%
2	Belum tamat SD / sederajat	234.417	13,88%
3	Tamat SD/MI sederajat	98.857	5,85%
4	SLTP/MTs / sederajat	202.314	11,98%
5	SLTA/MA/ sederajat	455.405	26,96%
6	Diploma I / II	5.503	0,33%
7	Akademi/Diplom III/Sarjana Muda	53.525	3,17%
8	Diploma IV/Strata I	160.418	9,50%
9	Strata II	16.113	0,95%
10	Strata III	1.059	0,06%
J U M L A H		1.688.981	100,00%

Sumber: SIPD, Dispendukcapil (data diolah) 2023

Berdasarkan mata pencahariannya, penduduk Kota Semarang sebagian besar bekerja sebagai karyawan swasta (30,10%), mengurus rumah tangga (12,29%), wiraswasta (4,80%) dan PNS/TNI/POLRI (2,69%). Sementara itu, penduduk yang belum atau tidak bekerja sebesar 29,02% dan pelajar/mahasiswa sebesar 13,67%. Mata pencaharian yang sifatnya profesi walaupun secara persentase kecil namun ragamnya cukup banyak. Jumlah penduduk menurut mata pencahariannya secara lengkap dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2022

JENIS MATA PENCAHARIAN	(JIWA)	(%)	JENIS MATA PENCAHARIAN	(JIWA)	(%)
Karyawan Swasta	508.407	30,10%	Mekanik	283	0,02%
Mengurus RumahTangga	207.657	12,29%	Apoteker	373	0,02%
Wiraswasta	81.102	4,80%	Industri	190	0,01%
PNS/TNI/POLRI	45.503	2,69%	Wartawan	184	0,01%
Buruh Tani/Perkebunan	29.800	1,76%	Pengacara	195	0,01%
Buruh Harian Lepas	15.055	0,89%	Konstruksi	134	0,01%
Pensiunan	15.651	0,93%	Konsultan	145	0,01%
Guru	14.274	0,85%	Transportasi	135	0,01%
Pedagang	9.750	0,58%	Arsitek	111	0,01%
Petani/Pekebun/ Peternak	8.073	0,48%	Notaris	137	0,01%
Karyawan BUMN	6.583	0,39%	Seniman	132	0,01%
Dosen	4.153	0,25%	Buruh Nelayan/Perikanan	63	0,00%
Dokter	3.150	0,19%	Akuntan	44	0,00%

JENIS MATA PENCAHARIAN	(JIWA)	(%)	JENIS MATA PENCAHARIAN	(JIWA)	(%)
Perawat	2.950	0,17%	Psikiater/Psikolog	40	0,00%
Nelayan/Perikanan	1.515	0,09%	Pilot	20	0,00%
Perdagangan	1.116	0,07%	Buruh Peternakan	17	0,00%
Karyawan Honorer	1.497	0,09%	Peneliti	17	0,00%
Karyawan BUMD	851	0,05%	Lainnya	7.572	0,45%
Bidan	664	0,04%	Belum/Tidak Bekerja	490.111	29,02%
Pelaut	505	0,03%	Pelajar/Mahasiswa	230.822	13,67%

Sumber: Dispendukcapil, diolah 2023

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pembangunan daerah yang merupakan upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi (1) aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (2) aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan sosial dan; (3) aspek kesejahteraan dengan fokus Seni Budaya dan Olahraga. Kinerja masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Keberhasilan pembangunan antara lain dapat dilihat pada beberapa indikator utama ekonomi, antara lain pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, indeks gini serta rasio penduduk miskin. Kinerja indikator-indikator tersebut sampai dengan tahun 2022 sesuai ketersediaan data adalah sebagai berikut:

a. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu tolok ukur untuk melihat kondisi perekonomian suatu wilayah pada periode tertentu. Penghitungan PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan atas dasar harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan) untuk dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, dan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi suatu daerah. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, dan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Besarnya PDRB ADHB dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2018–2022) mengalami peningkatan dari Rp. 175.223,20 Milyar pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp. 227.619,17 Milyar pada tahun 2022. Peningkatan PDRB ADHK juga sejalan dengan peningkatan PDRB ADHB yang menunjukkan peningkatan dari Rp. 123.279,89 Milyar pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp. 152.999,37 Milyar pada tahun 2022. Kontribusi tiga sektor terbesar pada PDRB ADHB disumbangkan berturut-turut oleh Kategori Industri Pengolahan (rata-rata prosentase lima tahun terakhir sebesar 28,18%), Konstruksi (rata-rata prosentase lima tahun terakhir 26,62%) dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (rata-rata prosentase lima tahun terakhir sebesar 13,51%). Selain itu, kontribusi terbesar pada PDRB ADHK disumbangkan berturut-turut oleh Kategori Industri Pengolahan

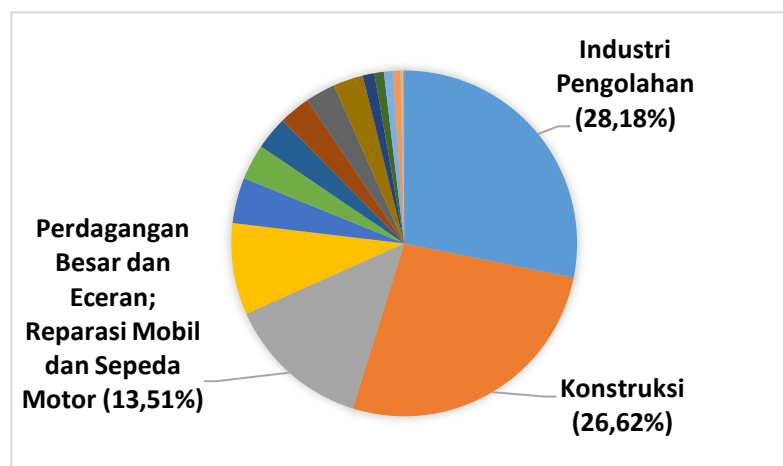
(rata-rata prosentase lima tahun terakhir sebesar 25,92%), Konstruksi (rata-rata prosentase lima tahun terakhir 25,07%) dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (rata-rata prosentase lima tahun terakhir sebesar 14,52%). Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK serta kontribusi per kategorinya berturut-turut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6.
Nilai PDRB dan Kontribusi Sektor Atas Dasar Harga Berlaku Kota Semarang Tahun 2018 – 2022

No	Kategori/ Sub Kategori	Nilai/ Kontribusi	PDRB ADH BERLAKU TAHUN 2018 – 2022 (dalam Milyar Rupiah)				
			2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	1.492,50	1.554,99	1.610,97	1.721,15	1.830,42
		Kontribusi kategori (%)	0,85	0,81	0,85	0,84	0,80
B	Pertambangan dan Penggalian	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	292,19	342,42	359,64	373,92	383,37
		Kontribusi kategori (%)	0,17	0,18	0,19	0,18	0,17
C	Industri Pengolahan	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	47.723,23	52.552,40	54.010,54	58.895,09	65.673,62
		Kontribusi kategori (%)	27,24	27,46	28,62	28,75	28,85
D	Pengadaan Listrik dan Gas	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	199,43	211,56	210,72	213,14	211,76
		Kontribusi kategori (%)	0,11	0,11	0,11	0,10	0,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	129,67	137,53	147,83	163,72	165,66
		Kontribusi kategori (%)	0,07	0,07	0,08	0,08	0,07
F	Konstruksi	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	47.073,91	51.435,48	49.078,35	55.385,71	59.872,60
		Kontribusi kategori (%)	26,87	26,88	26,00	27,03	26,30
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	24.075,89	26.068,40	25.511,98	27.650,59	30.005,77
		Kontribusi kategori (%)	13,74	13,62	13,52	13,50	13,18
H	Transportasi dan Pergudangan	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	6.726,75	7.546,36	4.435,88	4.776,12	9.485,36
		Kontribusi kategori (%)	3,84	3,94	2,35	2,33	4,17
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	6.032,08	6.386,73	5.233,22	5.665,45	7.174,69
		Kontribusi kategori (%)	3,44	3,34	2,77	2,77	3,15
J	Informasi dan Komunikasi	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	13.291,17	15.015,40	18.085,59	18.886,96	19.604,74
		Kontribusi kategori (%)	7,59	7,85	9,58	9,22	8,61
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	7.657,05	8.038,38	8.155,86	8.718,46	9.524,47
		Kontribusi kategori (%)	4,37	4,20	4,32	4,26	4,18
L	Real Estate	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	5.020,02	5.375,79	5.407,70	5.685,16	6.090,51
		Kontribusi kategori (%)	2,86	2,81	2,87	2,77	2,68
M, N	Jasa Perusahaan	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	1.246,82	1.407,45	1.324,33	1.379,62	1.538,79
		Kontribusi kategori (%)	0,71	0,74	0,70	0,67	0,68

No	Kategori/ Sub Kategori	Nilai/ Kontribusi	PDRB ADH BERLAKU TAHUN 2018 – 2022 (dalam Milyar Rupiah)				
			2018	2019	2020	2021	2022
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	5.525,53	5.824,86	5.774,58	5.821,37	6.054,64
		Kontribusi kategori (%)	3,15	3,04	3,06	2,84	2,66
P	Jasa Pendidikan	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	5.091,57	5.565,05	5.567,51	5.659,48	5.777,47
		Kontribusi kategori (%)	2,91	2,91	2,95	2,76	2,54
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	1.543,78	1.579,93	1.823,71	1.850,88	1.922,62
		Kontribusi kategori (%)	0,88	0,83	0,97	0,90	0,84
R,S, T,U	Jasa Lainnya	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	2.101,63	2.309,32	1.993,28	2.024,17	2.302,68
		Kontribusi kategori (%)	1,20	1,21	1,06	0,99	1,01
TOTAL PDRB ADHB		Jumlah (dalam Milyar Rupiah)	175.223,20	191.352,04	188.731,69	204.871,00	227.619,17
TOTAL KONTRIBUSI KATEGORI THD PDRB		(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kota Semarang, 2023



Gambar 2.3

Grafik Tiga Sektor Terbesar Rata-rata kontribusi PDRB ADHB di Kota Semarang Tahun 2018-2022

Sedangkan untuk Nilai PDRB atas dasar harga konstan (tahun 2010), perkembangan dari tahun 2018-2022 serta kontribusi per kategorinya terlihat sebagai berikut:

Tabel 2.7.

Nilai dan Kontribusi Kategori PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Semarang Tahun 2018-2022

No	Kategori/ Sub Kategori	Nilai / Kontribusi	PDRB ADH KONSTAN TAHUN 2018 – 2022 (dalam Milyar Rupiah)				
			2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	1.068,07	1.089,57	1.106,08	1.141,64	1.169,22
		Kontribusi kategori (%)	0,81	0,78	0,80	0,79	0,76

No	Kategori/ Sub Kategori	Nilai / Kontribusi	PDRB ADH KONSTAN TAHUN 2018 – 2022 (dalam Milyar Rupiah)				
			2018	2019	2020	2021	2022
B	Pertambangan dan Penggalian	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	146,38	169,46	173,67	179,61	170,72
		Kontribusi kategori (%)	0,11	0,12	0,13	0,12	0,11
C	Industri Pengolahan	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	33.198,26	35.950,39	36.020,69	37.990,51	40.131,85
		Kontribusi kategori (%)	25,29	25,64	26,18	26,25	26,23
D	Pengadaan Listrik dan Gas	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	161,54	171,17	171,50	173,22	171,12
		Kontribusi kategori (%)	0,12	0,12	0,12	0,12	0,11
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	114,49	120,68	123,68	131,24	132,79
		Kontribusi kategori (%)	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
F	Konstruksi	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	34.109,91	35.908,41	34.031,87	36.235,04	36.666,19
		Kontribusi kategori (%)	25,99	25,61	24,73	25,04	23,96
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	19.393,07	20.520,79	19.756,74	21.039,60	21.865,39
		Kontribusi kategori (%)	14,77	14,64	14,36	14,54	14,29
H	Transportasi dan Pergudangan	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	4.847,43	5.320,84	3.184,25	3.424,05	6.129,29
		Kontribusi kategori (%)	3,69	3,80	2,31	2,37	4,01
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	4.320,77	4.547,72	3.770,08	4.039,33	4.859,46
		Kontribusi kategori (%)	3,29	3,24	2,74	2,79	3,18
J	Informasi dan Komunikasi	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	13.921,17	15.505,40	18.654,55	19.479,19	20.217,45
		Kontribusi kategori (%)	10,61	11,06	13,56	13,46	13,21
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	5.204,95	5.364,00	5.457,98	5.560,38	5.581,21
		Kontribusi kategori (%)	3,97	3,83	3,97	3,84	3,65
L	Real Estate	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	4.102,16	4.338,39	4.334,92	4.497,48	4.728,54
		Kontribusi kategori (%)	3,13	3,09	3,15	3,11	3,09
M, N	Jasa Perusahaan	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	859,08	948,80	873,42	900,15	957,00
		Kontribusi kategori (%)	0,65	0,68	0,63	0,62	0,63
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	3.933,82	4.087,63	3.996,12	3.937,30	4.010,14
		Kontribusi kategori (%)	3,00	2,92	2,90	2,72	2,62
P	Jasa Pendidikan	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	3.257,66	3.368,21	3.283,67	3.287,61	3.351,58

No	Kategori/ Sub Kategori	Nilai / Kontribusi	PDRB ADH KONSTAN TAHUN 2018 – 2022 (dalam Milyar Rupiah)				
			2018	2019	2020	2021	2022
		Kontribusi kategori (%)	2,48	2,40	2,39	2,27	2,19
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	1.052,24	1.068,68	1.197,89	1.212,98	1.246,53
		Kontribusi kategori (%)	0,80	0,76	0,87	0,84	0,81
R, S, T, U	Jasa Lainnya	Nilai (dalam Milyar Rupiah)	1.575,38	1.719,37	1.464,88	1.475,25	1.610,90
		Kontribusi kategori (%)	1,20	1,23	1,06	1,02	1,05
TOTAL PDRB ADHK		Jumlah (dalam Milyar Rupiah)	131.266,36	140.199,52	137.601,98	144.704,57	152.999,37
TOTAL KONTRIBUSI KATEGORI THD PDRB		(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kota Semarang, 2023

Tabel 2.8.
PDRB ADHK Kota Semarang Menurut Pengeluaran
Tahun 2018 – 2022

Jenis Pengeluaran	PDRB Kota Semarang Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (Milyar Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	53.878,12	57.078,16	54.271,35	55.708,27	58.495,08
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	796,11	896,56	871,92	914,21	959,52
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	13.637,32	14.298,74	13.597,03	13.763,06	13.800,90
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	86.262,47	90.264,29	82.578,49	87.457,76	87.970,16
5. Perubahan Inventori	498,96	568,79	1.100,88	812,98	972,55
6. Ekspor Barang dan Jasa	66.944,11	76.187,93	-14.817,69	-13.951,72	-9.198,84
Produk Domestik Regional Bruto	90.699,46	98.968,23	137.601,98	144.704,57	152.999,37

Sumber: BPS Kota Semarang, 2023

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) secara umum sama dengan konsep investasi sebagai salah satu pembentuk PDRB, terdiri dari investasi pemerintah dan investasi swasta. Secara terperinci, PMTB terdiri dari PMA, PMDN, perorangan (Koperasi, swasta dan lainnya), belanja modal pemerintah, dan juga perubahan stok. Pada tahun 2021 PMTB memiliki porsi kontribusi kedua terbesar terhadap PDRB Kota Semarang yakni sebesar 65,76% turun menjadi 61,58% pada tahun 2022.

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu kota secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan dalam regional.

Tabel 2.9.

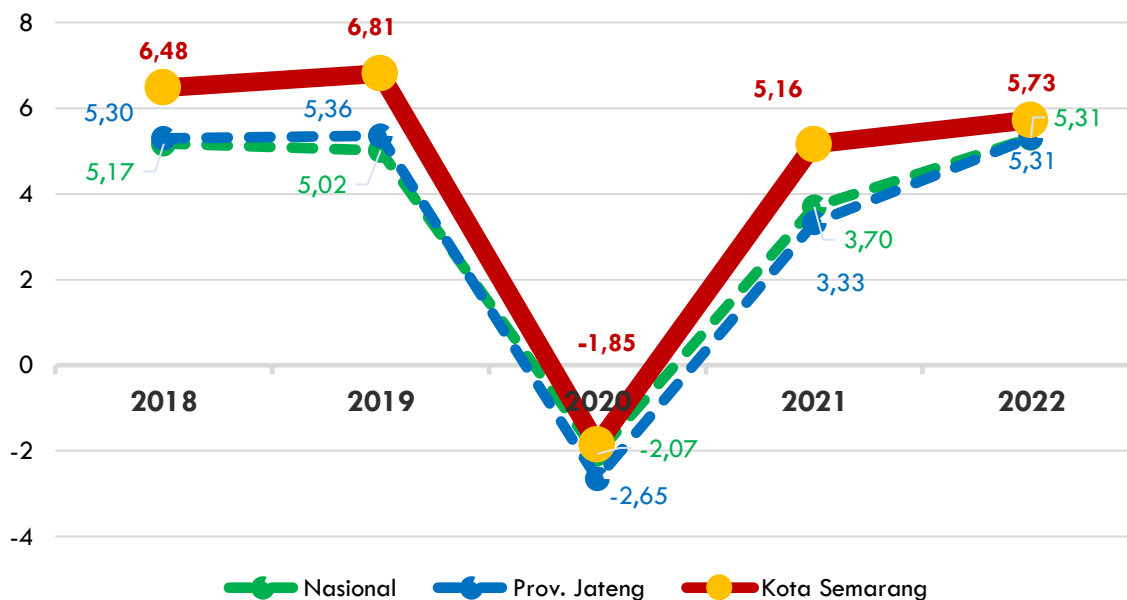
Laju Pertumbuhan Tiap Sektor Pembentuk PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Kategori/Sub Kategori Tahun 2018-2022

Kategori/Sub Kategori		Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,99	2,01	1,51	3,22	2,42
B	Pertambangan dan Penggalian	-8,36	15,77	2,49	3,42	-4,95
C	Industri Pengolahan	4,59	8,29	0,20	5,47	5,64
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,41	5,96	0,19	1,00	-1,21
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,60	5,40	2,48	6,12	1,17
F	Konstruksi	6,20	5,27	-5,23	6,47	1,19
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,18	5,82	-3,72	6,49	3,92
H	Transportasi dan Pergudangan	7,95	9,77	-40,16	7,53	79,01
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	7,32	5,25	-17,10	7,14	20,30
J	Informasi dan Komunikasi	12,26	11,38	20,31	4,42	3,79
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,24	3,06	1,75	1,88	0,37
L	Real Estate	6,10	5,76	-0,08	3,75	5,14
M, N	Jasa Perusahaan	10,71	10,44	-7,94	3,06	6,32
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,69	3,91	-2,24	-1,47	1,85
P	Jasa Pendidikan	10,77	3,39	-2,51	0,12	1,95
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	14,07	1,56	12,09	1,26	2,77
R, S,T,U	Jasa lainnya	9,56	9,14	-14,80	0,71	9,20
LAJU PERTUMBUHAN PDRB ADHK		6,48	6,81	-1,85	5,16	5,73

Sumber: BPS Kota Semarang, 2023 (Data diolah)

Tiga sektor terbesar rata-rata prosentase pertumbuhan dalam lima tahun terakhir terjadi pada lapangan usaha pada sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 11,87%, Informasi dan Komunikasi sebesar 10,43%, serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,41%. Sedangkan tiga laju pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2022 menurut lapangan usaha dicapai pada sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 79,01%, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 20,30%, serta Jasa lainnya sebesar 9,20%.

Kondisi ekonomi makro selama lima tahun terakhir (tahun 2018–2022) menunjukkan terjadinya penurunan di tahun 2020 hingga mencapai minus 1,85 yang disebabkan oleh adanya Pandemi Covid-19. Kondisi ekonomi makro kembali mengalami peningkatan pasca Pandemi Covid-19 yang ditunjukkan dengan capaian sebesar 5,16 pada tahun 2021 dan semakin meningkat pada tahun 2022 menjadi sebesar 5,73. Tidak hanya Kota Semarang, pandemi ini juga berdampak pada menurunnya ekonomi di kabupaten/kota lain bahkan sampai ke tingkat nasional. Berikut dapat dilihat perbandingan LPE Kota Semarang dengan Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional tahun 2018-2022:



Sumber: BPS, BPS Prov Jateng, BPS Kota Semarang, 2023 (Data diolah)

Gambar 2.4

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Semarang, Provinsi Jateng, dan Nasional Tahun 2018 – 2022

Selain Kota Semarang, peningkatan pertumbuhan ekonomi juga dialami oleh daerah sekitar. Berikut disajikan pertumbuhan ekonomi Kota Semarang jika disandingkan dengan kota besar setara.

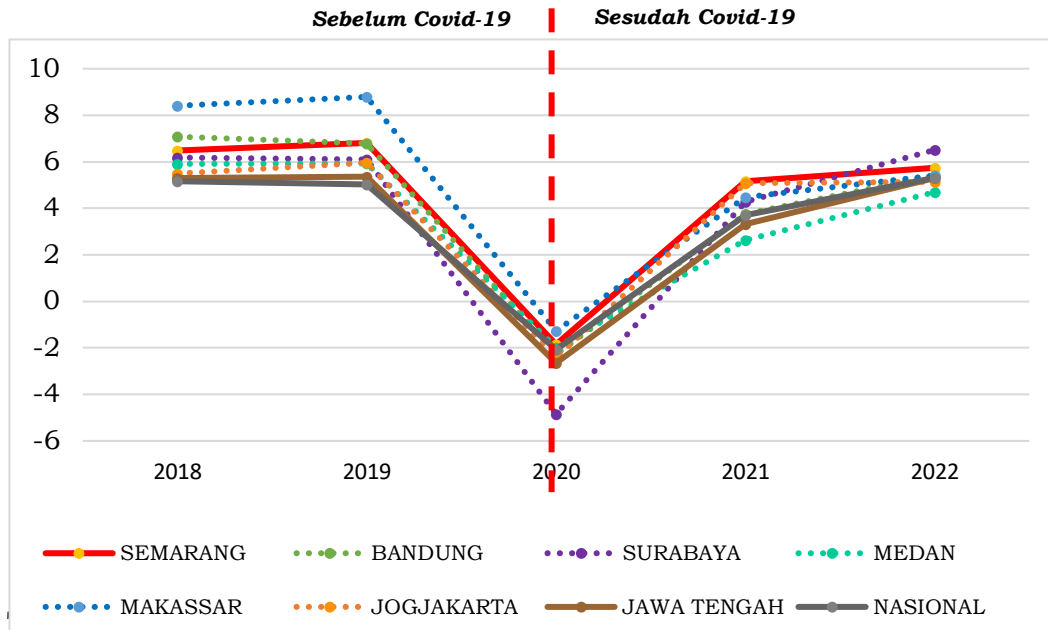
Tabel 2.10.

Laju Pertumbuhan (LPE) Kota Semarang, Provinsi Jateng, Nasional, dan Kota besar setara Tahun 2018-2022

KABUPATEN/ KOTA	2018	2019	2020	2021	2022
Semarang	6,48	6,81	-1,85	5,16	5,73
Bandung	7,08	6,79	-2,28	3,76	5,41
Surabaya	6,19	6,09	-4,85	4,29	6,51
Medan	5,92	5,93	-1,98	2,62	4,71
Makassar	8,42	8,79	-1,27	4,47	5,4
Yogyakarta	5,49	5,96	-2,42	5,09	5,15
Jawa Tengah	5,3	5,36	-2,65	3,33	5,31
Nasional	5,17	5,02	-2,07	3,70	5,31

Sumber: BPS, BPS Prov Jateng, BPS Kota Semarang, 2023 (Data diolah)

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dialami oleh Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Nasional, dan kota besar setara pada tahun 2022. LPE Kota Semarang sebesar 5,73 berada di bawah Kota Surabaya dengan capaian sebesar 6,51 di tahun 2022. Pada tahun 2020, LPE beberapa kota di Indonesia juga mengalami penurunan hingga mencapai angka minus. Namun, kondisi membaik setelah pandemi Covid-19 sehingga LPE kota di Indonesia mulai mengalami peningkatan. Berikut disajikan grafik pergerakan LPE Kota Semarang, kota besar setara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional pada kurun waktu 2018-2022:

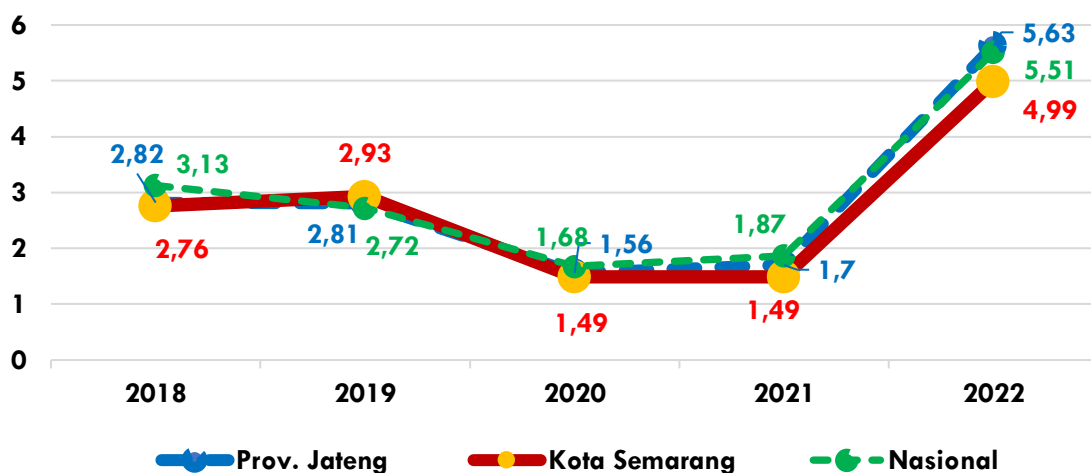


Gambar 2.5

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Semarang, kota besar setara, Provinsi Jateng, dan Nasional Tahun 2018 – 2022

b. Laju Inflasi

Dalam konteks ilmu ekonomi makro, inflasi adalah proses meningkatnya harga dari sekelompok barang dan jasa secara terus menerus yang berkaitan dengan mekanisme pasar. Inflasi diukur sebagai persentase perubahan Indeks Harga Konsumen (indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu), deflektor Produk Domestik Bruto (menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, atau indeks-indeks lain dalam tingkat harga keseluruhan). Inflasi dapat disebabkan antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau spekulasi, serta akibat adanya ketidaklancaran suplai dan distribusi barang. Jika besarnya tidak terkendali, inflasi akan mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat. Berikut disajikan perbandingan laju inflasi Kota Semarang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2018-2022.



Sumber: BPS Prov. Jateng, BPS 2023

Gambar 2.6

Perbandingan Laju Inflasi Kota Semarang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022

Inflasi Kota Semarang pada tahun 2018-2022 sangat fluktuatif, khususnya pada akhir tahun 2019 sebagai inflasi tertinggi sebesar 2,93% sempat menurun pada tahun 2020 menjadi 1,49% dan tidak terjadi perubahan pada tahun 2021. Sementara pada tahun 2022 dampak perang Ukraina dan Rusia menyebabkan tingginya harga BBM, dan ini memicu Inflasi Kota Semarang hingga menyentuh 4,99%. Selama lima tahun, kondisi inflasi di Kota Semarang meski kondisi pandemi pada 3 tahun belakangan ini lebih disebabkan oleh faktor administered price seperti fluktuasi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kenaikan tarif dasar listrik dan bukan karena faktor bahan makanan. Jika dilihat kondisi per tahun, inflasi cenderung meningkat akibat faktor ekspektasi menjelang perayaan hari-hari besar keagamaan (Lebaran, Natal dan Tahun Baru).

c. PDRB Perkapita

PDRB per kapita secara relatif menggambarkan rata-rata pendapatan penduduk suatu daerah. PDRB Perkapita diperoleh dari hasil pembagian pendapatan suatu daerah dengan proyeksi jumlah penduduk pada pertengahan tahun di daerah tersebut. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah daerah, semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur daerah tersebut. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Tabel 2.11.

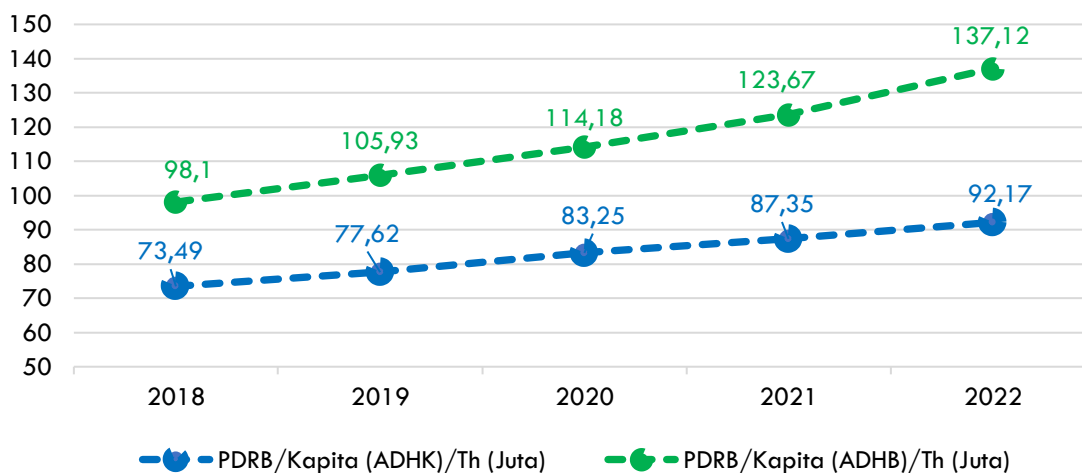
Pendapatan per kapita (ADHB) Kota Semarang Tahun 2018-2022

Uraian	Rupiah				
	2018	2019	2020	2021	2022
PDRB ADHB (Milyar)	175.223,20	191.352,04	188.731,69	204.871,00	227.619,17
PDRB ADHK (Milyar)	131.266,36	140.199,52	137.601,98	144.704,57	152.999,37
PDRB/Kapita (ADHB)/Th (Juta)	98,10	105,93	114,18	123,67	137,12
PDRB/Kapita (ADHK)/Th (Juta)	73,49	77,62	83,25	87,35	92,17

Sumber: Data diolah dari BPS Prov Jateng, *Disduk Capil*, 2023

Dari data di atas, diperoleh pendapatan perkapita atas dasar berlaku (memperhitungkan tingkat kenaikan harga atau inflasi) penduduk Kota Semarang Tahun 2022 sebesar Rp 137,12,- juta rupiah per jiwa/tahun. Trend PDRB perkapita yang terus mengalami peningkatan dari tahun 2018-2022 mengindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat semakin membaik dari tahun ke tahun dengan asumsi sebaran kemakmurannya merata. Mendasarkan pada pertumbuhan PDRB baik ADHK maupun ADHB yang menunjukkan trend positif semenjak pandemi, maka PDRB per kapita ditargetkan meningkat mengikuti Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi. Adapun target PDRB ADHK per kapita pada tahun 2023 dan 2024 berturut-turut sebesar 91 juta dan 92,51 juta rupiah dalam setahun.

Berikut disajikan grafik PDRB Kota Semarang dalam kurun waktu 2018-2022:



Sumber: BPS Kota Semarang, 2023 (Data diolah)

Gambar 2.7

Grafik PDRB Perkapita Kota Semarang Tahun 2018-2022

Berdasarkan grafik di atas, PDRB ADHK per kapita per tahun dan PDRB ADHB per kapita per tahun dari tahun 2018 terus mengalami peningkatan hingga tahun 2022. Nilai tertinggi dalam kurun 5 tahun terakhir yaitu pada tahun 2022, dengan PDRB ADHK per kapita per tahun sebesar 92,17 juta rupiah dan PDRB ADHB per kapita per tahun sebesar 137,12 juta rupiah.

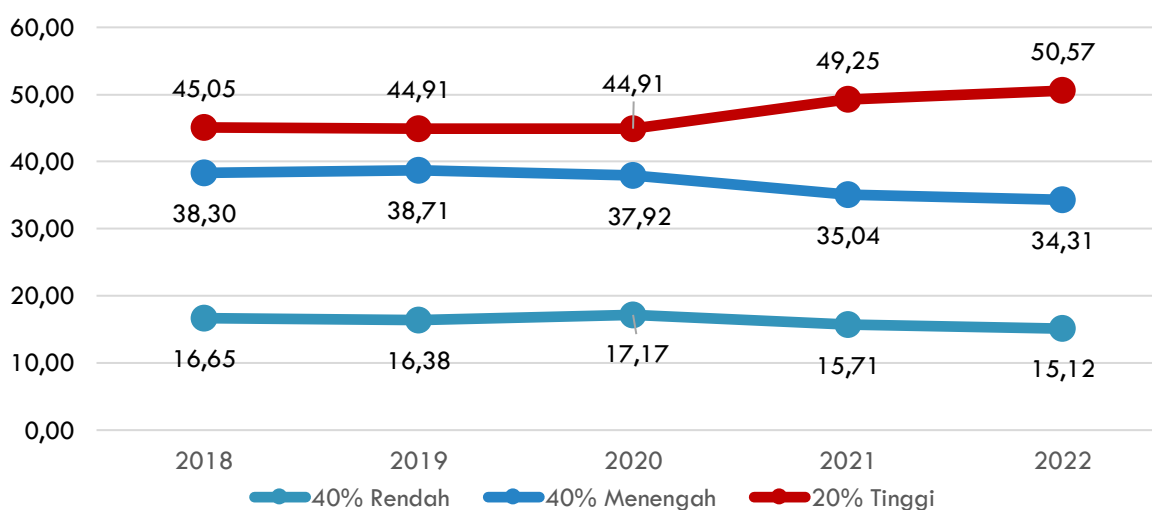
d. Indeks Gini

Untuk memberikan gambaran tentang tingkat pemerataan maupun ketimpangan pendapatan Kota Semarang digunakan pendekatan teori Gini Ratio yaitu menetapkan sebuah kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah pola pengeluaran suatu masyarakat ada pada ketimpangan taraf rendah, sedang atau tinggi. Indeks gini adalah ukuran ketimpangan ekonomi dalam pendapatan distribusi yang ditentukan dengan koefisien gini rasio antara 0 – 1 ($0 < \text{Koefisien Gini} < 1$).

Secara umum, koefisien gini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- $0,00 < G < 0,30$ → pemerataan tinggi / ketimpangan rendah
- $0,30 < G < 0,50$ → pemerataan / ketimpangan sedang
- $G > 0,50$ → pemerataan rendah / ketimpangan tinggi

Berikut disajikan grafik ketimpangan penduduk Kota Semarang pada kurun waktu 2018-2022:



Sumber: BPS, BPS Kota Semarang, 2022 (Data diolah)

Gambar 2.8

Ketimpangan Pendapatan Penduduk Kota Semarang Tahun 2018 – 2022

Kelompok 40 persen penduduk berpendapatan terendah menikmati bagian pendapatan sebesar 15,12% pada tahun 2022, lebih rendah daripada tahun 2021 sebesar 15,71%. Selain itu, untuk 40,00% penduduk lapisan menengah/sedang terjadi penurunan bagian pendapatan yaitu dari 35,04% pada tahun 2021 menjadi 34,31% pada tahun 2022. Sedangkan, 20,00% penduduk lapisan atas, terjadi peningkatan bagian pendapatan yaitu 49,25% pada tahun 2021 menjadi 50,57% pada tahun 2022.

Secara total, kelompok pendapatan menengah dan tinggi menguasai 84,88% distribusi pendapatan masyarakat di Kota Semarang. Sehingga dapat dikatakan dampak kemajuan pembangunan lebih dirasakan untuk penerima pendapatan kelompok sedang dan tinggi. Idealnya untuk kelompok penerima pendapatan sedang dan tinggi mampu mentransfer ke kelompok penerima pendapatan rendah sehingga akan lebih merata.

Indeks Gini Kota Semarang di tiga tahun terakhir mengalami kenaikan dari tahun 2020 sebesar 0,38 tahun 2021 sebesar 0,43 dan tahun 2022 sebesar 0,44. Berikut disajikan tabel perbandingan indeks gini Kota Semarang dengan kota besar setara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional dalam kurun waktu Tahun 2018-2022:

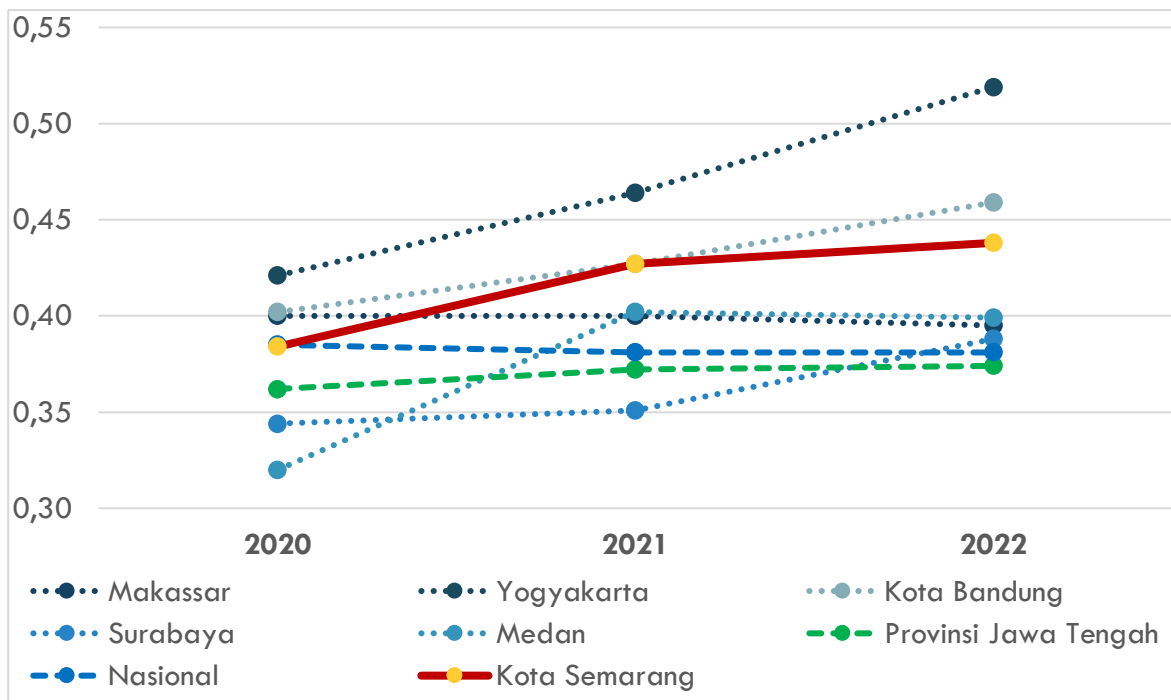
Tabel 2.12.

Indeks Gini Kota Semarang dengan Kota Besar setara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022

KOTA	2018	2019	2020	2021	2022
Semarang	0,33	0,33	0,38	0,43	0,44
Makassar	0,38	0,39	0,40	0,40	0,40
Yogyakarta	0,42	0,37	0,42	0,46	0,52
Bandung	0,42	0,44	0,40	0,43	0,46
Surabaya	0,36	0,41	0,34	0,35	0,39
Medan	0,31	0,35	0,32	0,40	0,40
Jawa Tengah	0,38	0,36	0,36	0,37	0,37
Nasional	0,38	0,38	0,39	0,38	0,38

Sumber: BPS Prov. Jateng, BPS Kota Semarang, 2023

Perubahan indeks gini Kota Semarang mengalami penurunan. Pada tahun 2021 indeks gini Kota Semarang meningkat sebesar 0,05 dari tahun 2020 dan kembali meningkat sebesar 0,01 pada tahun 2022. Peningkatan indeks gini Kota Semarang pada tahun 2021 sebesar 0,05 lebih besar dari rata-rata capaian kota pembanding (Makassar, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan) yang mengalami peningkatan sebesar 0,03 pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2022, Peningkatan indeks gini Kota Semarang sebesar 0,01 lebih kecil dari rata-rata capaian kota pembanding yang mengalami peningkatan sebesar 0,03.



Sumber: BPS Prov. Jateng, BPS Nasional, 2023 (Data diolah)

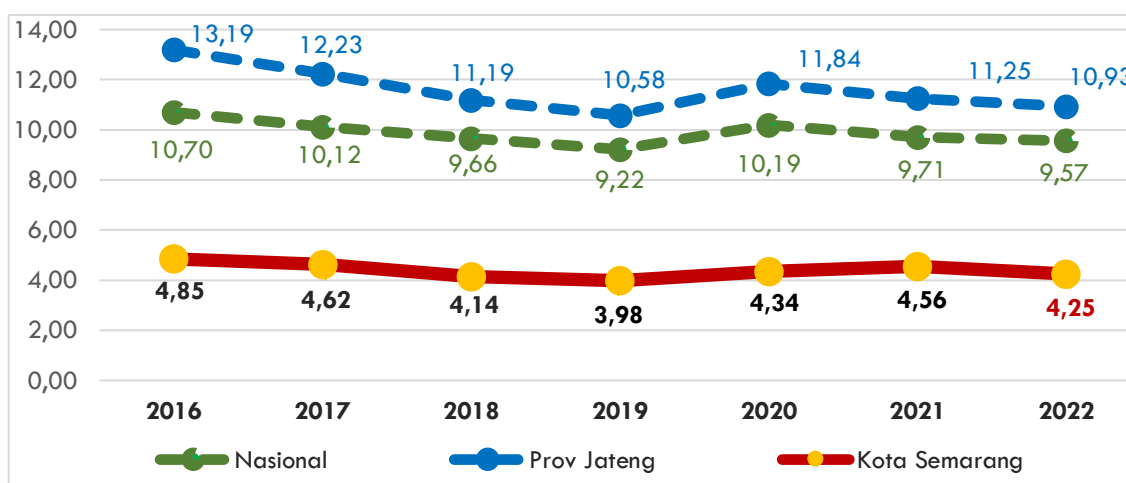
Gambar 2.9

Perbandingan Indeks Gini Kota Semarang dengan kota besar setara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020 – 2022

Jika dibandingkan dengan capaian nasional, peningkatan indeks gini Kota Semarang sebesar 0,05 lebih besar dari nasional yang justru mengalami penurunan sebesar 0,01 pada tahun 2021. Begitu pula pada tahun 2022, peningkatan indeks gini Kota Semarang sebesar 0,01 masih lebih tinggi daripada nasional yang tidak mengalami perubahan sejak tahun 2021.

e. Kemiskinan

Persentase penduduk miskin merupakan persentase jumlah penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan. Penduduk miskin di Kota Semarang kondisinya cenderung menurun sejak tahun 2016-2022, namun karena adanya wabah pandemi yang juga berimbas pada menurunnya perekonomian mengakibatkan persentase penduduk miskin di Kota Semarang sedikit meningkat menjadi sebesar 4,56% di Tahun 2021, dan kembali menurun menjadi sebesar 4,25% pada tahun 2022. Meski demikian angka ini masih yang terendah dibandingkan angka kemiskinan kab/kota lain di Jawa Tengah. Telah banyak hal yang diupayakan pemerintah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pada masa pandemi, mulai dari pemberian bansos, relaksasi kredit/pembiayaan/pajak, juga refocusing anggaran di daerah baik yang bersumber dari dana transfer maupun APBD untuk penanganan Covid-19 pada bidang kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk pemanfaatan mekanisme padat karya, namun dampak pukulan ekonomi masih tidak bisa dihindarkan. Pada periode tujuh tahun terakhir (2016-2022), terlihat persentase penduduk miskin di Kota Semarang sebagai berikut:



Sumber: BPS Jawa Tengah, BPS Nasional, 2023

Gambar 2.10
Persentase Penduduk Miskin Kota Semarang Provinsi Jateng dan Nasional Tahun 2016 – 2022

Perkembangan persentase penduduk miskin di Kota Semarang dan Kota besar lainnya dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.13.

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Semarang, kota besar setara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022

KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH PENDUDUK MISKIN					PERSENTASE PENDUDUK MISKIN				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Semarang	73.650	71.970	79.580	84.450	79.870	4,14	3,98	4,34	4,56	4,25
Bandung	89.380	84.670	100.020	112.500	109.820	3,57	3,38	3,99	4,25	4,37
Surabaya	140.810	130.550	145.670	152.490	138.210	4,88	4,51	5,02	5,23	4,72
Medan	186.450	183.790	183.540	193.030	187.740	8,25	8,08	8,01	8,34	8,07
Makassar	66.220	65.120	69.980	74.690	71.830	4,41	4,28	4,54	4,82	4,58
Yogyakarta	29.750	29.450	31.620	34.070	29.680	6,98	6,84	7,27	7,69	6,62
Jawa Tengah	3.867.420	3.679.400	4.119.930	3.934.010	3.858.230	11,19	10,58	11,84	11,25	10,93
Nasional	25.674.580	24.785.870	27.549.690	26.503.650	26.363.270	9,66	9,22	10,19	9,71	9,57

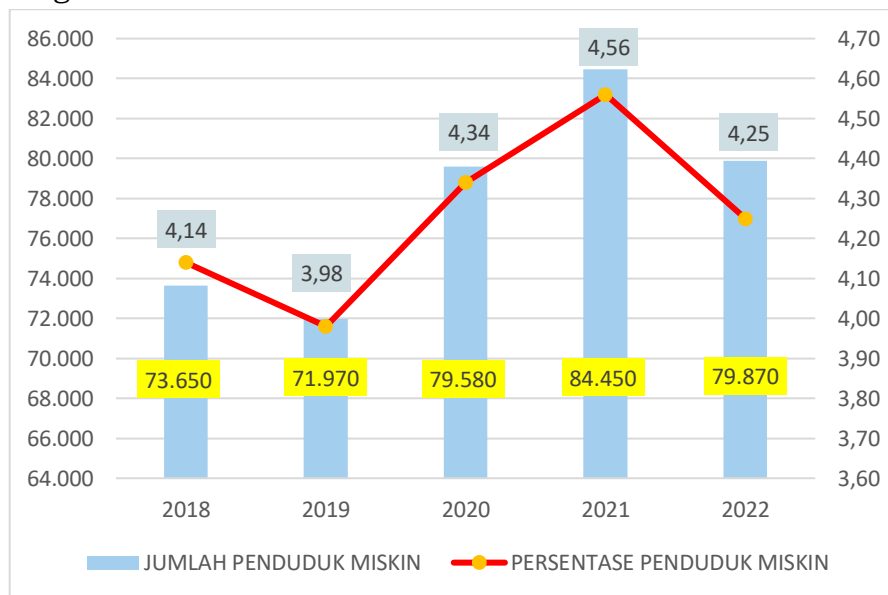
Sumber: Data diolah dari BPS Prov Jateng dan Nasional, 2023

Jika dibandingkan dengan rata-rata penduduk miskin kota besar setara yang terdiri dari Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, dan Yogyakarta capaian Kota Semarang tidak lebih baik dimana penurunan Kota Semarang hanya sebesar 0,31%, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan penurunan rata-rata penduduk miskin kota besar setara yang turun sebesar 0,39% dan Provinsi Jawa Tengah yang turun sebesar 0,32% pada tahun 2022. Meskipun begitu, jika dibandingkan dengan capaian nasional, jumlah penduduk miskin Kota Semarang bisa dikatakan lebih baik dimana nasional hanya turun sebesar 0,14% di tahun 2022.

Jumlah Penduduk Miskin di Kota Semarang tahun 2022 sebesar 79.870 jiwa telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu berkisar antara 79.682-81.561 jiwa. Berdasarkan capaian tersebut jumlah penduduk miskin Kota Semarang mengalami penurunan sebesar 4.580 jiwa dari capaian tahun 2021 yang menyentuh angka 84.450 jiwa

Penurunan jumlah penduduk miskin Kota Semarang pada tahun 2022 lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata capaian kota pembanding (Bandung, Surabaya, Palembang, dan Medan) yang mengalami penurunan sebesar 7.860 jiwa. Begitu pula jika dibandingkan dengan dengan penurunan jumlah penduduk miskin

nasional yang mencapai 140.380 jiwa, maka penurunan jumlah penduduk miskin Kota Semarang lebih rendah.



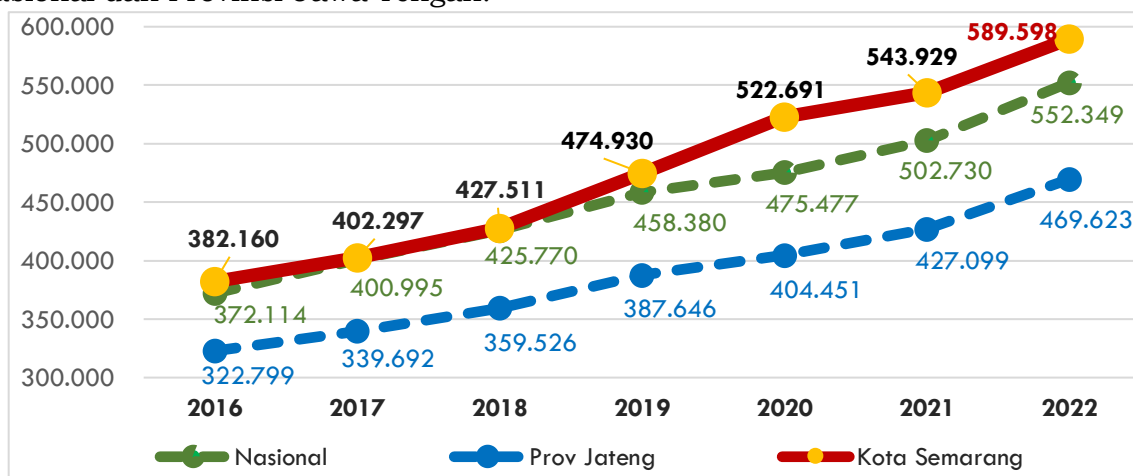
Sumber: BPS Kota Semarang, 2023 (Data diolah)

Gambar 2.11

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Semarang Tahun 2018-2022

Dari tahun 2016-2018 perubahan pertumbuhan penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 0,48%. Namun, dampak pandemi covid-19 menyebabkan kembali mengalami peningkatan dan baru pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,31%.

Garis Kemiskinan sebagai garis batas ukuran seseorang dikategorikan ke dalam kelompok miskin atau tidak, merupakan nilai rupiah rata-rata pengeluaran perkapita yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. Apabila seseorang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita dalam pemenuhan kebutuhan pokok lebih tinggi (diatas) garis kemiskinan, maka orang tersebut tidak termasuk dalam kategori penduduk miskin, demikian pula sebaliknya. Dilihat dari perbandingan garis kemiskinan antara Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, terlihat bahwa batas ukuran kemiskinan di Kota Semarang lebih tinggi jika dibandingkan dengan ukuran Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Artinya orang miskin di Kota Semarang, belum tentu tergolong miskin jika diukur menggunakan garis kemiskinan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

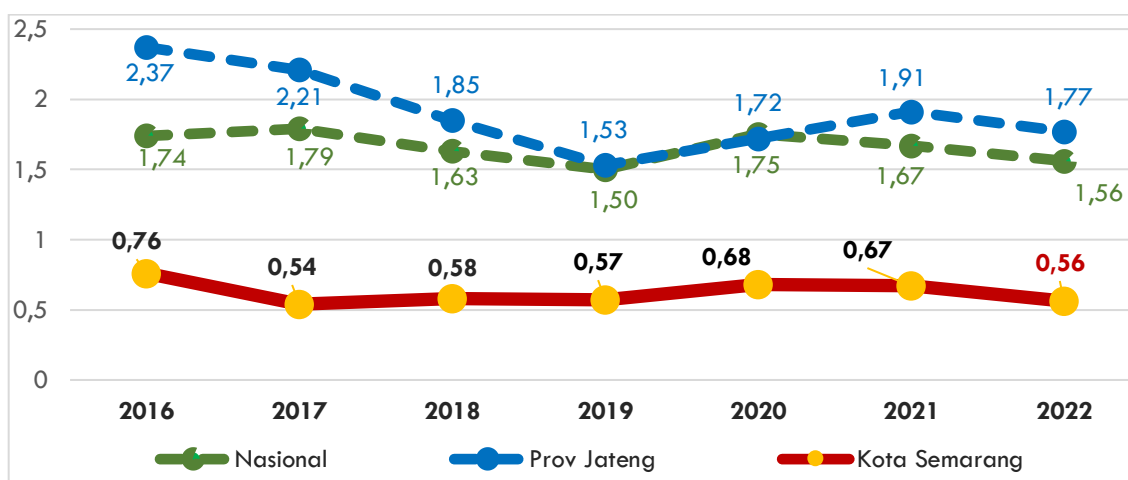


Sumber: BPS Prov. Jateng, BPS Nasional, 2023

Gambar 2.12

Garis Kemiskinan Kota Semarang, Provinsi Jateng dan Nasional Tahun 2016 – 2022

Indeks Kedalaman Kemiskinan, merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Dimana semakin tinggi nilai indeks, menunjukkan semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Gambaran Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Semarang selama 7 tahun terakhir menunjukkan bahwa kedalaman kemiskinan terhadap garis kemiskinan di Kota Semarang lebih rendah, dibandingkan dengan Nasional maupun Provinsi Jawa Tengah. Artinya mengentaskan warga miskin di Kota akan lebih mudah dilakukan karena kesenjangan terhadap garis kemiskinan tidak terlalu jauh.

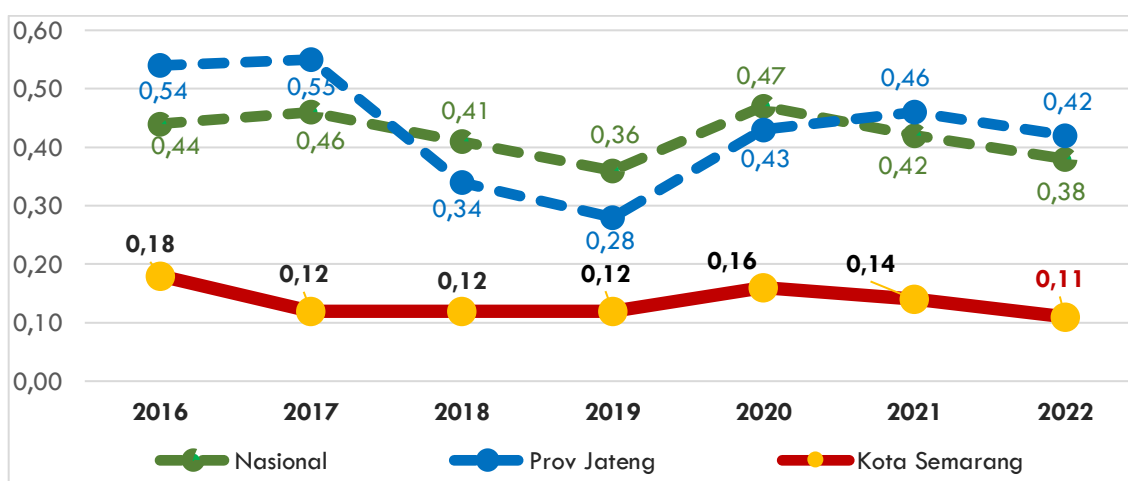


Sumber: BPS Prov. Jateng, BPS Nasional, 2023

Gambar 2.13

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Semarang, Provinsi Jateng dan Nasional Tahun 2016 – 2022

Indeks Keparahan Kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Selama tahun 2016-2022, indeks keparahan kemiskinan Kota Semarang selalu menduduki peringkat terbawah jika dibandingkan dengan indeks keparahan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.



Sumber: BPS Prov. Jateng, BPS Nasional, 2023

Gambar 2.14

Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Semarang, Provinsi Jateng dan Nasional Tahun 2016-2022

Dengan terbitnya UU No.13 tahun 2011 melalui Peraturan Menteri Sosial (Permensos) RI No.10 tahun 2016 tentang mekanisme penggunaan Data Terpadu

Program penanganan Fakir Miskin; Permensos RI No.28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu (BDT) Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; dan Instruksi Pemerintah Pusat bahwa Semua Pemda untuk melaksanakan Validasi dan Verifikasi terhadap BDT Tahun 2015 dilingkupnya masing-masing. Maka sejak tahun 2017 Kota Semarang melakukan validasi dan verifikasi terhadap data BDT Kota Semarang dan kemudian selanjutnya menggunakannya sebagai data tunggal dalam intervensi program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi.

Tabel 2.14.

Jumlah Penduduk Warga Miskin Kota Semarang Tahun 2017-2022

No	Tahun	Kota Semarang				Prov Jateng		Nasional	
		Versi Pemkot		Versi BPS		Versi BPS		Versi BPS	
		Smg/BDT Kemensos							
		Jiwa	(%)	Jiwa	(%)	Jiwa	(%)	Jiwa	(%)
1	2017	303.715	18,3	80,86 ribu	4,62	4.197,49 ribu	12,23	26.582,99 ribu	10,12
2	2018	280.211	16,8	73,65 ribu	4,14	3.867,42 ribu	11,19	25.674,58 ribu	9,66
3	2019	229.564	13,8	71,97 ribu	3,98	3.679,40 ribu	10,58	24.785,87 ribu	9,22
4	2020	271.396	16,15	79,58 ribu	4,34	3.980,90 ribu	11,84	27.549,69 ribu	10,19
5	2021	407.363	24,23	84,45 ribu	4,56	3.934,01 ribu	11,25	26.503,65 ribu	9,71
6	2022	186.675	11,06	79,87 ribu	4,25	3.858,23 ribu	10,93	26.363,27 ribu	9,57

Sumber: Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 050/680/2015 tentang Penetapan Warga Miskin Kota Semarang Tahun 2015, jatseng.bps.go.id; bps.go.id, Dinas Sosial, 2023

Sebagai bahan pertimbangan, berdasarkan data versi BPS Kota Semarang, data update Januari 2023 rasio penduduk miskin Kota Semarang tahun 2022 menyentuh angka 4,25% atau sebesar 79,87 ribu jiwa lebih rendah dari tahun 2021 dan bahkan jauh lebih rendah bila dibandingkan angka kemiskinan Jawa Tengah yang mencapai 3.858,23 ribu jiwa (10,93%). Sedangkan meningkatnya angka kemiskinan berdasarkan data BDT menjadi sebesar 24,23% pada tahun 2021 disebabkan terdapat kebijakan dari KL terkait angka DTKS pada tahun 2021 adalah angka kesejahteraan sosial yang meliputi: usulan daerah, fitur usul sanggah aplikasi cek bansos, data bencana, hasil pengecekan lapangan berdasarkan berita media, hasil verifikasi pejuang muda dan geo tagging data spasial dari citra satelit. Selain itu juga data penerimaan bantuan dari KL lain selain Kemensos.

Isu kemiskinan memiliki porsi perhatian yang cukup besar dalam pembangunan perkotaan, hal tersebut diindikasikan dari beragamnya program pengentasan kemiskinan dalam berbagai level. Pada tingkat pemerintahan kabupaten/kota, Kota Semarang telah melaksanakan berbagai program penanganan kemiskinan yang dibiayai oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, seperti JAMKESMASKOT, BOS, PKH dan RASKIN, Beasiswa, Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dan program lainnya. Kemiskinan juga menjadi salah satu target dalam Sustainable Development Goals (Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan) guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di tahun 2030.

f. Angka Kriminalitas

Dinamika perkembangan Kota Semarang yang pesat dengan kemajemukan masyarakat akan berdampak pada perubahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Disisi lain pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan ketersediaan fasilitas akan berdampak negatif seperti semakin bertambahnya tingkat pengangguran, bertambahnya angka kemiskinan, dan dapat memicu meningkatnya angka kriminalitas. Kriminalitas dapat diartikan sebagai segala bentuk

tindakan yang melanggar norma hukum. Selama 5 tahun dari tahun 2018 – 2022, jumlah tindak pidana menonjol (*crime index*) menurut jenis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.15.

Jumlah Tindak Pidana Menonjol (*Crime Index*) Menurut Jenis Kejahatan di Kota Semarang Tahun 2018 – 2022

Jenis Tindak Pidana	Jumlah di Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
a. Pencurian dengan pemberatan	1	1	0	14	138
b. Pencurian ranmor	83	19	33	31	91
c. Pencurian dengan kekerasan	10	2	4	7	11
d. Penganiayaan	13	30	19	38	115
e. Pembunuhan	5	1	3	1	6
f. Perkosaan	1	2	0	0	2
g. Uang palsu	3	0	0	NA	NA
h. Narkotika	4	NA	NA	NA	21
i. Perjudian	0	0	0	1	7
j. Pemerasan/Ancaman	1	4	3	3	16
k. Lainnya	1.322	1.092	1.268	1.084	928
Jumlah	1.443	1.151	1.330	1.253	1.335

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, 2023 (Data Diolah)

Dalam kurun tahun 2018-2022, dapat disimpulkan bahwa jumlah angka kriminalitas di Kota Semarang mempunyai kecenderungan meningkat pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebanyak 1.335 kejadian, lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu 1.330 kasus. Jika pada tahun 2021 kasus paling tinggi terjadi pada penganiayaan sebanyak 38 kasus, di tahun 2022 justru terjadi pada tindakan pecurian dengan pemberatan yang mencapai 138 kasus, selain itu juga terjadinya peningkatan pada penganiayaan menjadi sebanyak 115 kasus di tahun 2022.

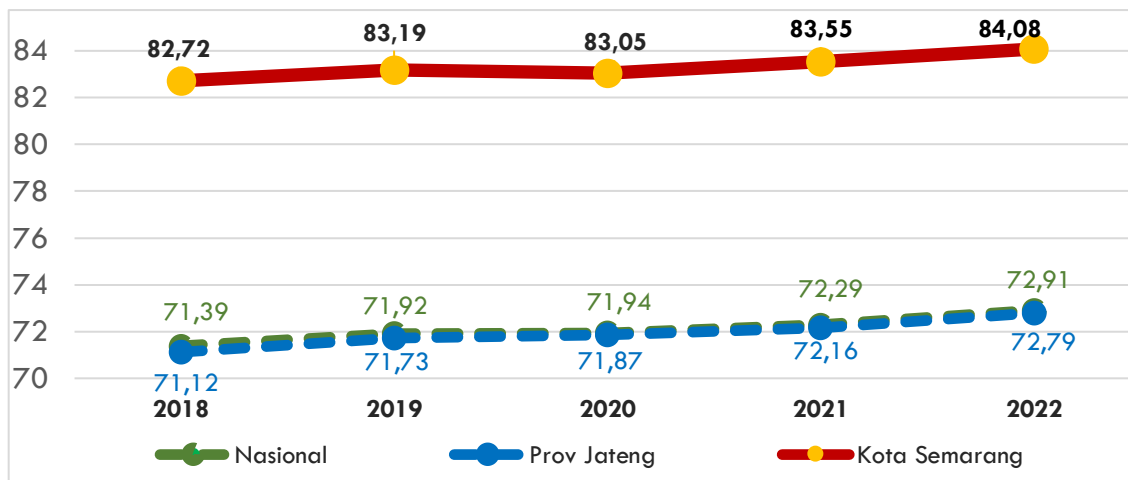
Angka kriminalitas Kota Semarang dari tahun 2018-2022 mengalami tren yang fluktuatif. Sebelum pandemi Covid-19, tren angka kriminalitas mengalami penurunan yang cukup signifikan namun, pada saat pandemi dan pasca pandemi terjadi fluktuasi.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial meliputi pembangunan yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar sosial masyarakat lainnya. Kondisi pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial sampai dengan tahun 2022 pada masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

a. Indeks Pembangunan Manusia

Secara umum, dalam lima tahun terakhir dari tahun 2018-2022, pembangunan manusia di Kota Semarang terus mengalami peningkatan, kecuali dari tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan dari semula 83,19 menjadi 83,05 namun kembali naik di tahun 2021 menjadi 83,55, dan juga mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi 84,08, hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Semarang terutama paska pandemi Covid-19.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.15

Indeks Pembangunan Manusia Kota Semarang, Jawa Tengah & Nasional Tahun 2018 – 2022

IPM merupakan indeks yang menunjukkan aspek-aspek peluang hidup panjang dan sehat, mempunyai pengetahuan dan ketrampilan yang memadai, serta hidup layak. Indikator ini merupakan kemudahan dalam aspek sosial, budaya dan aspek ekonomi.

Tabel 2.16.

Indikator Pembentuk IPM Kota Semarang Tahun 2018-2022

Tahun	Angka Harapan Hidup (AHH)	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Rata2 Lama Sekolah (RLS)	Paritas Daya Beli (PPP-Ribu Rupiah)
2018	77,23	15,50	10,51	14.895,-
2019	77,25	15,51	10,52	15.550,-
2020	77,34	15,52	10,53	15.243,-
2021	77,51	15,53	10,78	15.425,-
2022	77,69	15,54	10,80	16.047,-

Sumber: BPS Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah, 2023

Pencapaian IPM Kota Semarang dalam 5 tahun terakhir masuk ke dalam kategori Sangat Tinggi dengan angka capaian ≥ 80 . Hal ini menunjukkan bahwa hasil pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya.

Hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pembangunan manusia di Kota Semarang antara lain: selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan masyarakat termasuk diantaranya wajib penggunaan masker apabila ditempat umum, menghindari kerumunan yang berpotensi menjadi penularan virus, pemberian vaksin sesuai ketentuan pemerintah, karena hal ini merupakan salah satu penentu perbaikan derajat kesehatan masyarakat namun dalam kenyataannya hal ini cukup sulit diintervensi. Peran Pemerintah harus terus ditingkatkan dalam hal sosialisasi Pola Hidup Sehat. Penuntasan buta aksara dan penurunan angka putus sekolah. Pembebasan biaya pendidikan dan penyediaan infrastruktur pendidikan serta sarpras penunjang terkait dengan pembelajaran daring harus terus dikawal oleh Pemerintah Kota Semarang. Di sisi lain, dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat, upaya pengembangan skala mikro dan usaha kecil menengah merupakan alternatif untuk menaikkan pendapatan masyarakat yang masih rendah dan bermuara pada peningkatan daya beli, apalagi selama pandemi sektor ini banyak mengalami kelesuan, di samping sektor hiburan, wisata, serta sektor ekonomi lainnya.

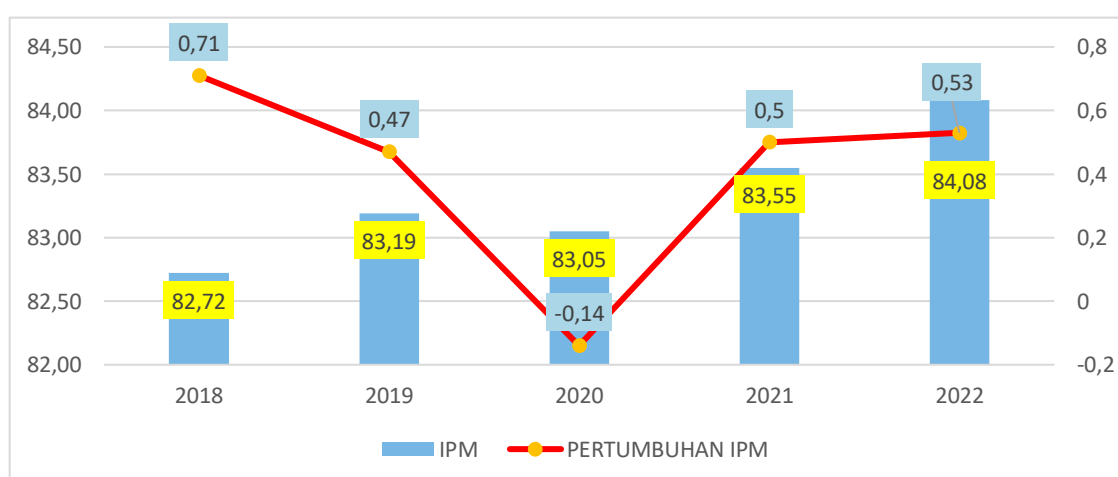
IPM Kota Semarang dan Pertumbuhan IPM Kota Semarang serta Perbandingan IPM Kota Semarang dengan IPM kota-kota besar setara ditunjukkan pada gambar berikut.

Tabel 2.17.
IPM Kota Semarang, Kota Besar Setara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022

KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020	2021	2022
Semarang	82,72	83,19	83,05	83,55	84,08
Bandung	81,06	81,62	81,51	81,96	82,50
Surabaya	81,74	82,22	82,23	82,31	82,74
Medan	80,65	80,97	80,98	81,21	81,76
Makassar	81,73	82,25	82,25	82,66	83,12
Yogyakarta	86,11	86,65	86,61	87,18	87,69
Jawa Tengah	71,12	71,73	71,87	72,16	72,79
Nasional	71,39	71,92	71,94	72,29	72,91

Sumber: BPS Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional, 2023

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Semarang berada di atas IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kota Semarang berada di atas kemajuan pembangunan Jawa Tengah pada umumnya. Namun, IPM Kota Semarang pada tahun 2022 berada di bawah Kota Yogyakarta dengan nilai IPM 87,69. Berikut disajikan grafik pertumbuhan IPM Kota Semarang untuk kurun waktu tahun 2018-2022.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (diolah), 2023

Gambar 2.16
Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Kota Semarang
Tahun 2018 – 2022

Pertumbuhan IPM Kota Semarang pada tahun 2018-2022 cukup fluktuatif. Pada tahun 2020 IPM Kota Semarang sedikit mengalami penurunan sebesar 0,14 dibanding tahun sebelumnya dikarenakan pandemi. Kemudian setelah pandemi IPM Kota Semarang kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 0,5 dan tahun 2022 sebesar 0,53, hingga IPM menjadi sebesar 84,08 pada tahun 2022.

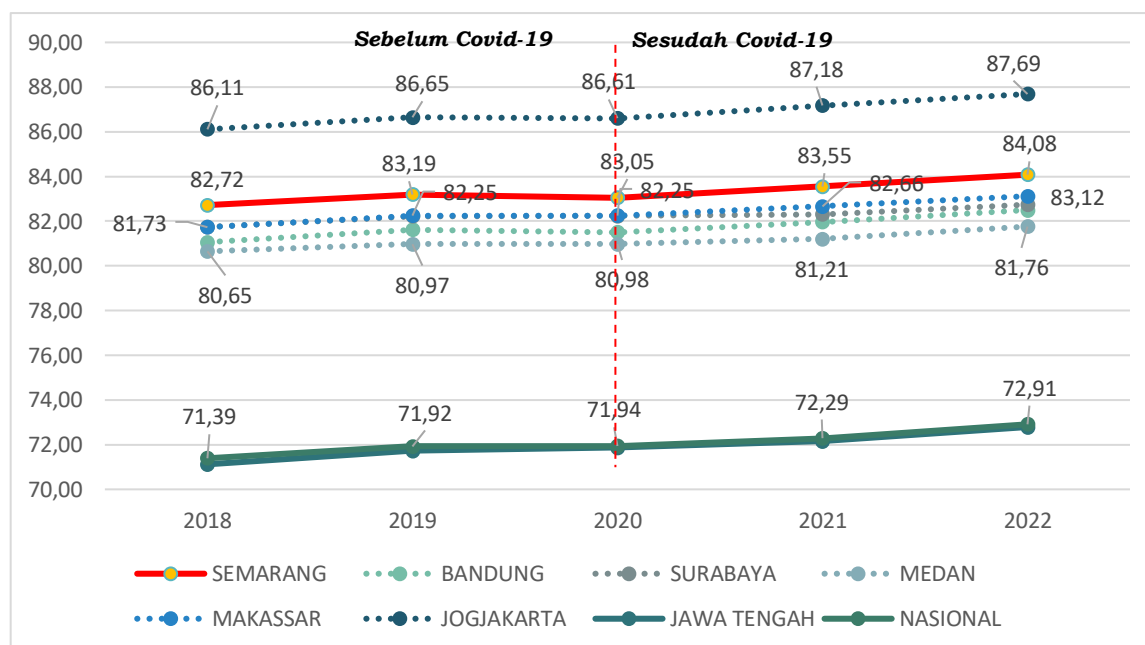
Pertumbuhan IPM Kota Semarang di tahun 2022 lebih rendah dari pertumbuhan IPM nasional yang mengalami peningkatan 0,62. Berikut data pertumbuhan IPM Kota Semarang, kota besar setara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022.

Tabel 2.18.

Pertumbuhan IPM Kota Semarang, Kota Besar Setara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022

KABUPATEN/ KOTA	IPM					PERTUMBUHAN IPM				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Semarang	82,72	83,19	83,05	83,55	84,08	0,71	0,47	-0,14	0,5	0,53
Bandung	81,06	81,62	81,51	81,96	82,50	0,75	0,56	-0,11	0,45	0,54
Surabaya	81,74	82,22	82,23	82,31	82,74	0,67	0,48	0,01	0,08	0,43
Medan	80,65	80,97	80,98	81,21	81,76	0,67	0,32	0,01	0,23	0,55
Makassar	81,73	82,25	82,25	82,66	83,12	0,60	0,52	0	0,41	0,46
Yogyakarta	86,11	86,65	86,61	87,18	87,69	0,62	0,54	-0,04	0,57	0,51
Jawa Tengah	71,12	71,73	71,87	72,16	72,79	0,60	0,61	0,14	0,29	0,63
Nasional	71,39	71,92	71,94	72,29	72,91	0,58	0,53	0,02	0,35	0,62

Sumber: BPS Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional, 2023



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah dan Nasional (diolah), 2023

Gambar 2.17

Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Kota Semarang, Kota Besar Setara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2018 – 2022

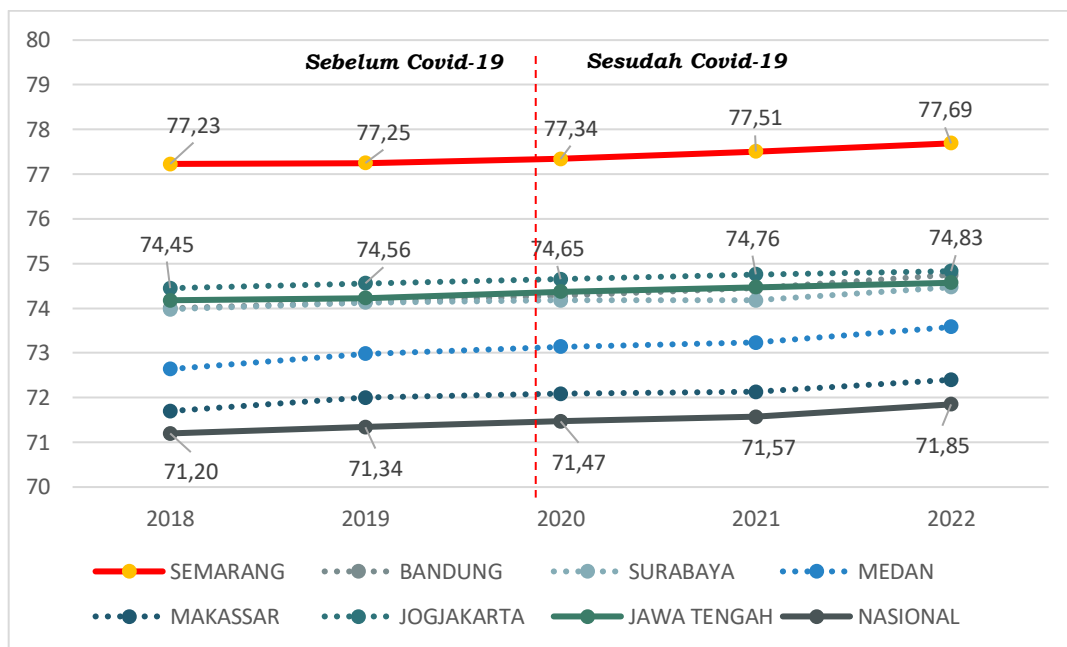
Sementara itu, Pertumbuhan AHH (Angka Harapan Hidup) Kota Semarang pada Tahun 2022 sebesar 0,18 tahun, lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan kota besar setara Bandung, Surabaya, Medan dan Makassar yang masing-masing tumbuh 0,29 tahun, 0,29 tahun, 0,35 tahun dan 0,27 tahun. Begitu pula jika dibandingkan dengan capaian nasional, Pertumbuhan AHH Kota Semarang lebih kecil dari pertumbuhan nasional yang sebesar 0,28 tahun pada tahun 2022. Berikut disajikan data dan grafik terkait dengan AHH dan Pertumbuhan AHH Kota Semarang Tahun 2018-2022.

Tabel 2.19.

Pertumbuhan AHH Kota Semarang, kota besar setara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022

KABUPATEN/ KOTA	AHH					PERTUMBUHAN AHH				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Semarang	77,23	77,25	77,34	77,51	77,69	0,02	0,02	0,09	0,17	0,18
Bandung	74,00	74,14	74,28	74,46	74,75	0,14	0,14	0,14	0,18	0,29
Surabaya	73,98	74,13	74,18	74,18	74,47	0,10	0,15	0,05	0,00	0,29
Medan	72,64	72,98	73,14	73,23	73,58	0,24	0,34	0,16	0,09	0,35
Makassar	71,70	72,00	72,09	72,13	72,40	0,19	0,30	0,09	0,04	0,27
Yogyakarta	74,45	74,56	74,65	74,76	74,83	0,10	0,11	0,09	0,11	0,07
Jawa Tengah	74,18	74,23	74,37	74,47	74,57	0,10	0,05	0,14	0,10	0,10
Nasional	71,20	71,34	71,47	71,57	71,85	0,14	0,14	0,13	0,10	0,28

Sumber: BPS Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional, 2023



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah dan Nasional (diolah), 2023

Gambar 2.18

Pertumbuhan AHH Kota Semarang, Kota Besar Setara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2018 – 2022

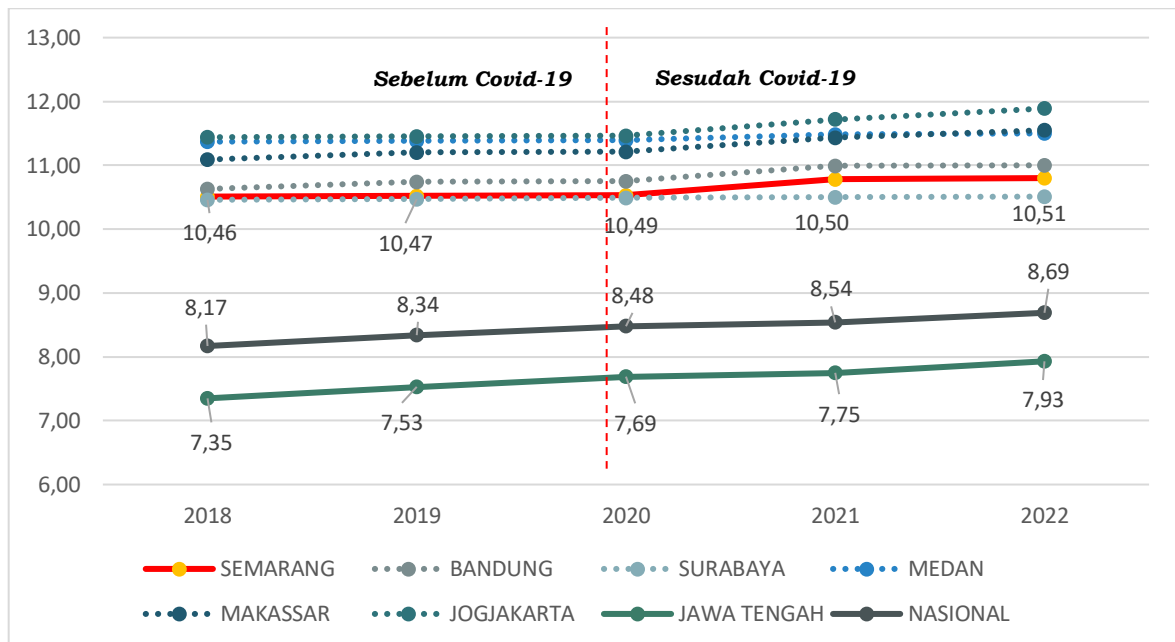
Pertumbuhan RLS (Rata-rata Lama Sekolah) Kota Semarang sebesar 10,8 tahun pada tahun 2022. RLS tersebut telah melampaui target tahun 2022 yaitu sebesar 10,57 tahun. Dari capaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa di tahun 2022 RLS Kota Semarang naik sebesar 0,02 tahun. Kenaikan tersebut lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan Kota Makassar sebesar 0,12 tahun dan Kota Yogyakarta Sebesar 0,17 tahun. Begitu pula jika dibandingkan dengan capaian nasional dan Provinsi Jawa Tengah, Pertumbuhan RLS Kota Semarang lebih kecil dari pertumbuhan nasional yang sebesar 0,15 tahun dan Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,18 tahun pada tahun 2022. Data RLS dan Pertumbuhan RLS dapat dilihat melalui tabel dan grafik berikut.

Tabel 2.20.

Pertumbuhan RLS Kota Semarang, kota besar setara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022

KABUPATEN/ KOTA	RLS					PERTUMBUHAN RLS				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Semarang	10,51	10,52	10,53	10,78	10,80	0,01	0,01	0,01	0,25	0,02
Bandung	10,63	10,74	10,75	10,99	11,00	0,04	0,11	0,01	0,24	0,01
Surabaya	10,46	10,47	10,49	10,50	10,51	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01
Medan	11,37	11,38	11,39	11,48	11,50	0,12	0,01	0,01	0,09	0,02
Makassar	11,09	11,20	11,21	11,43	11,55	0,01	0,11	0,01	0,22	0,12
Yogyakarta	11,44	11,45	11,46	11,72	11,89	0,01	0,01	0,01	0,26	0,17
Jawa Tengah	7,35	7,53	7,69	7,75	7,93	0,08	0,18	0,16	0,06	0,18
Nasional	8,17	8,34	8,48	8,54	8,69	0,07	0,17	0,14	0,06	0,15

Sumber: BPS Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional, 2023



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah dan Nasional (diolah), 2023

Gambar 2.19

Pertumbuhan RLS Kota Semarang, kota besar setara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2018 – 2022

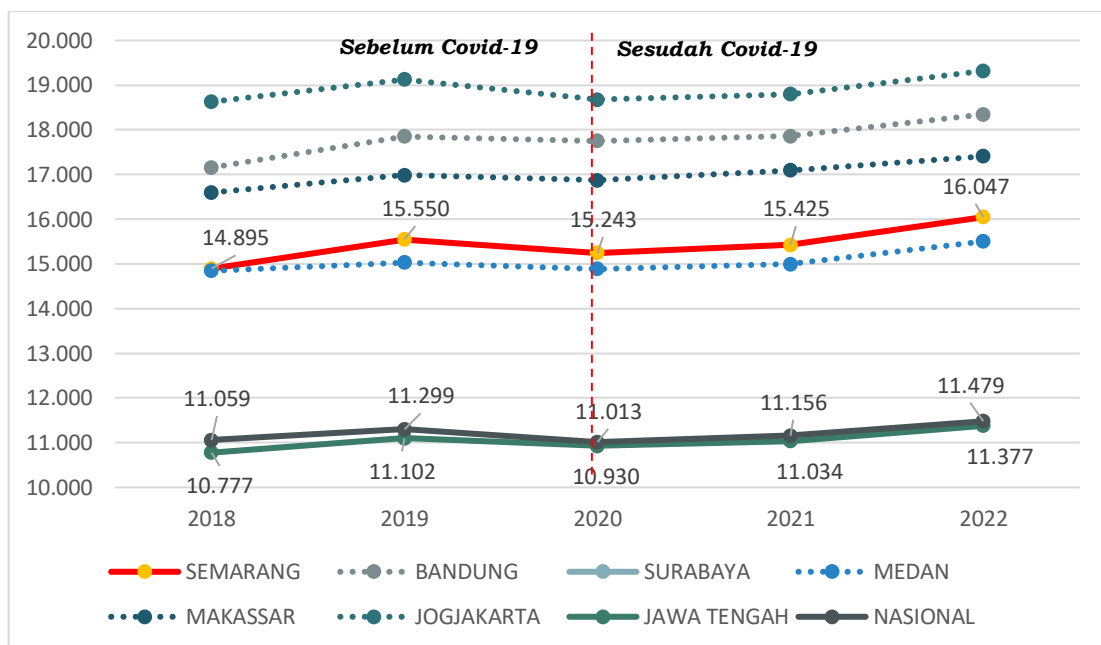
Pertumbuhan HLS (Harapan Lama Sekolah) Kota Semarang sebesar 15,54 tahun pada tahun 2022, sedikit lebih rendah target tahun 2022 sebesar 15,56 tahun. Meski demikian pertumbuhan HLS Kota Semarang positif meningkat sebesar 0,01 tahun. Kenaikan tersebut lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan kota besar setara Bandung, Surabaya dan Medan yaitu sebesar 0,02 tahun. Begitu pula jika dibandingkan dengan capaian nasional, Pertumbuhan HLS Kota Semarang lebih kecil dari pertumbuhan nasional yang sebesar 0,02 tahun pada tahun 2022. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.21.

Pertumbuhan HLS Kota Semarang, kota besar setara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022

KABUPATEN/ KOTA	HLS					PERTUMBUHAN HLS				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Semarang	15,50	15,51	15,52	15,53	15,54	0,30	0,01	0,01	0,01	0,01
Bandung	14,18	14,19	14,20	14,21	14,23	0,28	0,01	0,01	0,01	0,02
Surabaya	14,78	14,79	14,80	14,81	14,83	0,37	0,01	0,01	0,01	0,02
Medan	14,72	14,73	14,74	14,75	14,77	0,27	0,01	0,01	0,01	0,02
Makassar	15,55	15,56	15,57	15,58	15,59	0,37	0,01	0,01	0,01	0,01
Yogyakarta	17,05	17,28	17,43	17,60	17,61	0,23	0,23	0,15	0,17	0,01
Jawa Tengah	12,63	12,68	12,70	12,77	12,81	0,06	0,05	0,02	0,07	0,04
Nasional	12,91	12,95	12,98	13,08	13,10	0,06	0,04	0,03	0,10	0,02

Sumber: BPS Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional, 2023



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah dan Nasional (diolah), 2023

Gambar 2.20

Pertumbuhan HLS Kota Semarang, kota besar setara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2018 – 2022

Pada tahun 2022 pengeluaran per Kapita Kota Semarang sebesar 16.047 ribu rupiah/orang/tahun, lebih kecil dibandingkan dengan kota besar setara Bandung, Surabaya, Makassar dan Yogyakarta namun lebih besar dibanding dengan kota Medan. Pengeluaran per Kapita Kota Semarang lebih besar dari pengeluaran per kapita Provinsi Jawa Tengah sebesar 11.377 ribu rupiah/orang/tahun dan pengeluaran per kapita nasional yang sebesar 11.479 ribu rupiah/orang/tahun pada tahun 2022.

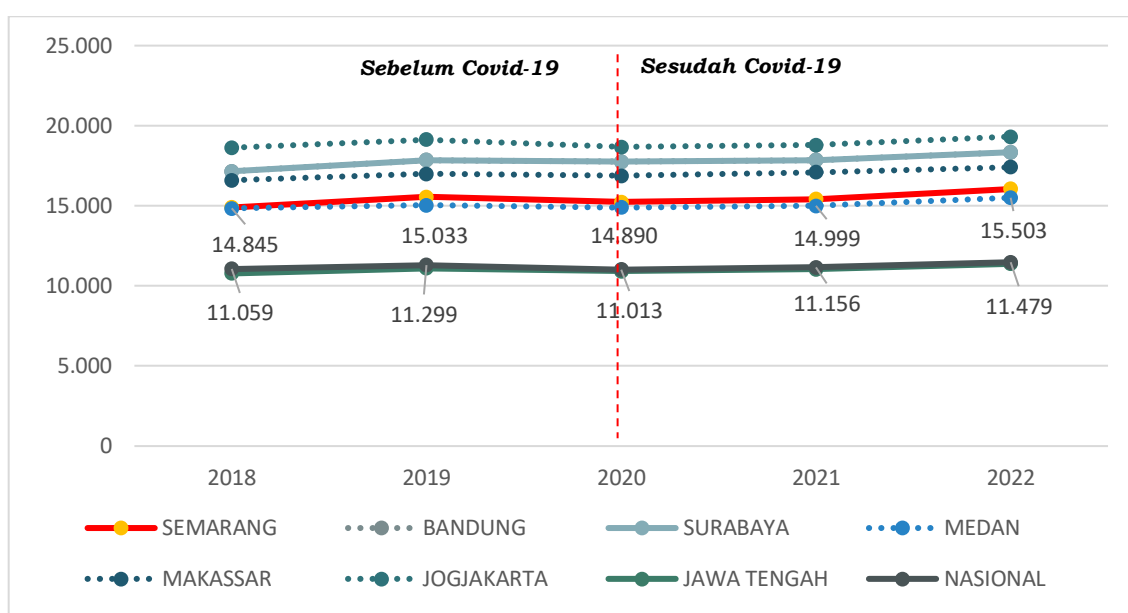
Tabel 2.22.

Pertumbuhan Pengeluaran Per Kapita Kota Semarang, kota besar setara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022

KABUPATEN/ KOTA	PENGELUARAN PER KAPITA					PERTUMBUHAN PENGELUARAN PER KAPITA				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Semarang	14.895	15.550	15.243	15.425	16.047	561	655	-307	182	622

KABUPATEN/ KOTA	PENGELUARAN PER KAPITA					PERTUMBUHAN PENGELUARAN PER KAPITA				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Bandung	16.630	17.254	16.887	16.996	17.639	597	624	-367	109	643
Surabaya	17.157	17.854	17.755	17.862	18.345	431	697	-99	107	483
Medan	14.845	15.033	14.890	14.999	15.503	232	188	-143	109	504
Makassar	16.597	16.989	16.873	17.097	17.406	230	392	-116	224	309
Yogyakarta	18.629	19.125	18.678	18.801	19.319	624	496	-447	123	518
Jawa Tengah	10.777	11.102	10.930	11.034	11.377	400	325	-172	104	343
Nasional	11.059	11.299	11.013	11.156	11.479	395	240	-286	143	323

Sumber: BPS Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional, 2023



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah dan Nasional (diolah), 2023

Gambar 2.21

Pertumbuhan Pengeluaran Perkapita Kota Semarang, kota besar setara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2018 – 2022

Sebelum pandemi *Covid-19* pengeluaran per kapita Kota Semarang selalu mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari tahun 2018 yang mengalami peningkatan sebesar 561 ribu rupiah/orang/tahun menjadi 14.895 ribu rupiah/orang/tahun dan pada tahun 2019 meningkat sebesar 655 ribu rupiah/orang/tahun menjadi 15.550 ribu rupiah/orang/tahun. Namun, saat terjadi pandemi tahun 2020 pengeluaran per kapita turun sebesar 307 ribu rupiah / orang menjadi sebesar 15.243 ribu rupiah/orang/tahun. setelah keadaan membaik, pengeluaran per kapita berangsur mengalami peningkatan di tahun 2021 sebesar 182 ribu rupiah/orang/tahun dan pada tahun 2022 menjadi 16.047 ribu rupiah/orang/tahun.

b. Kesempatan kerja

Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja, sehingga dapat menyerap pertambahan angkatan kerja.

Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Untuk menilai kesempatan kerja, dapat dilihat dari beberapa indikator, yakni:

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Merupakan perbandingan jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Dengan melihat tingkat pengangguran terbuka, secara langsung dapat mengindikasikan seberapa luas kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut. Pandemi Covid-19 juga membawa dampak yang sangat signifikan pada perekonomian dan pada akhirnya berimbas pada sektor ketenagakerjaan, yaitu mulai dari tidak bekerja sampai dengan pengurangan jam kerja. Selain itu pandemi menuntut masyarakat untuk cepat beradaptasi dengan segala perubahan, terutama dalam hal pemanfaatan teknologi digital yang akhirnya membuat pekerjaan menjadi sangat fleksibel baik secara waktu maupun tempat, sehingga pekerjaan tidak lagi harus dikerjakan dari tempat kerja dengan jam kerja yang monoton.

Untuk melindungi dan mengembalikan kesejahteraan pekerja dan masyarakat yang terdampak pandemi, perlu mempersiapkan SDM pekerja sebaik mungkin, meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan vokasi yang tepat, agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja paska pandemi.

Dalam lingkup Kota Semarang, TPT dari tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi, hingga pada tahun 2020 naik tajam menjadi sebesar 9,57% dari sebelumnya yang hanya sebesar 4,54% dan kembali menurun di Tahun 2021 menjadi sebesar 9,54%. Pada tahun 2022, TPT Kota Semarang semakin turun menjadi 7,60%. Secara umum TPT Kota Semarang lebih tinggi jika dibandingkan TPT di Provinsi Jawa Tengah yang hanya sebesar 5,95% dan juga nasional yang sebesar 6,49%. Selain dampak pandemi Covid-19 yang secara global terjadi penurunan daya beli masyarakat, sehingga banyak perusahaan untuk bisa tetap mempertahankan usaha diantaranya dengan mengurangi Tenaga Kerja selain adanya pembatasan kegiatan usaha dengan penerapan protokol kesehatan. Di luar pandemi covid penyebab tingginya TPT di Kota Semarang juga disebabkan minat warga daerah lain untuk tinggal di Kota Semarang guna memperbaiki kesejahteraannya. Namun diantaranya kurang berbekal dengan ketrampilan dan pendidikan yang memadai. Sementara itu dari komposisi profesi/pekerjaan penduduk kota Semarang terdapat peningkatan untuk jenis Mengurus Rumah Tangga dan Pelajar/Mahasiswa yang bukan sebagai komponen penyumbang Angkatan Kerja. Selain itu juga kemungkinan metodologi pendataan yang perlu pendalaman, khususnya pekerja sektor non formal (online shop dll). Sebagaimana diketahui bersama saat ini kecenderungannya justru sektor non formal yang lebih mendominasi, karena dinilai lebih praktis dan menjanjikan untuk konsumen perkotaan. Hal inilah diantaranya yang menjadikan TPT Kota Semarang angkanya tergolong tinggi dalam lima tahun terakhir.

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survey. Sama halnya dengan tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja di suatu wilayah juga dapat mengindikasikan seberapa besar kesempatan kerja di wilayah tersebut. Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja maka mengindikasikan semakin luas kesempatan kerja. Dalam lingkup Kota Semarang, TPAK mengalami pergerakan yang fluktuatif namun tetap dalam kisaran di atas 65%. Artinya bahwa dari 100 penduduk usia kerja, terdapat lebih dari 65 penduduk yang tersedia untuk memproduksi secara ekonomi pada waktu tertentu.

Perkembangan TPT dan TPAK dari tahun 2018 hingga 2022 secara lengkap tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.23.
Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Kota Semarang Tahun 2018-2022

Tahun	TPT (%)		TPAK (%)	
	Prov. Jateng	Kota Semarang	Prov. Jateng	Kota Semarang
2018	4,51	5,29	68,56	65,56
2019	4,49	4,54	68,62	66,42
2020	6,48	9,57	69,43	69,89
2021	5,95	9,54	69,58	69,41
2022	5,57	7,60	70,84	70,96

Sumber: BPS Prov. Jateng, 2023

Tabel 2.24.
Jumlah Angkatan Kerja Kota Semarang Tahun 2018-2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Angkatan Kerja:					
Bekerja	872.827	907.937	925.963	936.076	994.091
Pengangguran Terbuka	48.724	43.198	98.001	98.718	81.736
Total Angkatan Kerja	921.551	951.135	1.023.964	1.034.794	1.075.827

Sumber: BPS Prov. Jateng 2023

Upaya peningkatan kesempatan kerja dan perbaikan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing mutlak dilakukan, hal tersebut sangat perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, masyarakat dan kalangan dunia usaha melalui pendidikan formal maupun informal berbasis vokasi.

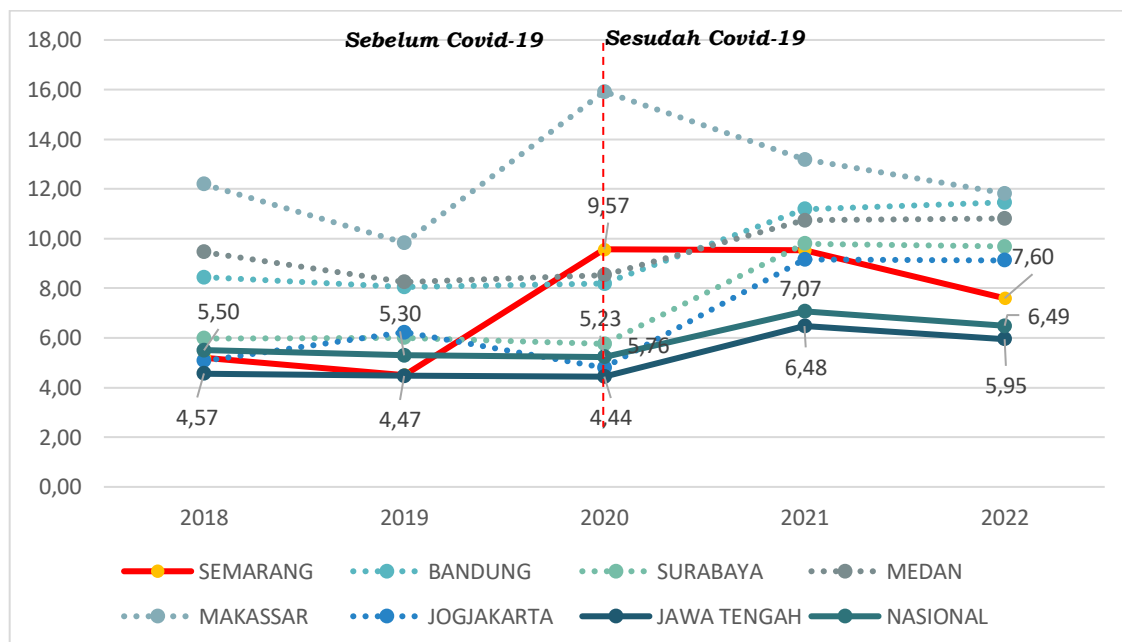
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Semarang mengalami fluktuasi bila dibandingkan dengan kota-kota besar setara antara tahun 2018-2022. Berikut disajikan tabel TPT Kota Semarang, kota besar setara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional untuk kurun waktu 2018-2022.

Tabel 2.25.
TPT Kota Semarang, kota besar setara, Provinsi Jawa tengah, dan Nasional
Tahun 2018-2022

KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020	2021	2022
Semarang	5,21	4,50	9,57	9,54	7,60
Bandung	8,44	8,05	8,18	11,19	11,46
Surabaya	5,98	6,01	5,76	9,79	9,68
Medan	9,46	8,25	8,53	10,74	10,81
Makassar	12,19	9,83	15,92	13,18	11,82
Yogyakarta	5,08	6,22	4,8	9,16	9,13
Jawa Tengah	4,57	4,47	4,44	6,48	5,95
Nasional	5,50	5,30	5,23	7,07	6,49

Sumber: BPS Prov. Jateng, BPS Nasional, 2023

TPT Kota Semarang sebesar 7,60 pada tahun 2022 lebih tinggi daripada Provinsi Jawa Tengah dan Nasional namun, lebih rendah jika dibandingkan dengan kota-kota besar setara. Hal ini menunjukkan bahwa presentase jumlah penganggur di Kota Semarang lebih rendah daripada kota-kota besar setara. Berikut disajikan grafik pergerakan TPT Kota Semarang, kota-kota besar setara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional untuk kurun waktu 2018-2022:



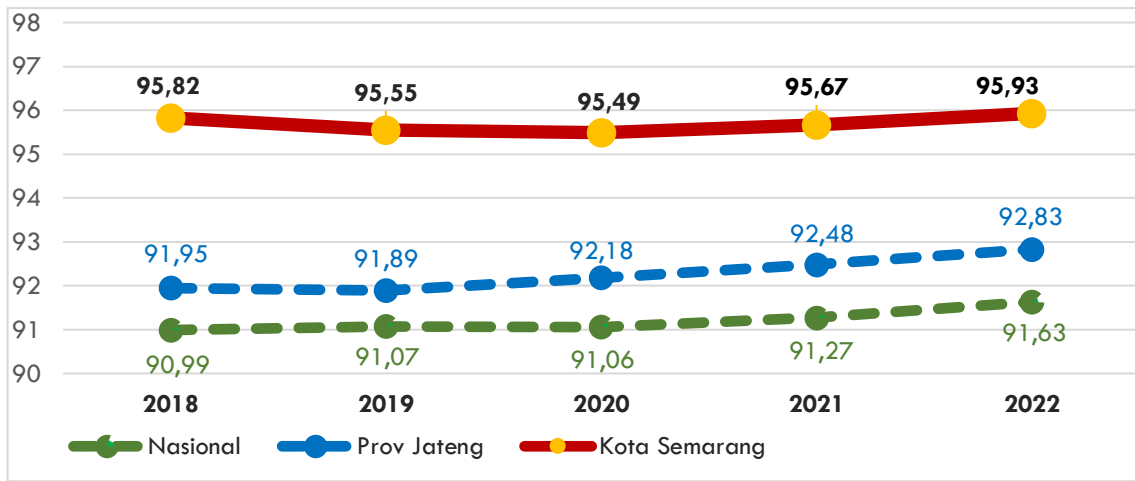
Sumber: BPS Prov. Jateng, BPS Nasional, 2023

Gambar 2.22

Perkembangan TPT Kota Semarang dengan kota besar setara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional tahun 2018-2022

c. Indeks Pembangunan Gender

Kesenjangan gender secara statistik ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan ukuran yang lazim digunakan untuk mengukur pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dari perspektif gender. Indeks Pembangunan Gender menggunakan indikator yang sama dengan IPM namun lebih diarahkan untuk mengungkap ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG Kota Semarang mulai mengalami penurunan sejak tahun 2019 hingga tahun 2020, hal ini disebabkan AHH perempuan merupakan satu-satunya variable IPM yang lebih tinggi dibandingkan dengan AHH laki-laki, sedangkan variable komposit lainnya lebih rendah. Pada tahun 2021 IPG kembali meningkat menjadi sebesar 95,67% dan terus meningkat hingga tahun 2022 menjadi 95,93%. Pencapaian IPG Kota Semarang selalu melebihi IPG Provinsi Jateng dan IPG Nasional. Hal ini menandakan bahwa telah terdapat kesetaraan dan keadilan gender dalam hasil pembangunan manusia di Kota Semarang.



Sumber : BPS Nasional, 2023

Gambar 2.23

Perkembangan IPG Kota Semarang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2018-2022

IPG Kota Semarang pada tahun 2022 meningkat menjadi sebesar 95,93%, yaitu lebih tinggi dibandingkan dengan IPG Provinsi Jawa Tengah sebesar 92,83% dan Nasional sebesar 91,63%. Dibandingkan dengan 5 besar setara, Kota Semarang menempati posisi di bawah Kota Yogyakarta yang mencapai angka 98,48% seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.26.

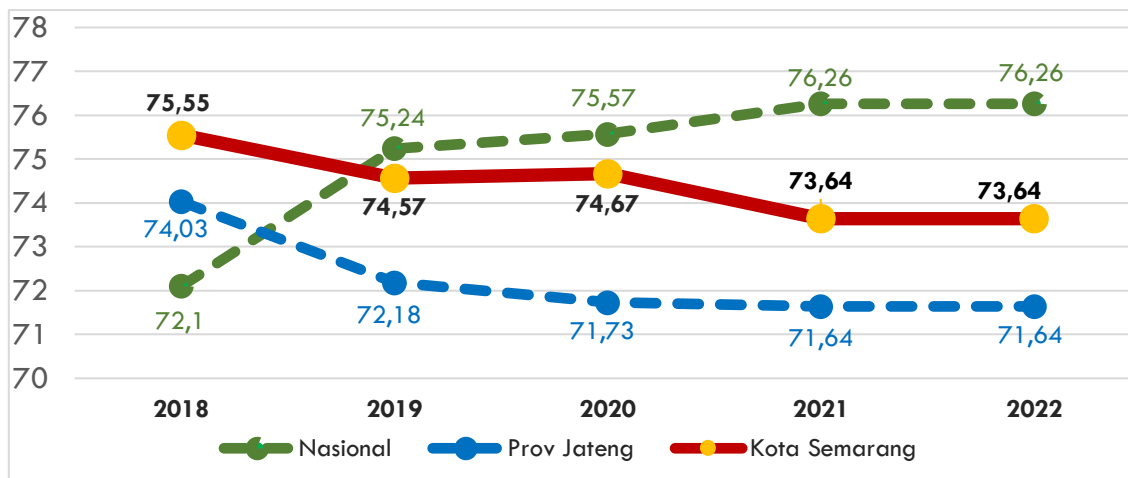
Perbandingan IPG Kota Semarang dengan kota besar setara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022

KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020	2021	2022
Semarang	95,82	95,55	95,49	95,67	95,93
Bandung	95,11	94,82	94,68	94,72	94,81
Surabaya	93,57	93,60	93,58	93,90	94,21
Medan	93,98	94,02	94,00	93,76	93,85
Makassar	94,53	94,48	94,47	94,44	94,52
Yogyakarta	98,48	98,09	98,16	98,32	98,48
Jawa Tengah	91,95	91,89	92,18	92,48	92,83
Nasional	90,99	91,07	91,06	91,27	91,63

Sumber: BPS Nasional, 2023

d. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks pemberdayaan gender (IDG) digunakan untuk mengukur sejauh mana keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, sehingga kebutuhan dan permasalahannya dapat mempengaruhi serta teraktualisasi dalam hasil keputusan kebijakan pembangunan yang menyangkut kepentingan perempuan baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Progres IDG dari tahun 2018-2022 terlihat pada gambar berikut ini.



Sumber: BPS Nasional, BPS Provinsi Jawa Tengah 2023

Gambar 2.24

Perkembangan IDG Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022

Capaian IDG Kota Semarang dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2018-2022) menunjukkan perkembangan fluktuatif dari sebesar 75,55 pada tahun 2018 turun menjadi 74,57 di tahun 2019 dan kemudian naik kembali menjadi 74,67 pada tahun 2020. Namun pada tahun 2021 dan 2022 capaian IDG Kota Semarang kembali turun menjadi 73,64, sedangkan IDG Nasional justru meningkat tajam menjadi sebesar 76,26 sebagai pencapaian tertinggi selama kurun waktu 2019-2022.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Pemerintah Kota Semarang dalam memberikan pelayanan, meningkatkan peran, prakarsa, dan keberdayaan masyarakat terlihat pada kinerja pembangunan pada masing-masing urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Semarang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Aspek pelayanan umum digunakan sebagai gambaran kinerja berbagai penyelenggaraan urusan pelayanan yang mencakup dari beberapa indikator, antara lain: 1) Indikator Kinerja Daerah, yang menjadi ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah, sekaligus internalisasi pencapaian 17 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kab/Kota; serta 2) Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, yang diatur lebih lanjut melalui Permendagri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan SPM yang diantaranya memuat mekanisme penghitungan Indeks Pencapaian SPM, dimana untuk capaian SPM sebelum tahun 2022 dilakukan hanya pada aspek penerima layanan, sedangkan mulai tahun 2022 Indeks Pencapaian SPM mempunyai bobot sebesar 80 % dari aspek penerima layanan dan 20 % lainnya dinilai dari capaian kualitas mutu layanan, sehingga Indeks Pencapaian SPM tahun 2022 tidak bisa disandingkan dengan tahun sebelumnya dengan adanya perbedaan penghitungan ini.

Adapun sebagai gambaran kinerja berbagai penyelenggaraan urusan pelayanan yang mencakup dari beberapa indikator sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut:

2.1.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau dari sisi aksesibilitas maupun pembiayaan dan kebutuhan pendidikan yang berkualitas, merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kota Semarang. Banyak hal yang telah dilakukan untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan di bidang Pendidikan,

diantaranya Pendampingan BOP/BOS Sekolah Swasta, Beasiswa Miskin, serta Beasiswa Miskin Berprestasi mulai jenjang Pendidikan SD/MI hingga jenjang Perguruan Tinggi. Gambaran capaian indikator pendidikan sesuai dengan kewenangan sebagaimana Undang Undang Nomor 23 tahun 2014, sampai dengan tahun 2022:

1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD usia 5-6 tahun sebesar 116,76% pada tahun 2022 meningkat signifikan dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 81,50%. Hal ini disebabkan tahun 2021 masih dalam kondisi pandemi covid sedangkan balita dan usia PAUD termasuk dalam kelompok rentan, sehingga orang tua siswa enggan mengikutkan putranya dalam kegiatan belajar mengajar secara langsung, dan ketika tahun 2022 sudah tidak lagi terdapat Pembatasan Kegiatan Masyarakat, PAUD kembali normal.

Disisi lain persentase Pendidik PAUD Berkualifikasi S1/D4 sebesar 81,33% pada tahun 2022 menurun jika dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 98 %. Hal ini disebabkan dengan meningkatnya peserta didik PAUD tentunya diperlukan tenaga pendidik yang lebih banyak, sehingga belum sepenuhnya memenuhi kualifikasi S1/D4, selain itu pendidika yang memenuhi kualifikasi diantaranya telah mendapatkan pekerjaan baru yang lebih sesuai dengan harapan. Untuk itu perlu kiranya peningkatan kesejahteraan dan kapasitas pendidik PAUD, sehingga meningkatkan minat dan kualitas pendidikan di jenjang PAUD yang terdapat 208 lembaga PAUD di Kota Semarang telah berakreditasi B.

2) Pendidikan Dasar

Pendidikan Dasar Sembilan tahun, terdiri dari dua jenjang pendidikan yaitu SD/MI dan SMP/MTs atau sederajat. Untuk mengukur keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan dasar digunakan indikator yang menggambarkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan keterjaminan.

APK dan APM SD/MI pada tahun 2022 masing-masing sebesar 103,71% dan 90,41% meningkat dari tahun 2021, sedangkan angka putus sekolah cenderung tetap ada sebesar 0,01%. Beberapa kondisi yang menurun pada tahun 2022 terjadi pada angka kelulusan sebesar 99,98%, persentase Pendidik SD/MI berkualifikasi S1/D4 menjadi sebesar 93,33% karena telah memasuki purna tugas,serta Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs.

Disisi lain APK dan APM SMP/MTs pada tahun 2022 menurun masing-masing menjadi sebesar 98,95 % dan 73,11 % jika dibandingkan dengan tahun 2021, demikian pula persentase Pendidik SMP/MTs berkualifikasi S1/D4 juga mengalami penurunan. Sedangkan kinerja terbaiknya mampu menekan Angka Putus Sekolah sehingga menjadi 0,01% dari tahun sebelumnya sebesar 0,06%, dan angka kelulusan menjadi sebesar 100%.

Pelayanan urusan Pendidikan di bidang sarana Gedung sekolah juga menjadi perhatian bersama. Untuk tahun 2022, baik kondisi bangunan sekolah SD/MI maupun SMP/MTS yang kondisinya baik semuanya menurun dimana untuk persentase jenjang SD dan SMP masing-masing sebesar 65% dan 80%. Hal ini disebabkan anggaran untuk perbaikan bangunan dilakukan refocusing untuk penanganan Covid-19, sehingga untuk selanjutnya perlu untuk menjadi prioritas agar tidak mengganggu proses belajar mengajar.

3) Pendidikan Non-Formal Pendidikan

Pendidikan Non formal menjadi penting dan strategis dalam upaya membantu mewujudkan peningkatan rata-rata lama sekolah. Pendidikan Non formal berupa pendidikan kesetaraan memiliki peran membantu peningkatan APK dan APM pada jenjang pendidikan masing-masing. Selain itu dengan

diselenggarakannya Kelompok Belajar Masyarakat (KBM) akan membantu meningkatkan ketrampilan penduduk putus sekolah atau tidak sekolah. Dalam mendukung pencapaian SDG's pendidikan sepanjang hayat dan inklusi, Kota Semarang sudah mengembangkan sekolah inklusi jenjang sekolah dasar sebanyak 21 sekolah, dan jenjang sekolah menengah pertama sebanyak 21 sekolah, jumlah kelembagaan PKBM yang berakreditasi minimal B (18 lembaga), jumlah LKP rujukan (5 lembaga) dan jumlah master penguji dan penguji kursus dan pelatihan mengikuti uji kompetensi (20 orang) telah memenuhi target yang ditetapkan. Secara lengkap perkembangan capaian indikator di bidang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.27.
Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pendidikan dasar:					
a.	Rasio Ketersediaan Sekolah (%)	34,10	34,02	33,68	34,19	36,81
b.	Rasio guru/murid	01:18	01:18	01:18	01:18	01:18
c.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata	01:20:32	01:20:32	01:20:32	01:20:32	01:20:32
2	Pendidikan Menengah					
a.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah (%)	28,63	28,32	27,92	27,86	26,86
b.	Rasio guru terhadap murid	01:17	01:17	01:17	01:17	01:17
c.	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	01:17:30	01:17:30	01:17:30	01:17:30	01:17:30
3	Angka Putus Sekolah					
a.	SD/MI	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
b.	SMP/MTs	0,03	0,02	0,04	0,06	0,01
4	Angka Kelulusan					
a.	Angka Kelulusan SD/MI (%)	99,98	99,98	99,98	100,00	97,22
b.	Angka Kelulusan SMP/MTs (%)	99,95	99,94	99,95	99,95	100,00
5	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	106,10	103,14	103,47	100,00	95,05
6	Fasilitas Pendidikan					
a.	SD/MI Kondisi Bangunan Baik	82,82	87,84	86,44	95,00	65,00
b.	SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	90,49	93,09	92,95	99,00	80,00
7	Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (%)					
	- Jenjang PAUD	71,63	80,44	72,87	98,00	81,33
	- Jenjang SD/MI	88,21	90,6	96,43	97,00	93,33
	- Jenjang SMP/MTs	85,15	86,98	96,95	98,00	88,57
8	Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi umum	NA	NA	NA	1,92	1,94

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
9	Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi umum	NA	NA	NA	1,78	1,72
Indikator SDGs						
10	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat (Tujuan 4 Target1)	92,08	96,1	97,66	90,00	90,41
11	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat (Tujuan 4 Target 1)	83,57	84,88	84,88	80,00	73,11
12	APK PAUD 5-6 Tahun (Tujuan 4 Target 2)	84,72	83,01	83,01	81,50	116,76
13	APK SD/MI (%) (Tujuan 4 Target 1)	112,76	110,59	111,67	100,00	103,71
14	APK SMP/MTs (%) (Tujuan 4 Target 1)	116,21	114,41	115,59	100,00	98,95
15	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) (Tujuan 4 Target 1)	10,51	10,52	10,53	10,55	10,80

Sumber: BPS, Dinas Pendidikan, Bappeda Kota Semarang, 2023

Adapun pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimum pada Bidang Urusan Pendidikan pada tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.28.

Indeks Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2018-2022

No	Indikator SPM	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022		
						Capaian Penerima Layanan Dasar	Capaian Mutu Minimal Layanan Dasar	IP SPM = 80% Capaian Layanan + 20% Capaian Mutu layanan
1	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD: Jumlah Peserta Didik Usia 5-6 Tahun ----- ----- x 100% Jumlah Penduduk Usia 5-6 Tahun	87,82 % <u>46.492</u> 52.940	60,79% <u>31.429</u> 51.705	86,50% <u>44.233</u> 51.135	107,97% <u>54.234</u> 50.231	89,53% <u>44.656</u> 49.880	2,5 % <u>740</u> 29.646	72,12% (Tuntas Pratama)
2	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dlm pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs): Jumlah Peserta Didik Usia 7-15 Th ----- ----- x 100% Jumlah Penduduk Usia 7-15 Th	80,88 % <u>190.684</u> 235.771	79,48% <u>187.578</u> 236.011	77,95% <u>185.604</u> 238.093	95,56% <u>231.952</u> 242.351	100,81% <u>242.758</u> 240.798	6,64% <u>10.771</u> 162.312	81,98% (Tuntas Madya)
3	Jumlah Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dlm pendidikan dasar (SD/MI): Jml Peserta Didik Usia 7-12 Th ----- ----- x 100% Jumlah Penduduk Usia 7-12 Th				95,59% <u>154.453</u> 161.580	103,45% <u>165.544</u> 160.018	8,35% <u>9.662</u> 115.673	84,43% (Tuntas Madya)

4	Jumlah Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dlm pendidikan Menengah Pertama (SMP/MTs): Jml Peserta Didik Usia 13-15 Th ----- x 100% Jumlah Penduduk Usia 13-15 Th				95,51% <u>77.147</u> 80.771	95,59% <u>77.214</u> 80.780	2,38% <u>1.109</u> 46.639	76,95% (Tuntas Pratama)
5	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan: Jml Peserta Didik Kesetaraan Usia 7-18 thn ----- x 100% Jml penduduk Usia 7-18 th yang belum menyelesaikan Pend Dasar dan/atau Menengah	0,38 % <u>1.154</u> 303.281 (dengan pembagi Jml penduduk Usia 7-18 th)	7,13 % <u>3.225</u> 45.235 (dengan pembagi Jml penduduk Usia 7-18 th)	6 % <u>1.650</u> 27.501 (dengan pembagi Jml penduduk Usia 7-18 th)	26,22% <u>1.617</u> 6.166 (dengan pembagi Jml penduduk Usia 7-18 th yang belum menyelesaikan Pend Dasar dan/atau Menengah)	84,12% <u>3.226</u> 3.835 (dengan pembagi Jml penduduk Usia 7-18 th yang belum menyelesaikan Pend Dasar dan/atau Menengah)	10,17% <u>328</u> 3.226	69,33% (Tuntas Muda)

Sumber: Laporan SPM, Bag Kerjasama dan Otda, Dinas Pendidikan, 2023

Dari data tersebut diatas, jika dilihat dari aspek capaian penerima layanan, secara umum capaian SPM tahun 2022 meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021. Namun karena penerapan penghitungan SPM sesuai Permendagri Nomor 59 tahun 2021 telah melibatkan capaian mutu layanan dengan bobot 20%, sehingga sangat mempengaruhi hasil Indeks pencapaian SPM pada setiap indikator yang belum bisa mencapai kriteria tuntas paripurna. Permasalahan yang dijumpai diantaranya terdapat kebijakan untuk melakukan efisiensi anggaran terhadap beberapa kegiatan yang telah direncanakan, selain itu juga pemenuhan tenaga pendidik sesuai kualifikasi dan pemerataan mutu guru diharapkan dapat mengungkit peningkatan kualitas Pendidikan terutama dalam meningkatkan nilai literasi dan numerasi siswa. Disamping itu juga masih terdapat anak putus sekolah meskipun kebijakan sekolah gratis dan juga beasiswa siswa miskin dan miskin berprestasi semakin diperluas pemanfaatannya. Perlu upaya nyata dan keseriusan berbagai pihak dalam peningkatan Indeks SPM Bidang Urusan Pendidikan, diantaranya koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, data kependudukan Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil), Data Kementerian Sosial (BDT), serta Pemerintah Provinsi terkait kewenangan jenjang SMA/MA juga Paket C.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Pada urusan kesehatan, selain dari pencapaian indikator kinerja yang ada, Kota Semarang memperoleh beberapa penghargaan atas pencapaian keberhasilan pembangunan pada urusan kesehatan, diantaranya:

TOP Inovasi Pelayanan Publik Terpuji dengan Inovasi WARAK NGENDOG (Lawan Corona Virus Kota Semarang dengan Dukungan Integrasi Program dan Bergerak Bersama) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Selain itu juga Indonesia Healthcare Innovation Award kategori GERMAS-GOLD AWARD Inovasi Pelangi Nusantara Penanganan Stunting dan Gizi Buruk di Semarang dari IndoHCF (Indonesia Healthcare Forum).

Terkait percepatan penanggulangan stunting di Kota Semarang telah berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 21,30% pada tahun 2021 menjadi sebesar

10,40% pada tahun 2022. Penanganan stunting ini dilakukan secara holistik dan integrative melalui inovasi program yang dilakukan diantaranya: Pelangi Nusantara yang didalamnya terdapat kegiatan Wisata Edukasi Gizi, Duta Kesehatan, Kebun Gizi, Penyusunan dan Pembuatan menu Balita dan Ibu Hamil. Selain itu juga Dashat (Dapur Sehat Atasi Stunting), Kegiatan Daycare di Rumah Pelita (Rumah Penanganan Stunting Lintas Sektor bagi Baduta). Selain itu Kota Semarang sudah mempunyai SK TPPS, Tim TPPS, penyelenggaraan kegiatan melalui konvergensi aksi, serta Perwal Percepatan Penurunan Stunting yang mengacu pada perpres

Kinerja dalam penanganan Penyakit Menular AIDS, TB dan Malaria (ATM) perlu ditingkatkan melibatkan lintas sector dan masyarakat sipil peduli terhadap ATM, karena trendnya menunjukkan kecenderungan menurun.

Adapun kinerja pada urusan kesehatan selama periode 2018-2022 sebagai berikut:

Tabel 2.29.

Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Daerah / SDGs	Realisasi Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk x 1000	0,20	0,21	0,22	0,229	0,24
2	Rasio Rumah Sakit per 100.000 penduduk	1,6	1,6	2	2	1,9
3	Rasio dokter per satuan penduduk x 1000	1,65	2,03	2,16	2,21	2,43
4	Rasio tenaga medis per satuan penduduk x 1000	2,59	2,78	2,96	2,94	3,36
5	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	NA	NA	0,29%	0,31%	0,32%
6	Persentase RS Rujukan Tingkat kota yang terakreditasi	NA	NA	89,65%	78,12%	65,63%
7	Nilai IKM Pelayanan Kesehatan RS	85,01	90,01	96,11	95,90	96,98
8	Nilai Kinerja BLUD Baik	73,30	70,20	71,85	73,20	87,5
Indikator SDGs						
9	Cakupan kelurahan UCI (%) (1.4.1.(b))	100	100	98,7	100	100
10	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%)	100	100	100	100	100
11	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	100	100	100	100	100
12	Cakupan puskesmas (%)	231,25	231,25	231,25	231,25	237,5
13	Cakupan pembantu puskesmas	20,9	21,46	21,46	21,46	26,38
14	Prevalensi gizi kurang dan gizi buruk (Wasting: BB/TB) pada Balita (1.3.1.(a))	NA	NA	NA	2,20	1,16
15	Cakupan pertolongan persalinan di faskes (1.4.1.(a))	100	100	100	100	100
16	Rasio akseptor KB per 1000 PUS (1.4.1.(c))	78,1	77,47	76,94	73,88	78
17	Prevalensi pendek dan sangat pendek (stunting: TB/U) pada balita (Balita) (2.2.1*)	2,5	2,57	3,13	3,10	1,55
18	% kasus stunting anak dibawah dua tahun (Baduta) (2.2.1.(a))	2,73	2,48	2,48	2,81	0,27
19	Bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif (2.2.2.(b))	68,22	69,39	71,31	71,91	74,33
20	Persentase penduduk yang memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan (3.1.1*)	100	95,8	100	94,24	99,24
21	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup (3.1.2*)	75,77	75,8	71,35	95,32	67,25

No	Indikator Kinerja Daerah / SDGs	Realisasi Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
22	Jumlah kasus kematian ibu	19	18	17	21	15
23	Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (3.1.2.(a))	99,98*	100	100	100	100
24	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)(3.2.1*)	99,98*	100	100	100	100
25	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup. (3.2.1*)	7,46	7,29	7,01	6,95	6,5
26	Cakupan Pelayanan kesehatan bayi baru lahir. (3.2.2*)	95,99	100	100	100	100
27	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. (3.2.2(a))	6,38	6,15	6,09	6,04	5,6
28	Kelurahan UCI (3.2.2.(b))	100	100	98,7	100	100
29	Prevalensi HIV (3.3.1(a))	0,081	0,098	0,111	0,123	0,123*
30	cakupan pelayanan kesehatan orang dengan TB (3.3.1(b))	104,5	106	79,18	100	100
31	Prevalensi Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk (3.3.1(b))	338	415	293	260	260*
32	Prevalensi penduduk malaria per 1000 penduduk (3.3.3*)	0,03	0,03	0,018	0,035	0,041
33	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan Malaria	100	100	100	100	100
34	Jumlah Kasus Hepatitis B (3.3.4.(a))	177	424	441	406	406*
35	Jumlah Kasus Kusta (3.3.5*)	33	13	8	10	10*
36	Cakupan Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi (3.4.1.(b))	95,41	97,51	88,6	100	100
37	Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat (3.4.2(a))	100	119,7	100	100	100
38	Cakupan peserta KB aktif (3.7.1*)	78,1	77,47	76,94	76,94	78

Sumber: BPS & LKPJ Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2023

Dalam pemenuhan pelayanan dasar di bidang urusan kesehatan, pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimum pada tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.30.
Indeks Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2018-2022

No	Indikator SPM	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022		
						Capaian Penerima Layanan Dasar	Capaian Mutu Minimal Layanan Dasar	IP SPM = 80% Capaian Layanan + 20% Capaian Mutu layanan
1	Pelayanan Kesehatan ibu hamil: Jml bumil yg dilayani SS ----- ---- x 100% Jml sasaran ibu hamil	100% <u>26.131</u> 26.131	100% <u>25.655</u> 25.655	100% <u>23.885</u> 23.885	100% <u>22.040</u> 22.040	100% <u>22.872</u> 22.872	96,17% 3.222.003 3.222.168	99,23% (Tuntas Utama)

No	Indikator SPM	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022		
						Capaian Penerima Layanan Dasar	Capaian Mutu Minimal Layanan Dasar	IP SPM = 80% Capaian Layanan + 20% Capaian Mutu layanan
2	Pelayanan Kesehatan ibu bersalin = Jml ibu bersalin yg dilayani SS ----- ----- x 100% Jml sasaran ibu hamil	100% <u>25.035</u> 26.131	100% <u>23.796</u> 23.796	100% <u>23.885</u> 23.885	100% <u>22.040</u> 22.040	100% <u>22.330</u> 22.330	94,89% <u>71.161</u> 71.326	98,98% (Tuntas Utama)
3	Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir = Jml BBL yg dilayani SS (KN1) ----- ----- x 100% Jumlah Bayi Baru Lahir (kelahiran hidup)	99,99% <u>25.073</u> 25.074	100 % <u>25.073</u> 25.073	100,02% <u>23.829</u> 23.825	100% <u>22.030</u> 22.030	100% <u>22.304</u> 22.304	94,37% <u>108.273</u> 108.519	98,87% (Tuntas Utama)
4	Pelayanan Kesehatan Balita = jml balita yg dilayani SS ----- ----- x 100% Jml balita di wilayah kerja	100,03% <u>132.634</u> 132.600	100 % <u>100.292</u> 100.292	88,78 % <u>65.137</u> 73.369	100% <u>100.403</u> 100.403	100% <u>89.239</u> 89.239	83,80% <u>1.067.404</u> 1.072.599	96,76% (Tuntas Utama)
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (kelas VII) jml anak usia Dikdas yg dilayani SS ----- ----- x 100% jml semua anak usia dikdas	100% (kelas VII) <u>49.873</u> 49.873	100% <u>218.841</u> 218.841	97,81% <u>215.016</u> 219.821	100% <u>227.547</u> 227.547	100% <u>227.182</u> 227.182	99,52% <u>937.073</u> 937.134	99,90% (Tuntas Utama)
6	Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif = usia pengunjung 15-59 tahun ----- ----- x 100% Jumlah warga negara usia 15-59 tahun	100,95% <u>584.705</u> 578.607	103,25% <u>1.157.214</u> 1.194.808	100% <u>1.014.944</u> 1.014.944	100% <u>1.112.588</u> 1.112.588	100% <u>1.125.431</u> 1.125.431	78,46% <u>2.255.589</u> 2.256.570	95,69% (Tuntas Utama)
7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut = usia pengunjung >60 tahun ----- ----- x 100% Jumlah WN usia > 60	99,83% <u>179.859</u> 178.972	100,49% <u>179.859</u> 178.972	85,98% <u>154.847</u> 180.096	100% <u>184.027</u> 184.027	100% <u>164.287</u> 164.287	78,46% <u>497.514</u> 498.495	95,69% (Tuntas Utama)
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi = jml pendrt hipert > 15 th ----- ----- x 100% Jml est penderita hipert >15th	95,41% <u>232.180</u> 238.120	97,51% <u>232.180</u> 238.120	88,60% <u>255.727</u> 288.619	100% <u>289.903</u> 289.914	100% <u>290.910</u> 290.910	92,76% <u>295.527</u> 295.773	98,55% (Tuntas Utama)
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) = jml penderita DM > 15 th	164,23% <u>38.899</u> 39.902	97,49% <u>38.899</u> 39.902	100% <u>40.303</u> 40.303	100% <u>40.483</u> 40.483	100% <u>40.623</u> 40.623	86,29% <u>85.863</u> 86.204	97,26% (Tuntas Utama)

No	Indikator SPM	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022		
						Capaian Penerima Layanan Dasar	Capaian Mutu Minimal Layanan Dasar	IP SPM = 80% Capaian Layanan + 20% Capaian Mutu layanan
	----- ----- x 100% jml est penderita DM usia >15 th							
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGI) = jml ODGI berat di wil kerja kota ----- ----- x 100% Jml ODGI Berat berdsr proyeksi wil kerja kota	100%	119,70% <u>2.497</u> 2.086	100 % <u>4.172</u> 4.172	100% <u>4.215</u> 4.215	100% <u>4.218</u> 4.218	96,79% <u>4.413</u> 4.422	99,36% (Tuntas Utama)
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB) = jml orang terduga TBC yg dilak pemriksa ----- -----x 100% Jml orang yg terduga TBC kurun waktu 1 th	104,52%	106% <u>14.7351</u> 13.901	34,55 % <u>7.770</u> 22.487	100% <u>15.853</u> 15.853	100% <u>37.270</u> 37.270	93,52% <u>285.208</u> 285.848	98,70% (Tuntas Utama)
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV = jml org dgn resiko terinfeksi HIV yg mendpt pelynan sesuai stndar ----- ----- x 100% Jml orang dgn risiko terinfeksi HIV di Kab/Kota	102,97%	103,77% <u>42.253</u> 40.716	98,81% <u>37.681</u> 38.136	99,72% <u>27.790</u> 27.869	100% <u>33.592</u> 33.592	91,10% <u>863.398</u> 864.098	98,22% (Tuntas Utama)

Sumber: Laporan SPM, Bag Otda, Dinas Kesehatan, 2023

Mendasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), untuk penghitungan capaian SPM termasuk pada bidang kesehatan sejak tahun 2022 dinilai dari dua aspek, yaitu aspek capaian penerima layanan dan aspek mutu layanan. Dan untuk bidang Kesehatan, capaian SPM tahun 2022 dari aspek penerima layanan sudah tercapai 100 % sedangkan capaian dari aspek mutu layanan sebesar 90,51 %, karena masih terdapat kekurangan tenaga kesehatan diantaranya dokter/dokter spesialis kebidanan dan kandungan, spesialis anak, dokter umum, ahli gizi, kader kesehatan, serta tenaga non kesehatan terlatih dari kebutuhan yang ada. Sehingga dari hasil pembobotan akhir, capaian SPM Bidang Kesehatan pada tahun 2022 sebesar 98,10% dengan kategori tuntas utama. Belum tercapainya Indeks pencapaian SPM bidang urusan Kesehatan pada level tuntas peripurna, diantaranya disebabkan belum terpenuhinya kebutuhan jenis tenaga kesehatan terutama tenaga non kesehatan terlatih, kader kesehatan, sarana prasarana, serta penetapan estimasi sasaran membutuhkan upaya yang lebih karena terbagi berdasarkan wilayah domisili sasaran, selain belum optimalnya hubungan lintas sektoral.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat diukur diantaranya dari kemantapan jalan, pengendalian banjir, fungsinya drainase dan irigasi, menurunnya areal kawasan kumuh, pengelolaan sarpras persampahan, cakupan pelayanan air minum, pengolahan air limbah domestik dan lainnya. Kondisi ini dapat terlihat pada tabel berikut.

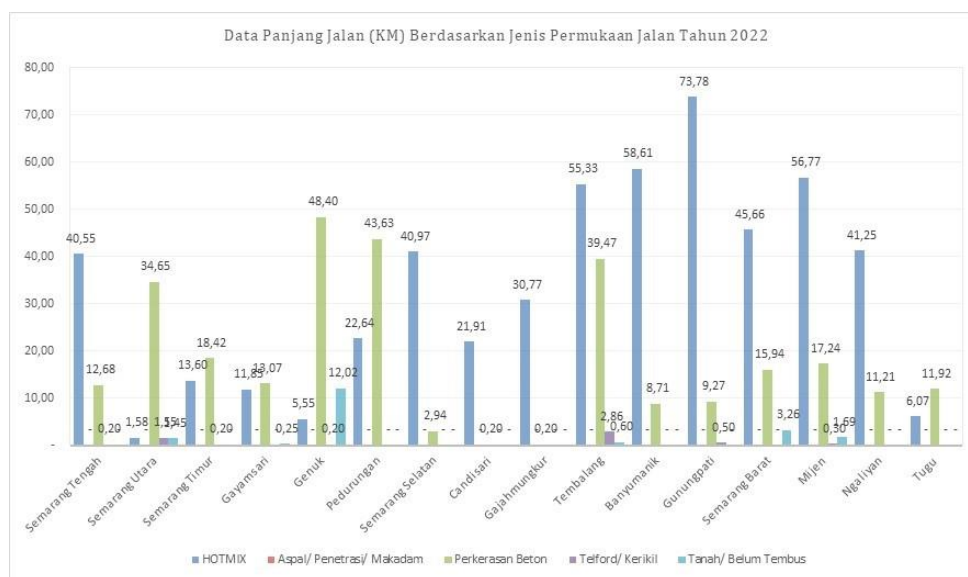
Tabel 2.31.
Realisasi Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Daerah / SDGs	Realisasi Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (%)	NA	NA	NA	93,74	93,74*
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS (%)	NA	NA	NA	97,25	97,25*
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)	77	78	79	80,64	81,8
4	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	89,54% (752,05km)	89,65% (752,97km)	92,38% (775,88km)	92,52% (778,12km)	90,42% (759,42km)
5	Rasio kepatuhan IMB (%)	53,98	54,49	55,04	55,56	51,25
6	Persentase luas sawah beririgasi (%)	43	43	43	43	43
7	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	NA	NA	35	35,74	35,74
8	Persentase areal kawasan kumuh (%)	NA	0,3	0,21	84	76,62
9	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	14,93%	18,36%	22 %	24 ,35%	26,18 %
10	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	80	80	95,85	82,50	82,50
11	Persentase sampah yang terangkut dari TPS ke TPA	88,5 %	89%	89,5%	90%	90,5%
12	Rumah tangga ber-Sanitasi (%)	86,26	86,46	86,51	98,93	98,94
13	Persentase kawasan banjir dan rob (%)	4,00 (Hanya jalan dan permukiman)	4,00 (Hanya jalan dan permukiman)	1,30 (Hanya jalan dan permukiman)	3,4 (Jalan, permukiman, tambak, sawah)	3,48 (Jalan, permukiman, tambak, sawah)
14	Persentase Kawasan Banjir (%)	NA	NA	NA	3,40	2,37
15	Persentase Kawasan Rob (%)	NA	NA	NA	2,00	1,11
16	Persentase lampu penerangan jalan umum yang dalam kondisi baik (%)	94,09%	95,87%	95,87%	96,96%	97,46%
	- Jumlah lampu penerangan jalan umum yang dalam kondisi baik	70.452	73.141	73.141	74.815	77.557
	- Jumlah lampu penerangan jalan umum di wilayah Kota Semarang	74.878	76.292	76.292	77.161	77.557
Indikator SDGs						
17	Persentase rumah tangga yg terlayani air minum	95,33	95,40	96,28	97,14	98,94
18	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	92,15	92,15	96,28	96,28	96,28

No	Indikator Kinerja Daerah / SDGs	Realisasi Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
19	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	95	95	91	91	91
20	Jumlah IPLT (Instalasi Pengolah limbah Tinja) yang terbangun	1	1	1	1	1
21	Indeks kualitas air	31,01	48,75	50,44	50	33,76
22	Rasio Ruang Hijau per Satuan Luas Wilayah Kota Semarang (%)	44,12	44,17	44,21	44,23	44,36
23	Persentase kesesuaian Tata Ruang	81,76	95	96,73	100	100

Sumber: BPS, Dinas Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perkim, 2023

Untuk pembangunan infrastruktur bidang jalan melalui Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 621/360 Tahun 2018 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kota dan Fungsinya Sebagai Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan di Wilayah Kota Semarang, ditetapkan total panjang jalan yang merupakan kewenangan Pemerintah Kota Semarang adalah sepanjang 839.901 meter. Dari total panjang jalan tersebut terbagi atas jenis-jenis perkerasan yang berbeda dan terbanyak jalan di Kota Semarang didominasi oleh perkerasan aspal *hot mix* dengan proporsi mencapai 62,73% (526,873 km); disusul dengan perkerasan jenis beton blok/ rigid sebesar 34,28 % (287,934 km); telford/kerikil sebesar 0,69 % (5,812 km) dan tanah/belum tembus sebesar 2,29% (19,273 km). Khusus untuk jalan dengan kondisi tanah secara keseluruhan masih terdapat pada 6 kecamatan, namun yang masih dominan berlokasi di wilayah Kecamatan Genuk sepanjang 12,019 km (Jl. Babon Inspeksi Barat, Utara dan Timur), Semarang Barat sepanjang 3,259 km (Jl. menuju maron), Kecamatan Mijen sepanjang 1,694 km (Jl. Amarta, Jl. Banjarsari, Jl. Kebonroto), Kecamatan Semarang Utara sepanjang 1,453 km (Jl. Tambakrejo Tanggul), Kecamatan Tembalang sepanjang 0,6 km (Jl. Telumpak), dan Kecamatan Gayamsari sepanjang 0,248 km (Jl. Tanggungrejo). Secara lengkap Kondisi tersebut terbagi ke dalam wilayah kecamatan seperti terlihat pada profil sebagai berikut:



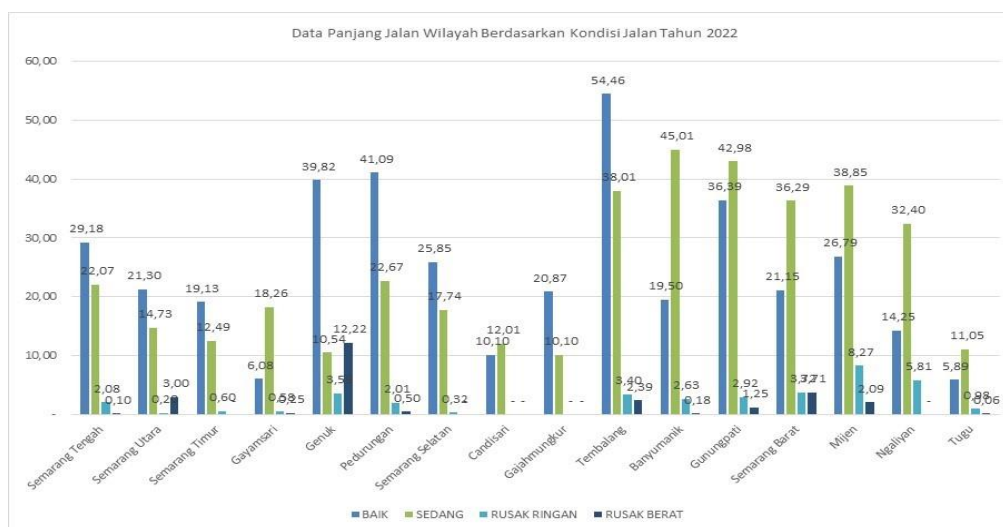
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, 2023

Gambar 2.25

Jenis Perkerasan Jalan Kota Semarang Tahun 2022

Dari total panjang jalan sesuai surat keputusan Wali Kota tentang status jalan sepanjang 839,901 meter, pada tahun 2022 jalan dalam kondisi baik 381,72 km (45,45%), kondisi sedang sepanjang 377,70 km (44,97%), atau jalan kondisi mantap sepanjang 759,42 km atau sebesar 90,42%, sisanya adalah kondisi rusak ringan sebesar 52,14 km (6,21%) dan kondisi rusak berat sebesar 28,34 km (3,37%). Sedangkan jika dilihat secara kewilayahan, kondisi jalan rusak berat banyak terjadi di wilayah-wilayah dengan kondisi tanah yang cenderung labil dan intensitas yang

cukup tinggi antara lain: Kecamatan Genuk, Tembalang dan Mijen, serta Semarang Barat. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan Pemerintah Kota Semarang dalam pengalokasian program dan kegiatan selanjutnya.



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang data diolah, 2023

Gambar 2.26

Kondisi Jalan Kota Semarang Tahun 2022 per Wilayah Kecamatan

Untuk penanganan rob dan banjir menjadi tugas yang sangat berat bagi Pemerintah Kota Semarang terutama saat datangnya musim penghujan. Potensi letak Kota Semarang yang berada di pinggir pantai menjadikan Kota Semarang sebagai daerah berpotensi mengalami banjir dan rob. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk mengatasi kawasan banjir dan rob, diantaranya dengan penataan sungai besar, normalisasi saluran drainase, pemeliharaan jaringan irigasi, operasionalisasi dan pemeliharaan stasiun pompa banjir, operasionalisasi dan pemeliharaan embung/penampung air lainnya, serta pemeliharaan polder/kolam retensi. Namun demikian, dikarenakan terdapat perubahan variabel dalam perhitungan kawasan banjir dan rob, dimana untuk tahun 2022 selain jalan dan permukiman juga memperhitungkan komponen kawasan ladang dan persawahan yang terdampak banjir dan rob, mengakibatkan terjadinya peningkatan persentase kawasan banjir dan rob dari sebesar 3,4% di tahun 2021 meningkat menjadi sebesar 3,48% tahun 2022 dengan rincian luasan banjir sebesar 7,91 ha, genangan seluas 877,31 ha dan rob seluas 416,95 ha, sehingga total seluas 1.302,16 ha atau sebesar 3,48% dari seluruh luas wilayah Kota Semarang.

Kondisi infrastruktur Kota Semarang dilihat dari Penerangan Jalan Umum diharapkan menunjukkan peningkatan utamanya wilayah pinggir karena hal ini juga sedikit banyak akan mengurangi potensi kerawanan kejahatan. Kebutuhan titik lampu yang terpasang di seluruh wilayah Kota Semarang sebesar 79.580 titik, perhitungan ini diperoleh dari panjang jalan Kota dan jalan lingkungan sepanjang 2.785,28 km dibagi 35 m (kebutuhan ideal penerangan jalan). Pemenuhannya sebanyak 79.580 titik dilakukan secara bertahap dengan mengoptimalkan sumber pembiayaan diluar APBD. Selain dari aspek pemenuhan titik lampu, dalam rangka pengendalian emisi Gas Rumah Kaca dan juga penghematan energi, Kota Semarang secara bertahap juga melakukan retrofit terhadap PJU konvensional menjadi PJU berbasis LED.

Kinerja dalam bidang persampahan menuju “*waste to energy*” menunjukkan perkembangan yang signifikan, berkat sinergitas peran masyarakat dan *stakeholder* persampahan lainnya. Pada tahun 2022 produk sampah harian diperkirakan sebesar 1.181,06 ton, dimana yang terangkut masuk ke TPA Jatibarang lebih dari 90,50% per hari dengan komposisi material organik sebesar $\pm 62\%$ dan sisanya material anorganik. Mengingat sumbangan terbesar berasal dari sampah domestik, besar

kiranya peran masyarakat dalam mengurangi beban TPA melalui pilah sampah/bank sampah, sedangkan sisanya menjadi tugas Pemerintah dalam mengelolanya. Dalam upaya penanganan sampah dan pengurangan sampah di Kota Semarang, telah dilakukan beberapa sebagai upaya pengelolaan sampah dari hulu ke hilir diantaranya Gerakan Implementasi Ekonomi Sirkular pengelolaan Sampah Hulu Perkotaan berbasis Entitas berkelanjutan (GERAI ESHP), Patroli Pakde Uzt, gerakan peduli TPS bersih bermanfaat, pemanfaatan sampah organik menjadi ecoenzym, budidaya manggot/BSF pemakan sampah organik, Biowash, dan penguatan kelembagaan KSM Kebersihan di 16 Kecamatan di Kota Semarang.

Capaian Ruang Terbuka Hijau (RTH) tahun 2021 sebesar 37,51% atau seluas 14.002,67 Ha, menurun sebesar 6,7% dari tahun 2020 dikarenakan adanya penyesuaian dengan Perda Nomor 5 tahun 2022 tentang Revisi RTRW Kota Semarang tahun 2011-2031. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan Perencanaan Tata Ruang mencapai 98,73%, sehingga masih terdapat sekitar 1,27% wilayah yang belum sesuai dengan peruntukan tata ruang.

Persentase kepatuhan bangunan ber-IMB pada tahun 2022 sebesar 51,25% dari target 59,6% (tercapai 85,99%) melalui penetapan 840 Rekomendasi Teknis IMB dan 1.060 Rekomendasi Teknis PBG ditahun berjalan. Capaian kinerja menunjukkan kenaikan kepatuhan bangunan ber-IMB/PBG walaupun dari jumlah permohonan perijinan mengalami penurunan akibat adanya penyesuaian perubahan kebijakan perijinan bangunan dari IMB menjadi PBG yang mana prosesnya harus melalui aplikasi Pemerintah Pusat yaitu SIMBG. Kebijakan ini membutuhkan penyesuaian prosedur pengajuan permohonan yang tadinya manual menjadi berbasis system yang memaksa baik operator maupun pemohon harus memiliki wawasan IT, sehingga diawal masa transisi rekomtek IMB/PBG yang dikeluarkan cenderung lebih sedikit.

Indikator persentase reklame berizin dengan realisasi 2022 sebesar 78,81% atau naik dibandingkan tahun 2021 sebesar 75,83%. Kenaikan ini disebabkan makin intensifnya pengawasan dan penertiban reklame di Kota Semarang.

Dalam pemenuhan pelayanan dasar di bidang Urusan Pekerjaan Umum, pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimum tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.32.

Indeks Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum
Tahun 2018 – 2022

No	Indikator SPM	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022		
						Capaian Penerima Layanan Dasar	Capaian Mutu Minimal Layanan Dasar	IP SPM = 80% Capaian Layanan + 20% Capaian Mutu layanan
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari hari Jml yang dilayani Sesuai Standar ----- ---x 100 % Jml sasaran (1 SR melayani 8 jiwa)	95,33%	95,40%	96,28% <u>1.623.225</u> 1.685.909	97,14% <u>1.638.931</u> 1.687.222	98,94% <u>556.977 RT</u> 562.943 RT	100% 60 liter /org/hari, tdk keruh, berwarna dan berasa	99,15% (Tuntas Utama)
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Jml yang dilayani Sesuai Standar ----- ---x 100 % Jml sasaran	86,26%	86,46%	86,51% <u>382.195 SRT</u> 441.814 SRT	98,93% <u>556.442</u> 562.444	98,94% <u>556.991 RT</u> 562.943 RT	98,94% <u>556.991 RT</u> 562.943 RT	98,94% (Tuntas Utama)

Sumber: Laporan SPM, Bag Otda, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2023

Capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dari tahun 2018 sampai tahun 2022 menunjukkan trend positif. Untuk cakupan layanan pemenuhan air minum sebanyak 556.977 RT dengan 180.372 RT diantaranya terlayani PDAM (jaringan perpipaan) dan sisanya sebanyak 376.605 RT melalui jaringan Non Perpipaan, dengan menggunakan asumsi 1 Rumah Tangga (RT) melayani 8 jiwa dengan standar mutu 60 liter /orang /hari dengan kondisi air tidak keruh, tidak berasa dan tidak berwarna. Masih belum maksimalnya capaian layanan pada pelayanan penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum berkaitan dengan belum terbangunnya IPAL limbah domestik skala perkotaan maupun skala kawasan, hal ini berpengaruh pada kualitas air sungai. Dengan optimalisasi SPAM Semarang Barat dan perluasan layanan PDAM Kota Semarang, serta pembangunan sumur air tanah di 11 lokasi yang tersebar pada Kecamatan Gunungpati, Tembalang, Ngaliyan, Mijen, Candisari, Tugu dan Pedurungan, diharapkan penyediaan kebutuhan pokok air minum masyarakat Kota Semarang akan terpenuhi.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kinerja pada penyelenggaraan pembangunan urusan Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman pada tahun 2022 terlihat sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.33.

Realisasi Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio permukiman layak huni	97,44	97,91	98,17	98,63	98,34
2	Luas Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	0,29 (Dari 415,83 Ha)	0,23 (Dari 415,83 Ha)	0,21 (Dari 415,83 Ha)	0,14 (Dari 415,83 Ha)	76,62% (dari 431,54 Ha) (Eksist 330,65 Ha)
3	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah tidak layak huni)	NA	NA	934	1.670	1.713
4	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	NA	NA	100 (9 perum)	100 (10 perum)	100 (25 perum)
5	Rasio tempat pemakaman umum per 1.000 penduduk	50,08	47,09	45,50	41,01	40,05

Sumber: Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Kota Semarang, 2023

Berdasarkan SK Wali Kota Semarang No. 050/801/2014 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Semarang, ditetapkan Luas Permukiman Kumuh sebesar 415,83 ha atau 4,16 km² atau mencapai 1,11% dari wilayah Kota Semarang. Dan kinerja sampai dengan tahun 2021, luas lingkungan permukiman kumuh yang belum tertangani menyisakan seluas 52,85 Ha. Pada tahun 2022 dikarenakan adanya update SK Kumuh pada tahun 2021 (SK Walikota Semarang Nomor 050/275) dengan luas Kawasan kumuh terbaru sebesar 431,54 Ha dan perubahan definisi operasional menyesuaikan dengan definisi operasional sesuai Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dimana sebelumnya pembagi indikator Luas Lingkungan Permukiman kumuh adalah luas Kota Semarang menyesuaikan menjadi luas Kawasan Kumuh berdasarkan SK Kumuh. Sehingga capaian Luas Lingkungan pemukiman kumuh (%) mengalami perubahan capaian dari sebelumnya pada tahun 2021 sebesar 0,14 % dari 415,83 Ha menjadi 76,62 % dari 431,54 Ha pada tahun 2022, atau sebesar 330,65 Hektar. Kinerja lain dalam pemenuhan pelayanan dasar di bidang Sarana Prasarana Lingkungan

Permukiman, pada tahun 2022 persentase rumah layak huni cenderung konsisten sebesar 98,34%

Adapun Pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimum pada Bidang Urusan Perumahan dan Permukiman tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.34.
Indeks Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2018 – 2022

No	Indikator SPM	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022		
						Capaian Penerima Layanan Dasar	Capaian Mutu Minimal Layanan Dasar	IP SPM = 80% Capaian Layanan + 20% Capaian Mutu layanan
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana	100%	100 %	100% <u>2 unit</u> 2 unit	100% <u>17 unit</u> 17 unit	100% <u>8 unit</u> 8 unit	100% <u>8 unit</u> 8 unit	100% (Tuntas Paripurna)
2	Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	100%	100%	100% <u>97 KK</u> 97 KK	100% Tidak ada relokasi	100% <u>38 KK</u> 38 KK	100% <u>38 KK</u> 38 KK	100% (Tuntas Paripurna)

Sumber: Laporan SPM, Bag Otda, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2023

Capaian SPM pada bidang Urusan Perumahan Rakyat selalu menunjukkan predikat tuntas paripurna, dengan jumlah sasaran penerima layanan yang fluktuatif. Kendala dalam pelaksanaan dalam rehabilitasi rumah korban bencana diantaranya adalah kesulitan dalam mengakses rumah korban bencana pada saat kendaraan mengangkut material saat pengerjaan rehabilitasi rumah korban bencana, sehingga karena harus dilakukan secara manual, sehingga waktu pengerjaan menjadi lebih lama.

- e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Perkembangan dalam urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.35.
Realisasi Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Daerah / SDGs	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	1,04	0,93	0,93	0,93	0,69
2	Rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota	0,84	0,92	0,93	0,81	0,81*
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	34,78	34,78	30,43	30,43	30,43*
4	Partisipasi Pemilih Pada Pilpres/Pileg/Pilkada (%)	72,80	82,33	68,62	Tidak ada pemilu	Tidak ada pemilu
5	Tingkat waktu tanggap (response time rate / 15 Menit setelah pengaduan) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	98,78	50,26	77,04	79,87	90,13
6	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	60%	60%	62%	62%	64% (32 dari 50 perda)
7	Indeks Risiko Bencana (1.5.1.(e))	130,60	120,75	113,83	108,63	103,49
8	Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran	NA	NA	77,04	77,04	90,13

No	Indikator Kinerja Daerah / SDGs	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Indikator SDGs						
10	Kelurahan Siaga Bencana (renja) (1.5.1.(a))	40	50	58	64	64
11	Persentase pemenuhan bagi korban bencana (1.5.1.(b))	100	100	100	100	100
12	Pendampingan psikososial korban bencana sosial. (1.5.1.(c))	90	90	90	90	90*
13	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana) (1.5.1.(d))	11	16	16	16	16
15	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) Daerah (1.5.3*)	1	1	1	1	1
16	Jumlah kota (kelurahan) tangguh bencana yang terbentuk. (11.5.1.(b))	16	16	21	22	30
17	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir. (16.1.1.(a)) (angka kriminalitas)	1.443	1.151	1.330	1.253	1.335

Sumber: Satpol PP, D. Kebakaran, BPBD, 2023

Dari data di atas Tingkat waktu tanggap (*response timerate*/15 Menit setelah pengaduan) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) pada tahun 2021 sebesar 78,30%, dan kinerja ini meningkat pada tahun 2022 menjadi sebesar 90,13 %. Dari sebanyak 152 kejadian kebakaran pada tahun 2022, sebanyak 137 kejadian sesuai responsetime oleh petugas damkar, sedangkan SPM oleh relawan damkar sebesar 9,87 % atau sebanyak 12 kejadian dari 162 kejadian kebakaran di Kota Semarang. Sehingga masih terdapat gap sebesar 9,87% pelayanan yang belum memenuhi SOP. Hal ini disebabkan terjadinya lonjakan intensitas kebakaran musim kemarau, dan waktu kejadian bencana kebakaran yang hampir bersamaan, menyebabkan personil pemadam yang tersebar di pos pemadam di 7 Kecamatan se-Kota Semarang tidak mampu memberikan pelayanan sesuai *respon time* 15 menit. Sehingga selain diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas sarpras serta SDM pemadam kebakaran, juga perlu upaya peningkatan kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Jumlah relawan damkar pada tahun 2022 sebanyak 186 orang terdiri 96 relawan laki-laki dan 90 relawan perempuan yang tersebar dalam 10 Kecamatan di 30 kelurahan. Kinerja positif juga terkadi pada capaian Indeks Risiko Bencana (IRB) yang trendnya menurun, namun demikian perlu selalu ditingkatkan kesadaran masyarakat, antisipasi, tindak pencegahan dan penanggulangan bencana ke depannya.

Kinerja Indikator Partisipasi Pemilih pada Pilkada serentak tahun 2021 sebesar 68,62%, lebih kecil dari pelaksanaan Pilpres/Pileg tahun 2019 yang sebesar 82,33%. Hal ini disebabkan anemo pemilih yang menurun akibat adanya pandemi Covid-19. Sedangkan angka kriminalitas yang menonjol pada tahun 2022 disumbangkan oleh penganiayaan dan narkoba.

Dalam pemenuhan pelayanan dasar pada bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal pada tahun 2018- 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.36.

Indeks Pencapaian SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat Tahun 2018 – 2022

No	Indikator SPM	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022		
						Capaian Penerima Layanan Dasar	Capaian Mutu Minimal Layanan Dasar	IP SPM = 80% Capaian Layanan + 20% Capaian Mutu layanan
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100%	100%	100% <u>0 orang</u> 0 orang	100% <u>0 orang</u> 0 orang	100 %	100%	100 % (Tuntas Paripurna)
2	Pelayanan informasi rawan bencana	100%	100%	100% <u>60 orang</u> 60 orang	100% <u>1.687.222</u> 1.687.222	100 % <u>500 org</u> 500 org	100% <u>500 org</u> 500 org	100 % (Tuntas Paripurna)
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	85,36%	86,3% <u>790 orang</u> 890 orang	100% <u>1.975</u> 1.975	100 % <u>100 %</u> 100 %	100 % <u>20 %</u> 20 %	100 % (Tuntas Paripurna)
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	95,14%	100% <u>59</u> 59	100% <u>1.255</u> 1.255	100 % <u>100 %</u> 100 %	100 % <u>100 %</u> 100 %	100 % (Tuntas Paripurna)
5	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100% <u>1.680.417</u> 1.680.417	97,32% <u>837</u> 860	100 % <u>936</u> 936	97,17%	99,43% (Tuntas Utama)
6	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100 % <u>100 %</u> 100 %	100 % <u>100 %</u> 100 %	100 % (Tuntas Paripurna)

Sumber: Laporan SPM, Bag Kerjasama dan Otda, Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD, 2023

Capaian SPM pada bidang urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sejak tahun 2018-2022 menunjukkan trend yang positif. Diantara SPM layanan di bidang Trantibum, kinerja yang tidak mencapai paripurna terdapat pada jenis layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Kendala yang dihadapi terkait pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran diantaranya belum terdapat RISP KP dan manajemen pemadaman kebakaran ditingkat Kota, selain itu juga kapasitas SDM personil pemadam yang belum optimal (36,75% belum bersertifikasi) serta sarpras pemadam kebakaran yang kurang representatif (mobil tangga/snorkel rusak, sedangkan kebutuhan pemadaman digedung bertingkat meningkat, alat pelindung diri yang jumlahnya terbatas). Sedangkan secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang Trantibumlinas antara lain:

- a. Belum terpenuhinya standar teknis terkait jumlah dan kualitas sarana prasarana dan juga jumlah dan kualitas personil pelaksana layanan;
- b. Kurangnya informasi atau peringatan dini yang mengakibatkan ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi bencana;
- c. Jumlah pos pemadam beserta personil dan sarana pemadaman dan penyelamatan belum ada di tiap Kecamatan untuk meningkatkan *response time*.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Pembangunan pada Urusan Sosial ditujukan untuk mengurangi angka kemiskinan yang penanganannya bersifat multi dimensional. Pada tahun 2022, pandemi covid menyebabkan angka kemiskinan Kota Semarang menurut data BPS

meningkat menjadi sebesar 4,56% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 4,34%. Ditinjau dari persentase kemiskinan, tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan, kondisi di Kota Semarang selalu lebih baik jika dibandingkan dengan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan bahkan tingkat Nasional. Ini menunjukkan bahwa indikator presentase kemiskinan pada Tujuan ke-1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yaitu untuk mengakhiri kemiskinan telah dilaksanakan dengan baik.

Sehingga penetapan angka kemiskinan yang merujuk dari data penerima manfaat bansos bersumber dari kemensos yang ada di DTKS dimana pada tahun 2021 angka kemiskinan sebanyak 407.363 jiwa atau 24,23%, menurun pada tahun 2022 menjadi sebesar 11,06 % atau sebanyak 186.675 jiwa.

Mendasarkan Inpres No 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, data awal terdapat sebanyak 21.863 KK (102.394 individu) yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem yang tersebar pada 7 kelurahan, yaitu: Kelurahan Muktiharjo, Tandang, Tanjungmas, Bandarharjo, Kemijen, Rejosari, dan Muktiharjo Kidul. Dan setelah dilakukan pendataan, verifikasi dan validasi pada kantong kemiskinan tersebut, data penduduk yang termasuk dalam kategori ini menurun menjadi sebanyak 518 KK (2.446 Individu), yang selanjutnya sesuai dengan prioritas pembangunan, ditargetkan menjadi 0 pada tahun 2024 dengan melibatkan lintas sektor dan juga korporasi untuk mendapatkan CSR.

Tabel 2.37.

Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Tahun 2018-2022

NO	Indikator Kinerja Daerah / SDGs	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah PPKS	280.211	229.564	518.358	501.322	755.979
2	Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	290.602	231.148	516.759	501.322	755.979
3	PPKS yang memperoleh bantuan sosial	52.137	158.257	513.287	258.154	607.353
4	Jumlah sarana sosial /panti asuhan/panti jompo/panti rehabilitasi	105	105	119	105	144
5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	100	100	100	100
Indikator SDGs						
6	Persentase penduduk miskin versi Perda Kt Smg (%) (indikator 1.2.1*)	16,81	13,80	16,15	24,23	11,06
7	Cakupan disabilitas miskin yang memperoleh bantuan kebutuhan dasar (%) (indikator 1.3.1.(c))	100	100	100	100	100
8	Persentase Rumah Tangga miskin / jiwa yang memperoleh Program PKH (%) (indikator 1.3.1.(d))	5,68	4,8	7,99	7,99	14,72
9	Angka kemiskinan BPS (%) (indikator 10.1.1.(a))	4,14	3,98	4,34	4,56	4,25

Sumber: Dinas Sosial, 2023

Dalam pemenuhan pelayanan dasar di bidang Urusan Sosial, pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimum pada tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.38.

Indeks Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2018 – 2022

No	Indikator SPM	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022		
						Capaian Penerima Layanan Dasar	Capaian Mutu Minimal Layanan Dasar	IP SPM = 80% Capaian Layanan + 20% Capaian Mutu layanan
1	Persentase (%) penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100% (274/274) orang	100 % (176/176) orang	100 %	100% <u>150 orang</u> 150 orang	100%	100% (Tuntas Paripurna)
2	Persentase (%) anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100% (11/11) Orang	100% (29/29) orang	100%	100% <u>24 orang</u> 24 orang	100%	100% (Tuntas Paripurna)
3	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100% (117/117) Orang	100% (148 / 148) orang	100%	100% <u>102 orang</u> 102 orang	100%	100% (Tuntas Paripurna)
4	Persentase (%) gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	100% (114/114) orang	100% (292/292) orang	100%	100% <u>83 orang</u> 83 orang	100%	100% (Tuntas Paripurna)
5	Persentase (%) korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100% (792/792) orang	100% (510.650/ 510.650) orang	100%	100% <u>14.274 org</u> 14.274 org	100%	100% (Tuntas Paripurna)

Sumber: Laporan SPM, Bag Kerjasama dan Otda, Dinas Sosial, 2023

Permasalahan yang dijumpai dalam penyelenggaraan layanan SPM bidang urusan sosial adalah:

- Penetapan sasaran penerima layanan dasar Tahun 2022 masih menggunakan estimasi berdasarkan pelayanan yang dilaksanakan dinas tahun sebelumnya disisi lain, penerima layanan dasar diberikan kepada kelayan yang ditangani di UPTD/Shelter hasil laporan dari call center 112 Kota Semarang serta laporan dari warga ke Dinas Sosial.
- Belum/kurang pahamnya sumber daya manusia pengampu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang social, sehingga perlu sosialisasi dan koordinasi kepada SDM yang menangani secara terus menerus agar meningkatkan kinerja Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial.
- Penetapan penghitungan anggaran pada kegiatan pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang sosial belum sepenuhnya berdasarkan komponen pembiayaan yang telah ditetapkan sesuai Permendagri Nomor 59 Tahun 2021.
- Belum terbentuknya Tim Reaksi Cepat dan pada layanan kebencanaan, termasuk juga Layanan Dukungan Psikososial, Manajemen Logistik, Manajemen Shelter, Dapur Umum saat kejadian bencana. Selain itu Belum semua kelurahan di kota Semarang terbentuk Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) khususnya Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

2.1.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Sasaran utama pembangunan Urusan Tenaga Kerja yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja yang akan bermuara pada rendahnya tingkat pengangguran terbuka. Beberapa indikator kinerja pada Urusan Tenaga Kerja tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.39.
Realisasi Indikator Kinerja pada Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Tahun 2018-2022

Indikator Kinerja Daerah / SDGs		2018	2019	2020	2021	2022
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (BPS)	65,56%	66,42%	69,89%	69,41%	70,96%
2	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	94,71%	95,46%	90,43%	90,43%*	90,43%*
3	Jumlah Penduduk Usia Kerja	1.405.604	1.431.894	1.191.265	1.490.742	1.516.197
4	Angkatan Kerja					
	Jumlah Bekerja	872.827	907.937	925.963	936.076	994.091
	Jumlah Pengangguran Terbuka	48.724	43.198	98.001	98.718	81.736
	Total Angkatan Kerja	921.551	951.135	1.023.964	1.034.794	1.075.827
5	Bukan Angkatan Kerja	484.053	480.859	441.157	455.948	440.370
	Sekolah	166.175	174.979	151.538	165.797	139.678
	Mengurus Rumah Tangga	268.388	245.101	232.208	222.279	241.445
	Lainnya	49.490	60.779	57.411	67.872	59.247
6	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	NA	NA	NA	78,94% (15 keg)	80,95% (17 keg)
7	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	72%	73%	74%	68,14% (198150 dari 272399 TK)	72,74 % (173421 dari 254511 TK)
8	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama	NA	NA	50 (158 kasus, 79 PB)	50 (158 kasus, 79 PB)	50 (158 kasus, 79 PB)*
Indikator SDGs						
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (8.5.2*)	5,29	4,54	9,57	9,54	7,60

Sumber: BPS dan Dinas Tenaga Kerja, 2023

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2022 sebesar 70,96% meningkat jika dibandingkan dengan 2021 sebesar 69,41%. Angkatan kerja harus diimbangi dengan jumlah lowongan pekerjaan. Demikian pula yang terjadi di Kota Semarang, investasi dengan pelibatan tenaga kerja lokal menyebabkan jumlah pengangguran terbuka menurun. Terlihat tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Semarang yang terus menurun dari tahun 2017 sebesar 6,61% turun menjadi sebesar 4,54 % pada tahun 2019 dan melonjak drastis menjadi sebesar 9,57 % pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 namun terus mengalami penurunan hingga tahun 2022 sebesar 7,6% yang mengindikasikan pemulihan ekonomi dan sektor tenaga kerja mulai pulih. Dan kesejahteraan tenaga kerja yang ditunjukkan melalui UMK, Kota Semarang menempati UMK tertinggi se Provinsi Jawa Tengah. Progres UMK sejak tahun 2018-2022 terlihat sebagai berikut:

Tabel 2.40.
UMK dan KHL Kota Semarang Tahun 2018-2022

UMK DAN KHL	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)
Upah Minimum Kota Semarang	2.310.087	2.498.588	2.715.000	2.810.025	2.835.021

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, 2023

Dari tahapan penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial cukup bervariasi, dimana dengan penyelesaian dalam bentuk PB/Persetujuan Bersama sebesar 63 kasus diartikan masih rendahnya tingkat pemahaman baik pekerja maupun pengusaha tentang regulasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dengan asumsi masih diperlukan mediasi untuk mewujudkan penyelesaian secara PB/Persetujuan Bersama.

Data kasus perselisihan hubungan industrial dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.41.
Data Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial
Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah kasus yang ditangani:		157	124	150	159	108
Penyelesaian:						
1	Dalam bentuk PB	62	83	84	63	63
2	Tahap anjuran mediator	76	53	51	33	33
3	Secara bipartite usai mediasi	4	21	21	10	10
4	Diasumsikan selesai bipartite tidak melapor.	42	14	3	2	2

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, 2023

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemerintah Kota Semarang sangat peduli terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Komitmen sekaligus kinerja ini terlihat dengan diterimanya Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tingkat Utama dan predikat Kota Layak Anak kategori Nindya dari Kementerian PPPA. Penyelenggaraan upaya terkait juga diperkuat dengan ditetapkannya Perda Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Disisi lain Rasio KDRT pada tahun 2022 sebesar 0,025 sedikit meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 0,02. demikian halnya dengan Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan) yang juga mengalami peningkatan dari tahun 2021 yang sebesar 18,78 meningkat menjadi sebesar 25,46 pada tahun 2022, dan semuanya telah dapat ditangani sebesar 100 %. Hal ini menandakan adanya peningkatan kesetaraan bagi perempuan dan perlindungan terhadap anak, sehingga korban KDRT dan korban kekerasan semakin terbuka dan bangkit untuk mendapatkan pendampingan dan fasilitasi yang diperlukan.

Melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI Kota Semarang dan 16 (enam belas) Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) tingkat Kecamatan melakukan advokasi baik litigasi maupun non litigasi terhadap kasus KDRT, Kekerasan dalam pacaran (KDP). Kekerasan terhadap Anak, Kekerasan terhadap Perempuan dan Masalah Anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu juga Pelayanan Rumah Duta Revolusi Mental RDRM yang menyediakan layanan konsultasi masalah anak, remaja dan keluarga, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum.

Tabel 2.42.

Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Daerah / SDGs	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	N/A	2,81%	7,26%	17,14%	59,37%
2.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	0,02 1%	0,018 %	0,013%	0,017%	0,028%
3.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)	32,16	22,23	17,04	18,78	25,46
4.	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100%	100%	100%	100% (22 kasus)	100% (23 kasus)
5.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,55	74,57	74,67	73,64	73,93
6.	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	N/A	N/A	N/A	70,59	70,59
7.	Rasio KDRT	0,055	0,038	0,029	0,020	0,025
Indikator SDGs						
8.	Cakupan program pengarusutamaan gender	96	97	97	97	98
9.	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan	0,0047	0,0048	0,0041	0,0052	0,0092
10	Pemberdayaan terhadap korban KDRT	100	100	100	100	100
11	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,55	74,57	74,67	73,64	73,64

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, 2023

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Inovasi pada penyelenggaraan urusan pangan dalam rangkaantisipasi inflasi dampak kenaikan bahan bakar di Kota Semarang diantaranya dengan melaksanakan pasar pangan murah dan aman melalui program Pak Rahman sebanyak 18 kali yang pelaksanaannya berkolaborasi dengan pemangku kepentingan di bidang pangan seperti Bulog, Indoguna, BUMP, *Fresh Mart*, Pengusaha Sayur, UMKM Pangan Lokal. Dan upaya ini secara efektif cukup mampu menahan inflasi dari sisi pemutusan rantai pemasokan penawaran barang pangan.

Kinerja lain adalah tercapainya pola pangan harapan pada tahun 2022 sebesar 91,20%, dimana semakin tinggi nilai skor Pola Pangan Harapan (PPH) maka akan semakin beragam konsumsi pangan masyarakat dan menuju PPH. Ketersediaan pangan berupa beras berdasarkan data tahun 2022 sebesar 356.688,971 ton, sedangkan tingkat kebutuhan pangan masyarakat Kota Semarang sebesar 97.055,758 ton, sehingga cadangan pangan masyarakat sebesar 367,51%.

Distribusi Pangan didukung oleh Mekanisme dan alur distribusi pangan (terutama berupa beras) kepada warga miskin yang sesuai aturan juga telah tercapai 100 %. Demikian pula terkait Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang. Selain itu juga berhasil menurunkan Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan dari yang ditargetkan 5% mencapai 3,4%, melalui Intervensi daerah rentan rawan pangan prioritas 1,2,3 dengan berbagai kegiatan antara lain: memberi bantuan beras melalui Anjungan Terima Mandiri Beras (ATM-Beras), penyelenggaraan Pasar Pangan Rakyat Murah dan Aman (Pak Rahman), peningkatan kawasan rumah pangan lestari (KRPL)

Pelatihan pengembangan ketersediaan pangan dan Rakor dengan multistekholder lintas sektoral. Beberapa kinerja pada Urusan Pangan terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.43.
Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Tahun 2018 - 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor / hari	87,7	88,7	89,1	89,1	91,2
2	Ketersediaan Energi / Kapita	Kkl/Kapita / hari	3.052	3.053	3.054	3.055	3.056
3	Tingkat Keamanan Pangan	%	83,56	76,01	91,26	91,27	84,6
4	Persentase cadangan pangan masyarakat	%	NA	NA	252,05	252,806	367,51
5	Persentase daerah rentan rawan pangan	%	NA	NA	7	6	3,40
6	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	NA	NA	NA	NA	99,40

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2023

d. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Dalam penyelenggaraan urusan pertanahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota lebih pada dukungan pada program Reformasi Agraria bekerjasama dengan Kantor Pertanahan/BPN terutama dalam hal fasilitasi atau mediasi sengketa tanah yang terjadi di wilayahnya.

Capaian kinerja pada tertib administrasi pertanahan ditunjukkan dengan meningkatnya ketertiban administrasi pertanahan menjadi sebesar 87,14% yang ditunjukkan dari 70 aduan sengketa pertanahan telah dilakukan mediasi sebanyak 61 kasus, sedangkan 9 kasus lainnya dalam proses mediasi. Selain itu juga diberikan dukungan melalui Hibah PTSL dari Pemerintah Kota Semarang ke Kantor Pertanahan, serta Integrasi Penyusunan Peta Tematik sebagai basis data pertanahan yang valid dan *up to date* dalam optimalisasi administrasi pertanahan maupun dalam penyusunan kebijakan. Realisasi kinerja pada Urusan Pertanahan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.44.
Realisasi Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Tertib Administrasi Pertanahan (%) (peningkatan Data Base Pertanahan)	37	57,00	88,27	87,18	87,14
2	Penyelesaian kasus tanah Negara (%)	100% 15 kasus	100% 7 kasus	100% 15 kasus	100% 27 Kasus	100% 61 Kasus
3	Presentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	NA	NA	58%	12,79%	12,79%
4	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	NA	NA	60%	11,08%	11,08%

Sumber: BPN dan Dinas Penataan Ruang, 2023

e. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Kinerja penyelenggaraan pada urusan Lingkungan Hidup salah satunya ditandai dengan diraihnya penghargaan Sekolah Adiwiyata baik tingkat nasional maupun provinsi, selain itu juga penghargaan Kampung Iklim (Proklam) Tingkat

Nasional. Selain itu juga dilakukannya Program Strategis untuk menunjang terhadap peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, diantaranya : pembatasan penggunaan plastik, secara periodik dilaksanakan *Car Free Day*, juga penanganan dan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga mulai dari pemilahan, pengumpulan pengolahan dan pemrosesan akhir. Sehingga sampai dengan saat ini terdapat 225 unit bank sampah di masyarakat, juga rumah kompos, dan TPS 3R, yang masih menyisakan sebanyak 4.046,74 ton sampah atau sebesar 0,94% yang belum dikelola, baik yang dikurangi maupun yang di tangani.

Kinerja Pengelolaan Sampah Kota Semarang tahun 2022 sesuai Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.45.

Data Kinerja Pengelolaan Sampah Kota Semarang Tahun 2022

NO	KETERANGAN	NILAI (Ton/tahun)
I	JUMLAH TIMBULAN SAMPAH	431.085,22
II	JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH (26,18%)	112.850,49
a	Jumlah Pembatasan Timbulan Sampah	50.609,39
b	Jumlah Pemanfaatan Kembali Sampah	1.466,45
c	Jumlah Pendaauran Ulang Sampah	60.774,65
III	JUMLAH PENANGANAN SAMPAH (72,88%)	314.187,99
d	Pemilahan/Pengumpulan	
e	Pengangkutan*)	
f	Pengolahan	297,48
	Jumlah Sampah terolah menjadi bahan baku (pakan ternak, kompos, daur ulang dan upcycle)	297,48
	Jumlah Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi	0
g	Pemrosesan akhir	313.890,51
	Jumlah Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	313.890,51
IV	SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III) = (99,06%)	427.038,48
V	SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV) = (0,94%)	4.046,74

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2022 menurun kinerjanya, pada tahun 2022 sebesar 51,32 sedangkan IKLH pada tahun 2021 sebesar 59,60. Penurunan capaian ini disumbangkan oleh penurunan Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Lahan. IKA pada tahun 2022 sebesar 33,76 menurun jika dibandingkan tahun 2021 sebesar 50. Indeks Kualitas Air mengalami penurunan dikarenakan badan air sungai tercemar limbah domestik dan industri pertanian maupun peternakan. Sehingga melebihi baku mutu untuk parameter BOD dan COD serta tingginya nilai fecal coliform. Hal ini mencerminkan limbah rumah tangga yang belum terkelola dengan baik. Sedangkan Indeks kualitas lahan mengalami penurunan karena perubahan tata guna lahan dari Kawasan non terbangun menjadi terbangun. Indeks Kualitas Udara (IKU) meski meningkat namun juga berpotensi menurun secara kualitas kedepannya karena penurunan Emisi GRK. Upaya yang dilakukan dalam rangka penurunan emisi GRK dalam 4 sektor sebagai berikut :

Tabel 2.46.
Upaya penurunan emisi GRK

No	Sektor	Kegiatan	Aksi Mitigasi	Penurunan Emisi
1	Sektor Energi	<i>Off Grid PLTSa</i> (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah)	pemanfaatan energi terbarukan <i>off grid</i> yaitu PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah)	1,874,46 Ton CO ₂ e
		<i>On Grid PLTS</i>	penggunaan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) dapat menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	0,062 Ton CO ₂ e
		<i>Efisiensi Energi</i>	penggantian lampu menjadi LED (<i>Light-Emitting Diode</i>)	135.077,32 Ton CO ₂ eq
			penggunaan solar cell pada LPJU	0,08 Ton CO ₂ eq
		<i>Substitusi Bahan Bakar</i>	Pembangunan Digester Biogas	7,71 Ton CO ₂ e
2	Sektor Transportasi	<i>Area Traffic Control System (ATCS)</i>	Pemasangan ATCS (<i>Area Traffic Control System</i>) untuk mengendalikan kemacetan di simpang	18,06 Ton CO ₂ e
		<i>Reformasi Sistem Transit (Bus Rapid Transit) BRT</i>		20.460 Ton CO ₂ e
		<i>Peremajaan Angkutan Umum</i>		326,59 Ton CO ₂ e
3	Sektor Lahan	penanaman pohon di beberapa kelurahan		683,18 Ton CO ₂ e
4	Sektor Pertanian	Unit Pengolah Pupuk Organik	Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)	1.196,47 Ton CO ₂ e

Berikut capaian kinerja urusan lingkungan hidup dari tahun 2018-2022, yang secara umum kondisinya ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.47.
Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Daerah / SDGs	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	51,94	62,88	66,05	59,60	51,32
2	Peningkatan Indeks kualitas air (IKA)	31,01	48,75	50,44	50	33,76
3	Peningkatan Indeks kualitas udara (IKU)	74,27	85,50	95,20	75	77,38
4	Peningkatan Indeks Kualitas Lahan	56,51	56,51	55,9	47,58	33,28
5	Persentase usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air (%)	78	110,52	172,34	173,68	73,59
6	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota, meliputi:					
	1. Persentase pengurangan sampah Rumah Tangga dan sampah sejenisnya	14,93 %	18,36 %	22%	24%	26,04%
	2. Persentase penanganan sampah Rumah Tangga dan sampah sejenisnya	69,47 %	77,64%	75%	74%	73,31%
7	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	NA	NA	85,00%	85,20%	86,08%
Indikator SDGs						
8	persentase vol sampah terangkut dari TPS ke TPA (11.6.1.(a))	88,5	89,00	89,5	90,00	90,50
9	Jumlah Bank Sampah yang beroperasi (11.6.1.(b))	25	34	47	47	225
10	Jumlah ijin penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan (perush)	39	38	50	52	54,5

Sumber: Bappeda, DLH Kota Semarang, 2023

Permasalahan yang ditemui dalam penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup diantaranya : menurunnya Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Lahan, kurangnya sarana prasarana pengangkutan sampah dan alat berat khususnya di TPA Jatibarang serta Kapasitas zona buang TPA Jatibarang. Sehingga perlu pemantauan kualitas air dengan menggunakan sistem monitoring kualitas air secara online dan real time menggunakan onlimo serta memperketat pengawasan dan pelaporan Usaha Skala Kecil (USK). Selain itu untuk meningkatkan luasan tutupan lahan, perlu upaya masif melalui penghijauan, pembangunan taman kota dan hutan kota. Dan untuk mengurangi timbulan khususnya sampah domestik, perlu penguatan pengelolaan sampah.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
Keberhasilan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dalam rangka tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja antara lain kepemilikan KTP, rasio bayi berakta kelahiran, rasio pasangan nikah dan penerapan KTP nasional berbasis NIK.

Berdasarkan data permohonan pelayanan KTP-el, maka capaian kepemilikan KTP-el pada tahun 2022 adalah 96,93% atau 1.233.741 orang, dari jumlah wajib KTP-el sejumlah 1.272.828 orang. Sedangkan 3,07% lainnya adalah penduduk yang belum memiliki KTP-el yaitu penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP-el, ataupun penduduk yang melakukan mutasi kedatangan yang belum rekam KTP-el. Capaian kinerja tersebut, dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 terdapat peningkatan sejumlah 2.294 orang atau 1,86%. Adapun hal-hal yang mendukung peningkatan kinerja di tahun 2022 adalah adanya peningkatan penyelenggaraan pelayanan penerbitan KTP-el di Dinas dan TPDK Kecamatan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan menyesuaikan perkembangan teknologi sehingga jumlah perekaman dan pencetakan KTP-el meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2.48.

Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Daerah / SDGs	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio keluarga berKK (Kartu Keluarga)	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase anak usia 0- 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	12,94%	37,16%	60,57%	62,05%	60,87%
3	Kepemilikan akta kelahiran	NA	NA	93,42	95,00	97,85
4	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian, akta perceraian, dan akta perkawinan dari peristiwa kematian, perceraian dan perkawinan yang dilaporkan	100	100	100	100	100
5	Pemanfaatan data kependudukan (Perjanjian Kerjasama)	NA	NA	45	65	100
6	Perekaman KTP elektronik	94,94%	97,14%	98,07%	98,48%	96,93%
Indikator SDGs						
7	Persentase anak yang memiliki akte kelahiran (0-5 Tahun)	96,02%	97,15%	97,15%	99,53%	99,48%
8	Rasio bayi berakta kelahiran (1.4.1.(j))	95,46%	97,15%	98,81%	99,26	99,48%

No	Indikator Kinerja Daerah / SDGs	2018	2019	2020	2021	2022
9	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dispendukcapil, 2023

Persentase capaian kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) pada tahun 2022 yaitu sebesar 60,87%, ditunjukkan dengan terdapat 260.285 anak yang memiliki KIA dari jumlah penduduk usia KIA yang sebanyak 427.628 anak. Terdapat 39,13% belum ber KIA karena terjadi peningkatan jumlah anak usia wajib KIA dari tahun sebelumnya, disisi lain terdapat anak yang memiliki KIA yang sudah berusia diatas 17 tahun, sehingga sudah tidak diperhitungkan dalam kepemilikan KIA.

Capaian tersebut akan terus ditingkatkan untuk tahun yang akan datang, dengan menerapkan pelayanan online adminduk yaitu Aplikasi SiD'nOK, melaksanakan pelayanan paket terintegrasi dengan penerbitan akta kelahiran sekaligus akan mendapatkan KIA dan Kartu Keluarga (KK) atau yang disebut Paket 3 in 1. Selain itu dilaksanakan pula kerjasama pemanfaatan KIA dengan 11 (sebelas) Mitra KIA yaitu Toko Buku Gramedia, Toko Buku Merbabu, Toko Buku Gunung Agung, Toko Buku Toha Putra, English First, Halmahera Music, Klub Merby, Jungle Toon Water Park, Water Blaster, BRT Trans Semarang dan Club House Graha Wahid. Kerjasama ini dilakukan untuk memberikan nilai tambah dan nilai manfaat bagi anak yang memiliki KIA, selain itu untuk menarik minat warga untuk membuat KIA bagi anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari.

g. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja pembangunan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dapat dilihat dari keterlibatan lembaga masyarakat dan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan. Pemerintah tidak mampu menangani sendiri tanpa dukungan dan peran serta semua pihak yaitu swasta, pelaku usaha, perguruan tinggi, LSM dan masyarakat. Hal ini terlihat dari capaian presentase LPM aktif di tahun 2022 sebesar 100%.

Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat dapat dilihat kegiatan fasilitasi Kegiatan musrenbang Kelurahan dan Kecamatan, termasuk di dalamnya untuk peningkatan kapasitas SDM dan peningkatan kesejahteraan bagi perempuan, lansia, karang taruna dan remaja. Kegotongroyongan dan kepedulian masyarakat kembali diperlukan saat menanamkan kebiasaan baru dalam tatanan hidup kemasyarakatan pasca pandemi Covid-19 varian Omicron, sehingga Kota Semarang tidak Kembali menjadi kota dengan persebaran kasus Corona tertinggi di Jateng seperti yang pernah terjadi di tahun 2020.

Adapun permasalahan-permasalahan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, diantaranya: Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menjadikan berkurangnya intensitas kegiatan kemasyarakatan. Penyelenggaraan kegiatan yang telah terseleksi dilakukan secara daring menjadi pilihannya.

Tabel 2.49.

Kinerja Daerah pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat & Desa
Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022
1	Presentase LPM aktif	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: D. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023

h. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Menindaklanjuti amanat Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 serta Surat Mendagri Nomor 470133761SJ dan 470133751SJ tanggal 5 Juni 2020, Kota Semarang telah menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 pilar, yang terdiri dari: Pengendalian Kuantitas Penduduk; Peningkatan Kualitas Penduduk; Pembangunan Keluarga; Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk; dan Penataan Administrasi Kependudukan. Dan semuanya telah diinternalisasikan dalam program dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026. Dan pada tahun 2022 masih dalam proses penyusunan Perkada Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kota Semarang.

Capaian kinerja pada indikator yang telah ditetapkan sebagian besar dapat tercapai dengan baik dan apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 semua indikator terdapat peningkatan.

Jumlah Kelompok Aktif Bina Keluarga (BKB, BKR, BKL) pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021 dikarenakan bahwa kegiatan Bina Keluarga (BKB, BKR, BKL) adalah dalam bentuk pertemuan-2 dimana pada tahun 2022 merupakan masa pasca pandemi yaitu masa mulai merintis kembali membangkitkan kelompok Bina keluarga (BKB, BKR, BKL) untuk aktif. Dan untuk membangkitkan kembali kegiatan pada Kelompok Aktif Bina Keluarga (BKB, BKR, BKL) membutuhkan perhatian dari berbagai pihak dan perlu kerja keras yang maksimal.

Tabel 2.50.

Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018- 2022

NO	Indikator Kinerja Daerah / SDGs	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pengendalian angka kelahiran (TFR)	2	2	1,99	1,86	1,75
2	Jumlah peserta KB Aktif	205.201	199.001	194.631	175.603	181.864
3	Rasio Akseptor KB per 100 PUS	78,1	77,47	76,94	72,71	76,08
4	Jumlah PIK Remaja perjumlah kelurahan	70	70	73	73	81
5	Cakupan anggota Bina Keluarga Aktif	57,67	55,22	48,85	40,16	72,90
6	Jumlah Kelompok Aktif Bina Keluarga (BKB, BKR, BKL)	BKB: 270 BKR: 129 BKL: 235	BKB: 254 BKR: 121 BKL: 234	BKB: 274 BKR: 124 BKL: 212	BKB: 283 BKR: 131 BKL: 218	BKB: 276 BKR: 113 BKL: 216
7	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)	75,95	75,40	76,94%	77%	76,09%
Indikator SDGs						
8	Cakupan peserta KB aktif	78,1	77,47	76,94	73,88	76,08
9	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), cara modern	28,14	25,79	25,19	29,03	29,58
10	Cakupan PUS unmet need (5.6.1.(a))	10,44	9,63	10,46	10,89	9,13

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, 2023

Permasalahan yang muncul pada tahun 2022:

- a. Beberapa sasaran ibu hamil tidak berkenan didampingi oleh kader sehingga tidak mendapatkan intervensi dari operasional TPK;
- b. MOW dengan operasi Caesar tidak dapat diklaim menggunakan BOKB (DAK Non Fisik);
- c. Ada beberapa daerah yang sulit terjangkau petugas terutama di Perumahan Besar

i. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Kinerja pada penyelenggaraan Urusan Perhubungan pada tahun 2022, ditandai diantaranya dengan diterimanya penghargaan: Pemenang III Lomba Abdi Yasa Teladan Tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Pemenang II Kategori Inovasi Lomba Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi Jawa Tengah. Kinerja ini terlihat dari profil kecelakaan yang menunjukkan kecenderungan menurun baik dari jumlah kejadian kecelakaan, jumlah korban meninggal dunia (MD), dan korban luka ringan (LR), disisi lain dari jumlah korban luka berat (LB) dan kerugian material justru terjadi peningkatan.

Pada tahun 2022 jumlah kecelakaan sebesar 668 kejadian, terjadi penurunan sebesar 17 % dari jumlah kejadian kecelakaan tahun 2021 sebanyak 803 kasus. Sedangkan korban meninggal dunia berkurang 110 orang dari tahun 2021 sebesar 141 orang menjadi 31 pada tahun 2022. Demikian pula untuk korban luka ringan juga menurun sebanyak 306 orang, dari tahun 2021 sebanyak 809 orang menjadi 503 orang korban luka ringan. Sedangkan kasus korban luka berat meningkat dari tahun 2021 nihil menjadi sebanyak 3 orang. Demikian pula secara material terjadi peningkatan kerugian material dari tahun 2021 sebesar Rp.651.950.000,- menjadi sebesar Rp. 785.250.000,- pada tahun 2022. Adapun identifikasi lima lokasi rawan kecelakaan tahun 2022, adalah : Jalan Urip Sumoharjo Mangkang (55 kasus); Jalan Brigjend Sudiarto (52 Kasus); Jalan Perintis Kemerdekaan (36 kasus); Jalan Soekarno-Hatta (33 kasus) dan Jalan Kaligawe Raya (21 kasus). Beberapa penanganan yang sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan bersama Polresta Semarang diantaranya: Patroli & Turlalin, membentuk Tim Urai Kepadatan, Rekayasa arus lalu lintas dan mensiagakan derek, koordinasi dengan Ambulance Hebat dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan

Kinerja urusan perhubungan tidak dapat terlepas dari sektor transportasi. Transportasi berfungsi sebagai penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan. Beberapa ruas jalan mengalami peningkatan volume lalu lintas kendaraan yang berpotensi pada kerawanan kemacetan lalu lintas masih menjadi isu yang harus segera dipecahkan. Indikator Jumlah titik/ruas rawan macet yang pada tahun 2020 terdapat 3 lokasi (Jl. Brigjend. Sudiarto, Jl. Setiabudi, dan Siliwangi), pada tahun 2021 bertambah 1 lokasi yaitu Jl. Elang. Hal ini disebabkan adanya bangkitan-bangkitan perjalanan baru di lokasi tersebut, berupa perumahan/permukiman baru, tempat pendidikan dan pusat ekonomi. Pada tahun 2022 Jl Elang dapat diurai kemacetannya didukung oleh rekayasa lalu lintas dan pemasangan perlengkapan jalan di lokasi tersebut antara lain *traffic light*, rambu-rambu, dan marka jalan.

Salah satu indikator titik kemacetan adalah kinerja tingkat pelayanan jalan (LOS) berikut merupakan LOS pada tiga ruas jalan tersebut :

Tabel 2.51.
Kinerja tingkat pelayanan jalan (LOS)

No	Ruas Jalan	Status Jalan	V/C	LOS
1	Jalan Brigjend Sudiarto	Provinsi	0,83	D
2	Jalan Setiabudi	Nasional	0,82	D
3	Jalan Siliwangi	Nasional	0,88	E

Dari data di atas ketiga ruas jalan tersebut termasuk dalam tingkat pelayanan D dan E sehingga membutuhkan penanganan. Sejauh ini Pemerintah Kota Semarang telah berupaya melakukan penanganan di ketiga ruas jalan melalui manajemen rekayasa lalu lintas dan pengaturan lalu lintas meski belum optimal menurunkan V/C rasio jalan. Dan karena ketiga ruas jalan dimaksud termasuk ke dalam kewenangan Provinsi dan Nasional sehingga membutuhkan bantuan dari

Pemerintah Provinsi dan Pusat untuk melakukan penanganan. Pada Jalan Bringjend Sudiarto yang merupakan jalan utama dari Kabupaten Grobogan ke Kota Semarang sudah terdapat perencanaan pembangunan flyover di Simpang Fatmawati, proses saat ini sudah dilakukan penyusunan DED oleh Pemerintah Kota Semarang Tahun 2017. Sedangkan pada jalan Setiabudi sudah terdapat perencanaan pembangunan flyover di Simpang Patung Diponegoro merupakan salah satu program penjabaran Perpres No 79 Tahun 2019 untuk mendukung perkembangan kawasan ekonomi kedungsepur dan KSPN Borobudur, dan saat ini progress perencanaan pembangunan sudah dilakukan Penyusunan Dokumen Study Kelayakan Jalan Dan Jembatan Provinsi Jateng - DIY pada tahun 2021 oleh BBJN Wilayah Jateng DIY dan berdasarkan kajian tersebut akan dilakukan pembangunan pada tahun 2034. Selain itu pemerintah Kota Semarang juga berencana melakukan upgrade Simpang Ber-Apill di wilayah Tembalang dan sekitarnya menjadi simpang Ber-Apill terkoordinasi ATCS. Sedangkan pada ruas Jalan Siliwangi untuk mengurai kepadatan lalu lintas terdapat perencanaan Pembangunan Harbour Tol yang menyambung dari Pesisir Kendal menuju Pelabuhan Tanjung Mas dan merupakan salah satu program penjabaran Perpres No 79 Tahun 2019 untuk mendukung perkembangan kawasan ekonomi kedungsepur dan KSPN Borobudur.

Kondisi lalu lintas di Kota Semarang secara umum masih dalam kondisi normal, meski demikian untuk pelayanan transportasi diperlukan peningkatan rekayasa lalu lintas, layanan angkutan massal, serta peningkatan prasarana lalu lintas untuk mengatur arus lalu lintas.

Tabel 2.52.
Kondisi Angkutan Umum Massal Tahun 2018 - 2022

URAIAN		SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pelayanan angkutan umum massal (BRT)	koridor	7	8	8	11	12
2	Load Faktor Trans Semarang						
A	Koridor 1 (T Mangkang – T Penggaron)	%	84,45	93,92	41,53	43,46	65,68
B	Koridor 2 (T Terboyo – T Sisemut)	%	98,10	100,60	60,63	56,80	82,87
C	Koridor 3 (Tanjung Emas - Akpol)	%	61,62	59,35	34,27	50,20	94,37
D	Koridor 4 (Terminal Cangkiran – St Tawang)	%	64,68	71,82	42,91	38,08	60,93
E	Koridor 5 (Meteseh - Bandara - PRPP)	%	78,42	108,28	63,09	55,77	78,23
F	Koridor 6 (Undip - Unnes)	%	41,58	43,79	23,53	24,89	50,29
G	Koridor 7 (T.Terboyo - Soekarno Hatta - Pemuda)	%	54,08	73,81	46,45	52,44	54,47
H	Koridor 8 (T. Cangkiran – T. Gunung pati - Sp Lima)	%			45,26	45,80	76,51
I	Feeder 1 (Ngaliyan - Madukoro - Ngaliyan)	%			13,47	17,42	37,41
J	Feeder 2 (T. Terboyo - Lamper Tengah - Soekarno Hatta – T. Terboyo)	%			10,87	6,06	23,02
K	Feeder 3 (Banyumanik - Penggaron)	%					55,85
L	Feeder 4 (Terminal Gunungpati - Unnes - BSB)	%				7,50	8,74
3	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill)	%	60,87	61,73	63,13	65,09	67,71

URAIAN		SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
4	Ketersediaan terminal Terminal Tipe C	unit	4	3	3	3	5
5	Ketersediaan sarana pendukung moda transportasi massal (halte BRT)	unit	283	376	376	376	437
6	Cakupan wilayah terlayani transportasi	%	65,79	70	70	75	75
7	Persentase ketertiban parkir di kawasan strategis	%	78,47	81,32	83,42	84	86,42
8	Arus penumpang angkutan umum	Jumlah	19.296.425	23.180.418	10.935.306	12.028.837	15.869.466
9	Pengurangan jumlah titik atau ruas rawan macet	Titik/ruas rawan macet	5	4	3	4 (2 titik dari periode lalu, ditambah 2 titik baru)	3
10	Kepemilikan KIR angkutan umum	Jumlah	NA	NA	1913	1932	2191
Indikator SDGs							
11	Jumlah penumpang BRT (11.2.1.(a))	Penumpang	10.210.296	10.233.291	6.835.778	6.207.674	11.013.922
12	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar (11.2.1.(b))	NA	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Perhubungan, 2023

Arus penumpang angkutan umum di tahun 2022 sebesar 15.869.466 meningkat dibanding tahun 2021. Hal ini ditunjang oleh perbaikan pelayanan angkutan umum dan mulai berakhirnya pandemi covid-19 sehingga masyarakat mulai kembali menggunakan angkutan umum. Untuk load factor dari pelayanan feeder masih cukup sedikit peningkatan sehingga BLU Trans Semarang terus melakukan evaluasi dan uji coba re-routing pada jalur-jalur feeder. Secara umum penggunaan angkutan umum oleh masyarakat menjadikan biaya perjalanan semakin murah dan terjangkau.

Kepemilikan kir angkutan umum di tahun 2022 sebesar 2.191 meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 1.932, ini mengindikasikan bahwa semenjak tidak diberlakukannya PKM penggunaan angkutan umum meningkat dan diharapkan KIR dapat meningkatkan keamanan bagi penumpang angkutan umum.

Persentase fasilitas perlengkapan jalan meningkat jika dibandingkan tahun 2021 dimana pada tahun 2022 berhasil mencapai 67,71%. Dampak dari pencapaian ini adalah cukup tersedianya perlengkapan jalan dalam rangka rekayasa lalu lintas, yang berguna dalam mengatur lalu lintas sehingga lalu lintas di jalan menjadi lebih tertib.

j. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Kinerja pada penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2022, ditandai diantaranya dengan diterimanya penghargaan Implementasi *Smart City* Terbaik Tahun 2022 (Kategori "*Smart Economy*") Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selain itu juga penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Pemerintah Kota Semarang Sebagai Kota Informatif dalam Menyampaikan, Menyediakan, dan Menguasai Informasi Publik Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Kategori Informatif). Serta juara 3 Lomba Pertunjukan Rakyat FK Metra oleh Provinsi Jawa Tengah.

Untuk mendukung Pelayanan Informasi Publik di Kota Semarang pada tahun 2022 terlaksana forum koordinasi PPID serta pengelolaan Pusat Informasi Publik. Dan sebagai dasar pelaksanaannya telah di tetapkan dengan Keputusan Walikota Semarang Nomor 485.1/122 Tahun 2022 tentang Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2022.

Pengelolaan laporan layanan pengaduan yang masuk selama tahun 2022 melalui kanal-kanal yang tersedia telah diterima laporan sebanyak 6.403, terdiri dari 6.349 pengaduan, 5 permintaan informasi, dan 49 aspirasi. Dari 6.403 laporan, 5.213 laporan atau 81% laporan telah selesai dan 385 laporan selesai bersyarat. Sedangkan, laporan yang masih dalam proses sebesar 787 laporan dan laporan belum selesai sebesar 18 laporan (pada saat akhir desember 2022).

Dalam melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika, khususnya terkait dengan keterbukaan informasi publik, telah banyak layanan yang diwujudkan, diantaranya SDK (Semarang Digital Kreatif) yang memfasilitasi masyarakat Kota Semarang untuk tertarik dan menjadikan digital kreatif sebagai salah satu fokus kewirausahaan dan jumlah komunitas yang bergabung dan aktif semakin meningkat pasca pandemi; Layanan Pengaduan dan Layanan fasilitas untuk umum dan gratis melalui call center 112 #darurat112aja; Terbangunnya fasilitas publik baru *Co Working Space* di Gedung Olahraga Tri Lomba Juang; *Free Wifi* pada tempat publik; Aktivasi jaringan Internet kelurahan, Internet CCTV RT se-Kota Semarang sejumlah 8.734 kamera dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama Dan Pembantu Pada Badan Publik; Penilaian Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dengan hasil Pemerintah Kota Semarang sebagai Badan Publik Informatif; Penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota Semarang dan terlaksananya Evaluasi *Smart City* Kota Semarang. Selain itu, pada tahun 2022 telah terlaksana *launching* aplikasi Klepon.in dan Semarangkota.CSIRT.

Kinerja pada urusan Komunikasi dan Informatika sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.53.

Realisasi Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	100	100	100	100
2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	100	100	100	100
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	75	75	75,33	75,95	95,23
4	Persentase (%) perangkat daerah yang mengimplementasi/ replikasi inovasi yang mendukung <i>smart city</i> sesuai dengan <i>Masterplan</i>	70	75	75	80	80
5	Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan sesuai amanat UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kominfo Statistik dan Persandian, 2023

Kinerja pada Urusan Komunikasi dan Informatika menunjukkan kinerja yang positif, terkait akses internet di OPD, integrasi sistem, cakupan penyebaran dan penyediaan informasi publik serta implementasi masterplan *smart city*.

Beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informasi, diantaranya: perubahan aplikasi pengaduan menjadi Sapa Mbak Ita sehingga memerlukan penyesuaian dalam beberapa hal serta perlunya sosialisasi kepada masyarakat untuk mengenalkan nama aplikasi terbaru; Jaringan internet di OPD-OPD yang sudah berumur lama perlu di*upgrade* dan pada tahun 2022 terdapat perubahan Arsitektur SPBE Pusat. Sehingga perlu tindak lanjut diantaranya melalui Sosialisasi aplikasi Sapa Mbak Ita serta melaksanakan penyesuaian-penyesuaian terkait aplikasi terbaru; Dilakukan *upgrade* jaringan internet di OPD-OPD yang sudah berumur lama dan pemeliharaan secara rutin; dan menjadikan Arsitektur SPBE Kota Semarang sebagai dasar perubahan kebijakan Perwal SPBE Kota Semarang.

k. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Dalam penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam menyelesaikan permasalahan terkait kesulitan pemasaran produk dan akses permodalan bagi UMKM, Kota Semarang mempunyai program Kredit Wibawa bagi penyelenggaraan usaha Mikro, dan aplikasi GULO ASEM (Gerai Usaha Mikro lokal online Asli Semarang) yaitu Inovasi layanan pemasaran online dalam bentuk aplikasi katalog produk UMKM, serta Fasilitasi kemitraan usaha antara UMKM dengan indomaret dan Uniqlo untuk memperluas jangkauan akses pemasaran bagi pelaku usaha mikro. Disamping itu juga dikembangkan sebuah system pendataan UMKM di kota Semarang untuk memperoleh data dan informasi terkait perkembangan UMKM di Kota Semarang.

Tabel 2.54.

Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil & Menengah Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Daerah / SDGs	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah UMKM yang dibina	Orang	2.140	2.857	2.822	3575	5220
2	Jumlah koperasi aktif	unit	618	634	637	638	561
3	Jumlah seluruh koperasi	unit	699	715	718	720	732
4	Persentase koperasi aktif	%	88,41	86,67	88,72	88,61	76,64
5	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	NA	NA	10,24	11	16,93
6	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	NA	NA	50,70	52	48,22
Indikator SDGs							
7	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) kelayanan keuangan. (8.3.1.(c))	%	1.075/ 14.893x 100% = 7,22 % (Kredit Wibawa)	1.498/ 16.456x 100% = 9,10% (Kredit Wibawa)	1.899/ 16.802x 100% = 11,30% (Kredit Wibawa)	2.238/ 21.065x 100% = 10,62% (Kredit Wibawa)	2.361/ 29.611x 100% = 7,97% (Kredit Wibawa)

Sumber: Dinas Koperasi & UKM, 2023

Realisasi persentase koperasi aktif pada tahun 2022 sebesar 76,64% menurun dari tahun 2021 sebesar 88,61 %. Hal ini disebabkan paska pandemi dilakukan pendataan dan pengawasan terhadap koperasi di Kota Semarang, dimana terdapat peningkatan jumlah koperasi sebanyak 12 unit sehingga tahun 2022 menjadi sebanyak 732 koperasi terdaftar di Kota Semarang. Selain itu juga terdapat sebanyak 77 unit koperasi yang selama pandemi tidak melaksanakan RAT dan aktivitas lainnya. Disisi lain terjadi peningkatan usaha mikro yang menjadi

wirausaha dari tahun 2021 sebesar 11%, meningkat menjadi sebesar 16,93 pada tahun 2022.

Beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan Urusan Koperasi dan Usaha Mikro di tahun 2022, diantaranya:

- a. Masih terbatasnya kualitas dan kompetensi SDM pengelola koperasi, sehingga berakibat pada pengelolaan koperasi yang belum menggunakan pendekatan manajemen usaha yang profesional.
- b. Masih terbatasnya pengetahuan pelaku usaha mikro tentang manajemen kewirausahaan serta digitalisasi.
- c. Jangkauan akses pemasaran pelaku usaha mikro yang masih terbatas dan masih bersifat konvensional.
- d. Keterbatasan Permodalan Para Pelaku Usaha Mikro Kota Semarang.
- e. Masih banyaknya produk Usaha Mikro yang belum memiliki Sertifikasi produk antara lain PIRT, HALAL dan HAKI.

1. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Salah satu faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah kinerja dalam urusan penanaman modal. Dimana kemudahan dalam pelayanan perijinan dan kejelasan kepastian hukum, menjadi salah satu indikator untuk menarik minat investor.

Pada tahun 2022 pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha berusaha di Kota Semarang berjalan dengan baik, dimana persentase izin terbit sesuai Standar Pelayanan sebesar 95,63% melebihi target yang ditetapkan sebesar 95%. Selain itu kinerja di bidang penanaman modal juga ditandai diraihnya beberapa penghargaan, antara lain peringkat pertama *Monitoring Center for Prevention* (MCP) KPK Kategori Perizinan Pemerintah Kota Tingkat Nasional, peringkat pertama Publikasi Standar Pelayanan Terbanyak Tingkat Nasional, dan mendapatkan Predikat A Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN-RB.

Beberapa capaian Urusan Wajib Penanaman Modal di Kota Semarang pada tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.55.

Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Tahun 2018-2022

NO	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022
1	Nilai Investasi (juta rupiah)	27.549.279	33.658.609	18.209.772	22.538.063	24.662.877
2	Persentase peningkatan investasi	33,77%	32,61%	-40,21%	3,09%	10,24%
3	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	317	312	344	416	675
4	Persentase ijin terbit sesuai SP	97,50%	98,20%	98,70%	99,33%	95,63%

Sumber: DPM PTSP, 2023

Pada tahun 2022 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN) dari yang ditargetkan 448 investor mencapai 675 Investor dengan meningkat dibandingkan capaian tahun 2021 sebesar 416 investor. Semakin banyaknya investasi yang masuk di Kota Semarang akan membawa dampak positif, beberapa diantaranya adalah adanya peningkatan tenaga kerja bagi masyarakat, peningkatan daya beli masyarakat, dan terciptanya perubahan kualitas sumber daya manusia serta taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik.

Nilai investasi tahun 2022 mencapai Rp 24.662.877.213.739,- berhasil melebihi target kinerja RPJMD Kota Semarang yaitu sebesar Rp 24.086.799.000.000,- Peningkatan nilai investasi di Kota Semarang ini menjadi salah satu bukti adanya percepatan pemulihan ekonomi yang sangat pesat pasca Pandemi Covid-19. Meningkatnya nilai investasi pasca pandemi Covid-19 ini sekaligus dapat membawa *multiplier effect* yang dapat memperluas peluang usaha, mendorong produksi barang dan jasa Kota Semarang, meningkatkan penyediaan lapangan kerja, menurunkan angka ketimpangan ekonomi, serta semakin meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pasca pandemi Covid-19.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal diantaranya Masih banyak masyarakat/pemohon belum memahami terkait penerbitan perizinan melalui Aplikasi OSS RBA, dan masih sering ditemukannya error sistem pada Aplikasi OSS RBA itu sendiri.

m. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap kegiatan kepemudaan dan keolahragaan, karena tempat olahraga di masa pandemi ini banyak yang ditutup selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Namun karena minat masyarakat terhadap kegiatan keolahragaan sangat tinggi, sehingga pengoperasionalan dengan pengetatan dan penyediaan sarpras untuk menerapkan protokol kesehatan di tempat olah raga terbuka tidak bisa dihindari.

Untuk keaktifan organisasi dan kegiatan kepemudaan pada tahun 2021 terjadi penurunan yang cukup signifikan, karena hampir seluruh kegiatan dispora melibatkan banyak orang sehingga tidak bisa dilaksanakan, dan untuk tahun 2022 mulai terdapat peningkatan jumlah organisasi kepemudaan maupun keolahragaan yang telah melakukan aktifitasnya.

Kinerja dalam penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga ditandai dengan diraihnya kejuaraan prestasi pada tahun 2022 : Juara I Putra dan Juara II Putri pada Pesta Siaga Binwil Semarang, Juara III Persari Kwarda Jateng, Juara I Penegak dan Juara II Penggalang, pada Lomba Pramuka Garuda Berprestasi Kwarda Jateng, Juara I Putra, Juara V Putri pada Lomba Tingkat IV Regu Penggalang Kwarda Jateng dan Juara 2 Kategori Event “Renovasi Rumah 2022” & Juara 3 di Kategori Pengelolaan Pramuli Cabang Pramuli Award. Selain itu juga telah membentuk kelas Khusus Olahraga (KKO) yang ditempatkan di SMP 3 Semarang, dan untuk tahun pertama baru dibuka 7 cabang olahraga.

Tabel 2.56.

Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan & Olahraga Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	75	90	74	25	30
2	Jumlah organisasi olahraga	45	61	63	45	63
4	Gelandang / balai remaja (selain milik swasta)	5	5	5	6	6
5	Jumlah kegiatan pelatihan kewirausahaan/life skill bagi pemuda	4 keg	4 keg	2 keg	2 keg	2 keg
6	Jumlah peserta kegiatan pelatihan kewirausahaan/ <i>life skill</i> bagi pemuda (SDGs)	200 Org	200 org	100 Org	100 org	100 org*
7	Peningkatan prestasi olahraga	NA	NA	8	9	9,366
8	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	NA	NA	0,93	0,94	0,94
9	Tingkat partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	NA	NA	0,035	0,035	0,04

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2023

n. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Kinerja dalam penyelenggaraan Urusan Statistik ditandai dengan prestasi pada tahun 2022, diantaranya dengan diraihnya Predikat Optimum dalam Penyelenggaraan Satu Data Tingkat Kota Semarang, Tingkat Provinsi Jawa Tengah. Selain itu juga perolehan Skor Tertinggi dalam Kematangan Penyelenggaraan Satu Data Tingkat Kota Semarang, Tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Dasar pelaksanaan pengembangan Portal Satu Data Tingkat Kota Semarang dan Penyusunan Metadata Statistik Sektor Kota Semarang adalah Peraturan Walikota No.25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk memberi dukungan terhadap pencapaian sasaran, diantaranya: Koordinasi & Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis & Diseminasi Data Statistik Sektor, Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi, Membangun Metadata Statistik Sektor, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektor, Pengembangan Infrastruktur, Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektor di Daerah.

Tabel 2.57.

Realisasi Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Statistik tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
2	Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Diskominfo, Statistik dan Persandian, 2023

Indikator presentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dan Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi mencapai 100% sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, demikian halnya integrasi sistem data dan statistik yang mengindikasikan Penyelenggaraan Satu Data Tingkat Kota Semarang telah dimanfaatkan oleh semua pihak.

o. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Tingkat keamanan informasi pemerintah di tahun 2022 yaitu sebesar 100% berhasil konsisten mempertahankan prestasi di tahun 2021. Peningkatan SDM pengelola keamanan syber dan SPBE yang mengikuti peningkatan kompetensi dan bersertifikat pada tahun 2022 Selain itu juga dilaksanakan Sertifikasi ISO 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) Data Center Kota Semarang

Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik salah satunya dengan kegiatan Launching Semarangkota CSIRT dan Terbentuknya Tim CISRT Tingkat Kota Semarang.

Tabel 2.58.

Realisasi Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	100%	100%	100%	100%	100%
2	Peningkatan (%) SDM pengelola keamanan syber dan SPBE yang mengikuti peningkatan kompetensi dan bersertifikasi	NA	NA	NA	40,00%	50,00%

Sumber : Setda Kota Semarang dan Diskominfo, Statistik dan Persandian, 2023

p. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Prestasi dalam Urusan Kebudayaan pada tahun 2022, diantaranya Kota Semarang mendapat apresiasi sebagai Lima Penyaji Terbaik Duta Seni Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah yang diselenggarakan Badan Penghubung Jawa Tengah TMII Jakarta. Selain itu juga berhasil diselenggarakannya Semarang Flowers Festival, Semarang *Heritage Family Run*, Semarang Jelajah Musik, dan Semarang *Night Carnival*.

Selain itu kinerja lain di bidang pelaku seni, sanggar seni, apresiasi terhadap kesenian lokal, dan pelestarian warisan cagar budaya juga menunjukkan tren yang positif. Hal ini mengindikasikan Pemerintah Kota Semarang berkomitmen terhadap pembangunan tanpa mengesampingkan seni budaya lokal dan warisan cagar budaya yang menjadi salah satu produk wisata asli Kota Semarang.

Tabel 2.59.

Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah sanggar seni dan Budaya di Kota Semarang	781 group	792 group	813 group	859 group	929 group
2	Jumlah grup kesenian	781 group	792 group	813 group	859 group	929 group
3	Jumlah gedung kesenian	14 gedung	14 gedung	14 gedung	14 gedung	15 gedung
4	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	194 Gedung	199 Gedung	199 Gedung	199 Gedung	200 Gedung
5	Jumlah Obyek Cagar Budaya yang juga merupakan obyek wisata	12 buah	12 buah	12 buah	12 buah	12 buah
6	Benda, Situs, Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	336 buah	336 buah	336 buah	351 buah	400 buah
7	Terlestarikannya Cagar Budaya	36,86%	34,18%	70,96%	71,30%	77,78%
8	Register cagar budaya (pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	461 Unit	461 Unit	461 Unit	461 Unit	461 Unit
9	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	0	0	4 Unit	4 Unit	8 Unit
10	Persentase Apresiasi terhadap Kesenian Lokal	59,56%	77,34%	23,92%	25,66%	45,27%

Sumber: Dinas Kebudayaan & Pariwisata, 2023

Permasalahan yang dihadapi pada penyelenggaraan urusan kebudayaan diantaranya: kurangnya apresiasi masyarakat terhadap atraksi seni budaya; belum optimalnya pemeliharaan artefak dan cagar budaya; dan belum optimalnya partisipasi kelompok/sanggar/komunitas seni budaya dalam pembangunan kebudayaan.

q. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Berawal pandemi menyebabkan jumlah kunjungan *offline* pada perpustakaan Kota Semarang berkurang tajam, dan sebaliknya jumlah pengunjung pada perpustakaan digital meningkat sebagai dampak pandemi yang menerapkan social distancing. Pada tahap awal, SiBooky (perpustakaan digital Kota Semarang) berisi koleksi *ebook* baik *ebook* komersial dengan sistem DRM (*Digital Right Management*) dan *ebook open source* atau non komersial tanpa sistem DRM. Untuk *ebook* dengan sistem DRM, setiap judul baru tersedia satu buku, sehingga jika *ebook* ini sedang dibaca pengunjung lain, maka pembaca berikutnya harus menunggu lebih dahulu. Sedangkan untuk buku komersial, tidak menggunakan sistem DRM sehingga bisa dibaca oleh siapa saja dalam waktu bersamaan.

Untuk manajemen peminjaman *online* juga telah dikembangkan, sehingga masyarakat luas bisa meminjam buku untuk lama waktu tertentu untuk dibaca melalui *smartphone*. Koleksi *ebook* perpustakaan Kota Semarang juga akan disediakan di beberapa tempat umum yang bisa diakses tanpa menggunakan koneksi internet, tetapi cukup dengan koneksi bluetooth dengan aplikasi tertentu. Pada jumlah pengunjung perpustakaan di tahun 2022 sebanyak 588.851 pengunjung, berasal dari Kunjungan Perpustakaan Digital (SiBooky), Kunjungan Inlist, Layanan Terpadu, dan Perpustakaan Keliling dan ini jauh meningkat

Nilai Tingkat Gemar Membaca Kota Semarang yakni di angka 67,00% di tahun 2022 meningkat dari tahun 2021 yang sebesar 45,00%. Adapun angka tersebut masuk dalam kategori Tinggi. Adapun survei dilakukan dengan mengambil sampel masyarakat kota Semarang dengan rentang usia 15-68 tahun sejumlah 500 orang. Untuk Tingkat Gemar Membaca dapat diperoleh dari Frekuensi Membaca, Durasi Membaca, Jumlah Bahan Bacaan, Frekuensi Akses Internet, dan Durasi Akses Internet. Dari hasil global angka Tingkat Gemar Membaca serta rincian variable pendukung dapat menjadi pemahaman bagi pemerintah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang tepat sesuai dengan titik lemah tingkat gemar membaca.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Semarang tahun 2022 didapatkan angka 59,80% mengalami peningkatan dari tahun 2021 yang sebesar 57,00%. Terdapat tujuh unsur pembangunan Literasi Masyarakat yakni Pemerataan Layanan Perpustakaan, Ketercukupan Koleksi, Ketercukupan Tenaga Perpustakaan, Tingkat Kunjungan Masyarakat, Jumlah Perpustakaan Sesuai Standar, Keterlibatan Masyarakat, dan Anggota Perpustakaan yang kemudian dibagi dengan Aspek Masyarakat yakni Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota setempat. Dari capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Semarang, dapat dilakukan pemetaan unsur mana saja yang perlu difokuskan untuk ditingkatkan.

Tabel 2.60.

Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja Daerah	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah perpustakaan milik Pemerintah	1	1	1	1	1
	Jumlah perpustakaan milik non Pemerintah	191	191	191	193	195
2	Jumlah pengunjung perpustakaan (orang)	418.793	28.960	10.471	1.066 (peminjam)	588.851 (dari inlist, layanan terpadu, pusling, dan SiBooky)
3	Jumlah Koleksi buku perpustakaan	132.171	134.000	101.460	106.168	108.937
4	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	NA	NA	42,07%	45,00%	67,00%
5	Pengunjung perpustakaan per tahun	NA	NA	22,00%	24,00%	36,00%
6	Indeks pembangunan literasi masyarakat	NA	NA	56,58%	57,00%	59,80%

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan, 2023

r. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Prestasi yang diperoleh pada penyelenggaraan urusan kearsipan pada tahun 2022 diantaranya: Peringkat 1 Pameran Arsip Virtual sekaligus sebagai Stand Arsip Virtual Terbaik pada Pameran Arsip Virtual yang diadakan Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

Secara umum kinerja pada urusan kearsipan berada pada nilai realisasi yang sama dan atau meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021. Tingkat

Keberadaan dan Keutuhan arsip sebagai bentuk pertanggungjawaban adalah di angka 57,05% di tahun 2022. Adapun interpretasi ringkas dari interval nilainya adalah semakin tinggi angka, semakin tinggi tingkat keberadaan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban.

Sementara itu, tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional sebesar 79,02%. Dan interpretasi ringkas dari interval nilainya adalah Semakin tinggi angka, semakin tinggi tingkat keberadaan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban. Secara umum permasalahan yang dihadapi diantaranya penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kota melalui JIKN, sedangkan pada saat ini belum dilakukan sosialisasi pemanfaatan SIKN – JIKN dan GNSTA pada Organisasi Masyarakat dan Organisasi Sosial karena kurang mengerti pentingnya pengelolaan, pemanfaatan dan pengolahan arsip yang baku.

Beberapa indikator yang dapat menggambarkan kinerja urusan kearsipan sebagai berikut:

Tabel 2.61.
Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Tahun 2018-2022

INDIKATOR KINERJA		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah arsip dengan sistem administrasi yang baik	22.582 arsip	25.141 arsip	28.055 arsip	29.000 arsip	30.500 arsip
2	Peningkatan klasifikasi arsip	8%	8%	10%	10%	100%
4	Rasio ketersediaan sarana/prasarana penyimpanan arsip yang berfungsi dan terpelihara	100%	100%	99%	100%	95%
5	Jumlah SKPD yang dilibatkan dalam pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	50	50	50	50	50
6	Jumlah dokumen/arsip daerah yang diselamatkan /dipelihara	26.000 Arsip	25.000 arsip	37.000 Arsip	37.000 arsip	37.500 arsip
7	Jumlah dokumen yang berhasil di digitalisasi	60.000 Dokumen	65.000 dokumen	83.491 dokumen	83.491 dokumen	84.991 dokumen
8	Pameran tentang kearsipan yang diikuti	2 kali	2 kali	1 kali	1 kali	2 kali
9	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang –Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	NA	NA	76,16%	76,00%	79,02%
10	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	NA	NA	55,33%	56%	57,05%
11	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	88.540 arsip	89.770 arsip	139.000 arsip	145.000 arsip	149.000 arsip

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan, 2023

2.1.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

a. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Pemerintah terus berupaya memberdayakan perekonomian masyarakat pesisir melalui fasilitasi dan pembinaan kelompok-kelompok pelaku usaha perikanan. Produksi perikanan tangkap pada tahun 2022 sebesar 3.008,92 ton meningkat dari tahun 2021 yang sebesar 2.901,45 ton. Sedangkan produksi perikanan budidaya

pada tahun 2022 sebesar 3.887,87 ton juga berhasil meningkat dari tahun 2021 sebesar 3.738 ton. Sehingga total produksi perikanan pada tahun 2022 meningkat yaitu sebesar 6.896,79 ton

Selain itu, pada tahun 2022 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan angka konsumsi ikan menjadi sebesar 40,25 Kg/Kapita/Thn dan juga meningkatkan produksi ikan olahan menjadi sebesar 17.604,14 ton/tahun jika dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 17.506,107ton.

Secara umum meskipun produksi perikanan budidaya sudah menunjukkan peningkatan namun belum optimal dalam pemanfaatan lahan dan pengetahuan masyarakat terhadap budidaya ikan. Demikian pula belum optimalnya produksi hasil tangkapan ikan bila dibandingkan dengan peluang dan transaksi pasar yang ada di Kota Semarang. Sedangkan masih rendahnya tingkat konsumsi makan ikan, untuk tingkat kota karena tingkat kesadaran dan tingkat daya beli ikan yang belum optimal, serta belum memiliki TPI yang representatif, sehingga nelayan hanya sedikit yang melelangkan ikan di TPI.

Berikut kinerja urusan kelautan dan perikanan tahun 2018-2022.

Tabel 2.62.

Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan & Perikanan Tahun 2018-2022

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kelompok pelaku usaha perikanan	Kelompok	202	202	215	235	235
2	Produksi perikanan budidaya (ton)	Ton/Tahun	3.419,24	3.725,78	3.738,1	3.810,67	3.887,87
3	Produksi perikanan tangkap (ton)	Ton/Tahun	3.079,54	3.153,45	2.801,12	2.901,45	3.008,92
4	Produksi ikan olahan	Ton/Tahun	17.397,86	17.919	17.485	17.506,107	17.604,14
5	Konsumsi ikan	Kg/kapita/tahun	33,14	38,56	40,16	40,166	40,25
6	Jumlah total produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Ton	6.498,78	6.879,23	6.539,12	6.487,98	6.896,79

Sumber: Dinas Perikanan Kota Semarang, 2023

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Prestasi dalam penyelenggaraan pada Urusan Pariwisata ditandai dengan diraihnya Juara Kategori Paket Wisata Gelar Desa Wisata Jawa Tengah Tahun 2022 Kepada Desa Wisata Kandri, tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Lima Penyaji Terbaik Duta Seni Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah secara virtual, yang diselenggarakan Badan Penghubung Jawa Tengah TMII Jakarta.

Kinerja penyelenggaraan urusan kepariwisataan pada tahun 2022 mulai menunjukkan kinerja positif di beberapa indikatornya dibandingkan kinerja pada tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi mulai membaik, sehingga destinasi dan industri kepariwisataan juga mulai meningkat. Faktor utama penyebab hal tersebut tentunya masih karena Pandemi Covid-19 meskipun tidak separah di tahun 2020. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan Persentase Kenaikan Kunjungan wisata di tahun 2022 sebesar 100,58% meningkat tajam dibandingkan tahun 2021 yang sebesar -18,46%. Sumbangan paling tinggi dirasakan pada jumlah wisatawan domestik, meskipun wisatawan mancanegarapun juga mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan dibukanya penerbangan dari dan ke luar negeri, juga kapal pesiar sudah mulai diijinkan berlabuh di tanjungmas, serta destinasi wisata kembali dibuka operasionalisasinya.

Dukungan pengembangan edutrip Wisata Semarang juga dilakukan dengan penyediaan angkutan wisata untuk perjalanan wisata edukasi (edutrip) keliling Kota Semarang secara gratis dengan menggunakan bis tingkat SI DENOK, SI KENANG

dan SI KUNCUNG yang beroperasi 3 trip dalam setiap harinya. Rute dari angkutan wisata tersebut melewati objek-objek bersejarah di Kota Semarang seperti Museum Ronggowarsito, Situs Kota Lama, Tugu Muda, Lawang Sewu, Simpang Lima, Sampo Kong dan lainnya.

Untuk meningkatkan daya Tarik wisata Kota Semarang saat ini dilakukan rencana pembangunan kereta perkotaan atau Trem yang digunakan untuk angkutan wisata. Perlu diketahui rencana pembangunan trem ini bertujuan untuk menghidupkan Kembali Trem Semarang sebagai jalur wisata Pendidikan heritage yang menghubungkan dengan situs bersejarah Semarang Lama juga sebagai pengingat bahwa Kota Semarang merupakan kota pertama di Indonesia yang mnengoperasikan trem yaitu pada tahun 1882. Rencananya rencana jalur trem tersebut terdapat 2 trase yaitu trase barat stasiun tawang-tugu muda-stasiun Poncol-Stasiun Tawang dan trase timur Stasiun Tawang-Tugu Muda-Simpang Lima-Jalan Gajah Mada-Stasiun Tawang. Jika melihat hasil kajian kelayakan yang disusun oleh PT. KAI estimasi jumlah penumpang dan ATP WTP masih berdasarkan pergerakan komuter sehingga tidak layak untuk operasional maka mungkin dapat menggunakan pendekatan pariwisata akan meningkatkan ATP dan WTP sehingga dapat layak operasional.

Dalam upaya mencapai target kepariwisataan, Kota Semarang terus menggalakkan upaya peningkatan promosi pariwisata melalui berbagai media seperti leaflet, media cetak dan elektronik berupa baliho, surat kabar dan website serta melalui sosial media dan paket wisata lainnya.

Tabel 2.63.

Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Kenaikan Kunjungan wisata	%	8,6	26,62	-59,77	-18,46	100,58
2	Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Semarang	Orang	5.769.387	7.305.559	3.266.931	2.663.761	5.343.151
	- Mancanegara	Orang	66.105	82.030	628	77	4.918
	- Domestik	Orang	5.703.282	7.223.529	3.260.303	2.663.684	5.338.233
3	Pendapatan sektor pariwisata	Rp. juta	256.362,7	312.195,5	10,17% PAD Rp 190.758. 295.291	7,96 % PAD Rp 207.712. 087.923	14,13% PAD Rp 357.978. 839.578
4	Jumlah Destinasi Wisata	Obyek	71	71	71	200	373
5	Jumlah kunjungan wisata MICE	Orang	8.549	8.619	5.109	427.305	770.439
6	Lama menginap MICE	hari	1,47	1,51	1,4	1,32	1,43
7	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/ kota	%	8,6 5.769.387	26,62 7.305.559	-59,77 3.266.931	-18,46 2.663.761	100,59 5.343.151
8	Tingkat hunian akomodasi	%	NA	NA	NA	30,32	33,96
9	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	NA	NA	NA	10,17	19

Sumber: Dinas Kebudayaan & Pariwisata, 2023

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Mendasarkan pada Peraturan Wali Kota Nomor 24 tahun 2021 tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan, Program Urban Farming telah menunjukkan

perkembangan yang luar biasa, pada tahun 2022 telah mencakup di 124 kelurahan dan telah memberikan dampak positif meskipun tidak secara langsung terhadap penanganan berbagai isu ketahanan pangan, pencegahan inflasi, penanganan stunting, bahkan pada pengurangan kemiskinan kewilayahan.

Pada tahun 2022 kinerja terkait Produktivitas pertanian pangan utama (padi dan jagung) mencapai 6,96 ton/ha/tahun, meningkat jika dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 6,38 ton/ha/tahun. Selain itu jumlah sentra produk unggulan pertanian terealisasi 4 kawasan, yaitu Agro Wates, Agro Purwosari, Agro Cepoko, dan Agro Plalangan (proses) dimana masing-masing agro memiliki tanaman utama (unggulan) disamping komoditas lainnya.

Pada tahun 2022 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan produksi hasil peternakan mencapai 39.690,27 ton, mengindikasikan membaiknya kondisi perekonomian pasca pandemi covid-19 dimana permintaan daging meningkat sehingga mendorong peningkatan pemotongan sapi, ayam, maupun babi, sedangkan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan pada tahun 2022 mencapai 58.065,88 ton. Dimana jumlah kelompok tani yang berada pada kelas madya dan utama sebanyak 27 kelompok, sementara realisasi pada tahun 2021 baru sebanyak 24 kelompok tani.

Disisi lain kinerja terkait penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular mengalami peningkatan tajam dari tahun 2021 menurun sebesar 44,49% menjadi meningkat tajam sebesar 7.108 % di tahun 2022. Tidak tercapainya kinerja ini disebabkan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan *Lumpy Skin Diseases* (LSD) yang masih menjadi ancaman di tahun 2023. Wabah kedua penyakit ini yang muncul di tahun 2022 telah mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi para peternak, dan wabah 2 penyakit ternak ini masih menjadi ancaman untuk dua tahun ke depan.

Berikut kinerja terkait penyelenggaraan urusan pertanian.

Tabel 2.64.

Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Tahun 2018-2022

NO	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah petani yang tergabung dalam kelompok tani (orang)	9.679	9.492	10.285	9.902	10.108
2	Jumlah kelompok tani yang terbina (kelompok)	18 (gapoktan)	19 (gapoktan)	24 (gapoktan)	24 (gapoktan)	27
3	Jumlah kawasan pertanian perkotaan (kelurahan)	37	66	91	104	124
4	Jumlah Produksi Peternakan (Ton)	33.703	37.347	35.045	33.254,34	39.690,27
5	Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dalam Ton)	51.009	51.696	51.379	53.527,47	58.065,88
6	Jumlah sertifikat dan rekomendasi penjaminan BAH (Sertifikat NKV)	9	14	19	22	29
7	Produktivitas pertanian pangan utama (padi dan jagung) per hektar per tahun	NA	NA	6,38 ton/ha/ta hun	6,38 ton/ha/ta hun	6,96 ton/ha/ta hun
8	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	NA	NA	44,44%	44,49%	(7.108) %
9	Sentra produk unggulan pertanian (kawasan - komoditas)	NA	NA	3 Kawasan	4 Kawasan	4 kawasan

Sumber: Dinas Pertanian, 2023

Permasalahan secara umum yang dihadapi diantaranya terkait kualitas kelembagaan petani yang masih rendah dan tingkat partisipasi anggota kelompok tani juga relatif sangat rendah dimana pada sebagian besar kelompok tani hanya

beberapa anggota saja yang aktif, selain itu juga masih menjadi ancaman wabah penyakit pada ternak untuk dua tahun ke depan.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Kinerja dalam penyelenggaraan Urusan Pilihan Perdagangan dapat ditunjukkan diantaranya dengan prestasi sebagai berikut: Pasar Johar Kota Semarang mendapatkan sertifikat sebagai Pasar Rakyat ber-SNI; Juara 1 Stand Terbaik Bandung *Tourism, Craft, Trade and Investment* (Bandung TCTI) 2022; Juara 1 Stand Terbaik Pameran Produk Unggulan Perdagangan, Pariwisata dan Investasi Jakarta ITT 2022; Juara 1 Stand Terbaik Pameran Produk Unggulan Perdagangan, Pariwisata dan Investasi Jakarta TCTI EXPO 2022; dan *Inacraft Best Booth* Pameran Inacraft 2022 Jakarta *Convention Centre* (JCC).

Sebagai kota yang perekonomiannya bertumpu pada sektor perdagangan, kontribusi sektor perdagangan pada PDRB Kota Semarang memiliki peranan yang penting terhadap kemajuan perekonomian Kota Semarang. Nilai ekspor Kota Semarang dari tahun ke tahun berfluktuasi. Pada tahun 2022 Nilai Ekspor Kota Semarang mengalami peningkatan menjadi sebesar US\$ 1.334.629.083, namun capaiannya hanya sebesar 40,78% dari target US\$ 3.272.281.681,82. Hal ini disebabkan terjadinya perang Rusia vs Ukraina yang berdampak pada harga minyak dunia, dan menyebabkan inflasi di beberapa negara Eropa, dimana beberapa negara sasaran ekspor dari Kota Semarang juga mengalami kontraksi secara ekonomi. Selain itu juga dampak pandemi yang masih dirasakan sehingga adanya pembatasan dari negara tujuan untuk menekan impor dari negara eksportir Indonesia, mengingat barang harus menjalani karantina yang membutuhkan waktu cukup lama, sehingga mengakibatkan turunnya permintaan barang dari Indonesia.

Pada tahun 2022 kinerja persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku mengalami penurunan menjadi 67,32%. Hal ini disebabkan kewenangan metrologi berkurang sehingga pendapatan turun seperti contohnya sudah tidak ada tera ulang argo taxi karena sudah beralih ke *taxi online*. Selain itu, meter Listrik PLN sudah tidak di tera lagi karena meter listrik PLN diganti meter baru, Meter PDAM sudah tidak ditera lagi karena meter PDAM diganti tiap 5 tahun sekali, serta tera ulang alat-alat kesehatan yang dulu kewenangan Meterologi Legal kini beralih ke Dinas Kesehatan. Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai, antara lain karena kegiatan untuk melindungi konsumen dilakukan melalui pengawasan kemetrologian dan pelayanan tera serta tera ulang yang dilaksanakan oleh UPTD Metrologi Legal.

Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di tahun 2022 juga mengalami penurunan karena ada pengurangan item produksi dari perusahaan yang diawasi dan adanya perlambatan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Walaupun mengalami penurunan nilai capaian dari tahun 2021 sebesar 86,67% menjadi 76,00% di tahun 2022, hasil capaian tersebut sudah memenuhi target yg ditentukan 64,00% tahun 2022.

Tabel 2.65.

Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/ IUTS/SIUP Toko Swalayan)	NA	100%	100%	100%	100%
2	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	80%	70,08%	66,29%	72,96%	67,32%

No	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022
3	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	86,00%	80,67%	83,33%	86,67%	76,00%
4	Persentase penanganan pengaduan konsumen	NA	90,01	79,87	NA	84,00
5	Nilai Ekspor kota Semarang	1.163.718.499 US\$	1.101.478.622 US\$	3.084.439.326,82 US\$	1.117.549.543 US\$	1.334.629.083 US\$

Sumber: Dinas Perdagangan, 2023

e. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Kinerja penyelenggaraan pada Urusan Pilihan Perindustrian dapat ditunjukkan diantaranya dengan penghargaan kepada IKM Batik Zee berhasil Juara OVOP Bintang 3 untuk katagori produk kain Batik yang diberikan oleh Kementerian Perindustrian pada tahun 2022.

Kinerja lain yang mendukung pelaksanaan Urusan Perindustrian diantaranya Pemenuhan data industri di SIINas (Sistem informasi Industri Nasional) bisa tercapai dengan baik yaitu sebesar 6,41%.

Pemerintah Kota Semarang mendorong para pelaku IKM untuk registrasi di SIINas agar terpantau kondisi industri dan kawasan industri secara menyeluruh, tersedianya data industry yang memadai sehingga menghasilkan kebijakan industri yang tepat. Selain itu juga terjadi Pertambahan jumlah sentra IKM dari yang ditargetkan 84% (target 2022: 21 sentra IKM dari total target 25 sentra) tercapai 84% atau berhasil tercapai 100%. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya (Tahun 2021 20 sentra) sebesar 80% (20 sentra IKM).

Juga tercapainya pertambahan IKM sebanyak 20 IKM (0,5%). Dengan capaian ini diharapkan meningkatkan kapasitas/keterampilan SDM pelaku Industri Kecil dan Menengah. Dan Optimalisasi Sentra IKM. Memperluas jaringan pemasaran/penjualan produk IKM sehingga bisa dikenal dan bersaing baik ditingkat lokal maupun nasional. Hal ini bisa berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan pelaku IKM yang pada akhirnya membawa kesejahteraan masyarakat.

Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota di tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 1,23% lebih tinggi dari capaian pada tahun 2021 yang sebesar 0,50%. Selain itu, Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan di tahun 2022 juga mengalami peningkatan menjadi 11,87% lebih tinggi dari capaian pada tahun 2021 yang sebesar 10,00%.

Tabel 2.66.

Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB (ADBK)	27,88	27,44	28,64	28,65	28,85
2	Kontribusi kategori Industri Pengolahan thd PDRB (ADBK)	25,27	25,64	26,20	26,21	26,23
3	Jumlah Industri Kecil dan Menengah	3.542	3.570	3.587	3.638	3683
4	Berkembangnya industri kreatif dan industri kecil	2782	2790	2.805	2840	2885
5	Jumlah kluster industri	10	10	10	10	10
6	Pengembangan kawasan sentra- sentra industri potensial	20 sentra	20 sentra	20 Sentra	20 Sentra	21 Sentra
7	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	NA	NA	0,48%	0,50%	1,23%
8	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	NA	NA	50%	50%	50%

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
9	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan	NA	NA	0%	10%	11,87%
10	Sentra produk unggulan (kawasan – Logam)	0	0	0	0	1
11	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	NA	NA	0%	0%	12,50%
Indikator SDGs						
12	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	27,22	27,43	28,56	28,65	28,85

Sumber: Dinas Perindustrian, 2023

2.1.3.4. Unsur Pendukung

a. Sekretariat Daerah

Kinerja Unsur pendukung Sekretariat Daerah sebagai fungsi koordinatif Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah diantaranya dapat ditunjukkan dengan penghargaan dan prestasi yang diterima Kota Semarang selama tahun 2022, diantaranya : Predikat BB (Sangat Baik) SAKIP dan Reformasi Birokrasi (RB) Tingkat Nasional oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Reformasi Birokrasi ; Perumda BPR Bank Pasar mendapatkan TOP BUMD AWARD Tingkat Nasional untuk kategori : Pembina BUMD terbaik (Wali kota Semarang), CEO BUMD Terbaik (Direktur Utama Perumda BPR Bank Pasar), BUMD Terbaik (Bintang Empat); Urutan ke 12 Kota Se Indonesia yang melakukan upaya konkret dalam pengendalian inflasi; Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) 2022 dari BPJS Kesehatan; Penghargaan Karya Bhakti dari Menteri Dalam Negeri Tahun kepada kota/kabupaten yang dinilai berprestasi dalam penyelenggaraan penegakan Perda, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; Pemenang Terbaik 1 dalam program Integrated-Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) for Cities Award dan melalui program Kampung Tematik sebagai inovasi untuk mendukung dan meningkatkan capaian SDGs/TPB di Kota Semarang dari PT Surveyor Indonesia, Bappenas dan APEKSI pada ajang Indonesia's SDGs Annual Conference tahun 2022; Penghargaan sebagai Kota Terinovatif pada Innovative Government Award (IGA) 2022 dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan masih banyak lainnya.

Pada tahun 2022 terdapat kinerja yang pencapaiannya melebihi target yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 88,63 dari target yang ditetapkan sebesar 88,00, yang mengindikasikan Pemerintah Kota Semarang selalu meningkatkan komitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih kepada masyarakat. Selain itu Indikator yang mengalami peningkatan adalah Indeks Reformasi Birokrasi yang pada tahun 2022 terealisasi sebesar 72,68 dan penilaian evaluasi atas penerapan SAKIP dengan predikat BB (70,35) yang meningkat jika dibandingkan tahun 2018-2021 masih dengan predikat B, meski secara angka absolut setiap tahunnya terjadi peningkatan. Dan ini menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan terus meningkat.

Kinerja pada bidang Penyusunan Produk Hukum Daerah pada tahun 2022 menghasilkan sebanyak 8 Peraturan Daerah Kota Semarang yang merupakan inisiatif Eksekutif, 77 Peraturan Walikota Semarang, dan 620 Keputusan Walikota Semarang. Hal ini bertujuan memberikan kepastian hukum melalui penyediaan dan penyusunan Produk Hukum Daerah sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tabel 2.67.
Realisasi Kinerja Unsur Pendukung Sekretariat Daerah
Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Evaluasi atas penerapan SAKIP)	Predikat	B 67,92	B 68,12	B 68,52	B 69,44	BB 70,35
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	83,25	83,81	86,68	87,35	88,63
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai Indeks	68,86	69,46	69,78	71,03	72,68
4	Nilai dan status kinerja Pemerintah Daerah (Nilai EKPPD)	Nilai	3,41/ST	3,414/ST	3,439/ST	3,44/ST	3,44/ST
5	Tersusun dan terintegrasinya program kerja DPRD dalam fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	%	100	100	100	100	100
6	Jumlah Produk Hukum: ● Peraturan Daerah ● Peraturan Wali Kota ● Keputusan Wali Kota	Perda Perwal SK Wali kota	11 94 405	8 73 420	5 94 426	13 124 533	8 77 620
7	Terfasilitasi dan terselesaikannya kasus pemerintahan	Kasus	18	35	28	23	28
8	Jumlah raperda yang disetujui DPRD	Raperda	6 (dari target 19 Raperda)	8 (dari target 15 Raperda)	5 (dari target 16 Raperda)	13 (dari target 10 Raperda)	8 (dari target 15 Raperda)

Sumber: Sekretariat Daerah, 2023

b. Sekretariat DPRD

Dalam menjalankan fungsi legislasi yang berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah, kinerja DPRD diantaranya ditunjukkan dengan belum tercapainya pemenuhan target penetapan dari 15 Perda yang direncanakan. Hal ini disebabkan kurangnya kesiapan materi dari OPD pengusul Raperda dan adanya perubahan perundang-undangan dari tingkat pusat, sehingga pada tahun 2022 baru dapat terealisasi 8 Perda, yaitu Perda tentang Retribusi Perizinan tertentu, Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Raperda tentang Keamanan Pangan, Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Kita Semarang tahun 2021, Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD Tahun 2022-2026, Raperda tentang Perubahan APBD Tahun 2022, Raperda tentang APBD Tahun 2023 dan Raperda tentang Kota Layak Anak.

Kinerja lain terkait nomenklatur program kerja DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan fungsi anggaran DPRD telah termuat dalam RPJMD maupun RKPD sebesar 100%, sesuai nomenklatur Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tabel 2.68.
Kinerja Daerah Unsur Pendukung Sekretariat DPRD
Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Tersusun dan terintegrasinya program kerja DPRD dalam fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Jumlah raperda yang disetujui DPRD	6 (dari target 19 Raperda)	8 (dari target 15 Raperda)	5 (dari target 16 Raperda)	13 (dari target 10 Raperda)	8 (dari target 15 Raperda)

Sumber: Sekretariat DPRD, 2023

2.1.3.5. Unsur Penunjang

a. Perencanaan

Kinerja pada unsur penunjang Perencanaan dapat ditunjukkan diantaranya dengan diraihinya penghargaan, diantaranya: Pemenang Terbaik I Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) for Cities 2022 dari Kementerian PPN/Bappenas dan Kota Terbaik II Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Kinerja lain yang merupakan lintas sektor koordinasi ditandai dengan terbitnya beberapa regulasi terkait Dokumen Perencanaan Tahunan (Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 Penetapan RKPD Tahun 2023, Penetapan Lokasi dan Tema Kampung Tematik Kota Semarang Tahun 2022 (Keputusan Walikota Semarang Nomor 050/488), Tim percepatan Technopark (Keputusan Walikota Semarang Nomor 050/642 Tahun 2022) dan lainnya.

Capaian kinerja pada Urusan Penunjang Perencanaan pada tahun 2022 diukur dari Kesesuaian program di RPJMD dengan program di RKPD tahunan 100 %, dan Kesesuaian program di RKPD tahunan dengan program di APBD tahunan 100 %.

Beberapa dukungan kegiatan dalam rangka mencapai kinerja perencanaan tersebut diantaranya: Pelaksanaan Konsultasi Publik, Forum Lintas OPD, Musrenbang Kota, Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Kegiatan Pengendalian, Evaluasi & Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, serta Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, Perekonomian dan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

Tabel 2.69.
Realisasi Kinerja Unsur Penunjang Perencanaan Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Perda tepat waktu	3	2	2	2	2
2	Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPD (%)	98,91	98,90	94,16	100	100
4	Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD	74,23	75,14	75,70	79,44	81,50
5	Tersedianya Dokumen RPJPD dan RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA secara tepat waktu.	2	2	2	2	2
6	Kesesuaian Program di RKPD tahunan dengan Program di APBD tahunan	100	100	100	100	100

Sumber : Bappeda, 2023

Dalam penyelenggaraan unsur penunjang perencanaan terdapat permasalahan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain: SIPD belum memfasilitasi sampai pada monev kinerja, sehingga masih memerlukan dukungan aplikasi lokal dalam penyusunan monev kinerja, selain itu dengan dilaksanakan pilkada serentak pada tahun 2024, harus dilakukan percepatan pencapaian kinerja mengingat periode pelaksanaan RPJMD tahun 2021-2026 akan habis pada tahun 2025. Sehingga diperlukan skala prioritas dalam penganggaran pembangunan. Terbitnya Kepmendagri terkait updating nomenklatur ditengah tahun berjalan, berpeluang menyumbangkan inkonsistensi antara dokumen strategis dengan dokumen operasionalnya sehingga menyebabkan perlunya penyesuaian pada dokumen perencanaan di Kota Semarang.

b. Keuangan

Kinerja penyelenggaraan unsur penunjang keuangan salah satunya adalah Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2021 dari BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, dan ini merupakan tahun ke tujuh diperoleh opini WTP sejak tahun 2016.

Tingkat kemandirian keuangan daerah (Rasio PAD dibanding Pendapatan Daerah) pada tahun 2022 sebesar 52,03 % meningkat jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yang sebesar 49,4%. Hal ini mengindikasikan pemulihan ekonomi masyarakat akibat pandemi dan inflasi sudah menunjukkan kinerja positifnya. Kinerja lain terkait SILPA APBD mencapai 6,02% atau sebesar Rp319.157.987.567,00. SILPA APBD Kota Semarang pada tahun 2022, dimana sumbangan terbesar karena Penundaan Penyertaan Modal pada BUMD (Penyertaan Modal pada PT BPS sebesar Rp2.000.000.000,00 dan PT Taman Satwa sebesar Rp20.000.000.000,00), sedangkan sisanya disumbangkan efisiensi belanja dan tidak tercapainya target belanja secara keseluruhan OPD di Kota Semarang.

Permasalahan yang ditemui dalam penyelenggaraan Fungsi Keuangan pada tahun 2021 adalah dampak pandemi yang berimbas di berbagai sektor dan dinamika regulasi yang cepat dan kompleks, menuntut penyesuaian dalam dokumen anggaran tanpa mengurangi akuntabilitas pemerintah daerah. Selain itu juga terkait optimalisasi pencatatan dan pemanfaatan aset milik daerah untuk mendukung pembangunan.

Tabel 2.70.
Realisasi Kinerja Unsur Penunjang Keuangan Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Tingkat kemandirian keuangan daerah (Persentase Realisasi PAD terhadap Realisasi Pendapatan Daerah)	43,01%	45,29%	46,01%	49,47%	52,03%
2	Persentase Silpa Terhadap APBD	3,68%	1,65%	6,50%	5,17%	6,02%
3	Persentase pengelolaan keuangan daerah	98,04%	98,31%	98,11%	96,42%	97,79%
4	Persentase nilai aset yang dikelola	NA	NA	NA	89,51%	98,55%

Sumber : Tahun 2022 LRA dan Neraca Unaudited BPK masih dalam proses pemeriksaan BPK

c. Kepegawaian

Kinerja pada penyelenggaraan Unsur Penunjang Kepegawaian dapat ditunjukkan salah satunya dengan diraihnya Perhargaan Meritokrasi Tingkat Jawa Tengah Tahun 2022 dengan Kategori Baik. Selain itu juga disusunnya Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Pegawai

Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Maksud disusunnya Perwal ini adalah memberikan kejelasan dan kepastian karier kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dalam Pengembangan karier yang dilaksanakan sesuai prinsip profesionalisme yaitu dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang Pangkat yang ditetapkan serta syarat objektif lainnya

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara hasil penilaian mandiri tahun 2021 sebesar 83,84 namun kemudian sejak terbit ketentuan bahwa BKN yang akan melakukan evaluasi secara nasional, sehingga kemudian hasil penilaian Indeks Profesionalisme ASN Kota Semarang Tahun 2021 yang dilakukan pengukuran pada tahun 2022 sebesar 51,23 (Sangat Rendah) dengan aspek penilaian Kualifikasi (13,31), Kompetensi (8,04), Kinerja (24,90), dan Disiplin (4,99). Disisi lain Indeks Sistem Merit Kota Semarang sebesar 0,66 yang meningkat kinerjanya jika dibandingkan tahun 2021 sebesar 0,44 sedangkan Indeks Kepuasan Aparatur terhadap layanan kepegawaian pada tahun 2022 sebesar 91,88.

Salah satu isu terkait pembinaan kepegawaian dapat dilihat dari penegakan disiplin pegawai. Pada tahun 2022 terdapat 24 pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin. Hukuman disiplin berupa teguran diberikan kepada 11 orang, sanksi penundaan kenaikan gaji berkala dan atau penurunan pangkat diberikan kepada 6 orang, dan penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan jabatan menjadi pelaksana, dan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS dijatuhkan kepada 7 orang pegawai dengan hukuman berupa.

Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural tahun 2022 yang sebesar 100% dengan 5 orang lulus. Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis dan fungsional meningkat dari tahun 2021 menjadi sebesar 404 orang di tahun 2022.

Tabel 2.71.
Realisasi Kinerja Unsur Penunjang Kepegawaian
Tahun 2018-2022

NO	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	84,24	78,42	82,28	83,84	83,84
2	Indeks Kepuasan Aparatur terhadap Layanan Kepegawaian	NA	NA	NA	91,79	91,88
3	Indeks Sistem Merit	NA	NA	NA	0,44	0,66
4	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Badan Kepegawaian dan Diklat, 2023

d. Pendidikan dan Pelatihan

Kinerja pada unsur penunjang Pendidikan dan Pelatihan dapat ditunjukkan dengan diraihnya pencapaian, yaitu Sertifikasi ISO 9001: 2015 sistem manajemen mutu pada penyelenggaraan Diklat serta Sarana dan Prasarana Pengelola Diklat (berlaku selama 3 tahun).

Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural tahun 2022 yang sebesar 100% dengan 5 orang lulus. Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis dan fungsional meningkat dari tahun 2021 menjadi sebesar 404 orang di tahun 2022.

Tabel 2.72.
Realisasi Kinerja Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan
Tahun 2018-2022

NO	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	127 Orang (Lulus 100%)	67 Orang (Lulus 100%)	74 Orang (Lulus 100%)	60 Orang (Lulus 100%)	5 Orang (Lulus 100%)
2	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional	550 Orang	372 Orang	397 orang	397 Orang	404 Orang
3	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	NA	NA	5,60%	16,15%	41,68%
4	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	NA	NA	100%	100%	100%
5	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	NA	NA	85%	85%	35%

Sumber: Badan Kepegawaian dan Diklat, 2023

e. Penelitian dan Pengembangan

Kinerja pada unsur penunjang Penelitian dan Pengembangan diantaranya ditunjukkan Kota Semarang meraih prestasi dan penghargaan sebagai Juara I Anugerah Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kategori Ekosistem Inovasi dari Gubernur Jawa Tengah. Selain itu, pada tahun 2022 mendapatkan Penghargaan Kota Terinovatif dari Innovative Government Award (IGA) Tahun 2022 dari Menteri Dalam Negeri, yang diserahkan pada tanggal 23 Desember 2022, Juara Umum Kota pada Anugerah Pemetaan Daya Saing Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 dari Gubernur Jawa Tengah, yang diserahkan pada tanggal 19 Desember 2022, dan Fasilitasi peraihan Pemenang Utama dan Pemenang Favorit Lomba Kreativitas dan Inovasi Masyarakat (KRENOVA) Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada Penjaringan Inovasi Masyarakat Tahun 2022, yang diserahkan pada tanggal 23 November 2022; untuk inovasi SIATEX (Sistem Informasi Akademik untuk mempermudah administrasi guru dan membantu pengelolaan sekolah) dan inovasi Digital Smart Farm 4.0.

Indeks Inovasi Daerah menunjukkan capaian penyelenggaraan inovasi di daerah. Pada tahun 2022 Kota Semarang mencapai 60,79 meningkat jika dibandingkan tahun 2021 sebesar 57,49, meskipun secara predikat Kota Semarang termasuk dalam kategori Inovatif. Secara struktur, Indeks Inovasi Daerah terdiri dari 2 aspek, 8 variabel, dan 36 indikator. Jika dilihat dari cakupan perangkat daerah yang mendapatkan fasilitasi melaksanakan inovasi daerah dari tahun ke tahun menunjukkan kinerja yang positif, dan pada tahun 2022 mencapai 47,06% atau sebanyak 24 OPD dari 51 OPD secara keseluruhan.

Tabel 2.73.
Realisasi Kinerja Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan
Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100	100	100	100	100
2	Persentase perangkat daerah yang terfasilitasi dan melaksanakan inovasi daerah	N/A	N/A	21,57	35,29	47,06
3	Indeks Inovasi Daerah	N/A	N/A	1423 (DO lama)	57,49	60,79

Sumber : Bappeda, 2023

Jumlah kajian yang dilakukan pada tahun 2022 sebanyak 9 kajian, meningkat dari tahun 2021 yang sebesar 6 kajian karena alokasi anggaran terdapat kebijakan *refocusing* untuk penanganan dampak pandemi. Ke sembilan kajian tersebut adalah:

1. Kajian Kesiapan Pelaku Usaha Kuliner Kota Semarang dalam Implementasi Sertifikasi Produk Pangan Halal (LPPM UNDIP)
2. Kajian Strategi Pengembangan Integrated and Sustainable Tourism (Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan) di Kota Semarang (LPPM UNNES)
3. Kajian Implementasi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kota Semarang (LPPM UNNES)
4. Kajian Pembangunan Kota Semarang (UNIVERSITAS TRILOGI)
5. Kajian Analisis Banjir Genangan di Kawasan Tembalang dan Sekitarnya (LPPM UNNES)
6. Kajian Estimasi Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Berdasarkan Sebaran Urban Heat Island (UHI) di Kota Semarang (PT Tata Rekapraya Utama)
7. Kerjasama Persepsi Stakeholder Terhadap Branding Kota Semarang 2022 (PT Markplus Indonesia)
8. Kajian Strategi Pemasaran Kota Semarang (PT. Tigakalitiga)
9. Kajian Model Pengembangan Kawasan Pusat Kota Semarang (Fakultas Teknik UNDIP)

2.1.3.6. Unsur Pengawas

a. Inspektorat Daerah

Sistem Pengendalian Intern menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP yang merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta pemantauan. Pada tahun 2022 nilai maturitas SPIP Pemerintah Kota Semarang sebesar 3,012 (Terdefinisi) yang artinya Pemerintah Kota Semarang telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kesesuaian Laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern. Pemerintah Kota Semarang berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022. Sehingga telah memperoleh WTP selama 7 (tujuh) tahun berturut-turut sejak Tahun 2016.

Level kapabilitas APIP menunjukkan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi yang harus dimiliki agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Semakin tinggi levelnya maka semakin baik kapabilitasnya APIP. Capaian kapabilitas APIP Kota Semarang Tahun 2022 telah sepenuhnya berada pada level 3 (integrated). Penerapan manajemen risiko yang efektif akan membantu instansi pemerintah untuk meminimalkan dampak risiko yang berpotensi menghambat dalam mencapai tujuan, serta memaksimalkan nilai bagi para stakeholders. Terkait Survei Penilaian Integritas (SPI) yang merupakan alat ukur

yang dikembangkan oleh KPK untuk mengetahui peta risiko korupsi dalam pengelolaan anggaran dan mengukur efektivitas pencegahan korupsi yang dilakukan pemerintah daerah, pada tahun 2022 terjadi penurunan nilai dari tahun 2021 sebesar 78,21 menurun menjadi sebesar 74,1. Meski demikian nilai tersebut masih diatas rata-rata nasional yang sebesar 71,94.

Sedangkan kinerja terkait penilaian baseline indeks penerapan manajemen risiko pada Pemerintah Kota Semarang Tahun 2022 telah memenuhi kriteria pada tingkat “Repeatable” atau level 2 dengan skor sebesar 2,820. Adapun target yang diharapkan adalah dapat mencapai level 3 pada tahun 2024 sesuai surat edaran BPKP Perwakilan Prov. JATENG Nomor S-619/PW11/3.1/2021 Perihal Atensi kebijakan Pembinaan SPIP dan MR tahun 2020-2024.

Tabel 2.74.

Realisasi Kinerja Unsur Pengawas Inspektorat Daerah Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Opini BPK atas hasil laporan keuangan pemerintah daerah (opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Indeks Penerapan Manajemen Resiko	NA	NA	NA	2,025	2,820
3	Tingkat Maturitas SPIP (leveling)	NA	NA	3	2	3
4	Kapabilitas APIP	2	2	3	3	3
5	Nilai Survey penilaian Integritas (SPI)	NA	NA	NA	78,21	74,1

Sumber: Inspektorat, 2023

2.1.3.7. Unsur Kewilayahan

a. Kecamatan

Sebagai unsur Kewilayahan, 16 Kecamatan di Kota Semarang melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu. Fungsi Penunjang Kewilayahan diarahkan pada meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan meningkatnya manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Secara umum kinerja kecamatan dalam bidang urusan pemberdayaan masyarakat diukur melalui persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif, dimana pada tahun 2022 terealisasi sebesar 95,00 %, sedangkan kinerja dalam fungsi pemerintahan dan pelayanan publik diukur dengan persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE) yang realisasinya sebesar 92,65%, pada fungsi Ketentraman Dan Ketertiban Umum diukur dari persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum akibat pelanggaran perda di kewilayahan sebesar 10,16% , sedangkan pada Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum diukur dari Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang terealisasi sebesar 89,940%.

Indikator yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan adalah: Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima layanan berbasis teknologi informasi (SPBE); Persentase Tingkat partisipasi masyarakat; Presentase partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Trantibum dan Wawasan Kebangsaan ditingkat kewilayahan; dan Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif. Dimana keempat indikator tersebut mempunyai capaian positif pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan semakin tingginya kesadaran masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di wilayahnya.

Disisi lain perangkat daerah kecamatan selalu memberikan dukungan terhadap kebijakan strategis (lintas sektor) Pemerintah Daerah di wilayahnya, seperti

halnya keberlanjutan Program Urban Farming, Percepatan Penanganan Stunting, Penanganan Kemiskinan, Operasi Harga Kebutuhan Bahan Pokok, Penanggulangan dan Koordinasi Penanganan Bencana.

Prestasi yang diperoleh pada penyelenggaraan Unsur Penunjang Kewilayahan tahun 2022 adalah penghargaan kepada Kelurahan Pedalangan sebagai Kampung Iklim Kategori Utama dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kecamatan Banyumanik) dan Lima besar Kawasan Tanpa Rokok se-Indonesia Tingkat Nasional Tahun 2022 (Kecamatan Gajahmungkur).

Adapun capaian pada tahun 2022 secara rata-rata dari 16 kecamatan sesuai dari indikator terbut sebagai berikut:

Tabel 2.75.
Realisasi Kinerja Unsur Kewilayahan Kecamatan 2018-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Tingkat partisipasi masyarakat	%	81,64%	82,17%	87,50%	90,11%	94,27%
2	Presentase partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Trantibum dan wawasan kebangsaan ditingkat kewilayahan	%	NA	NA	82,50%	84,34%	89,94%
3	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima layanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	%	NA	NA	85%	91%	92,65%
4	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	NA	NA	95%	95%	95%

Sumber: 16 Kecamatan, 2023 (Data diolah)

2.1.3.8. Unsur Pemerintahan Umum

a. Kesatuan Bangsa dan Politik

Indeks Demokrasi Kota Semarang adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi sebagai acuan perencanaan pembangunan politik di Kota Semarang. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*).

Pengukuran Indeks Demokrasi pada tahun 2022 dari yang ditargetkan 72,20 indeks tercapai 95,35 dengan kategori BAIK meskipun masih perlu dilakukan perbaikan utamanya terkait Peran DPRD (Aspek Lembaga Demokrasi) dan Hak memilih dan Dipilih (Aspek Hak-hak Politik).

Pengukuran Indeks Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK) pada tahun 2022 mencapai 82,13 indeks meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 72,50. Hal ini mengindikasikan meningkatnya pemahaman dan implementasi ideologi Pancasila serta wawasan kebangsaan masyarakat Kota Semarang ditengah kemajuan teknologi yang berpotensi menjadi ancaman terhadap penyusupan ideologi asing yang tidak sejalan.

Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kota Semarang diantaranya adanya masih terjadinya tawuran antar pelajar yang menandakan bahwa masih kurangnya rasa toleransi, saling menghormati dan menghargai antar anggota masyarakat sehingga perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengamalan dan pembumian Pancasila terhadap masyarakat terutama bagi generasi muda, karena generasi muda merupakan ujung tombak dari pembangunan suatu bangsa.

Tabel 2.76.
Realisasi Kinerja Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Demokrasi	Indeks	NA	NA	72,00	72,00	95,35
2	Indeks Pembumihian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK)	Indeks	NA	NA	72,50	72,50	82,13

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2023

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

1. Kemampuan Ekonomi Daerah

PDRB per kapita Kota Semarang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya. PDRB per kapita di tahun 2022 yaitu sebesar 137,12 juta rupiah. Hal ini mengindikasikan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kota Semarang dengan asumsi kesenjangan tidak tinggi. Fluktuasi nilai ekspor disebabkan dampak global pandemic covid, disusul kemudian perang Rusia dan Ukraina.

Tabel 2.77.
Realisasi Kinerja Kemampuan Ekonomi Daerah 2018-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	PDRB per kapita berlaku	Juta Rp	98,10	105,93	114,18	123,67	137,12
2	Nilai Ekspor	US\$	1.163.718.499,82	1.101.478.621,82	3.084.439.326,82	1.117.549.543,14	1.242.337.131

Sumber: Bappeda Kota Semarang, Dinas Perdagangan Kota Semarang, 2023

2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur Kota Semarang meliputi aksesibilitas wilayah, penataan wilayah, ketersediaan air bersih, ketersediaan fasilitas listrik dan telepon, fasilitas perdagangan dan jasa serta ketersediaan fasilitas lainnya. Ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan salah satu daya tarik Kota Semarang dalam meningkatkan daya saing daerah.

a. Aksesibilitas Daerah

Kota Semarang selain merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah, juga merupakan jalur perlintasan dari wilayah barat (Jakarta) menuju wilayah Timur (Surabaya) dan Selatan (Yogyakarta) atau sebaliknya sehingga Kota Semarang merupakan penopang jalur distribusi perekonomian Jawa Tengah. Ketersediaan sarana yang memadai dalam mendukung aksesibilitas daerah di Kota Semarang antara lain:

- 1) Sarana jalan di Kota Semarang terdiri dari Jalan Nasional, Provinsi dan Pemerintah Kota. Dengan kondisi jalan Kota sesuai SK Wali kota sepanjang 839,901 km. Jalan dengan kondisi baik pada tahun 2022 yaitu sepanjang 391,837 km (46,65%), kondisi sedang sepanjang 385,199 km (45,86%), kondisi rusak ringan sepanjang 37,309 km (4,44%) dan kondisi rusak berat sepanjang 25,756 km (3,07%)
- 2) Bandar Udara Internasional Ahmad Yani yang melayani penumpang domestik dan internasional. Pengembangan terminal baru telah beroperasi pada pertengahan tahun 2018 dan diharapkan akan makin meningkatkan kapasitas pelayanan Bandara Ahmad Yani. Untuk tahun 2020 di Bandara Achmad Yani

dilakukan sebanyak 17.681 kali penerbangan kedatangan dengan jumlah penumpang sebanyak 1.948.569 orang dan 17.673 kali penerbangan pemberangkatan. Dengan jumlah penumpang sebanyak 1.919.405 orang, serta penumpang transit sebanyak 21.144 orang.

- 3) Pelabuhan Tanjung Emas yang merupakan pelabuhan pelayaran nusantara untuk melayani penumpang kapal antar Provinsi, juga beberapa kapal pesiar internasional telah singgah dipelabuhan ini. Pelabuhan Tanjung Emas melayani angkutan barang dan penumpang, ditunjang keberadaan Terminal Peti Kemas yang melayani bongkar muat muatan baik nasional maupun internasional.
- 4) Terminal bus untuk melayani angkutan bus di dalam kota, antar kota bahkan antar provinsi. Beberapa terminal di Kota Semarang berdasarkan tipe pelayanan yaitu: Terminal Penumpang Tipe A Mangkang (kewenangan Pusat) berlokasi di Kelurahan Mangkang Kulon Kecamatan Tugu, Terminal Penumpang Tipe B Penggaron (kewenangan Provinsi) berlokasi di Kelurahan Penggaron Kidul di Kecamatan Pedurungan, Terminal Penumpang Tipe C (kewenangan Pemerintah Kota Semarang) ada 3 (tiga) yaitu Terminal Cangkiran yang berlokasi di Kelurahan Cangkiran Kecamatan Mijen, Terminal Gunungpati yang berlokasi di Kelurahan Cepoko Kecamatan Gunungpati dan Terminal Terboyo berlokasi di Kelurahan Terboyo Wetan Kecamatan Genuk.
- 5) Stasiun kereta api di Kota Semarang untuk melayani angkutan penumpang dan barang. Untuk pelayanan angkutan kelas Eksekutif dan Bisnis pelayanan diutamakan di Stasiun Tawang, sedangkan pelayanan angkutan penumpang kelas ekonomi dan bisnis dipusatkan di Stasiun Poncol.

Rasio konektivitas kabupaten/kota pada tahun 2020 hingga 2018 terus mengalami peningkatan. Data realisasi rasio konektivitas kabupaten/kota tahun 2022 sebesar 0,58. Angka ini menunjukkan bahwa 58% trayek angkutan umum sudah terlayani guna mendukung pergerakan masyarakat dalam beraktivitas.

Tabel 2.78.
Realisasi Kinerja Fungsi Aksesibilitas Daerah 2018-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Rasio	NA	NA	0,5647	0,5703	0,5800

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2023

b. Penataan Wilayah

Penataan wilayah Kota Semarang terbagi menjadi kawasan yang berfungsi lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung, meliputi kawasan yang melindungi kawasan di bawahnya, kawasan lindung setempat dan kawasan rawan bencana. Kawasan yang melindungi kawasan di bawahnya adalah kawasan-kawasan dengan kemiringan >40% yang tersebar di wilayah bagian selatan. Kawasan lindung setempat adalah kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan waduk, dan sempadan mata air. Kawasan lindung rawan bencana merupakan kawasan yang mempunyai kerentanan bencana longsor dan gerakan tanah. Kawasan budidaya merupakan kawasan yang secara karakteristik wilayah dikembangkan sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah. Kawasan yang dikembangkan berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah adalah sebagai berikut: kawasan perdagangan dan jasa, kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, kawasan pendidikan, kawasan pemerintahan dan perkantoran, kawasan industri, kawasan olahraga, kawasan wisata/rekreasi, kawasan perumahan dan permukiman, kawasan pemakaman umum, kawasan khusus dan kawasan terbuka non hijau. Namun seiring dengan pesatnya perkembangan pembangunan kota banyak timbul pusat-pusat kegiatan baru seperti kawasan industri,

perdagangan/jasa dan tumbuhnya kawasan-kawasan permukiman di daerah pinggiran kota.

Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan Kota Semarang dalam kurun waktu tahun 2020-2022 mengalami peningkatan yaitu dari angka 44,21% pada tahun 2020, meningkat menjadi 44,67% tahun 2021, dan di tahun 2022 kembali meningkat menjadi 44,82%.

Selain itu indikator persentase kesesuaian tata ruang dengan realisasi di tahun 2022 sebesar 100% berdasarkan jumlah permohonan KRK yang sesuai Tata Ruang. Rincian perhitungannya adalah dari 2.413 pengajuan KRK, telah diterbitkan 2.413 KRK yang terdiri dari 2.340 KRK boleh dibangun dan 73 KRK tidak boleh dibangun. Realisasi 100% ini konsisten dari tahun 2021 yang meningkat dari tahun 2020 yang sebesar 95,89%. Lebih lanjut KRK yang diterbitkan ini menjadi dasar atau syarat penerbitan Rekomendasi Teknis IMB/PBG.

Realisasi kesesuaian tata ruang tidak lepas dari Pengendalian pemanfaatan tata ruang yang sudah terdigitalisasi melalui aplikasi Tata Ruang Pro Investasi. Aplikasi tersebut dapat diakses oleh masyarakat luas dan memberikan kemudahan investasi terutama kepastian lokasi bagi investor, sehingga permohonan KRK yang diajukan investor sudah dapat diinformasikan secara pasti ketetapan terkait kesesuaian tata ruangnya, sesuai Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031.

Tabel 2.79.

Realisasi Kinerja Fungsi Penataan Wilayah 2018-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	NA	NA	44,21	44,67	44,82
2	Kesesuaian tata ruang	%	NA	NA	95,89	100	100

Sumber: Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2023

c. Ketersediaan Air Minum

Untuk pelayanan umum terhadap fasilitas air minum di Kota Semarang dapat dikatakan mengalami perkembangan yang relatif meningkat tiap tahun, Jumlah pelanggan PDAM Kota Semarang pada tahun 2020 sebanyak 176.042 pelanggan, meningkat menjadi 177.929 pelanggan pada tahun 2021, dan kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi sebesar 181.705 pelanggan. Demikian pula untuk pemakaian air dan penjualan air mengalami peningkatan pada tahun 2022 masing-masing menjadi sebesar 54.058,365 m³ dan Rp. 301.868.878.580,-.

Secara lengkap data banyaknya pelanggan, pemakaian dan penjualan air minum PDAM dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.80.

Perkembangan Jumlah Pelanggan, Pemakaian & Penjualan Air Minum PDAM Tahun 2018 – 2021

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Pelanggan	172.334	174.584	176.042	177.929	181.705
2.	Pemakaian Air (Ribuan m ³)	53.301,67	53.739,007	51.155,716	51.100,925	54.058,365
3.	Penjualan Air (Juta Rp)	206.117,95	257.636,22	276.735,11	293.638,47	301.868,88

Sumber: PDAM Kota Semarang 2023

d. Fasilitas Perdagangan dan Jasa

Kota Semarang sebagai kota perdagangan dan jasa dapat dilihat dari ketersediaan fasilitas hotel, penginapan, restoran/rumah makan, pasar modern dan

pasar tradisional. Sampai dengan tahun 2021 jumlah fasilitas perdagangan dan jasa mengalami peningkatan. Jumlah restoran/rumah makan tahun 2015 sebanyak 345 buah menjadi 1.568 buah di tahun 2021 dan semakin meningkat pada tahun 2022 menjadi 1.675 buah. Selain itu jumlah hotel juga bertambah dari tahun 2015 sebanyak 124 buah menjadi 182 buah di tahun 2021, dengan rincian hotel berbintang sebanyak 92 buah dan hotel non bintang 90 buah. Jumlah hotel di Kota Semarang pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi sebesar 186 buah. Disamping itu juga terdapat fasilitas pendidikan, tempat wisata alam dan wisata religius. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Semarang memiliki daya tarik bagi investor untuk investasi dan para wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk berkunjung di Kota Semarang.

3. Fasilitasi Iklim Berinvestasi

Daya tarik investor untuk menanamkan modalnya sangat dipengaruhi faktor-faktor seperti tingkat suku bunga, kebijakan perpajakan dan regulasi perbankan, sebagai infrastruktur dasar yang berpengaruh terhadap kegiatan investasi. Iklim investasi juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang mendorong berkembangnya investasi antara lain kondisi keamanan dan ketertiban wilayah serta kemudahan proses perijinan.

a. Ketentraman dan Ketertiban

Kondisi keamanan dan ketertiban Kota Semarang relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat maupun kegiatan investasi. Berbagai tindakan kejahatan kriminalitas, unjuk rasa dan mogok kerja yang merugikan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dapat ditanggulangi dengan sigap oleh aparat Pemerintah. Situasi tersebut juga didorong oleh pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya. Pada tahun 2021 angka kriminalitas sebesar 1253 kejadian, menurun dibandingkan angka kriminalitas pada tahun 2020 yang sebesar 1330 kejadian, dan keadaan ini juga membaik dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dimungkinkan karena stabilitas bidang sosial politik juga dipengaruhi oleh aktivitas kelompok masyarakat. Untuk menjalankan fungsi Linmas sebagai garda terdepan pelayanan dan pintu awal informasi bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di setiap RT/RW telah berdiri Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) yang dioperasikan dengan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling). Dan kebijakan Pemerintah Kota Semarang untuk terus meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban mulai dari lingkungan terkecil (RT) dilakukan pemasangan CCTV.

Pada tahun 2022 pencapaian pada indikator persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban turun menjadi sebesar 10,46%, yang terdiri dari 1.404 angka gangguan keamanan dan ketertiban, dan 1.335 angka kriminalitas di Kota Semarang. Angka kriminalitas ini juga mengalami peningkatan di tahun 2022.

Tabel 2.81.

Realisasi Kinerja Fungsi Ketentraman dan Ketertiban 2018-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Angka Kriminalitas	Kejadian	1.443	1.151	1.330	1.253	1335
2	Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban	%	20	15	12,37	11,47	10,46

Sumber: Satpol PP Kota Semarang 2023

b. Kemudahan Perijinan

Sampai dengan tahun 2021, Perijinan dalam berinvestasi dilaksanakan dengan pelayanan perijinan satu pintu, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang, Penyelesaian ijin usaha bagi

investor dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi lokal SIIMUT (Sistem Izin Investasi Mudah dan Terpadu) dengan 27 jenis layanan. Selanjutnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, pengajuan perizinan berusaha serta pengajuan perizinan lainnya di wilayah Pemerintah Kota Semarang dan daerah lainnya menggunakan layanan melalui OSS (*Online Single Submissions*) yang dikembangkan pemerintah pusat untuk semua proses registrasi. Adapun karakteristik izin berusaha oleh pelaku usaha adalah: berbentuk badan usaha maupun perorangan; Usaha mikro, kecil, menengah maupun besar; Usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS. Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun terdapat komposisi modal asing.

Tentunya dalam masa peralihannya, terdapat beberapa kendala dalam pelayanan perijinan tersebut. Dan sampai dengan saat ini telah dilakukan integrasi secara bertahap antara sistem OSS dengan SIIMUT, meski belum sepenuhnya dapat terwujud. Dalam peningkatan pelayanan tentang perijinan berusaha, selain dilakukannya integrasi sistem juga mengajukan ijin kepada Lembaga OSS untuk mendapatkan Notifikasi Komitmen pelaku usaha di OSS, serta tetap mengoperasikan SIIMUT bagi perijinan dan Non perijinan yang tidak terfasilitasi dalam OSS dan PP Nomor 24 tahun 2018.

Kemudahan investasi dapat diukur diantaranya melalui indikator Prosedur ijin terbit perijinan sesuai Standar Pelayanan yang ditetapkan, dimana pada tahun 2021 telah mencapai 99,30% meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 98,70%. Selain itu juga Survei Kepuasan Masyarakat terkait dengan pelayanan perijinan, dimana capaian pada tahun 2021 sebesar 90,10% keadaan ini menurun jika dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 92,13%. Diharapkan adanya Kondisi iklim usaha Kota Semarang yang kondusif akan berpengaruh secara langsung pada perkembangan penanaman modal selanjutnya.

Pada tahun 2022 pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha di Kota Semarang berjalan dengan baik. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang berhasil mencapai target persentase izin terbit sesuai Standar Pelayanan sebesar 95,63% melebihi target yang ditetapkan yaitu 95%.

Tabel 2.82.

Realisasi Kinerja Fungsi Kemudahan Perijinan 2018-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Prosedur ijin terbit sesuai SP (sejak 2020: 174 jenis perijinan dari semula 52 jenis)	%	97,5	98,2	98,7	99,33	95,63%

Sumber: DPMPSTP Kota Semarang 2023

4. Sumber Daya Manusia

a. Kualitas Tenaga Kerja

Sejak tahun 2010 hingga 2020, persentase penduduk Kota Semarang kategori usia muda, usia produktif dan usia lansia tidak banyak berubah. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, baik ditahun 2010 sampai dengan tahun 2020, komposisi penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) di Kota Semarang memiliki persentase terbesar yaitu mencapai 70,66% . Kondisi ini mengindikasikan bahwa Kota Semarang sudah memasuki tahapan bonus demografi (*demographic dividend*). Bonus demografi adalah suatu keadaan kependudukan dimana ketergantungan penduduk berada pada rentang yang terendah. Secara numerik dapat dilihat dengan angka ketergantungan penduduk tahun 2020 sebesar 31,90% yang berada di bawah 50%. Artinya penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sedikit penduduk usia non produktif (<15 dan >64 tahun), dimana kualitas penduduk (baik tingkat

pendidikan, skill, profesionalitas, dan kreativitas) mampu menekan beban ketergantungan sampai tingkat terendah yang berguna untuk mendorong pembangunan ekonomi.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari tahun 2018 sampai dengan 2022 bergerak fluktuatif. TPAK mengalami peningkatan hingga tahun 2020 dan sedikit menurun pada tahun 2021 menjadi 69,41%. Namun, pada tahun 2022 TPAK mulai mengalami peningkatan menjadi sebesar 70,96%.

Presentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi pada tahun 2018-2022 mengalami perubahan secara fluktuatif. Capaian pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 66,25%, meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar 75,00%, dan kembali menurun sebesar 2,26% menjadi 72,74% di tahun 2022.

Tabel 2.83.
Realisasi Kinerja Fungsi Kualitas Tenaga Kerja 2018-2022




No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	65,93	66,87	69,89	69,41	70,96
2	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	%	70,00	66,25	74,00	75,00	72,74
3	Rasio Ketergantungan Penduduk (Data Disdukcapil)	%	NA	NA	41,15	41,10	40,66

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, Dispendukcapil Kota Semarang, 2023

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program Terhadap Target RKPD 2022 dan Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD (Tahun 2026)

Evaluasi capaian indikator kinerja RKPD tahun 2022 ditunjukkan dengan capaian indikator program pembangunan Tahun 2022 yang terkompilasi atas kelompok urusan wajib, urusan pilihan, fungsi penunjang dan fungsi lainnya. Pada evaluasi tersebut, status pencapaian kinerja yang dijabarkan dalam Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022 yang merupakan tahun pertama periode Evaluasi Hasil terhadap target akhir RPJMD Tahun 2021-2026, yang dikelompokkan dalam beberapa kategori status sebagaimana diatur dalam Permendagri No.86 tahun 2017, sebagaimana berikut:

- a. Untuk Pemredikatan Evaluasi terhadap target RKPD tahun 2022 sampai (*) memiliki status:
 - Sangat Tinggi (ST), untuk capaian diatas 90% ($X > 90\%$);
 - Tinggi (T), untuk capaian nilai diatas 75 % sampai dengan 90% ($90\% \geq X > 75\%$);
 - Sedang (S), untuk capaian nilai diatas 65% sampai dengan 75% ($75\% \geq X > 65\%$);
 - Rendah (R), untuk capaian nilai diatas 50% sampai dengan 65% ($65\% \geq X > 50\%$); dan
 - Sangat Rendah (SR), untuk capaian nilai sama atau kurang dari 50% ($X \leq 50\%$).
- b. Untuk Pemredikatan Evaluasi terhadap target akhir RPJMD Tahun 2026 (**) memiliki status:
 - Sangat Tinggi (ST), untuk capaian diatas 18% ($X > 18\%$);
 - Tinggi (T), untuk capaian nilai diatas 15% sampai dengan 18% ($18\% \geq X > 15\%$);
 - Sedang (S), untuk capaian nilai diatas 12% sampai dengan 15% ($15\% \geq X > 12\%$);
 - Rendah (R), untuk capaian nilai diatas 10% sampai dengan 12% ($12\% \geq X > 10\%$); dan

- Sangat Rendah (SR), untuk capaian nilai sama atau kurang dari 10% ($X \leq 10\%$)
- c. Untuk Identifikasi Capaian pada periode akhir RPJMD (***)
-  Tercapai, jika capaian terhadap target akhir RPJMD (tahun 2026) lebih besar atau sama dengan 100 % ($100\% \geq X$);
 -  Akan Tercapai, jika capaian terhadap target akhir RPJMD (tahun 2026) untuk capaian nilai sampai dengan atau diatas 20% hingga kurang dari 100% ($100\% > X \geq 20\%$) besar atau sama dengan 100 % ($100\% \geq X$);
 -  Perlu Upaya Keras, jika capaian terhadap target akhir RPJMD (tahun 2026) kurang dari 20% ($X < 20\%$).

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- (1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi
Gradasi ini menunjukkan pencapaian kinerja telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- (2) Hasil Sedang
Gradasi ini menunjukkan pencapaian kinerja telah memenuhi persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja (cukup).
- (3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Berikut Capaian Indikator Kinerja Program Terhadap Target Tahun 2022 dan terhadap target akhir RPJMD Tahun 2021-2026.

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Wajib Pendidikan

Pencapaian kinerja RKPD Tahun 2022 pada urusan wajib Pendidikan dalam kategori baik. Kondisi ini terlihat dari 12 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, terdapat 9 indikator dalam predikat sangat tinggi dan 3 sisanya dengan predikat kinerja tinggi. Sedangkan terhadap target akhir periode RPJMD, dari 12 indikator yang ada, sebanyak 2 indikator telah tercapai, sedangkan 10 indikator lainnya dalam status akan tercapai, mengingat tahun 2022 merupakan tahun pertama dalam rentang periode yang ada.



Beberapa indikator capaiannya perlu ditingkatkan karena memiliki persentase belum mencapai 100% dibandingkan target tahun 2022 yaitu APK SD/MI; APK SMP/MTs; Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan; Persentase Guru berkualifikasi S1/D-IV; Persentase PAUD dan PNF Swasta yang berijin; dan Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang berijin. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses Pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah jenjang SD/MI dan SMP/MTs perlu ditingkatkan, karena masih terdapat anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Disamping itu perlu upaya peningkatan mutu guru agar melanjutkan S1/D-IV terutama guru PAUD, mendorong pengawasan terhadap perizinan sekolah jenjang PAUD dan PNF serta satuan pendidikan dasar.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2022 pada urusan pendidikan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.84.

Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2022 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2021-2026
Urusan Pendidikan



Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2022	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2022	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	20,00%	ST		Dinas Pendidikan
	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	20,00%	ST		Dinas Pendidikan
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	20,00%	ST		Dinas Pendidikan
Program Pengelolaan pendidikan	APK SD/MI	%	111,69	109,88	98,38%	ST	111,75	109,88	98,33%	ST		Dinas Pendidikan
	APK SMP/MTs	%	115,61	113,67	98,32%	ST	115,65	113,67	98,29%	ST		Dinas Pendidikan
	APK PAUD 5-6 tahun	%	85,81	85,81	100,00%	ST	86,39	85,81	99,33%	ST		Dinas Pendidikan
	Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan	%	6,00	5,00	83,33%	T	14,00	5,00	35,71%	ST		Dinas Pendidikan
Program pengembangan Kurikulum	Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan PNF	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00 %	ST		Dinas Pendidikan
	Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00 %	ST		Dinas Pendidikan
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru berkualitas S1/D-IV	%	89,01	79,50	89,32%	T	90,70	79,50	87,65%	ST		Dinas Pendidikan


Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPDP Tahun 2022	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPDP 2022	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase PAUD dan PNF Swasta yang berijin	%	100,00	88,86	88,86%	T	100,00	88,86	88,86%	ST		Dinas Pendidikan
	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang berijin	%	100,00	99,70	99,70%	ST	100,00	99,70	99,70%	ST		Dinas Pendidikan

Sumber: eMonev Perencanaan

*) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR: $X \leq 50\%$

***) ST: $X > 18\%$; T: $18\% \geq X > 15\%$; S: $15\% \geq X > 12\%$; R: $12\% \geq X > 10\%$; dan SR: $X \leq 10\%$

***): Target Akhir RPJMD : Sudah Tercapai ($X \geq 100\%$) : Akan Tercapai ($100\% > X \geq 20\%$)

: Perlu Upaya Keras ($X < 20\%$)

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan Urusan pendidikan diantaranya:

- Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang masih belum dapat memenuhi kebutuhan ideal terutama di jenjang SD.
- Pemerataan mutu guru sebagai salah satu penentu meningkatnya kualitas pendidikan terutama dalam meningkatkan nilai literasi dan numerasi siswa.
- Masih adanya anak tidak sekolah.

Adapun Rencana Tindak Lanjut yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, yaitu:

- Merekrut guru dan tenaga kependidikan non PNS dengan anggaran APBD Kota Semarang.
- Optimalisasi Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM), Guru Penggerak dan Sekolah Penggerak, Raport Pendidikan untuk mengevaluasi dan melakukan peningkatan mutu pendidikan dari sekolah.
- Meluncurkan aplikasi BAMBUS APUS (Bergerak Bersama Membantu Anak Putus Sekolah) yang dapat diakses oleh masyarakat untuk melaporkan adanya anak usia sekolah yang tidak/belum bersekolah di lingkungannya.
- Kebijakan sekolah swasta gratis di beberapa sekolah swasta berupa pemberian hibah pendampingan BOP TK swasta, hibah pendampingan BOS SD/MI swasta serta hibah pendampingan BOS SMP/MTs.
- Adanya bantuan sosial berupa beasiswa bagi siswa miskin serta siswa miskin berprestasi jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK dan perguruan tinggi.

2. Urusan Wajib Kesehatan

Dalam upaya meningkatkan pelayanan bidang kesehatan, Pemerintah Kota Semarang pada bulan Oktober tahun 2022 menambah 1 (satu) puskesmas induk sebagai unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat yaitu Puskesmas Plamongsari yang saat ini masih menunggu ijin operasionalnya, sehingga jumlah puskesmas di Kota Semarang saat ini menjadi sejumlah 38 puskesmas.

Mendasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), untuk

penghitungan capaian SPM termasuk pada bidang kesehatan sejak tahun 2022 dinilai dari dua aspek, yaitu aspek capaian penerima layanan dan aspek mutu layanan. Dan untuk bidang Kesehatan, capaian SPM tahun 2022 dari aspek penerima layanan sudah tercapai 100 % sedangkan capaian dari aspek mutu layanan sebesar 90,51 %, karena masih kekurangan tenaga kesehatan diantaranya dokter/dokter spesialis kebidanan dan kandungan, spesialis anak, dokter umum, ahli gizi, kader kesehatan, serta tenaga non kesehatan terlatih dari kebutuhan yang ada . Sehingga dari hasil pembobotan akhir, capaian SPM Bidang Kesehatan pada tahun 2022 sebesar 98,10%.





Disisi lain pencapaian kinerja pada Urusan Kesehatan terlihat dari realisasi kinerja program RKPD dan RPJMD pada tahun 2022 sangat baik, kondisi ini terlihat dari 9 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, semuanya termasuk dalam kategori capaian Sangat Tinggi. Indikator yang capaiannya dibawah 100% yaitu Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar.

Sedangkan pencapaian kinerja dari 9 indikator program terhadap target akhir RPJMD terdapat 5 indikator telah tercapai dan 4 indikator akan tercapai. Indikator yang capaiannya perlu ditingkatkan karena persentase capaian targetnya terhadap target tahun 2022 kurang dari 100% yaitu, Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar sehingga kedepan perlu ditingkatkan upaya pencapaian indikator SPM.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2022 pada urusan kesehatan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.85.

Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2022 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026
Urusan Kesehatan

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2022	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2022	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi sd Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Dinas Kesehatan
	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Dinas Kesehatan, RSWN
	Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran OPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Dinas Kesehatan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya	Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%	100,00	98,10	98,10%	ST	100,00	98,10	98,10%	ST		Dinas Kesehatan

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPDP Tahun 2022				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPDP Tahun 2022	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPDP 2022	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi sd Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Kesehatan Masyarakat	sesuai standar											
	Pemenuhan Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	RSUD KRMT WONGSO NEGORO
	Pengembangan Sarana Prasarana Rumah Sakit	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	RSUD KRMT WONGSO NEGORO
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Kesehatan
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang memenuhi standar	%	96,00	100,00	104,17%	ST	98,00	100,00	102,04%	ST	●	Dinas Kesehatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Kesehatan

Sumber: eMonev Perencanaan

*) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR: $X \leq 50\%$

***) ST: $X > 18\%$; T: $18\% \geq X > 15\%$; S: $15\% \geq X > 12\%$; R: $12\% \geq X > 10\%$; dan SR: $X \leq 10\%$

***): Target Akhir RPJMD ●: Sudah Tercapai ($X \geq 100\%$) ▲: Akan Tercapai ($100\% > X \geq 20\%$)

▼: Perlu Upaya Keras ($X < 20\%$)

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan Urusan kesehatan diantaranya:

- Capaian Cakupan HIV on ARV tahun 2022 masih belum memenuhi target yang disebabkan penderita tidak on ARV, diantaranya karena penderita putus obat (LFU) dan tidak dapat dilakukan penelusuran karena tidak berdomisili di Kota Semarang.
- Masih terdapat masyarakat dengan kasus tuberculosis yang enggan untuk memeriksakan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dan lebih memilih untuk pengobatan alternatif ataupun menolak melanjutkan pengobatan.
- Masih adanya kematian ibu, bayi dan balita.
- Belum optimalnya pemantauan dan pendampingan bumil KEK dan anemi yang berpotensi stunting.
- Meningkatnya kehamilan pada usia kurang dari 20 tahun

Rencana tindak lanjut yang dilakukan diantaranya:

- a. Optimalisasi inovasi Semarang Berantas Tuberculosis (SEMAR BETUL) yaitu program pemberantasan tuberculosis terpadu, yang mengintegrasikan layanan pemantauan jadwal obat, edukasi TBC oleh petugas surveilan kesehatan, penilaian terpadu kualitas layanan TBC, pelayanan antar obat TBC, skrining tuberculosis dan HIV secara bersama, pemberian informasi seputar tuberculosis dan HIV serta melaksanakan jejaring layanan pemerintah dan swasta untuk pelayanan TBC.
- b. Meningkatkan pendampingan pada ibu hamil, ibu nifas dan bayi baru lahir serta meningkatkan peran lintas sektor dalam penanganan ibu hamil KEK dan anemi.
- c. Meningkatkan edukasi kesehatan reproduksi pada remaja dan calon pengantin serta screening layak hamil pada calon pengantin.
- d. Edukasi dan promosi gizi seimbang serta peningkatan aktivitas fisik, deteksi dini terutama untuk kelompok faktor resiko tinggi, Penguatan deteksi dini melalui posbindu dan pandu PTM.

3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja penyelenggaraan pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2022 diantaranya ditunjukkan dengan kondisi jalan mantap sebesar 92,52%, kondisi jembatan dalam kondisi baik sebesar 86,45%.

Kinerja terkait penyelenggaraan Program penataan bangunan gedung diukur dari pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung juga dari perencanaan, pembangunan, pengawasan, rehabilitasi dan pemeliharaan Gedung Pemerintahan. Capaian ini terlihat dari penetapan 840 rekomendasi teknis Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), 1.060 rekomendasi teknis Penataan Bangunan Gedung (PBG), Rekomendasi Teknis Reklame terbit sebanyak 513 titik reklame berijin, penetapan 4 SK Bangunan Cagar Budaya, 23 Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Pembangunan Puskesmas Mijen Tahap II dan Rumah Sakit Type D tahap III, Pembangunan Sport Center di kecamatan dan kelurahan, Pembangunan Wisata Religi Depok dan lainnya.

Sedangkan Kinerja terkait penyelenggaraan Program Pengembangan Jasa Konstruksi yang diukur dari persentase izin usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan, pada tahun 2022 merupakan tahun pertama dijalankan, sehingga pada program ini capaian yang diharapkan masih berupa konsolidasi dengan asosiasi pelaku jasa konstruksi dan membangun database lokal terkait potensi pelaku jasa konstruksi di Kota Semarang

Pada tahun 2022 realisasi Lingkungan Permukiman Sehat sebesar 98,78% atau meningkat sebesar 0,01% dari capaian tahun 2021. Indikator ini merupakan komposit dari capaian persentase luas lingkungan permukiman kumuh sebesar 99,12%; persentase lampu penerangan jalan yang terpasang sebesar 97,46%; persentase rumah tangga yang terlayani air minum sebesar 98,94%; dan persentase rumah tangga bersanitasi sebesar 98,94%.

Kinerja dibidang penanganan luas kawasan permukiman kumuh dengan kriteria luasan dibawah 10 Ha pada tahun 2022 yang hanya terealisasi sebesar 23,38% dari target yang ditetapkan sebesar 26,00%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 maka realisasi tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 11,39%. Sedangkan terkait Rumah Tangga yang telah terlayani air minum sebesar 98,94%, meningkat sebesar 1,80% dari tahun 2021 dimana penanganannya disinergikan melalui APBD Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (Bantuan keuangan) dan APBD (DAK Fisik).

Pada tahun 2022 capaian persentase rumah tangga bersanitasi adalah sebesar 98,94% dari target 88,51% atau mengalami peningkatan sebesar 0,01%

dari tahun 2021. Capaian ini diperoleh melalui pembangunan sarana sanitasi di Kota Semarang berupa pembangunan tangki septik skala individual perdesaan di Kelurahan Barusari, Semarang Selatan; Kelurahan Jomblang, Candisari; Kelurahan Karanganyar Gunung, Candisari; Kelurahan Ngadirgo, Mijen; Kelurahan Purwoyoso, Ngaliyan; Kelurahan Sendangmulyo, Tembalang; Kelurahan Tambakrejo, Gayamsari; Kelurahan Tegalsari, Candisari; Kelurahan Terboyo Kulon, Genuk serta Pembangunan dan perbaikan MCK Muktiharjo Kidul.





Pencapaian kinerja indikator program RKPD Tahun 2022 urusan wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap target RKPD Tahun 2022 maupun target akhir RPJMD dalam kategori baik. Kondisi ini terlihat dari 16 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, sebanyak 14 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi, dan 2 indikator termasuk dalam kategori capaian tinggi.

Pencapaian target akhir RPJMD penyelenggaraan urusan PUPR tergolong baik, terdapat 6 indikator yang telah mencapai target akhir RPJMD, dan sebanyak 10 indikator yang akan mencapai target akhir RPJMD. Indikator yang capaiannya perlu ditingkatkan adalah persentase capaian targetnya terhadap target tahun 2022 kurang dari 100% yaitu Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani.



Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2022 pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.86.

Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2022 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026
Urusan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2022	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2022	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase perencanaan dan pelaporan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang
	Persentase Kinerja administrasi dan Pelaporan Keuangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang
	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang
	Persentase peningkatan kemampuan ASN	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Dinas Pekerjaan Umum



Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPDP Tahun 2022	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPDP 2022	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengendalian banjir dan rob	%	97,57	98,26	100,70%	ST	98,75	98,26	99,50%	ST		Dinas Pekerjaan Umum
	Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Layak	%	66,64	98,94	148,47%	ST	59,84	98,94	165,34%	ST		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga Terlayani SPAM	%	100,00	98,94	98,94%	ST	100,00	98,94	98,94%	ST		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	%	88,51	98,94	111,78%	ST	92,75	98,94	106,67%	ST		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Tingkat pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	%	64,00	64,00	100,00%	ST	68,00	64,00	94,12%	ST		Dinas Pekerjaan Umum
Program Pengembangan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten. / kota yang ditangani	%	26,00	23,38	89,92%	T	100,00	23,38	23,38%	ST		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Tertatanya Bangunan Gedung	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Penataan Ruang
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase reklame berizin	%	100,00	78,81	78,81%	T	100,00	78,81	78,81%	ST		Dinas Penataan Ruang
	Pemanfaatan Hunian yang Tertata	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	%	74,13	74,13	100,00%	ST	75,75	74,13	97,86%	ST		Dinas Pekerjaan Umum


Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPDP Tahun 2022				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPDP Tahun 2022	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPDP 2022	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Izin usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Penataan Ruang
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dokumen perencanaan tata ruang yang disusun	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Penataan Ruang

Sumber: eMonev Perencanaan

*) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR: $X \leq 50\%$

**) ST: $X > 18\%$; T: $18\% \geq X > 15\%$; S: $15\% \geq X > 12\%$; R: $12\% \geq X > 10\%$; dan SR: $X \leq 10\%$

***): Target Akhir RPJMD : Sudah Tercapai ($X \geq 100\%$) : Akan Tercapai ($100\% > X \geq 20\%$)

: Perlu Upaya Keras ($X < 20\%$)

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, diantaranya:

- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Tugu harus tertunda karena menyesuaikan materi RDTR Kecamatan Tugu dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11/2021. Sebelumnya mendasarkan Kepmen ATR/KBPN No.1589/SK-HK.02.01/XII/2021 terkait Lahan Sawah yang Dilindungi dan saat ini dilaksanakan revisi terhadap Kepmen tersebut. Ditargetkan tahun 2023 RDTR tersebut sudah menjadi Peraturan Kepala Daerah.
- Beberapa usulan pembangunan sumur air tanah tidak dapat diakomodir karena termasuk dalam zona merah.
- Mendasarkan Permendagri No. 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022, dimana pergeseran pada akun belanja modal tidak dapat dilakukan perubahan rincian obyek belanja, sehingga pelaksanaannya harus menunggu mekanisme perubahan anggaran.

Upaya yang akan dilaksanakan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut adalah:

- Koordinasi Lintas Perangkat Daerah terkait, kecamatan dan kelurahan sebelum pelaksanaan pekerjaan.
- Memastikan dan melakukan survey lokasi rencana pekerjaan sebelum melakukan penginputan anggaran, sehingga tidak terjadi perubahan lokasi maupun volume pekerjaan.
- Koordinasi dengan PDAM untuk mengakomodir usulan pembangunan sumur air tanah di zona merah.

4. Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kinerja penyelenggaraan dalam urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diantaranya ditunjukkan dengan diraihnya penghargaan Penanganan Kawasan Permukiman Terbaik I Tingkat Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan kinerja Lingkungan Permukiman Sehat pada tahun 2022 terealisasi sebesar 98,78% dari target 97,00%. Indikator ini mempunyai komposit capaian persentase luas lingkungan permukiman tidak kumuh sebesar 99,12%; persentase lampu penerangan jalan yang terpasang sebesar 97,46%;

persentase rumah tangga yang terlayani air minum sebesar 98,94%; dan persentase rumah tangga bersanitasi sebesar 98,94%.

Realisasi penanganan rumah layak huni pada tahun 2022 sebesar 98,34% (menangani sebanyak 1.713 unit sehingga rumah layak huni menjadi sebanyak 361.665 unit). Persentase perumahan yang terfasilitasi PSU pada tahun 2022 terealisasi sebesar 250% dari target sebesar 100%. Capaian ini diperoleh dari target 10 perumahan yang menyerahkan PSUnya, terealisasi sebanyak 25 perumahan yang telah menyerahkan PSUnya.

Kinerja terkait persentase Ruang Terbuka Hijau adalah sebesar 44,36%, meningkat 0,13% dibandingkan capaian tahun 2021 sebesar 44,23%. Penambahan Ruang Terbuka Hijau tahun 2022 mencapai 15,75 Ha sehingga total luas Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang mencapai 16.578 Ha.

Jika dilihat dari capaian kinerja indikator program RKPD Tahun 2022 urusan wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terhadap target RKPD Tahun 2022 maupun target akhir RPJMD dalam kategori sangat baik. Kondisi ini terlihat dari 8 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, seluruhnya dalam kategori capaian sangat tinggi.




Pencapaian target akhir RPJMD dalam penyelenggaraan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tergolong baik, terdapat 1 indikator yang telah mencapai target, dan sebanyak 1 indikator akan mencapai target akhir RPJMD.

Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk pada tahun 2022 terealisasi sebesar 40,05%, dari target tahun 2022 sebesar 17,70% (persentase capaian target sebesar 226,27%). Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021, maka rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,96%

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2022 pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.87.

Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2022 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2022	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2022	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPDP Tahun 2022	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPDP 2022	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
	Persentase peningkatan kemampuan ASN	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Pengembangan Perumahan	Terlaksananya fasilitasi kebutuhan perumahan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah layak huni	%	98,87	98,34	99,46%	ST	100,00	98,34	98,34%	ST		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Perumahan yang Terfasilitasi PSU	%	100,00	100%	98,34%	ST	100,00	100%	98,34%	ST		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Persentase Ruang Terbuka Hijau	%	44,26	44,36	100,23%	ST	44,46	44,36	99,78%	ST		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sumber: eMonev Perencanaan

*) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR: $X \leq 50\%$

**) ST: $X > 18\%$; T: $18\% \geq X > 15\%$; S: $15\% \geq X > 12\%$; R: $12\% \geq X > 10\%$; dan SR: $X \leq 10\%$

***): Target Akhir RPJMD : Sudah Tercapai ($X \geq 100\%$) : Akan Tercapai ($100\% > X \geq 20\%$)

: Perlu Upaya Keras ($X < 20\%$)

Permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan kegiatan diantaranya:

- Pengentasan kawasan permukiman kumuh belum optimal, karena penanganannya masih sektoral.
- Data Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) yang bukan milik Pemerintah Kota Semarang, baik milik pribadi maupun swasta belum tersedia.
- Belum terselesaikannya pengadaan lahan akibat penolakan oleh warga masyarakat.

Upaya yang akan dilaksanakan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut adalah:

- Melakukan koordinasi antar lintas Perangkat Daerah untuk memetakan kebutuhan dan solusi tepat untuk pengentasan kawasan permukiman kumuh.
- Melakukan inventarisasi data Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) yang bukan milik Pemerintah Kota Semarang, baik milik pribadi maupun swasta.
- Sosialisasi kepada masyarakat sebelum dilakukannya rencana pengadaan lahan makam. Mencari alternatif lahan di lokasi lain untuk memenuhi kebutuhan pemakaman warga Kota Semarang.

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Keberhasilan penyelenggaraan pada urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat salah satunya ditandai dengan diraihnya penghargaan Karya Bhakti dari Menteri Dalam Negeri pada Tahun 2022. Selain itu realisasi penurunan gangguan keamanan dan ketertiban sebesar 10,16% atau sepanjang tahun 2022 terdapat 2.778 kejadian yang terdiri dari 1.443 angka pelanggaran atas penegakan 32 perda di 16 Kecamatan, dan 1.335 angka kriminalitas (data Polrestabes) yang berpotensi mengganggu trantibum di Kota Semarang dan seluruhnya (100%) telah ditindaklanjuti dan diselesaikan.

Disisi lain kinerja terkait pemberdayaan Relawan Pemadam Kebakaran keberadaannya juga telah mencakup 75 kelurahan, meningkat sebanyak 30 kelurahan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang baru mencakup 45 kelurahan. Masih terkait dengan bencana, indeks risiko bencana juga telah menunjukkan kinerjanya, dimana indeksnya menurun menjadi 103,49 dibanding tahun 2021 sebesar 113 yang artinya mengalami penurunan kerentanan terhadap bencana. Dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana secara partisipatif sehingga masyarakat memiliki kesiapsiagaan dalam pengurangan risiko bencana di wilayahnya. Dengan demikian, diharapkan dapat terbangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan tentang kebencanaan. Pada tahun 2022 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana berupa Early Warning System (EWS) banjir dari yang ditargetkan 3 titik mencapai 5 titik, yaitu di Kelurahan Bendan duwur Kecamatan Gajahmungkur, Kelurahan Pudak Payung Kecamatan Banyumanik, Kelurahan Karangtempel Kecamatan Semarang Timur, Kelurahan Mayangsari Kecamatan Ngaliyan.

Pencapaian kinerja indikator program RKPD Tahun 2022 urusan wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terhadap target RKPD Tahun 2022 maupun target akhir RPJMD dalam kategori sangat baik. Kondisi ini terlihat dari 11 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, sebanyak 9 diantaranya dalam kategori capaian sangat tinggi, 1 kategori rendah yaitu Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran, dan 1 kategori sangat rendah yaitu Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran.

Pencapaian target akhir RPJMD dalam penyelenggaraan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam kategori baik, sebanyak 2 indikator telah tercapai, sebanyak 8 indikator dengan kategori akan tercapai, dan 1 indikator kategori perlu upaya keras.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2022 pada urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.88.

Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2022 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026

Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2022	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2022	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		SatPol PP, Damkar, BPBD
	Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		SatPol PP, Damkar, BPBD
	Persentase peningkatan kemampuan ASN	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		SatPol PP, Damkar, BPBD
	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		SatPol PP
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan pelanggaran Perda	%	10,00	10,00	100,00%	ST	10,00	10,00	100,00%	ST		SatPol PP
Program Penanggulangan Bencana	Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	%	20,00	20,00	100,00%	ST	27,00	20,00	74,07%	T		BPBD
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	pelayanan pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan kondisi membahayakan manusia	%	100,00	98,01	98,01%	ST	100,00	98,01	98,01%	ST		DAMKAR
	Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah	%	100,00	78,90	78,90%	T	100,00	78,90	78,90%	ST		DAMKAR

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2022	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2022	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
	pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran											
	Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran	%	100,00	26,23	26,23%	SR	100,00	26,23	26,23%	ST		DAMKAR
	Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		DAMKAR
	Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	%	100,00	92,77	92,77%	ST	100,00	92,77	92,77%	ST		DAMKAR

Sumber: eMonev Perencanaan

*) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR: $X \leq 50\%$

**) ST: $X > 18\%$; T: $18\% \geq X > 15\%$; S: $15\% \geq X > 12\%$; R: $12\% \geq X > 10\%$; dan SR: $X \leq 10\%$

***) : Target Akhir RPJMD : Sudah Tercapai ($X \geq : 100\%$) : Akan Tercapai ($100\% > X \geq 20\%$)

: Perlu Upaya Keras ($X < 20\%$)

Beberapa permasalahan yang ditemui dalam penyelenggaraan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, antara lain:

- Jmlah pos pemadam beserta personil dan sarana pemadaman dan penyelamatan belum memenuhi standar pelayanan, yaitu baru tersedia di 7 kecamatan. (Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 ditentukan Pos Sektor Pemadam Kebakaran ada di setiap kecamatan).
- Kurangnya kompetensi personil pemadam kebakaran, partisipasi relawan yang masih minim serta sarpras (mobil pemadam) sudah melebihi 10 tahun dan bahkan mobil tangga dalam kondisi rusak, sehingga berpotensi mengurangi kinerja pelayanan utamanya pada gedung yang tinggi.

- c. Masih banyaknya bangunan gedung yang belum memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran.
- d. Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- e. Pelaksanaan penyelenggaraan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang dilaksanakan oleh petugas Linmas belum didukung oleh pemenuhan sarana kelengkapan bertugas yang memadai.

Untuk rencana tindak lanjut dalam memecahkan permasalahan, diantaranya:

- a. Menambah Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) beserta sarana prasarana pendukung;
- b. Mengembangkan potensi kerjasama dengan pihak lain untuk penyediaan pos pemadam kebakaran.
- c. Memaksimalkan kerjasama antar instansi terkait sampai ke tingkat wilayah melalui kegiatan formal dan nonformal untuk mencari memetakan dan mencari solusi permasalahan ketertiban yang merupakan hal klasik di perkotaan besar.
- d. Mengajukan penghapusan mobil pemadam yang sudah tidak layak operasional dan pengusulan pengadaan mobil tangga.
- e. Melanjutkan penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang naskah akademiknya sudah disusun di tahun 2021.

6. Urusan Sosial

Capaian kinerja Urusan Wajib Sosial untuk indikator kinerja Angka Kemiskinan pada tahun 2022 menjadi sebesar 4,25% dari yang ditargetkan 4,32%. Hal ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 4,56% sesuai dari Data BPS Kota Semarang.

Adapun hasil verifikasi validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk warga miskin Kota Semarang pada Tahun 2022 untuk indikator kinerja Menurunnya Angka Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (berdasarkan kelayakan penerima Bansos BPNT dan PKH) mengalami penurunan menjadi sebesar 11,06% dari yang ditargetkan 16,1%, hal ini memenuhi target yang telah ditentukan. Serta mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 24,23

Untuk capaian indikator kinerja persentase penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sebesar 100%, sedangkan untuk indikator kinerja persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sebesar 100%, untuk indikator kinerja Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota capaian target juga sama dengan tahun 2021 yaitu 100%.


Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian RKPD Tahun 2022 pada Urusan Sosial menunjukkan kinerja yang baik. Terlihat dari 8 indikator yang menjadi alat ukur keberhasilan, sebanyak 8 indikator termasuk ke dalam kategori sangat tinggi. Indikator yang kinerjanya dibawah 100% yaitu persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran, karena dapat ditunda

Pencapaian target akhir RPJMD dalam penyelenggaraan urusan sosial dari sebanyak 8 indikator kinerja, sebanyak 2 indikator kategori telah mencapai target akhir, sebanyak 5 indikator akan mencapai target akhir RPJMD, dan sebanyak 1 indikator perlu upaya keras untuk mencapai target akhir RPJMD.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2022 pada urusan sosial disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.89.
Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2022 dan
Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026
Urusan Sosial



Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2022	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2022	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Dinas Sosial
	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Dinas Sosial
	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	%	100,00	98,00	98,00%	ST	100,00	19,60	19,60%	ST		Dinas Sosial
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi	%	66,67	100,00	112,49%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Sosial
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pekerja Migran Bermasalah Sosial yang ditangani	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Dinas Sosial
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	%	99,75	100,00	100,25%	ST	99,99	20,00	20,00%	ST		Dinas Sosial
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan Sosial	%	69,15	80,34	116,18%	ST	71,96	80,34	111,65%	ST		Dinas Sosial


Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPDP Tahun 2022				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPDP Tahun 2022	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPDP 2022	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penanganan Bencana	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) korban bencana yang ditangani	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Dinas Sosial

Sumber: eMonev Perencanaan

*) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR: $X \leq 50\%$

***) ST: $X > 18\%$; T: $18\% \geq X > 15\%$; S: $15\% \geq X > 12\%$; R: $12\% \geq X > 10\%$; dan SR: $X \leq 10\%$

***): Target Akhir RPJMD  : Sudah Tercapai ($X \geq 100\%$)  : Akan Tercapai ($100\% > X \geq 20\%$)

 : Perlu Upaya Keras ($X < 20\%$)

Permasalahan yang ditemui dalam penyelenggaraan Urusan sosial, diantaranya masih banyaknya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan keluarga miskin yang memerlukan penanganan. Selain itu masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung untuk pemenuhan pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada umumnya dan kepada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti, serta korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial.

Upaya yang dilakukan adalah dengan memaksimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia, serta mengajukan usulan untuk pemenuhan sarana dan prasarana pendukung yang belum ada untuk pemenuhan pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial pada Tahun 2023.

7. Urusan Tenaga kerja

Kinerja penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja salah satunya ditandai dengan diraihnya prestasi dan penghargaan, di antaranya sebagai Pembina Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit Terbaik Kedua Tingkat Provinsi Jawa Tengah; Penghargaan Siddhakarya dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; serta Balai Latihan Kerja Terbaik Pertama Kategori Kompetensi Sertifikasi, Penempatan Lulusan dan Capaian Kinerja dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang, Kementerian Ketenagakerjaan, Republik Indonesia.

Terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 41.033 orang dari Tahun 2021 yang semula sebesar 1.034.794 orang menjadi 1.075.827 orang pada Tahun 2022. Disisi lain jumlah penganggur mengalami penurunan sebanyak 16.982 orang dari Tahun 2021 sebesar 98.718 orang menjadi 81.736 orang pada Tahun 2022. Berdasarkan data yang ada ini, kemudian dapat diketahui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Tahun 2022. TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT di Kota Semarang pada Tahun 2022 terlihat telah mengalami penurunan yaitu sebesar 1,94% dari 9,54% pada Tahun 2021 menjadi 7,60% pada Tahun 2022. Penurunan TPT mengindikasikan makin banyak masyarakat yang memiliki pekerjaan, sehingga semakin banyak yang mempunyai pendapatan dan berkorelasi positif terhadap peningkatan kesejahteraan, serta

penguatan struktur ekonomi wilayah di Kota Semarang. Dengan demikian dapat menurunkan angka kemiskinan, sehingga dapat berkontribusi dalam menurunkan tingkat kriminalitas dan kejadian kejahatan di Kota Semarang.

Penduduk Usia Kerja (PUK) mengalami peningkatan sebanyak 25.455 orang dari Tahun 2021 sehingga menjadi 1.516.197 orang. Disisi lain jumlah angkatan kerja mengalami peningkatan sebanyak 41.033 orang sehingga menjadi 1.075.827 orang pada Tahun 2022. TPAK merupakan persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK di Kota Semarang pada Tahun 2022 telah mengalami peningkatan sebanyak 1,55% dari Tahun 2021 yaitu sebesar 69,41% menjadi 70,96% pada Tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu roda perekonomian di Kota Semarang pada Tahun 2022 lebih besar sehingga perlu dikelola sehingga dapat mengisi lowongan pekerjaan di perusahaan-perusahaan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.

Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi pada Tahun 2022 telah mengalami peningkatan sebanyak 4,60% dari Tahun 2021 sebanyak 68,14% menjadi 72,74% pada Tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja di Kota Semarang semakin banyak yang memiliki keterampilan tertentu dan sudah diuji di depan penguji keterampilan, sehingga memiliki daya saing yang tinggi untuk memperoleh pekerjaan yang layak sesuai kompetensi dan harapannya. Berdasarkan data tersebut, pada tahun 2022 kinerja yang dicapai pada program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja berhasil meningkatkan persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi dari yang ditargetkan yaitu sebesar 76,00% mencapai 72,74% atau berhasil mencapai target sejumlah 95,71%.

Hasil evaluasi pencapaian RKPD Tahun 2022 pada urusan tenaga kerja menunjukkan kinerja yang sangat baik. Kondisi ini ditunjukkan dari 7 indikator yang dievaluasi, seluruhnya dalam kategori pencapaian sangat tinggi.

Pencapaian target akhir RPJMD dalam penyelenggaraan urusan urusan tenaga kerja termasuk dalam kategori baik, terdapat 3 indikator termasuk kategori telah tercapai dan sebanyak 4 indikator kategori akan tercapai.

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa pada Tahun 2022 kinerja yang dicapai pada program penempatan tenaga kerja adalah berhasil meningkatkan persentase tenaga kerja yang ditempatkan sebesar 97,33%.

Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub-kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:

1. Pelayanan Antar Kerja. Sub-kegiatan ini dilakukan mulai dari pelayanan pendaftaran pencari kerja, hingga penempatan pencari kerja pada perusahaan pemberi kerja oleh pejabat fungsional pencari kerja;
2. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online. Sub-kegiatan ini dilakukan dengan memberikan informasi pasar kerja, pendaftaran pencari kerja hingga penempatan tenaga kerja kepada pencari kerja yang semuanya dapat dilakukan secara online baik melalui media sosial, maupun melalui portal <https://siker.semarangkota.go.id>;
3. *Job Fair*/Bursa Kerja. Sub-kegiatan ini merupakan kegiatan untuk mengakomodasi masyarakat untuk dapat mengakses informasi pasar kerja, serta dapat mendaftar berbagai kesempatan kerja secara lebih luas dalam satu sesi.

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa pada Tahun 2022 kinerja yang dicapai pada program hubungan industrial adalah berhasil meningkatkan persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dari yang ditargetkan yaitu sebesar 5,10% mencapai 6,74% atau berhasil mencapai target sejumlah 132,15%.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2022 pada urusan tenaga kerja disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.90.
Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2022 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026
Urusan Tenaga kerja

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2022	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2022	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Dinas Tenaga Kerja
	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Dinas Tenaga Kerja
	Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Dinas Tenaga Kerja
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase prog./keg. yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	60,00 17 keg	80,95 21 keg	134,91%	ST	80,00	80,95	101,18%	ST		Dinas Tenaga Kerja
Program Pelatihan Tenaga Kerja Dan Produktivitas Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	76,00	72,74%	95,71%	ST	80,00	72,74%	90,92%	ST		Dinas Tenaga Kerja
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	64,00	97,33	152,07%	ST	72,00	97,33	135,18%	ST		Dinas Tenaga Kerja
Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	5,10	6,74	132,15%	ST	5,70	6,74	118,24%	ST		Dinas Tenaga Kerja

Sumber: eMonev Perencanaan

*) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR: $X \leq 50\%$

**) ST: $X > 18\%$; T: $18\% \geq X > 15\%$; S: $15\% \geq X > 12\%$; R: $12\% \geq X > 10\%$; dan SR: $X \leq 10\%$

***): Target Akhir RPJMD : Sudah Tercapai ($X \geq :100\%$) : Akan Tercapai ($100\% > X \geq 20\%$)

: Perlu Upaya Keras ($X < 20\%$)

Dalam penyelenggaraan urusan Tenaga Kerja masih terdapat beberapa permasalahan di antaranya adanya pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, sehingga menyebabkan terdapatnya batasan-batasan penyelenggaraan kegiatan serta pasar kerja yang tersedia terkadang belum sesuai dengan keinginan dari masyarakat di Kota Semarang.

Rencana tindak lanjut atas hambatan dan permasalahan yang ada di antaranya pelaksanaan kegiatan dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19 yang ketat sesuai dengan anjuran Pemerintah serta menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai perusahaan pada berbagai sektor untuk dapat menyediakan lowongan pekerjaan yang sesuai harapan masyarakat di Kota Semarang.

8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja penyelenggaraan pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditandai diantaranya dengan berhasil mempertahankan Predikat Nindya untuk ketiga kalinya pada Kategori Penghargaan Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2022, selain itu juga diraihinya Juara III pada Lomba 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi Jawa Tengah, serta Penyelenggaraan Musrenbang Khusus Perempuan dan Anak (Sang Puan) agar program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak lebih berkesinambungan, sinergis dan tepat sasaran.

Pada tahun 2022 terjadi peningkatan rasio KDRT (0,025%) dibandingkan tahun 2021 (0,020%), meski demikian kasus KDRT tersebut 100 % sudah tertangani. Disisi lain peningkatan rasio KDRT ini mengindikasikan terjadi peningkatan kesadaran korban KDRT baik perempuan maupun anak dalam melaporkan kasusnya dan keinginan untuk mendapatkan pendampingan sampai dengan kasusnya tertangani bahkan bisa menjadi mandiri baik secara social maupun ekonomi.

Terkait Pengarusutamaan Gender (PUG), pada tahun 2022 telah banyak dukungan dilakukan Kota Semarang, diantaranya Sosialisasi Perda Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021, Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Semarang tentang pedoman pelaksanaan Perda Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang PUG. Selain itu juga untuk peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan dilakukan pelatihan, seminar, advokasi dan pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan, dan Peningkatan Partisipasi Perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi, Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan dan masih banyak lainnya.

Pada tahun 2022 rasio kekerasan terhadap perempuan sebesar 25,46 (217 kasus) meningkat dari tahun 2021 sebesar 18,78. Upaya yang dilakukan untuk menekan angka kekerasan ini melalui Rakor Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Keluarga, Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Dalam Lingkup Keluarga, Trauma Healing dengan berbagai tema. Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Semarang melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI Kota Semarang dan 16 (enam belas) Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) tingkat Kecamatan melakukan advokasi baik litigasi maupun non litigasi terhadap kasus KDRT, Kekerasan dalam pacaran (KDP), Kekerasan terhadap Anak, Kekerasan terhadap Perempuan dan Masalah Anak yang berhadapan dengan hukum.

Pada tahun 2022 telah dilakukan penanganan kasus kekerasan pada anak 136 (seratus tiga puluh enam) dari sejumlah anak sebanyak 480.249. Rasio kekerasan pada anak pada tahun 2022 sebesar 0,027%, yang meningkat dari realisasi capaian tahun 2021 sebesar 0,017, dan 100 % kasusnya telah 100 % dilakukan penanganan. Upaya yang dilakukan untuk terus menekan kekerasan pada anak: Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah,

Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha, Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak, Penguatan Gugus Tugas Kota Layak Anak, dan Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

Hasil evaluasi pencapaian RKPD Tahun 2022 pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan kinerja baik. Kondisi ini ditunjukkan dari 9 indikator program yang di evaluasi, masih terdapat 1 indikator dengan capaian sangat rendah, sedangkan 8 indikator lainnya termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi.





Pencapaian target akhir RPJMD dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak termasuk dalam kategori baik, dari sebanyak 9 indikator program, terdapat 5 indikator termasuk kategori telah tercapai, sebanyak 3 indikator kategori akan tercapai dan 1 indikator termasuk dalam kategori perlu upaya keras, yaitu Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2022 pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.91.

Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2022 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2022	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2022	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan dan pelaporan kinerja serta pelaporan keuangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		DP3A
	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		DP3A
	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		DP3A
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		DP3A
Program Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	15,64	25,46	37,21%	SR	10,00	25,46	(54,0%)	ST		DP3A


Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2022	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2022	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		DP3A
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		DP3A
Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Cakupan Pemenuhan Hak Anak	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		DP3A
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	%	0,01	0,03	300,00%	ST	0,01	0,03	300,00%	ST		DP3A

Sumber: eMonev Perencanaan

*) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR: $X \leq 50\%$

***) ST: $X > 18\%$; T: $18\% \geq X > 15\%$; S: $15\% \geq X > 12\%$; R: $12\% \geq X > 10\%$; dan SR: $X \leq 10\%$

***): Target Akhir RPJMD : Sudah Tercapai ($X \geq 100\%$) : Akan Tercapai ($100\% > X \geq 20\%$)

: Perlu Upaya Keras ($X < 20\%$)

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, diantaranya:

- Masih kurangnya kegiatan yang menunjang pemberdayaan perempuan dan komitmen terkait pemenuhan hak anak dari stakeholder;
- Masih kurangnya pemahaman tentang pentingnya ketahanan keluarga;
- Belum efektifnya Forum Anak sebagai wadah fasilitasi partisipasi anak dalam penentuan kebijakan publik.

Dan tindak lanjut yang akan dilakukan:

- Penguatan peran lembaga layanan dan penambahan kegiatan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan;
- Optimalisasi kebijakan dan koordinasi pemerhati anak lintas sektoral dan stakeholder;
- Optimalisasi kegiatan sosialisasi, advokasi dan fasilitasi kegiatan Ketahanan Keluarga sampai dengan kelurahan di Kota Semarang;
- Meningkatkan peran aktif Forum Anak dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan dan pembuatan pengambilan kebijakan publik melalui keterlibatan Forum Anak pada Musrenbang;

9. Pangan

Kinerja dalam penyelenggaraan Urusan Pangan pada tahun 2022 utamanya dalam rangkaantisipasi inflasi dampak kenaikan bahan bakar di Kota Semarang, diantaranya dengan melaksanakan pasar pangan murah dan aman berkolaborasi dengan pemangku kepentingan di bidang pangan seperti Bulog, Indoguna, BUMP, Fresh Mart, Pengusaha Sayur, UMKM Pangan Lokal. Dan upaya secara efektif cukup mampu menahan inflasi dari sisi pemutusan rantai pemasokan penawaran barang pangan.

Kinerja lain adalah tercapainya pola pangan harapan pada tahun 2022 sebesar 91,20%, dimana semakin tinggi nilai skor PPH maka akan semakin beragam konsumsi pangan masyarakat dan menuju Pola Pangan Harapan (PPH). Selain itu juga berhasil meningkatkan cakupan wilayah Layanan Kemandirian Pangan yang ditunjukkan terpenuhinya kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat, sehingga warga Kota Semarang tidak kekurangan pangan. Kinerja lain yang dicapai adalah meningkatkan Ketersediaan Energi / Kapita sebesar 3056, yang salah satunya mengindikasikan keberhasilan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Dimana ketersediaan pangan berupa beras berdasarkan data tahun 2022 sebesar 356.688,971 ton, sedangkan tingkat kebutuhan pangan masyarakat Kota Semarang sebesar 97.055,758 ton.



Distribusi Pangan didukung oleh Mekanisme dan alur distribusi pangan (terutama berupa beras) kepada warga miskin yang sesuai aturan juga telah tercapai 100 %. Demikian pula terkait Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang. Kinerja yang dicapai adalah berhasil menurunkan tingkat Presentase Daerah Rentan Rawan Pangan dari yang ditargetkan 5% mencapai 3,4%, atau berhasil mencapai target sejumlah 132%. Upaya yang dilakukan dalam menurunkan Kelurahan Daerah Rentan Rawan Pangan yaitu Intervensi daerah rentan rawan pangan prioritas 1,2,3. Pada tahun 2022 sudah tidak terdapat kelurahan yang masuk kategori daerah sangat rawan pangan atau prioritas 1. Kelurahan yang masih masuk daerah rentan rawan pangan atau prioritas 2 meliputi Kelurahan Wonoplumbon Kecamatan Mijen, Kelurahan Cepoko dan Ponganan Kecamatan Gunungpati dan Kelurahan Jangli Kecamatan Tembalang. Sedangkan untuk prioritas 3 meliputi Kelurahan Karangmalang Kecamatan Mijen dan Kelurahan Jabungan Kecamatan Banyumanik.








Hasil evaluasi pencapaian RKPD Tahun 2022 pada urusan Pangan menunjukkan kinerja yang sangat baik. Kondisi ini ditunjukkan dari 9 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, semuanya memiliki kinerja sangat tinggi.

Pencapaian target akhir RPJMD dalam penyelenggaraan urusan pangan termasuk dalam kategori baik, kondisi ini ditunjukkan dari 9 indikator program, terdapat 4 indikator termasuk kategori telah tercapai dan 5 indikator akan tercapai. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2022 pada urusan Pangan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.92.

Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2022 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026
Urusan Pangan



Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2022	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2022	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Dinas Ketahanan Pangan
	Presentase Pemenuhan Sarana dan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Dinas Ketahanan Pangan


Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPd Tahun 2022				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPd Tahun 2022	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPd 2022	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
	Prasarana Aparatur											
	Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Dinas Ketahanan Pangan
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Cakupan Wilayah Layanan Kemandirian Pangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Energi / Kapita	Kkal/Kapita	3056,00	3.056,00	100,00%	ST	3060,00	3.056,00	99,87%	ST		Dinas Ketahanan Pangan
	Presentase Cakupan Distribusi	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Ketahanan Pangan
	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Ketahanan Pangan
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Presentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	5,00	3,40	200,00%	ST	1,00	3,40	40%	ST		Dinas Ketahanan Pangan
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Presentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	%	81,00	99,40	122,72%	ST	83,00	99,40	119,76%	ST		Dinas Ketahanan Pangan

Sumber: eMonev Perencanaan

*) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR: $X \leq 50\%$

**) ST: $X > 18\%$; T: $18\% \geq X > 15\%$; S: $15\% \geq X > 12\%$; R: $12\% \geq X > 10\%$; dan SR: $X \leq 10\%$

***): Target Akhir RPJMD : Sudah Tercapai ($X \geq 100\%$) : Akan Tercapai ($100\% > X \geq 20\%$)

: Perlu Upaya Keras ($X < 20\%$)

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pangan yaitu pada tahun 2022 dihadapkan pada perubahan ekonomi yang sangat cepat dan fundamental serta pemulihan ekonomi setelah adanya pandemi yang mempengaruhi rantai pasok penawaran yang tidak mampu mengikuti pemulihan di sisi permintaan. Hal tersebut mengakibatkan tekanan pada harga atau inflasi. Penyumbang terbesar inflasi tersebut dikarenakan naiknya beberapa komoditas pangan disamping angkutan udara. Sehingga perlu upaya untuk mengantisipasinya.

Tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu melakukan kegiatan pasar pangan pokok berkolaborasi dengan pemangku kepentingan di bidang pangan seperti Bulog, Indoguna, BUMP, Fresh Mart, Pengusaha Sayur, UMKM Pangan Lokal dll. dengan harga murah dan aman (Pak Rahman) setiap bulan sekali dan insidental sesuai dengan permintaan masyarakat.


10. Pertanahan

Kinerja dalam penyelenggaraan Urusan Pertanahan, dalam memberikan dukungan terhadap Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 20218 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dimana ditargetkan seluruh tanah sudah bersertifikat di tahun 2025. Kinerja tersebut diantaranya ditandai dengan terbitnya SK Walikota Semarang Nomor 978/104 Tahun 2022 tentang Penetapan Penerima Hibah Beserta Besaran Uang untuk Kegiatan Pengelolaan Data Pertanahan di Kota Semarang Tahun 2022 dan SK Walikota Semarang Nomor 978/828 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas SK Walikota Semarang Nomor 978/104 Tahun 2022 tentang Penetapan Penerima Hibah Beserta Besaran Uang untuk Kegiatan Pengelolaan Data Pertanahan di Kota Semarang Tahun 2022 sebagai dasar Hibah PTSL ke Kantor Pertanahan Kota Semarang.

Meningkatnya tertib Administrasi Pertanahan di tunjukkan dengan penanganan sengketa tanah yang tertangani 87,14 %, dari 70 kasus aduan, 61 kasus berhasil difasilitasi oleh Pemerintah Kota Semarang sedangkan sisanya sedang dalam proses mediasi.

Hasil evaluasi pencapaian RKPD Tahun 2022 pada urusan Pertanahan menunjukkan kinerja yang baik, yang ditunjukkan dari sebanyak 7 indikator yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan, semuanya sebanyak 7 indikator memiliki status pencapaian sangat tinggi. Begitu pula jika disandingkan dengan target akhir RPJMD semuanya sebanyak 7 indikator telah mencapai target akhir RPJMD, meskipun outputnya merupakan kajian dan atau rekomendasi terkait kebijakan yang beberapa diantaranya merujuk untuk dilaksanaannya program yang direncanakan. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2022 pada urusan pertanahan disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.93.
Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2022 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026
Urusan Pertanahan

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2022	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2022	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	terselesaikannya sengketa tanah garapan di	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Penataan Ruang

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2022	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2022	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	terselenggarakannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Penataan Ruang
Program Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	terselenggarakannya redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Penataan Ruang
Program Penetapan Tanah Ulayat	terselesaikannya penetapan tanah ulayat	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Penataan Ruang
Program Pengelolaan Tanah Kosong	terselesaikannya masalah seputar pengelolaan tanah kosong	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Penataan Ruang
Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	terkelolanya izin membuka tanah	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Penataan Ruang
Program Pernetagunaan Tanah	terselesaikannya penatagunaan tanah	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Penataan Ruang

Sumber: eMonev Perencanaan

*) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR: $X \leq 50\%$

**) ST: $X > 18\%$; T: $18\% \geq X > 15\%$; S: $15\% \geq X > 12\%$; R: $12\% \geq X > 10\%$; dan SR: $X \leq 10\%$

***): Target Akhir RPJMD ●: Sudah Tercapai ($X \geq 100\%$) ▲: Akan Tercapai ($100\% > X \geq 20\%$)

▼: Perlu Upaya Keras ($X < 20\%$)

Terdapat permasalahan yang ditemui dalam penyelenggaraan urusan Pertanahan diantaranya:

- a. Kegiatan Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota mengindikasikan lahan pertanian Kota Semarang yang dioverlay dengan data kepadatan penduduk diperoleh hasil temuan lahan pertanian berada di Kawasan kurang padat dan tidak padat, sehingga batas maksimum untuk kepemilikan lahan pertanian adalah 20 hektar (tidak padat) dan 12 hektar (cukup padat). Dan dari morfologis dan sifat perkotaan di Kota Semarang, lahan pertanian dengan luasan kepemilikan sebagaimana dimaksud sudah sangat sulit dijumpai. Kepastian pengaturan dan penetapan atas keberadaan tanah kelebihan maksimum ini sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian menjadi kewenangan dari Kepala Kantor Pertanahan untuk melakukan inventarisasi terhadap kepemilikan tanah yang melebihi ketentuan pembatasan sebagaimana dimaksud.

- b. Di lain sisi untuk Tanah Absentee, mengindikasikan keberadaan tanah absentee di Kota Semarang. Kepastian pengaturan dan penetapan atas keberadaan tanah absentee ini sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian menjadi kewenangan dari Kepala Kantor Pertanahan untuk melakukan inventarisasi terhadap kepemilikan tanah absentee sebagaimana dimaksud.
- c. Dari hasil Kajian terkait Tanah Ulayat di Kota Semarang yang mengindikasikan ketiadaan tanah ulayat di lingkup wilayah administratif Kota Semarang.

Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 dan Petunjuk Teknis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nomor 5/Juknis-HK.02/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi dengan Rencana Tata Ruang, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Izin, Konsesi, dan/atau Hak Atas Tanah maka Kantor Pertanahan Kota Semarang perlu melakukan inventarisasi terhadap kepemilikan tanah absentee dan kepemilikan tanah yang melebihi ketentuan batas maksimum sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Perundangan yang berlaku;
- b. Kantor Pertanahan Kota Semarang telah memastikan bahwa terdapat indikasi keberadaan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee di Kota Semarang, maka Pemerintah Kota Semarang dapat menyusun rencana tindak lanjut atas status tersebut, salah satunya melakukan pendataan dan membangun database terkait tanah absentee;
- c. Perlu penyesuaian Program-program Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan, menyesuaikan dengan potensi daerah Kota Semarang.

11. Urusan Lingkungan Hidup

Kinerja penyelenggaraan pada urusan Lingkungan Hidup salah satunya ditandai dengan diraihnya penghargaan Sekolah Adiwiyata baik tingkat nasional maupun provinsi, selain itu juga penghargaan Kampung Iklim (Proklam) Tingkat Nasional.

Selain itu juga dilakukannya Program Strategis untuk menunjang terhadap peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, diantaranya: pembatasan penggunaan plastik, secara periodik dilaksanakan Car Free Day, juga penanganan dan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga mulai dari pemilahan, pengumpulan pengolahan dan pemrosesan akhir. Sehingga sampai dengan saat ini terdapat 225 unit bank sampah di masyarakat, juga Rumah kompos, dan TPS3R.

Namun disisi lain pada tahun 2022, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebagai indikator tujuan dari penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup justru menurun kinerjanya, yaitu pada tahun 2022 sebesar 51,32 sedangkan IKLH pada tahun 2021 sebesar 59,60. Ketidak tercapaian ini disumbangkan dari variable Indeks Kualitas air dan Indeks Kualitas lahan . IKA pada tahun 2022 sebesar 33,76 menurun jika dibanding tahun 2021 sebesar 50. Indeks Kualitas Air mengalami penurunan dikarenakan badan air sungai di Kota Semarang tercemar limbah domestik dan industri pertanian maupun peternakan. Sehingga melebihi baku mutu untuk parameter BOD dan COD serta tingginya nilai fecal coliform. Hal ini mencerminkan limbah rumah tangga yang belum terkelola dengan baik artinya upaya mempercepat perbaikan sanitasi sangat penting. Sedangkan Indeks kualitas lahan mengalami

penurunan karena perubahan tata guna lahan dari Kawasan non terbangun menjadi terbangun. Salah satu upaya pengendalian alih fungsi tata guna lahan, adalah dengan mempertahankan kelestarian hutan kota pada 5 lokasi, yaitu: Taman Keanekaragaman hayati TBRS yang berlokasi di Kel. Tegalsari, Kec. Candisari (\pm 4 Ha), Kebun Keanekaragaman hayati di Jl. Tapak Tugurejo (\pm 4000 m²), Taman Hutan Wisata Tinjomoyo (\pm 3,5 Ha), Taman Hutan Kota Krobokan (\pm 4 Ha) dan Taman Hutan Kota Gunung Talang (\pm 42 Ha)

Dalam mendukung upaya pengelolaan sampah Kota Semarang melakukan penilaian Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) yaitu suatu instrument standar penilaian kinerja pengelolaan sampah dari pusat hingga daerah untuk mengukur keberhasilan daerah dalam mengelola sampah, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian pengelolaan sampah. Penilaian Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) terdiri dari kebijakan, sumber daya manusia, sarana prasarana pengangkutan sampah, penganggaran dan proses dalam pengelolaan sampah (sosialisasi, pendampingan, pembinaan, pemahaman serta implementasi). Dari data diatas menunjukkan bahwa Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) tahun 2022 sebesar 65,40% dari target sebesar 64,38 %.

Pada tahun 2022 persentase volume sampah terangkut dari TPS ke TPA terealisasi sebesar 90,50%, meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 90%. Berdasarkan data tahun 2022, timbulan sampah yang dihasilkan Kota Semarang per harinya sebesar 1.181,06 ton/hari atau 431.085,22. Komposisi sampah berdasarkan sumber sampah penyumbang terbanyak ada pada sampah rumah tangga sebesar 432,80 ton atau 37,59% sedangkan dari komposisinya di dominasi oleh sampah sisa makanan 60,79%, plastik 17,20%, dan kertas 10,18%.

Sedangkan pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti pada tahun 2022 tercapai 100% yaitu dari 53 kasus terdiri dari limbah cair 23 kasus, pencemaran udara 20 kasus, kebisingan 8 kasus dan sampah 2 kasus. Dengan kata lain untuk penanganan pengaduan lingkungan tersebut semua dapat tertangani/ditindaklanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

Hasil evaluasi pencapaian RKPd Tahun 2022 pada urusan Lingkungan Hidup menunjukkan kinerja yang baik. Kondisi ini ditunjukkan dari 19 indikator yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan, terdapat 18 indikator dengan capaian sangat tinggi, dan sisanya sebanyak 1 indikator termasuk capaian tinggi. Sementara jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, dari sebanyak 19 indikator, sebanyak 9 indikator yang telah tercapai dan 10 indikator akan tercapai.







Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2022 pada urusan Lingkungan Hidup disajikan pada tabel berikut ini:






Tabel 2.94.

Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPd Tahun 2022 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026
Urusan Lingkungan Hidup

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPd Tahun 2022				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPd Tahun 2022	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPd 2022	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Disperkim

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2022	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2022	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi.d Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Kabupaten/ Kota	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Disperkim
	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		DLH
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase terlaksananya Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		DLH
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan peningkatan penataan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		DLH
	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	%	57,00	77,57	136,09%	ST	66,00	77,57	117,53%	ST		DLH
	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	%	85,00	73,59	86,57%	T	93,00	73,59	79,12%	ST		DLH
	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor	Hektar	10,00	10,00	100,00%	ST	50,00	10,00	20,00%	ST		DLH



Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD	
			Target RKPD Tahun 2022	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2022	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi.d Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)		
	dan sumber mata air												
	Persentase perubahan emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca	%	2,00	5,90	200,00%	ST	2,00	5,90	200,00%	ST		DLH	
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Cakupan pengelolaan taman keanekaragaman hayati (kehati) di	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		DLH	
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dalam pengolahan B3 dan limbah B3	%	54,00	54,50	100,93%	ST	62,00	54,50	87,90%	ST		DLH	
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase pembinaan dan pengawasan terkait Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	%	85,20	86,08	101,03%	ST	86,00	86,08	100,09%	ST		DLH	
	Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		DLH	
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan	%	48,00	48,00	100,00%	ST	58,00	48,00	82,76%	ST		DLH	


Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2022	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2022	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi.d Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Hidup Untuk Masyarakat	lingkungan hidup											
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan sekolah adiwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan	%	11,00	16,91	153,73%	ST	13,00	16,91	130,08%	ST		DLH
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		DLH
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase volume sampah terangkut dari TPS ke TPA	%	90,50	90,50	100,00%	ST	92,00	90,50	98,37%	ST		DLH
	Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	%	26,00	26,04	100,15%	ST	32,00	26,04	81,38%	ST		DLH
	Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	%	73,00	73,31	100,42%	ST	69,00	73,31	106,25%	ST		DLH

Sumber: eMonev Perencanaan

*) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR: $X \leq 50\%$

***) ST: $X > 18\%$; T: $18\% \geq X > 15\%$; S: $15\% \geq X > 12\%$; R: $12\% \geq X > 10\%$; dan SR: $X \leq 10\%$

***): Target Akhir RPJMD : Sudah Tercapai ($X \geq 100\%$) : Akan Tercapai ($100\% > X \geq 20\%$)

: Perlu Upaya Keras ($X < 20\%$)

Permasalahan yang ditemui dalam penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup:

- a. Indeks Kualitas Air Kota Semarang tergolong dalam kategori kurang
- b. Indeks Kualitas Lahan Kota Semarang tergolong dalam kategori kurang

Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilakukan:

- a. Pemantauan kualitas air dengan menggunakan sistem monitoring kualitas air secara online dan real time menggunakan onlimo serta memperketat pengawasan dan pelaporan Usaha Skala Kecil (USK)
- b. Meningkatkan luasan tutupan lahan melalui penghijauan, pembangunan taman kota, hutan kota

12. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Kinerja penyelenggaraan urusan kependudukan dan pencatatan sipil salah satunya ditandai dengan Prestasi dan penghargaan yang diterima dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Kategori “DUKCAPIL BISA” Bagi Kota/Kabupaten Dengan Penduduk Besar Tahun 2022. Selain itu juga Penghargaan Pelayanan Publik dari KemenPAN-RB sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Terbaik Kategori “Pelayanan Prima” Tahun 2022. Telah banyak inovasi yang dilakukan dalam peningkatan pelayanan di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Profil Kependudukan. Belum semua kinerja tercapai 100%, namun justru hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Semarang dalam menuntaskan problem kependudukan yang ada utamanya jelang Pilpres, Pileg dan Pilkada tahun 2024.

Berdasarkan data permohonan pelayanan KTP-el, maka capaian kepemilikan KTP-el pada tahun 2022 adalah 96,93% atau 1.233.741 orang, dari jumlah wajib KTP-el sejumlah 1.272.828 orang. Sedangkan 3,07% lainnya adalah penduduk yang belum memiliki KTP-el yaitu penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP-el, ataupun penduduk yang melakukan mutasi kedatangan yang belum rekam KTP-el. Keberhasilan ini dilakukan melalui : perekaman KTP-el ke Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang ada di Kota Semarang, melakukan perekaman KTP-el jemput bola bagi warga difabel dan lansia yaitu inovasi Jempol Tiger Japri (Jemput Bola Tim Gerak Kerja Cepat dan Responsif). Perekaman keliling jemput bola dilakukan dengan mendatangi Panti-panti sosial, Panti Wredha, Panti Asuhan. Selain itu juga melaksanakan inovasi Paket 3 in 1 bagi penduduk yang pindah dari luar kota Semarang masuk ke Kota Semarang. Warga yang melaporkan kedatangan dari luar kota cukup dengan menunjukkan SKPWNI maka secara otomatis akan mendapatkan 3 (tiga) dokumen kependudukan yaitu Kartu Keluarga (KK), KTP-el dan KIA bila ada anak usia KIA yang ikut pindah. Mengadakan pelayanan akhir pekan dan malam hari yang dilaksanakan di kantor Dinas dan 16 TPDK Kecamatan setiap hari Sabtu pada minggu pertama dan ketiga setiap bulannya. Pelayanan akhir pekan dan malam hari dibuka mulai pukul 07.30 sampai 13.00 dan dilanjutkan pada malam hari yaitu pada pukul 19.00-22.00 WIB.

Persentase capaian kepemilikan KIA pada tahun 2022 yaitu sebesar 64,31%. Jumlah anak yang memiliki KIA pada tahun 2022 sebesar 260.702 anak atau 64,31% dari jumlah penduduk usia KIA 405.368 anak. Capaian kepemilikan KIA pada tahun 2022 belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 68%. Hal ini dikarenakan terdapat peningkatan jumlah anak usia wajib KIA dari tahun sebelumnya dan terdapat jumlah anak yang memiliki KIA yang sudah berusia diatas 17 tahun maka sudah tidak dihitung ke dalam capaian kepemilikan KIA. Dalam upaya meningkatkan kinerja KIA, akan diterapkan pelayanan online adminduk yaitu Aplikasi SiD'nOK, melaksanakan pelayanan paket terintegrasi dengan penerbitan akta kelahiran sekaligus akan mendapatkan KIA dan Kartu Keluarga (KK) atau yang disebut Paket 3 in 1. Selain itu dilaksanakan pula kerjasama

pemanfaatan KIA dengan 11 (sebelas) Mitra KIA yaitu Toko Buku Gramedia, Toko Buku Merbabu, Toko Buku Gunung Agung, Toko Buku Toha Putra, English First, Halmahera Music, Klub Merby, Jungle Toon Water Park, Water Blaster, BRT Trans Semarang dan Club House Graha Wahid. Kerjasama ini dilakukan untuk memberikan nilai tambah dan nilai manfaat bagi anak yang memiliki KIA, selain itu untuk menarik minat warga untuk membuat KIA bagi anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari.

Adapun kinerja di bidang pencatatan sipil seluruhnya tercapai yaitu Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-18 Tahun, Rasio Penduduk Berakta Kematian, Persentase pasangan non muslim berakta perkawinan dan Persentase pasangan non muslim berakta perceraian.

Keberhasilan capaian indikator kinerja pada Program Pencatatan Sipil karena beberapa langkah yang dilakukan antara lain:

- a. Penerapan aplikasi pelayanan online administrasi kependudukan yaitu aplikasi SiDenOK. Dengan adanya aplikasi SiD'nOK yang dapat diakses 24 jam, memudahkan masyarakat dalam pelaporan akta pencatatan sipil, karena pemohon cukup mengupload persyaratan yang dibutuhkan dan setelah dokumen jadi maka dapat langsung mencetak secara mandiri akta pencatatan sipil yang didaftarkan menggunakan kertas A4 80 gram.
- b. Penerapan kerjasama penerbitan akta kelahiran dan akta kematian dengan Rumah Sakit / Dokter / Bidan. Bagi masyarakat akan mendapatkan Akta Kelahiran, KK dan KIA sekaligus apabila melahirkan di Rumah Sakit / Dokter / Bidan yang telah bekerjasama dengan Dukcapil. Saat ini telah bekerjasama dengan 7 (tujuh) Rumah Sakit Pemerintah maupun swasta yaitu RSUD KRMT Wongsonegoro, RS Hermina Pandanaran, RS Hermina Banyumanik, RS Telogorejo, RS Elizabeth, Siloam Hospital dan RS Colombia Asia.
- c. Melaksanakan kerjasama dengan beberapa Yayasan Layanan Kematian yang ada di Kota Semarang untuk penerbitan Akta Kematian. Yayasan Layanan Kematian yang telah bekerjasama antara lain Yayasan Layanan Kematian Bambang Purnomo, Yayasan Layanan Kematian Santa Maria dan Yayasan Layanan Kematian Budi Kasih.

Selain itu dalam pengelolaan informasi adminduk, mulai tahun 2022 diberlakukan SIAK Terpusat untuk seluruh Dukcapil seluruh Indonesia. SIAK Terpusat adalah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang menggunakan satu data kependudukan yang ada di pusat dalam hal ini data kependudukan pada Ditjen Dukcapil, database terdistribusi yang sebelumnya dapat dikelola oleh masing-masing Dukcapil Kota/Kabupaten, saat ini sudah ditutup untuk menjaga keamanan data kependudukan. Maka sistem pemanfaatan data yang ada antara Disdukcapil dengan lembaga pengguna turut mengalami perubahan. Website pemanfaatan data yang semula menggunakan *web service* yang dikelola masing-masing Dukcapil Kota/Kabupaten, saat ini menggunakan web portal yang dikelola oleh Ditjen Dukcapil untuk menjaga keamanan data kependudukan ketika data tersebut dimanfaatkan oleh lembaga pengguna. Oleh karenanya, dalam hal pemanfaatan data ikut terdampak dengan peralihan penggunaan web portal untuk pemanfaatan data kependudukan sehingga Perjanjian Kerjasama untuk seluruh lembaga pengguna diwajibkan untuk diperbarui kembali dengan sistem perijinan pemanfaatan data melalui Ditjen Dukcapil. Pada tahun 2022, beberapa lembaga pengguna yang telah melakukan pembaruan Perjanjian Kerjasama dengan sistem web portal terbaru mencapai 14 (empat belas) lembaga pengguna yang melakukan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data. Dan dari 14 (empat belas) lembaga pengguna tersebut seluruhnya sudah dapat memanfaatkan data kependudukan atau telah mengaplikasikan web portal untuk OPD/instansi/lembaganya masing-masing

Hasil evaluasi pencapaian RKPD Tahun 2022 pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan kinerja yang sangat baik. Kondisi ini ditunjukkan dari 10 indikator yang dievaluasi, sebanyak 9 indikator termasuk pada kategori pencapaian sangat tinggi, dan 1 indikator dengan capaian tinggi. Indikator yang capaiannya tinggi yaitu Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA. Sementara jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, terdapat 4 indikator yang telah tercapai dan 6 indikator akan tercapai target akhir RPJMD.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2022 pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.95.

Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2022 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2022	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2022	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Dispenduk Capil
	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Dispenduk Capil
	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Dispenduk Capil
	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Dispenduk Capil
Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Perekaman KTP-el	%	99,30	96,93	97,61%	ST	99,70	96,93	97,22%	ST		Dispenduk Capil
	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	%	68,00	64,31	94,57%	ST	80,00	64,31	80,38%	ST		Dispenduk Capil
Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta kelahiran	%	97,00	98,45	101,49%	ST	98,00	98,45	100,46%	ST		Dispenduk Capil
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan	%	81,00	100,00	123,46%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dispenduk Capil

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD	
			Target RKPD Tahun 2022	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2022	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)		
	perjanjian kerjasama												
	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dispenduk Capil	
Program Pengelolaan Profil Kependudukan Daerah	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Daerah	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dispenduk Capil	

Sumber: eMonev Perencanaan

*) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR: $X \leq 50\%$

***) ST: $X > 18\%$; T: $18\% \geq X > 15\%$; S: $15\% \geq X > 12\%$; R: $12\% \geq X > 10\%$; dan SR: $X \leq 10\%$

***): Target Akhir RPJMD ●: Sudah Tercapai ($X \geq 100\%$) ▲: Akan Tercapai ($100\% > X \geq 20\%$)

▼: Perlu Upaya Keras ($X < 20\%$)

Dalam melaksanakan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih terdapat kendala dan permasalahan yaitu penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi kependudukan belum sepenuhnya dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh masyarakat.

Dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan seperti yang telah dikemukakan di atas, maka langkah-langkah yang ditempuh antara lain:

1. Penerapan inovasi pelayanan administrasi kependudukan, diantaranya : Membangun aplikasi layanan administrasi kependudukan online Si'D'Nok; Pelayanan Akhir Pekan dan Malam Hari yang dilaksanakan setiap Hari Sabtu pertama setiap bulan; Inovasi Paket 3 in 1 yaitu penerbitan paket permohonan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KIA, permohonan Akta Kematian akan mendapatkan Kartu Keluarga dan KTP-el pasangan; Penerbitan Akta Kelahiran dan Akta Kematian bekerjasama dengan Rumah Sakit Pemerintah maupun swasta, Praktek Bidan dan Yayasan Pelayanan Kematian; Inovasi KIA Goes To School, yaitu jemput bola Kartu Identitas Anak dengan datang ke sekolah SD dan SMP; Inovasi "Kado Mbak Ita" yaitu Kanugrahan Dokumen Kependudukan Baru Penduduk Pitulas Tahun. Bagi wajib KTP-el pemula yang sudah melakukan perekaman KTP-el, maka pada saat usia menginjak 17 tahun, maka Disdukcapil akan mencetak KTP-el yang dikemas secara khusus berbentuk kado dan mengirimkannya melalui Kelurahan, RW dan RT sampai kepada Wajib KTP-el 17 tahun.
2. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan .
3. Secara massif akan dilaksanakan sosialisasi dan edukasi Pencanaan Dukcapil GO DIGITAL baik secara langsung melalui pendampingan atau melalui berbagai media. Termasuk juga sosialisasi penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yaitu informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan.

4. Dalam rangka penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di bidang administrasi kependudukan, penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang SPBE terus ditingkatkan dengan menganalisa kebutuhan sarana dan prasarana terkait SPBE dan berkolaborasi dengan dinas teknis lainnya.

13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Salah satu kinerja dalam penyelenggaraan pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditandai dengan diraihnya Juara III penilaian Evaluasi Perkembangan Kelurahan/Lomba Kelurahan di Tingkat Provinsi Jawa Tengah, yang diwakili oleh Kelurahan Purwosari. Selain itu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang aktif berhasil sebesar 100%, yang terdiri dari RT, RW, PKK, Posyandu, LPMK, Karang Taruna dan KP SPAMS.

Upaya untuk peningkatan tertib administrasi kelurahan, telah dilakukan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa melalui pelatihan penyusunan profil kelurahan kepada peserta yang berasal dari 177 Kelurahan. Selain itu dilakukan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan.



Sedangkan salah satu bentuk dukungan pemanfaatan TTG dimasyarakat, Pemerintah Kota Semarang mengikuti Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional XXIII pada tanggal 18 sampai dengan 21 Oktober 2022 bertempat di Aston Cirebon Hotel & Convention. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan TMMD merupakan wujud pemberdayaan masyarakat yang secara rutin dilaksanakan.

Hasil evaluasi pencapaian RKPD Tahun 2022 pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menunjukkan kinerja yang sangat baik. Kondisi ini ditunjukkan dari 2 indikator yang dievaluasi, semuanya sebanyak 2 indikator termasuk pada kategori pencapaian sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, semuanya sebanyak 2 indikator telah mencapai target akhir RPJMD.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2022 pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.96.



Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2022 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2022	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2022	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Administrasi Pemerintahan dan Desa	Persentase Kelurahan yang menerapkan sistem informasi	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		DP3A
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Cakupan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		DP3A

Sumber: eMonev Perencanaan

*) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR: $X \leq 50\%$

**) ST: $X > 18\%$; T: $18\% \geq X > 15\%$; S: $15\% \geq X > 12\%$; R: $12\% \geq X > 10\%$; dan SR: $X \leq 10\%$

***): Target Akhir RPJMD : Sudah Tercapai ($X \geq 100\%$) : Akan Tercapai ($100\% > X \geq 20\%$)

: Perlu Upaya Keras ($X < 20\%$)

Masih dijumpai kendala dalam penyelenggaraan kegiatan, diantaranya belum optimalnya fungsi lembaga kemasyarakatan dan masih kurangnya pemahaman mengenai fungsi lembaga kemasyarakatan.

Adapun tindak lanjut yang akan ditempuh adalah dengan penguatan peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan dan peningkatan program dan advokasi kebijakan terkait peran serta dan pemberdayaan masyarakat.

14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Prestasi dan penghargaan yang diraih dalam penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan KB pada Tahun 2022 diantaranya: Juara Favorit Apresiasi Tenaga Lini Lapangan Terbaik Tahun 2022 Kategori Kader IMP Tingkat.

Nasional, dan Juara Teladan 1 Pemilihan IMP Teladan Tingkat Provinsi Jawa Tengah. Selain itu kinerja Cakupan tingkat putus alat kontrasepsi (DO) mempunyai predikat sangat tinggi terealisasi sebesar 7,91%, jauh lebih rendah dari target sebesar 11,20%. Sedangkan indikator Cakupan PUS *unmet need* dan cakupan peserta KB Aktif capaiannya diatas 98%, dengan realisasi masing-masing sebesar 9,13 % dan 76,08%

Sedangkan Cakupan PUS *unmetneed* di tahun 2022 kurang berhasil memenuhi target yaitu dari target 9,08% tercapai 9,13%, namun begitu ketidakberhasilannya masih dalam kategori memadai. Indikator Kinerja Cakupan PUS *Unmetneed* kurang berhasil mencapai target dikarenakan antara lain karena kurang optimalnya : Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan, Peningkatan Kepesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) , Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB , Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Hak- Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan, serta kepesertaan KB Pria kurang optimal.

Adapun Kinerja Cakupan Peserta KB Aktif juga kurang berhasil mencapai target antara lain dikarenakan program/sub kegiatan yang telah dilaksanakan kurang optimal yaitu advokasi program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal , Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok), Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLK, Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB), Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB serta Pembinaan Terpadu Kampung KB.

Hasil evaluasi pencapaian RKPD Tahun 2022 pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menunjukkan kinerja yang kurang baik. Kondisi ini ditunjukkan dari sebanyak 6 indikator yang menjadi alat ukur keberhasilan, semuanya sebanyak 6 indikator yang menunjukkan capaian sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sebanyak 3 indikator telah mencapai target akhir RPJMD, dan 3 indikator akan mencapai target akhir RPJMD.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2022 pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.97.

Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2022 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2022	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2022	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Disdalduk KB
	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Disdalduk KB
	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Disdalduk KB
Program Pengendalian Penduduk	Cakupan PUS umur istri < 20 th	%	0,50	0,39	128,20%	ST	0,50	0,39	128,20%	ST		Disdalduk KB
Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Cakupan Angka Kelahiran Total (TFR)	%	2,00	2,00	100,00%	ST	2,00	2,00	100,00%	ST		Disdalduk KB
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	%	60,02	72,90	121,46%	ST	60,42	72,90	120,65%	ST		Disdalduk KB

Sumber: eMonev Perencanaan

*) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR: $X \leq 50\%$

**) ST: $X > 18\%$; T: $18\% \geq X > 15\%$; S: $15\% \geq X > 12\%$; R: $12\% \geq X > 10\%$; dan SR: $X \leq 10\%$

***): Target Akhir RPJMD : Sudah Tercapai ($X \geq 100\%$) : Akan Tercapai ($100\% > X \geq 20\%$)

: Perlu Upaya Keras ($X < 20\%$)

Pemasalahan yang ditemui dalam penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan KB diantaranya:

- a. Tidak semua kader anggota Tim Penggerak Keluarga (TPK) mempunyai kemampuan sesuai standar;
- b. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk ber KB, dan masih terdapat wilayah yang sulit terjangkau petugas (Perumahan Mewah).

Adapaun rencana tindak lanjut yang dilakukan adalah:

- a. Mengoptimalkan media pertemuan tingkat kecamatan sebagai pembinaan berjenjang kepada kader TPK termasuk pemanfaatan pertemuan minilok tingkat kecamatan;
- b. Bekerjasama dengan instansi terkait untuk pendataan di wilayah-wilayah tersebut dan mengoptimalkan peran KIE pada platform media sosial;
- c. Mengoptimalkan Komunikasi Informasi dan Edukasi di semua media.

15. Urusan Perhubungan

Beberapa hasil kinerja yang dicapai pada tahun 2022 diantaranya : Pencapaian kinerja lalu lintas ditunjukkan dengan rata-rata kepadatan lalu lintas naik dari 0,54 menjadi 0,54 tetapi masih terkendali, Rasio Konektivitas wilayah sebesar 0.58. Angka ini mengindikasikan bahwa 58% trayek angkutan umum sudah terlayani guna mendukung pergerakan masyarakat dalam beraktifitas. Terkait manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan dengan cara pemasangan sarana prasarana / perlengkapan jalan yang dilakukan Pemasangan prasarana / perlengkapan jalan berupa rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, traffic light (APILL) berfungsi meningkatkan kelancaran dan keamanan lalu lintas. Selain itu jumlah titik / lokasi rawan kemacetan sudah sesuai target yang ditetapkan dan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami perbaikan. Lokasi rawan kemacetan pada tahun 2021 tercatat 4 lokasi yaitu Jl. Brigjend. Sudiarto, Jl. Setriabudi, Jl. Siliwangi dan Jl. Elang. Pada Tahun 2022 ini untuk Jl. Elang sudah berangsur mengalami kelancaran. Hal ini didukung oleh rekayasa lalu lintas dan pemasangan perlengkapan jalan di lokasi tersebut antara lain Traffic Light, rambu-rambu, dan marka jalan. Trayek BRT sebanyak 12 trayek juga telah menunjukkan peningkatan jumlah penumpang, dan kepemilikan kir angkutan umum sebagai upaya meningkatkan keamanan angkutan umum.

Hasil evaluasi pencapaian RKPDP Tahun 2022 pada urusan Perhubungan menunjukkan kinerja yang baik. Kondisi ini ditunjukkan dari 9 indikator yang menjadi alat ukur keberhasilan, semuanya termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi. Namun jika dilihat dari ketercapaian target akhir RPJMD, penyelenggaraan urusan perhubungan terdapat 1 indikator yang telah berhasil mencapai target dan 8 indikator lainnya akan mencapai target akhir RPJMD. Indikator yang capaiannya perlu ditingkatkan karena kurang dari 100% yaitu: Persentase pelanggaran lalu lintas angkutan umum; dan Rasio ijin trayek per 10.000 jumlah penduduk.

Perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2022 pada urusan Perhubungan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.98.

Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPDP Tahun 2022 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026
Urusan Perhubungan

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPDP Tahun 2022				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPDP Tahun 2022	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPDP 2022	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Dinas Perhubungan
	Persentase peningkatan kemampuan ASN Dinas Perhubungan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Dinas Perhubungan
	Persentase tersedianya sarana dan prasarana	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Dinas Perhubungan

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPDP Tahun 2022				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPDP Tahun 2022	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPDP 2022	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
	Dinas Perhubungan											
	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST	▶	Dinas Perhubungan
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	%	62,96	67,71	107,54%	ST	68,15	67,71	99,35%	ST	▶	Dinas Perhubungan
	Persentase pengelolaan Parkir On the Street	%	86,00	86,42	100,49%	ST	94,00	86,42	91,94%	ST	▶	Dinas Perhubungan
	Jml trayek BRT	trayek	12,00	12,00	100,00%	ST	15,00	12,00	80,00%	ST	▶	Dinas Perhubungan
	Persentase pelanggaran lalu lintas angkutan umum	%	34,00	33,98	99,94%	ST	30,00	33,98	113,27%	ST	●	Dinas Perhubungan
	Rasio ijin trayek per 10.000 jumlah penduduk	%	6,74	5,48	81,31%	T	7,00	5,48	78,29%	ST	▶	Dinas Perhubungan

Sumber: eMonev Perencanaan

*) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR: $X \leq 50\%$

**) ST: $X > 18\%$; T: $18\% \geq X > 15\%$; S: $15\% \geq X > 12\%$; R: $12\% \geq X > 10\%$; dan SR: $X \leq 10\%$

***): Target Akhir RPJMD ●: Sudah Tercapai ($X \geq :100\%$) ▶: Akan Tercapai ($100\% > X \geq 20\%$)

▼: Perlu Upaya Keras ($X < 20\%$)

Permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- Beberapa pengusaha angkutan umum tidak mampu meremajakan armadanya, sehingga tidak bisa melayani penumpang;
- Peningkatan volume lalu lintas kendaraan akibat dari berputarnya roda ekonomi paska pandemi yang berpotensi pada kerawanan kemacetan lalu lintas.

Strategi yang akan dilaksanakan untuk mengatasi masalah:

- Peningkatan pelayanan BRT untuk menggantikan angkutan umum swasta yang tidak mampu melakukan peremajaan armada;
- Rekayasa lalu lintas dan pemasangan perlengkapan jalan untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas.

16. Komunikasi dan Informatika

Kinerja pada penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2022, ditandai diantaranya dengan diterimanya penghargaan Implementasi Smart City Terbaik Tahun 2022 (Kategori "*Smart Economy*") Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selain itu juga penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Pemerintah Kota Semarang Sebagai Kota Informatif dalam Menyampaikan, Menyediakan, dan Menguasai Informasi Publik Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Kategori Informatif). Serta juara 3 Lomba Pertunjukan Rakyat FK Metra oleh Provinsi Jawa Tengah.

Untuk mendukung Pelayanan Informasi Publik di Kota Semarang pada tahun 2022 terlaksana forum koordinasi PPID serta pengelolaan Pusat Informasi Publik. Dan sebagai dasar pelaksanaannya telah di tetapkan dengan Keputusan Walikota Semarang Nomor 485.1/122 Tahun 2022 tentang Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2022. Dan untuk mengatur secara teknis ,selanjutnya diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Nomor B/2424/485.1/IV Tahun 2022 Tentang Klasifikasi Daftar Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2022, dan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Nomor B/2423/485.1/IV Tahun 2022 tentang Klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2022.

Pengelolaan laporan yang masuk selama tahun 2022 melalui kanal-kanal yang tersedia telah diterima laporan sebanyak 6.403 laporan dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.99.
Laporan melalui kanal-kanal yang diterima

NO	SUMBER	JUMLAH
1	Website	315
2	SMS	135
3	WhatsApp	3.759
4	Instagram	323
5	Twitter	139
6	Mobile App SAPA MBAK ITA	1.134
7	LAPORGUB	577
8	Andoid SP4N	20
9	Offline (Datang Langsung)	1
TOTAL JUMLAH INPUTAN		6403

Dengan lima terbesar OPD yang sering mendapatkan Laporan adalah Dinas Perhubungan, Dinas pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman, PDAM Tirta Moedal, dan Satpol PP. Dan dari seluruh laporan tersebut sebagian besar telah selesai ditangani.

Selain publikasi kebijakan pemerintah, pada tahun 2022 juga dilaksanakan pengelolaan Pengaduan Call Center 112 Kota Semarang, Kampanye #darurat112aja, pengadaan kamera CCTV RT sejumlah 8.734 kamera, juga Terlaksananya launching Aplikasi Klepon.in dan Semarangkota.CSIRT serta launching Indigospace SDK Semarang untuk pembinaan dan memfasilitasi pengembangan ekosistem digital, termasuk startup, komunitas kreatif, dan UMKM.

Pencapaian kinerja RKPD pada urusan komunikasi dan informatika tahun 2022 termasuk dalam kategori baik. Kondisi ini terlihat dari 6 indikator yang dimiliki, semua indikator sebanyak 6 indikator termasuk pada kategori capaian sangat tinggi. Namun jika disandingkan terhadap target akhir RPJMD, terdapat 2 indikator telah tercapai dan 4 indikator lainnya belum mencapai target akhir RPJMD.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2022 pada urusan komunikasi dan informatika disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.100.

Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2022 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026
Urusan Komunikasi dan Informatika

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2022	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2022	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST	▶	Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian
	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST	▶	Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian
	Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST	▶	Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian
	Persentase peningkatan kemampuan ASN	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST	▶	Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian
Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase penyebaran informasi ke masyarakat	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Terselenggaranya pengelolaan E-Government	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian

Sumber: eMonev Perencanaan

*) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR: $X \leq 50\%$

**) ST: $X > 18\%$; T: $18\% \geq X > 15\%$; S: $15\% \geq X > 12\%$; R: $12\% \geq X > 10\%$; dan SR: $X \leq 10\%$

***): Target Akhir RPJMD ●: Sudah Tercapai ($X \geq 100\%$) ▶: Akan Tercapai ($100\% > X \geq 20\%$)

▼: Perlu Upaya Keras ($X < 20\%$)

Pemmasalahan yang ditemui diantaranya:

- Pemerintah Kota Semarang Belum Menggunakan Aplikasi Umum Srikandi;
- Kebijakan Arsitektur SPBE Pusat Baru Disahkan Akhir Tahun 2022;
- Belum adanya lisensi data base yang mengolah data yang berjumlah jutaan data;

- d. Sarana Prasarana di gedung Indigospace SDK masih kurang memenuhi sebagai tempat beraktifitas para Komunitas TIK dan UMKM;
- e. Masih rendahnya partisipasi kelompok perempuan dan Difabel dalam pelaporan dan pengaduan.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan adalah:

- a. Perlunya dilaksanakan sosialisasi tentang mekanisme pelaporan dan pengaduan terutama perempuan dan difabel dalam pelaporan dan pengaduan serta Sosialisasi aplikasi Sapa Mbak Ita;
- b. *Launching* dan Penggunaan Aplikasi Umum Srikandi Awal Tahun 2023;
- c. Arsitektur SPBE Kota Semarang sebagai dasar perubahan kebijakan Perwal SPBE Kota Semarang;
- d. Pengadaan lisensi data base yang dapat mengolah jutaan data;
- e. Mengupgrade fasilitas sarpras di gedung Indigospace SDK seperti Komputer, Printer, alat pelatihan UMKM seperti Studio foto ruang pelatihan UMKM.

17. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dalam penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah didukung program inovasi berupa pembiayaan melalui Kredit Wibawa bagi Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Semarang dan GULO ASEM (Gerai Usaha Mikro lokal online Asli Semarang) yaitu Inovasi layanan pemasaran online dalam bentuk aplikasi katalog produk UMKM, serta Fasilitasi kemitraan usaha antara UMKM dengan indomaret dan Uniqlo untuk memperluas jangkauan akses pemasaran bagi pelaku usaha mikro. Disamping itu juga dikembangkan sebuah system pendataan UMKM di kota Semarang untuk memperoleh data dan informasi terkait perkembangan UMKM di Kota Semarang.

Pada tahun 2022 di Kota Semarang terdapat jumlah Koperasi Aktif sebanyak 561 dari seluruh jumlah koperasi yang sebanyak 732 atau sebesar 76,63%. Dengan Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru yang Berskala Mikro menjadi sebesar 28,86%.

Dengan meningkatnya persentase Koperasi yang Berkualitas berdasarkan RAT, volume usaha, dan aset serta meningkatnya persentase koperasi aktif, diharapkan mampu mewujudkan koperasi yang mandiri, Akuntabel, sehat dan berkesinambungan serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya guna pemerataan pembangunan perekonomian. Demikian pula dengan meningkatnya usaha mikro menjadi wirausaha dan meningkatnya persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro, diharapkan akan mewujudkan UMKM yang berdaya saing dan berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dan dampaknya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melalui pengawasan koperasi yang dilakukan pada tahun 2022 diharapkan pengelolaan Koperasi di Kota Semarang akan semakin baik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perkoperasian yang berlaku serta meningkatkan Akuntabilitas koperasi dan meningkatkan kepercayaan anggotanya terhadap kinerja koperasi sehingga mampu memberikan kemanfaatan bagi seluruh anggotanya khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Dengan adanya Koperasi yang Sehat sebesar 56,25% dirasa mampu mendorong koperasi lainnya menjadi kategori sehat dari aspek Permodalan, manajemen, efisiensi, likuiditas dan kemandirian, sehingga akan meningkatkan kepercayaan anggota dan masyarakat terhadap koperasi serta berperan dalam Perekonomian Daerah.

Demikian pula pelaku usaha mikro yang dibina dan berhasil meningkatkan omsetnya (sebesar 47,89%) akan memperluas akses pemasaran pelaku usaha mikro Kota Semarang baik secara online maupun off line sehingga dapat meningkatkan omset usahanya serta mendorong usaha mikro yang meningkat.







Pencapaian kinerja RKPD pada Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2022 tergolong baik. Kondisi ini terlihat dari 11 indikator yang menjadi alat ukur keberhasilan, sebanyak 11 indikator mempunyai capaian sangat tinggi. Sementara itu jika dibandingkan terhadap target akhir RPJMD, terdapat 6 indikator program yang telah mencapai target, dan 5 indikator lainnya mempunyai predikat akan tercapai target akhir RPJMD.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2022 pada Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.101.

Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2022 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026
Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2022	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2022	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	%	3,00	10,60	353,33%	ST	3,00	10,60	353,33%	ST		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	%	50,00	50,55	101,10%	ST	50,00	50,55	101,10%	ST		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro


Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2022	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2022	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Prosentase koperasi sehat	%	30,00	56,25	187,50%	ST	35,00	56,25	160,71%	ST		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	%	10,00	45,36	453,60%	ST	10,00	45,36	453,60%	ST		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
	Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan	%	1,00	20,38	2,038%	ST	2,00	20,38	2,038%	ST		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	%	25,00	26,37	105,48%	ST	30,00	26,37	87,90%	ST		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	%	3,00	6,24	208,00%	ST	3,00	6,24	208,00%	ST		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Program Pengembangan Umkm	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	%	20,00	47,89	239,45%	ST	25,00	47,89	191,56%	ST		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Sumber: eMonev Perencanaan

*) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR: $X \leq 50\%$

**) ST: $X > 18\%$; T: $18\% \geq X > 15\%$; S: $15\% \geq X > 12\%$; R: $12\% \geq X > 10\%$; dan SR: $X \leq 10\%$

***): Target Akhir RPJMD : Sudah Tercapai ($X \geq 100\%$) : Akan Tercapai ($100\% > X \geq 20\%$)

: Perlu Upaya Keras ($X < 20\%$)

Dalam penyelenggaraan urusan koperasi dan UKM, masih dijumpai beberapa permasalahan, diantaranya:

- Jangkauan Akses pemasaran pelaku usaha mikro yang masih terbatas dan masih bersifat konvensional;
- Keterbatasan Permodalan Para Pelaku Usaha Mikro Kota Semarang;
- Masih banyaknya produk Usaha Mikro yang belum memiliki Sertifikasi produk antara lain PIRT, HALAL dan HAKI.

Dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan sebagaimana tersebut diatas, langkah-langkah yang ditempuh antara lain:

- Melaksanakan Fasilitasi kemitraan usaha dengan Indomaret dan Uniqlo dan Fasilitasi pemasaran baik secara *offline* maupun *online*. Secara

online antara lain melalui Galeri UMKM Kota lama, Hall Balaikota Semarang, dan Pasar Bulu, mengikuti pameran di luar daerah secara berkelanjutan serta mengadakan Foodstreet Festival. Sedangkan secara Online antara lain dengan mengembangkan Aplikasi GULO ASEM (Gerai Usaha Mikro lokal online Asli Semarang) pada <http://guloasem.semarangkota.go.id> serta pelatihan Pemasaran secara Online.

- b. Meningkatkan Sosialisasi Kredit Wibawa kepada masyarakat baik pelaku usaha mikro serta menyelenggarakan Forum Kemitraan Pembiayaan bagi Pelaku Usaha Mikro dengan lembaga Perbankan/Non Perbankan.
- c. Memberikan fasilitasi perlindungan produk usaha Mikro antara lain dengan Fasilitasi Sertifikasi PIRT, HALAL dan HAKI kepada Pelaku Usaha Mikro secara berkelanjutan.

18. Urusan Penanaman Modal

Kinerja dalam penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal ditandai diantaranya dengan diterimanya penghargaan dan atau prestasi. Pada tahun 2022 kembali memperoleh Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, Predikat “A” Penyelenggaraan Pelayanan Publik Terbaik dari Kementerian PAN-RB, Peringkat Pertama *Monitoring Center for Prevention* (MCP) KPK Kategori Perizinan Pemerintah Kota Tingkat Nasional dan Peringkat Pertama Publikasi Standar Pelayanan Terbanyak Tingkat Nasional.

Untuk menunjang pelayanan publik terkait perijinan, pada tahun 2022 terbit Peraturan Walikota Semarang Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penyelenggaran Mal Pelayanan Publik Kota Semarang sebagaimana Instruksi Presiden No.12 Tahun 2016 tentang Implementasi Program Gerakan Indonesia Melayani. Selain itu juga telah terbit Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan berusaha dan non berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang sebagai upaya penambahan wewenang penerbitan perijinzn di DPMPPTSP Kota Semarang untuk menyesuaikan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Beberapa kegiatan unggulan yang dilaksanakan yaitu Semarang Business Forum ke-15 Tahun 2022, Sharing Session DPMPPTSP dengan Pelaku Usaha, Temu Bisnis kolaborasi dengan pengusaha di Kota Semarang, Pameran Promosi Potensi Investasi, Kegiatan Kemitraan Usaha Menengah Besar, dan Penyusunan Kajian Strategi Promosi Investasi Kota Semarang.

Hasil Kinerja pada Urusan penanaman modal diukur dari pertumbuhan maupun nilai investasi di Kota Semarang. Berikut nilai investasi Kota Semarang dari tahun 2019 sampai dengan 2022:

Tabel 2.102.

Nilai investasi Kota Semarang Tahun 2019-2022

Nilai Investasi Kota Semarang (Rp)			
2019	2020	2021	2022
33.658.609.338.941	18.209.772.344.035	22.538.063.406.487	24.662.877.213.739

Nilai investasi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 berfluktuasi, karena terdampak pandemi. Pada tahun 2022 nilai investasi mencapai Rp24.662.877.213.739,- dengan pertumbuhan sebesar 9,94 % dari nilai investasi tahun sebelumnya. Demikian pula jika dilihat dari jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN), meningkat menjadi sebanyak 675 investor, dari tahun 2021 sebanyak 416 investor.

Peningkatan nilai investasi di Kota Semarang ini menjadi salah satu bukti adanya percepatan pemulihan ekonomi yang sangat pesat pasca Pandemi Covid-19. Meningkatnya nilai investasi pasca pandemi Covid-19 ini sekaligus dapat membawa multiplier effect yang dapat memperluas peluang usaha, mendorong produksi barang dan jasa Kota Semarang, meningkatkan penyediaan lapangan kerja, menurunkan angka ketimpangan ekonomi, serta semakin meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pasca pandemi Covid-19.

Banyak upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan nilai investasi ini, diantaranya Pengembangan iklim penanaman modal dengan memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal di Kota Semarang, harmonisasi regulasi perizinan berusaha dan non berusaha dengan menyusun Naskah Akademis dan Raperda Perizinan berusaha dan non berusaha Semarang, Naskah Akademis Raperda Penanaman Modal Kota Semarang guna memberikan kepastian hukum dalam Perizinan berusaha dan non berusaha yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

Pada tahun 2022 berhasil mencapai target Rasio Daya Serap Tenaga Kerja dengan persentase capaian 100%. Jumlah total tenaga kerja yang terserap pada Tahun 2022 mengalami peningkatan dari semula 35.388 tenaga kerja (WNI/WNA) untuk tahun 2022 kini tenaga kerja yang terserap mencapai 41.620 tenaga kerja diantaranya 28 WNA dan 41.620 WNI. Daya serap tenaga kerja yang cukup besar ini setidaknya mampu menghentikan pertumbuhan angka pengangguran dan kemiskinan akibat pandemi Covid-19.

Terdapat 9 indikator dalam urusan Penanaman Modal yang menjadi ukuran keberhasilan dalam RPJMD tahun 2021-2026. Dan pelaksanaan RKPD Tahun 2022, dari 9 indikator tersebut menunjukkan kinerja yang sangat baik karena seluruhnya berada pada kategori capaian sangat tinggi. Indikator yang perlu ditingkatkan karena capaiannya dibawah 100% yaitu Jumlah Penanam Modal yang Mendapat Fasilitas Investasi. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sebanyak 2 indikator kategori telah tercapai, dan sebanyak 7 indikator kategori akan tercapai.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2022 pada urusan Penanaman Modal disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.103.
Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2022 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026
Urusan Penanaman Modal

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2022	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2022	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Dinas PM dan PTSP
	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Dinas PM dan PTSP
	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Dinas PM dan PTSP

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPDP Tahun 2022				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPDP Tahun 2022	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPDP 2022	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Dinas PM dan PTSP
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Penanam Modal yang Mendapat Fasilitas Investasi	Penanam Modal	3683,00	3.475,00	94,35%	ST	3744,00	3.475,00	92,82%	ST		Dinas PM dan PTSP
Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Investor	408,00	854,00	209,31%	ST	654,00	854,00	130,58%	ST		Dinas PM dan PTSP
Program Pelayanan Penanaman Modal	Prosentase Ijin Terbit sesuai SP	%	95,00	95,00	100,00%	ST	96,00	95,00	98,96%	ST		Dinas PM dan PTSP
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Nilai	1,00	5,18	518,00%	ST	2,00	5,18	259,00%	ST		Dinas PM dan PTSP
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pengembangan dan inovasi sistem informasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal	%	95,00	95,00	100,00%	ST	100,00	95,00	95,00%	ST		Dinas PM dan PTSP

Sumber: eMonev Perencanaan

*) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR: $X \leq 50\%$

**) ST: $X > 18\%$; T: $18\% \geq X > 15\%$; S: $15\% \geq X > 12\%$; R: $12\% \geq X > 10\%$; dan SR: $X \leq 10\%$

***) : Target Akhir RPJMD : Sudah Tercapai ($X \geq :100\%$) : Akan Tercapai ($100\% > X \geq 20\%$)

: Perlu Upaya Keras ($X < 20\%$)

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Wajib Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

- Belum adanya Peraturan tentang Pemberian Fasilitas dan Insentif Penanaman Modal untuk mendukung peningkatan Investasi.
- Adanya perubahan nomenklatur dimana Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui Sistem SIMBG yang mana sering terjadi kendala seperti kesalahan sistem, dan pemohon kesulitan melengkapi dokumen persyaratan kedalam sistem SIMBG.
- Terkendalanya penerbitan PKKPR Berusaha pada Aplikasi OSS RBA dan PKKPR Non Berusaha pada dan SIIMUT. Dimana sering terjadi pendaftaran PKKPR Non UMK pada dashboard OSS tidak terlacak pada sistem GISTARU/Geo KKP yang sering error.
- Masih banyak masyarakat/pemohon belum memahami terkait penerbitan perizinan melalui Aplikasi OSS RBA, dan masih sering ditemukannya error sistem pada Aplikasi OSS RBA itu sendiri.

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mengakomodir peraturan terkait Pemberian Fasilitas dan Insentif Penanaman Modal untuk di ditambahkan ke dalam Pasal-pasal dalam Raperda Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kota Semarang, guna memberikan kepastian hukum dalam perizinan berusaha dan non berusaha yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.
- b. Pendampingan pembuatan PBG melalui berbagai kegiatan workshop, bintek, sosialisasi, maupun pendampingan pengajuan PBG kepada pemohon secara langsung, pembuatan video tutorial, dan juga melakukan koordinasi intensif dengan OPD-OPD teknis terkait penerbitan PBG melalui sistem SIMBG.
- c. Pendampingan pembuatan PKKPR Berusaha dan Non Berusaha melalui berbagai kegiatan workshop, bintek, sosialisasi, maupun pelayanan secara langsung pendampingan pengajuan PBG kepada pemohon, pembuatan video tutorial, dan selain itu juga melakukan koordinasi intensif dengan OPD-OPD teknis terkait daftar inventarisasi kendala teknis PKKPR dan bersurat kepada Kementerian Investasi dan Kementerian PUPR perihal Permohonan Bimbingan Teknis terkait PKKPR. Selain itu akan dibuat kajian -kajian yang akan mempercepat proses perizinan di Kota Semarang.
- d. Guna membantu masyarakat/pemohon dalam proses pengajuan perizinan berusaha dan non berusaha maka akan dilaksanakan kegiatan workshop, bintek, sosialisasi, maupun pelayanan secara langsung pendampingan OSS RBA kepada masyarakat/pemohon, pembuatan video tutorial, dan selain itu juga melakukan koordinasi intensif dengan OPD-OPD teknis terkait daftar inventarisasi kendala teknis OSS RBA.

19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Kinerja dalam penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga ditandai dengan prestasi pada tahun 2022: Juara I Putra dan Juara II Putri pada Pesta Siaga Binwil Semarang, Juara III Persari Kwarda Jateng, Juara I Penegak dan Juara II Penggalang, pada Lomba Pramuka Garuda Berprestasi Kwarda Jateng, Juara I Putra, Juara V Putri pada Lomba Tingkat IV Regu Penggalang Kwarda Jateng dan Juara 2 Kategori Event “Renovasi Rumah 2022” & Juara 3 di Kategori Pengelolaan Pramuli Cabang Pramuli Award.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk penguatan kapasitas kepemudaan, kapasitas dan daya saing keolahragaan dan kemitraan dunia usaha, diantaranya: Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (*Sport Science*), Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota, dan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan, Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah, Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota, Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha

Pencapaian kinerja RKPD pada urusan pemuda dan olahraga tahun 2022 baik. Kondisi ini terlihat dari 7 indikator yang menjadi ukuran, semua indikator sebanyak 7 indikator termasuk kategori sangat tinggi. Jika disandingkan terhadap target akhir RPJMD, terdapat 1 indikator telah tercapai sesuai target, dan 6 indikator lainnya akan mencapai target.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2022 pada urusan Kepemudaan dan Olahraga disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.104.

Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2022 dan
Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026
Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2022	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2022	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Pemuda dan Olah Raga	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Dinas Pemuda dan Olahraga
	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Pemuda dan Olah Raga	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Dinas Pemuda dan Olahraga
	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pemuda dan Olah Raga	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	Jumlah	30,00	30,00	100,00%	ST	50,00	30,00	60,00%	ST		Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	jumlah Atlet prestasi	Jumlah	1121,00	1.121,00	100,00%	ST	1334,00	1.121,00	84,03%	ST		Dinas Pemuda dan Olahraga
	Jumlah Sarana dan prasarana Olahraga yang dibangun	Lapangan	5,00	20,00	400,00%	ST	5,00	20,00	400,00%	ST		Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Pembinaan Pembentukan karakter bagi anggota Pramuka	Kegiatan	44,00	44,00	100,00%	ST	58,00	44,00	75,86%	ST		Dinas Pemuda dan Olahraga

Sumber: eMonev Perencanaan

*) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR: $X \leq 50\%$

**) ST: $X > 18\%$; T: $18\% \geq X > 15\%$; S: $15\% \geq X > 12\%$; R: $12\% \geq X > 10\%$; dan SR: $X \leq 10\%$

***): Target Akhir RPJMD : Sudah Tercapai ($X \geq :100\%$) : Akan Tercapai ($100\% > X \geq 20\%$)

: Perlu Upaya Keras ($X < 20\%$)

Permasalahan yang ditemui dalam penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga, antara lain:

- a. Pada Program Kelas Khusus Olahraga (KKO) yang ditempatkan di SMP 3 Semarang belum optimal dalam pemenuhan Sarana dan Prasarana Latihan.
- b. Kegiatan kewirausahaan belum berkesinambungan, sehingga belum berhasil memunculkan wirausaha pemuda di Kota Semarang.

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, yaitu:

- a. Pembangunan GOR di Kota Semarang guna melengkapi sarana dan Prasarana Olahraga di Kota Semarang.
- b. Meningkatkan kegiatan kepemudaan dan mencari tempat sebagai pusat kegiatan yang Kepemudaan di Kota Semarang.

20. Statistik

Kinerja dalam penyelenggaraan Urusan Statistik ditandai dengan prestasi pada tahun 2022, diantaranya dengan diraihnya Predikat Optimum dalam Penyelenggaraan Satu Data Tingkat Kota Semarang, Tingkat Provinsi Jawa Tengah. Selain itu juga perolehan Skor Tertinggi dalam Kematangan Penyelenggaraan Satu Data Tingkat Kota Semarang, Tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Dasar pelaksanaan pengembangan Portal Satu Data Tingkat Kota Semarang dan Penyusunan Metadata Statistik Sektoral Kota Semarang adalah Peraturan Walikota No.25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk memberi dukungan terhadap pencapaian sasaran, diantaranya: Koordinasi & Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis & Diseminasi Data Statistik Sektoral, Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi, Membangun Metadata Statistik Sektoral, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral, Pengembangan Infrastruktur, Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah.

Pencapaian kinerja RKPD pada urusan statistik tahun 2022 sangat baik. Kondisi ini terlihat dari 1 indikator kinerja mempunyai kategori capaian sangat tinggi, dan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD dapat mencapai target akhir RPJMD. Dalam penyelenggaraan Urusan Statistik, masih ditemui beberapa permasalahan, diantaranya: Belum terpenuhinya kapastitas SDM dalam menangani pengelolaan data statistik sektoral di tiap perangkat daerah; dan Belum semua perangkat daerah melakukan integrasi data sektoralnya dalam Portal Satu Data.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2022 pada urusan statistik disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.105.



Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2022 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026
Urusan Statistik


Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2022	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2022	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	%	100,00	100,00	ST	Sangat Tinggi	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian

Sumber: eMonev Perencanaan

*) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR: $X \leq 50\%$

***) ST: $X > 18\%$; T: $18\% \geq X > 15\%$; S: $15\% \geq X > 12\%$; R: $12\% \geq X > 10\%$; dan SR: $X \leq 10\%$

***): Target Akhir RPJMD : Sudah Tercapai ($X \geq 100\%$) : Akan Tercapai ($100\% > X \geq 20\%$)

: Perlu Upaya Keras ($X < 20\%$)

Permasalahan yang ditemui dalam penyelenggaraan urusan statistik, diantaranya:

- a. Belum maksimalnya Penyelenggaraan Statistik Sektorale sesuai dengan kaidah statistik oleh perangkat daerah Kota Semarang.
- b. Belum semua perangkat daerah melakukan integrasi data sektoralnya ke Portal Satu Data Tingkat Kota Semarang;
- c. Belum adanya personil tetap dalam pengelolaan data di setiap OPD;
- d. Belum tersedianya metadata elemen data statistik sektoral secara keseluruhan.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan:

- a. Melaksanakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Data Statistik Sektorale;
- b. Melakukan koordinasi integrasi data untuk aplikasi terkait dengan pengelolaan data yang dimiliki oleh produsen data/OPD;
- c. Menetapkan Tim Personil Pengisian Portal Semarang Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang;
- d. Menyusun metadata elemen data statistik sektoral untuk produsen data/OPD.

21. Urusan Persandian


Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam Urusan Persandian, khususnya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik, dengan: Kegiatan Launching Semarangkota CSIRT dan Terbentuknya Tim CISRT Tingkat Kota Semarang, Kegiatan Sosialisasi Keamanan Informasi, dan Sertifikasi ISO 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) Data Center Kota Semarang.

Pencapaian kinerja RKPD pada urusan persandian tahun 2021 sangat baik. Kondisi ini terlihat dari 1 indikator yang menjadi ukuran, semuanya termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sebanyak 1 indikator telah mencapai target akhir RPJMD.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2022 pada urusan persandian disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.106.



Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2022 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026
Urusan Persandian


Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2022	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2022	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Terselenggaranya keamanan informasi pemerintahan daerah	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian

Sumber: eMonev Perencanaan

*) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR: $X \leq 50\%$

***) ST: $X > 18\%$; T: $18\% \geq X > 15\%$; S: $15\% \geq X > 12\%$; R: $12\% \geq X > 10\%$; dan SR: $X \leq 10\%$

***): Target Akhir RPJMD : Sudah Tercapai ($X \geq :100\%$) : Akan Tercapai ($100\% > X \geq 20\%$)

: Perlu Upaya Keras ($X < 20\%$)

Permasalahan yang ditemui dalam penyelenggaraan Urusan Persandian, diantaranya adalah belum adanya lisensi keamanan informasi yang handal dan masih diperlukannya peningkatan kapasitas SDM bidang persandian.

Dan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, tindak lanjut yang diperlukan adalah pengadaan lisensi keamanan informasi yang handal dan pengiriman pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM bidang persandian.

22. Urusan Kebudayaan

Prestasi dalam Urusan Kebudayaan pada tahun 2022, diantaranya Kota Semarang mendapat apresiasi sebagai Lima Penyaji Terbaik Duta Seni Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah yang diselenggarakan Badan Penghubung Jawa Tengah TMII Jakarta. Selain itu juga berhasil diselenggarakannya Semarang Flowers Festival, Semarang Heritage Family Run, Semarang Jelajah Musik, dan Semarang Night Carnival.

Sebagai indikator tujuan pada urusan kebudayaan adalah meningkatnya Kearifan Budaya Lokal, dimana pada tahun 2022 mempunyai capaian kinerja sebesar 62,41 % , meningkat dari tahun 2021 yang sebesar 50,47%. Komposit dari indikator ini adalah tingkat Pelestarian warisan budaya dengan kinerja sebesar 77,78% dan Tingkat Apresiasi terhadap kesenian budaya lokal sebesar 47,04%.

Dari aspek pelestarian warisan budaya, merupakan rata-rata capaian situs cagar budaya, kawasan cagar budaya dan bangunan cagar budaya yang dilestarikan terhadap jumlah situs cagar budaya, kawasan cagar budaya dan bangunan cagar budaya yang dilindungi.

Sedangkan dari aspek tingkat apresiasi terhadap kesenian budaya lokal, merupakan rata-rata capaian Apresiasi Pelaku Seni Budaya, Apresiasi Kegiatan Sanggar Seni Budaya dan Event Yang Mengapresiasi Budaya Lokal terhadap keseluruhan event yang diselenggarakan selama tahun 2022

Beberapa kegiatan Pengembangan Kebudayaan yang dilakukan diantaranya: atraksi budaya, drama tari tradisional , drama tradisional , festival dalang, pagelaran wayang kuli, wayang orang dan ketoprak. Selain itu juga diselenggarakan event diantaranya: pagelaran seni, festival film, festival goa kreo, festival keroncong, festival semarang, dan Sesaji Rewanda.

Apresiasi kelompok/sanggar dan komunitas seni budaya terhadap pengembangan seni budaya tradisional merupakan kegiatan untuk meningkatkan hasil karya dari pelaku seni budaya yang bergabung dalam kelompok/sanggar dan komunitas seni budaya dengan menampilkan seni budaya tradisi dan ekonomi kreatif. Kelompok/sanggar dan komunitas seni budaya ini mengapresiasi karyanya dengan dilakukan pendampingan pembinaan dan workshop serta pelatihan lalu diadakan perlombaan untuk meningkatkan semangat berkreatifitas dari kelompok/sanggar dan komunitas seni budaya dan tampil pada penyambutan tamu acara seremoni Pemerintah Kota Semarang.

Adapun dalam rangka Pengembangan Kesenian Tradisional dilaksanakan kegiatan sebagai berikut: fasilitasi HAKI, fasilitasi kreativitas seni, budaya dan ekraf, kreativitas seni film, lomba, pelatihan, dan workshop seni.

Pencapaian kinerja RKPD pada urusan kebudayaan tahun kategori baik. Kondisi ini terlihat dari 7 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, semua indikator dalam kategori sangat tinggi.

Namun jika disandingkan dengan target akhir RPJMD dari 7 indikator sebagai alat ukur kinerja, terdapat 1 indikator yang sudah mencapai target akhir, sedangkan 6 indikator dalam kategori akan tercapai sesuai dengan tahapan progresnya.

Permasalahan yang dihadapi pada penyelenggaraan urusan kebudayaan diantaranya: kurangnya apresiasi masyarakat terhadap atraksi seni budaya; belum optimalnya pemeliharaan artefak dan cagar budaya; dan belum optimalnya partisipasi kelompok/sanggar/komunitas seni budaya dalam pembangunan kebudayaan.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2022 pada urusan kebudayaan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.107.

Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2022 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026
Urusan Kebudayaan

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2022	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2022	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengembangan Kebudayaan	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Kegiatan Seni Budaya	%	15,00	14,07	93,80%	ST	35,00	14,07	40,20%	ST		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional	%	15,00	19,26	128,40%	ST	35,00	19,26	55,03%	ST		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Pelestarian dan Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya	%	71,57	127,56	178,23%	ST	100,00	127,56	127,56%	ST		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sumber: eMonev Perencanaan

*) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR: $X \leq 50\%$

**) ST: $X > 18\%$; T: $18\% \geq X > 15\%$; S: $15\% \geq X > 12\%$; R: $12\% \geq X > 10\%$; dan SR: $X \leq 10\%$

***): Target Akhir RPJMD : Sudah Tercapai ($X \geq :100\%$) : Akan Tercapai ($100\% > X \geq 20\%$)

: Perlu Upaya Keras ($X < 20\%$)

Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Wajib Kebudayaan antara lain sebagai berikut:

- a. Masih kurangnya apresiasi masyarakat pada atraksi seni budaya lokal;

- b. Masih kurangnya apresiasi penggiat seni budaya terhadap pembangunan kebudayaan.

Dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi terdapat solusi sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi dan menyeleksi seni budaya lokal untuk dimasukkan di *calendar of event*, misalnya nyadran kali dan memetri kampung jawa dinaikkan ke *event* tingkat kota;
- b. Membuat kegiatan untuk mengapresiasi tokoh/pelaku seni budaya agar lebih masif lagi.

23. Urusan Perpustakaan

Kinerja pada urusan perpustakaan dapat ditunjukkan oleh Nilai Tingkat Gemar Membaca Kota Semarang yakni di angka 67%. Adapun angka tersebut masuk dalam kategori Tinggi dengan interval sebagai berikut: 0-20 (Sangat rendah); 20,01-40 (Rendah); 40,01-60 (Sedang); 60,01-80 (Tinggi); 80,01-100 (Sangat Tinggi). Adapun survey dilakukan dengan mengambil sampel masyarakat kota Semarang dengan rentang usia 15-68 tahun. Adapun variable tingkat Gemar Membaca terdiri dari Frekuensi Membaca, Durasi Membaca, Jumlah Bahan Bacaan, Frekuensi Akses Internet, dan Durasi Akses Internet. Indikator selanjutnya adalah Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Semarang tahun 2022 sebesar 59,8. Terdapat tujuh unsur pembangunan Literasi Masyarakat yakni Pemerataan Layanan Perpustakaan, Ketercukupan Koleksi, Ketercukupan Tenaga Perpustakaan, Tingkat Kunjungan Masyarakat, Jumlah Perpustakaan Sesuai Standar, Keterlibatan Masyarakat, dan Anggota Perpustakaan. Dan indikator lainnya rasio Ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk berdasarkan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI No. 8 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/ Kota di mana jumlah minimal Pustakawan adalah 1 dibanding 75.000 penduduk. Angka tersebut pada tahun 2022 tercapai karena pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Dinas Arsip dan Perpustakaan tahun 2022 sebanyak 47 orang yang terdiri dari pustakawan, arsiparis dan penata laporan keuangan.

Keberhasilan kinerja tersebut di atas didukung oleh kegiatan diantaranya: pembinaan Perpustakaan Sekolah sebanyak 90 lokasi perpustakaan sekolah baik negeri maupun swasta yang diharapkan bersama-sama dalam hal peningkatan literasi. Dari aspek peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan diselenggarakan Bimtek pustakawan, pengembangan Bahan Pustaka dengan penambahan bahan pustaka/ karya ilmiah dan koleksi perpustakaan sebanyak 200 eksemplar melalui hibah, kerjasama, CSR, hingga pengadaan. Kegiatan lainnya berupa Nonton Bareng Komunitas Sahabat Mata, Inovasi SiBuca (Sistem Informasi Buku Bercerita), Sosialisasi/Bimtek tentang naskah kuno dan lainnya.

Pencapaian kinerja RKPD urusan perpustakaan pada tahun 2022 tergolong baik. Kondisi ini terlihat dari 5 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, semuanya dalam capaian sangat tinggi. Jika disandingkan dengan target akhir RPJMD, sebanyak 2 indikator telah mencapai target, dan 3 indikator akan mencapai target akhir RPJMD.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2022 pada urusan Perpustakaan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.108.

**Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2022
dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026
Urusan Perpustakaan**

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2022	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2022	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Dinas Arsip dan Perpustakaan
	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Dinas Arsip dan Perpustakaan
	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Dinas Arsip dan Perpustakaan
Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Rasio	1,00	1,00	100,00%	ST	1,00	1,00	100,00%	ST		Dinas Arsip dan Perpustakaan
Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Terlindungnya koleksi dan naskah kuno dari kerusakan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Arsip dan Perpustakaan

Sumber: eMonev Perencanaan

*) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR: $X \leq 50\%$

**) ST: $X > 18\%$; T: $18\% \geq X > 15\%$; S: $15\% \geq X > 12\%$; R: $12\% \geq X > 10\%$; dan SR: $X \leq 10\%$

***): Target Akhir RPJMD : Sudah Tercapai ($X \geq 100\%$) : Akan Tercapai ($100\% > X \geq 20\%$)

: Perlu Upaya Keras ($X < 20\%$)

Permasalahan yang dihadapi oleh urusan perpustakaan kota Semarang adalah terkait dukungan komunikasi dan kerjasama yang baik antar instansi. Hal ini dikarenakan dalam pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat kota Semarang tidak terlepas dari peran berbagai institusi di kota Semarang termasuk misalnya: Perpustakaan Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta, Perpustakaan Sekolah Menengah Atas yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar yang diampu oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang, Perpustakaan Khusus se-Kota Semarang yang diampu oleh berbagai lembaga induk masing-masing, Perpustakaan Kecamatan dan Kelurahan yang tidak terlepas dari dukungan peran serta pihak kecamatan dan kelurahan dalam partisipasinya untuk peningkatan indeks pembangunan literasi masyarakat kota Semarang.

Sudah, sedang dan akan tetap dilaksanakan komunikasi dan koordinasi antar pihak dalam rangka peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat termasuk tapi tidak terbatas pada komunikasi kepada Organisasi Perangkat Daerah Kota Semarang terkait Perpustakaan Khusus/Pojok Baca OPD, komunikasi pada pengelola Rumah Pintar/Taman Baca Masyarakat di Kota Semarang, komunikasi kepada Pustakawan se Kota Semarang melalui Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Cabang Kota Semarang, Komunikasi dengan pakar/dosen/pegiat literasi di Kota

Semarang, serta bantuan dukungan Sekretaris Daerah untuk langkah-langkah yang kiranya perlu diambil dan dilaksanakan.

24. Urusan Kearsipan

Prestasi yang diperoleh pada penyelenggaraan urusan kearsipan pada tahun 2022 diantaranya : Peringkat 1 Pameran Arsip Virtual sekaligus sebagai Stand Arsip Virtual Terbaik pada Pameran Arsip Virtual yang diadakan Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

Kinerja pada urusan Kearsipan dapat ditunjukkan capaian Tingkat Keberadaan dan Keutuhan arsip sebagai bentuk pertanggungjawaban adalah di angka 57,05. Selain itu adalah tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan adalah di angka 79,02. Dukungan yang dilakukan dalam mencapai kinerja tersebut diantaranya:

Peningkatan sistem dan jaringan informasi kearsipan akan terintegrasi ke dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik, dengan manfaat memudahkan untuk masyarakat ataupun pemerintah itu dalam hal penggunaan manfaat arsip.

Selain itu meningkatkan persentase jumlah arsip musnah sebesar 100%, dimana sebelumnya dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun. Selain itu juga dilaksanakan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis dengan indikator terawatnya dan terjaganya arsip yang bernilai guna sekunder. Arsip yang bernilai guna sekunder memiliki peran dalam memberikan edukasi pendidikan, bahan untuk penelitian serta pengambilan keputusan. Berkaitan dengan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota, kegiatan yang dilakukan melalui sosialisasi kepada organisasi perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Semarang tentang standar operasional prosedur penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup. Hal ini penting dilakukan karena arsip yang bersifat tertutup merupakan arsip yang hanya dapat diakses oleh pengguna sesuai dengan sistem klasifikasi dan keamanan akses arsip, serta menjadi pedoman pengelola arsip dalam penerbitan izin terhadap akses arsip yang bersifat tertutup. Sehingga terdapat batasan-batasan terhadap akses arsip yang dinilai dapat membahayakan kestabilan negara serta meminimalisir penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab terhadap penggunaan arsip.

Pencapaian kinerja RKPD pada Urusan Kearsipan pada tahun 2022 dalam kategori baik. Kondisi ini terlihat dari 3 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan semuanya termasuk dalam kategori sangat tinggi. Demikian pula jika dibandingkan terhadap target akhir RPJMD, semuanya telah mencapai target akhir RPJMD. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah pada tahun 2022 urusan Kearsipan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.109.

Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2022 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026
Urusan Kearsipan

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2022	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2022	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Pengelolaan Arsip	Peningkatan sistem dan jaringan informasi kearsipan akan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Arsip dan Perpustakaan

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2022	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2022	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
	terintegrasi ke dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik											
Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	persentase jumlah arsip musnah	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Dinas Arsip dan Perpustakaan
Program Perizinan Penggunaan Arsip	Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	%	50,00	100,00	200,00%	ST	90,00	100,00	111,11%	ST	●	Dinas Arsip dan Perpustakaan

Sumber: eMonev Perencanaan

*) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR: $X \leq 50\%$

**) ST: $X > 18\%$; T: $18\% \geq X > 15\%$; S: $15\% \geq X > 12\%$; R: $12\% \geq X > 10\%$; dan SR: $X \leq 10\%$

***): Target Akhir RPJMD ●: Sudah Tercapai ($X \geq 100\%$) ▲: Akan Tercapai ($100\% > X \geq 20\%$)

▼: Perlu Upaya Keras ($X < 20\%$)

Permasalahan yang dihadapi pada urusan bidang kearsipan adalah sebagai berikut:

- Belum adanya dasar hukum yang mewadahi urusan Kearsipan yang dimiliki Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang sehingga Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang sebagai Lembaga Kearsipan Daerah belum dapat melakukan Standarisasi Teknis, Sarana dan Prasarana serta Kompetensi pada Pengelolaan Kearsipan secara umum, yang pada akhirnya terdapat beragam persepsi terhadap pengelolaan Arsip yang ada pada Organisasi Perangkat Daerah.

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, akan dilakukan tindak lanjut:

- Lebih intensif dalam melakukan pendampingan dan pengawasan terkait pemahaman tentang pengelolaan kearsipan secara benar dan tepat;
- Mengusahakan terbitnya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kearsipan, guna memberikan dasar wajib dilaksanakannya pengelolaan kearsipan dilingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- Memberikan sosialisasi kearsipan yang lebih luas dengan ruanglingkup pembahasan yang lebih mendetail sehingga pemanfaatan ilmu tentang kearsipan dapat lebih dimengerti dan dikuasai oleh peserta sosialisasi.

25. Urusan Kelautan dan Perikanan

Kinerja pada urusan perikanan ditunjukkan Jumlah total produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya), Konsumsi ikan dan penurunan kasus pelanggaran peraturan di bidang perikanan. Pada tahun 2022 semua kinerjanya telah mencapai target, dengan Capaian kinerja tertinggi dicapai oleh indikator kinerja penurunan jumlah kasus pelanggaran peraturan perikanan. Keberhasilan ini ditunjang oleh beberapa faktor, salah satunya terselesaikannya kasus pelanggaran peraturan perikanan. Yaitu dengan terbinyanya pelaku usaha perikanan untuk mentaati aturan perikanan yang berlaku dan terbaru. Dampak dari hal tersebut, maka masyarakat lebih tertib dalam menjalankan usaha perikanan sesuai aturan yang berlaku.

Pada tahun 2022 kinerja peningkatan produksi perikanan tangkap mencapai 3.008,92 Ton, meningkat dibandingkan tahun 2021, sehingga diasumsikan Kesejahteraan Nelayan meningkat dengan bertambahnya hasil tangkapan sehingga pendapatan nelayan meningkat. Kinerja lainnya adalah meningkatkan produksi perikanan budidaya mencapai 3.887,87 Ton, selain itu juga penurunan jumlah kasus pelanggaran peraturan perikanan dari yang ditargetkan 5 kasus dengan realisasi 1 kasus, hal ini mengindikasikan bahwa pelaku usaha perikanan memiliki tingkat kesadaran yang baik dari sebelumnya untuk mentaati peraturan perikanan yang berlaku. Indikator lainnya pada urusan perikanan adalah Angka konsumsi ikan masyarakat Kota Semarang mencapai 40,25 Kg/Kapita/Tahun dan juga produksi ikan olahan mencapai 17.604,14 Ton/Thn, hal ini mengindikasikan dengan meningkatnya produksi perikanan dimungkinkan bertambah pula jumlah pelaku usaha pengolah perikanan dan hasil olahan ikan dan juga dengan meningkatnya konsumsi ikan berarti kesadaran masyarakat semakin lebih baik untuk mengkonsumsi ikan sebagai kebutuhan untuk mencegah stunting dan gizi buruk.

Pencapaian kinerja RKPD urusan pilihan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2022 sangat baik, kondisi ini terlihat dari 8 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, seluruhnya termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi. Sementara itu jika disandingkan dengan target akhir RPJMD, sebanyak 1 indikator telah mencapai target akhir RPJMD, sebanyak 4 indikator akan mencapai target akhir RPJMD, dan 3 indikator perlu upaya keras untuk mencapai target akhir RPJMD. Yaitu Produksi perikanan tangkap, Produksi perikanan budidaya dan Produksi ikan olahan dimana capaiannya terhadap target RPJMD hampir 20 %. Kondisi kinerja ini dimungkinkan karena tahun 2022 merupakan tahun pertama untuk mencapai target akumulasi selama 5 tahun periode RPJMD.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2022 pada urusan kelautan dan perikanan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.110.

Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2022 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026
Urusan Kelautan dan Perikanan

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2022	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2022	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Perikanan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	Sangat Tinggi		Dinas Perikanan
	Peningkatan Kapasitas SDM	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Dinas Perikanan
	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Dinas Perikanan
	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Dinas Perikanan

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2022	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2022	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	ton	3005,61	3.008,92	100,11%	ST	15557,91	3.008,92	19,34%	ST	▼	Dinas Perikanan
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya	ton	3775,93	3.887,87	102,96%	ST	19865,96	3.887,87	19,57%	ST	▼	Dinas Perikanan
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Penurunan jumlah kasus pelanggaran peraturan perikanan	kasus	5,00	1,00	580,00%	ST	1,00	1,00	100,00%	ST	●	Dinas Perikanan
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi ikan olahan	ton	17495,45	17.604,14	100,62%	ST	88477,00	17.604,14	19,90%	ST	▼	Dinas Perikanan

Sumber: eMonev Perencanaan

*) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR: $X \leq 50\%$

**) ST: $X > 18\%$; T: $18\% \geq X > 15\%$; S: $15\% \geq X > 12\%$; R: $12\% \geq X > 10\%$; dan SR: $X \leq 10\%$

***): Target Akhir RPJMD ●: Sudah Tercapai ($X \geq 100\%$) ▲: Akan Tercapai ($100\% > X \geq 20\%$)

▼: Perlu Upaya Keras ($X < 20\%$)

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

- Masih kurangnya sosialisasi dan optimalisasi pemanfaatan Teknologi Perikanan untuk meningkatkan produksi hasil – hasil perikanan
- Kurangnya Kerjasama dengan pihak – pihak terkait untuk meningkatkan produksi hasil – hasil perikanan.

Tindakan lanjut yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, diantaranya:

- Intensifikasi lahan produksi budidaya yang tersedia dan peningkatan ketrampilan pembudidaya;
- Fasilitasi bantuan alat tangkap ikan dan perbaikan sarana TPI;
- Peningkatan kualitas SDM pengolah dan pemasar.

26. Urusan Pariwisata

Prestasi dalam penyelenggaraan pada Urusan Pariwisata ditandai dengan diraihnya Juara Kategori Paket Wisata Gelar Desa Wisata Jawa Tengah Tahun 2022 Kepada Desa Wisata Kandri, tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Lima Penyaji Terbaik Duta Seni Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah secara virtual, yang diselenggarakan Badan Penghubung Jawa Tengah TMII Jakarta.

Hasil kinerja Urusan Pilihan Pariwisata dapat ditunjukkan diantaranya dengan jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara (5.338.233 orang), Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (4.918 orang), Tingkat Hunian Akomodasi (54,01%), Lama Tinggal Wisatawan (1,43 hari). Semua itu tidak terlepas dari pengelolaan daya tarik 373 destinasi pariwisata yang dikelola oleh swasta atau milik pemerintah, yaitu:

- Wisata alam sebanyak 43 lokasi.
- Wisata budaya sebanyak 59 lokasi.
- Wisata buatan sebanyak 76 lokasi.
- Wisata pendidikan sebanyak 3 lokasi.

5. Wisata kuliner sebanyak 151 lokasi.
6. Wisata religi sebanyak 41 lokasi.

Hal ini didukung dengan adanya promosi pariwisata Kota Semarang, juga peningkatan SDM pariwisata memiliki sertifikasi sebanyak 4.309 orang dari seluruhnya yang berjumlah 4.824 orang. Hal ini didukung dengan adanya kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat pariwisata dan pelaku usaha pariwisata melalui pelayanan prima untuk pelaku wisata dan penatausahaan kelembagaan serta pengelolaan desa wisata.

Pada Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif didukung oleh Sub Kegiatan yaitu sebagai berikut:

1. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.

Aktivitas yang dilakukan yaitu bintek *citytour guide* untuk pemandu wisata, bintek pelayanan prima untuk pelaku wisata dan bintek penatausahaan kelembagaan untuk pokdarwis.

2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata.




Aktivitas yang dilakukan yaitu apresiasi pokdarwis Jawa Tengah, gelar desa wisata Jawa Tengah, lomba pokdarwis, pelatihan digitalisasi: branding, pemasaran dan penjualan pada desa wisata, *homestay*, kuliner, souvenir dan fotografi, pelatihan pemandu geowisata, pelatihan pemandu wisata budaya, pelatihan pengelolaan desa wisata, pelatihan peningkatan inovasi dan higienitas sajian kuliner di destinasi wisata, pembinaan pokdarwis, pembuatan aplikasi SIEMPOK dan sosialisasi *branding* kepariwisataan.

Pencapaian kinerja RKPD urusan pilihan pariwisata pada tahun 2022 tergolong baik. Kondisi ini terlihat dari 3 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan pembangunan bidang pariwisata, semuanya sebanyak 3 indikator termasuk kategori sangat tinggi. Demikian pula jika disandingkan dengan capaian terhadap target akhir RPJMD, semuanya sebanyak 3 indikator program telah mencapai target akhir RPJMD.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2022 pada urusan pariwisata disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.111.



**Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2022 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026
Urusan Pariwisata**


Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2022	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2022	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Daya Tarik Destinasi Pariwisata	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pemasaran Pariwisata	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	SDM Pariwisata	%	60,00	143,82	239,70%	ST	100,00	143,82	143,82%	ST		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sumber: eMonev Perencanaan

*) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR: $X \leq 50\%$

***) ST: $X > 18\%$; T: $18\% \geq X > 15\%$; S: $15\% \geq X > 12\%$; R: $12\% \geq X > 10\%$; dan SR: $X \leq 10\%$

***): Target Akhir RPJMD : Sudah Tercapai ($X \geq 100\%$) : Akan Tercapai ($100\% > X \geq 20\%$)

: Perlu Upaya Keras ($X < 20\%$)

Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Pilihan Pariwisata antara lain sebagai berikut:

- a. Belum fokus pada target pasar tertentu pada kunjungan wisatawan mancanegara Kota Semarang;
- b. Belum optimalnya kolaborasi seni budaya untuk atraksi wisata sebagai salah satu daya tarik wisatawan;
- c. Belum optimalnya lama tinggal wisatawan;
- d. Belum optimalnya masyarakat dalam perintisan tempat wisata;
- e. Belum optimalnya penjualan paket wisata pada desa wisata.

Dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi terdapat solusi sebagai berikut:

- a. Mengadakan jasa konsultasi dengan menyusun kajian target pasar wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kota Semarang;
- b. Mendorong kelompok/sanggar dan komunitas seni budaya untuk berkarya atau tampil pada penyelenggaraan atraksi wisata di desa wisata dan di daya tarik wisata;
- c. Memfasilitasi menciptakan paket wisata dan berkolaborasi antar daya tarik wisata untuk mendorong kunjungan wisatawan;
- d. Lebih banyak melibatkan masyarakat dalam menawarkan produk paket wisata kepada Biro Perjalanan Wisata supaya masyarakat lebih berkolaborasi dalam kepariwisataan;
- e. Menambah rintisan obyek wisata dan pemaketan wisata.

27. Urusan Pertanian

Mendasarkan pada Perwal No. 24 tahun 2021 tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan, Program Urban Farming telah menunjukkan perkembangan yang luar biasa, baik pada skala gedung pemerintahan, industri, sampai dengan pemanfaatan pekarangan & lahan kosong yang bersifat privat. Dan dampak yang dirasakan telah memberikan pengaruh positif terhadap berbagai isu ketahanan pangan, inflasi, penanganan stunting, bahkan pada pengurangan kemiskinan ekstrem di kewilayahan.

Kinerja terkait Produktivitas pertanian per ha per tahun (6,96 ton/ha); jumlah kawasan pertanian perkotaan (124 kelurahan); presentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT (93,33%); dan jumlah sentra produk unggulan pertanian (4 kawasan) pada tahun 2022 menunjukkan kinerja positif.

Pada tahun 2022 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan produksi hasil peternakan mencapai 39.690,27 ton, mengindikasikan membaiknya kondisi perekonomian pasca pandemi covid-19 dimana permintaan daging meningkat sehingga mendorong peningkatan pemotongan sapi, ayam, maupun babi.

Sedangkan indikator produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan pada tahun 2022 berhasil meningkat mencapai 58.065,88 ton, sedangkan produktivitas pertanian per ha mencapai 6,96 ton/ha.

Pada tahun 2022 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan jumlah kelompok tani yang berada pada kelas madya dan utama dari yang ditargetkan 26 kelompok mencapai 27 kelompok, dibandingkan relisasi tahun 2021 sebesar 24 kelompok.





Pencapaian kinerja RKPD urusan pertanian pada tahun 2022 termasuk pada kondisi yang baik. Hal tersebut terlihat dari capaian kinerja dari 9 indikator yang

menjadi ukuran keberhasilan, sebanyak 8 indikator dalam kategori capaiannya sangat tinggi, dan 1 indikator dalam kategori sangat rendah, yaitu Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sebanyak 4 indikator program telah mencapai target akhir RPJMD, sebanyak 4 indikator belum mencapai target akhir RPJMD, dan 1 indikator perlu upaya keras untuk mencapai target akhir RPJMD. Indikator dengan predikat sangat rendah, adalah Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular. Bahkan dibandingkan tahun 2021 maka terjadi lonjakan kasus penyakit hewan menular secara ekstrim yaitu sebesar 7.108,33% dimana pada tahun 2021 hanya terdapat 24 kasus sedangkan pada tahun 2022 kasus penyakit hewan menular yang terjadi mencapai 1.730 kasus. Hal ini disebabkan oleh wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang masuk Kota Semarang sejak bulan April dimana terdapat 9 kecamatan yang ditemukan kasus PMK, serta munculnya penyakit hewan menular yang sebelumnya belum pernah ada di Indonesia yaitu penyakit Lumpy Skin Diseases (LSD) yang ditemukan di 5 kecamatan (Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Ngaliyan, dan Tugu). Wabah PMK dan LSD ini telah menjadi isu nasional dimana untuk wabah PMK sendiri telah ditetapkan sebagai status keadaan tertentu darurat PMK dengan SK Kepala BNPB No. 47 Tahun 2022 tanggal 29 Juni 2022.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2022 pada urusan pertanian disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.112.
Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2022 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026
Urusan Pertanian



Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2022	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2022	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Dinas Pertanian
	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Dinas Pertanian
	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan OPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Dinas Pertanian
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	produksi hasil peternakan	Ton	35627,50	39.690,27	111,40%	ST	36822,00	39.690,27	107,79%	ST		Dinas Pertanian
	Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura	Ton	50439,36	58.065,88	115,12%	ST	51284,00	58.065,88	113,22%	ST		Dinas Pertanian


Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2022	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2022	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
	dan perkebunan											
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Produktivitas pertanian per ha per tahun	Ton	6,38	6,96	109,09%	ST	6,38	6,96	109,09%	ST		Dinas Pertanian
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	5,00	(7.108,33)	0,00%	SR	5,00	(7.108,33)	0,00%	SR		Dinas Pertanian
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan	%	75,00	93,33	124,44%	ST	85,00	93,33	109,80%	ST		Dinas Pertanian
Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani yang berada pada kelas madya dan utama	Kelompok	26,00	27,00	103,85%	ST	36,00	27,00	75,00%	ST		Dinas Pertanian

Sumber: eMonev Perencanaan

*) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR: $X \leq 50\%$

***) ST: $X > 18\%$; T: $18\% \geq X > 15\%$; S: $15\% \geq X > 12\%$; R: $12\% \geq X > 10\%$; dan SR: $X \leq 10\%$

***): Target Akhir RPJMD : Sudah Tercapai ($X \geq 100\%$) : Akan Tercapai ($100\% > X \geq 20\%$)

: Perlu Upaya Keras ($X < 20\%$)

Permasalahan yang ditemui dalam penyelenggaraan Urusan Pertanian diantaranya :

- Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan *Lumpy Skin Diseases* (LSD) yang masih menjadi ancaman di tahun 2023;
- Alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian, serta menurunnya kualitas tanah sebagai akibat penggunaan bahan kimia;
- Kualitas kelembagaan petani yang masih rendah dimana dari 420 kelompok tani yang ada hanya 27 kelompok (6%) yang kualitasnya tinggi. Selain itu tingkat partisipasi anggota kelompok tani juga relatif sangat rendah;
- Dampak perubahan iklim yaitu curah hujan tinggi menyebabkan banjir di area persawahan, serta resiko terjadinya ledakan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) pasca banjir.

Adapun rencana tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dimaksud, adalah:

- a. Meningkatkan upaya penanggulangan dan pengendalian penyebaran wabah PMK dan LSD melalui upaya-upaya preventif maupun kuratif antara lain vaksinasi, *biosecurity* kandang ternak, pengawasan lalu lintas ternak, dan pengobatan ternak;
- b. Optimalisasi lahan pekarangan, lahan kosong atau maupun lahan yang belum dimanfaatkan, serta mengembangkan budidaya pertanian di lahan sempit. Meningkatkan kesehatan dan mengembalikan kesuburan tanah melalui pertanian organik, pertanian regeneratif, pertanian terintegrasi sehingga produksi, produktivitas, dan mutu hasil pertanian dapat meningkat;
- c. Meningkatkan kapasitas petani maupun kelembagaan petani dengan mengintensifkan pembinaan dan pendampingan kelompok tani;
- d. Antisipasi dampak perubahan iklim melalui: (a) strategi mitigasi berupa penerapan teknologi budidaya rendah karbon (tingkat emisi gas rumah kaca rendah); dan (b) strategi adaptasi antara lain melalui penyesuaian irigasi sesuai dengan perubahan sistem hidrologi dan potensi sumberdaya air, pola tanam, jenis tanaman dan varietas, dan sistem pengolahan tanah.

28. Urusan Perdagangan

Kinerja pada tahun 2022 dilakukan penyusunan Draft Revisi Peraturan Daerah Kota Semarang, yang mengatur tentang Toko Modern di Wilayah Kota Semarang. Saat ini terdapat 620 toko modern dan diharapkan terdapat hubungan yang harmonis antara keberadaan toko modern, pasar tradisional serta UMKM sehingga dapat mewujudkan ekonomi masyarakat Kota Semarang yang berbasis kerakyatan. Melalui penyusunan regulasi yang tepat dan berkesinambungan, serta bersinergi dengan peraturan/dasar hukum lainnya, nantinya akan digunakan sebagai dasar penindakan jika terdapat pelanggaran dalam pelaksanaannya.

Indikator kinerja dalam penyelenggaraan urusan perdagangan yang belum mencapai target adalah nilai ekspor dan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif. Pada tahun 2022 karena masih terdapat pandemi yang kemudian disusul perang Rusia dengan Ukraina tentunya berdampak terhadap permintaan ekspor ke negara tujuan. Sedangkan belum terealisasinya target 20 pembangunan pasar secara utuh karena pada tahun ini baru menyelesaikan pematangan lahan Pasar Barito Karya Mandiri, disamping tetap dilakukan perbaikan ringan/rehab bangunan di beberapa pasar di Kota Semarang yang sebagian besar memerlukan penanganan karena kondisi bangunan yang membahayakan pedagang dan pengunjung pasar. Ke delapan belas pasar tersebut adalah Pasar Sampangan, RPU Penggaron, Bulu, Rasamala, Surtikanti, Jrasah, Genuk, Klithikan Penggaron, Rejomulyo, Pedurungan, Peterongan Konservasi, Waru Indah, Sronдол, Wonodri, Banyumanik, Banjardowo, Satriowibowo, dan Jangli.

Kinerja lainnya dilakukan kegiatan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat dengan melaksanakan monitoring harga kebutuhan pokok masyarakat yang dilaporkan pada sistem yang terintegrasi secara elektronik serta memenuhi target prosentase alat UTTP berterater ulang.

Pencapaian kinerja RKPD pada urusan perdagangan pada tahun 2022 tergolong baik. Kondisi ini terlihat dari capaian kinerja 9 indikator keberhasilan pembangunan bidang perdagangan, sebanyak 7 indikator termasuk kategori sangat tinggi, sedangkan 1 indikator masing-masing mempunyai predikat Tinggi dan Sangat Rendah. Jika disandingkan terhadap pencapaian terhadap target akhir RPJMD, terdapat 2 indikator program yang telah memenuhi target akhir RPJMD dan 7 indikator akan mencapai target akhir RPJMD. Indikator dengan capaian Sangat Rendah yaitu Nilai ekspor non migas yang capaian terhadap target hanya sebesar


37,97%. Hal ini salah satunya dikarenakan pada tahun 2022 perekonomian belum pulih sepenuhnya, pandemi covid baru berakhir, dan disusul perang Ukarina dengan Rusia sehingga berdampak terhadap permintaan ekspor negara Eropa, meski demikian realisasi ekspor tahun ini meningkat bila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2022 pada urusan perdagangan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.113.

Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPd Tahun 2022 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026
Urusan Perdagangan



Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPd Tahun 2022				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPd Tahun 2022	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPd 2022	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	80,00	80,00%	ST		Dinas Perdagangan
	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	80,00	80,00%	ST		Dinas Perdagangan
	Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	80,00	80,00%	ST		Dinas Perdagangan
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelayanan pengurusan perizinan tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Dinas Perdagangan
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	pasar	20,00	18,00	90,00%	T	28,00	18,00	64,28%	ST		Dinas Perdagangan
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	%	4,05	4,05	100,00%	ST	3,80	4,05	106,58%	ST		Dinas Perdagangan
Program Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor non migas	Milyar dollar	1,568676610	1,242337131	79,20 %	T	1,8177484281	1.242.337.131	68.35%	ST		Dinas Perdagangan
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	%	71,00	71,00	100,00%	ST	91,00	71,00	78,02%	ST		Dinas Perdagangan


Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2022	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2022	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Prosentase UMKM yang mendapat fasilitas promosi	%	20,00	20,00	100,00%	ST	60,00	20,00	33,33%	ST		Dinas Perdagangan

Sumber: eMonev Perencanaan

*) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR: $X \leq 50\%$

***) ST: $X > 18\%$; T: $18\% \geq X > 15\%$; S: $15\% \geq X > 12\%$; R: $12\% \geq X > 10\%$; dan SR: $X \leq 10\%$

***): Target Akhir RPJMD : Sudah Tercapai ($X \geq 100\%$) : Akan Tercapai ($100\% > X \geq 20\%$)

: Perlu Upaya Keras ($X < 20\%$)

Permasalahan yang dijumpai dalam penyelenggaraan Urusan Perdagangan diantaranya:

- Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berbasis Risiko, bahwa pendaftaran kegiatan usaha dilakukan secara online. Sehingga perlu dilakukan revisi Perda, Perwal dan SK yang berkaitan dengan perijinan untuk dilakukan harmonisasi;
- Perlunya Revisi Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 511.3/1112/2016 tentang Penetapan Lahan / Lokasi PKL di Kota Semarang, karena sudah tidak relevan dengan kondisi PKL yang semakin berkembang;
- Kewenangan Meterologi berkurang, Tera ulang Argo Taxi sudah beralih ke *taxi online*, Meter Listrik PLN dan meter PDAM sudah tidak di tera lagi, sehingga berpotensi terhadap penurunan pendapatan.

Rencana Tindak lanjut yang akan dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan:

- Berkoordinasi dengan OPD terkait berkaitan dengan rencana perubahan Perda, Perwal/SK Walikota yang memang sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang;
- Melihat perkembangan PKL yang semakin pesat di Kota Semarang dan dalam upaya Peningkatan PAD Kota Semarang dalam hal retribusi, telah dilakukan revisi Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 511.3/1112/2016 tentang Penetapan Lahan/Lokasi PKL di Kota Semarang. Penambahan titik PKL di masing-masing Kecamatan dan Kelurahan berkoordinasi dengan pemangku wilayah.
- Tera Ulang/Meterologi Legal: Menambah pelayanan tera ulang ke luar kota Semarang yang bisa menjadi kewenangan Meterologi Legal, Sosialisasi Pemilik alat ukur, timbangan dll untuk melakukan tera ulang secara berkala sesuai ketentuan, menambah cakupan potensi UTTP yang ditera atau tera ulang dengan melakukan pelayanan door to door.

29. Urusan Perindustrian

Kinerja penyelenggaraan pada Urusan Pilihan Perindustrian dapat ditunjukkan diantaranya dengan penghargaan kepada IKM Batik Zee berhasil Juara OVOP Bintang 3 untuk katagori produk kain Batik yang diberikan oleh Kementerian Perindustrian pada tahun 2022.

Kinerja lain yang mendukung pelaksanaan Urusan Perindustrian, yaitu: Pemenuhan data industri di SIINas (Sistem informasi Industri Nasional) bisa tercapai dengan baik yaitu sebesar 6,41%.

Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Perindustrian mendorong para pelaku IKM untuk registrasi di SIINas agar terpantau kondisi industri dan kawasan industri secara menyeluruh, tersedianya data industry yang memadai sehingga menghasilkan kebijakan industri yang tepat. Selain itu juga terjadi Pertambahan jumlah sentra IKM dari yang ditargetkan 84% (target 2022: 21 sentra IKM dari total target 25 sentra) tercapai 84% atau berhasil tercapai 100%. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya (Tahun 2021 20 sentra) sebesar 80% (20 sentra IKM).




Juga tercapainya pertambahan IKM sebanyak 20 IKM (0,5%). Dengan capaian ini diharapkan meningkatkan kapasitas/keterampilan SDM pelaku Industri Kecil dan Menengah. Dan Optimalisasi Sentra IKM. Memperluas jaringan pemasaran/penjualan produk IKM sehingga bisa dikenal dan bersaing baik ditingkat lokal maupun nasional. Hal ini bisa berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan pelaku IKM yang pada akhirnya membawa kesejahteraan masyarakat.

Pencapaian kinerja RKPD urusan perindustrian pada tahun 2022 termasuk sangat baik. Kondisi ini terlihat dari 8 indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan bidang perindustrian, semuanya mempunyai kategori capaian sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sebanyak 3 indikator pada kategori telah mencapai target akhir RPJMD, dan 5 indikator kategori akan mencapai target akhir RPJMD. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2022 pada urusan perindustrian disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.114.

Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2022 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026
Urusan Perindustrian



Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2022	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2022	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Dinas Perindustrian
	Persentase tersedianya Sarana Dan Prasarana Perkantoran Dinas Perindustrian	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Dinas Perindustrian
	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Dinas Perindustrian
	Persentase Peningkatan Kinerja ASN Dinas Perindustrian	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	80,00	80,00%	ST		Dinas Perindustrian
Program Perencanaan Dan	Persentase Pertambahan jumlah Sentra IKM	%	84,00	84,00	100,00%	ST	100,00	84,00	84,00%	ST		Dinas Perindustrian


Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2022	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2022	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Pembangunan Industri	Persentase Pertumbuhan IKM	%	0,50	0,50	100,00%	ST	0,50	0,50	100,00%	ST		Dinas Perindustrian
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota	Persentase jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif	%	4,00	4,40	110,00%	ST	4,00	4,40	110,00%	ST		Dinas Perindustrian
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya Data Informasi Industri	%	0,50	1,23	100 %	ST	0,50	1,23	100%	ST		Dinas Perindustrian

Sumber: eMonev Perencanaan

*) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR: $X \leq 50\%$

***) ST: $X > 18\%$; T: $18\% \geq X > 15\%$; S: $15\% \geq X > 12\%$; R: $12\% \geq X > 10\%$; dan SR: $X \leq 10\%$

***): Target Akhir RPJMD : Sudah Tercapai ($X \geq 100\%$) : Akan Tercapai ($100\% > X \geq 20\%$)

: Perlu Upaya Keras ($X < 20\%$)

Permasalahan yang dijumpai pada penyelenggaraan Urusan Prindustrian diantaranya:

- Adanya Pelaku IKM yang kesulitan mendapatkan bahan baku dengan kualitas baik dan harga terjangkau;
- Membutuhkan ruang/media pemasaran yang memadai;
- Masih banyak pelaku IKM yang belum membuat strategi pemasaran/penjualan produk yang tepat;
- Pelaku IKM yang belum “aware” untuk mendapatkan legalitas usaha dan standarisasi produk dalam menjalankan usahanya;
- Pelaku usaha belum sepenuhnya memberikan data yang memadai terkait usahanya.

Adapun rencana tindak lanjut yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan, diantaranya:

- Mengupayakan *link and match* pelaku usaha dengan produsen bahan baku, seperti link and match pelaku usaha jajan pasar dengan PT. Sriboga.
- Memberikan fasilitasi galeri yang memadai sebagai tempat pameran produk dan pemasaran, sekaligus tempat berproduksi Bersama.
- Memberikan pelatihan sesuai kebutuhan Pelaku IKM untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu memproduksi produk yang berkualitas.
- Memberikan pelatihan online sale maupun link and match dengan dengan minimarket/perusahaan perdagangan retail.
- Memberikan sosialisasi dan monev legalitas secara berkala sehingga pelaku usaha mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum. Dengan adanya legalitas usaha ini maka pengusaha merasa aman dalam menjalankan usahanya. Hal ini juga memberikan adanya kepastian hukum jika suatu saat terjadi sengketa/kasus.
- Mendorong pelaku usaha untuk memberikan data yang memadai terkait usahanya sehingga dinas perindustrian bisa memberikan pembinaan secara baik dan tepat.

30. Sekretariat Daerah

Kinerja Unsur pendukung Sekretariat Daerah sebagai fungsi Koordinatif Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dapat ditunjukkan dengan penghargaan dan prestasi yang diterima Kota Semarang selama tahun 2022, diantaranya: Predikat BB (Sangat Baik) SAKIP dan Reformasi Birokrasi (RB) Tingkat Nasional oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Reformasi Birokrasi; Perumda BPR Bank Pasar mendapatkan TOP BUMD AWARD Tingkat Nasional untuk kategori: Pembina BUMD terbaik (Wali kota Semarang), CEO BUMD Terbaik (Direktur Utama Perumda BPR Bank Pasar), BUMD Terbaik (Bintang Empat); Urutan ke 12 Kota Se Indonesia yang melakukan upaya konkret dalam pengendalian inflasi; Pemenang Terbaik 1 dalam program *Integrated-Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) for Cities Award* dan melalui program Kampung Tematik sebagai inovasi untuk mendukung dan meningkatkan capaian SDGs/TPB di Kota Semarang dari PT. Surveyor Indonesia, Bappenas dan APEKSI pada ajang Indonesia's *SDGs Annual Conference* tahun 2022; Penghargaan sebagai Kota Terinovatif pada *Innovative Government Award (IGA) 2022* dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan masih banyak lainnya.

Pencapaian kinerja RKPD sekretariat daerah pada tahun 2022 termasuk sangat baik. Kondisi ini terlihat dari 13 indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan sekretariat daerah, sebanyak 12 indikator mempunyai kategori capaian sangat tinggi dan 1 indikator kategori rendah yaitu OPD yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sebanyak 8 indikator pada kategori telah mencapai target akhir RPJMD, dan 5 indikator kategori akan mencapai target akhir RPJMD.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2022 pada sekretariat daerah disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.115.

Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2022 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026
Unsur Sekretariat Daerah

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2022	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2022	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Bagian Rumah Tangga
	Perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Bagian Administrasi Pemb
	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Bagian Keuangan
	Peningkatan kemampuan ASN	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Bagian TU
	OPD yang melakukan Survey	OPD	39,00	23,00	58,97%	R	39,00	23,00	58,97%	ST		Bagian Organisasi



Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2022	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2022	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
	Kepuasan Masyarakat											
	Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan elektronik	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Indek Pelayanan Publik	%	88,00	88,63	100,7%	ST	90,00	88,63	98,47%	ST	●	Bagian Organisasi
	Cakupan koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan	Kegiatan	9,00	9	100%	ST	9,00	9	100%	ST	●	Bagian Kesra
	Fasilitasi, Kerjasama serta Hubungan Antar Lembaga, Pemerintah dan Kepala Daerah	%	20,00	35,00	175,00%	ST	20,00	35,00	175,00%	ST	●	Bagian Otda dan Kerjasama
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Wilayah	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Bagian Tapem
Program Perekonomian Dan Pembangunan	Tersedianya pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD	Dokumen	1,00	1,00	100,00%	ST	1,00	1,00	100,00%	ST	●	Bagian Administrasi Pemb
	Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Bagian Pengadaan BJ
	prosentase peningkatan koordinasi perekonomian berbasis potensi	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST	●	Bagian Perekonomian dan SDA


Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026				OPD
			Target RKPD Tahun 2022	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2022	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	
	unggulan lokal daerah										

Sumber: eMonev Perencanaan

*) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR: $X \leq 50\%$

***) ST: $X > 18\%$; T: $18\% \geq X > 15\%$; S: $15\% \geq X > 12\%$; R: $12\% \geq X > 10\%$; dan SR: $X \leq 10\%$

***): Target Akhir RPJMD : Sudah Tercapai ($X \geq 100\%$) : Akan Tercapai ($100\% > X \geq 20\%$)

: Perlu Upaya Keras ($X < 20\%$)

Permasalahan yang dijumpai pada penyelenggaraan Unsur Pendukung Sekretariat Daerah diantaranya:

- Kurangnya Pemahaman Perangkat Daerah dan/atau ASN terkait penyusunan produk hukum daerah, penanganan perkara, penyusunan Peta Lintas Fungsi sebagai penjabaran dari proses bisnis dan dasar penyusunan SOP;
- Masih terdapat warga miskin yang tidak masuk dalam data base warga miskin (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), yang menjadi salah satu syarat pengajuan fasilitasi bantuan hukum bagi warga miskin Kota Semarang;
- Program CSR masih perlu ditingkatkan meskipun realisasi tahun 2022 ada kenaikan dibanding tahun 2021, akan tetapi jika dibandingkan dengan kota/kab lain masih jauh dan untuk aplikasi CSR sudah dilakukan pengembangan. Masih banyak perusahaan yang belum melaksanakan CSR atau tidak melaporkan CSR sesuai dengan UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan
- Indeks kematangan UKPBJ belum mencapai level 3;

Adapun rencana tindak lanjut atas permasalahan tersebut diantaranya:

- Memberikan asistensi kepada OPD terkait penyusunan produk hukum daerah, penanganan perkara, penyusunan Peta Lintas Fungsi, Proses Bisnis dan monitoring SOP;
- Melakukan koordinasi dengan kelurahan, Ketua RT dan Ketua RW dalam memverifikasi status pemohon fasilitasi bantuan hukum non litigasi bagi warga miskin disertai dengan bukti foto tempat tinggal;
- Untuk program CSR perlu dilaksanakan amanah Peraturan Daerah Kota Semarang No 7 tahun 2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Semarang Bab VI pasal 21 "Walikota memberikan penghargaan kepada Mitra PKBL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Pemberian penghargaan dalam bentuk CSR Award dan sudah banyak dilakukan di Kota/Kab lain serta memperbanyak Perusahaan yang masuk dalam forum CSR Kota Semarang, untuk melaksanakan hal tersebut diperlukan kajian dan perwal tentang CSR Award;
- Meningkatkan kinerja individu dan kinerja organisasi agar indeks kematangan UKPBJ tercapai;

31. Sekretariat DPRD

Pencapaian kinerja RKPD sekretariat DPRD pada tahun 2022 termasuk cukup baik. Kondisi ini terlihat dari 5 indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan sekretariat daerah, sebanyak 4 indikator mempunyai kategori capaian sangat tinggi, dan 1 indikator kategori rendah yaitu Jumlah Raperda yang disetujui DPRD.

Dari sebanyak 15 Perda yang direncanakan, hanya 8 Perda yang terealisasi mendapatkan persetujuan DPRD. Hal ini diantaranya disebabkan kurangnya kesiapan materi dari OPD pengusul Raperda dan adanya perubahan perundang-undangan dari tingkat pusat. Kedelapan Perda dimaksud adalah Perda tentang Retribusi Perizinan tertentu, Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Raperda tentang Keamanan Pangan, Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Kita Semarang tahun 2021, Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD Tahun 2022-2026, Raperda tentang Perubahan APBD Tahun 2022, Raperda tentang APBD Tahun 2023 dan Raperda tentang Kota Layak Anak. Tindaklanjut yang dilakukan adalah: mendorong OPD pengusul untuk menyiapkan materi/naskah akademik raperda dengan sebaik-baiknya sebelum dimasukkan dalam Propemperda, serta meningkatkan kuantitas pembahasan raperda dengan melibatkan lebih banyak lagi narasumber.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sebanyak 5 indikator kategori akan mencapai target akhir RPJMD.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2022 pada Sekretariat DPRD disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.116.

Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPd Tahun 2022 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026
Sekretariat DPRD

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPd Tahun 2022				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPd Tahun 2022	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPd 2022	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Sekretariat DPRD
	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Sekretariat DPRD
	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Sekretariat DPRD
	Persentase peningkatan kemampuan ASN	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Sekretariat DPRD
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD	Raperda	15,00	8,00	53,33%	R	15,00	8,00	53,33%	ST		Sekretariat DPRD

Sumber: eMonev Perencanaan

*) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR: $X \leq 50\%$

***) ST: $X > 18\%$; T: $18\% \geq X > 15\%$; S: $15\% \geq X > 12\%$; R: $12\% \geq X > 10\%$; dan SR: $X \leq 10\%$

***): Target Akhir RPJMD : Sudah Tercapai ($X \geq 100\%$) : Akan Tercapai ($100\% > X \geq 20\%$)

: Perlu Upaya Keras ($X < 20\%$)

32. Unsur Penunjang Perencanaan

Capaian kinerja program pada Urusan Penunjang Perencanaan pada tahun 2022 diukur dari Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Tataran Kota sebesar 99,44%. Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebesar 98,30%. Tidak tercapainya kinerjanya ini disebabkan pada

tengah periode tahun 2022 terdapat arahan SPM terkait air minum (Urusan PUPR oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman) yang nomenklatur programnya harus dilakukan penyesuaian. Presentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebesar 98,74%. Adapun Capaian kinerja Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dapat mencapai target kinerjanya.

Beberapa dukungan kegiatan dalam rangka mencapai kinerja perencanaan tersebut diantaranya: Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Kegiatan Pengendalian, Evaluasi & Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, serta Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA serta Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Pencapaian kinerja RKPD unsur penunjang Perencanaan pada tahun 2022 tergolong sangat baik. Kondisi ini terlihat dari 8 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan pembangunan unsur penunjang Perencanaan, semua indikator sebanyak 8 indikator pada kategori sangat tinggi. Indikator kinerja yang perlu ditingkatkan karena memiliki tingkat capaian dibawah 100% yaitu Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Tataran Kota; Presentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dan Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sebanyak 1 indikator telah mencapai target akhir RPJMD, dan sebanyak 7 indikator akan mencapai target akhir RPJMD.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2022 pada unsur penunjang perencanaan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.117.

Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2022 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026
Unsur Penunjang Perencanaan

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2022	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2022	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Bappeda	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Bappeda
	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Bappeda	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Bappeda
	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Bappeda	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Bappeda
	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Bappeda	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Bappeda

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2022	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2022	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Tataran Kota	%	100,00	99,44	99,44%	ST	100,00	99,44	99,44%	ST		Bappeda
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100,00	98,74	98,74%	ST	100,00	98,74	98,74%	ST		Bappeda
	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	%	100,00	100,47	100,47%	ST	100,00	100,47	100,47%	ST		Bappeda
	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100,00	98,30	98,30%	ST	100,00	98,30	98,30%	ST		Bappeda

Sumber: eMonev Perencanaan

*) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR: $X \leq 50\%$

**) ST: $X > 18\%$; T: $18\% \geq X > 15\%$; S: $15\% \geq X > 12\%$; R: $12\% \geq X > 10\%$; dan SR: $X \leq 10\%$

***): Target Akhir RPJMD : Sudah Tercapai ($X \geq :100\%$) : Akan Tercapai ($100\% > X \geq 20\%$)

: Perlu Upaya Keras ($X < 20\%$)

Dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Urusan Penunjang Perencanaan di tahun anggaran 2022, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, diantaranya: Belum optimalnya sinergitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah; belum optimalnya perencanaan dan penganggaran pada aplikasi berbasis web (SIPD), diantaranya belum memfasilitasi sampai tahap monev kinerja.

Dalam menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi rencana tindak lanjut diantaranya:

- Melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam hal perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, perencanaan penganggaran pembangunan daerah serta pencapaian target indikator masing-masing OPD dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Daerah.
- Menggunakan aplikasi lokal untuk mendokumentasikan evaluasi hasil perencanaan, melakukan koordinasi intensif dengan pengelola SIPD Kemendagri, upgrade SIPD monolithich menjadi microservice, dan untuk perencanaan ke depan akan mulai menggunakan SIPD-RI.

33. Unsur Penunjang Keuangan

Penghargaan atas Keberhasilan Pemerintah Kota Semarang meraih Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah Kota Semarang Tahun 2021 dari BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 23 Mei 2022. Terkait dengan legalitas asset pada tahun 2022 sebesar 70,72% meningkat dari tahun 2021 yang terealisasi sebesar 60,96. Pengamanan Barang Milik Daerah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2022 dengan target sejumlah 1.188 bidang tanah telah terbit sejumlah 1.188 bidang tanah sesuai dengan Surat Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang Nomor NT.02.01/8649-33.74/XII/2022 Tanggal 20 Desember 2022 Perihal Laporan Pensertifikatan Tanah Aset Pemerintah Kota Semarang melalui PTSL Tahun Anggaran 2022 dan sertifikat tanah telah diserahkan oleh Badan Pertanahan Kota Semarang ke Pemerintah Kota Semarang pada tanggal 6 Januari 2023.

Sedangkan dari Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada tahun 2022 terealisasi sebesar 52,03 % meski tidak dapat memenuhi target 2022 sebesar 54,57%, capaian ini meningkat jika dibandingkan kemandirian keuangan daerah tahun 2021 yang sebesar 49,47%. Hal ini mengindikasikan pemulihan ekonomi masyarakat akibat pandemi dan inflasi sudah menunjukkan kinerja positifnya. Selain itu semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah maka semakin tinggi kemampuan pemerintah Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dimana pendapatan asli daerah terdiri dari beberapa komponen yang salah satunya berasal dari sektor rertribusi yang pada tahun 2022 tidak dapat melampaui target dikarenakan target yang diberikan terlalu tinggi dan dari sector lain-lain PAD yang sah yaitu komponen Pendapatan Denda Pajak yang tidak dapat melampaui target dengan adanya program pembebasan denda pajak pada bulan Januari sampai dengan Mei sebesar 10% untuk Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19.

Pencapaian kinerja RKPD urusan keuangan pada tahun 2022 tergolong cukup baik. Kondisi ini terlihat dari capaian kinerja 8 indikator keberhasilan pembangunan unsur penunjang keuangan, sebanyak 6 indikator memiliki kinerja tinggi, sebanyak 1 indikator memiliki kinerja kategori sedang dan 1 indikator memiliki predikat sangat rendah. Jika disandingkan capaiannya terhadap target akhir RPJMD terdapat 7 indikator akan mencapai target akhir RPJMD, dan 1 indikator perlu upaya keras untuk mencapai target akhir RPJMD. Indikator yang tingkat kategori sangat rendah yaitu. Persentase SILPA Terhadap APBD. Hal ini disebabkan SILPA APBD Kota Semarang sebesar Rp319.157.987.567,00 (sumber: LRA Unaudited 2022) hal ini dapat disebabkan karena beberapa hal yaitu:

1. Efisiensi Belanja,
Pemerintah Kota Semarang dalam pengelolaan kebijakan fiskal tahun 2022 menyampaikan kepada seluruh SKPD untuk melakukan efisiensi belanja dan mencari sumber pendapatan lain seperti CSR tetapi tetap dengan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
2. Evaluasi Penyaluran Penyertaan Modal pada BUMD, yaitu Penyertaan Modal pada PT BPS sebesar Rp2.000.000.000,00 dan PT Taman Satwa sebesar Rp20.000.000.000,00. Sehingga penundaan penyertaan modal tersebut juga menjadi salah satu penyebab besarnya SILPA pada APBD TA 2022.
3. Penundaan Penyertaan Modal pada BUMD, yaitu Penyertaan Modal pada PT. BPS sebesar Rp 2.000.000.000,00 dan PT. Taman Satwa sebesar Rp 20.000.000.000,00. Sehingga penundaan penyertaan modal tersebut juga menjadi salah satu penyebab besarnya SILPA pada APBD TA 2022.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2022 pada urusan keuangan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.118.
Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2022 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026
Unsur Penunjang Keuangan

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2022	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2022	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		BPKAD, BAPENDA
	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		BPKAD, BAPENDA
	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		BPKAD, BAPENDA
	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		BPKAD, BAPENDA
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase SILPA Terhadap APBD	%	1,42	6,02		SR	0,62	6,02		SR		BPKAD
	Persentase realisasi dana transfer terhadap target dana transfer	%	100,00	98,46	98,46%	ST	100,00	98,46	98,46%	ST		BPKAD
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Legalitas Aset	%	70,72	70,72	100,%	ST	100,00	70,72	70,72%	ST		BPKAD
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	%	10,00	6,35	63,50%	S	10,00	6,35	63,50%	ST		BAPENDA

Sumber: Tahun 2022 LRA Unaudited BPK masih dalam proses pemeriksaan BPK

*) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR: $X \leq 50\%$

**) ST: $X > 18\%$; T: $18\% \geq X > 15\%$; S: $15\% \geq X > 12\%$; R: $12\% \geq X > 10\%$; dan SR: $X \leq 10\%$

***): Target Akhir RPJMD : Sudah Tercapai ($X \geq 100\%$) : Akan Tercapai ($100\% > X \geq 20\%$)

: Perlu Upaya Keras ($X < 20\%$)

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan penunjang keuangan tahun 2022:

- Belum optimalnya proses akuntansi dan pelaporan keuangan, karena menu akuntansi dan pelaporan pada aplikasi SIPD masih dalam proses pengembangan;
- Belum optimalnya informasi mengenai pemanfaatan aset untuk masyarakat;

- c. Beberapa hal yang menjadikan kurang optimalnya potensi pendapatan, diantaranya disebabkan oleh :
- Penertiban pemasangan reklame sesuai aturan, sehingga mengurangi potensi penerimaan Pajak Reklame;
 - Prediksi akan terjadi kenaikan tarif listrik pada tahun 2021-2022, karena krisis energi global , baru terealisasi pada bulan Juni 2022, sehingga berpengaruh terhadap realisasi target Pajak Penerangan Jalan;
 - Pajak Mineral dan Batuan (Minerba) tidak tercapai karena meningkatnya Wajib Pajak yang tidak mengajukan maupun tidak memperoleh izin untuk melakukan penggalian;
 - Berkurangnya penerimaan Pajak Parkir yang disebabkan meningkatnya pengguna transportasi online, dan tempat parkir lain termasuk di bandara Ahmad Yani yang disebabkan berkurangnya jadwal penerbangan;
 - Meningkatnya Jumlah Wajib Pajak Air Bawah Tanah (ABT) yang beralih ke PDAM;
 - Menurunnya kondisi alam, menyebabkan obyek pajak Sarang Burung Walet di Kota Semarang yang tidak berproduksi dalam menjalankan usahanya;
 - Tertundanya proses verifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dikarenakan belum diterimanya sertifikat PTS.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan:

- a. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan Tim Teknis SIPD Kementerian Dalam Negeri, melakukan desk dengan SKPD terkait transaksi penerimaan dan pengeluaran, serta menyesuaikan laporan administrasi keuangan berdasarkan desk;
- b. Mengembangkan Aplikasi Sistem Elektronik Manajemen Aset Terintegrasi (SEMAR) bertujuan untuk mengumpulkan data kerjasama pemanfaatan aset di Kota Semarang, mempermudah mencari data akan aset tanah Kota Semarang yang idle, serta membantu pengarsipan data pemanfaatan, penatausahaan, dan pengamanan aset;
- c. Mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, diantaranya melalui :
 - Melakukan sosialisasi, penggalian potensi dan pengawasan terhadap wajib pajak hiburan;
 - Pengawasan terutama yustisi terhadap wajib pajak reklame terus ditingkatkan dan lebih menekankan kepada pendataan, potensi, objek reklame yang ada di dalam Mall;
 - Bekerjasama dengan PLN dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan untuk memberikan informasi pentingnya pembayaran listrik yang berdampak pada Pendapatan Asli Daerah dan menghimbau untuk pembayaran listrik tepat pada waktunya, agar tidak terkena sanksi;
 - Terus melakukan upaya untuk mencari potensi objek baru, dan memantau objek pajak minerba yang saat ini telah habis masa izinnya, dengan berkoordinasi dengan Dinas ESDM Provinsi;
 - Melakukan pengawasan dan pengendalian terkait potensi pajak parkir, dan koordinasi dengan dinas terkait dalam menentukan potensi pajak parkir;
 - Melakukan pendataan dan pengawasan terkait pemanfaatan air bawah tanah di lingkungan industri maupun pusat bisnis;

- Melakukan sosialisasi kepada pengusaha sarang burung walet di kota semarang dan pendataan lebih lanjut terkait adanya potensi tempat usaha sarang burung walet baru di Kota Semarang;
- Mendorong Kantor Pertanahan untuk mempercepat proses penyerahan sertifikat.

34. Unsur Penunjang Kepegawaian

Kinerja pada penyelenggaraan Unsur Penunjang Kepegawaian dapat ditunjukkan salah satunya dengan diraihnya Perhargaan Meritokrasi Tingkat Jawa Tengah Tahun 2022 dengan Kategori Baik. Selain itu juga disusunnya Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Maksud disusunnya Perwal ini adalah memberikan kejelasan dan kepastian karier kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dalam Pengembangan karier yang dilaksanakan sesuai prinsip profesionalisme yaitu dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang Pangkat yang ditetapkan serta syarat objektif lainnya.

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara hasil penilaian mandiri tahun 2021 sebesar 83,84 namun kemudian sejak terbit ketentuan bahwa BKN yang akan melakukan evaluasi secara nasional, sehingga kemudian hasil penilaian Indeks Profesionalisme ASN Kota Semarang Tahun 2021 yang dilakukan pengukuran pada tahun 2022 sebesar 51,23 (Sangat Rendah) dengan aspek penilaian Kualifikasi (13,31), Kompetensi (8,04), Kinerja (24,90), dan Disiplin (4,99). Disisi lain Indeks Sistem Merit Kota Semarang sebesar 0,66 yang meningkat kinerjanya jika dibandingkan tahun 2021 sebesar 0,44 sedangkan Indeks Kepuasan Aparatur terhadap layanan kepegawaian pada tahun 2022 sebesar 91,88.



Salah satu isu terkait pembinaan kepegawaian dapat dilihat dari penegakan disiplin pegawai. Pada tahun 2022 terdapat 24 pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin. Hukuman disiplin berupa teguran diberikan kepada 11 orang, sangsi penundaan kenaikan gaji berkala dan atau penurunan pangkat diberikan kepada 6 orang, dan penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan jabatan menjadi pelaksana, dan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS dijatuhkan kepada 7 orang pegawai dengan hukuman berupa.

Pencapaian kinerja RKPD unsur penunjang kepegawaian pada tahun 2022 tergolong baik. Kondisi ini terlihat dari 10 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, semua indikator sebanyak 10 indikator mempunyai capaian sangat tinggi. Jika disandingkan dengan target akhir RPJMD, sebanyak 6 indikator yang telah mencapai target akhir RPJMD, dan sebanyak 4 indikator akan mencapai target akhir RPJMD.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2022 pada unsur penunjang kepegawaian disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.119.
Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2022 dan
Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026
Unsur Penunjang Kepegawaian



Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2022	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2022	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Tingkat kesesuaian dan ketepatan waktu penyajian dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan serta evaluasi kinerja perangkat daerah	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		BKPP
	Persentase peningkatan kemampuan ASN	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		BKPP
	Persentase ketersediaan sarana prasarana kantor yang berfungsi baik	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		BKPP
Program Kepegawaian Daerah	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah / dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	225,70	236,58	104,82%	ST	300,00	236,58	78,86%	T		BKPP
	Persentase keterisian jabatan JPT Pratama, administrasi, dan fungsional sesuai kualifikasi	%	100,00	196,00	196,00%	ST	100,00	196,00	196,00%	ST		BKPP
	Persentase akurasi data kepegawaian	%	99,00	198,00	200,00%	ST	99,00	198,00	200,00%	ST		BKPP
	Persentase ASN yang tidak mendapatkan hukuman disiplin	%	99,00	100,00	101,01%	ST	99,00	100,00	101,01%	ST		BKPP
	Persentase ASN yang berkinerja baik sampai dengan sangat baik	%	81,00	199,36	246,12%	ST	82,00	199,36	243,12%	ST		BKPP


Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPDP Tahun 2022	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPDP 2022	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
	Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	17,53	41,68	237,76%	ST	25,00	41,68	166,72%	ST		BKPP
	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		BKPP

Sumber: eMonev Perencanaan

*) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR: $X \leq 50\%$

***) ST: $X > 18\%$; T: $18\% \geq X > 15\%$; S: $15\% \geq X > 12\%$; R: $12\% \geq X > 10\%$; dan SR: $X \leq 10\%$

***): Target Akhir RPJMD : Sudah Tercapai ($X \geq 100\%$) : Akan Tercapai ($100\% > X \geq 20\%$)

: Perlu Upaya Keras ($X < 20\%$)

Secara umum permasalahan utama dalam pencapaian program dan kegiatan yang dihadapi selama tahun 2022 adalah tingginya dinamika regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah harus menunggu petunjuk teknis untuk penyelenggaraan kegiatan yang mengakibatkan perubahan jadwal kegiatan yang sudah direncanakan sehingga berdampak pada pencapaian program dan kegiatan.

Terkait permasalahan tersebut di atas akan dilakukan rencana tindak lanjut diantaranya dengan meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait aturan dan kebijakan yang berpengaruh terhadap proses kegiatan yang ada di Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini Urusan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan melalui Konsultasi, Rapat-Rapat Koordinasi baik langsung atau melalui Daring.

35. Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan

Kinerja pada unsur penunjang Pendidikan dan Pelatihan dapat ditunjukkan dengan diraihnya pencapaian, yaitu Sertifikasi ISO 9001: 2015 sistem manajemen mutu pada penyelenggaraan Diklat serta Sarana dan Prasarana Pengelola Diklat (berlaku selama 3 tahun).

Pengembangan sumber daya aparatur di dukung dengan berbagai hal seperti pengiriman peserta diklat teknis dan fungsional, penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional lainnya, dimana sebelumnya dilakukan Analisis Kebutuhan Diklat dan juga menyelenggarakan evaluasi pasca diklat terkait evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan diklat teknis maupun fungsional lainnya.


Pemerintah Kota Semarang melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang pada tahun 2022 telah menyelenggarakan berbagai diklat manajerial, teknis dan fungsional yang bekerja sama dengan Kementerian-Kementerian terkait yang membidangi maupun Lembaga Non Kementerian.

Pencapaian kinerja RKPDP unsur penunjang pendidikan dan pelatihan pada tahun 2022 tergolong baik. Kondisi ini terlihat dari 1 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, mempunyai capaian sangat tinggi. Jika

disandingkan dengan target akhir RPJMD, 1 indikator yang menjadi ukuran kinerja memiliki kinerja akan mencapai target akhir RPJMD.

Tabel 2.120.



Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2022 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026
Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan


Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2022	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2022	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat (struktural, teknis, fungsional), seminar, kursus dan sejenisnya	%	35,00	35,00	100,00%	ST	55,00	35,00	63,64%	ST		BKPP

Sumber: eMonev Perencanaan

*) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR: $X \leq 50\%$

**) ST: $X > 18\%$; T: $18\% \geq X > 15\%$; S: $15\% \geq X > 12\%$; R: $12\% \geq X > 10\%$; dan SR: $X \leq 10\%$

***): Target Akhir RPJMD : Sudah Tercapai ($X \geq 100\%$) : Akan Tercapai ($100\% > X \geq 20\%$)

: Perlu Upaya Keras ($X < 20\%$)

36. Unsur penunjang Penelitian dan Pengembangan

Kinerja dalam penyelenggaraan bidang penelitian dan pengembangan ditandai dengan diraihnya beberapa penghargaan yang diterima pada tahun 2022, yaitu: Penghargaan dari Kementerian dalam Negeri sebagai Kota Terinovatif dari Innovative Government Award (IGA) Tahun 2022. Selain itu sebagai Juara Umum Kota pada Anugerah Pemetaan Daya Saing Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah, serta Fasilitasi peraihan Pemenang Utama dan Pemenang Favorit Lomba Kreativitas dan Inovasi Masyarakat (KRENOVA) Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada Penjaringan Inovasi Masyarakat Tahun 2022 dan inovasi Digital Smart Farm 4.0.

Selain itu disusun, kajian penelitian yang diantaranya berkerjasama dengan berbagai Perguruan Tinggi dalam penyusunannya pada tahun 2022 yaitu :


1. Kajian Kesiapan Pelaku Usaha Kuliner Kota Semarang dalam Implementasi Sertifikasi Produk Pangan Halal
2. Kajian Strategi Pengembangan Integrated and Sustainable Tourism (Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan) di Kota Semarang;
3. Kajian Implementasi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kota Semarang;
4. Kajian Pembangunan Kota Semarang;
5. Kajian Analisis Banjir Genangan di Kawasan Tembalang dan Sekitarnya;
6. Kajian Potensi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Semarang;
7. Kajian Persepsi Stakeholder Terhadap Branding Kota Semarang 2022;
8. Kajian Strategi Pemasaran Kota Semarang;
9. Kajian Model Pengembangan Kawasan Pusat Kota Semarang.

Pencapaian kinerja RKPD unsur penunjang Penelitian dan Pengembangan pada tahun 2022 tergolong baik. Kondisi ini terlihat dari capaian kinerja

indikator yang menjadi ukuran keberhasilan pembangunan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan dalam kategori sangat tinggi. Demikian pula jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, indikator dimaksud telah mencapai target akhir RPJMD.

Perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2022 pada Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan disajikan pada tabel berikut ini.



Tabel 2.121.
Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2022 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026
Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan


Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2022	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2022	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase inovasi dan hasil kelibngan yang diimplementasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00	100,00%	ST		Bappeda

Sumber: eMonev Perencanaan

*) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR: $X \leq 50\%$

**) ST: $X > 18\%$; T: $18\% \geq X > 15\%$; S: $15\% \geq X > 12\%$; R: $12\% \geq X > 10\%$; dan SR: $X \leq 10\%$

***): Target Akhir RPJMD : Sudah Tercapai ($X \geq 100\%$) : Akan Tercapai ($100\% > X \geq 20\%$)

: Perlu Upaya Keras ($X < 20\%$)

Dalam pelaksanaan Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan terdapat permasalahan yang dihadapi, diantaranya belum optimalnya proses penginputan & pengumpulan data kegiatan inovatif yang dilaksanakan OPD, sehingga mempengaruhi Indeks Inovasi Kota Semarang.

Rencana Tindak lanjut yang akan dilakukan diantaranya:

- Melakukan koordinasi dengan Tim Teknis Inovasi Kemendagri terkait strategi optimalisasi pengumpulan data-data kegiatan inovatif di Kota Semarang;
- Merancang website untuk mewadahi data-data kegiatan inovatif di seluruh OPD se-Kota Semarang (JELITA)
- Pada tahun 2023 penginputan dan pengumpulan data-data kegiatan inovatif di Pemkot Semarang akan dilaksanakan lebih awal dan melalui website <https://jelita.semarangkota.go.id> (tidak menunggu website inovasi Kemendagri dibuka).

37. Unsur Penunjang Pengawasan

Kinerja fungsi pengawasan di daerah, diantaranya dapat ditunjukkan dengan Tingkat Maturitas SPIP, Opini BPK atas Laporan Keuangan, Level Kapabilitas APIP, dan Indeks Manajemen Risiko yang semua itu akan berdampak pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan lebih luas lagi pada Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di Daerah. Indeks Reformasi Birokrasi di pemerintah kota Semarang pada tahun 2022 sebesar 72,68

meningkat sebesar 1,65 jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 71,03. Peran pengawasan ini menyumbangkan dari aspek opini BPK, Nilai SAKIP sebesar 70,34, Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik sebesar 89,70, Indeks Persepsi Anti Korupsi sebesar 84,45 dan Survey Internal Organisasi oleh KPK sebesar 81,95.

Sistem Pengendalian Intern menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan organisasi. Penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta Pemantauan. Pada tahun 2022 nilai maturitas SPIP Pemerintah Kota Semarang sebesar 3,012 (Terdefinisi) yang artinya Pemerintah Kota Semarang telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Meskipun demikian, Nilai maturitas SPIP ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 2,639.

Disisi lain Pemeriksaan atas Laporan Keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kesesuaian Laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern. Dan Pemerintah Kota Semarang berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021. Sehingga telah memperoleh WTP selama 6 (enam) tahun berturut-turut sejak Tahun 2016.

Level kapabilitas APIP menunjukkan kemampuan untuk melaksanakan tugas – tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi yang harus dimiliki agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Semakin tinggi levelnya maka semakin baik kapabilitasnya APIP. Capaian kapabilitas APIP Kota Semarang Tahun 2022 telah sepenuhnya berada pada level 3 (integrated). Penerapan manajemen risiko yang efektif akan membantu instansi pemerintah untuk meminimalkan dampak risiko yang berpotensi menghambat dalam mencapai tujuan, serta memaksimalkan nilai bagi para stakeholders.

Selanjutnya, penerapan manajemen risiko oleh Instansi Pemerintah terbit Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 menetapkan “Persentase Instansi Pemerintah (K/L/D) dengan Indeks Penerapan Manajemen Risiko (Manajemen Risiko Indeks) Level 3” sebagai salah satu indikator keberhasilan Proyek Prioritas “Penguatan Pengelolaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Organisasi”.

Berdasarkan hasil laporan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah terkait penilaian baseline indeks penerapan manajemen risiko pada Pemerintah Kota Semarang Tahun 2022 memenuhi kriteria pada tingkat “Repeatable” atau level 2 dengan skor sebesar 2,820. Adapun target yang diharapkan adalah dapat mencapai level 3 pada tahun 2024 sesuai surat edaran BPKP Perwakilan Prov.

JATENG Nomor S-619/PW11/3.1/2021 Perihal Atensi kebijakan Pembinaan SPIP dan MR tahun 2020-2024.

Pencapaian kinerja RKPD unsur penunjang pengawasan pada tahun 2022 tergolong baik. Kondisi ini terlihat dari capaian kinerja 6 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, semuanya sebanyak 6 indikator semuanya termasuk dalam kategori sangat tinggi. Jika disandingkan dengan target akhir RPJMD, sebanyak 2 indikator telah mencapai target, dan sebanyak 4 indikator akan mencapai target akhir RPJMD. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2022 pada urusan pengawasan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.122.

Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2022 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026 Unsur Penunjang Pengawasan

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2022	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2022	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Inspektorat
	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Inspektorat
	persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Inspektorat
	Persentase peningkatan kemampuan ASN	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Inspektorat
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Tingkat Leveling Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	leveling	3,00	3,00	100,00%	ST	3,00	3,00	100,00%	ST		Inspektorat
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,02	3,01	99,74%	ST	3,00	3,01	100,40%	ST		Inspektorat

Sumber: eMonev Perencanaan

*) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR: $X \leq 50\%$

**) ST: $X > 18\%$; T: $18\% \geq X > 15\%$; S: $15\% \geq X > 12\%$; R: $12\% \geq X > 10\%$; dan SR: $X \leq 10\%$

***): Target Akhir RPJMD : Sudah Tercapai ($X \geq 100\%$) : Akan Tercapai ($100\% > X \geq 20\%$)

: Perlu Upaya Keras ($X < 20\%$)

Hambatan atau permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dalam Fungsi Pengawasan salah satunya adalah belum optimalnya implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah. Selain itu juga terdapat pelimpahan tugas dari pusat untuk Inspektorat Daerah diluar kebijakan pengawasan yang tidak direncanakan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2022

Rencana tindak lanjut terhadap hambatan serta permasalahan yang ada bahwa selanjutnya Inspektorat Kota Semarang akan lebih mengoptimalkan SPIP di tingkat OPD dengan pembinaan serta akan menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun selanjutnya berbasis risiko.

38. Unsur Kewilayahan

Beberapa prestasi yang menunjukkan kinerja pada penyelenggaraan pemerintahan pada kecamatan adalah pemenang lima besar Kawasan Tanpa Rokok se-Indonesia Tingkat Nasional Tahun 2022 yang dimenangkan oleh Kecamatan Gajahmungkur. Selain itu juga Penghargaan kepada Kelurahan Pedalangan (Kecamatan Banyumanik) sebagai Kampung Iklim Kategori Utama yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Secara umum kinerja kecamatan dalam bidang urusan pemberdayaan masyarakat diukur melalui persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif, dimana pada tahun 2022 terealisasi sebesar 90,90 %, sedangkan kinerja dalam fungsi pemerintahan dan pelayanan publik diukur dengan persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE) yang realisasinya sebesar 92,87%, pada fungsi Ketentraman Dan Ketertiban Umum diukur dari persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum akibat pelanggaran perda di kewilayahan sebesar 10,16%, sedangkan pada Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum diukur dari Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang terealisasi sebesar 87,10%.

Pencapaian kinerja RKPD Tahun 2022 pada unsur kewilayahan sangat baik. Kondisi ini terlihat dari 7 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, semua indikator termasuk dalam kategori sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sebanyak 3 indikator kategori telah mencapai target akhir RPJMD, dan sebanyak 4 indikator akan mencapai target akhir RPJMD.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2022 pada urusan pendidikan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.123.

Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2022 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026
Unsur Kewilayahan

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2022	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2022	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		16 Kecamatan
	Persentase Tersedianya sarana dan	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		16 Kecamatan

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2022	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2022	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
	prasarana perkantoran SKPD											
	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		16 Kecamatan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	%	91,06	92,87	101,98%	ST	91,06	101,98	111,99%	ST		16 Kecamatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	%	96,38	90,90	94,31%	ST	96,38	94,31	97,86%	ST		16 Kecamatan
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	9,81	10,16	103,54%	ST	10,00	101,60	1016,00%	ST		16 Kecamatan
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	%	73,56	87,10	118,41%	ST	90,00	96,78	107,54%	ST		16 Kecamatan

Sumber: eMonev Perencanaan

*) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR: $X \leq 50\%$

**) ST: $X > 18\%$; T: $18\% \geq X > 15\%$; S: $15\% \geq X > 12\%$; R: $12\% \geq X > 10\%$; dan SR: $X \leq 10\%$

***): Target Akhir RPJMD : Sudah Tercapai ($X \geq 100\%$) : Akan Tercapai ($100\% > X \geq 20\%$)

: Perlu Upaya Keras ($X < 20\%$)

Permasalahan yang dihadapi yaitu:

- Jika terjadi cuaca ekstrim, dengan kondisi geografis dan topografi yang bervariasi, berpotensi terjadinya pohon tumbang, bencana tanah longsor, banjir dan genangan air, bervariasi di wilayah kecamatan;
- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pencegahan dan penanganan bencana banjir maupun bencana lainnya;
- Kondisi Jalan yang naik turun, rusak mengganggu lalu lintas dan menyebabkan kemacetan bahkan rawan kecelakaan;
- Dengan adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Covid-19 dan terjadinya kenaikan inflasi mengakibatkan kondisi ekonomi masyarakat menurun sehingga kemampuan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan juga menurun;

- e. Masih adanya balita stunting, kemiskinan ekstrem, dan disabilitas di wilayah yang memerlukan penanganan;
- f. Masih perlu adanya peningkatan kompetensi aparatur di Kecamatan dan Kelurahan;
- g. Kurangnya kesetaraan gender, berdampak pada kegiatan pelatihan yang diselenggarakan mayoritas diikuti oleh peserta perempuan.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan adalah:

- a. Melakukan koordinasi dengan Dinas Teknis melakukan pemangkasan pohon secara berkala, normalisasi sungai dan saluran serta pembangunan talud di wilayah rawan longsor, Polsek untuk dapat mengatur lalu lintas khususnya di pagi hari karena intensitas laju kendaraan yang padat;
- b. Kegiatan jemput bola pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
- c. Penerapan bapak asuh untuk balita stunting, sosialisasi pola asuh anak dalam rangka pencegahan stunting dan pemberian bantuan secara berkala kepada bayi penderita stunting;
- d. Adanya pembinaan aparatur ataupun bimbingan teknis meningkatkan kompetensi aparatur di Kecamatan dan Kelurahan;
- e. Upaya koordinasi dengan dinas terkait untuk melakukan rekayasa lalu lintas dan pelebaran jalan, selain itu dengan pemasangan rambu larangan melintas pada waktu tertentu;
- f. Meningkatkan Mengadakan sosialisasi untuk menumbuhkan pemahaman masyarakat agar dapat sigap dalam menangani bencana;
- g. Perlu adanya rencana aksi agar dalam kegiatan pelatihan bisa seimbang peserta laki-laki dan perempuan, misalnya dengan memilih waktu dan tempat yang tepat dalam pelaksanaan kegiatan agar partisipasi laki-laki dan perempuan meningkat, pemilihan materi kewirausahaan yang tepat dengan memperhatikan isu gender, penetapan proporsi peserta laki-laki perempuan, penetapan narasumber yang sesuai.

39. Unsur Kesatuan Bangsa Dan Politik

Pada tahun 2022 kinerja pada Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik ditunjukkan melalui Indeks Demokrasi (95,35), Indeks Pembumih Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK) (82,13), Indeks Pengamalan Pancasila (3,2), Indeks Ormas (63,81), dan Indeks Kerukunan Umat Beragama (80,04).

Indeks Demokrasi adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Kota Semarang. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*).

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa variabel yang mempunyai indeks terendah adalah peran DPRD. Nilai indeksnya adalah sebesar 82,44 yang masuk dalam Aspek III Lembaga Demokrasi. Kemudian, nilai indeks variabel terendah kedua adalah hak memilih dan dipilih sebesar 89,90 yang masuk dalam Aspek II Hak-Hak Politik. Indeks demokrasi Kota Semarang Tahun 2022 sebesar 95,35. Nilai tersebut masuk dalam kategori demokrasi baik. Kategori tersebut melebihi nilai Indeks Demokrasi Jawa Tengah tahun 2021 (nilai indeks 81,15 dengankategori baik).

Pengukuran Indeks Pembumih Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK) pada tahun 2022 mencapai 82.13 indeks yang ditargetkan 73.00 indeks atau berhasil mencapai target 112,51%. Hal ini lebih besar dibandingkan data tahun 2021 sejumlah 72,50 indeks.

Pada tahun 2022 dari hasil pengukuran Indeks Kinerja Ormas mencapai 63,81 Indeks. Pengukuran ini dilakukan kepada 61 organisasi kemasyarakatan dari total keseluruhan 302 Organisasi kemasyarakatan di Kota Semarang yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) pada Badan Kesbangpol Kota Semarang dan Kementerian Dalam Negeri . Pemerintah melindungi kebebasan berserikat/ berorganisasi dan berkumpul setiap warga negara, sehingga adanya organisasi kemasyarakatan merupakan wadah dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah dalam membangun Negara Indonesia.

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) tahun 2022 mencapai 80,04 Indeks. Kehidupan beragama saat ini, mulai muncul potensi konflik yang bersumber dari luntarnya rasa toleransi antar umat beragama. Indeks ini menggambarkan tingkat kerukunan umat beragama di Kota Semarang dan untuk mengetahui peta variasi kerukunan yang terjadi di masyarakat Kota Semarang. Survey Indeks Kerukunan Umat Beragama pada tiga dimensi utama yaitu toleransi dengan indeks sebesar 80,94, kesetaraan dengan indeks sebesar 79,64 dan kerjasama dengan indeks sebesar 79,58. Perhitungan indeks di Kota Semarang pada tahun 2022 yang dikategorikan tinggi dengan tingkat IKUB 80,04 merupakan nilai yang cukup tinggi karena diatas rata-rata IKUB Jawa Tengah sebesar 76,80 pada tahun 2022 dan rata-rata secara Nasional sebesar 72,39 pada tahun 2021.






Pencapaian kinerja RKPD Tahun 2022 pada unsur kewilayahan sangat baik. Kondisi ini terlihat dari 6 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, semua indikator termasuk dalam kategori sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sebanyak 2 indikator kategori telah mencapai target akhir RPJMD, dan sebanyak 4 indikator akan mencapai target akhir RPJMD.

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah tahun 2022 pada Fungsi Pengawasan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.124.

Capaian Kinerja Indikator Program Terhadap Target RKPD Tahun 2022 dan Target Akhir RPJMD tahun 2021-2026
Unsur Kesatuan Bangsa dan Politik



Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2022	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2022	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Persentase peningkatan kemampuan ASN	%	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	20,00	20,00%	ST		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik


Program	Indikator Kinerja	Satuan	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022				Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026					OPD
			Target RKPD Tahun 2022	Realisasi	Capaian Terhadap Target RKPD 2022	Status *)	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d Tahun 2022	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD	Status **)	Status ***)	
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Indeks Pengamalan Pancasila	Indeks	2,00	3,20	160,00%	ST	2,40	3,20	133,00%	ST		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik Dan pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Indeks Kebebasan Sipil	Indeks	62,00	98,20	158,39%	ST	70,00	98,20	140,29%	ST		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Indeks Kinerja Ormas	Indeks	55,00	63,81	116,02%	ST	60,00	63,81	106,35%	ST		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Indeks kerukunan umat beragama	Indeks	70,00	80,04	114,34%	ST	72,00	80,04	111,17%	ST		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan peningkatan Kualitas Dan fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase kemampuan analisa inteligen strategis terhadap gangguan ipoleksosbud hankam	%	81,00	81,00	100,00%	ST	85,00	81,00	95,29%	ST		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber: eMonev Perencanaan

*) ST: $X > 90\%$; T: $90\% \geq X > 75\%$; S: $75\% \geq X > 65\%$; R: $65\% \geq X > 50\%$; dan SR: $X \leq 50\%$

**) ST: $X > 18\%$; T: $18\% \geq X > 15\%$; S: $15\% \geq X > 12\%$; R: $12\% \geq X > 10\%$; dan SR: $X \leq 10\%$

***): Target Akhir RPJMD : Sudah Tercapai ($X \geq 100\%$) : Akan Tercapai ($100\% > X \geq 20\%$)

: Perlu Upaya Keras ($X < 20\%$)

Penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di Tahun 2022 masih menemui beberapa permasalahan, antara lain:

- Masih terjadinya kejadian tawuran antar pelajar di Kota Semarang;
- Belum adanya standarisasi materi/kurikulum pengajar/narasumber dan segmentasi pendidikan Wawasan Kebangsaan;
- Masih ditemukannya ketidaksetujuan terhadap pendirian Rumah Ibadat oleh masyarakat setempat dan sikap intoleransi dari kelompok masyarakat tertentu;
- Angka prevalensi pengguna narkoba di Kota Semarang mengalami tren peningkatan;

Adapun langkah-langkah yang direncanakan guna menangani permasalahan dimaksud antara lain:

- Guna mengantisipasi kenakalan remaja, salah satunya tawuran antar pelajar perlu diaktifkan forum-forum yang melibatkan organisasi intra

- sekolah, utamanya dalam mengintensifkan edukasi tentang Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan kegiatan persahabatan antar sekolah;
- b. Menyusun panduan praktek/pengamalan nilai-nilai kebangsaan agar pendidikan Wawasan Kebangsaan memiliki standard tertentu;
 - c. Penggalakan edukasi toleransi, kesetaraan, dan kerjasama antar umat beragama dan meningkatkan forum-forum silaturahmi yang melibatkan tokoh-tokoh agama;
 - d. Menghadapi fenomena makin meningkatnya jumlah pengguna narkoba maka dirasa perlu untuk merubah strategi edukasi bahaya narkoba menjadi rehabilitasi pengguna narkoba;

Dari sejumlah 297 indikator program yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan, jika dibandingkan terhadap target RKPD pada tahun 2022 terdapat 281 indikator atau sebesar 94,61% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi ($90% < X$), terdapat 11 indikator atau sebesar 3,70% dengan predikat kinerja Tinggi ($75% < X \leq 90%$), terdapat 1 indikator atau sebesar 0,34% dengan predikat kinerja Sedang ($65% < X \leq 75%$), terdapat 1 indikator atau sebesar 0,34% dengan predikat kinerja Rendah ($50% < X \leq 65%$), dan terdapat 3 indikator atau sebesar 1,01% dengan predikat kinerja Sangat Rendah ($X \leq 50%$).

Sedangkan jika dibandingkan terhadap target akhir RPJMD (tahun 2026), dari sejumlah 297 indikator program yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan, jika dibandingkan terhadap target RPJMD 2021-2026 sampai dengan tahun 2022 terdapat 293 indikator atau sebesar 98,65% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi ($90% < X$) dan terdapat 4 indikator atau sebesar 1,35% dengan predikat kinerja Sangat Rendah ($X \leq 50%$).

Indikator kinerja dengan capaian Rendah dan Sangat Rendah terhadap target RKPD tahun 2022 tersebut adalah:

1. Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (naik sebesar 6.683% dari target menurun 5% → SR)
Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sejak April 2022 menimpa di 9 kecamatan, serta penyakit hewan menular Lumpy Skin Diseases (LSD) yang ditemukan di 5 kecamatan (Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Ngaliyan, dan Tugu). Wabah PMK dan LSD ini telah menjadi isu nasional, ditetapkan sebagai status keadaan tertentu darurat PMK dengan SK Kepala BNPB No. 47 Tahun 2022 tgl 29 Juni 2022, dan ini masih menjadi ancaman untuk dua tahun ke depan.
2. Persentase SILPA terhadap APBD (8,54% dari target 1,42% → SR)
Yang disumbangkan karena efisiensi belanja, tidak tercapainya target belanja, dan penundaan penyertaan modal pada BUMD.
3. Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan (37,21% dari target 15,64% → SR)
Yang disebabkan peningkatan kesadaran korban KDRT baik perempuan maupun anak dalam melaporkan kasusnya dan keinginan untuk mendapatkan pendampingan sampai dengan kasusnya tertangani bahkan bisa menjadi mandiri baik secara social maupun ekonomi.
4. Jumlah Raperda yang disetujui DPRD (8 dari target 15 raperda → R)
Yang disebabkan kurangnya kesiapan materi dari OPD pengusul dan adanya perubahan per Undang-undangan dari tingkat pusat.

Secara makro, progress capaian 11 indikator tujuan dan 38 indikator sasaran pembangunan sampai dengan tahun 2022, diperoleh rata-rata untuk indikator tujuan sebesar 106,95% dengan predikat Sangat Tinggi (ST), dan rata rata capaian untuk 38 indikator sasaran sebesar 103,14% dengan predikat

Sangat Tinggi (ST). Jika dibandingkan terhadap target tahun 2022, sebanyak 10 indikator tujuan atau sebesar 90,90% termasuk pada kategori kinerja Sangat Tinggi (ST), dan sebanyak 1 indikator atau sebesar 9,09% pada kategori kinerja Tinggi (T), yaitu indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH).

Sedangkan dari sebanyak 38 indikator sasaran, terdapat 33 indikator memiliki kinerja dengan kategori kinerja Sangat Tinggi (ST), sebanyak 2 indikator dengan kategori kinerja Tinggi (T) yaitu Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks SPBE, sebanyak 2 indikator kategori Sedang (S) yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), dan Indeks Profesionalitas ASN, dan sebanyak 1 indikator kategori kinerja Sangat Rendah (SR), yaitu nilai ekspor.

Tidak tercapainya indeks kualitas lingkungan hidup (sebesar 51,32 dari target 66,84) berkaitan erat dengan tidak tercapainya Indeks Kualitas Air (sebesar 52,33 dari target 52,73) dan Indeks Kualitas Udara (sebesar 77,38 dari target 95,40) sebagai komposit. Penurunan IKA disebabkan terdapat perubahan parameter penilaian IKA (menurut Permen LHK No.27 tahun 2021), terkait fecal coliform yang dalam hal ini di Kota Semarang kandungan fecal coliform pada air sungai disumbangkan terbesar oleh sampah domestik dan kotoran ternak. Sehingga perlu pengetatan aturan larangan membuang sampah/limbah ke sungai bagi masyarakat.

Sedangkan tidak tercapainya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan realisasi sebesar 3,38 (Baik) dari target sebesar 4,1 disebabkan pada domain manajemen SPBE yang terdiri dari aspek penerapan manajemen SPBE dan aspek Audit TIK, masih jauh dari standar ideal (terrealisasi 2,64 dari skala 5). Sedangkan dari domain Kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE dan Layanan SPBE menunjukkan skor diatas 3. Dengan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) yang merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) diharapkan dapat mengungkit Indeks SPBE Kota Semarang mendatang.

Rendahnya capaian nilai ekspor sebesar US\$ 1.242.337.131 dari target US\$ 3.272.281.681,82 disebabkan diantaranya karena harga bahan baku beberapa komoditi meningkat sehingga menyebabkan beberapa komoditi mengalami kenaikan harga dan menyebabkan penurunan volume permintaan ekspor. Selain itu tidak terdapat permintaan komoditi secara masif seperti pada waktu pandemi (APD dan Masker) sehingga tidak melakukan ekspor secara besar-besaran. Juga menurunnya permintaan barang, karena banyak negara sasaran ekspor terutama negara Eropa mengalami krisis akibat perang Rusia-Ukraina.

Sedangkan Indeks Profesionalitas ASN hanya terealisasi sebesar 51,23 dari target 82,5 disebabkan sejak tahun 2021 sudah tidak lagi dilakukan penilaian mandiri. Mendasarkan Surat Kepala Kantor Reg I BKN Yog No 172/BM.02.01/C.II/2022 tgl 5 Okt 2022 tentang Laporan Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2021 = 51,23 dengan kategori "Sangat Rendah". Dan dari 4 aspek penilaian yang ada, pada aspek kompetensi ASN yang masih memerlukan pengembangan. Untuk itu perlu perhatian dari Pemerintah Kota Semarang untuk pemenuhan aspek aspek dalam penilaian Profesionalitas ASN.

Jika dibandingkan target akhir RPJMD, sebanyak 4 indikator tujuan memiliki kinerja telah mencapai target akhir RPJMD, dan 7 indikator tujuan akan mencapai target akhir RPJMD. Sementara itu pada indikator sasaran, sebanyak 11 indikator sasaran telah mencapai target akhir RPJMD, dan

sebanyak 27 indikator sasaran belum mencapai target akhir RPJMD. Berikut disajikan secara rinci capaian dari 10 indikator Tujuan dan 38 indikator Sasaran Pembangunan Tahun 2022.

Tabel 2.125.

Capaian Kinerja Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran Pembangunan RPJMD Kota Semarang sampai dengan Tahun 2022

Tujuan	Indikator Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian		
				2022	2022	%	2026	2022		
1	Meningkatnya kualitas dan kapasitas sumber daya manusia	Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		poin	83,20 - 83,60	84,08	101,06%	84,80 - 85,20	99,15%	
		1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,56	15,54	99,87%	15,64	99,36%
			Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,57	10,8	102,18%	10,65	101,41%	
			Angka Harapan Hidup	Tahun	77,44	77,69	100,32%	77,62	100,09%	
		Tingkat Kearifan Budaya Lokal		Persen	45,95	61,52	133,88%	72,50	84,86%	
		2	Meningkatnya kearifan budaya lokal	Persentase Tingkat kearifan budaya lokal	Persen	45,95	61,52	133,88%	72,50	84,86%
2	Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka		Persen	8,70-9,00	7,6	115,56%	5,90-6,20	115,56%	
		3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Persentase Tingkat partisipasi masyarakat	Persen	91,56	91,67	100,12%	96,68	94,82%
		4	Meningkatnya produktivitas dan keterampilan tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	70,04	70,96	101,31%	70	101,01%
				Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	Persen	76,00	72,74	95,71%	80	90,93%
		Angka Kemiskinan		Persen	4,24-4,34	4,25	102,07%	3,51-3,74	113,64%	
		5	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	Persen	15,80 - 16,10	11,06	131,30%	14,60 - 14,90	125,77%
		6	Terwujudnya pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial	Persentase Penanganan PPKS	Persen	99,75	100	100,25%	100	100,01%
3	Meningkatnya pertumbuhan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	ST	5,50-6,00	5,73	104,18%	5,90-6,60	97,12%		

Tujuan	Indikator Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian		
				2022	2022	%	2026	2022		
ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing	7	Meningkatnya produk unggulan daerah	Nilai Ekspor	US\$	3.272.281,681,82	1.242.337.131	37,97%	3.828.106.736,21	32,45%	
		Persentase peningkatan kunjungan wisata	Persen	6,00	100,59	200,00%	6,00	200,00%		
	8	Meningkatnya nilai tambah ekonomi	Persentase peningkatan nilai investasi	% (Juta Rupiah)	10% (24.086.799 juta Rp)	10,24% (24.662.472 juta Rp)	102,40%	7 (31.326.856 juta Rp)	78,73%	
			PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	Juta Rupiah	103,16	137,12	132,92%	105,59	129,86%	
			Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB	Persen	28,70	29,75	103,66%	28,98	102,66%	
			Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	28,68	28,85	100,59%	28,76	100,31%	
4	Meningkatnya pemenuhan hak dasar, kesetaraan gender, dan kondusivitas wilayah bagi masyarakat secara berkeadilan	Indeks Demokrasi		Nilai	72,20	95,35	132,06%	73,60	129,55%	
		9	Meningkatnya internalisasi ideologi Pancasila serta Wawasan Kebangsaan	Indeks Pembumihian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK)	Indeks	73,00	82,13	112,51%	75	109,51%
		10	Meningkatnya akses dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai Indeks	75	73,64	98,19%	75,50	97,54%
		Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban		Persen	11,14	10,16	108,80%	8,85	114,80%	
		11	Meningkatnya kualitas ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	Kejadian	1.300	1335	97,31%	1176	86,48%

Tujuan	Indikator Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian		
				2022	2022	%	2026	2022		
5	Terwujudnya pembangunan kota yang tangguh, produktif, dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		Persen	66,84	51,32	76,78%	67,52	76,01%	
		12	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam	Indeks Kualitas Air	Nilai Indeks	52,33	33,76	64,51%	52,73	64,02%
				Indeks Kualitas Udara	Nilai Indeks	95,40	77,38	81,11%	96,20	80,44%
				Penurunan Emisi CO2	Ton CO2e	143.448	247.855,14	172,78%	198.965,07	124,57%
				Persentase sampah perkotaan yang tertangani	Persen	73	73,31	100,42%	69,00	106,25%
				Persentase ruang terbuka hijau	Persen	44,82	44,36	98,97%	45,83	96,79%
				Indeks Kinerja Sistem Infrastruktur		Nilai	84	84,73	100,87%	90
		13	Meningkatnya pemerataan pelayanan sarana dan prasarana perkotaan	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu	Persen	53	53,98	101,85%	79	68,33%
				Persentase perencanaan regional dan kota yang terintegrasi	Persen	63	64,00	101,59%	84	76,19%
				Persentase kawasan banjir dan rob	Persen	3,50	3,48	100,57%	3	80,00%
		14	Terwujudnya sarana dan prasarana dasar permukiman yang berkualitas	Persentase lingkungan permukiman sehat	Persen	97,00	98,78	101,84%	100	98,78%
				Persentase rumah layak huni	Persen	98,87	98,34	99,46%	100	98,34%
		15	Terwujudnya tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan	Persentase tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan	Persen	83	81,30	97,95%	91	89,34%

Tujuan	Indikator Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian	
				2022	2022	%	2026	2022	
	16	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana	Nilai	113	103,49	108,42%	105	101,44%
	17	Mewujudkan sistem transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Rasio	0,5761	0,58	100,68%	0,60	96,76%
			Pengurangan jumlah titik/ruas rawan macet	Jumlah	3	3	100,00%	0	25,00%
6	Terwujudnya reformasi birokrasi yang mumpuni, terbuka, melayani dan bertanggung jawab	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai Indeks	72,00	72,68	100,94%	79,20	91,77%	
	18	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai/ Predikat	ST	70,35	97,71%	>80/A	87,94%
			Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100,00%	WTP	100,00%
	19	Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai Indeks	82,50	51,23	62,10%	85	60,27%
			Indeks SPBE	Skor 0-5	4,1	3,38	82,44%	5	67,60%
			Nilai dan status kinerja Pemerintah Daerah (Nilai EKPPD)	Nilai	>3,45/ST	3,4395	99,70%	>3,49/ST	98,55%
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks	87,50	88,63	101,29%	90	98,48%

Sumber: Data Bappeda Kota Semarang (diolah), 2023

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pokok pembangunan di Kota Semarang secara umum dapat terpilah dalam tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan; kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan; pembangunan yang masih diprioritaskan di wilayah tertentu sehingga masih memunculkan adanya kesenjangan wilayah; daya saing daerah dalam bidang ekonomi yang masih perlu didorong dan diperkuat; masih perlunya upaya dalam rangka pemenuhan kedaulatan pangan; pengelolaan sumber daya alam lingkungan hidup dan penanganan bencana yang masih harus ditingkatkan; serta penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang belum optimal, disamping diperlukan juga strategi penanganan dan pemulihan dampak pandemi Covid-19 diberbagai sektor.

2.3.1. Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis Pembangunan Tahun 2024

Permasalahan pembangunan di Kota Semarang diidentifikasi melalui data dan informasi berdasarkan gambaran umum kondisi pembangunan daerah di Kota Semarang. Yang menjadi catatan, gambaran umum di Kota Semarang tidak semua mencerminkan penurunan capaian namun hal ini dapat diidentifikasi sebagai akar permasalahan di Kota Semarang dengan dasar bahwa Kota Semarang adalah kota metropolitan yang tidak lagi mentolerir kondisi-kondisi minor seperti halnya angka kemiskinan, permukiman kumuh dan kondisi minor lainnya, apalagi pasca pandemi menunjukkan penurunan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, meskipun posisi Kota Semarang saat ini untuk beberapa indikator makro ekonomi masih diatas rata-rata Jawa Tengah bahkan tingkat nasional.

Berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah sampai dengan tahun berjalan dan realisasinya terhadap target akhir RPJMD maka permasalahan pembangunan daerah Kota Semarang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Tingkat kesejahteraan masyarakat masih perlu ditingkatkan, dengan akar permasalahan yaitu:
Belum optimalnya penyediaan akses kebutuhan dasar dan pemberdayaan warga miskin; masih perlunya optimalisasi lembaga sosial untuk perlindungan masalah sosial; masih perlunya penguatan jaring pengaman sosial; serta kualitas lingkungan permukiman yang masih perlu ditingkatkan.
- b. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan, dengan akar permasalahan yaitu:
Belum optimalnya kualitas pelayanan pendidikan utamanya pendidikan inklusi dan peningkatan Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) utamanya pada capaian mutu minimal layanan dasar, kualitas mutu pendidikan, masih adanya anak putus sekolah dan belum optimalnya pendidikan non formal; kualitas sarpras pendidikan, masih belum optimalnya layanan kesehatan di semua tingkatan, masih terdapat balita stunting; masih tingginya angka pengangguran (diatas provinsi dan nasional) ; serta masih perlu ditingkatkannya kapasitas masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan.
- c. Pembangunan yang masih diprioritaskan diwilayah tertentu sehingga masih memunculkan adanya kesenjangan wilayah, dengan akar permasalahan yaitu:
Akses konektivitas antar wilayah yang belum seluruhnya terbangun; Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang menurun, utamanya dari aspek Indeks Kualitas Air dan Tutupan Lahan; waktu tempuh kendaraan yang masih belum optimal mengindikasikan kondisi rawan macet; serta kawasan strategis dan infrastruktur wilayah yang perlu ditingkatkan.
- d. Daya saing daerah dalam bidang ekonomi yang masih perlu didorong dan diperkuat, dengan akar permasalahan yaitu:
Belum optimalnya keterlibatan UKM dalam pengembangan program Ekonomi Kreatif, penguatan kelembagaan dan pemenuhan standar baku ekspor bagi UMKM dan IKM, perlunya peningkatan akses permodalan, pemasaran produk koperasi dan IKM, serta minimnya kompetisi usaha kecil menengah dalam kegiatan ekspor produknya; dan perlunya Optimalisasi Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata serta Pengembangan Kerjasama Destinasi MICE.
- e. Masih perlunya upaya dalam rangka pemenuhan kedaulatan pangan, dengan akar permasalahan yaitu:
Ketersediaan akses pangan yang belum optimal dan perlunya mengurangi ketergantungan pada sumber bahan pangan tertentu, serta belum optimalnya pemanfaatan lahan tidak produktif untuk meningkatkan pemenuhan gizi

- keluarga, Perluasan dan keberlanjutan urban farming dengan mengoptimalkan potensi yang ada di wilayah.
- f. Pengelolaan sumber daya alam lingkungan hidup dan penanganan bencana yang masih harus ditingkatkan, dengan akar masalah:
Masih adanya genangan banjir dan rob serta tanah longsor; pohon tumbang; minimnya sistem peringatan dini kebencanaan, pemenuhan resptime kebencanaan serta upaya pengurangan resiko bencana yang masih rendah.
- g. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang belum optimal, dengan akar permasalahan yaitu:
Belum optimalnya akses, kemudahan dan sarana prasarana pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan daerah masih perlu peningkatan kualitasnya terkait dengan terbitnya regulasi yang sangat berpengaruh pada struktur keuangan, penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas sesuai ketentuan dan pengawasan internal daerah, dan perlunya menekan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam rangka menjaga kondusifitas menjelang Pilkada serentak.

Selain memperhatikan permasalahan yang dirumuskan dari data dan informasi yang sudah ada, perumusan prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2024 juga harus memperhatikan isu-isu sebagai berikut:

Isu Strategis Pembangunan Daerah

Dari identifikasi permasalahan pembangunan daerah di Kota Semarang serta dengan memperhatikan lingkungan strategis daerah, maka dapat dirumuskan isu strategis pembangunan Kota Semarang tahun 2024 sebagai berikut:

- 1) Kemiskinan, diprioritaskan pada upaya-upaya untuk:
Menanggulangi dan menurunkan angka kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan lingkup cara menyediakan akses kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan bagi warga miskin; meningkatkan perlindungan sosial melalui kualitas permukiman, perlindungan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan penyandang disabilitas, meningkatkan kualitas sarpras rehabsos; serta melakukan pemberdayaan kepada warga miskin dengan cara penguatan kelembagaan dan penguatan kampung tematik.
- 2) Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia, diprioritaskan pada upaya-upaya untuk:
 - meningkatkan kualitas pendidikan dan angka partisipasi sekolah dengan lingkup pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan inklusi dan pendidikan non formal (kesetaraan);
 - meningkatkan layanan kesehatan dengan lingkup pelayanan kesehatan masyarakat secara gratis, peningkatan kesehatan keluarga dan kesehatan lingkungan, peningkatan upaya promotif dan preventif, serta peningkatan sarana prasarana kesehatan masyarakat, pencegahan serta penanganan stunting, penurunan unmet need dan kehamilan pada usia kurang dari 20 tahun;
 - menurunkan angka pengangguran dengan cara meningkatkan kesempatan kerja dan jaringan ketenagakerjaan, meningkatkan kualitas daya saing tenaga kerja melalui sertifikasi tenaga kerja, dan penempatan tenaga kerja, terutama untuk lanjutan penerima manfaat Kartu Pra Kerja
 - meningkatkan kapasitas masyarakat dalam berpartisipasi untuk pembangunan daerah dengan lingkup cara penguatan pemberdayaan gender serta penguatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
- 3) Kesenjangan wilayah, diprioritaskan pada upaya-upaya untuk: membangun konektivitas pusat-pusat ekonomi dengan lingkup cara peningkatan akses wilayah di pusat-pusat pertumbuhan, mengurangi titik dan simpul kemacetan, serta meningkatkan kawasan strategis dan infrastruktur wilayah.

- 4) Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha, di prioritaskan pada upaya-upaya untuk:
Meningkatkan potensi unggulan daerah yang berdaya saing dengan lingkup cara peningkatan investasi, peningkatan jaringan distribusi produk, peningkatan sarana , PIRT, sertifikasi halal , HAKI dan event yang langsung dapat dinikmati oleh pelaku usaha kecil dan mikro, peningkatan kunjungan wisatawan melalui pengembangan serta promosi destinasi wisata dan seni budaya lokal, pengembangan sistem pendukung usaha bagi koperasi dan IKM melalui akses permodalan, branding serta pemasaran, juga mendorong ekspor produk UMKM agar mampu bersaing dipasar internasional.
- 5) Kedaulatan pangan dan energi, diprioritaskan pada upaya-upaya untuk:
Melakukan penguatan ketahanan pangan dengan lingkup cara Meningkatkan akses dan ketersediaan pangan yang difokuskan pada peningkatan produksi, penguatan ketersediaan dan distribusi pangan, Perluasan dan keberlanjutan urban farming dengan mengoptimalkan potensi yang ada di wilayah, serta penanganan daerah rawan pangan.
- 6) Keberlanjutan Pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumberdaya alam, diprioritaskan pada upaya-upaya untuk:
Menanggulangi kejadian bencana dengan lingkup cara mengatasi rob, banjir dan tanah longsor yang kerap terjadi Kota Semarang, serta peningkatan upaya dalam mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana, selain itu juga pengelolaan, pengolahan dan pemanfaatan sampah menjadi energi maupun barang yang bernilai ekonomi lebih.
- 7) Tata kelola pemerintahan, diprioritaskan pada upaya-upaya untuk:
 - Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui perwujudan birokrasi yang profesional dengan cara meningkatkan efektifitas kelembagaan perangkat daerah dan meningkatkan kualitas sumber daya aparatur (Indeks Profesionalitas ASN); peningkatan kualitas ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan demokrasi dan sadar hukum; serta peningkatan kinerja pemerintah daerah dengan penerapan *smart city* serta penguatan akuntabilitas dan kualitas dokumen perencanaan.
 - Memantapkan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas pelayanan publik untuk kemudahan pelayanan publik dan kemudahan investasi di Kota Semarang.

2.4 Inovasi Daerah

Inovasi menjadi kata kunci dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan sekaligus untuk akselerasi pencapaian pembangunan daerah. Melalui inovasi maka penggunaan sumber daya akan dapat diefektifkan, sehingga akan tumbuh budaya kerja cerdas. Inovasi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang telah dilingkupi dalam Sistem Inovasi Daerah (SIDa) agar ada sinergi dalam proses inovasi. Inovasi yang sedang dan telah dikembangkan oleh Pemerintah Kota Semarang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.126.
Inovasi Daerah Yang Telah Dilaksanakan

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
1	Alokasi anggaran untuk Fasilitasi Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	Untuk memfasilitasi hasil Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan, dialokasikan anggaran (dedicated) untuk melaksanakan hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan, sehingga proses

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
		partisipatif dari hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan dapat terjamin akan direalisasikan.
2	Gerbang Hebat	Gerbang Hebat adalah kependekan dari Gerakan Bersama Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Melalui Harmonisasi Ekonomi, Edukasi, Ekosistem dan Etos Bersama Masyarakat. Gerbang Hebat merupakan gerakan terpadu untuk penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dengan memanfaatkan seluruh potensi dan sumber daya yang ada.
3	Situation room	Situation room digunakan untuk memantau situasi Kota Semarang. Di ruangan tersebut terdapat smart table, ruang diskusi, Call Center, dan ruang monitoring CCTV.
4	Kampung Tematik	Kampung Tematik adalah suatu wilayah di bawah administrasi kelurahan yang menunjukkan jatidiri/identitas/makna masyarakatnya atas suatu potensi lokal yang diangkat dan ditonjolkan atas hasil kesepakatan masyarakat. Kampung Tematik dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan potensi lokal; meningkatnya kualitas lingkungan permukiman; dan mengangkat kearifan lokal dalam mengelola potensi dan memecahkan permasalahan ekonomi, sosial dan lingkungan.
5	Smart City	Untuk pengembangan menuju Kota Cerdas, telah disusun Rencana Induk Semarang Kota Cerdas yang diintegrasikan dengan dokumen perencanaan. Semarang Smart City dapat diakses pada portal smartcity.semarangkota.go.id.
6	SiPU (SIM Jalan)	Untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan jalan di Kota Semarang, dikembangkan SIM Jalan yang memuat data jalan dan historis pembangunan/rehabilitasi jalan yang ada. Data disajikan dalam bentuk visual, tabular dan berbasis spasial (peta).
7	SiPU (SIM Pedestrian Jalan)	Untuk melihat kondisi eksisting serta rencana pengembangan pedestrian jalan, dikembangkan SIM Pedestrian yang memuat data visual, peta (spasial) dan data teknis.
8	One Map Semarang	Website yang berisi informasi geospasial dasar dan tematik yang dapat diakses dan diunduh publik sebagai data spasial dasar yang wajib digunakan oleh seluruh stakeholder terkait di Kota Semarang.
9	Aplikasi Satu Data	Aplikasi yang akan menjadi sumber rujukan data-data penyelenggaraan pemerintahan di Kota Semarang.

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
10	Pangripta	Inovasi Sistem informasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang yang berisi informasi mengenai data usulan musrenbang, informasi rencana pembangunan, dan prioritas pembangunan di Kota Semarang
11	Jurnal Riptek	Terbitan berkala ilmiah milik Pemerintah Kota Semarang yang berisi mengenai artikel hasil penelitian yang dilakukan di wilayah Kota Semarang. Jurnal Riptek memiliki ISSN Cetak 1978-8320 dan ISSN Elektronik 2716-3482 terbit 2 kali dalam setahun. Jurnal Riptek sudah terindeks di Google Scholar dan Directory of Open Journal Access (DOAJ).
12	Si Amanah Bergas (Sistem Perencanaan Air Minum dan Sanitasi Semarang Hebat Bergerak Bersama Gapai Sanitasi Sehat)	Sistem informasi dan monitoring evaluasi sektor air minum dan sanitasi Kota Semarang. Inovasi ini berisi mengenai data spasial di sektor air minum dan sanitasi mulai dari pelayanan air minum perpipaan oleh PDAM dan non perpipaan yang berasal dari program Pamsimas, DAK, Bankeu, dan APBD Kota Semarang, kemudian pelayanan air limbah skala permukiman dan layanan persampahan dari hulu sampai hilir dengan kedetailan data tingkat kelurahan di seluruh Kota Semarang.
13	Website Siaga Corona	Website yang berisi mengenai berbagai informasi terkait dengan penanganan Covid-19 di Kota Semarang. Mulai dari perkembangan kasus harian, informasi bantuan sosial, jadwal penyemprotan disinfektan, monitoring bahan pokok, ketersediaan alat kesehatan, dan informasi terkait lainnya.
14	E-Sarapan	Sebagai sarana untuk penyampaian aspirasi dari Rakyat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan lebih cepat, dan Terbuka. Hal ini berkaitan juga dengan realisasi program Parlemen Modern, dimana salah satu indikatornya adalah adanya keterbukaan informasi / Transparansi Publik.
15	Kredit Wibawa	Kredit Wibawa adalah kredit Wirausaha Bangkit Jadi Jawara. Kredit Wibawa merupakan kredit tanpa agunan untuk usaha mikro dengan bunga 3% per tahun.
16	Call Center 112	Untuk kedaruratan, warga Kota Semarang dapat menghubungi 112 untuk mendapatkan layanan kedaruratan.

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
17	Kebijakan cashless pada layanan publik	Untuk mendukung terwujudnya <i>cashless society</i> , maka dikembangkan Kartu Semarang Hebat yang bisa digunakan untuk transaksi non tunai dengan diskon di berbagai merchant dan layanan yang dikelola oleh Pemerintah Kota Semarang. Pembayaran non tunai juga dikembangkan untuk bis Trans Semarang dengan berbagai vendor penyedia (OVO, GoPay, TCash, Yap!)
18	Universal Health Coverage	Pemerintah Kota Semarang memberikan jaminan kesehatan gratis rawat inap di Rumah Sakit kelas 3 bagi seluruh warga Kota Semarang.
19	Konsultasi Dokter Gratis	Konter adalah sistem pemberian informasi kesehatan secara gratis kepada masyarakat melalui telepon dan WhatsApp.
20	Ambulans dan Motor Hebat	Untuk kegawatdaruratan, warga Kota Semarang dapat mengakses layanan Ambulans Hebat dan Motor Hebat secara Gratis.
21	Co-Working Space gratis	Untuk memfasilitasi komunitas, terutama dalam pengembangan ekonomi kreatif, Pemerintah Kota Semarang mengembangkan Semarang Digital Kreatif (SDK) yang merupakan co-working space yang dapat dimanfaatkan secara gratis untuk mengembangkan produk ekonomi kreatif.
22	Integrasi CCTV sampai ke RT	Pengadaan dan pemasangan 1 CCTV untuk 1 RT di seluruh wilayah Kota Semarang yang terintegrasi dengan situation room secara realtime.
23	Lek Paijo (Layanan Elektronik Pajak Daerah melalui Sistem Informasi Jaringan Online)	Aplikasi cetak mandiri Salinan PBB, BPHTB serta tanda lunas PBB.
24	LAYANAN SIAGA (SIAP KAWAL KELUARGA)	Layanan SIAGA merupakan layanan Gratis yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung dan belum ada sebelumnya. Layanan ini terintegrasi dengan Puskesmas dan Call Center 1500-132 dengan Aplikasi PERIKSA-IN (Pelayanan Resiko Kesehatan Intervensi). Adapun jenis layanan yang diberikan antara lain Home Care, Penjemputan Pasien, Intervensi Lanjut Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK), Merujuk, P3K dan Pengobatan Gratis.
25	PUSTAKA (Puskesmas Tanpa Antrian)	Fasilitas kemudahan bagi masyarakat untuk berobat ke Puskesmas tanpa harus menunggu antrian. Masyarakat hanya cukup melakukan pendaftaran melalui SMS/WA ke Nomor Puskesmas yang dituju, Pasien selanjutnya akan mendapatkan nomer antrian dan jam kedatangan. Pada hari yang di tentukan, pasien menuju <i>Customer Services</i> untuk melakukan

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
		konfirmasi kedatangan dan langsung menuju poliklinik pemeriksaan.
26	GIAT (GERAKAN IBU ANAK SEHAT)	dengan pendekatan "5 SEKAWAN" merupakan upaya bergerak bersama untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan ibu dan anak, untuk mencegah kematian ibu anak di Kota Semarang, dengan melibatkan: 1. Masyarakat; 2. Organisasi Profesi; 3. Puskesmas; 4. Rumah Sakit; 5. Lintas Sektor/Swasta.
27	KOMUKKU (Komunikasi Kesehatan Ibu)	Merupakan upaya promotif dan preventif penurunan Kematian Ibu di Kota Semarang melalui pendekatan <i>Service Oriented</i> dengan memanfaatkan Teknologi Informasi melalui Media Dalring (Dalam Jaringan), yang terdiri dari: 1) Aplikasi Sayang BUnda; 2) Jawil Bumil/Bufas dengan WhatsApp; 3) Penyuluhan kesehatan Ibu Hamil/Nifas melalui media sosial Instagram dan Youtube.
28	Si Lampah	Aplikasi pelaporan masyarakat khususnya mengenai sampah yang terjadi di lokasi sekitar masyarakat yang melapor. Secara khusus aplikasi ini memanfaatkan geo tagging yang melekat dalam smartphone.
29	LEGO Digital	Legalisasi Online Digital Dokumen Kependudukan.
30	Lumpia (Layanan Urus Mandiri Paket Integrasi Administrasi Kependudukan) Dukcapil	Penyelenggaraan layanan pengurusan, penerbitan dan digitalisasi dokumen kependudukan dengan sistem paket (satu kali pengurusan, dokumen mendapatkan 2, 3, atau 4 dokumen terkait).
31	Klinik "APEL" (Anak, Perempuan dan Lansia) (RSWN)	merupakan bentuk implementasi pendekatan Whole of Government (WoG) dimana fungsi-fungsi pelayanan diintegrasikan satu atap secara koordinatif dan heterarkis.
32	"Si Kingkong"	Solusi Kesenambungan Asuhan Pasien Pasca Rawat Inap Dan Percepatan Pelayanan Pasien Rawat Jalan.
33	JEMPOL TIGER JAPRI (Jemput Bola Tim Gerak Kerja Cepat dan Responsif)	Penyelenggaraan layanan adminduk berbasis JEMPUT BOLA yang dilaksanakan oleh Tim Penanganan Pengaduan (TPP) dan Tim Gerak Cepat (TIGER CEPAT) Disdukcapil kepada penduduk berkebutuhan khusus (difabel, panti jompo, panti sosial dan orang sakit) atas pelaporan dan permohonan dari pihak keluarga dan instansi terkait yang berwenang.

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
34	Sistem Informasi Geografis Lampu Jalan (PJU)	Peralatan inventarisasi dan pemantauan aset titik lampu dan KWH meter PJU di Kota Semarang.
35	Lapor PJU	Pengaduan lampu jalan di lingkungan masyarakat dan jalan protokol dan ditindaklanjuti dengan SOP 2 hari kalender.
36	KB Perusahaan	Meningkatkan pelayanan KB kepada buruh pabrik agar mendapatkan pelayanan KB tanpa meninggalkan tempat kerja.
37	KB Online	Memberikan informasi pelayanan KB melalui media Online.
38	Puskesmas 7G	Layanan puskesmas yang Gak Ribet (buka sampai sore), Gak Antri (dengan layanan PUSTAKA), Gesit (paperless), Gratis (bagi masyarakat dengan KTP Kota Semarang), dan <i>Go Cashless</i> bayar (pembayaran non tunai), Gemati (indeks kepuasan masyarakat), Gak lemot (layanan sesuai SOP dan telemedicine)
39	Si Imut (Sistem Izin Investasi Mudah dan Terpadu)	Merupakan sebuah sistem informasi berupa aplikasi berbasis web yang mengelola proses pelayanan perizinan dan non perizinan yang ada pada Pemerintah Kota Semarang, dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Masyarakat dapat mengajukan permohonan perizinan dengan mudah dan praktis, dilayani oleh sistem dimanapun dan kapanpun. Beberapa persyaratan perizinan yang sama juga dapat disatukan dengan prinsip berbagi data dan dokumen juga memfasilitasi berbagi data instansi yang terkait dengan perizinan di Pemerintah Kota Semarang.
40	Paket Perizinan Investasi Reklame dan IMB Pertandaan (PARI MESEM)	Merupakan sebuah layanan percepatan paket perizinan, dalam hal ini perizinan reklame dan IMB pertandaan, layanan percepatan paket ini dituangkan dalam sistem informasi/aplikasi berbasis web yang terintegrasi pada aplikasi SI IMUT. Layanan ini menyederhanakan beberapa persyaratan yang terdapat pada perizinan reklame dan IMB pertandaan, sehingga persyaratan tersebut lebih sedikit dan sederhana, dengan cara berbagi pakai data dan dokumen digital diantara 2 (dua) izin yang berbeda. Layanan penyederhanaan ini difasilitasi dalam aplikasi SI IMUT.
41	Buka Invest Semarang Bisniz (SEMBIZ)	Merupakan sistem informasi berupa aplikasi berbasis web yang membantu investor maupun pelaku usaha untuk dapat saling menemukan peluang berusaha atau berinvestasi. Para pelaku usaha dapat menampilkan produk yang dijual maupun yang disewakan, sehingga investor dapat mencari dan memilih pelaku usaha untuk berinvestasi.

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
42	Pilot project Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (Angin)	Inisiatif pengembangan energi baru dan terbarukan dengan memanfaatkan energi angin untuk menghasilkan energi listrik dengan kapasitas 4 kWp yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Selanjutnya Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (Angin) ini digunakan sebagai laboratorium.
43	Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Land Fill Gass	Dilaksanakan berdasarkan Perpres Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional, dimana Kota Semarang merupakan satu dari 12 kota yang ditunjuk untuk menjalankan proyek tersebut. Berlokasi di TPA Jatibarang, dengan estimasi nilai investasi 2,2 T, jumlah sampah yang diolah 1000 ton/hari, dan kapasitas energi yang dihasilkan 19 MW.
44	Converter Kit CNG untuk Bus Trans Semarang	Pemasangan converter kit yang bisa menjadikan bahan bakar bus menjadi hybrid yang mengatur komposisi bahan bakar 70% CNG dan 30% solar yang lebih rendah emisi.
45	SAN PIISAN (SAyaNgi dan damPIngi Ibu dan Anak Kota SemarANG)	Upaya promotif untuk menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi serta Stunting di Kota Semarang melalui keterlibatan masyarakat, pengusaha dan Rumah Sakit, yang terintegrasi dengan inovasi kesehatan lainnya (Ambulans HEBAT, UHC, Jampersal), serta Aplikasi Sayang Bunda, Jawil Bumil/ Bufas dengan WhatsApp, Penyuluhan kesehatan Ibu Hamil/ Nifas melalui media Sosial Instagram dan Youtube.
46	Smart Lighting	Inovasi untuk mengatur penggunaan lampu PJU melalui sistem informasi.
47	Pemasangan panel surya di instansi Pemerintah Kota	Inisiatif untuk menggunakan panel surya sebagai sumber tenaga listrik di kantor instansi pemerintah.
48	Kawasan kuliner Jalan Depok	Pengembangan Kawasan di Jalan Depok sebagai lokasi kuliner di malam hari.
49	e-retribusi PKL dan Pedagang Pasar	Pembayaran retribusi jasa pada pedagang di pasar dan PKL yang terdaftar melalui non tunai.
50	Si Pariem	Inovasi ini dilakukan untuk merubah pembayaran tunai menjadi non tunai dan terintegrasi dengan data perizinan pedagang yang ada di Dinas Perdagangan Kota Semarang. Bentuknya adalah penggunaan e-money untuk pembayaran retribusi pedagang setiap harinya. Pedagang membayar menggunakan kartu yang kemudian dibayarkan menggunakan EDC yang disediakan oleh petugas di lapangan.
51	SEMARisk	Sistem informasi kebencanaan berbasis web dan android yang merupakan bagian dari manajemen

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
		bencana dengan melibatkan peran aktif masyarakat agar siap siaga terhadap situasi dan waktu yang tepat berdasarkan informasi dari EWS secara online.
52	GEBER SEPTI (Gerakan Bersama Sekolah Semarang Peduli dan Tanggap Bullying)	Memberikan pelayanan prima dalam bidang kesehatan mental anak dan remaja berbasis teknologi dengan menyediakan layanan konseling online dan edukasi mengenai bullying kepada peserta didik, orang tua dan stakeholder sekolah.
53	SAMPOKONG (SAntri Milenial POndok Pesantren KOta SemaraNG)	Memberikan layanan pendidikan kesehatan untuk keluarga (preventif, promotif) dan Home Care. Kemudahan akses pelayanan kesehatan yang diberikan pada inovasi Sampokong ini dapat meningkatkan pencegahan penyakit, memulihkan kesehatan, memaksimalkan kemandirian serta meminimalkan dampak penyakit.
54	SECCON (Semarang Creative Content)	Inovasi dalam rangka pengembangan ekosistem industri kreatif, yang memperkuat jejaring kelembagaan dan sumber daya manusia pelaku industri kreatif, khususnya pada sektor konten, animasi, dan game di Kota Semarang. SECCON memiliki rencana pengembangan yang terstruktur setiap tahun untuk menuju tujuan inovasi yaitu membangun ekosistem industri kreatif.
55	TUNGGAL DARA	Inovasi yang bertujuan untuk mengintegrasikan kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit DBD di Kota Semarang sehingga dapat menekan angka kejadian DBD di Kota Semarang. Bentuk inovasi ini dimulai pada pelibatan seluruh komponen masyarakat dalam penanggulangan DBD, misalnya siswa sekolah (Sicentik), PKK, dan kader kesehatan lingkungan. Serta diperkuat dengan sistem informasi DBD yang terintegrasi untuk mempercepat respon dan pengambilan keputusan.
56	ASIKK PAK (Aplikasi Sistem Informasi dan Komunikasi Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak)	Pemkot Semarang melalui DP3A melihat peluang melalui perkembangan teknologi informasi untuk memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan perlindungan perempuan dan anak mulai dari pelaporan, pengaduan, pendampingan dan pencatatan serta evaluasi bahkan sebagai bahan sosialisasi/pencegahan dalam satu aplikasi kasus tindak kekerasan di Kota Semarang.
57	ATM Beras	Terobosan Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Ketahanan Pangan untuk membantu warga kurang mampu yang terdaftar dalam BDT (Basis Data Terpadu) tetapi belum menerima bantuan Beras Sejahtera (Rasta) maupun bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
58	Urban Farming Corner (UFC)	UFC bisa dimanfaatkan dengan sebaik baiknya oleh masyarakat Kota Semarang sebagai pusat edukasi dan informasi, juga tempat konsultasi mengenai pertanian perkotaan Kota Semarang. Pelatihan di UFC ini tidak hanya berisi penyampaian materi saja namun juga diikuti kegiatan lomba praktek penanaman sayur organik oleh para peserta.
59	YANKESTRAD (Pelayanan Kesehatan Tradisional)	RSUD KRMT Wongsonegoro menjadi Rumah Sakit pertama di Jawa Tengah yang memiliki program pengobatan tradisional. Konsep ini diangkat karena pengobatan tradisional Indonesia dengan berbagai ramuan herbalnya diyakini memiliki khasiat yang tidak kalah dengan obat-obatan lainnya. Pelayanannya meliputi akupunktur, akupressure, pijat anak, konsultasi obat herbal, pijat refleksi, dan pijat relaksasi.
60	GULO ASEM (Gerai Usaha Mikro Lokal online Asli Semarang)	Inovasi layanan pemasaran online dalam bentuk aplikasi katalog produk yang dikembangkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. Katalog Produk ini meliputi: produk kuliner, craft, fashion, dan ekonomi kreatif.
61	Pelangi Nusantara	Pelayanan kesehatan terkait gizi buruk bagi masyarakat Kota Semarang dengan pendekatan Continuum of Care 1000 Hari Pertama Kehidupan. Kegiatannya meliputi Wisata Edukasi Gizi dan Pelayanan Kesehatan bagi Balita Gizi Buruk dan Stunting
62	Akselerasi Smart City melalui IOT CCTV Analitik Kota Semarang	Merupakan inovasi digital dalam hal penggunaan IOT dalam CCTV sebagai sumber data dalam big data.
63	Semarang Satu Data Menuju Big Data	Tindak lanjut Penyelenggaraan Satu Data Indonesia dengan mengintegrasikan semua sistem melalui Portal Satu Data Kota Semarang pada data.semarangkota.go.id
64	Big Data Analitik Penggunaan Masker dan Kerumunan Bebas CCTV Analytics	Inovasi berupa sistem aplikasi pemantauan kerumunan massa dan pemakaian masker berbasis CCTV sebagai upaya mitigasi pandemi covid-19.
65	Streaming CCTV DPU Kota Semarang	Pengembangan aplikasi mobile smart infastruktur Kota Semarang berupa fitur Live Streaming CCTV.
66	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
67	SI LINTAS (Sistem Layanan Informasi Kota Semarang)	Pelayanan sistem keterbukaan informasi kepada masyarakat terutama penyandang difabel untuk

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
		mengoptimalkan pengawasan dan pelayanan informasi publik di Pemerintah Kota Semarang.
68	Strong	STRONG atau Integrasi Data Warehouse Penanganan Covid Kota Semarang adalah aplikasi covid yang merupakan integrasi pengelolaan data penanganan dengan memanfaatkan ICT sebagai basisnya.
69	<i>Integrated Smart System Platform (ISSP)</i> untuk Smart City Kota Semarang	Merupakan dokumen perencanaan dalam bentuk masterplan dan roadmap
70	APIK KERJAKU	Merupakan Akselerasi Pengurangan dan Perluasan Kesempatan Kerja melalui penyusunan grand design pelayanan ketenagakerjaan yang diintegrasikan dalam sistem informasi dan komunikasi (TIK)
71	Lunpia: Smart Tourism Penggerak Kepariwisata di Kota Semarang	Digital platform pariwisata untuk mempermudah wisatawan domestik maupun mancanegara untuk berkeliling Kota Semarang
72	E-Surat Aplikasi Surat Menyurat berbasis Tanda Tangan Elektronik	E-Surat Merupakan Aplikasi berbasis web yang berguna untuk mengelola Surat Menyurat antar OPD dilingkungan Pemerintah Kota Semarang
73	Opera Semarang	Penerapan teknologi digital barcode sebagai alat bantu untuk memberikan orientasi kepada pasien yang dapat diakses secara mandiri kapanpun pasien/keluarga membutuhkan informasi.
74	Dodolan E-Commerce e Wong Semarang (Dolan E-Semar)	Pemanfaatan teknologi E-Commerce analytics berupa kumpulan data berbagai marketplace melalui aplikasi ekonomi digital Dolan-e Semar.
75	E Fungsional	Pelayanan kepada seluruh pejabat fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang berbasis sistem melalui aplikasi "E-Fungsional" dengan mengintegrasikan ke dalam wadah layanan kepegawaian yaitu SISDM (Sistem Informasi Sumber Daya Manusia).
76	E-PENDAWA	E-PANDAWA atau Aplikasi Penataan Penetapan Perijinan Pendapatan dan Pengawasan dalam pengelolaan pasar tradisional di Kota Semarang
77	Siimoet	SI IMOET (Sistem Informasi Monitoring Emergency On Time) merupakan inovasi pelayanan untuk memberikan informasi dan pesan kepada pasien dan keluarga secara on time terkait pelayanan pasien di IGD

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
78	Sitrelo	Inovasi berupa aplikasi online untuk menunjang efisiensi komunikasi dan koordinasi pada proses pelaporan perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit.
79	Becak Kayu	Kegiatan rutin terapi bermain pada pasien anak untuk mengurangi tingkat kecemasan hospitalisasi setiap dua kali seminggu dan pemberian edukasi kesehatan bagi anak.
80	SI AMAN (Sistem Aplikasi Arsip Mandiri)	Aplikasi berbasis mobile untuk memantau Arsip tersimpan, Pengajuan, Pemusnahan, dan Peminjaman secara efektif tanpa perlu datang ke Dinas Arsip.
81	SATRIA BIRU	Inovasi terkait dengan pelayanan pertolongan dan penyelamatan masyarakat melalui "RANGER BIRU".
82	SIMKD	SIMKD yaitu Sistem Informasi Manajemen Kearsipan Digital yang dapat diakses masyarakat luas melalui website http://simkd.semarangkota.go.id untuk mencari IMB (ijin mendirikan bangunan), KRK (Keterangan Rencana Kota), HO (surat ijin Gangguan) yang tersimpan di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang.
83	Sitampan	SITAMPAN (Sistem Pangan Perkotaan) dengan melakukan reviu Rancangan Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG) melalui pengkajian pada sektor teknologi pada industri agro, peternakan, dan perikanan dalam mencukupi kebutuhan konsumsi daerah.
84	Portal Siaga Corona Pemerintah Kota Semarang berbasis Website	Inovasi dalam proses komunikasi publik melalui peluncuran kanal siagacorona.semarangkota.go.id terhadap permasalahan COVID-19 di Kota Semarang.
85	Aman Bertransportasi Umum di Semarang	Sistem pelayanan transportasi umum yang memastikan keamanan dan protokol kesehatan, memudahkan pengguna jasa mengetahui rute dan lokasi armada bus melalui Aplikasi Trans Semarang, dan penerapan transaksi non tunai.
86	Ramah Anak Semarang Selatan	Merupakan pelayanan berupa penyediaan Perpustakaan Mini atau Pojok Baca dan Pembuatan Taman Ramah Anak di Lingkungan Kecamatan Semarang Selatan diikuti dengan pemberian bimtek kepada petugas pelayanan.
87	Integrasi Server Cloud Pemerintah Kota Semarang	Cloud Computing (komputasi awan) merupakan gabungan pemanfaatan teknologi komputer (komputasi) dalam suatu jaringan dengan pengembangan berbasis internet yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan aplikasi yang dibutuhkan tanpa melakukan instalasi.

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
88	Tiker Mateng	Inovasi untuk mengatasi masalah kebersihan di Kota Semarang dengan membentuk tim yang terdiri dari seluruh petugas kebersihan di Kelurahan yang dinamai TIKER MATENG atau Tim Orange. Caranya dengan melakukan pelaporan pada sosial media Kecamatan ataupun call center (WA dan Telepon).
89	Quick Response Barcode (QR Code) Menuju Masyarakat Cerdas Kota Semarang	Quick Response Barcode (QR Code) sebagai program untuk meningkatkan minat membaca/ literasi di Kota Semarang melalui pemanfaatan media sosial untuk memudahkan masyarakat luas khususnya generasi milenial.
90	Minapolitan	Pengembangan perikanan terpadu menjadi konsep pengembangan kawasan Minapolitan untuk meningkatkan produksi perikanan air tawar di Kota Semarang, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan warga setempat, serta menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
91	<i>E-legal drafting</i>	<i>E-Legal Drafting System</i> hadir untuk meningkatkan pelayan penyusunan produk hukum daerah dengan berbasis elektronik (<i>smartphone</i>) yang akan memudahkan bagi para legal drafter dalam hal mengurus produk hukum secara lebih efektif dan efisien.
92	BOT Instagram - Monitoring dan Filter Keluhan di Kolom Komentar	Aplikasi BOT Instagram - Monitoring dan Filter Keluhan di Kolom Komentar Instagram Walikota Semarang dapat mengetahui lebih awal keluhan masyarakat khususnya Kecamatan Gajah Mungkur yang disampaikan dengan tujuan agar komentar dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait
93	BOT Whatsapp - Pelaporan Foto Kegiatan secara Otomatis dan Real Time	BOT Whatsapp - Pelaporan Foto kegiatan secara otomatis dan real time merupakan aplikasi pelaporan foto kegiatan kepada Camat Gajah Mungkur Kota Semarang secara cepat dan realtime sehingga tidak memudahkan dalam hal pelaporan kegiatan.
94	Anjungan dan Flyer Persyaratan Pelayanan Kantor Kecamatan Gajahmungkur	Anjungan dan Flyer Persyaratan Pelayanan Kantor Kecamatan Gajah Mungkur dapat memberikan kemudahan bagi warga masyarakat untuk mendapatkan informasi pelayanan publik melalui flyer yang menarik, informatif, singkat, dan padat di Kantor Kecamatan Gajah Mungkur.
95	Pakde Semar	Mobile Pakde Semar merupakan aplikasi yang dapat mewujudkan pelayanan pajak yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan mobilephone sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam mengurus pajak.
96	DJ Biker	Minimnya lowongan kerja bagi disabilitas maka hadirlah DJ Biker (Disabilitas Job Bisa Kerja) merupakan fitur baru yang ada pada aplikasi Smartnaker yang memiliki tujuan untuk membantu

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
		disabilitas dalam mencari lowongan pekerjaan di Kota Semarang
97	Tarif Difabel	Tarif Bus Rapid Transit (BRT) yang pada awalnya hanya dibedakan menjadi 2 kategori yaitu tarif umum dan tarif khusus, lalu pada tahun 2019 klasifikasi tarif diubah menjadi tarif umum Rp 3.500 dan tarif lanjut usia, tarif veteran, tarif mahasiswa, KIA dan penyandang disabilitas sebesar Rp 1.000.
98	SI KEPO (Sistem Informasi Ketetapan Pajak Daerah <i>On Line</i>)	SI KEPO (Sistem Informasi Ketetapan Pajak Daerah Online) hadir untuk meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat Kota Semarang dalam pelayanan perpajakan daerah secara digital serta untuk memaksimalkan pendapatan pajak daerah
99	Simkraf (Sistem Informasi Manajemen Pelaku Ekonomi Kreatif) Kota Semarang	Simkraf (Sistem Informasi Manajemen Pelaku Ekonomi Kreatif) Kota Semarang adalah sistem informasi yang diperuntukan sebagai platform pendataan bagi pelaku 17 sub ekonomi kreatif yang ada di Kota Semarang serta sebagai media informasi ekosistem pendukung ekonomi kreatif lainnya.
100	Pelayanan Informasi Administrasi melalui Whatsapp Costumer Service dan Linktree di Kelurahan Wonosari	Pelayanan Informasi Administrasi melalui Whatsapp Costumer Service dan Linktree di Kelurahan Wonosari digunakan untuk memudahkan masyarakat setempat untuk mendapatkan informasi secara online serta memanfaatkan media sosial facebook, twitter, dan instagram untuk menyampaikan keluhan dan penyampaian pelayanan.
101	Mas Awan Sigap (Masyarakat Relawan Siaga dan Tanggap)	Mas Awan Sigap (Masyarakat Relawan Siaga dan Tanggap) untuk memaksimalkan relawan sebagai garda terdepan informasi kedarifatan di Kota Semarang dengan menggunakan teknologi aplikasi kedaruratan, realtime dan tidak hoax, serta penanganan kedaruratan dapat dengan cepat diatasi.
102	Sistem Aplikasi QR Code Komunitas Digital	Sistem Aplikasi QR Code untuk pendataan komunitas digital pada ruang Semarang Digital Kreatif (SDK) (Apik Dadi Komunitas Semarang) merupakan aplikasi penyediaan data real komunitas dan anggota komunitas dalam pemanfaatan ruang digital Semarang Digital Kreatif.
103	SI RINDU (SISTEM INFORMASI HARIAN TERPADU)	SI RINDU (Sistem Informasi Harian Terpadu) merupakan aplikasi yang ditunjukan kepada keluarga/ penanggung jawab pasien agar keluarga pasien mendapatkan informasi tentang kondisi terkini pasien yang dirawat di ruang perawatan RSWN

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
104	Simentel	SI MENTAL (Sistem Informasi Menara Telekomunikasi) Kota Semarang merupakan website yang memudahkan para investor telekomunikasi yang masuk di Kota Semarang bisa dengan mudah mengurus perijinannya dan dalam waktu singkat
105	PEMANIS (PERSALINAN MENYENANGKAN, AMAN DAN NYAMAN DI RUANG ISOLASI)	PEMANIS (Persalinan Menyenangkan, Aman, dan Nyaman di Ruang Isolasi) merupakan inovasi RSWN untuk pasien maternal Covid 19 yang harus dirawat di ruang isolasi dengan memberikan perawatan dan pijak Effleurage yang bertujuan untuk meningkatkan sirkulasi darah, menghangatkan otot abdomen, dan meningkatkan relaksasi fisik dan mental, serta memberikan rasa nyaman dan mengurangi kecemasan selama proses persalinan.
106	TERPESONA (TABEL EWSS, RESIKO JATUH, PERKEMBANGAN, ALERGI OBAT, DO NOT RESUSITATE)	Merupakan inovasi dalam bidang kesehatan berupa kumpulan dokumen pada status pasien sebagai alat pengkajian yang kemudian di rangkum dalam tabel berupa Paparan Bergambar dan diinformasikan di papan TERPESONA RSWN.
107	PARU KRONIS - PENYARING UDARA (HEPAFILTER) MURAH DAN EKONOMIS	Paru Kronis (Penyaring Udara (Hepafilter) Murah dan Ekonomis) merupakan inovasi alat untuk memurnikan udara dalam ruangan agar terhindar dari paparan virus covid-19 dengan harga yang lebih terjangkau.
108	SIP (Sistem Informasi Parkir)	Inovasi pengelolaan perparkiran berbasis aplikasi online. Melalui SIP (Sistem Informasi Parkir) menggunakan GIS (Geographical Information System) untuk memantau kinerja parkir umum.
109	SI JAHE DAN PUTRI MAYANG (Sisa Jahe dan Putih Telur Dibuang Sayang)	Merupakan inovasi dengan pemanfaatan sisa jahe dan putih telur menjadi produk yang bernilai dan dapat di konsumsi kembali.
110	COMPRESSED NATURAL GAS (CNG) PADA ARMADA FEEDER TRANS SEMARANG	Pemasangan CNG (<i>Compressed Natural Gas</i>) pada Armada BRT Trans Semarang dan Feeder untuk mengurangi emisi gas buang, menghemat penggunaan bahan bakar, mengurangi polusi udara, serta sebagai bentuk dukungan terhadap upaya Pemerintah dalam Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup. Pemasangan converter kit menjadikan bahan bakar bus menjadi hybrid yang mengatur komposisi bahan bakar 70% CNG dan 30% solar yang lebih rendah emisi.
111	Eco-Edu Wisata Pantai Mangunharjo	Merupakan inovasi di bidang pengembangan kawasan pariwisata di wilayah Kecamatan Tugu. Eco-Edu Wisata Pantai Mangunharjo memiliki konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan yang mendasarkan pada prinsip pembangunan ekowisata, yaitu mengkombinasikan kepentingan industri

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
		pariwisata dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup termasuk melibatkan masyarakat setempat.
112	JARUM SI KENANG (Jejaring Komunitas Musisi Keroncong Semarang)	JARUM SI KENANG merupakan salah satu inovasi sekaligus komunitas yang dinaungi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Komunitas ini merupakan wadah bagi para musisi keroncong di Kota Semarang yang bertujuan untuk melestarikan musik keroncong yang saat ini semakin tergerus oleh perkembangan zaman. Selain itu, keberadaan komunitas ini juga diharapkan menjadi daya tarik kunjungan pariwisata di Kota Semarang melalui parade dan even musik keroncong yang diselenggarakan.
113	Sinau Bareng Pemasaran Pariwisata	Masih terkait sektor pariwisata, program Sinau Bareng Pemasaran Pariwisata merupakan program kerja Pemerintah Kota Semarang dalam rangka pengembangan potensi-potensi lokal untuk menjadi daya tarik wisata melalui giat pariwisata seperti pelatihan wisata, diskusi, transfer ilmu, best practices, dan lain-lain. Pelibatan berbagai sektor kalangan mulai dari akademisi, pelaku wisata, pemerintah, sektor bisnis, dan warga masyarakat menjadi kunci dalam giat pariwisata ini. Diharapkan program kerja tersebut dapat menginisiasi masyarakat untuk mengembangkan potensi wisata yang belum berkembang atau sedang dalam tahap rintisan.
114	PAK RAHMAN (Pasar Pangan Rakyat Murah dan Aman)	PAK RAHMAN merupakan sebuah inovasi dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang yang berkolaborasi dengan berbagai mitra untuk berkomitmen bersama untuk mencapai kestabilan harga pangan bagi masyarakat dan menekan inflasi, khususnya di situasi pasca pandemi. Hal tersebut dilakukan dengan mempermudah akses pangan murah dan membuat model kolaborasi untuk mengatasi persoalan pangan di Kota Semarang. Dengan mengusung tagline “50-ewu iso blonjo werno-werno”, PAK RAHMAN diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat Kota Semarang dalam mendapatkan akses pangan murah dan aman.

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
115	SEMAR MRANTASI (Semangat Bergerak Bersama Mewujudkan Kota Semarang Tangguh Pangan dan Gizi)	Pandemi Covid-19 telah mengajarkan bahwa ketahanan pangan merupakan sektor yang krusial dalam kehidupan masyarakat. Sistem logistik pangan yang sempat terganggu karena aktivitas masyarakat yang terbatas membuat pemerintah harus meningkatkan kualitas ketahanan pangan untuk kondisi-kondisi yang tidak terduga. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Ketahanan Pangan mengembangkan Semar Mrantasi, suatu sistem informasi berbasis web yang menyajikan informasi seputar pangan di Kota Semarang, termasuk perkembangan terkini harga-harga komoditas pokok
116	Layanan Home Care Pertanian	Layanan Home Care Pertanian merupakan program Dinas Pertanian Kota Semarang yang meliputi konsultasi, visitasi, edukasi, dan penanganan secara langsung di sektor pertanian. Layanan tersebut dapat diakses oleh masyarakat Kota Semarang dengan datang secara langsung di pojok konsultasi Urban Farming Corner (UFC). Jika diperlukan, petugas dari Dinas Pertanian Kota Semarang akan melakukan pengamatan dan penanganan langsung terhadap tanaman yang bermasalah ke lokasi pemohon layanan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun
117	E-Pendawa (Aplikasi Penataan Penetapan Perijinan Pendapatan Dan Pengawasan)	E-Pendawa merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang untuk melakukan proses seleksi dalam rangka penataan dan penempatan kembali pedagang pasar sesuai kriteria yang ditentukan. Dengan melakukan registrasi dan penginputan berkas seperti KTP, KK, SIPTD, dan dokumen pendukung lain, para pedagang dimudahkan dalam memperoleh ijin berdagang di pasar-pasar di Kota Semarang. Aplikasi ini juga sangat bermanfaat dalam penataan kembali para pedagang di Pasar Johar yang sempat direlokasi di tempat lain selama proses pembangunan
118	APIK KERJAKU (Aplikasi Sistem Informasi Pasar Kerja Terbuka dan Terpadu)	Aplikasi Sistem Informasi Pasar Kerja Terbuka dan Terpadu (APIK KERJAKU) adalah suatu ekosistem digital yang menjadi platform bagi segala jenis layanan publik dan aktivitas bidang ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang. Salah satu jenis layanan adalah mempertemukan antara pemberi kerja (pengusaha/perusahaan) dengan pencari kerja. APIK KERJAKU dapat diakses baik oleh perusahaan/pengusaha maupun pencari kerja melalui website siker.semarangkota.go.id .
119	Tata Ruang Pro Investasi	Pemerintah terus mendorong kemudahan berinvestasi di Indonesia melalui perbaikan sistem kemudahan berinvestasi yang dapat menjadi momentum untuk peningkatan optimism and awareness terkait reformasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah untuk mendukung kemudahan

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
		<p>berusaha. Di Kota Semarang, Pemerintah Kota Semarang melahirkan inovasi Tata Ruang Pro Investasi yang gawangi Dinas Penataan Ruang Kota Semarang yang bertujuan untuk melakukan percepatan, peningkatan pelayanan, dan kemudahan akses kepada masyarakat dan calon investor dalam hal perizinan keruangan dengan pendayagunaan data spasial dan teknologi GIS (Geographic Information System). Sistem ini mampu memberikan informasi secara cepat, tepat dan akurat kepada calon investor tentang diizinkan atau tidaknya suatu jenis investasi tanpa harus datang ke kantor pelayanan sampai dengan menganalisa secara otomatis ketentuan-ketentuan tata ruang terhadap rencana-rencana investasi/pembangunan dari para investor/masyarakat dan instansi-instansi lainnya dalam sekali klik.</p>
120	Dolan E-Semar (Dodolan E-Commerce e Wong Semarang)	<p>Di era digital saat ini, data berperan penting dalam proses pengambilan keputusan secara cepat dan tepat. Hasil analisis data yang tepat dapat membantu pemerintah termasuk di Kota Semarang untuk memperoleh informasi mengenai industri, UMKM, pariwisata, potensi daerah, dan informasi lainnya yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam merencanakan strategi pembangunan daerah serta mewujudkan visi dan misi. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang atau Diskominfo memanfaatkan teknologi E-commerce analytics untuk meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha. E-commerce analytics merupakan big data dari berbagai marketplace yang diolah dan dianalisa untuk keperluan tertentu seperti membuat keputusan (decision making), prediksi, juga menggugah masyarakat untuk beralih dari bisnis konvensional ke digital. Diskominfo Kota Semarang mengembangkan platform analisa ekonomi digital yang berbasis analisis transaksi, informasi potensi daerah, serta analisis produk top UMKM yang keseluruhannya terangkum dalam 1 platform yang disebut dengan Dolan E-Semar (Dodolan E-Commerce Wong Semarang)</p>
121	SI LINTAS (Sistem Layanan Informasi Kota Semarang)	<p>Kebutuhan akan data dan informasi sudah menjadi hajat masyarakat dewasa ini. Namun seringkali masih ditemui beberapa permasalahan dalam pengelolaan informasi publik termasuk di Kota Semarang mulai dari pelayanan permintaan data dan informasi yang membutuhkan waktu cukup lama serta bersifat ketat dan terbatas sampai dengan kurangnya pengawasan terhadap pelayanan informasi yang diberikan oleh perangkat daerah dan BUMD terhadap publik. Untuk mengatasi berbagai masalah yang masih sering terjadi, Pemerintah Kota</p>

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
		Semarang melalui Diskominfo menghadirkan inovasi Si Lintas, Sistem Pelayanan Informasi Publik berbasis website di tengah-tengah masyarakat sebagai upaya menuju keterbukaan informasi publik yang merupakan sarana untuk mengoptimalkan pengawasan dan pelayanan informasi publik. Diharapkan dengan adanya inovasi ini, pelayanan informasi di Pemerintah Kota Semarang menjadi lebih mudah, cepat, cermat, transparan, akuntabel, proporsional serta dapat mendorong partisipasi masyarakat umum tak terkecuali masyarakat difabel dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik
122	PANDANARAN (Pelayanan Aduan UHC Warga Kota Semarang)	PANDANARAN (Pelayanan Aduan UHC Warga Kota Semarang) dikembangkan karena banyaknya aduan masyarakat yang tidak memiliki jaminan kesehatan tetapi membutuhkan perawatan di fasilitas kesehatan, terutama kelompok rentan yaitu ibu hamil, disabilitas, orang sakit dan lansia. Prosedur pengaduan dari inovasi dapat dilakukan secara tidak langsung melalui Lapor Gubernur, Lapor Hendi, Hotline UHC, Instagram, Facebook dan Twitter, maupun secara langsung melalui petugas di Loker UHC. Inovasi ini menggunakan aplikasi SIM UHC yang mengintegrasikan segenap pemangku kepentingan seperti Dispendukcapil, BPJS Kesehatan, dan Rumah Sakit di Kota Semarang, sehingga proses penyelesaian aduan masyarakat terkait program UHC menjadi lebih cepat.
123	WARAK NGENDOG (Lawan Corona Virus Kota Semarang dengan Dukungan Integrasi Program dan Bergerak Bersama)	Penanganan penyakit menular berpotensi wabah di Kota Semarang sebelumnya tidak berjalan maksimal. Dinas Kesehatan Kota Semarang mencatat di tahun 2019 terdapat 213.715 kasus ISPA. Pengendalian yang belum didukung oleh pelaporan secara digital menyebabkan penanganan belum berjalan cepat dan tepat. Hal ini ditambah dengan adanya Pandemi Covid-19 yang berimbas terhadap berbagai sektor, terutama kesehatan dan ekonomi. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Kota Semarang menginisiasi WARAK NGENDOG yang mempunyai dampak signifikan terhadap pengendalian Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Case Fatality Rate (CFR) Covid-19 di Kota Semarang di tahun 2020 sebesar 8,4% menurun pada tahun 2022 menjadi 2,7%. WARAK NGENDOG menunjukkan kemampuan pemerintah untuk melakukan mitigasi pandemi didukung oleh platform digital STRONG dan pemberdayaan masyarakat melalui Kampung Siaga Candi Hebat, sehingga penanganan Covid-19 terlaksana dengan tepat, cepat, dan akurat sehingga dampak pandemi bisa diantisipasi dengan baik.

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
124	PALAWA (Sistem Pelayanan Laboratorium Melalui Whatsapp)	Transformasi digital telah mengubah cara berkomunikasi, termasuk antara pemerintah dan masyarakat. Penggunaan aplikasi terpopuler seperti Whatsapp-pun dilihat sebagai salah satu pilihan terbaik. Menanggapi hal tersebut, UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang membentuk inovasi pelayanan publik melalui program “PALAWA” atau Pelayanan Laboratorium Melalui Whatsapp yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi seputar layanan laboratorium lingkungan seperti informasi terkait biaya pengujian, konsultasi mengenai hasil pengujian serta informasi untuk keperluan pendidikan serta penelitian. Dengan adanya inovasi ini masyarakat diharapkan dapat memperoleh pelayanan dengan lebih cepat, tepat, mudah, dan fleksibel.
125	Program Sosialisasi Promosi dan Publikasi	Program Sosialisasi Promosi dan Publikasi yang diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang melalui UPTD Laboratorium Lingkungan berisi kegiatan presentasi ke beberapa kawasan industri di Kota Semarang dalam rangka mengenalkan dan mempromosikan pelayanan yang ada di UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kota Semarang. Beberapa manfaat dari program ini diantaranya memudahkan kerjasama antara UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kota Semarang dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Semarang, lebih jauh diharapkan dapat terbentuk kesepakatan kerjasama antara pihak UPTD dan perusahaan-perusahaan yang dikunjungi. Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program ini yakni mendapatkan respon positif dari para badan usaha di Kota Semarang yang linear dengan penambahan pendapatan daerah.
126	APROKLIM TAPAK (Aplikasi Pemberdayaan Proklam Tingkat Tapak)	Program Kampung Iklim (Proklam) merupakan salah satu strategi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam upaya pengendalian perubahan iklim dengan mendorong kerjasama multipihak untuk memperkuat kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak berbasis komunitas. Dengan hadirnya inovasi yang dikembangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang ini diharapkan Proklam dapat dilaksanakan secara lebih sistematis dan terarah dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dalam merealisasikan rencana kegiatan di setiap periode waktu sesuai tahapan yang direncanakan. Aplikasi ini juga menjadi instrumen yang akan memandu rencana tahapan pelaksanaan Proklam untuk dapat bersinergi dengan berbagai kegiatan terkait sehingga mampu memberikan gambaran titik

No	Inovasi	Gambaran Inovasi
		awal dan akhir dalam rangka menyukseskan target capaian program secara keseluruhan
127	Pemetaan Penghasil Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Kota Semarang	Perkembangan teknologi berbasis spasial dan smartphone saat ini sudah hampir menjangkau semua sektor. Kesempatan ini dapat dimanfaatkan dan dioptimalkan sebagai salah satu alternatif pemetaan sebaran maupun pemantauan limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) yang ada di Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan kegiatan pemetaan penghasil limbah B3 berbasis WebGIS online di aplikasi smartphone yang dapat digunakan sebagai sarana dalam melakukan pengawasan dan pemantauan limbah B3 di Kota Semarang
128	Percepatan Pemrosesan Izin Lingkungan/ Persetujuan Lingkungan di Kota Semarang	Inovasi Percepatan Pemrosesan Izin Lingkungan/ Persetujuan Lingkungan merupakan salah satu inovasi pelayanan publik dimana setiap pelayanannya dituntut untuk memberikan pelayanan prima yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Program penyederhanaan SOP ini ditujukan untuk dapat meningkatkan percepatan dan kualitas layanan di bidang perizinan lingkungan atau persetujuan lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang serta untuk mewujudkan good governance melalui prosedur kerja yang efektif, efisien, terukur, transparan, dan akuntabel yang akan mengantarkan Pemerintah Kota Semarang untuk memperoleh kepercayaan masyarakat.
129	SEMAR (Sistem Elektronik Manajemen Aset Terintegrasi)	Inovasi SEMAR merupakan salah satu inovasi pelayanan publik yang bertujuan untuk mengumpulkan data kerjasama pemanfaatan aset di Kota Semarang, mempermudah mencari data akan aset tanah Kota Semarang yang idle, serta membantu pengarsipan data pemanfaatan, penatausahaan, dan pengamanan aset.
130	SiKasda (Sistem Informasi Kas Daerah)	SiKasda adalah sebuah inovasi pelayanan publik yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perekapan transaksi dan pembuatan laporan baik penerimaan dan pencairan di Rekening Kas Umum Daerah Kota Semarang (RKUD). Selain itu manfaat yang diperoleh dari adanya inovasi ini yaitu tersedianya data laporan transaksi keuangan atas RKUD yang sudah teridentifikasi untuk setiap masing-masing bendahara penerimaan dan pengeluaran pada SKPD.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Semarang tahun 2024 menggambarkan kebijakan perekonomian daerah yang diambil sebagai dasar pencapaian bagi sasaran indikator ekonomi makro daerah. Kerangka ekonomi daerah menguraikan perkembangan ekonomi global dan nasional dalam beberapa tahun terakhir serta perkiraan dan prospek ekonomi ke depan. Secara lebih rinci, kerangka ekonomi daerah memberikan gambaran mengenai kondisi dan proyeksi ekonomi makro yang meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, pendapatan per kapita, perkembangan inflasi serta indikator-indikator lainnya yang berkaitan dalam penyusunan kerangka ekonomi makro daerah. Gambaran dan perkiraan ekonomi beserta indikator-indikatornya menjadi dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi dan selanjutnya dijadikan asumsi dasar ekonomi makro 2024 yang menjadi landasan dalam penyusunan pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal ke depan. Selanjutnya, hasil proyeksi ekonomi tersebut digunakan sebagai dasar asumsi dalam melakukan prediksi kondisi keuangan daerah, khususnya terkait dengan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Secara garis besar, bab ini memuat arah kebijakan ekonomi daerah yang menjelaskan tentang perkembangan ekonomi global dan domestik, kondisi ekonomi daerah, serta tantangan dan prospek perekonomian daerah, termasuk di dalamnya asumsi-asumsi yang digunakan sebagai dasar perhitungan APBD tahun 2024. Selanjutnya dijelaskan pula arah kebijakan keuangan daerah yang memuat proyeksi keuangan dan kerangka pendanaan daerah, serta arah kebijakan keuangan daerah dari segi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Perumusan arah kebijakan ekonomi daerah dilakukan dengan memperhatikan kondisi perekonomian regional, nasional maupun global, telaah terhadap kebijakan ekonomi nasional di daerah yang dapat mempengaruhi kondisi dan kebijakan ekonomi di Kota Semarang, serta arah dan kebijakan ekonomi yang direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

3.1.1. Kondisi Perekonomian Global dan Nasional

Perkembangan ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih, dihadapkan dengan guncangan akibat konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang mencuat sejak akhir Februari 2023. Dampak dari masalah ini diantaranya gangguan rantai pasokan global dan kenaikan harga komoditas secara signifikan, terutama yang terkait langsung dengan komoditas utama dari Ukraina dan Rusia. Pada semester 1 tahun 2023, berdasarkan laporan Bank Indonesia, Ketidakpastian perekonomian global kembali meningkat dengan kecenderungan risiko pertumbuhan yang melambat dan kebijakan suku bunga moneter di negara maju yang lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan sebesar 2,7% (yoy) dengan risiko perlambatan terutama di Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Di AS, tekanan inflasi masih tinggi terutama karena keketatan pasar tenaga kerja, di tengah kondisi ekonomi yang cukup baik dan tekanan stabilitas sistem keuangan (SSK) yang mereda, sehingga mendorong kemungkinan kenaikan Federal Funds Rate (FFR) ke depan. Kebijakan moneter juga masih ketat di Eropa, sedangkan di Jepang masih longgar. Sementara itu, di Tiongkok pertumbuhan ekonomi juga tidak sekuat prakiraan di tengah inflasi yang rendah sehingga mendorong pelonggaran kebijakan moneter. Pemulihan ekonomi di negara berkembang lain, seperti India, tetap kuat

didorong oleh permintaan domestik dan ekspor jasa. Kondisi ekonomi di negara maju dan berkembang tersebut mendorong nilai tukar dolar AS cenderung melemah terhadap mata uang negara maju, tetapi menguat terhadap mata uang negara berkembang. Perkembangan tersebut memerlukan penguatan respons kebijakan untuk memitigasi risiko rambatan terhadap ketahanan eksternal di negara berkembang, termasuk Indonesia.

Dengan kondisi global yang belum sepenuhnya membaik, ekonomi Indonesia tetap baik didukung oleh permintaan domestik dan positifnya kinerja ekspor. Kenaikan konsumsi rumah tangga berlanjut didorong oleh terus naiknya mobilitas, membaiknya ekspektasi pendapatan, dan terkendalinya inflasi. Investasi juga tetap kuat terutama investasi nonbangunan sejalan dengan kinerja ekspor yang positif dan berlanjutnya hilirisasi. Kinerja pariwisata juga membaik sejalan dengan kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara. Perbaikan ekonomi Indonesia dikonfirmasi oleh hasil survei Bank Indonesia tentang keyakinan konsumen yang meningkat dan penjualan eceran yang tumbuh positif, serta indikator dini Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur yang masih berada di zona ekspansi. Ke depan, pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan tetap berada dalam kisaran proyeksi Bank Indonesia pada 4,5-5,3%.

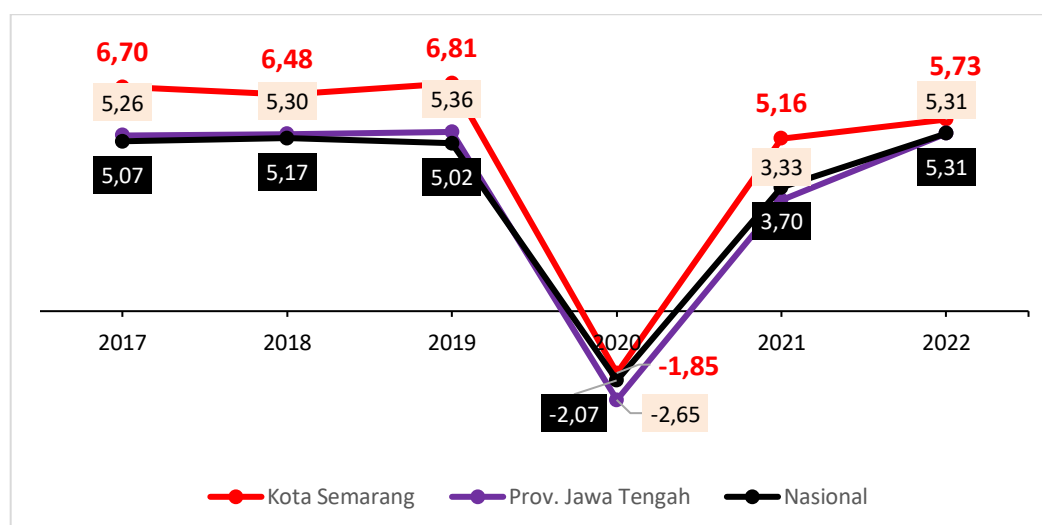
Dalam RKP 2024 ditekankan untuk pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan pelaksanaan Pemilu 2024. Berdasarkan skenario yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), sasaran pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan dalam RKP 2024 adalah sebesar 5,1-5,7%.

3.1.2. Kondisi Perekonomian Regional

Perekonomian Jawa Tengah tahun 2022 tercatat mengalami pertumbuhan positif, yaitu sebesar 5,31% dibandingkan pencapaian pada tahun 2021 sebesar 3,33%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yaitu sebesar 73,03%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, kenaikan tertinggi dicatat oleh Komponen Net Ekspor Antar Daerah yaitu sebesar 31,66%. Peningkatan pertumbuhan ekonomi juga terjadi di tingkat nasional, dimana Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) nasional pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,31% dibandingkan pencapaian tahun 2021 sebesar 3,70%. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah diperkirakan berkisar antara 5,00 - 5,60%, dan diperkirakan terus meningkat hingga tahun 2024 dengan digencarkannya program-program dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrem dan zero stunting. Capaian pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2024 diproyeksikan pada kisaran 4,70 - 5,50%. Sedangkan proyeksi pengendalian inflasi berada pada kisaran 3,0±1%, yang dapat dicapai melalui perkuatan distribusi, ketersediaan dan kecukupan bahan kebutuhan pokok masyarakat, serta terjaganya ekspektasi positif masyarakat.

Di level Kota Semarang, pertumbuhan ekonomi juga mengalami kenaikan di tahun 2022 dengan capaian sebesar 5,73%. Kondisi perekonomian diperkirakan akan terus membaik di tahun 2023 hingga mencapai 5,60-6,10%. Untuk tahun 2024, dengan mengusung tema pembangunan “Pemantapan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang didukung oleh penguatan struktur yang mendukung keberlanjutan”, Pemerintah Kota Semarang menargetkan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,70 - 6,50% dengan fokus pada peningkatan

ekonomi lokal terutama pada UMKM/IKM. Dengan pertumbuhan ekonomi yang sudah tumbuh tinggi di tahun 2022 (5,73%) dari basis yang rendah di tahun 2020 (-1,85%), di tahun 2023 dan 2024 Pemerintah Kota Semarang dituntut untuk tetap bisa menjaga momentum dan mempertahankan pertumbuhan positif tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, upaya pengentasan kemiskinan terutama pada masyarakat dalam kategori kemiskinan ekstrem menjadi fokus pemerintah Kota Semarang dengan target angka kemiskinan menurun hingga 4,00 – 3,82%.



Sumber : BPS & Bappeda Prov.Jateng, 2022

Gambar 3. 1

Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang Dibandingkan Dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2022

Dengan rata-rata 4,84%, pertumbuhan ekonomi Kota Semarang pada periode 2018 sampai dengan 2022 selalu berada di atas level pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan Nasional. Hal ini cukup relevan karena Kota Semarang selama ini selalu menjadi kontributor terbesar dalam pembentukan PDRB ADHK Jawa Tengah. Struktur perekonomian Semarang tersebar pada lima sektor ekonomi utama, sehingga terhindar dari ketergantungan pada satu sektor spesifik. Berdasarkan PDRB ADHK menurut lapangan usaha, sektor terbesar di Kota Semarang pada tahun 2022, masih didominasi oleh Industri Pengolahan (28,85%), Konstruksi (26,30%), Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,18%), Informasi dan Komunikasi (8,61%), dan Jasa Keuangan dan Asuransi (4,18%).

Tabel 3. 1

Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kota Semarang Tahun 2018-2022

LAPANGAN USAHA	2018	2019	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,85	0,81	0,85	0,84	0,80
B. Pertambangan dan Penggalian	0,17	0,18	0,19	0,18	0,17
C. Industri Pengolahan	27,24	27,46	28,62	28,75	28,85
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,11	0,11	0,10	0,09
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,07	0,08	0,08	0,07
F. Konstruksi	26,87	26,88	26,00	27,03	26,30
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,74	13,62	13,52	13,50	13,18
H. Transportasi dan Pergudangan	3,84	3,94	2,35	2,33	4,17
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,44	3,34	2,77	2,77	3,15
J. Informasi dan Komunikasi	7,59	7,85	9,58	9,22	8,61
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4,37	4,20	4,32	4,26	4,18
L. Real Estate	2,86	2,81	2,87	2,77	2,68

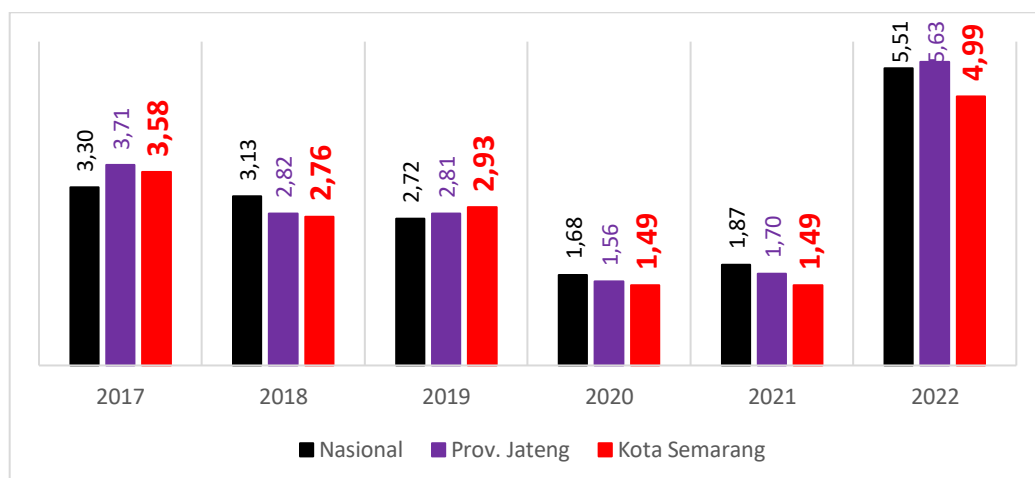
LAPANGAN USAHA	2018	2019	2020	2021	2022
M,N. Jasa Perusahaan	0,71	0,74	0,70	0,67	0,68
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,15	3,04	3,06	2,84	2,66
P. Jasa Pendidikan	2,91	2,91	2,95	2,76	2,54
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,88	0,83	0,97	0,90	0,84
R,S,T,U. Jasa Lainnya	1,20	1,21	1,06	0,99	1,01

Sumber : BPS Kota Semarang, 2023

Pertumbuhan ekonomi Kota Semarang di tahun 2023 dan 2024 ditargetkan optimis di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah maupun nasional. Prospek perekonomian Kota Semarang pada tahun 2023 dan 2024 diperkirakan mengalami percepatan seiring dengan peningkatan ekonomi pasca Pandemi yang ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kota Semarang dan keberhasilan Pemerintah Kota Semarang dalam menangani dampak Inflasi.

Selain perbaikan infrastruktur, upaya lain yang dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Semarang yakni kemudahan perizinan sebagai daya tarik para investor untuk berinvestasi di Kota Semarang. Iklim investasi di Kota Semarang khususnya di sektor perdagangan dan jasa terbukti mengalami pertumbuhan yang positif, dapat dilihat dengan meningkatnya banyaknya pembangunan berbagai pusat-pusat perbelanjaan dan infrastruktur yang akan meningkatkan perekonomian di Kota Semarang. Berbagai inovasi juga terus dilakukan, salah satunya dengan cara bersinergi dengan para pelaku UMKM agar produk unggulannya bisa menjadi produk ekspor yang diminati pasar internasional, serta melakukan kerjasama dengan toko retail modern untuk pemasaran produk UMKM. Proyeksi 2024 dari sisi PDRB pengeluaran, pertumbuhan ekonomi masih disokong oleh konsumsi pemerintah yang masih tinggi. Sedangkan ekspor diperkirakan mengalami akselerasi seiring dengan makin tingginya permintaan ekspor.

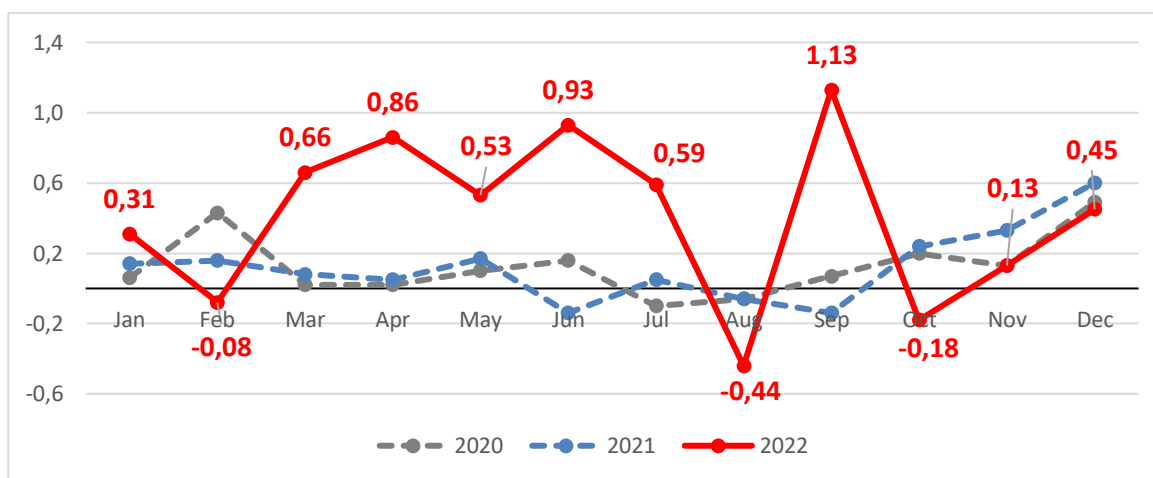
Indikator lain yang digunakan untuk mengukur kondisi ekonomi suatu daerah adalah dari nilai inflasi. Inflasi nasional mengalami peningkatan dari 1,87% di tahun 2021 menjadi 5,51% di tahun 2022, sejalan dengan kenaikan inflasi di tingkat Jawa Tengah dari 1,70% di tahun 2021 menjadi 5,63% di tahun 2022. Di sisi lain, inflasi Kota Semarang tahun 2022 tercatat sebesar 4,99%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam menahan laju inflasi pada saat pandemi berdampak positif.



Sumber : BPS, 2022

Gambar 3. 2
Inflasi Kota Semarang Dibandingkan Dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017 – 2022

Nilai inflasi bulanan Kota Semarang di tahun 2022 tercatat cukup fluktuatif dan cenderung meningkat memasuki akhir tahun. Peperangan antara Rusia dan Ukraina yang berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah dunia mengakibatkan naiknya harga bahan kebutuhan pokok yang memicu lonjakan inflasi di penghujung tahun 2022. Inflasi tertinggi berturut-turut terjadi pada bulan September (1,13%), Juni (0,93%), dan April (0,86%), dengan pendorong utama inflasi adalah komoditas umum seperti makanan, minuman dan tembakau, dan komoditas Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Sedangkan deflasi terjadi pada bulan Oktober (-0,18%), Agustus (-0,44%) dan Februari (-0,08%). Perkembangan inflasi bulanan pada tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : BPS Kota Semarang, 2022

Gambar 3. 3

Inflasi Bulanan Kota Semarang Tahun 2022

Proyeksi pengendalian inflasi Kota Semarang pada tahun 2024 diharapkan pada kisaran $2,4 \pm 1$ persen. Proyeksi ini masih dibawah proyeksi inflasi Provinsi Jawa Tengah yang berada pada kisaran $3,0 \pm 1$ persen. Hal ini dapat dicapai melalui perkuatan distribusi, ketersediaan dan kecukupan komoditas umum masyarakat seperti bahan kebutuhan pokok. Yang perlu menjadi perhatian lebih adalah isu nasional terkait kenaikan harga BBM yang berdampak pada peningkatan harga bahan dan kebutuhan pokok. Selain itu, ketersediaan dan kecukupan komoditas kesehatan, informasi, komunikasi dan jasa keuangan, dan perawatan pribadi dan jasa lainnya juga harus dapat dipertahankan sehingga ekspektasi positif masyarakat akan terjadi.

3.1.3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024

Kondisi perekonomian daerah tahun 2024 tidak lepas dari faktor-faktor yang berasal dari dalam daerah sendiri maupun faktor eksternal yang berdasar dari perkembangan makro ekonomi pada tingkat provinsi maupun nasional. Dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang diperkirakan mempengaruhi perekonomian, tantangan yang diperkirakan akan dihadapi di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a) Isu perubahan iklim

Perubahan iklim yang semakin nyata menuntut transformasi *green economy* oleh negara-negara tujuan ekspor Indonesia. Hal ini berdampak pada perlunya kebijakan dan strategi mendukung *green economy investment* yang masih perlu ditingkatkan implementasinya di Kota Semarang, khususnya pada sektor IKM dan UMKM. Perubahan iklim juga dapat berpengaruh terhadap penurunan kondisi infrastruktur di Kota Semarang. Pengembangan ekonomi sirkular dan penguatan ketahanan pangan juga menjadi perhatian di tahun 2024.

b) Isu terkait geopolitik dan geoekonomi

Konflik antara Rusia dan Ukraina diindikasikan akan berdampak terhadap terganggunya pasokan pangan global yang mendorong peningkatan harga pangan global sehingga mengakibatkan krisis pangan dunia. Hal ini karena Rusia dan Ukraina adalah negara eksportir gandum/terigu terbesar di dunia. Krisis pangan akan sangat berdampak terhadap negara berpenghasilan rendah, negara dengan konsumsi gandum yang tinggi, dan mendorong substitusi komoditas pangan di berbagai negara. Selain itu, kondisi perang dagang dan perebutan pengaruh antara dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia (Amerika Serikat dan Tiongkok) menjadi hal yang harus diperhatikan dalam perumusan kebijakan program dan kegiatan di tahun 2024.

c) Isu meningkatnya suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat (*The Fed*)

Perang Rusia-Ukraina telah menyebabkan disrupsi sisi produksi/ *supply* yang sangat besar, sehingga mendorong volatilitas harga-harga komoditas global dan penuh ketidakpastian khususnya komoditas energi dan pangan. Harga komoditas energi seperti gas alam dan batu bara masih persisten tinggi sejak perang di Ukraina, sedangkan harga minyak mentah turun setelah pengumuman *supply cut* oleh *Organization of The Petroleum Exporting Countries* (OPEC). Harga komoditas pangan seperti kedelai dan jagung kembali naik karena faktor cuaca dan geopolitik, serta harga *Crude Palm Oil* (CPO) sedikit kembali naik sedangkan harga gandum turun. Kenaikan pada harga komoditas pangan dan energi tersebut memicu tekanan inflasi di banyak negara yang kemudian mendorong pengetatan kebijakan moneter, seperti menaikkan suku bunga *The Fed* yang akan memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selain isu-isu tersebut, pertumbuhan perekonomian tahun 2023-2024 juga masih dibayangi oleh beberapa risiko dan tantangan lainnya, antara lain:

1) Pemulihan Ekonomi pasca penerapan endemi Covid-19

Pandemi Covid-19 memberikan dampak buruk terhadap perekonomian terutama bagi UMKM lokal. Pencabutan status pandemi dan berubah menjadi endemi merupakan peluang bagi sektor UMKM untuk kembali pulih seperti kondisi sebelum Covid-19.

2) Inovasi disruptif

Disruptive innovation merupakan suatu inovasi yang belum pernah terpikirkan sebelumnya dan dapat secara drastis mengubah pasar, seperti fenomena kecerdasan buatan yang berpotensi menghilangkan pekerjaan tertentu yang bisa tergantikan oleh kecerdasan buatan tersebut. Hal ini dapat disikapi sebagai tantangan, namun juga bisa menjadi potensi usaha baru bagi generasi muda yang lebih kreatif. Inovasi disruptif yang didominasi oleh perkembangan teknologi informasi ini tidak dapat dihindari karena masyarakat akan lebih memilih kemudahan dalam setiap aspek kehidupannya. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang sehat dan mendukung seluruh pengusaha baik yang berplatform *online* maupun *offline* agar tetap dapat berkompetisi di pasar domestik maupun global.

3) Ancaman Inflasi

Perang Rusia-Ukraina telah menyebabkan disrupsi sisi produksi/ *supply* yang sangat besar, sehingga mendorong volatilitas harga-harga komoditas global dan penuh ketidakpastian khususnya komoditas energi dan pangan yang memicu tekanan inflasi di banyak negara, termasuk Indonesia. Meskipun inflasi di Kota Semarang sepanjang tahun 2023 relatif terkendali, namun kewaspadaan terhadap potensi inflasi tetap harus diperhatikan.

4) Pemilu dan Pilkada serentak 2024

Adanya Pilkada dan Pemilu serentak pada tahun 2024 menyebabkan kerawanan bagi dunia usaha sebagai akibat dari ketidakstabilan politik pada tahun tersebut, namun berdasarkan hasil riset dapat disimpulkan bahwa peningkatan konsumsi masyarakat justru akan mengalami kenaikan.

Di sisi lain, beberapa hal yang diharapkan akan mendukung prospek perekonomian Kota Semarang di tahun 2024 antara lain:

- 1) Semarang memiliki potensi dari sisi lokasinya yang berada di tengah jalur nasional dan regional. Jalur masuknya pun lengkap, mulai dari Pelabuhan Tanjung Emas, Tol Trans Jawa, Stasiun Kereta Api, serta Bandara Ahmad Yani, termasuk adanya akses penerbangan langsung dari Kota Semarang ke IKN melalui Balikpapan;
- 2) Adanya PP No 28 Tahun 2018 tentang kerjasama daerah. Peraturan ini mendorong Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan alternatif pembiayaan pembangunan di luar APBD;
- 3) Adanya Peraturan Presiden No 79 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi di kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, Dan Kawasan Brebes Tegal – Pemalang. Peraturan ini dapat meningkatkan daya saing kawasan yang berdampak pertumbuhan investasi;
- 4) Adanya *Major Project* di Provinsi Jawa Tengah seperti Kawasan Industri Kendal, Kawasan Industri Batang, dan KSPN Borobudur yang diharapkan akan ikut memberikan dampak pada perekonomian Kota Semarang sebagai *hub* kawasan-kawasan tersebut.
- 5) Pengembangan infrastruktur untuk mendukung aksesibilitas dan konektivitas terus dilakukan di Kota Semarang, sehingga dukungan terhadap pertumbuhan investasi dapat terjaga untuk menarik investor baik dari dalam maupun luar negeri;
- 6) Pemerintah Daerah Kota Semarang berkomitmen mengembangkan sumber daya manusia dalam bidang keterampilan sehingga menopang berbagai kegiatan bisnis dalam skala kecil dan menengah (UMKM). Dalam hal ini termasuk pemanfaatan teknologi digital guna mengoptimalkan kinerja bisnis dan mengakses sumber pendanaan dan *market place*;
- 7) Inflasi yang relatif terkendali dan terhitung stabil. Laju inflasi tahun 2022 sebesar 4,99%, ini termasuk angka yang bagus ditengah gonjang ganjing adanya resesi. Terlebih di tahun sebelumnya Kota Semarang mengalami deflasi. Jika dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah, Kota Semarang tidak termasuk tinggi inflasinya. Justru yang tertinggi ada di Purwokerto dengan inflasi 30%, tapi jika dibandingkan kota-kota besar se Indonesia, Kota Semarang menduduki peringkat 4 dalam inflasi.

Dengan memperhatikan tren, tantangan dan daya dukung yang ada di Kota Semarang serta arah kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 maka prospek perekonomian daerah Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- Pertumbuhan ekonomi Kota Semarang Tahun 2024 ditargetkan antara 5,70 – 6,50%.
- Sedangkan tingkat inflasi tahun 2024 ditargetkan akan berada di kisaran 2,4±1% dengan asumsi Pemerintah Kota Semarang mampu menjaga harga komoditas dasar di tingkat domestik.
- Nilai Investasi akan naik dari sisi PMTB dan perubahan inventori seiring dengan membaiknya kondisi pasca Pandemi Covid-19.

- Dengan optimisme pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, maka Angka Kemiskinan 2024 ditargetkan turun menjadi 4,00 – 3,82% atau berkisar antara 75.172 - 71.789 jiwa. Target tersebut juga turun jika dibandingkan target pada tahun 2023 sebesar 79.682 - 75.923 jiwa.
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di tahun 2024 ditargetkan 7,60 – 6,50% dengan perkiraan jumlah penganggur sebesar 81.736 - 69.906 dari total seluruh angkatan kerja di Semarang. Target tersebut turun jika dibandingkan dengan target tahun 2023 yang berkisar antara 88.900 - 85.886 jiwa.

Tabel 3. 2
 Proyeksi Indikator Ekonomi Kota Semarang
 Tahun 2023 dan 2024

No	Indikator	Realisasi			Rerata	2023	2024
		2020	2021	2022		Target RKPD	Target RKPD
1	LPE (%)	-1,85	5,16	5,73	3,01	5,60 - 6,10	5,70 – 6,50
2	Inflasi (%)	1,49	1,49	4,99	2,66	2,5 ± 1	2,4 ± 1
3	Nilai Investasi PMA dan PMDN (juta rupiah)	21.842.472	22.538.063	24.662.877	23.014.471	25.684.059	27.362.089
4	Kemiskinan (%)	4,34	4,56	4,25	4,38	4,04 - 4,24	4,00 – 3,82
5	TPT (%)	9,57	9,54	7,60	8,90	8,30 - 8,60	7,60 – 6,50

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2023

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan daerah dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Keuangan daerah disusun setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

APBD merupakan salah satu wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah dengan berdasarkan pada program (*money follow program*), penyelesaian isu strategis dan permasalahan di daerah, serta mendukung pencapaian target RPJMD tahun 2021-2026. APBD merupakan salah satu instrumen penting kebijakan fiskal daerah, dimana kebijakan fiskal merupakan kebijaksanaan pemerintah untuk mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi suatu daerah.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. Hal tersebut bertujuan agar daerah lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah. Selain itu juga untuk mempercepat perwujudan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Pemberian otonomi daerah ini berimplikasi pada kebijakan daerah dan desentralisasi fiskal sebagai akibat adanya

pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Desentralisasi fiskal merupakan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan negara, sehingga dalam pelaksanaannya harus dilakukan pemantauan dan evaluasi guna menjaga sinergitas kebijakan fiskal nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Memperhatikan berbagai kondisi obyektif masyarakat, aspirasi yang berkembang, dan dalam rangka peningkatan ekonomi akibat dari dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19, serta mensinergikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang mengusung tema Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dengan 8 (delapan) arah kebijakan prioritas yaitu:

- 1) Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- 2) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;
- 3) Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
- 4) Penguatan daya saing usaha;
- 5) Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
- 6) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
- 7) Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan
- 8) Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pilkada Serentak tahun 2024.

Kebijakan keuangan daerah yang erat kaitannya dengan keberhasilan program pembangunan daerah serta mendukung arah kebijakan pembangunan RPJMD tahun 2024, yaitu pemantapan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang didukung oleh penguatan struktur yang mendukung keberlanjutan. Oleh karena itu kebijakan keuangan daerah harus sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJMD tahun 2024 melalui peningkatan penerimaan daerah, penajaman alokasi belanja, dan upaya-upaya untuk mendapatkan sumber-sumber pembiayaan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Suatu daerah yang kemampuan keuangannya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Gambaran realisasi dan proyeksi keuangan daerah serta kerangka pendanaan kemampuan keuangan Daerah Kota Semarang tahun 2021 s/d 2024 dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3. 3
Realisasi dan Proyeksi Keuangan Daerah Kota Semarang
Tahun 2021 s/d 2024

URAIAN	TA 2021			TA 2022			TA 2023	TA 2024
	INDUK	PERUBAHAN	REALISASI (<i>Audited</i>)	INDUK	PERUBAHAN	REALISASI (<i>Un-Audited</i>)	INDUK	TARGET RKPD
PENDAPATAN DAERAH								
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2.542.288.219.000	2.607.693.085.682	2.385.944.758.477	2.853.408.000.000	2.533.643.457.802	2.545.975.944.029	2.865.712.538.632	3.431.572.142.261
Pajak Daerah	1.974.540.653.000	2.016.634.447.354	1.445.171.299.551	2.227.149.000.000	1.937.950.180.074	1.956.376.326.258	2.190.083.500.000	2.389.028.620.494
Retribusi Daerah	129.360.552.000	87.617.710.256	96.448.844.019	140.698.000.000	110.704.628.900	100.975.888.363	149.306.250.120	936.355.102.989
<i>a. Retribusi Non BLUD</i>								488.252.551.164
<i>b. Retribusi BLUD</i>								448.102.551.825
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	39.345.709.000	66.895.891.301	66.895.891.301	49.725.000.000	66.717.312.156	66.717.372.156	73.297.199.962	79.688.418.778
Lain - lain PAD yang Sah	399.041.305.000	436.545.036.771	777.428.723.606	435.836.000.000	418.271.336.672	421.906.357.252	453.025.588.550	26.500.000.000
<i>a. BLUD</i>								-
<i>b. Selain BLUD</i>								26.500.000.000
Pendapatan Transfer	2.086.516.317.000	2.385.062.664.824	2.320.535.370.128	2.484.519.420.000	2.485.202.948.535	2.423.149.928.403	1.962.790.329.000	1.959.754.745.000
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.418.958.317.000	1.710.552.675.577	1.764.434.028.103	1.858.391.420.000	1.889.301.980.458	1.843.884.236.636	1.380.790.329.000	1.377.754.745.000
Dana Perimbangan	1.354.343.975.000	1.645.938.333.577	1.699.819.686.103	1.813.043.834.000	1.835.050.618.458	1.789.632.874.636	1.371.841.248.000	1.377.754.745.000
Dana Insentif Daerah (DID)	64.614.342.000	64.614.342.000	64.614.342.000	45.347.586.000	54.251.362.000	54.251.362.000	8.949.081.000	-
Pendapatan Transfer Antar Daerah	667.558.000.000	674.509.989.247	556.101.342.025	626.128.000.000	595.900.968.077	579.265.691.767	582.000.000.000	582.000.000.000
Pendapatan Bagi Hasil	631.370.000.000	639.001.989.247	532.561.552.641	626.128.000.000	563.887.968.077	551.844.602.271	582.000.000.000	582.000.000.000
Bantuan Keuangan	36.188.000.000	35.508.000.000	23.539.789.384	-	32.013.000.000	27.421.089.496	-	-
Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah	131.312.629.040	123.026.614.057	116.407.153.132	-	-	-	-	-
Hibah	-	-	339.000.000	-	-	294.866.952	-	-
Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	131.312.629.040	123.026.614.057	116.068.153.132	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Daerah	4.760.117.165.040	5.115.782.364.563	4.822.887.281.737	5.337.927.420.000	5.018.846.406.337	4.969.420.739.384	4.828.502.867.632	5.391.326.887.261
BELANJA DAERAH								
Belanja Operasi	3.714.396.640.741	4.104.816.025.439	3.781.987.198.191	4.325.311.416.434	4.052.284.946.533	3.813.525.640.923	3.932.024.402.000	4.109.926.403.811
Belanja Pegawai	1.564.260.064.131	1.790.256.137.357	1.708.462.916.083	1.932.415.819.173	1.625.302.485.043	1.569.996.280.372	1.629.553.033.842	1.786.136.328.651
Belanja Barang dan Jasa	2.076.029.393.210	2.200.019.938.982	1.983.309.901.739	2.200.559.049.261	2.239.785.538.226	2.079.211.268.876	2.184.824.451.158	2.183.704.434.918
Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-

URAIAN	TA 2021			TA 2022			TA 2023	TA 2024
	INDUK	PERUBAHAN	REALISASI (<i>Audited</i>)	INDUK	PERUBAHAN	REALISASI (<i>Un-Audited</i>)	INDUK	TARGET RKPD
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	70.825.183.400	107.491.869.400	85.550.563.669	183.996.692.000	181.157.067.264	158.850.512.925	110.017.617.000	134.203.895.712
Belanja Bantuan Sosial	3.282.000.000	7.048.079.700	4.663.816.700	8.339.856.000	6.039.856.000	5.467.578.750	7.629.300.000	5.881.744.530
Belanja Modal	1.089.994.528.299	1.181.452.834.129	953.669.847.701	1.163.915.612.566	1.152.919.989.803	1.048.844.590.189	981.957.166.912	1.169.238.570.360
Belanja Modal Tanah	140.728.528.578	124.927.890.834	52.042.383.689	96.718.275.429	79.733.021.616	63.702.048.900	38.803.972.800	115.711.335.340
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	193.465.267.333	255.556.647.050	228.830.535.556	234.984.080.439	268.642.192.971	248.668.073.407	137.024.522.897	213.591.525.351
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	316.858.675.443	349.676.591.411	271.292.301.923	340.993.931.843	349.836.308.178	307.769.407.374	356.771.811.988	344.703.671.388
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	420.640.124.273	438.260.330.730	391.427.601.258	478.433.122.484	441.856.731.647	416.883.937.675	443.856.041.286	493.344.040.215
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.365.085.637	12.746.021.212	9.911.290.075	11.926.202.371	12.001.735.391	11.446.554.185	5.339.589.831	713.444.745
Belanja Modal Aset Lainnya	5.936.847.035	285.352.892	165.735.200	860.000.000	850.000.000	374.568.648	161.228.110	1.174.553.321
Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000	50.297.065.937	28.388.900.264	55.000.000.000	13.091.366.523	9.341.768.995	69.839.913.090	101.962.989.098
Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000	50.297.065.937	28.388.900.264	55.000.000.000	13.091.336.523	9.341.768.995	69.839.913.090	101.962.989.098
Belanja Transfer	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Daerah	4.854.391.169.040	5.336.565.925.505	4.764.045.946.156	5.544.227.029.000	5.218.296.302.859	4.871.712.000.107	4.983.821.482.002	5.381.127.963.269
Surplus / (Defisit) Belanja Daerah	(94.274.004.000)	(220.783.560.942)	58.841.335.580	(206.299.609.000)	(199.449.896.522)	97.708.739.277	(155.318.614.370)	10.198.923.992
PEMBIAYAAN DAERAH								
Penerimaan Pembiayaan	183.036.004.000	288.545.560.942	288.545.560.942	291.474.609.000	279.624.896.522	279.624.248.290	270.790.614.370	62.123.076.008
Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)	183.036.004.000	288.545.560.942	288.545.560.942	291.474.609.000	279.624.896.522	279.624.248.290	270.790.614.370	62.123.076.008
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	-	-

URAIAN	TA 2021			TA 2022			TA 2023	TA 2024
	INDUK	PERUBAHAN	REALISASI (<i>Audited</i>)	INDUK	PERUBAHAN	REALISASI (<i>Un-Audited</i>)	INDUK	TARGET RKPD
Pengeluaran Pembiayaan	88.762.000.000	67.762.000.000	67.762.000.000	85.175.000.000	80.175.000.000	58.175.000.000	115.472.000.000	72.322.000.000
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal Daerah	84.762.000.000	67.762.000.000	67.762.000.000	81.175.000.000	80.175.000.000	58.175.000.000	111.472.000.000	68.322.000.000
<i>PT. Bhumi Pandanaran Sejahtera</i>	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	7.000.000.000	2.000.000.000	-	11.000.000.000	10.000.000.000
<i>PDAM Tirta Moedal</i>	52.412.000.000	52.412.000.000	52.412.000.000	30.675.000.000	30.675.000.000	30.675.000.000	48.972.000.000	7.322.000.000
<i>PD BPR Bank Pasar</i>	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.000.000.000
<i>PD BPR BKK</i>	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-
<i>PT Taman Satwa</i>	7.850.000.000	7.850.000.000	7.850.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	-	25.000.000.000	25.000.000.000
<i>Bank Jateng</i>	16.000.000.000	-	-	21.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	24.000.000.000	24.000.000.000
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah	4.000.000.000	-	-	4.000.000.000	-	-	4.000.000.000	4.000.000.000
<i>Dana bergulir</i>	4.000.000.000	-	-	4.000.000.000	-	-	4.000.000.000	4.000.000.000
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Netto	94.274.004.000	220.783.560.942	220.783.560.942	206.299.609.000	199.449.896.522	221.449.248.290	155.318.614.370	(10.198.923.992)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-	279.624.896.522	-	-	319.157.987.567	-	-

Sumber : Bappeda, BPKAD, dan Bapenda Kota Semarang, 2023

Retribusi pada struktur tahun 2024 menggunakan nomenklatur sesuai UU no 1 tahun 2022

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan instrumen yang mencerminkan kapasitas fiskal suatu daerah. Kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dinilai melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Dengan demikian, efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah melalui belanja daerah tidak terlepas dari kapasitas fiskal yang dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah Kota Semarang, arah kebijakan keuangan daerah tahun 2024 antara lain:

- 1) Mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui:
 - Penerapan rancangan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang sudah menetapkan tarif baru sesuai perhitungan berdasarkan objek pajak dan retribusi yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, serta PP Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah yang memiliki potensi besar seperti PBB, BPHTB, Pajak Air Tanah, dan Pajak Reklame, termasuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, dan Pajak Hiburan
 - Pembenahan manajemen penerimaan PAD terutama fokus pada pembenahan data wajib pajak dan objek pajak, kemudahan pembayaran pajak berbasis IT (e-tax), peningkatan ketaatan wajib pajak, dan peningkatan SDM untuk mencegah kebocoran penerimaan pajak terutama pemeriksa pajak dan appraisal/penilai objek pajak, termasuk di dalamnya peningkatan basis data pajak dengan menerjunkan petugas lapangan untuk melakukan pengecekan secara langsung;
 - Mengoptimalkan potensi penerimaan retribusi melalui optimalisasi objek retribusi yang belum maksimal pendapatannya dengan bekerjasama dengan pihak di luar Pemerintah Kota Semarang, termasuk dari Kejaksaan dan Kepolisian.
- 2) Mengoptimalkan sumber pendapatan lain yang sah;
- 3) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah. Optimalisasi potensi pendapatan dari bagi hasil laba deviden kepada Pemda atas Penyertaan Modal perusahaan milik daerah, antara lain dari PDAM, PT. BPS, Perusda Bank Pasar, Perusda BPR/BKK, PT. Taman Satwa, dan PT. Bank Jateng;
- 4) Mengoptimalkan sumber pendapatan dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan
- 5) Mengembangkan alternatif-alternatif pembiayaan pembangunan selain dari APBD, yaitu melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), dan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Di tahun 2024 diharapkan KPBU Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik akan dapat terealisasi, selain KPBU SPAM Semarang Barat yang sudah berjalan.

Arah kebijakan pendapatan daerah memperhatikan target yang tertuang dalam RPJMD serta menyesuaikan dengan kondisi perekonomian daerah sebagai berikut:

- 1) Target penerimaan Pendapatan Daerah Kota Semarang tahun 2024 sebesar Rp. 5.391.326.887.261,-;

- 2) Penerimaan pendapatan pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp. 3.431.572.142.261,-;
- 3) Dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp. 2.389.028.620.494,-; Retribusi Daerah sebesar Rp. 936.355.102.989,-; yang terdiri dari Retribusi Non BLUD sebesar Rp. 488.252.551.164,- dan Retribusi BLUD sebesar Rp. 448.102.551.825,-; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 79.688.418.778,; serta Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 26.500.000.000.

Tabel 3. 4

Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang Tahun 2024

SUMBER PAD		Target RKPD 2024
PAJAK DAERAH		2.389.028.620.494
1	Pajak Hotel	227.917.355.286
2	Pajak Restoran	330.940.294.304
3	Pajak Hiburan	67.407.091.693
4	Pajak Parkir	31.119.573.098
5	Pajak Tenaga Listrik	290.917.376.329
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	165.869.235
7	Pajak Reklame	54.560.790.648
8	Pajak Air Tanah	26.810.222.219
9	Pajak Sarang Burung Walet	830.962
10	Pajak BPHTB	706.745.485.316
11	PBB Pedesaan & Perkotaan	652.443.731.404
RETRIBUSI DAERAH		936.355.102.989
I. NON BLUD		488.252.551.164
1	Dinas Perdagangan	91.399.614.303
2	Dinas Lingkungan Hidup	169.723.755.135
3	Dinas Perhubungan	135.286.920.000
4	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	4.908.772.276
5	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	11.520.500.140
6	Dinas Penataan Ruang	61.114.888.951
7	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	78.926.000
8	Dinas Tenaga Kerja	5.141.230.800
9	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	6.260.728.950
10	Bagian Rumah Tangga Setda	355.262.500
11	Dinas Pemadam Kebakaran	276.330.311
12	Dinas Pendidikan	809.097.230
13	Dinas Perikanan	281.266.367
14	Dinas Pekerjaan Umum	278.347.523
15	Dinas Pertanian	492.498.678
16	Kecamatan	324.412.000
II. NON BLUD		448.102.551.825
1	RSUD KRMT Wongsonegoro	331.935.007.242
2	Dinas Perhubungan (BLUD BRT)	37.734.000.000
3	Dinas Kesehatan (UPTD Puskesmas)	76.836.344.583
4	Dinas Kesehatan (Labkes)	1.597.200.000
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN		79.688.418.778
1	PDAM	28.875.000.000
2	PERUSDA BANK PASAR	1.925.000.000
3	PERUSDA BPR/BKK	814.069.938
4	PT. TAMAN SATWA	574.348.840
5	PT. BANK JATENG	47.500.000.000

SUMBER PAD		Target RKPD 2024
LAIN-LAIN PAD YANG SAH		26.500.000.000
1	BPKAD	20.000.000.000
2	Badan Pendapatan Daerah	5.000.000.000
3	Dinas Perdagangan	1.500.000.000
PENDAPATAN ASLI DAERAH		3.431.572.142.261

Sumber : Bappeda, Bapenda Kota Semarang, 2023

Retribusi pada struktur tahun 2024 menggunakan nomenklatur sesuai UU no 1 tahun 2022

- 4) Pendapatan Transfer tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp. 1.959.754.745.000,- atau 0,15% lebih rendah dibandingkan APBD Induk 2023 yang tercatat sebesar Rp. 1.962.790.329.000,-. Target ini juga lebih rendah 19,12% dari realisasi 2022 sebesar Rp. 2.423.149.928.403,- dan belum memperhitungkan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID) dan Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Kota Semarang akan mengalokasikan target Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif daerah (DID), serta Bantuan Keuangan (Bankeu) setelah ada kepastian anggaran baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Pendapatan daerah Kota Semarang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Dari data APBD Induk di tahun 2021 – 2023, berdasarkan struktur keuangan PP Nomor 12 Tahun 2019, yang menempati porsi terbesar dalam kontribusi rata-rata terhadap pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 55,41%, diikuti Pendapatan Transfer sebesar 43,67% dan disusul sektor Lain-lain pendapatan yang sah sebesar 0,92%. Sedangkan untuk proyeksi RKPD Tahun 2024, porsi Pendapatan daerah ditargetkan berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 63,65%, Pendapatan Transfer mengalami penurunan dari tahun 2023 dengan porsi 36,35%, dan tidak terdapat pendapatan dari pos Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Hal ini dikarenakan Pendapatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sebelumnya masuk ke dalam pos Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah berpindah ke pos Dana Transfer, khususnya pada pos DAK non fisik.

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2021 s/d 2023), Pendapatan Asli Daerah (PAD) selalu lebih besar daripada Pendapatan Transfer dengan perbandingan rerata antara PAD : Pendapatan Transfer : Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah 55,41 : 43,67 : 0,92. Kondisi ini menunjukkan Pemerintah Kota Semarang memiliki ketergantungan yang relatif rendah terhadap Pendapatan Transfer baik dari Pemerintah Pusat maupun Transfer Antar Daerah (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah). Di rencana tahun 2024, rasio kemandirian fiskal daerah ini diperkirakan berada di 63,65%. Porsi Pendapatan Transfer yang lebih kecil menunjukkan rendahnya celah fiskal (*fiscal gap*) sebagai akibat selisih kebutuhan fiskal (*fiscal need*) dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*). Secara lengkap, persentase sumber pendapatan daerah dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 5
Persentase Sumber-sumber Pendapatan Daerah Kota Semarang
Tahun 2021-2023 dan Proyeksi 2024

KEUANGAN DAERAH	2021	2022	2023	Rerata	2024
	APBD Induk	APBD Induk	APBD Induk		Proyeksi RPKD
Pendapatan Asli Daerah / PAD (%)	53,41	53,46	59,35	55,41	63,65
Pendapatan Transfer (%)	43,83	46,54	40,65	43,67	36,35
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (%)	2,76	0,00	0,00	0,92	0,00
PENDAPATAN DAERAH	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Bappeda, BPKAD, dan Bapenda Kota Semarang, 2023

Tabel 3. 6
Rincian Kontribusi Pendapatan Daerah Kota Semarang
Tahun 2021-2023 dan Proyeksi 2024

KEUANGAN DAERAH	APBD Induk 2021	APBD Induk 2022	APBD Induk 2023	Rerata	Proyeksi RPKD 2024
	Kontribusi (%)	Kontribusi (%)	Kontribusi (%)		Kontribusi (%)
1) Pajak Daerah	77,67	78,05	76,42	77,38	69,62
2) Retribusi Daerah	5,09	4,93	5,21	5,08	27,29
3) Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	1,55	1,74	2,56	1,95	2,32
4) Lain-lain PAD yang Sah	15,70	15,27	15,81	15,59	0,77
Pendapatan Asli Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	68,01	74,80	70,35	71,05	70,30
2) Pendapatan Transfer Antar Daerah	31,99	25,20	29,65	28,95	29,70
Pendapatan Transfer	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1) Hibah	-	-	-	-	-
2) Dana Darurat	-	-	-	-	-
3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	100,00	-	-	100,00	-
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100,00	-	-	100,00	-

Sumber : Bappeda, BPKAD, dan Bapenda Kota Semarang, 2023

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran

berkenaan. Klasifikasi belanja daerah berdasarkan PP No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah, terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Dari sisi APBD Induk, alokasi Belanja Daerah Kota Semarang selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (2021-2023) didominasi oleh Belanja Operasi dengan rerata 77,81%, disusul kemudian oleh belanja modal dengan rerata 21,05% dan belanja tidak terduga dengan rerata 1,14% dari belanja daerah, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 7
Persentase Pembentuk Belanja Daerah
Tahun 2021 s/d 2023 dan Proyeksi 2024

KEUANGAN DAERAH	2021	2022	2023	Rerata	2024
	APBD Induk	APBD Induk	APBD Induk		Proyeksi RKPD
Belanja Operasi (%)	76,52	78,01	78,90	77,81	76,38
Belanja Modal (%)	22,45	21,00	19,70	21,05	21,73
Belanja Tidak terduga (%)	1,03	0,99	1,40	1,14	1,89
BELANJA DAERAH	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

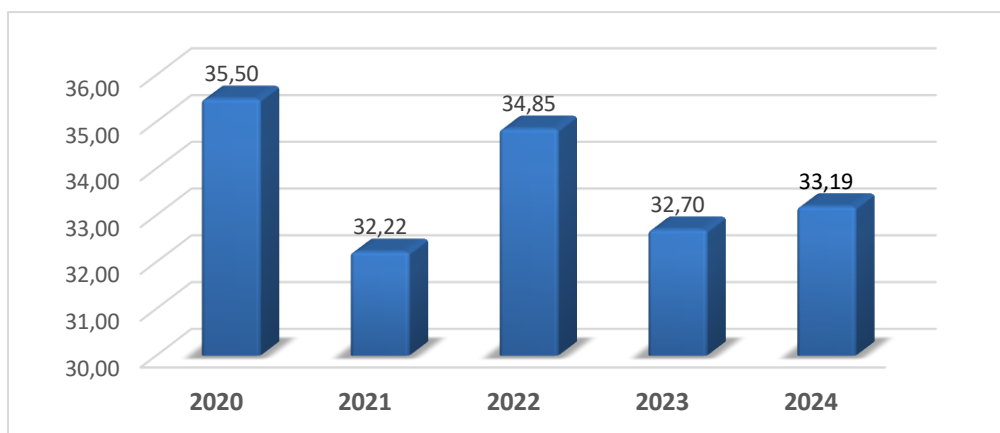
Sumber : Bappeda, BPKAD, dan Bapenda Kota Semarang, 2023

Alokasi Belanja Daerah RKPD tahun 2024 diarahkan pada pengelolaan belanja daerah yang dilaksanakan dengan pola yang proporsional, efisien dan efektif dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Kebijakan Belanja Daerah pada RKPD tahun 2024 adalah:

- 1) Proyeksi struktur keuangan Belanja Daerah ditentukan berdasarkan tren porsi realisasi 3 (tiga) tahun terakhir, namun tetap memperhatikan besaran belanja wajib/mengikat dan kebutuhan prioritas di tahun berjalan. Pada proyeksi RKPD 2024, proporsi belanja operasi terhadap belanja daerah sebesar 76,38%, proporsi belanja modal terhadap belanja daerah sebesar 21,73%, dan proporsi belanja tidak terduga terhadap belanja daerah sebesar 1,89%.
- 2) Belanja Daerah tahun 2024 diarahkan pada prioritas sebagai berikut:
 - a. Pemenuhan *mandatory spending* seperti pengalokasian anggaran minimal pada sektor Pendidikan dan Kesehatan. Di tahun 2024, proporsi anggaran bidang Kesehatan terhadap belanja daerah telah terpenuhi, yaitu sebesar 19,11% yang terdiri dari anggaran pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Sedangkan proporsi anggaran untuk fungsi Pendidikan terhadap belanja daerah sebesar 15,28% yang terdiri dari anggaran pada Dinas Pendidikan dan anggaran Diklat di BKPP. Proporsi tersebut diperkirakan akan bertambah setelah ada kepastian alokasi DAK tahun 2024. Kota Semarang berkomitmen akan terus mendorong alokasi Pendidikan hingga mencapai 20%.
 - b. Penyediaan pelayanan dasar untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
 - c. Pemenuhan program prioritas Wali Kota yang tertuang dalam penjabaran visi dan misi RPJMD Tahun 2021-2026.
 - d. Penyelesaian permasalahan dan isu strategis daerah.
 - e. Mendorong pemulihan dan percepatan peningkatan ekonomi daerah.
 - f. Pengembangan infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam

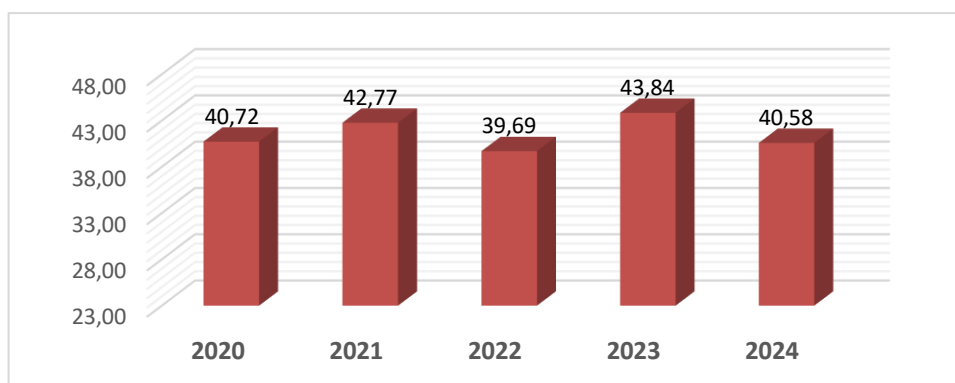
rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar wilayah. Oleh Karena itu, Kota Semarang mengalokasikan anggaran bagi kelurahan-kelurahan melalui fasilitasi musrenbangkel dengan total anggaran sebesar Rp. 208.489.000.000,- sebagai anggaran pendamping selain anggaran kelurahan yang bersumber dari DAU.

- g. Pemenuhan dukungan persiapan Pemilu dan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.
 - h. Dukungan terhadap prioritas nasional dan arahan presiden, yaitu yang terkait dengan penanganan kemiskinan ekstrem, *stunting*, dan pengendalian inflasi.
- 3) Belanja pegawai pada target RKPD 2024 meliputi Gaji dan Tunjangan Pegawai Aparatur Sipil Negara tanpa memperhitungkan belanja pegawai yang dianggarkan melalui DAK. Perhitungan gaji dan tunjangan tersebut berpedoman pada ketetapan tentang tambahan penghasilan bagi PNS, CPNS dan P3K di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Dalam rancangan belanja pegawai tahun 2024, pemberian TPP diperhitungkan sebanyak 12 kali. Rerata porsi belanja pegawai terhadap belanja daerah pada APBD Induk dari tahun 2020 sampai dengan 2023 adalah 33,82%, dan dengan memperhitungkan kebutuhan di tahun 2024, diperkirakan porsinya turun menjadi 33,19% dari belanja daerah. Tren penurunan porsi Belanja Pegawai tersebut akan terus dipertahankan untuk menekan proporsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah hingga mencapai kondisi ideal yang diterapkan pemerintah yaitu maksimal 30%. Secara nominal, anggaran untuk belanja pegawai di tahun 2024 meningkat dibandingkan di tahun 2023 karena adanya CPNS yang diangkat menjadi PNS serta adanya penambahan PPPK.



Gambar 3. 4
Porsi APBD Induk Belanja Pegawai Terhadap Belanja Daerah (%)

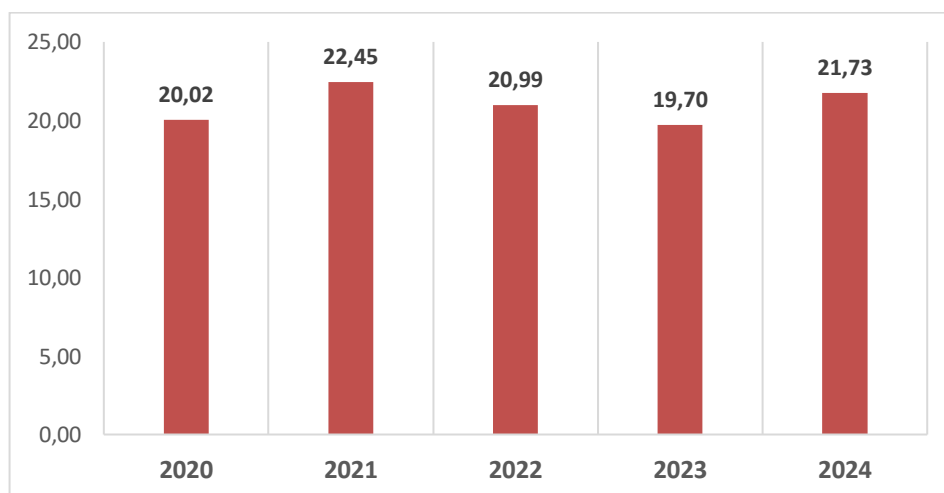
- 4) Rasio belanja barang dan jasa digunakan untuk mengukur porsi belanja barang dan jasa terhadap total belanja daerah. Jika melihat APBD Induk 2020-2023, porsi alokasi belanja barang dan jasa Kota Semarang yang relatif tinggi melebihi batas minimal penganggaran barang dan jasa paling sedikit 40% perlu dikaji ulang efektivitasnya, karena bisa jadi mengindikasikan pemborosan di anggaran. Hal ini mengingat belanja barang dan jasa sifatnya mendukung kegiatan dan pemeliharaan. Pada RKPD 2024 porsi alokasi belanja barang dan jasa ditargetkan sebesar 40,58% dari belanja daerah, yaitu sebesar Rp. 2.183.704.434.918,-. Alokasi ini lebih rendah dari porsi belanja barang dan jasa APBD 2023 sebesar 43,84% atau Rp. 2.184.824.451.158 dari total belanja sebesar Rp. 4.983.821.482.002.



Gambar 3. 5

Porsi APBD Induk Belanja Barang dan Jasa Terhadap Belanja Daerah (%)

- 5) Belanja hibah dan bantuan sosial yang dialokasikan pada RKPD 2024 masih berasumsi akan mengakomodir hibah KPU, Bawaslu untuk penyelenggaraan Pemilu, KONI, Pramuka, PMI, Bantuan Keuangan Partai Politik, ditambah dengan hibah dan bansos lainnya. Penganggaran Hibah ke KPU dan Bawaslu dilakukan setelah berkoordinasi dengan KPU dan bawaslu untuk menentukan kebutuhan anggaran pemilu di Tahun 2024. Penganggaran hibah dan bansos di tahun 2024 dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 74 tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 6) Rasio belanja modal digunakan untuk mengukur porsi belanja modal yang dibelanjakan terhadap total belanja daerah dalam rangka pemberian layanan kepada masyarakat. Proyeksi belanja modal pada RKPD 2024 adalah sebesar Rp. 1.169.238.570.360,- atau 21,73% dari pagu belanja daerah. Kedepan Pemerintah Kota Semarang akan berupaya untuk memenuhi proporsi belanja modal ideal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyebutkan bahwa jumlah belanja modal yang dialokasikan dalam APBD sekurang-kurangnya sebesar 29% dari total belanja daerah.



Gambar 3. 6

Porsi APBD Induk Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah (%)

- 7) Belanja Tidak Terduga merupakan anggaran penyediaan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kota Semarang. Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan memperhatikan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya yang disebabkan oleh bencana alam atau bencana lainnya. Sebagai antisipasi terhadap hal tersebut, BTT pada RKPD Tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp. 101.962.989.098,- atau 1,89% dari total belanja daerah.

Tabel 3. 8
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Semarang
Tahun 2021 s/d 2024

URAIAN	TA 2021			TA 2022			TA 2023	TA 2024
	INDUK	PERUBAHAN	REALISASI (Audited)	INDUK	PERUBAHAN	REALISASI (Un-Audited)	INDUK	TARGET RKPD
BELANJA DAERAH								
Belanja Operasi	3.714.396.640.741	4.104.816.025.439	3.781.987.198.191	4.325.311.416.434	4.052.284.946.533	3.813.525.640.923	3.932.024.402.000	4.109.926.403.811
Belanja Pegawai	1.564.260.064.131	1.790.256.137.357	1.708.462.916.083	1.932.415.819.173	1.625.302.485.043	1.569.996.280.372	1.629.553.033.842	1.786.136.328.651
Belanja Barang dan Jasa	2.076.029.393.210	2.200.019.938.982	1.983.309.901.739	2.200.559.049.261	2.239.785.538.226	2.079.211.268.876	2.184.824.451.158	2.183.704.434.918
Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	70.825.183.400	107.491.869.400	85.550.563.669	183.996.692.000	181.157.067.264	158.850.512.925	110.017.617.000	134.203.895.712
Belanja Bantuan Sosial	3.282.000.000	7.048.079.700	4.663.816.700	8.339.856.000	6.039.856.000	5.467.578.750	7.629.300.000	5.881.744.530
Belanja Modal	1.089.994.528.299	1.181.452.834.129	953.669.847.701	1.163.915.612.566	1.152.919.989.803	1.048.844.590.189	981.957.166.912	1.169.238.570.360
Belanja Modal Tanah	140.728.528.578	124.927.890.834	52.042.383.689	96.718.275.429	79.733.021.616	63.702.048.900	38.803.972.800	115.711.335.340
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	193.465.267.333	255.556.647.050	228.830.535.556	234.984.080.439	268.642.192.971	248.668.073.407	137.024.522.897	213.591.525.351
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	316.858.675.443	349.676.591.411	271.292.301.923	340.993.931.843	349.836.308.178	307.769.407.374	356.771.811.988	344.703.671.388
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	420.640.124.273	438.260.330.730	391.427.601.258	478.433.122.484	441.856.731.647	416.883.937.675	443.856.041.286	493.344.040.215
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.365.085.637	12.746.021.212	9.911.290.075	11.926.202.371	12.001.735.391	11.446.554.185	5.339.589.831	713.444.745
Belanja Modal Aset Lainnya	5.936.847.035	285.352.892	165.735.200	860.000.000	850.000.000	374.568.648	161.228.110	1.174.553.321
Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000	50.297.065.937	28.388.900.264	55.000.000.000	13.091.366.523	9.341.768.995	69.839.913.090	101.962.989.098
Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000	50.297.065.937	28.388.900.264	55.000.000.000	13.091.366.523	9.341.768.995	69.839.913.090	101.962.989.098
Belanja Transfer	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Daerah	4.854.391.169.040	5.336.565.925.505	4.764.045.946.156	5.544.227.029.000	5.218.296.302.859	4.871.712.000.107	4.983.821.482.002	5.381.127.963.269

Sumber : Bappeda, BPKAD, dan Bapenda Kota Semarang, 2023

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Berdasarkan APBD Induk, alokasi penerimaan pembiayaan daerah Kota Semarang dari tahun 2020-2023 sebagian besar bersumber dari SiLPA, sedangkan pengeluaran pembiayaan lebih banyak digunakan untuk Penyertaan Modal Daerah dan Pemberian Pinjaman Daerah (Dana Bergulir). Besaran penyertaan modal berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal, namun di tahun 2024 terdapat penyertaan modal yang nilainya di bawah Perda karena bertujuan untuk mendorong kemandirian BUMD tersebut. Adapun rencana Penyertaan Modal Daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 9
Rencana Penyertaan Modal Daerah Kota Semarang Tahun 2024

No	BUMD	Rencana Penyertaan Modal Tahun 2024 (Rp)
1	PT. Bhumi Pandanaran Sejahtera	10.000.000.000
2	PDAM Tirta Moedal	7.322.000.000
3	PD BPR Bank Pasar	2.000.000.000
4	PT Taman Satwa	25.000.000.000
5	Bank Jateng	24.000.000.000
<i>Jumlah</i>		68.322.000.000

Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kota Semarang, 2023

Pada RKPD Tahun 2024 memperhitungkan alokasi penerimaan pembiayaan yang akan diterima oleh Pemerintah Kota Semarang sebesar Rp. 62.123.076.008,- yang berasal dari Silpa. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah yang dikeluarkan direncanakan sebesar Rp. 72.322.000.000,- yang dialokasikan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD sebesar Rp. 68.322.000.000,- dan Pemberian Pinjaman Daerah (Dana Bergulir) sebesar Rp. 4.000.000.000,-.

Tabel 3. 10
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Semarang Tahun 2021 s/d 2024

URAIAN	TA 2021			TA 2022			TA 2023	TA 2024
	INDUK	PERUBAHAN	REALISASI (Audited)	INDUK	PERUBAHAN	REALISASI (Un-Audited)	INDUK	TARGET RKPD
PEMBIAYAAN DAERAH								
Penerimaan Pembiayaan	183.036.004.000	288.545.560.942	288.545.560.942	291.474.609.000	279.624.896.522	279.624.248.290	270.790.614.370	62.123.076.008
Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)	183.036.004.000	288.545.560.942	288.545.560.942	291.474.609.000	279.624.896.522	279.624.248.290	270.790.614.370	62.123.076.008
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	88.762.000.000	67.762.000.000	67.762.000.000	85.175.000.000	80.175.000.000	58.175.000.000	115.472.000.000	72.322.000.000
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal Daerah	84.762.000.000	67.762.000.000	67.762.000.000	81.175.000.000	80.175.000.000	58.175.000.000	111.472.000.000	68.322.000.000
PT. Bhumi Pandanaran Sejahtera	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	7.000.000.000	2.000.000.000	-	11.000.000.000	10.000.000.000
PDAM Tirta Moedal	52.412.000.000	52.412.000.000	52.412.000.000	30.675.000.000	30.675.000.000	30.675.000.000	48.972.000.000	7.322.000.000
PD BPR Bank Pasar	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.000.000.000
PD BPR BKK	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-
PT Taman Satwa	7.850.000.000	7.850.000.000	7.850.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	-	25.000.000.000	25.000.000.000
Bank Jateng	16.000.000.000	-	-	21.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	24.000.000.000	24.000.000.000
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah	4.000.000.000	-	-	4.000.000.000	-	-	4.000.000.000	4.000.000.000
Dana bergulir	4.000.000.000	-	-	4.000.000.000	-	-	4.000.000.000	4.000.000.000
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Netto	94.274.004.000	220.783.560.942	220.783.560.942	206.299.609.000	199.449.896.522	221.449.248.290	155.318.614.370	(10.198.923.992)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-	279.624.896.522	-	-	-	-	-

Sumber : Bappeda, BPKAD, dan Bapenda Kota Semarang, 2023

Dari uraian tersebut di atas, maka proyeksi struktur Keuangan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dapat adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 11
Proyeksi Struktur Keuangan Daerah Tahun 2024

KODE			URAIAN	TA 2024 TARGET RKPD
4			PENDAPATAN DAERAH	
4	1		Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3.431.572.142.261
4	1	1	Pajak Daerah	2.389.028.620.494
4	1	2	Retribusi Daerah	936.355.102.989
			<i>a. Retribusi Non BLUD</i>	488.252.551.164
			<i>b. Retribusi BLUD</i>	448.102.551.825
4	1	3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	79.688.418.778
4	1	4	Lain - lain PAD yang Sah	26.500.000.000
			<i>a. BLUD</i>	-
			<i>b. Selain BLUD</i>	26.500.000.000
4	2		Pendapatan Transfer	1.959.754.745.000
4	2	1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.377.754.745.000
4	2	1 1	Dana Perimbangan	1.371.841.248.000
4	2	1 2	Dana Insentif Daerah (DID)	-
4	2	2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	582.000.000.000
4	2	2 1	Pendapatan Bagi Hasil	582.000.000.000
4	2	2 2	Bantuan Keuangan	-
4	3		Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah	-
4	3	1	Hibah	-
4	3	2	Dana Darurat	-
4	3	3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-
			Jumlah Pendapatan Daerah	5.391.326.887.261
5			BELANJA DAERAH	
5	1		Belanja Operasi	4.109.926.403.811
5	1	1	Belanja Pegawai	1.786.136.328.651
5	1	2	Belanja Barang dan Jasa	2.183.704.434.918
5	1	3	Belanja Bunga	-
5	1	4	Belanja Subsidi	-
5	1	5	Belanja Hibah	134.203.895.712
5	1	6	Belanja Bantuan Sosial	5.881.744.530
5	2		Belanja Modal	1.169.238.570.360
5	2	01	Belanja Modal Tanah	115.711.335.340
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	213.591.525.351
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	344.703.671.388
5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	493.344.040.215
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	713.444.745
5	2	06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.174.553.321
5	3		Belanja Tidak Terduga	101.962.989.098
5	3	1	Belanja Tidak Terduga	101.962.989.098
			Jumlah Belanja Daerah	5.381.127.963.269
			Surplus / (Defisit) Belanja Daerah	10.198.923.992
6			PEMBIAYAAN DAERAH	
6	1		Penerimaan Pembiayaan	62.123.076.008
6	1	1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)	62.123.076.008
6	1	2	Pencairan Dana Cadangan	-
6	1	3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-
6	1	4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-
6	1	5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-
6	1	6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-

KODE			URAIAN	TA 2024
				TARGET RKPD
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	62.123.076.008
6	2		Pengeluaran Pembiayaan	
6	2	1	Pembentukan Dana Cadangan	-
6	2	2	Penyertaan Modal Daerah	68.322.000.000
			<i>Penyertaan Modal PDAM</i>	7.322.000.000
			<i>Penyertaan Modal Bank Pasar</i>	2.000.000.000
			<i>Penyertaan Modal Bank Jateng</i>	24.000.000.000
			<i>Penyertaan Modal PT. BPS (holding company)</i>	10.000.000.000
			<i>Penyertaan Modal PT. Taman Satwa</i>	25.000.000.000
6	2	3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-
6	2	4	Pemberian Pinjaman Daerah	4.000.000.000
6	2	5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	72.322.000.000
			Pembiayaan Netto	(10.198.923.992)
6	3		Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-

Sumber : Bappeda, Bappenda, dan BPKAD Kota Semarang, 2023

Retribusi pada struktur tahun 2024 menggunakan nomenklatur sesuai UU No. 1 Tahun 2022

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan Prioritas Pembangunan daerah disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi RKPD Tahun 2022 Triwulan IV sebagai pijakan kondisi yang ada untuk merumuskan target sasaran RKPD Tahun 2024. Prioritas Daerah yang teruang dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2024 berdasarkan:

1. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024;
2. Prioritas RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
3. Peraturan Daerah tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang 2021-2026; dan
4. Pokok-pokok pikiran DPRD.

Proses integrasi penyusunan RKPD Kota Semarang tahun 2024 digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4. 1
Komponen penyusunan RKPD Kota Semarang 2024

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026. Target tahun ketiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) diupayakan akan tercapai melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun sebagai bentuk penjabaran RPJMD dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan, serta berpedoman juga pada program kebijakan prioritas Rencana Pembangunan Tahunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2024.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah. Sehingga untuk mencapai kesinambungan prioritas pembangunan Kota Semarang maka penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 harus selaras dan sinergis dengan RPJMD Kota Semarang Periode Tahun 2021-2026.

Dalam konteks penyusunan perencanaan pembangunan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 4 (empat) prinsip pendekatan dalam penyusunan dokumen pembangunan yaitu (1) pendekatan perencanaan teknokratik, (2) pendekatan perencanaan politik, (3) pendekatan perencanaan partisipatif, dan (4) pendekatan perencanaan dari bawah (*bottom up*) dan pendekatan perencanaan dari atas (*top down*).

Penyusunan prioritas pembangunan RKPd Kota Semarang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria-kriteria antara lain (1) Kesesuaian dengan dokumen perencanaan; (2) Urgensitas penanganan isu; dan (3) kemanfaatan pada hajat hidup masyarakat. Selain kriteria tersebut penyusunan prioritas dirumuskan dengan memperhatikan (1) Visi dan Misi Pembangunan Kota Semarang sebagaimana RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, (2) Permasalahan dan Isu Strategis Daerah, dan (3) Prioritas program-program Pembangunan baik di tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun Tingkat Nasional.

Visi pembangunan daerah sebagaimana RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu “Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat yang berlandaskan Pancasila, dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”. Perwujudan visi tersebut mengandung makna Kota Semarang sebagai kota metropolitan dengan Sumber Daya Manusia unggul, produktif, berdaya saing dan berwawasan lingkungan.

Perwujudan visi tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah yaitu:

- Misi 1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial.
- Misi 2. Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila.
- Misi 3. Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota.
- Misi 4. Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan.
- Misi 5. Menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis dan menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Gambar 4. 2
Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2021-2026

Makna dari visi tersebut adalah Kota Semarang yang hebat akan menjadi semakin hebat kedepannya. Terbukti bahwa Kota metropolitan ini telah dapat menyelesaikan isu-isu strategis kota pada lima tahun terakhir, antara lain meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi, meningkatkan kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa serta industri terhadap PDRB, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Gender, meningkatkan nilai investasi, menuntaskan rob dan banjir, serta meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi. Tataran semakin hebat dapat dimaknai bahwa lima tahun ke depan akan siap menghadapi tantangan global, problematika perkotaan yang lebih heterogen, tuntutan layanan publik yang lebih tinggi serta tetap memperhatikan wawasan lingkungan. Untuk mencapai Kota yang semakin hebat tersebut, Pemerintah Kota Semarang bersama masyarakat akan bahu-membahu membangun kota dengan berlandaskan Pancasila dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika. Sehingga menjadi daerah yang kondusif dan dapat mendukung pengembangan ekonomi, sosial dan budaya di masyarakat yang akhirnya dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Definisi SEMAKIN HEBAT dikandung pemahaman bahwa Visi tersebut melalui semangat seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota ingin menguatkan berbagai keunggulan sebagai sebuah kota metropolitan yang memiliki sumber daya manusia yang unggul, ekonomi berbasis kerakyatan yang berdaya saing berbasis riset dan inovasi, berkeadilan sosial, infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan, serta pelayanan publik yang dinamis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya pencapaian visi dan misi Pembangunan Kota Semarang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka target indikator tujuan dan sasaran pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 1

Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Semarang Tahun 2024

Misi/Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2024	
MISI 1: MENINGKATNYA KUALITAS DAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL DAN PRODUKTIF UNTUK MENCAPAI KESEJAHTERAAN DAN KEADILAN SOSIAL						
1	Meningkatnya kualitas dan kapasitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		Poin	84,40 – 86,00	
		1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan Pendidikan dan kesehatan	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,60
				Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,61
				Angka Harapan Hidup	Tahun	77,54
		Tingkat Kearifan Budaya Lokal			Persen	61,05
2	Meningkatnya kearifan budaya lokal	Persentase Tingkat kearifan budaya lokal	Persen	61,05		
2	Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka		Persen	6,50 – 7,60	
		3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Persentase Tingkat partisipasi masyarakat	Persen	94,29
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	70,15
		4	Meningkatnya produktivitas dan keterampilan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	Persen	78,00
				Angka Kemiskinan		Persen
		5	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	Persen	15,20 - 15,50
		6	Terwujudnya pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial	Persentase Penanganan PPKS	Persen	99,87
MISI 2: MENINGKATKAN POTENSI EKONOMI LOKAL YANG BERDAYA SAING DAN STIMULASI PEMBANGUNAN INDUSTRI, BERLANDASKAN RISET DAN INOVASI BERDASAR PRINSIP DEMOKRASI EKONOMI PANCASILA						
3	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing	Laju Pertumbuhan Ekonomi		Persen	5,70 – 6,50	
		7	Meningkatnya produk unggulan daerah	Nilai Ekspor	US\$	3.539.299.867,06
				Persentase peningkatan kunjungan wisata	Persen	6,00
		8	Meningkatnya nilai tambah ekonomi	Persentase peningkatan nilai investasi	% (Juta Rp)	7 (27.362.089)
				PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	Juta Rupiah	104,12
				Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB	Persen	28,84
Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	28,72				
MISI 3: MENJAMIN KEMERDEKAAN MASYARAKAT MENJALANKAN IBADAH, PEMENUHAN HAK DASAR DAN PERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL SERTA HAK ASASI MANUSIA BAGI MASYARAKAT SECARA BERKEADILAN						
4	Meningkatnya pemenuhan hak dasar, kesetaraan gender, dan kondusivitas	Indeks Demokrasi		Nilai	72,80	
		9	Meningkatnya internalisasi ideologi Pancasila serta Wawasan Kebangsaan	Indeks Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK)	Indeks	74,00

Misi/Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2024	
wilayah bagi masyarakat secara berkeadilan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)				Nilai Indeks	95,80	
		10	Meningkatnya akses dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai Indeks	75,20	
	Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban				Persen	9,90	
		11	Meningkatnya kualitas ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	Kejadian	1.251	
MISI 4: MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR BERKUALITAS YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN UNTUK MENDUKUNG KEMAJUAN KOTA							
5	Terwujudnya pembangunan kota yang tangguh, produktif, dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				Persen	56,06
			12	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam	Indeks Kualitas Air	Nilai Indeks	50,01
					Indeks Kualitas Udara	Nilai Indeks	74,00
					Penurunan Emisi CO2	Ton CO2e	168.864,53
					Persentase sampah perkotaan yang tertangani	Persen	71
					Persentase ruang terbuka hijau	Persen	45,35
		Indeks Kinerja Sistem Infrastruktur				Nilai	80,62
			13	Meningkatnya pemerataan pelayanan sarana dan prasarana perkotaan	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu	Persen	73
					Persentase perencanaan regional dan kota yang terintegrasi	Persen	79
					Persentase kawasan banjir dan rob	Persen	3,19
			14	Terwujudnya sarana dan prasarana dasar permukiman yang berkualitas	Persentase lingkungan permukiman sehat	Persen	98,00
					Persentase rumah layak huni	Persen	99,42
			15	Terwujudnya tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan	Persentase tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan	Persen	87
			16	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana	Nilai	109
	17	Mewujudkan sistem transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan	Rasio konektivitas kabupaten/ kota	Rasio	0,5876		
			Pengurangan jumlah titik/ruas rawan macet	Jumlah	2		
MISI 5: MENJALANKAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN SECARA DINAMIS DAN MENYUSUN PRODUK HUKUM YANG SESUAI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA							
6	Terwujudnya reformasi birokrasi yang mumpuni, terbuka, melayani dan	Indeks Reformasi Birokrasi			Nilai Indeks	76,00	
			18	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai/ Predikat	>76/BB
					Opini BPK	Opini	WTP

Misi/Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2024
bertanggung jawab		19 Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai Indeks	83,50
			Indeks SPBE	Skor 0-5	4,3
			Nilai dan status kinerja Pemerintah Daerah (Nilai EKPPD)	Nilai	>3,47/ST
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks	88,35

4.2 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, prioritas pembangunan Kota Semarang dirumuskan secara bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tabel 4. 2
Tema Pembangunan Tahun 2024

Tema RKP Nasional Tahun 2024	Tema RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	Tema RKPD Kota Semarang 2024
Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas	Pemantapan Perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang didukung oleh penguatan struktur yang mendukung keberlanjutan

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2024

Berdasarkan tabel di atas, tema pembangunan Kota Semarang Tahun 2024 selaras dengan Tema Pembangunan baik RKP Nasional dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024. Tema pembangunan Kota Semarang Tahun 2023 bersumber dari arah kebijakan pembangunan RPJMD 2021-2026 yaitu “Pemantapan Perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang didukung oleh penguatan struktur yang mendukung keberlanjutan”.

4.2.1. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024

Tema pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan” dengan memperhatikan 5 (lima) arahan utama Presiden Republik Indonesia terkait fokus pembangunan tahun 2020-2024.

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi

Segala bentuk kendala regulasi, terutama menerbitkan 2 undang-undang dengan pendekatan omnibus law. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kebijakan di tahun 2024 diarahkan untuk meningkatkan produktivitas guna transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan arah kebijakan:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;
3. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
4. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
5. Penguatan daya saing usaha;
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
7. Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
8. Pelaksanaan pemilu 2024.

Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,10 – 5,70%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,00 – 5,70%
3. Rasio Gini nilai 0,374 – 0,377
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,99 – 74,02
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 105 – 108
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 107 – 110
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,70 – 7,50%

4.2.2. Prioritas Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2024

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada “Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata, Didukung Dengan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas”. Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
4. Perbaikan tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,70 – 5,50%
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,43
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,76 – 8,96%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 – 4,94%

4.2.3. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Semarang

Dalam menyusun prioritas-prioritas pembangunan, Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang didapat melalui mekanisme konsultasi publik, forum OPD dan musrenbang merupakan salah satu pertimbangan utama dalam proses perencanaan pembangunan tahun 2024. Masukan dari DPRD juga didapatkan dari hasil reses yang dilakukan, yang dirangkum pada uraian di bawah ini:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan
 - a) Pengembangan UKM yang sesuai era digital;
 - b) Pengembangan Lapak atau Gerai UKM di setiap Kelurahan;
 - c) Mendorong adanya bantuan usaha untuk UMKM;
 - d) Memberikan stimulus dan ruang berusaha kepada pelaku UMKM dan pelaku usaha mikro;
 - e) Mendorong tumbuhnya pelaku ekonomi kreatif di Kota Semarang dengan memberikan fasilitas serta meningkatkan kemampuan pelaku usaha kreatif;
 - f) Perlu bimbingan perizinan UKM dan akses mendapat Kredit Usaha Rakyat;
 - g) Peningkatan pengelolaan pasar tradisional yang ada di wilayah pinggiran Kota Semarang;
 - h) Memberikan kemudahan dalam perizinan guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan sebagai daya tarik para investor perdagangan dan pembangunan pusat perbelanjaan dan infrastruktur MICE.
2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem
 - a) Pembinaan kepada kelompok remaja produktif di bidang usaha;
 - b) Penyediaan program pendampingan usaha bagi lulusan SMA/ SMK atau yang sudah kuliah;
 - c) Lebih memperbanyak bantuan untuk warga lansia khususnya untuk lansia tidak mampu;
 - d) Mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti program gratis pembuatan dokumen kependudukan, gratis layanan *homecare* bagi warga lanjut usia yang mobilitasnya terbatas hingga gratis pemakaman dan santunan kematian;
 - e) Pelaksanaan penjangkauan, penghalauan dan pendataan bagi warga miskin yang berhak mendapat bansos dari pemerintah agar lebih terbuka dan mendalam;
 - f) Pemberian bantuan sosial harus tepat sasaran;
 - g) Memberikan pelatihan keterampilan kepada ibu-ibu rumah tangga;

- h) Pemberian pelatihan kewirausahaan maupun pelatihan lainnya yang menunjang keterampilan masyarakat usia produktif.
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif
 - a) Pemerataan pemberian beasiswa bagi siswa/siswi berprestasi dan siswa/siswi miskin pada jenjang SD dan SMP;
 - b) Memperbanyak program bantuan pendidikan, program-program yang dapat menambah semangat belajar anak usia sekolah;
 - c) Memperbanyak beasiswa untuk masuk perguruan tinggi;
 - d) Penambahan program pelatihan operator EMIS (*Education Management Information System*) bagi para guru Madrasah Diniyah;
 - e) Penguatan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - f) Fokus dalam pemerataan kualitas pendidikan melalui simplikasi kurikulum, penguatan BOS, program guru penggerak, dan juga transformasi tata kelola guru.

 4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota
 - a) Perbaikan jalan yang rusak, baik dengan aspal, paving maupun cor beton;
 - b) Perlu pembangunan drainase dan penataan saluran air;
 - c) Pembangunan talud di sungai kecil maupun besar;
 - d) Perlu pemeriksaan rutin pada setiap saluran air, penggantian gorong-gorong yang telah rusak, dan pengerukan endapan sampah atau tanah;
 - e) Pembangunan infrastruktur di wilayah permukiman yang padat penduduk, seperti peningkatan jalan, saluran, dan perbaikan jembatan;
 - f) Mengoptimalkan pengawasan dan perawatan rumah pompa di Kota Semarang;
 - g) Perlu pembangunan saluran irigasi untuk pertanian;
 - h) Melakukan percepatan dan pemerataan PJU di daerah-daerah pinggiran;
 - i) Peningkatan program bedah rumah tidak layak huni (RTLH);
 - j) Peningkatan penghijauan di seluruh Kota Semarang;
 - k) Perlu bantuan pembangunan maupun rehabilitasi bangunan balai RW maupun balau RT yang telah rusak dan belum ada;
 - l) Memperhatikan ruang public terbuka hijau dan tempat bermain di setiap kelurahan di Kota Semarang;
 - m) Perlu menambah halte untuk Bus Feeder Trans Semarang di beberapa kompleks perumahan, maupun di gang-gang sempit kampung yang padat penduduk;
 - n) Perlu memperbanyak jalur Bus Trans Semarang maupun Feeder yang melewati sekolah;
 - o) Perlu dilakukan kajian yang mendalam tentang manajemen lampu lalu lintas agar kemacetan di Kota Semarang bisa diatasi dengan baik;
 - p) Perlu menambah CCTV di setiap RT dan tempat publik.

 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota
 - a) Perlu terus menggalakkan edukasi tentang mitigasi bencana. Karena Kota Semarang masuk daerah rawan bencana alam yaitu banjir, longsor, dan angin topan;
 - b) Hendaknya pemerintah membuat aturan yang lebih ketat terhadap dampak lingkungan untuk mengantisipasi dampak banjir dan longsor yang

- diakibatkan alih fungsi lahan serta dampak kerusakan lingkungan yang lebih luas lagi;
- c) Realisasi anggaran dari seluruh kegiatan untuk dipastikan sudah berjalan;
 - d) Pemkot Semarang untuk membuat program kerja yang luar biasa dalam menangani pandemi Covid-19 pasca dicabutnya PPKM ini secara masif, terukur, dan jelas anggarannya;
 - e) Pemkot Semarang untuk memberikan perhatian lebih untuk masalah yang timbul di daerah pinggiran yang sekarang ini sudah berkembang baik fisik, sosial, budaya dan sebagainya sebagai penopang aktivitas di tengah kota;
 - f) Pemkot Semarang juga diharapkan memfokuskan pemulihan ekonomi warga dan Kota Semarang secara umum agar pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 ini bisa positif;
 - g) Perlu perhatian lebih kepada sekolah dasar yang kekurangan murid. Perlu dipikirkan sistem zonasi yang telah diterapkan, apakah perlu dievaluasi atau tidak;
 - h) Mendorong aparat terkait, polisi, dan jajaran mengadakan patroli agar mengurangi kejahatan dan masyarakat merasa nyaman di jalanan, hal itu mengingat kejadian kriminalitas di jalanan terutama di malam hari;
 - i) Perlu untuk memastikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) tepat sasaran dan semakin banyak didapatkan oleh penduduk yang berhak;
 - j) Memberikan sosialisasi terhadap masyarakat dengan adanya gerakan masyarakat hidup sehat (Germas);
 - k) Perlu pengawasan terus-menerus pada setiap kantor atau unit layanan masyarakat di Pemerintah Kota Semarang;
 - l) Berharap agar aplikasi ruang warga dapat diakses di laptop supaya pengisian data warga dan lainnya lebih mudah;
 - m) Pemerintah Kota Semarang menyebarkan informasi melalui media cetak dan elektronik agar supaya masyarakat Kota Semarang dapat mengetahui informasi tentang berita apapun dari Pemerintah Kota Semarang;
 - n) Pemerintah Kota Semarang diminta untuk mengencangkan sosialisasi terkait kemudahan mengurus dokumen kependudukan terutama di daerah pinggiran. Agar warga masyarakat yang tinggal di perkotaan pada umumnya dan yang tinggal di pinggiran khususnya dapat mengetahui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemkot Semarang;
 - o) Pelayanan publik di setiap kelurahan, kecamatan, dan Pemkot Semarang perlu ditingkatkan lagi agar masyarakat yang memerlukan pelayanan publik tersebut bisa terlaksana dengan baik dan harapannya bisa terpuaskan;
 - p) Agar Pemkot Kota Semarang dapat memperbaiki pelayanan publik/ masyarakat agar lebih baik, di sisi lain juga mempermudah akses yang dibutuhkan masyarakat sebagai perwujudan pelayanan cepat dari Pemerintah.

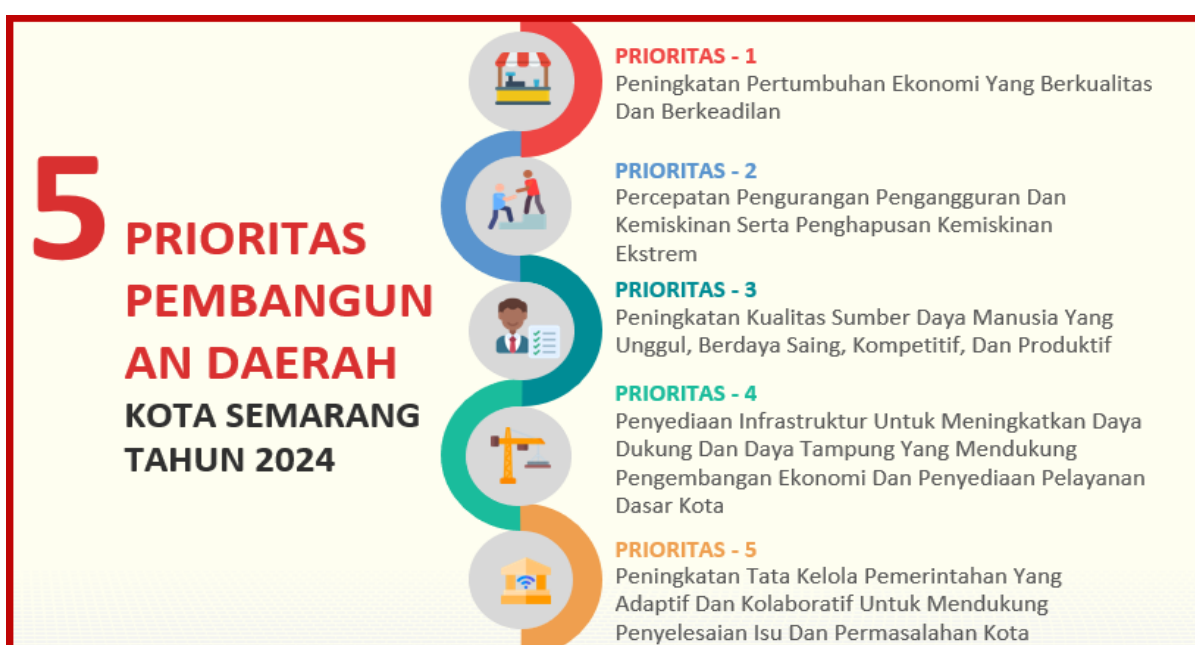
4.2.4. Prioritas Pembangunan Kota Semarang Tahun 2024

Prioritas pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2024 merupakan implementasi pelaksanaan kebijakan umum dan prioritas program pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang periode Tahun 2021-2026 yang disusun dengan pendekatan holistik, tematik, spasial dan integratif dengan memerhatikan capaian kinerja sampai dengan tahun 2022, perkiraan capaian di tahun 2023 serta isu-isu strategis di tahun 2024.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 adalah “Pemantapan Perekonomian dan Kesejahteraan

Masyarakat Yang Didukung Oleh Penguatan Struktur yang Mendukung Keberlanjutan”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan;
- Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;
- Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif;
- Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota;
- Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota.



Gambar 4. 3
Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2024

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, dengan fokus:
 - a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah;
 - b. Peningkatan nilai investasi;
 - c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal;
 - d. Peningkatan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa melalui penguatan rantai nilai dan rantai produksi;
 - e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*);
 - f. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.

Untuk mencapai prioritas 1 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui pengendalian inflasi dalam bentuk:

- a. Melaksanakan operasi pasar murah;

- b. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
 - c. Kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
 - d. Gerakan menanam;
 - e. Merealisasikan BTT;
 - f. Dukungan transportasi dari APBD;
 - g. Rapat teknis TPID;
 - h. Pemantauan harga dan stok;
 - i. Menjaga pasokan;
 - j. Inventarisasi informasi daerah surplus;
 - k. Bantuan sosial.
2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus:
- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;
 - b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin;
 - c. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
 - d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif;
 - e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja.

Untuk mencapai prioritas 2 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui Penghapusan Kemiskinan Ekstrem:

- 1) Administrasi kependudukan;
 - 2) Bantuan sembako;
 - 3) Jaminan kesehatan;
 - 4) Penanganan stunting & gizi buruk;
 - 5) Alat bantu penyandang disabilitas;
 - 6) Pelayanan pendidikan;
 - 7) Rehab rumah tidak layak huni;
 - 8) Sanitasi permukiman;
 - 9) Sumber air bersih;
 - 10) Pelayanan ketenagakerjaan;
 - 11) Pemberdayaan UMKM;
 - 12) Pelayanan keluarga berencana;
 - 13) Pengembangan pertanian/perikanan/peternakan.
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
 - b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessible*;
 - c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
 - d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
 - e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan.
- Upaya unggulan Prioritas-3, Penanganan Stunting:
- 1) Sensitif
 - Edukasi (Gizi, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat);
 - Pemanfaatan Pekarangan untuk Gizi Keluarga (Urban Farming);
 - Penanganan Kawasan Kumuh;
 - Pemberdayaan Ekonomi.
 - 2) Spesifik
 - Treatment balita gizi kurang dan stunting di Rumah Pelita/Daycare dan Pelangi Nusantara;

- PMT Balita Stunting (Pilot Project Tj. Mas);
 - PMT Posyandu Rp. 350.000/bulan.
4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota, dengan fokus:
- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan;
 - b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan;
 - c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
 - d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh;
 - e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu;
 - f. Penguatan ketahanan bencana.

Untuk mencapai prioritas 1 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui penanganan Banjir:

- 1) Tanggul Tambaklorok;
 - 2) Sungai Plumbon;
 - 3) Sungai Penggaron.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota, dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan;
 - d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan;
 - e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - f. Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

Upaya unggulan Prioritas-5:

- 1) *Smart City*;
- 2) Penguatan Inovasi;
- 3) SPBE (Sisten Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2024, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,7 – 6,5%
- 2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 86,00
- 3) Angka Kemiskinan sebesar 4,00 – 3,82%
- 4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,60 – 6,50%

Jika disandingkan dengan target-target capaian dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, angka capaian yang ditargetkan Pemerintah Kota Semarang di tahun 2024 rata-rata lebih baik seperti terlihat dalam tabel 4.3.

Tabel 4. 3
 Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemprov.
 Jateng dan Kota Semarang Tahun 2024

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,70 – 6,50%	84,40 – 86,00	4,00 – 3,82%	7,60 – 6,50%
Prov. Jateng	4,70 – 5,50%	73,43	9,76 – 8,96%	5,44 – 4,94%
Pusat	5,10 – 5,70%	73,99 – 74,02	6,70 – 7,50 %	5,00 – 5,70 %

Perumusan prioritas RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dengan mempertimbangkan prioritas nasional, prioritas Provinsi Jawa Tengah serta permasalahan pembangunan/isu strategis Kota Semarang. Secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Keselarasan dan keterkaitan dengan Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang

Sebagaimana penjelasan di atas, arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2024 secara nasional dituangkan ke dalam 7 Prioritas Nasional yang secara rinci dijabarkan sasaran pada masing-masing Prioritas Nasional. Keterkaitan sasaran indikator pembangunan daerah Kota Semarang dalam RKPD 2024 dengan sasaran Prioritas Nasional RKP 2024 dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4. 4
Keselarasan Prioritas Pembangunan Kota Semarang dengan
Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

PRIORITAS NASIONAL 2024	PRIORITAS PROVINSI JAWA TENGAH 2024	PRIORITAS RKPD TAHUN 2024	
Prioritas Nasional 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Prioritas Provinsi 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas.	P1	Peningkatan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan berkeadilan, dengan fokus: a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi, dan industri kecil menengah; b. Peningkatan nilai investasi; c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal; d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa; e. Pengembangan ekonomi hijau (<i>green economy</i>); dan f. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.
Prioritas Nasional 2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan Prioritas Nasional 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Prioritas Provinsi 3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung.	P2	Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus: a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin; b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin; c. Peningkatan upaya perlindungan sosial; d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif; e. Peningkatan kualitas calon tenaga kerja; dan f. Perluasan kesempatan kerja.
Prioritas Nasional 3 Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing Prioritas Nasional 4 Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Prioritas Provinsi 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata.	P3	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus: a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi; b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas; c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak; d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk; dan e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan.

PRIORITAS NASIONAL 2024	PRIORITAS PROVINSI JAWA TENGAH 2024	PRIORITAS RKPD TAHUN 2024	
<p>Prioritas Nasional 5 Memperkuat Infrastruktur mendukung pengembangan Ekonomi dan pelayanan dasar</p> <p>Prioritas Nasional 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim</p>	<p>Prioritas Provinsi 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas.</p>	P4	<p>Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota, dengan fokus:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan; Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan; Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman; Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh; Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu; dan Penguatan ketahanan bencana.
<p>Prioritas Nasional 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik</p>	<p>Prioritas Provinsi 4. Perbaikan tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.</p>	P5	<p>Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah; Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan; Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi; Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan; Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa prioritas pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2024 yang berjumlah 5 prioritas selaras dengan 7 prioritas nasional dan prioritas Provinsi Jawa Tengah. Tingkat keselarasan prioritas pembangunan daerah Kota Semarang dengan prioritas nasional RKP tahun 2024 dapat dinilai 100% (karena keseluruhan prioritas pembangunan daerah selaras dengan prioritas nasional).

2) Konsistensi dengan permasalahan/isu strategis

Permasalahan pembangunan Kota Semarang telah diidentifikasi berdasarkan kaitan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Sedangkan isu strategis Kota Semarang memperhatikan gambaran kondisi daerah dan permasalahan, capaian indikator kinerja serta arah kebijakan. Penyusunan prioritas pembangunan daerah Kota Semarang berdasarkan isu strategis yang ada. Adapun permasalahan pengembangan/isu strategis telah tertuang pada bab II. Selanjutnya, dilakukan sinkronisasi antara isu strategis dan prioritas daerah dengan prioritas Provinsi Jawa Tengah dan Prioritas Nasional, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4. 5

Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Daerah dengan Prioritas Provinsi Jawa Tengah dan Prioritas Nasional Tahun 2024

Isu Strategis	Prioritas Nasional		Prioritas Provinsi Jawa Tengah		Prioritas Daerah Kota Semarang	
Daya saing ekonomi, dan peningkatan kesempatan berusaha	PN.1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	PD.1	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas.	PD.1	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan
Kemiskinan	PN.2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	PD.2	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata.	PD.2	Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem
Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	PN.3	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	PD.2	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata.	PD.3	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif
	PN.4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan				
Kesenjangan wilayah; Keberlanjutan Pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian Sumber Daya; Kedaulatan pangan dan energi	PN.5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar	PD.3	Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung.	PD.4	Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota.
	PN.6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim				
Tata kelola pemerintahan	PN.7	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	PD.4	Perbaikan tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.	PD.5	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota

Tabel 4. 6
Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kota Semarang Tahun 2024

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2024				PRIORITAS RKPD TAHUN 2024		PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI YANG TERKAIT
SASARAN		INDIKATOR	TARGET 2024			
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Angka Harapan Lama Sekolah	15,60 Tahun	P3	1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus: a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi; b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu dan <i>accessible</i> ; c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak; d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk; dan e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan.	Prioritas Nasional 3 Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing Prioritas Nasional 4 Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan Prioritas Provinsi 2 Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata.
		Rata-Rata Lama Sekolah	10,61 Tahun			
		Angka Harapan Hidup	77,54 Tahun			
2	Meningkatnya kearifan budaya lokal	Persentase Tingkat kearifan budaya lokal	61,05%			
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Persentase Tingkat partisipasi masyarakat	94,29%			
4	Meningkatnya produktivitas dan keterampilan tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,15%			
		Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	78,00%			
5	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	15,20 - 15,50%	P2	1. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus: a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin; b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin; c. Peningkatan upaya perlindungan sosial; d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif;	Prioritas Nasional 2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan Prioritas Provinsi 3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung.
6	Terwujudnya pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial	Persentase Penanganan PPKS	99,87%			

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2024			PRIORITAS RKPD TAHUN 2024		PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI YANG TERKAIT
SASARAN		INDIKATOR	TARGET 2024		
					e. Pengembangan kesatuan system <i>demand and supply set</i> tenaga kerja.
7	Meningkatnya produk unggulan daerah	Nilai Ekspor	US\$ 3.539.299.867,06	P1	1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, dengan fokus: a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi, dan industri kecil menengah; b. Peningkatan nilai investasi; c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal; d. Peningkatan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa; e. Pengembangan ekonomi hijau (<i>green economy</i>); dan f. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.
		Persentase peningkatan kunjungan wisata	6,00%		
8	Meningkatnya nilai tambah ekonomi	Persentase peningkatan nilai investasi	7% (27.362.089 juta rupiah)		Prioritas Nasional 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan Prioritas Provinsi 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas.
		PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	104,12 juta rupiah		
		Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB	28,84%		
		Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB	28,72%		
9	Meningkatnya internalisasi ideologi Pancasila serta Wawasan Kebangsaan	Indeks Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK)	74,00	P3	1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dengan fokus: a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
					Prioritas Nasional 3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing Prioritas Provinsi 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2024			PRIORITAS RKPD TAHUN 2024	PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI YANG TERKAIT	
SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024			
				<ul style="list-style-type: none"> b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu dan <i>accessible</i>; c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak; d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk; dan e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan. 	dan adaptif secara inklusif dan merata.
10	Meningkatnya akses dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,20	P3 <ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dengan fokus: <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi; b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu dan <i>accessible</i>; c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak; d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk; dan e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan. 	Prioritas Nasional 3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing Prioritas Provinsi 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata.

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2024				PRIORITAS RKPD TAHUN 2024		PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI YANG TERKAIT
SASARAN		INDIKATOR	TARGET 2024			
11	Meningkatnya kualitas ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	1.251 kejadian	P2	1. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus: <ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin; b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin; c. Peningkatan upaya perlindungan sosial; d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif; e. Pengembangan kesatuan system <i>demand and supply set</i> tenaga kerja. 	Prioritas Nasional 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik Prioritas Provinsi 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas.
12	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam	Indeks Kualitas Air	50,01	P4	1. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota, dengan fokus: <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan; b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan; c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman; d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh; 	Prioritas Nasional 5. Memperkuat Infrastruktur mendukung pengembangan Ekonomi dan pelayanan dasar Prioritas Nasional 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim Prioritas Provinsi 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan
		Indeks Kualitas Udara	74,00			
		Penurunan Emisi CO2	168.864,53 Ton CO2e			
		Persentase sampah perkotaan yang tertangani	71%			
		Persentase ruang terbuka hijau	45,35%			
13	Meningkatnya pemerataan pelayanan sarana dan prasarana perkotaan	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu	73%			

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2024				PRIORITAS RKPD TAHUN 2024	PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI YANG TERKAIT
SASARAN		INDIKATOR	TARGET 2024		
		Persentase perencanaan regional dan kota yang terintegrasi	79%	e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu; dan f. Penguatan ketahanan bencana.	infrastruktur yang merata dan berkualitas. Prioritas Provinsi 3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung.
		Persentase kawasan banjir dan rob	3,19%		
14	Terwujudnya sarana dan prasarana dasar permukiman yang berkualitas	Persentase lingkungan permukiman sehat	98,00%		
		Persentase rumah layak huni	99,42%		
15	Terwujudnya tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan	Persentase tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan	87%		
16	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana	109		
17	Mewujudkan sistem transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan	Rasio konektivitas kabupaten/ kota	0,5876		
		Pengurangan jumlah titik/ruas rawan macet	2 titik/ruas		
18		Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas	>76/BB	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan	Prioritas Nasional 7. Memperkuat stabilitas

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2024			PRIORITAS RKPD TAHUN 2024	PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI YANG TERKAIT	
SASARAN		INDIKATOR	TARGET 2024		
	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		P5 kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota, dengan fokus: a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah; b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan; c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan; d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan; e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah; f. Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.	Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik Prioritas Provinsi 4. Perbaikan tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.
		Opini BPK	WTP		
19	Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik	Indeks Profesionalitas ASN	83,50		
		Indeks SPBE	4,3		
		Nilai dan status kinerja Pemerintah Daerah (Nilai EKPPD)	>3,47/ST		
Indeks Kepuasan Masyarakat		88,35			

Tabel 4. 7
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Tahun 2024 dengan Program Unggulan pada
Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2021-2026

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	FOKUS	UPAYA	PROGRAM UNGGULAN PADA VISI - MISI KDH	
1	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan	1 Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah	1 Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor	PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) Terpadu	
				Fasilitasi Industri Rumah Tangga	
				Klinik Hak Kekayaan Intelektual	
				<i>Micro Library</i> UMKM	
				<i>Link and Match</i> UKM dengan Swalayan / Mall	
				<i>Food Street Festival</i> – Kawasan Kuliner	
		2 Pengembangan kewirausahaan baru	Pemberdayaan <i>Startup</i> lokal		
			Semarang <i>Creative Makerspace</i>		
			Pembangunan <i>Coworking Space</i> UMKM		
		2 Peningkatan nilai investasi	4 Pelaksanaan promosi investasi	Temu Bisnis Internasional	
				Unit Kerja Promosi Kota	
		3 Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal	6 Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing	5 Pemberian insentif dan kemudahan perijinan	Paket Investasi Daerah
				Agenda Tahunan <i>Event-Event</i> Budaya Lokal	
Promosi Pariwisata Bersama (Daerah <i>Hinterland</i>)					
<i>Open Rooftop Double Decker Bus</i>					
<i>Amphibi Bus</i>					
<i>Semarang Zoo</i> bertaraf Internasional					

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	FOKUS		UPAYA		PROGRAM UNGGULAN PADA VISI - MISI KDH
						Pengembangan Sportourism
				7	Pengembangan wisata MICE	
		4	Peningkatan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa melalui penguatan rantai nilai dan rantai produksi	8	Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa	
				9	Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi	Sentra PKL
				10	Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan	Festival Angkringan
				11	Peningkatan nilai dan produk ekspor	Arena Nobar Kecamatan batas wilayah
		5	Pengembangan ekonomi hijau (<i>green economy</i>)	12	Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular	
				13	Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan	Pengembangan <i>Urban Farming</i>
						Gelar Hidroponik
						Kawasan Empon-Empon
						Kawasan Wisata Minapolitan
		6	Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah	14	Penguatan ketahanan pangan	Lumbung Pangan Kelurahan
				15	Kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan	
2	Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem	7	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin	16	Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)	
				17	Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin	
				18	Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin	Layanan JAGA (Jemput-Antar Pasien Warga Miskin)

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	FOKUS	UPAYA	PROGRAM UNGGULAN PADA VISI - MISI KDH
				Jumat Berkah
			19 Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Gerakan Bersama Forum CSR
				Forum Perguruan Tinggi Abdimas
		8 Peningkatan pendapatan masyarakat miskin	20 Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin	Pelatihan spesifik PMKS
			21 Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	
		9 Peningkatan upaya perlindungan sosial	22 Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan	
			23 Peningkatan bantuan untuk PPKS	Tim Reaksi Cepat Layanan PMKS
				Crisis Center PGOT
		10 Pengembangan Kampung Tematik produktif	24 Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif	Kampung Tematik Produktif
			25 Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif	
		11 Pengembangan kesatuan sistem <i>demand and supply set</i> tenaga kerja	26 Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja	Sertifikasi bahasa asing TKI
			27 Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja	
			28 Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja	Sertifikasi / lisensi ketrampilan khusus pencaker
			29 Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja	Kabar Loker (kebiasaan baru)
				Pelibatan Tenaga Kerja Wilayah
				Magang Tematik

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	FOKUS	UPAYA	PROGRAM UNGGULAN PADA VISI - MISI KDH
3	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif	11 Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi	29 Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan	
			30 Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi	Kurikulum pembelajaran berbasis IT
				Pembelajaran Daring dan Luring (kebiasaan baru)
				<i>E-Library</i> di seluruh area <i>free wifi</i>
			31 Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP	Pembangunan TK dan SMP Negeri berbasis zonasi
32 Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan	Lulusan TK, SD dan SMP Bersertifikat Khusus			
				Muatan Lokal Kurikulum Cinta Negara dan Daerah
			33 Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi	Penyediaan Broadband Learning Center (BLC)
				Penguatan Pendidikan Non Formal (PNF)
			34 Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat	
			35 Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah	Beasiswa warga miskin/berprestasi
				Pengembangan Sekolah Swasta Gratis (TK, SD, SMP dan yang sederajat))
				Bapak Angkat Anak Sekolah tidak mampu
			12 Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan <i>accessible</i>	
37 Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan				
38 Peningkatan layanan kesehatan rujukan	Layanan Puskesmas Malam Hari			

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	FOKUS	UPAYA	PROGRAM UNGGULAN PADA VISI - MISI KDH		
			39	Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama	Pemerataan akses layanan Kesehatan Bus Layanan Kesehatan / Hospital Bus	
			40	Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat	Rating Kelurahan Sehat	
		13	Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak	41	Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	
			42	Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan	Gerakan Dasawisma Hebat Musrenbang perempuan Penguatan peran PKK	
			43	Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia	Daycare Gratis Semarang Kota Inklusif	
		14	Peningkatan upaya pengendalian penduduk	44	Peningkatan kualitas layanan KB	
			45	Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas		
		15	Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan	46	Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan	Semarang Community Center Kompetisi Inovasi Usaha bagi Pemuda Nobar (Nongkrong Bareng) Komunitas
			47	Peningkatan prestasi olahraga	Fasilitasi atlet berprestasi	
			48	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat	Penghargaan Warga Berprestasi Kota Semarang Paguyuban Relawan Kota	
			49	Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM	Kota Ramah HAM	
			50	Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial	Religion center	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	FOKUS	UPAYA	PROGRAM UNGGULAN PADA VISI - MISI KDH	
4	Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota	16 Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan	51	Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur	
			52	Peningkatan sarana prasarana olahraga	Optimalisasi pemanfaatan Stadion Citarum (<i>home base</i> PSIS)
			53	Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata	Underground Simpang Lima
					Semarang <i>Expo and Convention Center</i>
					Semarang Technopark
			54	Pengembangan kawasan strategis cagar budaya	Revitalisasi Semarang Lama
Masjid Raya Semarang					
55	Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik				
		17 Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan	56	Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota	Rintisan Semarang <i>Outer Ring Road</i> (Mangkang-Mijen) dan <i>Middle Ring Road</i> (Jalan Gajah)
					Pembangunan Akses Perguruan Tinggi (Srandol-Sekaran, UNDIP-Jangli-Mrican, Sekaran-Tinjomoyo)
					<i>Tetenger</i> Kota
			57	Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi	Transportasi Massal Terintegrasi
			58	Rintisan Pembangunan moda transportasi massal berbasis rel	Pembangunan Trem
59	Peningkatan sarana prasarana angkutan barang	Terminal Angkutan Barang / Peti Kemas			
			60	Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon	Transportasi Berbahan Bakar Ramah Lingkungan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	FOKUS	UPAYA	PROGRAM UNGGULAN PADA VISI - MISI KDH			
		18 Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman	61	Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman	Stimulus Pembangunan Wilayah		
			62	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Bedah Rumah Tuntas		
			63	Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh	Kampung vertikal Kawasan Kumuh		
			64	Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		
			65	Pemenuhan lahan permakaman umum			
		19 Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh	66	Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan		<i>Rooftop solar panel</i> (Bangunan Milik Pemkot Semarang)	
						Pembangkit Listrik Tenaga Air	
					67	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik	<i>Vertical and Roof garden/ farming</i>
							Pembangunan Taman Tematik
		68	Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan		Pengelolaan Persampahan Terpadu		
					Pemberdayaan Bank Sampah Wilayah		
					69	Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana	
					20	Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu	70
71	Pendayagunaan sumber daya air						<i>Smart Water Management</i>
72	Pengendalian daya rusak air						Merubah air dari masalah (banjir dan rob) menjadi potensi (Water as Leverage)
21	Penguatan ketahanan bencana				73	Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat	
					74	Peningkatan kapasitas mitigasi bencana	Pengembangan Sistem peringatan dini bencana
5	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk	22	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	75	Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	FOKUS	UPAYA	PROGRAM UNGGULAN PADA VISI - MISI KDH			
	mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota						
			76	Optimalisasi barang milik daerah	Optimalisasi Aset-Aset Kota		
		23	Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan	77	Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah	Informasi Tata Ruang dan Pajak Bumi Bangunan Eksplorasi dan intensifikasi PAD	
				78	Pengembangan alternatif pembiayaan	Pengembangan Alternatif pembiayaan di luar APBD	
				79	Optimalisasi BUMD		
		24	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan	80	Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik	<i>Online public hearing</i>	
						Robot Layanan (Industry 5.0)	
						Layanan Terpadu Malam Hari	
						Layanan Publik Akhir Pekan	
						Semarang <i>Smart Card</i>	
			81	Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	<i>Single Sign-On</i> Sistem Informasi Manajemen Akselerasi SPBE SOLUSI: Semarang On-Line Untuk Sistem Integrasi		
			82	Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung <i>decision making system</i>	Dari Semarang untuk Indonesia (Satu Data dan Satu Peta)		
					Pembangunan Data Center II Pembangunan <i>Big Data Analytics</i>		
			83	Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan	Agen Informasi dan Pengaduan		
		25	25	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	84	Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	<i>Omnibus Law</i> Peraturan Kota Semarang

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	FOKUS		UPAYA	PROGRAM UNGGULAN PADA VISI - MISI KDH
					Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
					Talenta Berjejaring
				85 Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Pengembangan <i>Smart City (Cyber City)</i>
				86 Penguatan Manajemen Risiko	Pengelolaan Manajemen Risiko
				87 Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024	
		26	Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	88 Pengembangan budaya inovasi di OPD	
		27	Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024	89 Pemberian hibah untuk pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024	

Tabel 4. 8
Matriks Prioritas dan Program Pembangunan Kota Semarang Tahun 2024

PRIORITAS RKPD 2024	PROGRAM PEMBANGUNAN		CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH
			Indikator Kinerja Program	Target Capaian 2024	Satuan	
1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, dengan fokus: a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi, dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya: 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor. 2) Pengembangan kewirausahaan baru 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya: 1) Pelaksanaan promosi investasi 2) Pemberian insentif dan kemudahan perijinan c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya: 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase prog./keg. yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	70,00	%	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	78,00	%	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	68,00	%	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	5,50	%	DINAS TENAGA KERJA
	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Cakupan Wilayah Layanan Kemandirian Pangan	100,00	%	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Energi / Kapita	3.058,00	Kkal / Kapita / Tahun	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Presentase Cakupan Distribusi	100,00	%	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang	100,00	%	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Presentase Daerah Rentan Rawan Pangan	3,00	%	DINAS KETAHANAN PANGAN

PRIORITAS RKPD 2024	PROGRAM PEMBANGUNAN		CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH
			Indikator Kinerja Program	Target Capaian 2024	Satuan	
2) Pengembangan wisata MICE d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya-upaya:	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Presentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	82,00	%	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	3,00	Persen	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	50,00	Persen	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi sehat	32,00	Persen	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	10,00	Persen	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
4) Peningkatan nilai dan produk ekspor			Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan	1,00	Persen	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
e. Pengembangan ekonomi hijau (green economy), melalui upaya-upaya:	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	27,00	Persen	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	3,00	persen	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	20,00	%	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
f. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah, melalui upaya-upaya:			1) Penguatan ketahanan pangan			

PRIORITAS RKPD 2024	PROGRAM PEMBANGUNAN		CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH
			Indikator Kinerja Program	Target Capaian 2024	Satuan	
2) Kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Penanam Modal yang Mendapat Fasilitas Investasi	3.700,00	Penanam Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	541,00	Investor	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Izin Terbit Sesuai SP	95,50	%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	2,00	Nilai	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengembangan dan inovasi sistem informasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal	97,00	%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Kegiatan Seni Budaya	25,00	%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional	25,00	%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Pelestarian Warisan Budaya	85,45	%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

PRIORITAS RKPD 2024	PROGRAM PEMBANGUNAN		CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH
			Indikator Kinerja Program	Target Capaian 2024	Satuan	
	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	3.114,00	Ton	DINAS PERIKANAN
	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	3.961,00	Ton	DINAS PERIKANAN
	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Penurunan jumlah kasus pelanggaran peraturan perikanan	3,00	Kasus	DINAS PERIKANAN
	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi ikan olahan	17.632,00	Ton	DINAS PERIKANAN
	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100,00	%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100,00	%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	SDM Pariwisata	80,00	%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	produksi hasil peternakan	36.219,00	ton	DINAS PERTANIAN
			Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	50.857	ton	DINAS PERTANIAN
	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktivitas pertanian per ha per tahun	6	ton/ha	DINAS PERTANIAN
	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-5,00	%	DINAS PERTANIAN

PRIORITAS RKPD 2024	PROGRAM PEMBANGUNAN		CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH
			Indikator Kinerja Program	Target Capaian 2024	Satuan	
	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan	90,00	%	DINAS PERTANIAN
	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelompok tani yang berada pada kelas madya dan utama	31,00	kelompok	DINAS PERTANIAN
	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelayanan pengurusan perizinan tepat waktu	100,00	%	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	24,00	pasar	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	3,93	%	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor non migas	1.680.366.384	US\$	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	81,00	%	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Prosentase UMKM yang mendapat fasilitas promosi	40,00	%	DINAS PERDAGANGAN
	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertambahan jumlah Sentra IKM	92,00	%	DINAS PERINDUSTRIAN
			Persentase Pertambahan IKM	0,50	%	DINAS PERINDUSTRIAN

PRIORITAS RKPD 2024	PROGRAM PEMBANGUNAN		CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH	
			Indikator Kinerja Program	Target Capaian 2024	Satuan		
	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif	4,00	%	DINAS PERINDUSTRIAN	
	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya Data Informasi Industri	0,50	%	DINAS PERINDUSTRIAN	
2.	Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus:	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi	89,00	%	DINAS SOSIAL
	a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pekerja Migran Bermasalah Sosial yang ditangani	100	%	DINAS SOSIAL
	1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	70,54	%	DINAS SOSIAL
	2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan Sosial	69,85	%	DINAS SOSIAL
	3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	100,00	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	12,84	Point	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:			Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	0,01	%	
	1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin						
	2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)						

PRIORITAS RKPD 2024	PROGRAM PEMBANGUNAN		CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH
			Indikator Kinerja Program	Target Capaian 2024	Satuan	
c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya: 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi	100,00	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak	100,00	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya-upaya: 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Pemenuhan Hak Anak	100,00	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Perda	10,00	%	SATPOL PP
e. Pengembangan kesatuan sistem <i>demand and supply set</i> tenaga kerja, melalui upaya-upaya: 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Indeks Pengamalan Pancasila	2,20	Indeks	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Indeks Kebebasan Sipil	66,00	angka indeks	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Prosentase Partisipasi pemilih pada pemilu/pemilukada	70	%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Indeks Kinerja Ormas	58,00	indeks	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PRIORITAS RKPD 2024	PROGRAM PEMBANGUNAN		CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH
			Indikator Kinerja Program	Target Capaian 2024	Satuan	
	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	indeks kerukunan umat beragama	71,00	indeks	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	prosentase kemampuan analisa intelijen strategis terhadap gangguan ipolkesosbudhankam	83,00	prosentase	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus: a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya: 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMP/MTs	115,63	%	DINAS PENDIDIKAN
			APK PAUD 5-6 tahun	86,14	%	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan	10,00	lembaga	DINAS PENDIDIKAN
			APK SD/MI	111,72	%	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan PNF	100,00	%	DINAS PENDIDIKAN
			Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100,00	%	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru berkualifikasi S1/D-IV	89,82	%	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Dasar Swasta yang berijin	100,00	%	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase PAUD dan PNF Swasta yang berijin	100,00	%	DINAS PENDIDIKAN
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pemenuhan Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit	100,00	%	RSUD KRMT WONGSONEGORO

PRIORITAS RKPD 2024	PROGRAM PEMBANGUNAN		CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH
			Indikator Kinerja Program	Target Capaian 2024	Satuan	
5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi			Pengembangan Sarana Prasarana Rumah Sakit	100,00	%	RSUD KRMT WONGSONEGORO
6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat			Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar	100,00	persentase	DINAS KESEHATAN
7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100,00	persen	DINAS KESEHATAN
b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan <i>accessible</i> , melalui upaya-upaya:	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang memenuhi standar	97,00	persen	DINAS KESEHATAN
1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan <i>stunting</i> secara terintegrasi	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100,00	persen	DINAS KESEHATAN
2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0,50	%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Angka Kelahiran Total (TFR)	2	%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60,22	%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat						
c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	40	Organisasi Kpemudaan	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan						

PRIORITAS RKPD 2024	PROGRAM PEMBANGUNAN		CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH
			Indikator Kinerja Program	Target Capaian 2024	Satuan	
terhadap perempuan dan anak 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya: 1) Peningkatan kualitas layanan KB 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya: 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan 2) Peningkatan prestasi olahraga 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	jumlah Atlet prestasi	1.212	jumlah	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
			Jumlah Sarana dan prasarana Olahraga yang dibangun	5	Lapangan	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan Pembentukan karakter bagi anggota Pramuka Kota Semarang	50	Kegiatan	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

PRIORITAS RKPD 2024	PROGRAM PEMBANGUNAN		CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH
			Indikator Kinerja Program	Target Capaian 2024	Satuan	
5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial						
4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota, dengan fokus: a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya-upaya: 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob	98,15	%	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Layak	55,75	%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga Terlayani SPAM	100,00	%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	92,69	%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Tingkat pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	66,00	%	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten. / kota yang ditangani	64,00	%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Tertatanya Bangunan Gedung	100,00	%	DINAS PENATAAN RUANG
	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase reklame yang berizin	100,00	%	DINAS PENATAAN RUANG

PRIORITAS RKPD 2024	PROGRAM PEMBANGUNAN		CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH
			Indikator Kinerja Program	Target Capaian 2024	Satuan	
1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi 3) Rintisan Pembangunan moda transportasi massal berbasis rel 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya: 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Pemanfaatan Hunian yang Tertata	100,00	%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	74,90	%	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	izin usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan	100,00	%	DINAS PENATAAN RUANG
	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dokumen perencanaan tata ruang yang disusun	100,00	%	DINAS PENATAAN RUANG
	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terlaksananya fasilitasi kebutuhan perumahan	100,00	%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Layak Huni	99,42	%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Perumahan yang Terfasilitasi PSU	100,00	%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	44,36	%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	20,00	%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

PRIORITAS RKPD 2024	PROGRAM PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH	
		Indikator Kinerja Program	Target Capaian 2024	Satuan		
4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak 5) Pemenuhan lahan permakaman umum d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya: 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya: 1) Konservasi sumber daya air 2) Pendayagunaan sumber daya air 3) Pengendalian daya rusak air f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	pelayanan pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan kondisi membahayakan manusia	100,00	Persentase	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
			Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran	100,00	%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
			Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran	100,00	Persentase	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
			Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100,00	%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
			Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	100,00	persentase	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
			Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) korban bencana yang ditangani	100,00	%	DINAS SOSIAL
f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGGKETA TANAH GARAPAN	terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang	100,00	%	DINAS PENATAAN RUANG

PRIORITAS RKPD 2024	PROGRAM PEMBANGUNAN		CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH
			Indikator Kinerja Program	Target Capaian 2024	Satuan	
1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	terselenggarakannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100,00	%	DINAS PENATAAN RUANG
	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	terselenggarakannya redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100,00	%	DINAS PENATAAN RUANG
	2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	terselesaikannya masalah seputar pengelolaan tanah kosong	100,00	%	DINAS PENATAAN RUANG
	2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	terkelolanya izin membuka tanah	100,00	%	DINAS PENATAAN RUANG
	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	terselesaikannya penatagunaan tanah	100,00	%	DINAS PENATAAN RUANG
	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase terlaksananya Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100,00	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan peningkatan penataan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100,00	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara			62,00	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

PRIORITAS RKPD 2024	PROGRAM PEMBANGUNAN		CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH
			Indikator Kinerja Program	Target Capaian 2024	Satuan	
			Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	89,00	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	30,00	Ha	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Persentase perubahan emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca	2,00	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Cakupan pengelolaan taman keanekaragamanhayati (kehati) di Kota Semarang	100,00	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dalam pengolahan B3 dan limbah B3	58,00	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	85,60	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan	100,00	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PRIORITAS RKPD 2024	PROGRAM PEMBANGUNAN		CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH
			Indikator Kinerja Program	Target Capaian 2024	Satuan	
	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup	53,00	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan sekolah adiwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan	12,00	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100,00	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase volume sampah terangkut dari TPS ke TPA	91,50	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga			28,00	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga			71,00	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	65,51	%	DINAS PERHUBUNGAN
Persentase pengelolaan Parkir On the Street			90,00	persen	DINAS PERHUBUNGAN	
Jml trayek BRT			14,00	trayek	DINAS PERHUBUNGAN	

PRIORITAS RKPD 2024	PROGRAM PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH		
		Indikator Kinerja Program	Target Capaian 2024	Satuan			
			Persentase pelanggaran lalu lintas angkutan umum	32,00	persen	DINAS PERHUBUNGAN	
			Rasio ijin trayek per 10.000 jumlah penduduk	7	rasio	DINAS PERHUBUNGAN	
5.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota, dengan fokus: a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Perekaman KTP-el	99,50	%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
				Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	74,00	%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan akta kelahiran	97,50	%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2) Optimalisasi barang milik daerah	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	100,00	%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
				Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100,00	%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Daerah	100,00	%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah			2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kelurahan yang menerapkan sistem informasi	100,00
2) Pengembangan alternatif pembiayaan							
3) Optimalisasi BUMD							
c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan							

PRIORITAS RKPD 2024	PROGRAM PEMBANGUNAN		CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH
			Indikator Kinerja Program	Target Capaian 2024	Satuan	
teknologi informasi, melalui upaya-upaya: 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung <i>decision making system</i> 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya: 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan 3) Penguatan Manajemen Risiko	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	100,00	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase penyebarluasan informasi ke masyarakat	100,00	%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Terselenggaranya pengelolaan E-Government	100,00	%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100,00	%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Terselenggaranya keamanan informasi pemerintahan daerah	100,00	%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	1,00	Rasio	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Terlindunginya koleksi dan naskah kuno dari kerusakan	100,00	%	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

PRIORITAS RKPD 2024	PROGRAM PEMBANGUNAN		CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH
			Indikator Kinerja Program	Target Capaian 2024	Satuan	
<p>4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024</p> <p>e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD</p> <p>f. Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024, melalui upaya Pemberian hibah untuk pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024</p>	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Peningkatan sistem dan jaringan informasi kearsipan akan terintegrasi ke dalam sisye pemerin tahan berbasis elektronik	100,00	%	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	persentase jumlah arsip musnah	100,00	%	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	70,00	%	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Pelayanan Publik	123,00	100%	SEKRETARIS DAERAH
	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan	9,00	Kegiatan	SEKRETARIS DAERAH
			Fasilitasi, Kerjasama serta Hubungan Antar Lembaga, Pemerintah Kota Semarang dan Kepala Daerah	60,00	%	SEKRETARIS DAERAH
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Wilayah	100,00	%	SEKRETARIS DAERAH
	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tersedianya pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD	1,00	dokumen	SEKRETARIS DAERAH
			Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa	100,00	%	SEKRETARIS DAERAH

PRIORITAS RKPD 2024	PROGRAM PEMBANGUNAN		CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH
			Indikator Kinerja Program	Target Capaian 2024	Satuan	
			prosentase peningkatan koordinasi perekonomian berbasis potensi unggulan lokal daerah	100,00	%	SEKRETARIS DAERAH
	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD	17,00	dokumen	SEKRETARIAT DPRD
	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Tataran Kota	100,00	%	BAPPEDA
	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100,00	%	BAPPEDA
Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam			100,00	%	BAPPEDA	
Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			100,00	%	BAPPEDA	
	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase SILPA Terhadap APBD	1,02	%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			Persentase realisasi dana transfer terhadap target dana transfer	100,00	%	
	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Legalitas Aset	90,24	%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PRIORITAS RKPD 2024	PROGRAM PEMBANGUNAN		CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH
			Indikator Kinerja Program	Target Capaian 2024	Satuan	
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10,00	%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah / dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	258,00	Persen	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Persentase keterisian jabatan JPT Pratama, administrasi, dan fungsional sesuai kualifikasi			100,00	Persen	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
Prosentase akurasi data kepegawaian			99,00	Persen	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
Persentase ASN yang tidak mendapatkan hukuman disiplin			99,00	Persen	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
Persentase ASN yang berkinerja baik sampai dengan sangat baik			82,00	Persen	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			21,00	Persen	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			100,00	Persen	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
5.04.02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat (struktural, teknis, fungsional), seminar, kursus dan sejenisnya	45,00	Persen

PRIORITAS RKPD 2024	PROGRAM PEMBANGUNAN		CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH
			Indikator Kinerja Program	Target Capaian 2024	Satuan	
	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase inovasi dan hasil kelitbangan yang diimplementasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	100,00	%	BAPPEDA
	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tingkat Leveling Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3,00	Leveling	INSPEKTORAT
	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Maturitas SPIP	3,00	Nilai	INSPEKTORAT
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	93,00	Persen	16 KECAMATAN
			Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	2	Angka	KECAMATAN CANDISARI
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99,00	Persen	16 KECAMATAN
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20,00	Persen	16 KECAMATAN
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95,00	Persen	15 KECAMATAN

PRIORITAS RKPD 2024	PROGRAM PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET			PERANGKAT DAERAH
		Indikator Kinerja Program	Targat Capaian 2024	Satuan	
		Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	8.00	Angka	KECAMATAN CANDISARI

4.3 RAPAT KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN (RAKORTEKBANG) PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN KOTA SEMARANG UNTUK TAHUN 2024

Pembangunan di daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga keberhasilan pembangunan nasional tidak lepas dari keberhasilan pembangunan di daerah.

Untuk mewujudkan pencapaian target pembangunan nasional diperlukan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah secara efektif. Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekbang) dilaksanakan dalam rangka menciptakan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional. Hal ini berupa dukungan RKPD terhadap indikator kinerja urusan, penyepakatan target indikator makro pembangunan, serta strategi dan aksi pusat dan daerah dalam pencapaiannya.

Berikut merupakan penyepakatan bersama target indikator makro pembangunan dan Indikator Kinerja Urusan hasil Rakortekbang Provinsi Jawa Tengah dengan Kota Semarang untuk tahun 2024.

Tabel 4. 9
Indikator Kinerja Urusan hasil Rakortekbang Provinsi Jawa Tengah

KODE	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2024 HASIL RAKORTEKBANG	TARGET RKPD 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Indikator Makro Pembangunan				
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	5,7- 6,5	5,7- 6,5
2	Tingkat kemiskinan	Persentase	4 - 3,82	4 - 3,82
3	Tingkat Pengangguran Terbuka / TPT	Persentase	7,6 - 6,5	7,6 - 6,5
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	84,4 - 86	84,4 - 86
Indikator Kinerja Urusan				
1	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	Persentase	100	100
2	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Persentase	100	100
3	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	Persentase	100	100
8	Iklim Keamanan SD	Nilai	87	87
9	Iklim Keamanan SMP	Nilai	90,65	90,65
10	Iklim Kebhinekaan SD	Nilai	100	100
11	Iklim Kebinekaan SMP	Nilai	94,94	94,95
12	Iklim Inklusivitas SD	Nilai	85,34	85,4
13	Iklim Inklusivitas SMP	Nilai	85,46	85,5
220203	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	66,56	65,6
220204	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	47,05	48,5
220205	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	77,71	80
220206	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	63,3	65
220207	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	93,78	93,78
220208	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	%	85	98,8
BM2	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota	%	94	94

4.4 KONTRIBUSI PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 79 TAHUN 2019 PADA TAHUN 2024

Pemerintah Kota Semarang mendukung terlaksananya Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang. Kota Semarang masuk dalam percepatan Kawasan Kedungsepur. Program kegiatan yang direncanakan dalam mendukung percepatan tersebut adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4. 10
Perencanaan Pembangunan Mendukung Perpres No. 79 Tahun 2019

No	Program/ Kegiatan	Progres	Tindak Lanjut
1	Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1	Sudah beroperasi sejak 22 Desember 2022	Ditangani oleh Pemerintah melalui APBN
2	Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 2	Sudah beroperasi sejak 22 Desember 2022	Ditangani oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)
3	Pembangunan Harbour Toll Road Semarang-Kendal	Persiapan lelang	Ditangani oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)

4.5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PADA TAHUN 2024

Pengembangan infrastruktur merupakan salah satu faktor utama dalam keberhasilan pembangunan secara keseluruhan. Hal ini mengingat dampaknya yang hampir memengaruhi indikator kunci keberhasilan pembangunan dasar, baik pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. Selain itu, pembangunan infrastruktur berkualitas dengan kapasitas yang memadai dan merata merupakan faktor penting untuk mendorong konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi. Kualitas dan kuantitas infrastruktur yang memadai akan memperlancar konektivitas, menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, sehingga wilayah Kota Semarang akan mampu menjadi wilayah yang tangguh, produktif dan berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum bertujuan meningkatkan kualitas jalan dan/atau jembatan sehingga memperlancar arus transportasi yang akan berdampak dalam pergerakan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan, meningkatkan pembangunan berkelanjutan dan peningkatan daya saing daerah. Pengelolaan sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob, pembangunan/rehabilitasi stasiun pompa banjir, pembangunan polder/kolam retensi dan peningkatan saluran drainase perkotaan untuk menanggulangi dan mengurangi dampak bencana banjir atau rob.

Perencanaan pembangunan infrastruktur di Dinas Kesehatan bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat melalui puskesmas dan diarahkan mendukung prioritas pembangunan berkelanjutan dan peningkatan daya saing daerah.

Perencanaan pembangunan infrastruktur di Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan bertujuan meningkatkan produktivitas pertanian dan mendukung kemandirian pangan, serta pembangunan yang berkelanjutan.

4.6 SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH DALAM Mendukung Pencapaian Target SDGs Kota Semarang

Pemerintah Kota Semarang sepenuhnya mendukung dan berkomitmen dalam mendukung dan berkomitmen dalam mendukung terwujudnya tujuan SDGs sejumlah 17 tujuan melalui beberapa program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan dikoordinasikan oleh Bappeda Kota Semarang.

Tabel 4. 11
Sasaran, Prioritas dan Program Yang Mendukung Terwujudnya SDGs di Kota Semarang Pada Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program
1	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> - Menurunnya angka kemiskinan - Terwujudnya pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial - Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan Pendidikan dan kesehatan - Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif - Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem 	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Pengelolaan Pendidikan b. Program Pemenuhan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat c. Program Pembinaan Keluarga Berencana d. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera e. Program Pemberdayaan Sosial f. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial g. Program Penanggulangan Bencana h. Program Pengembangan Perumahan i. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum j. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum k. Program Pencatatan Sipil l. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja m. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan n. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) o. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif p. Program Stabilisasi Harga Barang Pokok dan Barang Penting q. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian r. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat

No	Tujuan	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program
				<ul style="list-style-type: none"> s. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya t. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian u. Program Penyelenggaraan Jalan
2	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> - Menurunnya angka kemiskinan - Terwujudnya pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif - Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem 	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Pengelolaan Pendidikan b. Program Pemenuhan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial d. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian e. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat f. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya g. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
3	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	<ul style="list-style-type: none"> - Menurunnya angka kemiskinan - Terwujudnya pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial - Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif - Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem 	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Pemenuhan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat b. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan c. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan d. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) e. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) f. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial g. Program Rehabilitasi Sosial h. Program Pengendalian Penduduk
4	Menjamin pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan belajar sepanjang hayat	<ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial - Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif - Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem 	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Pengelolaan Pendidikan b. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan c. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia d. Program Informasi dan Komunikasi Publik

No	Tujuan	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program
5	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya akses dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender - Meningkatnya kualitas ketenteraman dan ketertiban masyarakat - Terwujudnya pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif - Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem 	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan b. Program Perlindungan Perempuan c. Program Pengendalian Penduduk d. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) e. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
6	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam - Terwujudnya pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial 	<ul style="list-style-type: none"> - Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem - Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota 	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Pemenuhan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat b. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum d. Program Pengembangan Perumahan e. Program Kawasan Permukiman f. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup g. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) h. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
7	Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern	Tidak ada indikatornya di Pemerintah Kota Semarang, karena ESDM bukan kewenangan kabupaten/kota		
8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya produk unggulan daerah - Meningkatnya nilai tambah ekonomi - Menurunnya angka kemiskinan - Terwujudnya pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan - Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif 	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja b. Program Penempatan Tenaga Kerja c. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat d. Program Perekonomian dan Pembangunan e. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya f. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan g. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

No	Tujuan	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program
				<ul style="list-style-type: none"> h. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif i. Program Pengembangan Kebudayaan j. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal k. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan l. Program Hubungan Industrial m. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota n. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) o. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
9	Membangun infrastruktur yang tangguh meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya pemerataan pelayanan sarana dan prasarana perkotaan - Terwujudnya tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan - Mewujudkan sistem transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan - Meningkatnya produk unggulan daerah - Meningkatnya nilai tambah ekonomi 	- Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Penyelenggaraan Jalan b. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang c. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya d. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah e. Program Penataan Bangunan Gedung
10	Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara	<ul style="list-style-type: none"> - Menurunnya angka kemiskinan - Terwujudnya pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial - Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 	- Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan b. Program Rehabilitasi Sosial c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial d. Program Hubungan Industrial
11	Menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya sarana dan prasarana dasar permukiman yang berkualitas - Terwujudnya tata ruang yang 	- Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) b. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

No	Tujuan	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program
		berdaya guna dan berkelanjutan - Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota	c. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah d. Program Pengembangan Perumahan e. Program Kawasan Permukiman f. Program Pengembangan Permukiman g. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
12	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	- Meningkatnya pemerataan pelayanan sarana dan prasarana perkotaan	- Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota	a. Program Pengelolaan Persampahan b. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) c. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup d. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
13	Mengatasi langkah segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	- Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam	- Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota	a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat b. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan c. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat d. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian e. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian f. Program Penanggulangan Bencana g. Program Penyuluhan Pertanian h. Program Perencanaan Lingkungan Hidup i. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup j. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati k. Program Pengendalian B3 dan Limbah B3 l. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
14	Melakukan konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut, samudera dan maritim untuk	Tidak ada indikatornya di Pemerintah Kota Semarang, karena kawasan laut menjadi kewenangan Provinsi		

No	Tujuan	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program
	pembangunan yang berkelanjutan			
15	Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan	Tidak ada indikatornya di Pemerintah Kota Semarang, karena bukan kewenangan kabupaten/kota		
16	Mewujudkan perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh	<ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel - Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah d. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah e. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat f. Program Perekonomian dan Pembangunan g. Program Pencatatan Sipil h. Program Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan i. Program Pendaftaran Penduduk j. Program Informasi dan Komunikasi Publik
17	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global	<ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel - Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah b. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah c. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat d. Program Perekonomian dan Pembangunan e. Program Informasi dan Komunikasi Publik

4.7 SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH DALAM Mendukung PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)

Perempuan dan anak merupakan bagian dari masyarakat yang rentan terhadap kekerasan. Di sisi lain, kelompok tersebut juga merupakan masyarakat yang produktif dan potensial untuk mendukung kemajuan pembangunan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan hal yang mutlak dilakukan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat yang harmonis dan ramah gender demi kemajuan kota. Upaya yang dilakukan dalam pengarusutamaan gender yaitu melalui kebijakan yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat berbasis gender serta peningkatan perlindungan perempuan dan anak.

Strategi pengarusutamaan gender di Kota Semarang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender. Sesuai Perda ini, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja yang dilakukan melalui Analisis Gender.

Tabel 4. 12

Sasaran dan Prioritas Daerah Yang Mendukung Pengarusutamaan Gender di Kota Semarang Pada Tahun 2024

No	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Indikator	Program	Perangkat Daerah Pengampu
1	Meningkatnya akses dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	DP3A
2				Program Perlindungan Perempuan	DP3A
3				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	DP3A
4				Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	DP3A
5				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	DP3A
6				Program Perlindungan Khusus Anak	DP3A
7				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat	DP3A
8				Program Pembinaan Keluarga Berencana	DISDALDUK KB
9				Program Pengendalian Penduduk	DISDALDUK KB
10				Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	DISNAKER
11				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	SETDA
12				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPP
13				Program Pendidikan Politik Masyarakat	KESBANGPOL
14				Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	BAPPEDA
15				Program Pemberdayaan Sosial	DINSOS

No	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Indikator	Program	Perangkat Daerah Pengampu
16				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	DINSOS
17				Program Pengelolaan Pendidikan	DISDIK
18				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINKES RSWN
19				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DISPERKIM
20				Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DISPERKIM
21				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DISPERKIM
22				Program Pengembangan Permukiman	DISPERKIM
23				Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	DISPERKIM

4.8 SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH DALAM Mendukung PENGARUSUTAMAAN KERENTANAN BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM

Sesuai Undang-Undang Nomo 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana. Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 01 Tahun 2012 termuat definisi desa/kelurahan tangguh bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Sasaran, prioritas daerah dan program dalam mendukung pengarusutamaan kerentanan bencana dan perubahan iklim sebagaimana tersebut dalam tabel tersebut.

Tabel 4. 13

Sasaran dan Prioritas Daerah Yang Mendukung Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim di Kota Semarang Pada Tahun 2024

No	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Strategi	Program
1	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan	Penguatan ketahanan bencana	a. Program penanggulangan bencana
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam	daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota	Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh	b. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
			Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu	c. Program penanganan bencana
				d. Program perencanaan lingkungan hidup
				e. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

No	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Strategi	Program
				f. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
				g. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan
				h. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
				i. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
				j. Program Pengelolaan Persampahan

4.9 FASILITASI PERUBAHAN IKLIM

Dalam upaya melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional dan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.33/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim, upaya untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim terbagi menjadi dua, yaitu upaya mitigasi dan adaptasi. Kota Semarang telah melakukan beberapa kajian terkait mitigasi dan adaptasi, terdiri dari Rencana Aksi Daerah Mitigasi Perubahan Iklim pada tahun 2018, Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim pada tahun 2019, dan Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca. Berdasarkan kajian tersebut, Kota Semarang telah memiliki rencana aksi daerah penurunan emisi Gas Rumah Kaca dengan target penurunan 116.180 ton CO₂e atau setara dengan 1,9%.

Antisipasi dampak perubahan iklim melalui strategi mitigasi berupa penerapan teknologi budidaya rendah karbon (tingkat emisi gas rumah kaca rendah) dan strategi adaptasi antara lain melalui penyesuaian irigasi sesuai dengan perubahan sistem hidrologi dan potensi sumberdaya air, pola tanam, jenis tanaman dan varietas, dan sistem pengolahan tanah.

4.10 SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Sebagaimana diamanatkan dalam Unandag-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, prioritas pembangunan Kota Semarang pada tahun 2024 juga dalam mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), hal ini sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dan komitmen Pemerintah Kota Semarang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah Kota Semarang memprioritaskan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar melalui beberapa program di perangkat daerah dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima

menuju *Good Governance*. Pemenuhan SPM juga diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat karena terkait dengan pelayanan dasar dan memprioritaskan penyediaan layanan dasar sesuai target SPM tidak hanya dalam hal jenis melainkan juga mutu (kualitas dan kuantitas layanan).

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Program yang mendukung terlaksananya pemenuhan SPM sebagaimana tersebut dalam tabel berikut:

Tabel 4. 14
Sasaran, Prioritas Daerah dan Program yang Mendukung Pemenuhan SPM di Kota Semarang Tahun 2024

No.	SPM Bidang	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program
1	Pendidikan	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem	Program Pengelolaan Pendidikan
			Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional			
		Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan			
		Pendidikan Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD			
2	Kesehatan	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal essensial sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan balita	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			

No.	SPM Bidang	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program
		Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Setiap warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Setiap warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan penderita DM	Setiap penderita DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan ODGJ berat	Setiap ODGJ berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan pada orang terduga tuberkulosis	Setiap orang terduga tuberkulosis mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan pada orang dengan resiko terinfeksi HIV	Setiap orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	Meningkatnya pemerataan pelayanan sarana dan prasarana perkotaan	Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum d. Sistem Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik	Jumlah warga Negara yang memperoleh pengelolaan air limbah untuk limbah domestik			

No.	SPM Bidang	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni korban bencana	Terwujudnya sarana dan prasarana dasar permukiman yang berkualitas	Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Pengembangan Permukiman b. Program Kawasan Permukiman c. Program Pengembangan Perumahan
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	Jumlah warga terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni			
5	Ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni korban bencana	Meningkatnya kualitas ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum b. Program Penanggulangan Bencana
		Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana			
		Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			
6	Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Terwujudnya pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial	Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Pemberdayaan Sosial b. Program Rehabilitasi Sosial c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial d. Program Penanganan Bencana
		Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti			

No.	SPM Bidang	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program
		Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti			
		Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis rehabilitasi di luar panti	Jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti			
		Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota	Jumlah warga negara korban bencana Kab/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial			

4.11 INOVASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan mengatasi permasalahan yang ada, Pemerintah Kota Semarang terus berupaya untuk melakukan terobosan-terobosan yang dituangkan dalam inovasi kebijakan pembangunan daerah. Sejalan dengan tema pembangunan Kota Semarang Tahun 2024 yaitu Pemantapan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat yang Didukung oleh Penguatan Struktur yang Mendukung Keberlanjutan, maka beberapa inovasi yang mendukung secara langsung maupun tidak langsung adalah sebagai berikut:

1. eLING (Elektronik Legal Drafting)

eLING (Elektronik Legal Drafting) merupakan aplikasi online yang digunakan dalam mengusulkan Produk Hukum dari masing-masing Perangkat Daerah kepada Bagian Hukum. Setiap Perangkat Daerah wajib menginputkan dan mengupload draft Produk Hukum yang diusulkan melalui aplikasi ini, sehingga Bagian Hukum dapat merevisi dan menyetujui Produk Hukum yang diusulkan. Dengan menggunakan Aplikasi eLING ini proses verifikasi Produk Hukum bisa dilakukan secara online sehingga lebih efektif dan efisien tanpa harus berkunjung ke Bagian Hukum. Penyusunan Manual Book (Buku Panduan), Bimtek legal drafter, Sosialisasi, Publikasi dan pendampingan penggunaan Eling System pada jangka pendek.



Gambar 4. 4
Tampilan eLING Kota Semarang

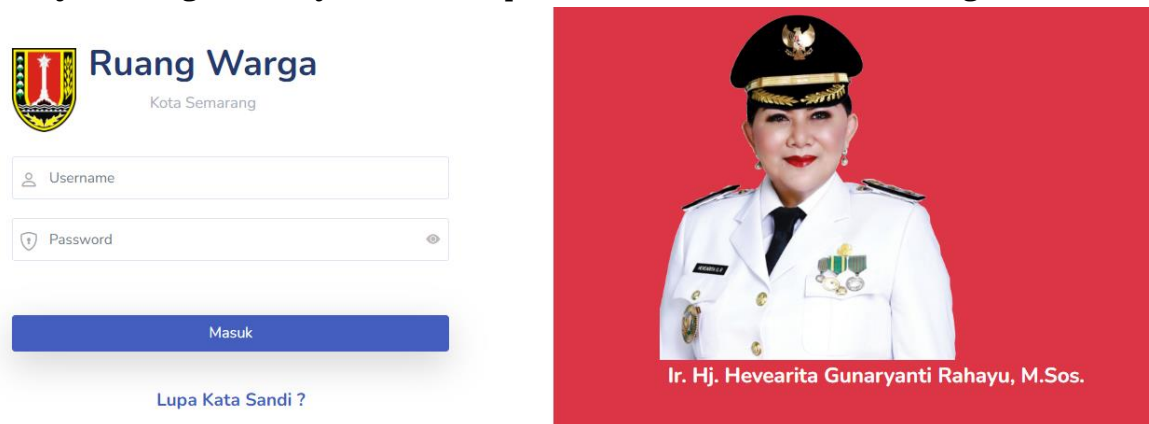
2. MPP (Mall Pelayanan Publik) Metaverse

MPP (Mall Pelayanan Publik) Metaverse merupakan inovasi Teknologi Informasi dengan penerapan *Augmented Reality* dan *Artificial Intelligence* dalam Pelayanan Publik yang strategis di Kota Semarang. Inovasi ini diciptakan sebagai upaya untuk menjadikan pelayanan yang lebih murah, mudah dan cepat bagi masyarakat Kota Semarang. Melalui inovasi ini, masyarakat di domisilinya masing-masing dapat melakukan akses dan mendapatkan produk pelayanan tanpa harus berkunjung secara langsung.



Gambar 4. 5
Tampilan MPP Metaverse Kota Semarang

3. Ruang Warga (Rembug Bareng Warga)
Ruang Warga atau RembUg bAreNG Warga merupakan inovasi berbasis digital bagi lembaga kemasyarakatan. Inovasi ini digunakan sebagai sistem pelaporan digital berbasis aplikasi android untuk pelaporan kinerja lembaga kemasyarakatan (RT,RW,LPMK) di Kota Semarang secara transparan, mudah, informatif, *up to date*. Inovasi ini berfungsi untuk memudahkan pelaporan kinerja lembaga kemasyarakatan kepada Pemerintah Kota Semarang.



Gambar 4. 6
Tampilan Ruang Warga Kota Semarang

4. Kado Mbak Ita (Kanugrahan Dokumen Baru Kagem Penduduk Pitulas Tahun)
Kado Mbak Ita (Kanugrahan Dokumen Baru Kagem Penduduk Pitulas Tahun) merupakan inovasi pelayanan publik melalui pengiriman secara langsung KTP elektronik. KTP elektronik akan dikirimkan ke rumah penduduk Kota Semarang saat ulang tahun ke 17, dan sudah melakukan perekaman KTP sebelum usia 17 tahun.



Gambar 4. 7
Pelaksanaan Inovasi Kado Mbak Ita

5. Roberto Carlos (Bergerak Bersama Cegah Risiko Stunting Sejak Hamil)
Bergerak Bersama Cegah Risiko Stunting Sejak Hamil, merupakan inovasi bidang kesehatan yang bertujuan untuk menurunkan angka stunting melalui intervensi ibu hamil. Intervensi dilakukan dengan kelas ibu hamil KEK (Kekurangan Energi Kronis) dan Anemia, edukasi dan konseling ibu hamil, senam hamil, coocing class, dan pembuatan PMT ibu hamil. Inovasi ini dijalankan secara kolaborasi antara bidan, nutrisionis, dokter Puskesmas dengan Dinas Kesehatan Kota Semarang.



ROBERTO CARLOS (Bergerak Bersama Cegah Risiko Stunting Sejak Hamil)

Gambar 4. 8
Kelas Ibu Hamil Roberto Carlos

6. Rumah Pelita

Rumah Pelita merupakan inovasi bidang kesehatan yang dirancang sebagai upaya penanganan stunting sejak hulu sampai hilir. Penanganan stunting terhadap balita dilakukan dengan daycare dengan memberikan pola asuh, penanganan gizi maupun sanitasi yang didukung oleh dokter anak, pengasuh, psikolog, dan juru nasak, Selain itu Rumah Pelita juga mewadahi pelayanan bagi ibu hamil yang mengalami anemia dan KEK (Kekurangan Energi Kronis).



Gambar 4. 9
Peresmian Rumah Pelita

7. Pelayanan Terpadu Akhir Pekan dan Malam Hari

Pelayanan terpadu akhir pekan dan malam hari pada pemerintah Kota Semarang yang dilaksanakan secara serentak oleh 16 (enam belas) Kecamatan se-Kota Semarang dan OPD terkait yang telah ditunjuk. Pelayanan Terpadu Akhir Pekan dan Malam Hari merupakan program Walikota Semarang yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026. Tugas Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang adalah melakukan koordinasi dengan OPD terkait agar kegiatan Pelayanan Akhir Pekan dan Malam Hari dapat terselenggara secara baik dan manfaat pelayanan yang dapat dirasakan oleh masyarakat Kota Semarang.



Gambar 4. 10
Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Akhir Pekan oleh Kecamatan dan OPD

8. Smart Park

Smart Park merupakan inovasi berbentuk taman kota dengan berbagai fasilitas modern pendukung antara lain bebas akses wifi, toilet bagi disabilitas, penyiraman tanaman secara otomatis yang bisa dikendalikan dari jarak jauh, tempat isi baterai handphone (charging station), dan noozel.

9. Pemasangan Pipa Resapan Horisontal sebagai Upaya Pengendalian Banjir
Pemasangan Pipa Resapan Horisontal merupakan inovasi yang dibuat sebagai salah satu usaha dalam upaya pengendalian banjir. Pemasangan pipa yang berfungsi untuk meresapkan air permukaan ke dalam tanah dan dipasang secara 331orisontal. Peresapan air ke dalam tanah sebanding dengan tinggi tekanan hidrolis.
10. Garang Asem (BerGerAk beRsama dalam aksi sayANG pangaAn kota SEMarang)
BerGerAk beRsama dalam aksi sayANG pangaAn kota SEMarang adalah Gerakan seluruh elemen masyarakat untuk mencegah terjadinya sampah pangan (food waste and food loss) dengan strategi habiskan isi piringmu, stop buang pangan, dan yuk berbagi pangan baik pangan segar maupun pangan olahan.



Gambar 4. 11
FGD dan Sosialisasi Garang Asem

11. Sekolah Gratis
Sekolah Gratis merupakan Inovasi program pendidikan sebagai dasar pembangunan manusia. Inovasi ini dilakukan dengan menggratiskan biaya pendidikan tidak hanya sekolah negeri, namun bagi siswa sekolah swasta.
12. Jaminan Mutu Keamanan Pangan Menuju Semarang Semakin Hebat (Jamu Sehat)
Pembentukan pasar rakyat percontohan yang sudah terjamin mutu dan Keamanan pangan yang berkolaborasi dengan pemangku kepentingan dibidang pangan.
13. Lumbung Pangan Kota Semarang (Lumpang Semar)
Lumpang Semar merupakan inovasi sistem jaringan akses pangan masyarakat melalui lumbung pangan. Inovasi ini dilaksanakan dengan masyarakat di Kota Semarang berkolaborasi dengan pemangku kepentingan di bidang pangan.



Gambar 4. 12
Launching BUMP Lumpang Semar

14. Detektif pangan

Detektif Pangan merupakan inovasi bidang ketahanan pangan dengan menargetkan siswa Sekolah Dasar (SD) yang terpilih, sebagai pengawas makanan di lingkungan sekolah. Siswa SD yang terpilih sebagai detektif pangan menjadi role model dan melakukan edukasi kepada teman temannya dalam membawa bekal yang B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman). Selain itu detektif pangan juga dapat melakukan pengawasan terhadap jajan di sekitar sekolah yang mencurigakan.



Gambar 4. 13
Pengukuhan Detektif Pangan

15. Kelurahan Tangguh Pangan dan Gizi

Kelurahan Tangguh Pangan dan Gizi dalam inovasi ini dimaknai sebagai kelurahan yang masyarakatnya mempunyai kemampuan mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan melalui subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, subsistem konsumsi, dan subsistem keamanan pangan dengan menyesuaikan kearifan lokal dan pemanfaatan teknologi secara berkelanjutan. Melalui inovasi ini diharapkan setiap kelurahan dapat memenuhi ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan.



Gambar 4. 14
Pelaksanaan Kelurahan Tangguh Pangan dan Gizi

16. Eco-Enzym

Bank Eco Enzym Semarang Hebat diinisiasi oleh Komunitas Eco Enzym Nusantara bersama warga Kelurahan Plombokan. Eco enzym memiliki fungsi utama sebagai bahan penjernih air dan penghilang bau air serta dapat mengurangi timbunan sampah. Eco Enzym merupakan inovasi yang dilakukan dengan memanfaatkan limbah sampah organik (sisa sayuran, buah, maupun kulit buah) supaya memiliki nilai guna lebih. Melalui proses fermentasi limbah sampah organik, cairan Eco Enzym dimanfaatkan sebagai karbol, sabun cuci, penjernih udara, maupun hand sanitizer.

17. Sidaksos (Sistem Informasi Data Kesejahteraan Sosial)

Sistem Informasi Data Kesejahteraan Sosial Kota Semarang merupakan inovasi pelayanan public yang bertujuan untuk memaparkan sekaligus memvisualisasikan data terkini tentang warga masyarakat kurang mampu (miskin) di Kota Semarang. Melalui visualisasi tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk memberikan bantuan social dan penanganan fakir miskin. Melalui inovasi tersebut akhirnya pengambilan keputusan dan pemberian bantuan terkait hal tersebut lebih tepat sasaran dan kebutuhan.



Gambar 4. 15
Tampilan Sidaksos Kota Semarang

18. Janaka

Sistem Informasi Jejaring dan Pendataan Perpustakaan Berbasis Website. Aplikasi ini mendata sekaligus memverifikasi dan memberikan sertifikat bagi seluruh perpustakaan di Kota Semarang, dari perpustakaan sekolah, perguruan tinggi, taman baca dan rumah pintar serta perpustakaan lainnya. Dengan adanya system ini akan meningkatkan literasi baik digital dan memperkaya wawasan daya kritis masyarakat

19. Si Kembang Asem (sinergitas ekosistem kesenian gambang semarang)

Merupakan inovasi di bidang seni yang dilakukan sebagai upaya pelestarian pemajuan kebudayaan kearifan lokal di Kota Semarang. Inovasi ini dilakukan dengan tujuan supaya terlaksana kegiatan Gambang Semarang secara berkala dan Kesenian Gambang Semarang masuk da;lam kurikulum Pendidikan.

20. Kopi Jarik's (Kolaborasi Pariwisata Jejaring Kota Semarang)

Kolaborasi Pariwisata Jejaring Kota Semarang merupakan inovasi yang bertujuan menjadi jembatan kolaborasi antarpelaku usaha pariwisata khususnya di sektor hotel dan resto terutama dalam bidang MICE (Meeting, Incentives, Conventions, dan Exhibitions).

21. BACARAD (Baca barcode Radiologi)

Memberikan informasi hasil pemeriksaan pasien radiologi melalui website sehingga mempermudah pasien untuk menyimpan hasil pemeriksaan radiologi, dapat diakses darimana saja. Pasien tidak repot membawa foto X-Ray yang lumayan besar fisiknya.

22. SIKEREN (Sistem Informasi Kemoterapi RSWN)

Memberikan informasi tentang jadwal kemoterapi yang akan dijalani pasien, segera setelah DPJP memberikan surat perintah kemoterapi sehingga mempermudah petugas dalam penjadwalan kemoterapi, memberikan informasi penjadwalan kemoterapi pasien segera setelah pasien diijinkan DPJP untuk dilakukan kemoterapi, mempermudah masyarakat/pasien untuk mengakses jadwal kemoterapi, meningkatnya indeks kepuasan masyarakat.

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Program dan kegiatan di tahun 2024 disusun dalam rangka mencapai target RPJMD Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah di tahun 2024 merupakan penjabaran pelaksanaan bidang urusan yang terdiri dari 6 (enam) urusan wajib yang berkaitan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib yang tidak berkaitan pelayanan dasar, 5 (lima) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung, 5 (lima) unsur penunjang, 1 (satu) unsur pengawas, 1 (satu) unsur kewilayahan, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum.

5.1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

5.1.1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Pendidikan

Program diarahkan pada pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan.

b. Program Pengembangan Kurikulum

Program diarahkan pada penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Non Formal.

c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini diarahkan pada Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Program ini diarahkan pada Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat, Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.

5.1.2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini diarahkan pada Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi, dan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diarahkan pada Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota dan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

- c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
Program ini diarahkan pada Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga, dan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan *Post Market* pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga.
- d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Program ini diarahkan pada Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

5.1.3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Program ini diarahkan pada Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Program ini diarahkan pada Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Program ini diarahkan pada Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
Program ini diarahkan pada Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- e. Program Pengembangan Permukiman
Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota.
- f. Program Penataan Bangunan Gedung
Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.
- g. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota.
- h. Program Penyelenggaraan Jalan
Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota.
- i. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi.

- j. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Program ini diarahkan pada Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota, dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

5.1.4. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Perumahan
Program ini diarahkan pada Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus, dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.
- b. Program Kawasan Permukiman
Program ini diarahkan pada Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha.
- c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
Program ini diarahkan pada Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan.

5.1.5. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Program ini diarahkan pada Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota, dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota.
- b. Program Penanggulangan Bencana
Program ini diarahkan pada Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, dan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.
- c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
Program ini diarahkan pada Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran, Investigasi Kejadian Kebakaran, Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran, Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia, dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran.

5.1.6. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pemberdayaan Sosial
Program ini diarahkan pada Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
Program ini diarahkan pada Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal.
- c. Program Rehabilitasi Sosial
Program ini diarahkan pada Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.
- d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Program ini diarahkan pada Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar dan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
- e. Program Penanganan Bencana
Program ini diarahkan pada Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota.

5.2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

5.2.1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan Tenaga Kerja
Program ini diarahkan pada Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK).
- b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja, Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil, dan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Program Penempatan Tenaga Kerja
Program ini diarahkan pada Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota, Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota, dan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Program Hubungan Industrial
Program ini diarahkan pada Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.

5.2.2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Program ini diarahkan pada Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota, Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota, dan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
- b. Program Perlindungan Perempuan
Program ini diarahkan pada Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota, dan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
Program ini diarahkan pada Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
Program ini diarahkan pada Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
Program ini diarahkan pada Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.

5.2.3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
Program ini diarahkan pada Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Program ini diarahkan pada Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota, dan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi.
- c. Program Penanganan Kerawanan Pangan
Program ini diarahkan pada Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan dan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota.
- d. Program Pengawasan Keamanan Pangan
Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota.

5.2.4. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
Program ini diarahkan pada Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
Program ini diarahkan pada Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
Program ini diarahkan pada Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dan Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Program Pengelolaan Tanah Kosong
Program ini diarahkan pada Penyelesaian Masalah Tanah Kosong dan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong.
- e. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah
Program ini diarahkan pada Penerbitan Izin Membuka Tanah.
- f. Program Penatagunaan Tanah
Program ini diarahkan pada Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota.

5.2.5. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
Program ini diarahkan pada Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota.
- b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Program ini diarahkan pada Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.
- c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
Program ini diarahkan pada Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota.
- d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
Program ini diarahkan pada Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
Program ini diarahkan pada Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
Program ini diarahkan pada Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
Program ini diarahkan pada Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota.
- i. Program Pengelolaan Persampahan
Program ini diarahkan pada Pengelolaan Sampah.

5.2.6. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pendaftaran Penduduk
Program ini diarahkan pada Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Penataan Pendaftaran Penduduk, Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, dan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.
- b. Program Pencatatan Sipil
Program ini diarahkan pada Pelayanan Pencatatan Sipil, Penyelenggaraan Pencatatan Sipil, dan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil.

- c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Program ini diarahkan pada Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan, Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
- d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
Program ini diarahkan pada Penyusunan Profil Kependudukan.

5.2.7. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Administrasi Pemerintahan Desa
Program ini diarahkan pada Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.
- b. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
Program ini diarahkan pada Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat.

5.2.8. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengendalian Penduduk
Program ini diarahkan pada Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk dan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal, Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.
- c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

5.2.9. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini diarahkan pada Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C, Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota, Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

5.2.10. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini diarahkan pada Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program ini diarahkan pada Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pengelolaan *e-government* Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

5.2.11. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Program ini diarahkan pada Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota, dan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

b. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini diarahkan pada Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota.

c. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Program ini diarahkan pada Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

- d. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
Program ini diarahkan pada Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam (1) satu Daerah Kabupaten/Kota.
- e. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
Program ini diarahkan pada Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
Program ini diarahkan pada Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.
- g. Program Pengembangan UMKM
Program ini diarahkan pada Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil.

5.2.12. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Program ini diarahkan pada Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.
- b. Program Promosi Penanaman Modal
Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Program Pelayanan Penanaman Modal
Program ini diarahkan pada Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Program ini diarahkan pada Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
- e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Program ini diarahkan pada Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

5.2.13. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
Program ini diarahkan pada Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota dan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

- b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
Program ini diarahkan pada Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi, Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga, dan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi.
- c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
Program ini diarahkan pada Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan.

5.2.14. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.

5.2.15. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

5.2.16. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Kebudayaan
Program ini diarahkan pada Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
Program ini diarahkan pada Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
Program ini diarahkan pada Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota.

5.2.17. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pembinaan Perpustakaan
Program ini diarahkan pada Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
Program ini diarahkan pada Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota dan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

5.2.18. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Arsip

Program ini diarahkan pada Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota, dan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota.

b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Program ini diarahkan pada Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun, Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota, Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan, Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota, dan Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang.

c. Program Perizinan Penggunaan Arsip

Program ini diarahkan pada Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota.

5.3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

5.3.1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini diarahkan pada Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota, dan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini diarahkan pada Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.

c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Program ini diarahkan pada Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota.

d. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini diarahkan pada Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil, Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, dan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.

5.3.2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini diarahkan pada Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota, Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, dan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota.

- b. Program Pemasaran Pariwisata
Program ini diarahkan pada Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota.
- c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.

5.3.3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Program ini diarahkan pada Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota, Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer, dan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain.
- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Program ini diarahkan pada Pengembangan Prasarana Pertanian, Pembangunan Prasarana Pertanian, Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota, dan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Program ini diarahkan pada Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
Program ini diarahkan pada Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota.
- e. Program Penyuluhan Pertanian
Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

5.3.4. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
Program ini diarahkan pada Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan, Penerbitan Tanda Daftar Gudang, Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri, dan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.
- b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
Program ini diarahkan pada Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya.

- c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Program ini diarahkan pada Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota.
- d. Program Pengembangan Ekspor
Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- e. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan.
- f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

5.3.5. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
Program ini diarahkan pada Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
- b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
Program ini diarahkan pada Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota.
- c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
Program ini diarahkan pada Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.

5.4. UNSUR PENDUKUNG

5.4.1. SEKRETARIAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Program ini diarahkan pada Administrasi Tata Pemerintahan, Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, dan Fasilitasi Kerjasama Daerah.
- b. Program Perekonomian dan Pembangunan
Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, dan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam.

5.4.2. SEKRETARIAT DPRD

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
Program ini diarahkan pada Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, Peningkatan Kapasitas DPRD, Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, dan Fasilitasi Tugas DPRD.

5.5. UNSUR PENUNJANG

5.5.1. PERENCANAAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan pada Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan pada Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), dan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

5.5.2. KEUANGAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini diarahkan pada Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah.

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini diarahkan pada Pengelolaan Barang Milik Daerah.

c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini diarahkan pada Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

5.5.3. KEPEGAWAIAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Kepegawaian Daerah

Program ini diarahkan pada Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, Mutasi dan Promosi ASN, Pengembangan Kompetensi ASN, dan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

5.5.4. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program ini diarahkan pada Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.

5.5.5. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program ini diarahkan pada Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

5.6. UNSUR PENGAWAS

5.6.1. INSPEKTORAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program ini diarahkan pada Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dan Pendampingan dan Asistensi.

5.7. UNSUR KEWILAYAHAN

5.7.1. KECAMATAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan pada Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan pada Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

5.8. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

5.8.1. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program ini diarahkan pada Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

- b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
Program ini diarahkan pada Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu.
- c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Program ini diarahkan pada Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
- d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Program ini diarahkan pada Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
Program ini diarahkan pada Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

Untuk mencapai target indikator program-program pada setiap urusan pemerintahan, unsur penunjang, unsur pendukung, unsur pengawas, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum, setiap Perangkat Daerah melaksanakan Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang bersifat mendukung. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator:

- 1) Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan;
- 2) persentase peningkatan kualitas sumber daya manusia ASN;
- 3) persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD; dan
- 4) persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran SKPD.

TABEL V.1
KOMPILASI PROGRAM DAN PAGU INDIKATIF TIAP PERANGKAT DAERAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA SEMARANG TAHUN 2024

KODE	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
		INDIKATOR	TARGET	
1.01.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN			817.569.467.649
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			656.333.073.069
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD (Dinas Pendidikan)	100%	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD (Dinas Pendidikan)	100%	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD (Dinas Pendidikan)	100%	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			81.002.180.000
		APK PAUD 5-6 tahun	86.14 %	
		APK SD/MI	111.72 %	
		APK SMP/MTs	115.63 %	
		Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan	10 lembaga	
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			585.000.000
		Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan PNF	100%	
		Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100%	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			79.149.214.580
		Persentase Guru berkualifikasi S1/D-IV	89.82 %	
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN			500.000.000
		Persentase PAUD dan PNF Swasta yang berijin	100%	
		Persentase Satuan Pendidikan Dasar Swasta yang berijin	100%	
1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN			459.470.520.593
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			350.177.835.489
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD	100.00 Persen	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100.00 Persen	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			108.683.965.654
		Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar	100.00 Persen	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			250.000.000
		Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100.00 Persen	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			185.000.000
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang memenuhi standar	97.00 Persen	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			173.719.450
		Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100.00 Persen	

KODE	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
		INDIKATOR	TARGET	
1.02.0.00.0.00.02.0000	RSUD KRMT WONGSONEGORO			569.106.708.009
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			399.106.708.009
		Persentase Kinerja Administrasi dan pelaporan keuangan OPD	100 persen	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	100 persen	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			170.000.000.000
		Pemenuhan peralatan kesehatan rujukan rumah sakit	100 persen	
		Pengembangan Sarana Prasarana Rumah Sakit	100 persen	
1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM			455.739.943.809
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			162.174.385.496
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100.00 Persen	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			46.043.232.671
		Tingkat pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob	98.15 Persen	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			130.012.967.014
		Tingkat pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	66.00 Persen	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			117.509.358.628
		Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	74.90 Persen	
1.03.2.10.0.00.02.0000	DINAS PENATAAN RUANG			125.786.259.729
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			20.559.177.802
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	
		Persentase Peningkatan kualitas SDM	100.00 Persen	
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			93.833.260.289
		Persentase Tertatanya Bangunan Gedung	100.00 Persen	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			820.022.760
		Persentase reklame yang berizin	100.00 Persen	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			1.146.590.000
		Izin usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan	100.00 Persen	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			7.172.894.362
		Dokumen perencanaan tata ruang yang disusun	100.00 Persen	
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			806.338.680
		Terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang	100.00 Persen	

KODE	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
		INDIKATOR	TARGET	
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			30.000.000
		Terselenggarakannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100.00 Persen	
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE			877.975.836
		Terselenggarakannya redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100.00 Persen	
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG			120.000.000
		Terselesaikannya masalah seputar pengelolaan tanah kosong	100.00 Persen	
2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH			300.000.000
		Terkelolanya izin membuka tanah	100.00 Persen	
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			120.000.000
		Terselesaikannya penatagunaan tanah	100.00 Persen	
1.04.1.03.2.11.01.0000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			323.910.488.450
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			1.325.000.000
		Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Layak	55.75 Persen	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			50.000.000
		Persentase Rumah Tangga Terlayani SPAM	100%	
1.03.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			200.829.002.800
		Persentase Perumahan yang Terfasilitasi PSU	100.00 Persen	
		Persentase Ruang Terbuka Hijau	44.36 Persen	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			3.949.197.688
		Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	92,69%	
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN			50.000.000
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten. / kota yang ditangani	64.00 persen	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			2.367.962.198
		Pemanfaatan Hunian yang Tertata	100%	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			47.857.737.470
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Disperkim	100%	
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Disperkim	100%	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Disperkim	100%	
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran Disperkim	100%	

KODE	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
		INDIKATOR	TARGET	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			5.262.830.450
		Terlaksananya Fasilitas Kebutuhan Perumahan	100%	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			13.663.207.352
		Persentase Rumah Layak Huni	99,42%	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			48.555.550.492
		Persentase Perumahan yang Terfasilitasi PSU	100.00 Persen	
		Persentase Ruang Terbuka Hijau	44.36 Persen	
1.05.0.00.0.00.01.0000	SATPOL PP			29.363.999.677
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			19.384.910.067
		Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100%	
		Persentase peningkatan kemampuan ASN SKPD	100%	
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran SKPD	100%	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			9.979.089.610
		Persentase pemberdayaan linmas	16%	
		Persentase penurunan pelanggaran Perda	10.00 Persen	
1.05.0.00.0.00.02.0000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN			29.566.739.032
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			18.176.776.590
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			11.389.962.442
		Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran	100.00 Persen	
		Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	100.00 Persen	
		Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran	100.00 Persen	
		Pelayanan pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan kondisi membahayakan manusia	100.00 Persen	
		Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100.00 Persen	

KODE	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
		INDIKATOR	TARGET	
1.05.0.00.0.00.03.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			13.654.280.300
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			9.059.022.642
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100.00 Persen	
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	100.00 Persen	
		Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100.00 Persen	
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			4.595.257.658
		Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	20.00 %	
		Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	20.00 persen	
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 persen	
1.06.0.00.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL			34.393.388.438
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			10.491.229.734
		Dokumen kelembagaan SKPD	100%	
		Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran SKPD	100.00 Persen	
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100.00 Persen	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			7.168.771.074
		Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang difasilitasi	89.00 Persen	
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN			40.955.130
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pekerja Migran Bermasalah Sosial yang ditangani	100.00 Persen	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			8.531.393.330
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99.87 Persen	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			7.009.078.990
		Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan Sosial	70.54 Persen	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			1.151.960.180
		Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) korban bencana yang ditangani	100.00 Persen	

KODE	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
		INDIKATOR	TARGET	
2.07.0.00.0.00.01.0000	DINAS TENAGA KERJA			18.636.644.343
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			14.291.730.613
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Tenaga Kerja	100.00 Persen	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja	100.00 Persen	
		Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran Dinas Tenaga Kerja	100.00 Persen	
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			142.722.500
		persentase prog./keg. yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	70.00 Persen	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			2.975.461.798
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	78.00 Persen	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			669.033.288
		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	68.00 Persen	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			557.696.144
		Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	5.50 Persen	
2.08.2.13.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			24.853.197.259
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			14.324.076.794
		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	
		Perencanaan dan pelaporan kinerja serta pelaporan keuangan DP3A	100%	
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran DP3A	100%	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			1.488.449.604
		Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	100.00 Persen	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			2.547.556.594
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	0.011 %	
		Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	12.84 point	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			2.561.500.000
		Persentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi	100.00 Persen	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			278.511.810
		Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak	100.00 Persen	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			1.794.116.942
		Cakupan Pemenuhan Hak Anak	100.00 Persen	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			545.129.154
		Persentase Kelurahan yang menerapkan sistem informasi	100.00 Persen	

KODE	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
		INDIKATOR	TARGET	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			1.313.856.361
		Cakupan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	100.00 Persen	
2.09.0.00.0.00.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN			16.633.805.374
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			9.783.223.571
		Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD-Ketapang	100.00 Persen	
		Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD-Ketapang	100 Persen	
		Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur-Ketapang	100.00 Persen	
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN			144.204.400
		Cakupan Wilayah Layanan Kemandirian Pangan	100 Persen	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			4.216.557.190
		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang	100.00 Persen	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			379.648.149
		Presentase Daerah Rentan Rawan Panga	3 Persen	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			2.110.172.064
		Presentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	82,00 Persen	
2.11.1.03.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			116.477.859.006
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			41.542.867.032
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			566.159.024
		Persentase terlaksananya Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100.00 Persen	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			5.140.013.861
		Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	30.00 Ha	
		Cakupan peningkatan penaatan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100.00 Persen	
		Persentase perubahan emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca	2.00 Persen	
	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	89.00 Persen		

KODE	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
		INDIKATOR	TARGET	
		Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	62.00 Persen	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			1.161.729.186
		Cakupan pengelolaan taman keanekaragamanhayati (kehati) di Kota Semarang	100.00 Persen	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			378.480.513
		Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dalam pengolahan B3 dan limbah B3	58.00 Persen	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			723.917.835
		Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan	100.00 Persen	
		Persentase pembinaan dan pengawasan terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	85.60 Persen	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			1.888.966.089
		Persentase peningkatan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup	53.00 Persen	
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			291.129.200
		Persentase peningkatan sekolah adiwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan	12.00 Persen	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			128.807.617
		Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100.00 Persen	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			64.655.788.649
		Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	71.00 Persen	
		Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	28.00 Persen	
		Persentase volume sampah terangkut dari TPS ke TPA	91.50 Persen	

KODE	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
		INDIKATOR	TARGET	
2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			21.215.594.269
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			18.828.925.720
		Pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD	100.00 Persen	
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			1.384.500.753
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	74.00 Persen	
		Persentase Perekaman KTP-el	99.50 Persen	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL			443.893.836
		Persentase kepemilikan akta kelahiran	97.50 Persen	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			468.364.800
		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	100.00 Persen	
		Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100.00 Persen	
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			89.909.160
		Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Daerah	100.00 Persen	
2.14.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			20.652.936.318
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			9.993.623.118
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD ((dukkb))	100.00 Persen	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD ((dukkb))	100.00 Persen	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD (dukkb)	100.00 Persen	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			921.774.750
		Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0.50 Persen	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			8.552.144.771
		Cakupan peserta KB Aktif	77.24 %	
		Cakupan tingkat putus pakai alat kontrasepsi (DO)	11.00 %	
		PUS Unmeet need	8.04 Persen	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			1.185.393.679
		Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60.22 Persen	

KODE	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
		INDIKATOR	TARGET	
2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN			307.979.701.993
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			66.388.602.519
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100.00 Persen	
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	100.00 Persen	
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana SKPD	100.00 Persen	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			241.591.099.474
		Jml trayek BRT	14.00 trayek	
		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	65.51 Persen	
		Persentase pelanggaran lalu lintas angkutan umum	35 Persen	
		Persentase pengelolaan Parkir On the Street	90 Persen	
		Rasio ijin trayek per 10.000 jumlah penduduk	6.87 Rasio	
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN			60.166.311.906
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			18.912.838.296
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD (Diskominfo)	100.00 Persen	
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN (Diskominfo)	100 persen	
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD (Diskominfo)	100 Persen	
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD (Diskominfo)	100 Persen	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			9.611.328.662
		Persentase penyebarluasan informasi ke masyarakat	100.00 Persen	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			30.325.219.670
		Terselenggaranya pengelolaan E-Government	100.00 Persen	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			626.003.608
		Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100.00 Persen	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			690.921.670
		Terselenggaranya keamanan informasi pemerintahan daerah	100.00 Persen	

KODE	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
		INDIKATOR	TARGET	
2.17.0.00.0.00.01.0000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO			25.509.465.294
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			12.285.617.086
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 persen	
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 persen	
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100 persen	
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM			160.941.690
		Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	3.00 Persen	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			666.228.580
		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	50.00 Persen	
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			250.816.800
		Persentase Koperasi sehat	32.00 Persen	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			560.300.000
		Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	10.00 Persen	
		Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan	1.00 Persen	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			2.636.334.793
		Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	27 Persen	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			3.491.708.800
		Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	3.00 Persen	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			5.457.517.545
		Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	20.00 Persen	
2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			19.579.371.173
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			14.225.614.506
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100.00 Persen	
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100.00 Persen	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			918.119.127
		Jumlah Penanam Modal yang Mendapat Fasilitasi Investasi	3700.00 Penanam Modal	

KODE	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
		INDIKATOR	TARGET	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			1.187.015.175
		Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	541.00 Investor	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			2.430.004.902
		Persentase Izin Terbit Sesuai SP	95.50 Persen	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			100.000.000
		Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	2 Nilai	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			718.617.463
		Persentase Pengembangan dan inovasi sistem informasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal	97.00 Persen	
2.19.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			57.555.817.256
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			13.271.918.746
		Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Pemuda dan Olah Raga	100 persen	
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Pemuda dan Olah Raga	100 persen	
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga	100 persen	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			3.068.762.000
		Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	40.00 Persen	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			38.815.136.510
		Jumlah Atlet prestasi	1212.00 jumlah	
		Persentase terbangunnya Sarana dan Prasarana Olahraga	5 Lapangan	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			2.400.000.000
		Pembinaan Pembentukan karakter bagi anggota Pramuka Kota Semarang	50.00 Kegiatan	
2.22.3.26.0.00.01.0000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			50.215.966.932
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			9.190.629.034
		Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Kegiatan Seni Budaya	25.00 Persen	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			1.224.479.064
		Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional	25.00 Persen	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			1.668.620.960
		Pelestarian Warisan Budaya	85.45 Persen	

KODE	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
		INDIKATOR	TARGET	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			18.575.249.000
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD - disbudpar	100.00 Persen	
		Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia - disbudpar	100.00 Persen	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD - disbudpar	100.00 Persen	
		Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran SKPD - disbudpar	100.00 Persen	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			14.180.259.400
		Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100.00 Persen	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			4.089.417.250
		Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100.00 Persen	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			1.287.312.224
		SDM Pariwisata	80.00 Persen	
2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH			17.073.496.033
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			13.492.177.408
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100.00 Persen	
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			2.391.952.830
		Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	1 Rasio	
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			231.782.360
		Terlindunginya koleksi dan naskah kuno dari kerusakan	100.00 Persen	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			519.019.197
		Peningkatan sistem dan jaringan informasi kearsipan akan terintegrasi ke dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik	100 Persen	
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			390.045.572
		Persentase jumlah arsip musnah	100.00 Persen	
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP			48.518.666
		Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	70 Persen	

KODE	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
		INDIKATOR	TARGET	
3.25.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERIKANAN			12.326.649.576
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			7.235.678.248
		Peningkatan Kapasitas SDM Dinas Perikanan	30.00 Orang	
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD di Dinas Perikanan	100.00 Persen	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD Dinas Perikanan	100.00 Persen	
		Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perikanan	100.00 Persen	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			1.151.000.000
		Produksi perikanan tangkap	3113.69 ton	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			2.573.752.000
		Produksi perikanan budidaya	3961.33 ton	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			350.000.000
		Penurunan jumlah kasus pelanggaran peraturan perikanan	3 Kasus	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			1.016.219.328
		1. Produksi ikan olahan	17631.86 ton	
		2. Angka konsumsi ikan per kapita	40.19 Kg/kapita/tahun	
3.27.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERTANIAN			33.590.911.872
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			21.634.118.268
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Pertanian	100.00 Persen	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Pertanian	100.00 Persen	
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Pertanian	100.00 Persen	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			5.872.993.578
		Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	50857.23 ton	
		Produksi hasil peternakan	36219.00 ton	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			4.440.812.257
		Produktivitas pertanian per ha per tahun	6.8 ton/ha	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			400.000.000
		Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-5.00 Persen	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			158.500.000
		Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan	90.00 Persen	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			1.084.487.769
		Jumlah kelompok tani yang berada pada kelas madya dan utama	31.00 kelompok	

KODE	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
		INDIKATOR	TARGET	
3.30.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERDAGANGAN			53.678.501.038
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			34.969.046.376
		Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	
		Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00 Persen	
		Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			186.156.000
		Persentase pelayanan pengurusan perizinan tepat waktu	100.00 Persen	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			15.129.797.000
		Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	22 pasar	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			338.078.500
		Persentase koefisien variasi harga antar waktu	3.99 Persen	
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			913.210.000
		Nilai ekspor non migas	1615736908 .00 US\$	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			1.003.378.162
		Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	81 Persen	
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			1.138.835.000
		Prosentase UMKM yang mendapat fasilitas promosi	30 Persen	
3.31.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERINDUSTRIAN			16.144.548.213
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			9.818.184.428
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Perindustrian	100.00 Persen	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			5.730.098.511
		Persentase Pertambahan Jumlah Sentra IKM	88.00 Persen	
		Persentase Pertambahan IKM	0.50 Persen	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			258.000.000
		Persentase jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif	4.00 Persen	
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			338.265.274
		Tersedianya Data Informasi Industri	0.50 Persen	

KODE	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
		INDIKATOR	TARGET	
4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH			205.902.531.465
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			143.287.510.532
		Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	
		Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan elektronik	100%	
		OPD yang melakukan Survei Kepuasan Masyarakat	43 OPD	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Bagian Tata Usaha	100%	
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Bagian Tata Usaha	100%	
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran Bagian Tata Usaha	100%	
		Peningkatan kemampuan ASN Bagian Tata Usaha	100%	
		Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	5 dokumen	
		Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	
		Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	50%	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			54.118.978.893
		Cakupan koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan	9.00 kegiatan	
		Fasilitasi, Kerjasama serta Hubungan Antar Lembaga, Pemerintah Kota Semarang dan Kepala Daerah	60.00 Persen	
		Indek Pelayanan Publik	123.00 Persen	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Wilayah	100.00 Persen	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			8.496.042.040
		Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa	100,00 persen	
		prosentase peningkatan koordinasi perekonomian berbasis potensi unggulan lokal daerah	100,00 persen	
		Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa	100,00 persen	
		Tersedianya pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD	1 dokumen	

KODE	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
		INDIKATOR	TARGET	
4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD			130.605.074.955
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			69.674.229.266
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100.00 Persen	
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			60.930.845.689
		Jumlah Raperda yang disetujui DPRD	17.00 dokumen	
5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			33.879.982.079
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			14.831.182.079
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100.00 Persen	
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	100.00 Persen	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			4.450.000.000
		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Tataran Kota	100.00 Persen	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			10.098.800.000
		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100.00 Persen	
		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100.00 Persen	
		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100.00 Persen	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			4.500.000.000
		Persentase inovasi dan hasil kelitbangan yang diimplementasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	100.00 Persen	

KODE	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
		INDIKATOR	TARGET	
5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			235.283.816.864
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			121.772.316.538
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100.00 Persen	
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	100.00 Persen	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			109.943.877.102
		Persentase realisasi dana transfer terhadap target dana transfer	100%	
		Persentase SILPA Terhadap APBD	1.02 Persen	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			3.567.623.224
		Persentase Legalitas Aset	90.24 Persen	
5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH			102.861.224.245
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			75.949.504.140
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD-Bapenda	100.00 Persen	
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN-Bapenda	100.00 Persen	
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD-Bapenda	100 Persen	
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD-Bapenda	100 Persen	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			26.911.720.105
		Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10 Persen	
5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			33.683.275.137
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			18.326.575.631
		Tingkat kesesuaian dan ketepatan waktu penyajian dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan serta evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	
		Persentase peningkatan kemampuan ASN BKPP	100 Persen	
		Persentase ketersediaan sarana prasarana kantor yang berfungsi baik	100 Persen	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			8.866.704.836
		Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah / dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	258,36 Persen	
		Persentase keterisian jabatan JPT Pratama, administrasi, dan fungsional sesuai kualifikasi	100,00 Persen	
		Presentase akurasi data kepegawaian	99,00 Persen	
		Persentase ASN yang tidak mendapatkan hukuman disiplin	99,00 Persen	
		Persentase ASN yang berkinerja baik sampai dengan sangat baik	81,50 Persen	
		Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	20,98 Persen	

KODE	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
		INDIKATOR	TARGET	
		Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100,00 Persen	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			6.489.994.670
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat (struktural, teknis, fungsional), seminar, kursus dan sejenisnya	45 Persen	
6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT			27.561.067.642
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			19.044.688.174
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100.00 Persen	
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	100.00 Persen	
		Persentase peningkatan kemampuan ASN (Inspektorat)	100.00 Persen	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			3.797.522.358
		Tingkat Leveling Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3.00 Leveling	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			4.718.857.110
		Nilai Maturitas SPIP	3.06 Nilai	
7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN			39.687.929.216
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			14.319.529.216
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 persen	
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100 persen	
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD %	100 persen	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.866.500.000
		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			22.290.100.000
		Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			110.000.000
		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20 Persen	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			101.800.000
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95 Persen	

KODE	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
		INDIKATOR	TARGET	
7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN SEMARANG UTARA			46.854.246.693
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			13.390.191.093
		Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 persen	
		Persentase tercapainya kegiatan sarana dan prasarana	100 persen	
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 persen	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			3.299.030.600
		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			29.906.400.000
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			155.000.000
		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20 Persen	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			103.625.000
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95 Persen	
7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN SEMARANG BARAT			62.176.378.028
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			19.992.654.352
		Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 persen	
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 persen	
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 persen	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			4.245.657.406
		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			37.849.776.170
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			14.041.500
		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20 Persen	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			74.248.600
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95 Persen	

KODE	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
		INDIKATOR	TARGET	
7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR			42.960.604.175
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			15.175.543.481
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD(Kec.Semarang Timur)	100 Persen	
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD(Kec.Semarang Timur)	100.00 Persen	
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD (Kec.SemarangTimur)	100 Persen	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			3.166.742.614
		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	93.00 Persen	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			24.475.968.080
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99.00 Persen	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			38.150.000
		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20.00 Persen	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			104.200.000
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95.00 Persen	
7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH			51.037.006.039
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			20.034.463.837
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD-Kec. SmgTgh	100.00 Persen	
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD-Kec Smg Tgh	100 Persen	
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD-Kec Smg Tgh	100 Persen	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			3.689.542.202
		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			27.197.000.000
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	93 Persen	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			33.600.000
		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	14 Persen	

KODE	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
		INDIKATOR	TARGET	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			82.400.000
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	40 Persen	
7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN GUNUNG PATI			58.804.687.370
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			23.739.685.114
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			4.321.397.256
		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			30.586.330.000
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			38.025.000
		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20 Persen	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			119.250.000
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95 Persen	
7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN TUGU			32.370.394.980
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			11.842.262.980
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD - Kec. Tugu	100.00 Persen	
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD - Kec. Tugu	100 Persen	
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD - Kec. Tugu	100 Persen	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.154.210.000
		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE) - Kec. Tugu	93 Persen	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			18.210.681.600
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan - Kec. Tugu	99 Persen	

KODE	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
		INDIKATOR	TARGET	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			75.540.000
		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum - Kec. Tugu	20 Persen	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			87.700.400
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional - Kec. Tugu	95 Persen	
7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN MIJEN			58.338.860.881
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			22.347.815.281
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 persen	
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD 100%	100 persen	
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100 persen	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			3.773.745.600
		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			32.075.800.000
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			49.500.000
		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20 Persen	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			92.000.000
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95 Persen	
7.01.0.00.0.00.09.0000	KECAMATAN GENUK			58.393.568.071
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			21.160.717.052
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			3.259.461.720
		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	

KODE	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
		INDIKATOR	TARGET	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			33.761.200.869
		Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			109.662.510
		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20 Persen	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			102.525.920
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95 Persen	
7.01.0.00.0.00.10.0000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR			33.815.043.611
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			13.639.308.611
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 Persen	
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.875.855.000
		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	95 Persen	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			17.135.960.000
		Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98 Persen	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			83.150.000
		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20 Persen	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			80.770.000
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	90 Persen	
7.01.0.00.0.00.11.0000	KECAMATAN TEMBALANG			65.831.788.734
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			19.939.835.067
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			4.124.103.667
		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92 Persen	

KODE	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
		INDIKATOR	TARGET	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			41.577.800.000
		Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			60.000.000
		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20 Persen	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			130.050.000
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	75 Persen	
7.01.0.00.0.00.12.0000	KECAMATAN CANDISARI			32.172.395.692
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			10.864.115.794
		Presentase Perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100 persen	
		Presentase Tersedianya Sarana dan prasarana perkantoran	100 persen	
		Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100 persen	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.681.453.414
		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			18.483.988.920
		Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Kecamatan Candisari)	100 Persen	
		Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			53.268.650
		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20 Persen	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			89.568.914
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95 Persen	

KODE	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
		INDIKATOR	TARGET	
7.01.0.00.0.00.13.0000	KECAMATAN BANYUMANIK			52.367.810.941
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			18.269.516.930
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 persen	
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 persen	
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 persen	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.978.844.011
		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			30.928.850.000
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	
		PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	99 Persen	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			50.400.000
		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20 Persen	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			140.200.000
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95 Persen	
7.01.0.00.0.00.14.0000	KECAMATAN NGALIYAN			54.011.025.887
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			18.818.144.480
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 persen	
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 persen	
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 persen	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			3.004.622.328
		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			32.025.262.879
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			81.896.200
		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20 Persen	

KODE	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
		INDIKATOR	TARGET	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			81.100.000
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95 Persen	
7.01.0.00.0.00.15.0000	KECAMATAN GAYAMSARI			32.917.700.142
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			11.842.642.928
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 persen	
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 persen	
		Persentase Kerja Administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 persen	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.255.608.214
		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			18.727.449.000
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			18.200.000
		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20 Persen	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			73.800.000
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95 Persen	
7.01.0.00.0.00.16.0000	KECAMATAN PEDURUNGAN			61.420.879.401
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			18.940.208.588
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD (Pedurungan)	100.00 Persen	
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD (Pedurungan)	100 Persen	
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD (Pedurungan)	100 Persen	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			3.355.070.813
		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			39.050.150.000
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan-Pedurungan	93 Persen	
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	93 Persen	

KODE	PROGRAM	KINERJA		PAGU INDIKATIF
		INDIKATOR	TARGET	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			50.000.000
		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum-Pedurungan	20 Persen	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			25.450.000
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional-Pedurungan	40 Persen	
8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			97.338.097.480
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6.813.370.840
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen	
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	100.00 Persen	
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			3.697.335.640
		Indeks Pengamalan Pancasila	2.20 Indeks	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			77.712.117.000
		Indeks Kebebasan Sipil	66.00 angka indeks	
		Prosentase Partisipasi pemilih pada pemilu/pemilukada	70.00 Persen	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			2.670.653.000
		Indeks Kinerja Ormas	58.00 indeks	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			2.882.847.000
		Indeks kerukunan umat beragama	71.00 indeks	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			3.561.774.000
		Prosentase kemampuan analisa intelijen strategis terhadap gangguan ipolkesosbudhankam	83.00 Persen	
JUMLAH				5.381.127.963.269

TABEL V.2
REKAPITULASI PAGU INDIKATIF PERANGKAT DAERAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA SEMARANG TAHUN 2024

KODE	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF
1.01.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN	817.569.467.649
1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	459.470.520.593
1.02.0.00.0.00.02.0000	RSUD KRMT WONGSONEGORO	569.106.708.009
1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM	455.739.943.809
1.03.2.10.0.00.02.0000	DINAS PENATAAN RUANG	125.786.259.729
1.04.1.03.2.11.01.0000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	323.910.488.450
1.05.0.00.0.00.01.0000	SATPOL PP	29.363.999.677
1.05.0.00.0.00.02.0000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	29.566.739.032
1.05.0.00.0.00.03.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	13.654.280.300
1.06.0.00.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL	34.393.388.438
2.07.0.00.0.00.01.0000	DINAS TENAGA KERJA	18.636.644.343
2.08.2.13.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	24.853.197.259
2.09.0.00.0.00.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN	16.633.805.374
2.11.1.03.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	116.477.859.006
2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	21.215.594.269
2.14.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	20.652.936.318
2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	307.979.701.993
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	60.166.311.906
2.17.0.00.0.00.01.0000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	25.509.465.294
2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	19.579.371.173
2.19.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	57.555.817.256
2.22.3.26.0.00.01.0000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	50.215.966.932
2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	17.073.496.033
3.25.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERIKANAN	12.326.649.576
3.27.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERTANIAN	33.590.911.872
3.30.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERDAGANGAN	53.678.501.038
3.31.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERINDUSTRIAN	16.144.548.213
4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	205.902.531.465

KODE	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF
4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD	130.605.074.955
5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	33.879.982.079
5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	235.283.816.864
5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	102.861.224.245
5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	33.683.275.137
6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT	27.561.067.642
7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	39.687.929.216
7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN SEMARANG UTARA	46.854.246.693
7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN SEMARANG BARAT	62.176.378.028
7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	42.960.604.175
7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	51.037.006.039
7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN GUNUNG PATI	58.804.687.370
7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN TUGU	32.370.394.980
7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN MIJEN	58.338.860.881
7.01.0.00.0.00.09.0000	KECAMATAN GENUK	58.393.568.071
7.01.0.00.0.00.10.0000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	33.815.043.611
7.01.0.00.0.00.11.0000	KECAMATAN TEMBALANG	65.831.788.734
7.01.0.00.0.00.12.0000	KECAMATAN CANDISARI	32.172.395.692
7.01.0.00.0.00.13.0000	KECAMATAN BANYUMANIK	52.367.810.941
7.01.0.00.0.00.14.0000	KECAMATAN NGALIYAN	54.011.025.887
7.01.0.00.0.00.15.0000	KECAMATAN GAYAMSARI	32.917.700.142
7.01.0.00.0.00.16.0000	KECAMATAN PEDURUNGAN	61.420.879.401
8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	97.338.097.480
	JUMLAH	5.381.127.963.269

TABEL V.3
Matrik Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Semarang Tahun 2024

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.01.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN				817.569.467.649	1.057.606.466.823	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				817.569.467.649	1.057.606.466.823	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD (Dinas Pendidikan)	100	%	656.333.073.069	755.490.887.000	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD (Dinas Pendidikan)	100	%			
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD (Dinas Pendidikan)	100	%			
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Pelaporan	100	%	120.000.000	1.482.000.000	DINAS PENDIDIKAN
		Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100	%			
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen	39.000.000	1.350.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	12.000.000	22.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	12.000.000	22.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	10.000.000	22.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	10.000.000	22.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Laporan	8.000.000	22.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	Laporan	29.000.000	22.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan SKPD	100	%	634.723.517.464	722.923.087.000	DINAS PENDIDIKAN
		Pelaporan Keuangan SKPD	100	%			
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6429	Orang/bulan	629.719.651.000	715.379.087.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2	Dokumen	4.973.866.464	7.500.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	10.000.000	22.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	20.000.000	22.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pelaporan Barang Milik Daerah	100	%	50.000.000	35.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	50.000.000	35.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100	%	2.315.317.605	5.800.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	139.749.605	350.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	225.000.000	350.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	225.000.000	550.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	225.000.000	600.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan	125.568.000	900.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	1.050.000.000	1.350.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	Dokumen	325.000.000	1.700.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	%	325.000.000	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10	Unit	325.000.000	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100	%	16.798.000.000	21.090.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	Laporan	15.964.000.000	20.400.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	14.000.000	90.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8	Laporan	820.000.000	600.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Aset SKPD	100	%	2.001.238.000	3.360.800.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	Unit	214.400.000	320.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	125	Unit	896.838.000	970.000.000	DINAS PENDIDIKAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	425.000.000	550.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	385.000.000	1.120.800.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16	Unit	80.000.000	400.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD 5-6 tahun	86.14	%	81.002.180.000	111.234.579.823	DINAS PENDIDIKAN
		APK SD/MI	111.72	%			
		APK SMP/MTs	115.63	%			
		Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan	10	lembaga			
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100	%	48.929.680.000	49.147.060.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2	Ruang	350.000.000	1.800.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	15	Unit	606.500.000	2.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	Ruang	200.000.000	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	12	Paket	18.700.000.000	1.800.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	16	Paket	525.000.000	2.520.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	13415	Peserta Didik	14.560.500.000	18.970.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	16	Paket	100.000.000	2.112.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	5000	Peserta Didik	950.000.000	1.500.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1600	Orang	1.022.800.000	225.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	502	Satuan Pendidikan	900.000.000	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	502	Orang	225.000.000	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	5555	Paket	520.000.000	1.020.060.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	24	Ruang	2.485.000.000	1.350.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	13	Unit	1.850.000.000	3.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar	502	Satuan Pendidikan	800.000.000	1.250.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	144	Ruang	5.134.880.000	10.500.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100	%	24.051.900.000	23.936.419.823	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1	Ruang	60.000.000	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	97	Ruang	140.000.000	1.120.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3	Ruang	100.000.000	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4	Unit	1.190.000.000	1.600.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	4	Paket	1.000.000.000	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	7	Paket	270.000.000	50.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	5333	Peserta Didik	12.786.900.000	11.685.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	2	Paket	100.000.000	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2240	Peserta Didik	750.000.000	1.522.474.423	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	900	Orang	300.000.000	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	190	Satuan Pendidikan	50.000.000	350.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	190	Orang	175.000.000	350.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	224	Satuan Pendidikan	1.200.000.000	1.500.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	34	Ruang	5.680.000.000	3.500.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	28	Paket	250.000.000	258.945.400	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100	%	6.430.600.000	34.958.300.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	2	Unit	100.000.000	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6	Unit	75.000.000	400.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4	Unit	358.500.000	400.000.000	DINAS PENDIDIKAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1	Paket	345.000.000	30.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	2	Paket	210.000.000	1.080.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1795	Peserta Didik	2.880.600.000	4.250.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	2	Paket	200.000.000	1.080.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	39569	Peserta Didik	585.000.000	2.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	5	Orang	200.000.000	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	100	Satuan Pendidikan	300.000.000	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	2	Unit	1.075.000.000	24.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	11	Paket	101.500.000	168.300.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal	100	%	1.590.000.000	3.192.800.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	1	Unit	700.000.000	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3450	Peserta Didik	40.000.000	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.0011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1	Paket	38.500.000	70.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50	Orang	75.000.000	125.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	40	Satuan Pendidikan	150.000.000	400.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1	Paket	61.500.000	67.800.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	Unit	100.000.000	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	3450	Peserta Didik	175.000.000	1.330.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.0050	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	Unit	250.000.000	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan PNF	100	%	585.000.000	4.350.000.000	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100	%			
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	100	%	200.000.000	3.750.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	4	Dokumen	50.000.000	850.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	63606	Buku	50.000.000	850.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	50	Orang	50.000.000	1.200.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	4	Dokumen	50.000.000	850.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase Lembaga PAUD dan PNF yang melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	100	%	385.000.000	600.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	4	Dokumen	60.000.000	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03.2.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	10550	Buku	150.000.000	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	6	Dokumen	175.000.000	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru berkualifikasi S1/D-IV	89.82	%	79.149.214.580	185.091.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase terlaksananya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100	%	79.149.214.580	185.091.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	18	Dokumen	74.565.214.580	184.716.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7	Laporan	4.584.000.000	375.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase PAUD dan PNF Swasta yang berijin	100	%	500.000.000	1.440.000.000	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase Satuan Pendidikan Dasar Swasta yang berijin	100	%			
1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Terbitnya Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100	%	150.000.000	440.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.05.2.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	4	Dokumen	50.000.000	240.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.05.2.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1	Dokumen	100.000.000	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Terbitnya Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100	%	350.000.000	1.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100	Dokumen	150.000.000	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100	Dokumen	100.000.000	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.05.2.02.0003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100	Dokumen	100.000.000	400.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN				459.470.520.593	478.886.725.306	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				459.470.520.593	478.886.725.306	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD	100.00	Persen	350.177.835.489	324.087.773.391	DINAS KESEHATAN
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00	Persen			
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100.00	Persen			
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	10	dokumen	102.602.150	521.260.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	47.718.592	222.332.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12	Dokumen	7.536.000	48.102.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12	Dokumen	8.976.000	46.949.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	12	Dokumen	5.504.000	43.008.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	2.992.000	43.008.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	Laporan	29.875.558	117.861.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah dokumen laporan keuangan	4	dokumen	257.529.250.400	260.852.316.557	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1750	Orang/bulan	256.769.384.000	259.956.335.230	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	748.720.000	883.739.827	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	3.678.000	4.080.500	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	Laporan	3.678.000	4.080.500	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	3.790.400	4.080.500	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	100	persentase	3.933.776.979	3.527.380.300	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16	Paket	52.209.800	27.940.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	23	Paket	31.476.130	82.225.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15	Paket	128.505.150	364.509.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	3.840.000	4.392.300	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	1.179.210.293	2.271.133.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	Dokumen	2.538.535.606	777.181.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	persentase	2.420.688.703	885.487.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6	Unit	2.420.688.703	885.487.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100	persentase	3.454.372.320	2.833.283.350	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	1.000.000	14.641.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	1.452.368.000	1.292.903.750	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	2.001.004.320	1.525.738.600	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase terpenuhinya pemeliharaan aset OPD	100	persentase	4.303.600.353	5.221.820.800	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	Unit	192.915.000	313.829.800	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	134	Unit	2.078.820.000	3.422.816.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	Unit	543.094.630	278.001.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28	Unit	1.423.212.203	1.096.415.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	65.558.520	110.759.000	DINAS KESEHATAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas	88	persentase	78.433.544.584	50.246.225.384	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	3.600.298.200	0	PUSKESMAS BANGETAYU
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	2.695.151.900	2.695.151.900	PUSKESMAS BANDARHARJO
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	Unit Kerja	1.471.976.700	1.471.976.700	PUSKESMAS BUGANGAN
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	1.930.358.600	1.435.298.000	PUSKESMAS BULULOR
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	1.820.369.000	0	PUSKESMAS CANDILAMA
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	3.045.673.200	3.045.673.200	PUSKESMAS GAYAMSARI
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	1.956.644.800	1.602.859.500	PUSKESMAS GENUK
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	2.890.166.700	2.890.166.700	PUSKESMAS GUNUNGPATI
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	2.286.117.000	2.286.117.000	PUSKESMAS HALMAHERA
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	1.400.094.500	0	PUSKESMAS KAGOK
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	Unit Kerja	1.294.442.200	1.294.442.200	PUSKESMAS KARANG AYU
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	Unit Kerja	1.332.331.384	1.332.331.384	PUSKESMAS KARANG ANYAR
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	2.324.525.600	2.324.525.600	PUSKESMAS KARANGDORO
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	4.026.620.900	0	PUSKESMAS KEDUNGUNDU
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	1.513.382.300	1.513.382.300	PUSKESMAS KARANGMALANG
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	Unit Kerja	1.478.885.500	0	PUSKESMAS KROBOKAN
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	1.730.196.400	1.730.196.400	PUSKESMAS LEBDOSARI
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	1.527.561.600	1.527.561.600	PUSKESMAS LAMPER TENGAH
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	Unit Kerja	1.392.036.500	1.392.036.500	PUSKESMAS MANGKANG
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	1.680.160.000	0	PUSKESMAS MANYARAN
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	2.555.162.700	2.555.162.700	PUSKESMAS MIJEN
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	1.343.995.000	0	PUSKESMAS MIROTO
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	Unit Kerja	2.992.035.800	2.162.058.600	PUSKESMAS NGALIYAN
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	Unit Kerja	1.215.747.200	0	PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	1.762.509.700	1.762.509.700	PUSKESMAS NGESREP
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	2.340.515.800	0	PUSKESMAS PANDANARAN
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	1.999.634.300	1.999.634.300	PUSKESMAS PADANGSARI
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	8	Unit Kerja	1.929.173.400	1.929.173.400	PUSKESMAS PENGANDAN
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	1.841.164.000	0	PUSKESMAS PONCOL
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	1.470.941.300	1.470.941.300	PUSKESMAS PUDAKPAYUNG
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	2.533.709.000	0	PUSKESMAS ROWOSARI

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	Unit Kerja	1.765.027.000	0	PUSKESMAS SRONDOL
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	1.597.200.000	1.597.200.000	UPTD Laboratorium Kesehatan
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	Unit Kerja	3.700.886.800	3.700.886.800	PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	1.845.979.400	1.845.979.400	PUSKESMAS SEKARAN
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	1.461.910.000	0	PUSKESMAS TAMBAKAJI
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	Unit Kerja	1.360.346.200	1.360.346.200	PUSKESMAS PURWOYOSO
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	Unit Kerja	3.320.614.000	3.320.614.000	PUSKESMAS TLOGOSARI KULON
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar	100.00	Persen	108.683.965.654	153.346.705.068	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	persentase terpenuhinya sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	100	persentase	27.383.278.172	34.892.263.787	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	2	Unit	9.709.723.154	10.237.330.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1	Unit	8.103.500.000	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1	Unit	268.450.000	1.400.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1	Unit	5.620.994.352	6.183.093.787	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	3	Unit	2.199.100.000	1.554.100.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	5	Paket	1.481.510.666	15.517.740.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas	100	persentase	71.209.822.894	107.431.270.235	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	24001	Orang	167.847.039	25.920.439.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	22802	Orang	46.350.000	4.263.491.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	22778	Orang	25.338.220	36.600.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	91122	Orang	30.400.000	2.887.046.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	227182	Orang	107.407.500	232.931.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1116174	Orang	132.000.000	649.660.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	151659	Orang	1.142.200.000	206.267.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	321721	Orang	50.000.000	654.950.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	41468	Orang	50.000.000	654.950.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	4222	Orang	52.500.000	101.553.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	34619	Orang	262.106.997	356.892.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	39268	Orang	408.158.731	241.873.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	4	Dokumen	52.141.981	186.340.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	10	Dokumen	8.529.482.895	1.537.683.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6	Dokumen	50.000.000	134.374.100	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15	Dokumen	275.028.019	438.155.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4	Dokumen	112.500.000	417.645.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	4	Dokumen	37.000.000	40.700.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	60	Dokumen	250.000.000	1.981.329.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	10	Orang	60.000.000	47.957.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	84	Dokumen	643.876.934	1.820.176.000	DINAS KESEHATAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	69	Dokumen	42.000.000.000	46.200.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	9	Dokumen	137.500.000	1.886.453.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12	Dokumen	13.275.000.000	13.275.000.000	DINAS KESEHATAN
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	Dokumen	500.000.000	500.000.000	PUSKESMAS PLAMONGAN SARI
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12	Dokumen	1.500.000.000	1.515.636.000	UPTD Instalasi Farmasi
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100	Dokumen	500.000.000	500.000.000	UPTD Laboratorium Kesehatan
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	25	Unit	253.240.000	278.564.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1	Laporan	26.750.000	7.232.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	100	Dokumen	111.721.071	23.923.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	Unit	218.663.150	240.529.465	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6748	Orang	100.120.357	103.507.670	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	580	Orang	93.890.000	81.264.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	40	Orang	8.600.000	8.150.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	persentase faskes (puskesmas, rumah sakit, klinik) yang telah menyelenggarakan sistem informasi kesehatan sesuai standar	100	persentase	1.597.562.480	1.680.318.728	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	100	Dokumen	1.597.562.480	1.680.318.728	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	cakupan penerbitan izin rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Semarang	100	persentase	8.493.302.108	9.342.852.318	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	100	Unit	19.900.000	22.110.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	260	Unit	1.337.058.120	1.470.763.932	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	9	Dokumen	7.136.343.988	7.849.978.386	DINAS KESEHATAN
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100.00	Persen	250.000.000	902.740.400	DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia kesehatan	100	persentase	160.332.228	410.432.200	DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2	Dokumen	22.381.000	24.619.100	DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	100	Orang	67.405.228	102.757.900	DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	90	Dokumen	70.546.000	283.055.200	DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase SDMK yang telah mengikuti pendidikan pelatihan fungsional dan teknis kesehatan	100	persentase	89.667.772	492.308.200	DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	2	Orang	89.667.772	492.308.200	DINAS KESEHATAN
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang memenuhi standar	97.00	Persen	185.000.000	245.988.952	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Cakupan pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	100	persentase	59.889.590	108.367.500	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100	Dokumen	59.889.590	108.367.500	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga	100	persentase	59.775.425	65.752.968	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100	Dokumen	59.775.425	65.752.968	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase frekuensi pembinaan dan keamanan produk makanan dan minuman industri rumah tangga	100	persentase	65.334.985	71.868.484	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	100	Unit	65.334.985	71.868.484	DINAS KESEHATAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100.00	Persen	173.719.450	303.517.495	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektoral	100	persentase	103.719.450	114.091.395	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	54	Dokumen	103.719.450	114.091.395	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dibina	100	persentase	70.000.000	189.426.100	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	10	Dokumen	70.000.000	189.426.100	DINAS KESEHATAN
1.02.0.00.0.00.02.0000	RSUD KRMT WONGSONEGORO				569.106.708.009	0	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				569.106.708.009	0	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan pelaporan keuangan OPD	100	persen	399.106.708.009	0	RSUD KRMT WONGSONEGORO
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	100	persen			
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja SKPD yang dihasilkan	12	dokumen	50.000.000	0	RSUD KRMT WONGSONEGORO
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	29.000.000	0	RSUD KRMT WONGSONEGORO
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	21.000.000	0	RSUD KRMT WONGSONEGORO
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi Keuangan Rumah Sakit	100	Persen	67.121.700.767	0	RSUD KRMT WONGSONEGORO
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	557	Orang/bulan	67.074.282.000	0	RSUD KRMT WONGSONEGORO
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6	Dokumen	47.418.767	0	RSUD KRMT WONGSONEGORO
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan BLUD	100	persen	331.935.007.242	0	RSUD KRMT WONGSONEGORO
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	331.935.007.242	0	RSUD KRMT WONGSONEGORO
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pemenuhan peralatan kesehatan rujukan rumah sakit	100	persen	170.000.000.000	0	RSUD KRMT WONGSONEGORO
		Pengembangan Sarana Prasarana Rumah Sakit	100	persen			
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Peralatan Kesehatan rujukan Rumah Sakit	100	Persen	170.000.000.000	0	RSUD KRMT WONGSONEGORO
		Persentase Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	100	Persen			
1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	2	Unit	100.000.000.000	0	RSUD KRMT WONGSONEGORO
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	105	Unit	70.000.000.000	0	RSUD KRMT WONGSONEGORO
1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM				455.739.943.809	436.883.000.000	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				455.739.943.809	436.883.000.000	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00	Persen	162.174.385.496	62.781.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100.00	Persen			
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00	Persen			
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00	Persen			
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	persen	81.395.627	45.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	33.129.164	15.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	3.200.000	2.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	3.200.000	2.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	Dokumen	7.050.000	3.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	5.000.000	4.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	4.525.000	8.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan	25.291.463	10.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100	persen	18.303.995.000	25.413.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	117	Orang/bulan	17.757.955.000	25.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	533.040.000	400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	3.000.000	3.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan	5.000.000	5.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	5.000.000	5.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	persen	11.100.000	16.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	6.600.000	8.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	4.500.000	8.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	persen	10.000.000	15.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen	5.000.000	10.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	5.000.000	5.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kelengkapan sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100	Persen	2.800.198.725	1.882.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50	Paket	200.000.000	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25	Paket	1.000.623.725	500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25	Paket	75.000.000	50.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20	Paket	150.000.000	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	Dokumen	5.000.000	5.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	Laporan	130.000.000	127.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	Laporan	479.075.000	400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7	Dokumen	760.500.000	500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	persen	6.259.756.456	5.100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20	Unit	109.756.456	100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	6.150.000.000	5.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	persen	12.276.933.020	11.010.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	Laporan	9.999.000	10.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	6.370.953.020	5.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	5.895.981.000	6.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100	Persen	122.431.006.668	19.300.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	80	Unit	2.500.000.000	2.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100	Unit	75.000.000	50.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200	Unit	207.985.560	250.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15	Unit	1.220.356.800	1.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	5	Ha	118.427.664.308	15.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob	98.15	Persen	46.043.232.671	42.150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas kawasan rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir	96.78	persen	42.633.232.671	39.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.02.2.01.0013	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	2	Unit	8.000.000.000	8.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.02.2.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	15	Unit	2.406.732.671	2.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.02.2.01.0028	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	2	Unit	8.500.000.000	3.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.02.2.01.0082	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara	18	Unit	1.520.800.000	2.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.02.2.01.0085	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	43	Unit	17.750.000.000	20.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.02.2.01.0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	4	Unit	900.000.000	1.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0.5	KM	3.000.000.000	2.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	6	Dokumen	555.700.000	500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi.	84.20	persen	3.410.000.000	2.650.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1	KM	3.300.000.000	2.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	1	Dokumen	110.000.000	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Tingkat pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	66.00	Persen	130.012.967.014	82.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas kawasan rawan abrasi, akresi dan erosi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai	99.41	Persen	130.012.967.014	82.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	4	Sistem Drainase Perkotaan	58.891.840.000	25.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.06.2.01.0026	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	232	Unit	29.925.010.827	26.000.000.000	UPTD Peralatan dan Perbengkelan
1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	9	Dokumen	917.800.000	1.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	5000	Sistem Drainase Perkotaan	20.355.000.000	15.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	4	Sistem Drainase Perkotaan	19.923.316.187	15.000.000.000	UPTD Perbekalan Pekerjaan Umum
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	74.90	Persen	117.509.358.628	249.452.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	87.98	persen	117.509.358.628	249.452.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	1	Dokumen	455.000.000	450.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	17	Dokumen	2.060.640.000	3.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	1	KM	7.491.600.000	25.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	0,5	KM	3.450.000.000	2.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	5	KM	44.561.389.518	50.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	5	KM	8.551.235.876	50.000.000.000	UPTD Perbekalan Pekerjaan Umum
1.03.10.2.01.0036	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	4	KM	2.947.600.905	2.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	20	Jembatan	974.800.000	1.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	2	Jembatan	4.967.600.000	2.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	1	Jembatan	800.000.000	1.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	100	KM	1.259.400.000	500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	4	KM	21.791.706.490	50.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	5	KM	6.895.812.013	50.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	3	KM	3.000.000.000	3.000.000.000	UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah I
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	3	KM	3.000.000.000	4.500.000.000	UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah II
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	3	KM	2.802.573.826	3.500.000.000	UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah III
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	3	KM	2.500.000.000	3.000.000.000	UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah IV
1.03.2.10.0.00.02.0000	DINAS PENATAAN RUANG				125.786.259.729	212.295.034.000	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				123.531.945.213	196.387.172.000	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100,00	Persen	20.559.177.802	26.427.728.000	DINAS PENATAAN RUANG
		Persentase Peningkatan kualitas SDM	100,00	Persen			
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100,00	Persen			
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100	%	126.700.000	66.464.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	37.500.000	20.343.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	7.850.000	3.861.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	9.250.000	3.854.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	7.850.000	3.854.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	9.250.000	3.854.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	12.500.000	10.172.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	Laporan	42.500.000	20.526.000	DINAS PENATAAN RUANG

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan dan Pelaporan Keuangan SKPD	100	%	13.922.872.798	18.718.029.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80	Orang/bulan	12.479.530.000	17.457.505.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3	Dokumen	1.419.567.600	1.240.760.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	7.925.066	6.588.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	7.925.066	6.588.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4	Dokumen	7.925.066	6.588.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Pelayanan Kepegawaian SKPD	100	%	482.485.595	310.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	24	Dokumen	14.225.760	130.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200	Orang	468.259.835	180.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%	4.176.710.267	5.022.235.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	Paket	114.413.805	31.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Paket	505.002.098	2.624.935.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	80	Paket	137.010.108	78.300.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	Paket	250.000.000	343.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	50	Paket	350.000.000	312.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30	Dokumen	8.958.410	8.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500	Laporan	1.291.000.000	1.500.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	50	Dokumen	1.520.325.846	125.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	897.647.132	801.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1200	Laporan	9.496.000	12.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	75	Laporan	269.239.200	84.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	Laporan	618.911.932	705.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	952.762.010	1.510.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	39.910.050	500.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	53	Unit	652.719.960	830.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	260.132.000	180.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Tertatanya Bangunan Gedung	100.00	Persen	93.833.260.289	141.973.880.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terselenggaranya bangunan gedung, pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	100	%	93.833.260.289	141.973.880.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.08.2.01.0015	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan	140	Bangunan Gedung Cagar Budaya	500.000.000	700.000.000	DINAS PENATAAN RUANG

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.03.08.2.01.0016	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Kompensasi, Insentif dan Disinsentif	15	Orang	25.000.000	300.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	24	Bangunan Gedung	14.752.225.000	23.650.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	77	Bangunan Gedung	4.000.000.000	17.500.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	5	Dokumen	300.000.000	550.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.08.2.01.0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	1	Bantuan Teknis	25.000.000	300.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	11	Dokumen	70.627.035.289	94.773.880.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilikan oleh Penilik Bangunan	2426	Unit	100.000.000	500.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	23	Dokumen	3.504.000.000	3.700.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase reklame yang berizin	100.00	Persen	820.022.760	0	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	terselenggarakannya penataan bangunan gedung dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota	100	%	820.022.760	0	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.09.2.01.0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	5	Dokumen	820.022.760	0	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Izin usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan	100.00	Persen	1.146.590.000	833.129.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	terselenggaranya pelatihan tenaga terampil konstruksi	100	%	1.146.590.000	833.129.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.11.2.01.0010	Fasilitas Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	540	Orang	148.845.000	230.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	420	Lembaga	199.175.000	253.129.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.11.2.01.0014	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihnnya	2	Dokumen	399.120.000	250.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	150	Orang	399.450.000	100.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dokumen perencanaan tata ruang yang disusun	100.00	Persen	7.172.894.362	27.152.435.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen perencanaan Tata Ruang	100	%	3.933.836.166	15.560.435.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	5	Dokumen	2.729.244.698	9.360.435.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	4	Dokumen	504.591.468	2.000.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.12.2.01.0009	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1	Dokumen	500.000.000	3.000.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	1	Orang	200.000.000	1.200.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang di Kota Semarang	100	%	1.598.130.655	1.000.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.12.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	1	Dokumen	98.130.655	450.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.12.2.02.0003	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1	Dokumen	1.500.000.000	550.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang di Kota Semarang	100	%	702.927.396	4.115.600.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	2	Dokumen	107.376.319	900.000.000	DINAS PENATAAN RUANG

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.03.12.2.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	5	Dokumen	595.551.077	3.215.600.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Semarang	100	%	938.000.145	6.476.400.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	4	Dokumen	568.000.145	4.276.400.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.12.2.04.0014	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	2	Dokumen	260.000.000	1.200.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.12.2.04.0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	1	Dokumen	110.000.000	1.000.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				2.254.314.516	15.907.862.000	
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang	100.00	Persen	806.338.680	1.339.041.000	DINAS PENATAAN RUANG
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang	100	%	806.338.680	1.339.041.000	DINAS PENATAAN RUANG
2.10.04.2.01.0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	37	Dokumen	400.000.000	850.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
2.10.04.2.01.0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50	Berita Acara	406.338.680	489.041.000	DINAS PENATAAN RUANG
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Terselenggarakannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100.00	Persen	30.000.000	841.997.000	DINAS PENATAAN RUANG
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	terselenggarakannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100	%	30.000.000	841.997.000	DINAS PENATAAN RUANG
2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3	Dokumen	30.000.000	841.997.000	DINAS PENATAAN RUANG
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Terselenggarakannya redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100.00	Persen	877.975.836	12.500.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	ditetapkannya subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100	%	877.975.836	12.500.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
2.10.06.2.01.0001	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4	Dokumen	632.975.836	4.000.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
2.10.06.2.01.0002	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4	Dokumen	205.000.000	2.000.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
2.10.06.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	4	Dokumen	20.000.000	3.500.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
2.10.06.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4	Dokumen	20.000.000	3.000.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Terselesaikannya masalah seputar pengelolaan tanah kosong	100.00	Persen	120.000.000	204.434.000	DINAS PENATAAN RUANG
2.10.08.2.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	terselesaikannya permasalahan tanah kosong	100	%	20.000.000	104.434.000	DINAS PENATAAN RUANG
2.10.08.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	3	Laporan	20.000.000	104.434.000	DINAS PENATAAN RUANG
2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Daftar inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong	100	persen	100.000.000	100.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
2.10.08.2.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	1	Laporan	100.000.000	100.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Terkelolanya izin membuka tanah	100.00	Persen	300.000.000	457.390.000	DINAS PENATAAN RUANG
2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	tertibnya izin membuka tanah	100	%	300.000.000	457.390.000	DINAS PENATAAN RUANG
2.10.09.2.01.0002	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	2	Dokumen	300.000.000	457.390.000	DINAS PENATAAN RUANG
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Terselesaikannya penatagunaan tanah	100.00	Persen	120.000.000	565.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	tergunakannya tanah yang hamparannya dalam satu daerah kab/kota	100	%	120.000.000	565.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	Laporan	120.000.000	565.000.000	DINAS PENATAAN RUANG

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.04.1.03.2.11.01.0000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				323.910.488.450	424.483.774.600	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				208.571.162.686	223.621.040.100	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Layak	55.75	Persen	1.325.000.000	2.732.386.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Sumber Daya Air Bawah Tanah (ABT) yang dilakukan perawatan	100	Persen	1.325.000.000	2.732.386.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.02.2.01.0107	Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun	3	Unit	1.325.000.000	2.732.386.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga Terlayani SPAM	100	%	50.000.000	244.759.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	50	SR	50.000.000	244.759.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	50	Liter/Detik	50.000.000	244.759.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	92,69	%	3.949.197.688	83.991.467.500	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100	%	3.949.197.688	83.991.467.500	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.05.2.01.0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	16	Lokasi	147.380.000.000	90.627.720.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.05.2.01.0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	177	Lokasi	53.449.002.800	39.225.630.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.05.2.01.0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	2	M ³ /Hari	3.432.672.688	83.516.206.500	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	75	M ³ /Hari	516.525.000	475.261.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Pembangunan dan Penyelenggaraan Infrastruktur di Lingkungan Permukiman	100	%	200.829.002.800	129.853.350.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Terwujudnya Urusan Penyelenggaraan PSU yang Menunjang Fungsi Hunian	100	%			
1.03.05.2.01.0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	16	Lokasi	147.380.000.000	90.627.720.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.05.2.01.0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	177	Lokasi	53.449.002.800	39.225.630.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.05.2.01.0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	2	M ³ /Hari	3.432.672.688	83.516.206.500	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	75	M ³ /Hari	516.525.000	475.261.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.05.2.01.0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	16	Lokasi	147.380.000.000	90.627.720.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.03.05.2.01.0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	177	Lokasi	53.449.002.800	39.225.630.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.05.2.01.0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	2	M ³ /Hari	3.432.672.688	83.516.206.500	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	75	M ³ /Hari	516.525.000	475.261.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.05.2.01.0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	16	Lokasi	147.380.000.000	90.627.720.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.05.2.01.0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	177	Lokasi	53.449.002.800	39.225.630.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.05.2.01.0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	2	M ³ /Hari	3.432.672.688	83.516.206.500	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	75	M ³ /Hari	516.525.000	475.261.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten. / kota yang ditangani	64.00	persen	50.000.000	1.027.838.100	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100	%	50.000.000	1.027.838.100	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.07.2.01.0033	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar	250	Rumah Tangga	50.000.000	1.027.838.100	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Pemanfaatan Hunian yang Tertata	100	%	2.367.962.198	5.771.239.500	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Bangunan Rumah Susun yang Tertata	100	%	2.367.962.198	5.771.239.500	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	8	Dokumen	2.367.962.198	5.771.239.500	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				115.339.325.764	200.862.734.500	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Disperkim	100	%	47.857.737.470	41.983.573.500	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Disperkim	100	%			
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Disperkim	100	%			
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran Disperkim	100	%			
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	111.516.800	68.418.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	30.837.600	18.862.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	6.535.900	8.202.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	7.660.900	8.202.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	19.185.900	8.202.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	7.660.900	8.202.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	7.317.800	8.202.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	32.317.800	8.546.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	100	%	21.529.855.400	26.300.103.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	156	Orang/bulan	21.091.564.000	24.524.651.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	415.560.000	1.738.897.500	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2	Dokumen	7.500.000	11.948.500	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	5.139.400	8.202.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	Laporan	6.051.600	8.202.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6	Dokumen	4.040.400	8.202.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Aparatur	100	%	614.219.469	300.773.500	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	Paket	326.637.869	206.644.500	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	Dokumen	8.100.000	17.668.500	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60	Orang	217.154.400	19.042.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	Orang	62.327.200	57.418.500	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perkantoran	100	%	2.862.952.887	3.761.746.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	Paket	42.928.000	27.787.500	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40	Paket	1.973.770.270	663.209.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20	Paket	207.249.698	80.839.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30	Paket	70.942.276	124.645.500	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10	Paket	87.576.602	59.305.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	59.130.600	43.697.500	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	124.334.041	748.513.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	160	Dokumen	22.021.400	8.202.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	Dokumen	275.000.000	2.005.547.500	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah	100	%	6.262.289.735	495.947.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	11	Unit	852.540.000	340.963.500	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	2	Unit	5.173.337.606	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6	Unit	236.412.129	154.983.500	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	3.276.294.340	1.960.117.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	13.000.000	14.568.500	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	772.056.000	776.754.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	2.491.238.340	1.168.794.500	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	13.200.608.839	9.096.469.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	270	Unit	1.828.348.355	2.130.080.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110	Unit	7.620.020.765	5.475.004.500	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	614	Unit	121.078.800	156.293.500	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	3.000.000.000	1.078.229.500	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	300	Unit	631.160.919	256.861.500	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terlaksananya Fasilitas Kebutuhan Perumahan	100	%	5.262.830.450	4.509.581.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100	%	400.000.000	607.838.500	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	15	Unit Rumah	400.000.000	607.838.500	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Terbina dan Terkelola dengan Baik	100	%	4.045.000.000	3.820.697.500	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	4	Laporan	4.045.000.000	3.820.697.500	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Terlaksananya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100	%	817.830.450	81.045.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.06.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	1	Laporan	817.830.450	81.045.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Layak Huni	99,42	%	13.663.207.352	27.456.857.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Terlaksananya penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan	100	persen	310.000.000	2.013.949.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	3	Laporan	310.000.000	2.013.949.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani	100	%	13.353.207.352	25.442.908.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	730	Unit Rumah	13.353.207.352	25.442.908.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Perumahan yang Terfasilitasi PSU	100.00	Persen	48.555.550.492	126.912.723.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Persentase Ruang Terbuka Hijau	44.36	Persen			
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Pembangunan dan Penyelenggaraan Infrastruktur di Lingkungan Permukiman	100	%	48.555.550.492	126.912.723.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Terwujudnya Urusan Penyelenggaraan PSU yang Menunjang Fungsi Hunian	100	%			
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	16	Lokasi	21.070.036.431	26.458.921.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05.2.01.0003	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	16	Laporan	25.673.000.000	98.285.462.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	10	Laporan	1.812.514.061	2.168.340.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.05.0.00.0.00.01.0000	SATPOL PP				29.363.999.677	34.831.529.501	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				29.363.999.677	34.831.529.501	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100	%	19.384.910.067	24.509.926.524	SATPOL PP
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100	%			
		Persentase peningkatan kemampuan ASN SKPD	100	%			
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran SKPD	100	%			
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100	%	128.668.700	114.897.340	SATPOL PP
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	32.328.800	7.662.600	SATPOL PP
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	4.849.020	10.224.510	SATPOL PP
1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	5.240.840	8.620.420	SATPOL PP
1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	4.849.020	5.424.510	SATPOL PP
1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	5.240.840	7.120.420	SATPOL PP
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	48.039.760	60.844.880	SATPOL PP
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	28.120.420	15.000.000	SATPOL PP
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kinerja adminitrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100	%	15.929.087.160	18.683.277.949	SATPOL PP
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115	Orang/bulan	15.682.311.000	18.406.051.789	SATPOL PP
1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	233.880.000	264.330.000	SATPOL PP
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	2.512.400	2.198.720	SATPOL PP
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	9.071.360	9.548.720	SATPOL PP
1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	1.312.400	1.148.720	SATPOL PP
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Pelayanan Kepegawaian SKPD	100	%	238.916.280	886.533.755	SATPOL PP
1.05.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4	Unit	46.382.480	200.000.000	SATPOL PP
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20	Paket	36.000.000	350.000.000	SATPOL PP
1.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	450	Orang	150.000.000	300.000.000	SATPOL PP
1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60	Orang	6.533.800	36.533.755	SATPOL PP
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Tersedianya Sarana dan Prasarana SKPD	100	%	496.181.676	1.225.841.615	SATPOL PP
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16	Paket	10.732.129	39.428.480	SATPOL PP
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25	Paket	34.557.540	54.557.540	SATPOL PP
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Paket	21.894.640	71.894.640	SATPOL PP
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13	Paket	31.682.820	71.682.820	SATPOL PP
1.05.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan	62.025.000	72.025.000	SATPOL PP
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	211.286.048	434.218.440	SATPOL PP
1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	Dokumen	124.003.499	482.034.695	SATPOL PP
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	%	578.689.822	1.288.821.556	SATPOL PP
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	529.360.004	650.000.000	SATPOL PP
1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	Unit	49.329.818	638.821.556	SATPOL PP
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100	%	617.941.080	712.941.080	SATPOL PP
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	235.141.080	250.141.080	SATPOL PP
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	382.800.000	462.800.000	SATPOL PP
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Aset SKPD	100	%	1.395.425.349	1.597.613.229	SATPOL PP
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	35.955.000	36.318.180	SATPOL PP
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50	Unit	971.235.000	981.045.210	SATPOL PP
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13	Unit	95.231.617	195.909.108	SATPOL PP

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	175.000.000	351.251.131	SATPOL PP
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	118.003.732	33.089.600	SATPOL PP
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemberdayaan linmas	16	%	9.979.089.610	10.321.602.977	SATPOL PP
		Persentase penurunan pelanggaran Perda	10.00	Persen			
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase partisipasi linmas dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum	16	%	9.429.901.791	9.238.266.865	SATPOL PP
		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100	%			
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12	Dokumen	1.573.409.198	281.680.000	SATPOL PP
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12	Dokumen	7.242.246.940	7.471.503.640	SATPOL PP
1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	252	Orang	92.350.000	271.651.170	SATPOL PP
1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2	Dokumen	189.206.870	358.934.930	SATPOL PP
1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1	Dokumen	46.755.690	150.264.032	SATPOL PP
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	80	laporan	80.274.100	280.274.100	SATPOL PP
1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	76	Laporan	197.525.166	365.825.166	SATPOL PP
1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1	Laporan	8.133.827	58.133.827	SATPOL PP
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	68	%	489.431.889	910.460.182	SATPOL PP
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4	Laporan	47.854.755	197.854.755	SATPOL PP
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	10	Laporan	257.823.944	371.237.237	SATPOL PP
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	80	Laporan	183.753.190	341.368.190	SATPOL PP
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kasus yang diselesaikan oleh PPNS	12	KASUS	59.755.930	172.875.930	SATPOL PP
1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1	Laporan	59.755.930	172.875.930	SATPOL PP
1.05.0.00.0.00.02.0000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN				29.566.739.032	36.928.303.662	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				29.566.739.032	36.928.303.662	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00	Persen	18.176.776.590	21.871.856.104	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100	Persen			
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100	Persen			
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen rencana kerja dan rencana anggaran Dinas Pemadam Kebakaran	100	%	72.664.700	77.247.683	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	30.690.800	30.027.150	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	4.228.700	4.757.200	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	4.813.700	5.415.410	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	2.946.900	3.315.260	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	3.396.900	3.821.500	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	1.197.200	1.346.850	DINAS PEMADAM KEBAKARAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Laporan	25.390.500	28.564.313	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi dan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran	100	%	14.329.910.610	17.323.275.041	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	107	Orang/bulan	14.042.671.000	17.000.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	277.979.000	312.726.375	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	949.680	969.390	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	Dokumen	2.067.690	2.326.151	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1.236.400	1.492.200	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12	Dokumen	1.459.840	1.568.050	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	2.685.600	3.223.800	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	861.400	969.075	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan dan pelaporan barang milik daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran	100	%	3.886.540	2.482.358	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	761.720	654.435	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	1.044.320	1.174.860	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	2.080.500	653.063	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan Pendapatan, Pelaporan Pendapatan Dinas Pemadam Kebakaran	100	%	2.345.790	2.629.585	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Dokumen	441.720	496.935	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.04.0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	12	Dokumen	563.440	624.450	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	Dokumen	1.340.630	1.508.200	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelayanan Administrasi kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran	100	%	291.617.784	323.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3	Paket	281.774.764	312.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	9.843.020	11.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Pemadam Kebakaran	100	%	573.334.202	653.666.110	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	20.616.075	22.611.850	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket	310.617.641	349.126.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	1.525.920	2.250.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	89.628.465	100.832.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	17.553.041	19.747.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	24	Laporan	42.735.000	45.450.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	88.902.000	93.649.260	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	1.756.060	20.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan pada Dinas Pemadam Kebakaran	100	persen	960.700.047	1.213.873.608	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor pada Dinas Pemadam Kebakaran	100	persen			
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	Unit	12.791.918	13.211.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12	Unit	8.865.792	9.974.016	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5	Unit	5.075.142	5.075.142	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	Unit	799.648.003	1.000.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	38	Unit	134.319.192	185.613.450	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor Dinas Pemadam Kebakaran	100	persen	533.171.840	599.818.320	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	366.776.400	412.623.450	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	166.395.440	187.194.870	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset pada Dinas Pemadam Kebakaran	100	persen	1.409.145.077	1.675.863.399	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dan lapangan, peralatan dan mesin pada Dinas Pemadam Kebakaran	100	persen			
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	39.910.050	44.898.806	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42	Unit	1.074.073.379	1.208.332.551	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20	Unit	1.454.400	1.500.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24	Unit	31.690.748	35.652.092	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	188.027.740	270.545.290	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	101	Unit	73.988.760	114.934.660	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran	100.00	Persen	11.389.962.442	15.056.447.558	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	100.00	Persen			
		Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran	100.00	Persen			
		Pelayanan pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan kondisi membahayakan manusia	100.00	Persen			
		Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100.00	Persen			
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan dan standar dan jumlah unit Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	100	persen	9.705.284.522	11.909.698.697	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Terlaksananya kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	persen			
		Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100	persen			
1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	12	Dokumen	100.000.000	150.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	300	Laporan	8.191.216.930	9.284.659.616	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	20	Dokumen	8.285.000	10.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.01.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	20	Dokumen	4.200.000	5.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	1	Dokumen	18.671.610	21.005.561	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	12	Desa/Kelurahan	81.379.635	433.033.520	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	100	Unit	1.267.700.000	2.000.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	5	Dokumen	33.831.347	6.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase layak operasional Proteksi Kebakaran bangunan gedung	100	persen	797.380.718	861.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	12	Dokumen	10.000.000	11.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	12	Dokumen	787.380.718	850.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	Perolehan data Kejadian Kebakaran yang Akurat	100	persen	25.865.195	250.786.620	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	165	Dokumen	25.865.195	250.786.620	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Tingkat partisipasi masyarakat dan relawan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	100	persen	686.732.570	772.210.461	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	1000	Orang	40.084.500	325.624.500	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	48	Desa/Kelurahan	297.059.390	204.407.460	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Supras Damkar	1	Dokumen	349.588.680	242.178.501	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Tersedianya standar beserta sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	100	persen	174.699.437	1.262.751.780	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Terselenggaranya operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	100	persen			
1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	500	Laporan	73.225.517	61.093.620	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.05.0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	1	Dokumen	1.473.920	1.658.160	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	11	Unit	100.000.000	1.200.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.0.00.0.00.03.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				13.654.280.300	15.623.112.665	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				13.654.280.300	15.623.112.665	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100.00	Persen	9.059.022.642	10.650.872.665	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	100.00	Persen			
		Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100.00	Persen			
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran SKPD	100.00	Persen			
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100	persen	51.800.000	6.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	50.450.000	1.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	450.000	1.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	450.000	1.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	450.000	1.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100	persen	6.980.892.000	8.468.653.290	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42	Orang/bulan	6.772.752.000	8.215.653.290	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	207.240.000	250.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	450.000	1.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	450.000	1.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100	persen	403.892.755	589.735.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	19.927.150	5.235.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	40.192.723	30.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	Paket	43.713.531	55.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	28.643.678	27.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1000	Paket	24.562.760	37.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1000	Laporan	13.200.000	65.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1000	Laporan	149.577.000	195.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	Dokumen	84.075.913	175.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100	persen	691.358.000	775.484.375	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000	Laporan	3.927.000	3.484.375	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	237.575.000	282.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	449.856.000	490.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100	persen	931.079.887	811.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10	Unit	309.290.400	330.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	Unit	415.461.789	325.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit	56.197.756	78.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	150.129.942	78.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	20.00	%	4.595.257.658	4.972.240.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	20.00	persen			
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	persen			
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi	500	orang	242.069.600	572.240.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	1	Dokumen	44.963.600	187.240.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	500	Orang	197.106.000	385.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana (RPB) Kota Semarang , dokumen Rencana Kontijensi dan dokumen kegiatan	4	dokumen	827.846.108	1.500.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana kebencanaan	5	jenis			
1.05.03.2.02.0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	2	Kawasan	42.665.790	375.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0009	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1	Dokumen	241.292.970	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	3	Unit	439.845.538	350.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	2	Kawasan	52.041.810	675.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	3	laporan	52.000.000	100.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tersedianya data kejadian bencana, penyelamatan dan bantuan terhadap korban bencana	12	dokumen	1.525.341.950	2.350.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	250	Orang	1.353.008.740	1.850.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	250	Orang	172.333.210	500.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terlaksananya pelatihan Jitu Pasna dan Money kebencanaan	200	orang	2.000.000.000	550.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	12	Kegiatan	2.000.000.000	550.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.06.0.00.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL				34.393.388.438	40.459.883.000	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				34.393.388.438	40.459.883.000	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dokumen kelembagaan SKPD	100	%	10.491.229.734	13.523.980.000	DINAS SOSIAL
		Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran SKPD	100.00	Persen			
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100.00	Persen			
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00	Persen			
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen rencana kerja dan rencana anggaran Dinas Sosial	100	%	59.777.945	9.010.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	29.357.600	2.010.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	Dokumen	445.600	1.500.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8	Dokumen	2.064.800	1.500.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	8	Dokumen	1.824.800	1.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	8	Dokumen	2.110.445	1.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Laporan	1.824.800	1.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Laporan	22.149.900	1.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan Dinas Sosial	100	%	8.853.215.262	10.523.868.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49	Orang/bulan	8.534.493.000	9.479.564.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	312.480.000	1.040.304.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	8	Dokumen	984.800	1.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	Laporan	1.295.771	1.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15	Laporan	2.665.920	1.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7	Dokumen	1.295.771	1.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Sosial	100	%	567.256.661	1.450.137.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8	Paket	5.900.000	5.900.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	66.587.024	500.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	53	Paket	5.067.472	50.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	448	Paket	33.656.500	66.550.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7106	Paket	32.400.000	25.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36	Dokumen	5.760.000	7.187.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	74	Laporan	154.350.000	147.500.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Laporan	147.100.000	350.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	9	Dokumen	116.435.665	298.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor Dinas Sosial	100	%	141.860.980	200.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	141.860.980	200.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset Dinas Sosial	100	%	800.782.214	1.286.965.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	35.955.000	39.950.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38	Unit	510.371.000	839.130.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	201	Unit	15.161.270	6.380.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	120.450.000	300.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	32.921.249	74.905.000	DINAS SOSIAL

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	136	Unit	85.923.695	26.600.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.13	Penataan Organisasi	Dokumen Kelembagaan Dinas Sosial	100	%	68.336.672	54.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1	Dokumen	68.336.672	54.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi	89.00	Persen	7.168.771.074	9.160.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya sumbangan untuk bidang sosial	100	%	149.769.259	500.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	2	Dokumen	149.769.259	500.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi	89.00	%	7.019.001.815	8.660.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	260	Orang	5.341.423.679	5.156.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	16	Orang	342.378.714	353.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Keluarga	116.062.254	420.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	50	Lembaga	340.213.065	1.110.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	12	Sertifikat	878.924.103	1.621.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pekerja Migran Bermasalah Sosial yang ditangani	100.00	Persen	40.955.130	40.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani	100	%	40.955.130	40.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Orang	40.955.130	40.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99.87	Persen	8.531.393.330	9.848.925.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	%	2.172.913.680	4.027.854.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	85	Orang	988.200.000	1.396.127.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	75	Orang	54.223.450	75.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30	Orang	42.050.000	85.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	85	Orang	719.570.190	450.350.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	90	Orang	55.023.000	55.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Orang	11.036.000	17.219.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	85	Orang	3.618.960	104.078.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	125	Orang	115.717.080	100.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	67.975.000	1.558.880.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30	Orang	57.750.000	95.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	15	Orang	57.750.000	91.200.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial	100	%	6.358.479.650	5.821.071.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	300	Orang	381.790.800	206.655.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	40.681.810	64.550.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	4000	Orang	4.772.399.810	0	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	48	Orang	19.008.000	27.500.000	DINAS SOSIAL

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	65	Orang	194.254.530	100.700.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	249.732.240	14.028.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	46.900.000	110.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	80.605.000	75.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Orang	51.477.460	66.550.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	150	Orang	41.391.600	76.834.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	125	Orang	26.300.000	16.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	26.300.000	16.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	25	Orang	26.300.000	33.275.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	4	Dokumen	401.338.400	5.013.979.000	DINAS SOSIAL
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan Sosial	70.54	Persen	7.009.078.990	7.056.978.000	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Pemberian perlindungan jaminan sosial kepada anak-anak terlantar	100	%	201.296.690	80.002.000	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Orang	129.769.400	25.002.000	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.01.0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Orang	27.366.760	25.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.01.0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Orang	44.160.530	30.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya angka DTKS	14.65	%	6.807.782.300	6.976.976.000	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	150000	Orang	519.417.249	1.799.976.000	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1500	Keluarga	482.215.951	1.700.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50000	Keluarga	5.169.649.100	3.427.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50	Orang	636.500.000	50.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) korban bencana yang ditangani	100.00	Persen	1.151.960.180	830.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	100	%	623.115.180	550.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	380	Orang	278.400.000	345.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	375	Orang	70.280.000	150.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Unit	30.250.000	25.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	75	Orang	63.290.400	30.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	180.894.780	0	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kota	100	%	528.845.000	280.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	3	Kampung	326.185.000	60.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	60	Orang	202.660.000	220.000.000	DINAS SOSIAL

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.07.0.00.0.00.01.0000	DINAS TENAGA KERJA				18.636.644.343	20.987.746.400	
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				18.636.644.343	20.987.746.400	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Tenaga Kerja	100.00	Persen	14.291.730.613	16.190.047.000	DINAS TENAGA KERJA
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja	100.00	Persen			
		Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran Dinas Tenaga Kerja	100.00	Persen			
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan Dinas Tenaga Kerja	100	persen	57.742.028	12.447.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	29.595.404	2.954.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1.425.018	2.954.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1.366.854	2.488.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	1.425.018	1.633.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1.142.190	1.244.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Laporan	745.254	443.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	22.042.290	731.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi dan tersusunnya dokumen pelaporan keuangan SKPD	100	persen	12.194.401.000	12.873.600.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	Orang/bulan	11.984.621.000	12.648.600.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	209.780.000	225.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana administrasi dan rumah tangga Dinas Tenaga Kerja	100	persen	278.674.032	589.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	Paket	19.993.701	27.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket	22.692.149	88.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	Paket	19.946.089	33.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8	Paket	20.020.361	38.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7	Paket	17.175.947	29.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36	Dokumen	5.008.953	6.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	200	Laporan	5.494.500	17.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Laporan	109.456.000	165.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	Dokumen	4.989.672	6.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	Dokumen	53.896.660	180.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Tenaga Kerja	100	persen	31.926.419	180.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	23	Unit	31.926.419	180.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa urusan penunjang kedinasan Dinas Tenaga Kerja	100	persen	1.283.788.956	1.495.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	366.601.356	500.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	917.187.600	995.000.000	DINAS TENAGA KERJA

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah Dinas Tenaga Kerja	100	persen	445.198.178	1.040.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	39.910.050	50.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24	Unit	280.099.620	350.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	63	Unit	50.130.308	140.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	75.058.200	500.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	persentase prog./keg. yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	70.00	Persen	142.722.500	130.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota	1	dokumen	142.722.500	130.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1	Dokumen	142.722.500	130.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	78.00	Persen	2.975.461.798	2.852.699.400	DINAS TENAGA KERJA
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	52	persen	2.836.501.298	2.522.699.400	DINAS TENAGA KERJA
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	672	Orang	2.822.699.400	2.482.699.400	DINAS TENAGA KERJA
2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	23	Unit	13.801.898	40.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK swasta yang terakreditasi	22	persen	80.000.000	155.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	20	Lembaga	80.000.000	155.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase LPK swasta yang memiliki izin	100	persen	10.000.000	25.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.03.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	15	Perizinan	10.000.000	25.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat produktivitas tenaga kerja	152739000	Rupiah	48.960.500	150.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	10	Dokumen	48.960.500	150.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	68.00	Persen	669.033.288	1.010.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui pelayanan antar kerja	2000	orang	302.053.172	520.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	2000	Orang	108.620.872	180.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	100	Orang	23.115.000	60.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	30	Orang	9.571.000	30.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	12	Orang	160.746.300	250.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui Informasi Pasar Kerja dan bursa kerja	1000	orang	253.967.244	330.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	2500	Orang	123.967.244	200.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	750	Orang	130.000.000	130.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perlindungan Pekerja Migran Indonesia (pra dan purna penempatan)	40	orang	113.012.872	160.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	40	Orang	21.335.000	120.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	15	Orang	91.677.872	40.000.000	DINAS TENAGA KERJA

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	5.50	Persen	557.696.144	805.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dan perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	788	perusahaan	292.058.109	370.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	45	Perusahaan	39.007.297	60.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	4	Laporan	253.050.812	310.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	58	persen	265.638.035	435.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	160	Perkara	75.260.112	125.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	100	Perkara	16.606.723	60.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	10	Asosiasi dan Serikat Pekerja	39.421.200	60.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1	Lembaga	134.350.000	190.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2.08.2.13.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				24.853.197.259	19.910.999.000	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				22.994.211.744	18.480.999.000	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	%	14.324.076.794	10.865.021.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Perencanaan dan pelaporan kinerja serta pelaporan keuangan DP3A	100	%			
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran DP3A	100	%			
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja yang dihasilkan	27	Dokumen	160.197.400	14.600.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen	125.691.000	7.800.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	2.586.000	1.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	3.036.000	1.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Dokumen	1.379.200	1.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.08.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1.012.000	1.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	Laporan	3.596.800	1.800.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Laporan	22.896.400	1.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100	%	9.918.108.345	9.235.015.588	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50	Orang/bulan	9.671.520.000	8.986.865.588	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	242.578.745	246.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	1.124.000	500.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	Dokumen	750.000	700.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14	Laporan	1.573.600	700.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	562.000	250.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan Pelayanan sumber daya aparatur	100	%	382.600.000	60.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	132.600.000	50.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.08.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	480	Orang	250.000.000	10.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100	%	1.134.598.847	718.105.412	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	5.355.300	3.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	57.905.370	8.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	Paket	29.997.620	12.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	64.466.452	70.105.412	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	20.175.425	25.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	48.000.000	100.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	Laporan	523.546.200	300.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3	Dokumen	385.152.480	200.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	%	1.341.628.410	50.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10	Unit	933.780.000	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	Unit	281.861.380	10.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	Unit	112.361.790	20.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	13.625.240	20.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100	%	582.109.140	375.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	177.384.000	125.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	404.725.140	250.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset dinas	100	%	804.834.652	412.300.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	39.910.050	238.800.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30	Unit	442.264.410	90.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit	43.390.566	40.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	243.102.165	25.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	36.167.461	18.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	100.00	Persen	1.488.449.604	1.365.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah di Kota Semarang yang sudah dievaluasi melalui analisis gender	96	Program/Kegiatan	216.903.968	270.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	33.766.450	65.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	54.244.530	35.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Perangkat Daerah	70.029.658	120.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.01.0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	46	Perangkat Daerah	58.863.330	50.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi yang mendapat pendampingan peningkatan partisipasi perempuan	3	Organisasi	444.347.212	170.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Dokumen	63.278.642	50.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	25	Organisasi	381.068.570	120.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	31	Lembaga	827.198.424	925.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	25	Lembaga	527.198.578	500.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	200	Orang	160.539.028	350.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	7	Dokumen	139.460.818	75.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	0.011	%	2.547.556.594	3.260.978.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	12.84	point			
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan rakor pencegahan kekerasan terhadap perempuan	4	Kegiatan	549.999.882	260.978.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	12	Dokumen	411.254.782	150.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	60	Perangkat Daerah	138.745.100	110.978.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	5	Lembaga	1.266.853.184	2.100.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	100	Orang	1.266.853.184	2.100.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan	26	Lembaga	730.703.528	900.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	2	Dokumen	253.882.570	250.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	297	Orang	130.105.119	250.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03.2.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	5	Orang	176.828.359	200.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	19	Dokumen	169.887.480	200.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi	100.00	Persen	2.561.500.000	2.230.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas keluarga	2	Kegiatan	2.062.612.120	30.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Perangkat Daerah	355.000.000	10.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	30	Dokumen	81.500.000	10.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1.626.112.120	10.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	17	Kegiatan	470.551.180	2.050.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	3	Lembaga	73.217.800	1.000.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	16	Orang	373.887.880	800.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04.2.02.0003	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	23.445.500	250.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan pemberdayaan berbasis gender	100	%	28.336.700	150.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	Layanan	28.336.700	150.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak	100.00	Persen	278.511.810	265.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan KIE Gender dan Anak	2	Kegiatan	278.511.810	265.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2	Dokumen	99.118.300	145.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	3	Dokumen	179.393.510	120.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Pemenuhan Hak Anak	100.00	Persen	1.794.116.942	495.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah jejaring kemitraan lembaga PHA	9	Jejaring	395.000.000	250.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	3	Organisasi	65.000.000	150.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6	Dokumen	330.000.000	100.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	9	Lembaga	1.399.116.942	245.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	50	Orang	841.156.942	100.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3	Dokumen	150.000.000	45.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6	Dokumen	207.960.000	50.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6	Dokumen	200.000.000	50.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				1.858.985.515	1.430.000.000	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kelurahan yang menerapkan sistem informasi	100.00	Persen	545.129.154	350.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Kelurahan yang terfasilitasi pelaksanaan evaluasi perkembangan Kelurahan	177	Kelurahan	545.129.154	350.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1	Dokumen	27.463.700	100.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1	Dokumen	517.665.454	250.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	100.00	Persen	1.313.856.361	1.080.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi peningkatan kapasitas bagi lembaga kemasyarakatan kelurahan	177	Kelurahan	1.313.856.361	1.080.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2	Dokumen	348.427.510	300.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Lembaga	100.667.580	130.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	Laporan	104.068.520	200.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	4	Laporan	760.692.751	450.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.09.0.00.0.00.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN				16.633.805.374	6.428.541.261	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				16.633.805.374	6.428.541.261	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD-Ketapang	100.00	Persen	9.783.223.571	1.601.589.061	DINAS KETAHANAN PANGAN
		Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD-Ketapang	100	Persen			
		Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur-Ketapang	100.00	Persen			
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD-Ketapang	8	Dokumen	63.272.806	18.585.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	29.896.800	7.500.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	2.796.900	2.015.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	2.796.900	2.015.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	1.245.300	2.129.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1.245.300	1.996.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	25.291.606	2.930.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD-Ketapang	4	Dokumen	7.071.251.200	281.184.061	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39	Orang/bulan	6.819.197.000	5.743.061	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	248.910.000	267.857.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	673.400	2.528.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17	Laporan	2.022.200	2.528.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	448.600	2.528.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD-Ketapang	100	%	1.003.503.588	373.020.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	9.164.604	4.500.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	126.241.938	9.500.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	55.579.611	40.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	62.676.118	40.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	38.573.346	12.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	5.700.000	8.386.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	100.972.400	37.700.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	380.960.000	90.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	223.635.571	130.934.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan SKPD-Ketapang	100	%	919.857.764	386.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	187.290.000	150.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	732.567.764	236.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD-Ketapang	100	%	725.338.213	542.800.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	39.950.000	40.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24	Unit	404.100.000	427.800.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	Unit	61.396.319	35.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	219.891.894	40.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Cakupan Wilayah Layanan Kemandirian Pangan	100	Persen	144.204.400	791.631.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	1	Unit	144.204.400	791.631.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	1	Unit	25.000.000	711.631.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	12	Laporan	119.204.400	80.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang	100.00	Persen	4.216.557.190	2.919.092.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Presentase Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	100	%	1.624.498.023	373.710.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	10	Laporan	180.120.000	50.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	4	Laporan	518.403.827	8.310.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.01.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	1	Unit	50.028.119	15.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	44	Unit	509.297.641	175.400.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.01.0011	Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	12	Dokumen	35.440.000	95.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.01.0013	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	25.150.170	30.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	4	Laporan	128.493.310	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	28	Dokumen	153.914.956	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1	Dokumen	23.650.000	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Penguatan Cadangan Pangan	100	%	1.304.629.167	1.788.400.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	97.5	Ton	1.170.000.000	1.600.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.02.0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	10	Ton	134.629.167	188.400.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Energi	88	%	1.287.430.000	756.982.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	4	Dokumen	528.516.000	75.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4	Laporan	412.120.000	569.482.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	4	Laporan	346.794.000	112.500.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Presentase Daerah Rentan Rawan Panga	3	Persen	379.648.149	301.150.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya Peta Katahanan dan Kerentanan Pangan	2	Buku	123.943.310	271.550.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	2	Dokumen	123.943.310	271.550.000	DINAS KETAHANAN PANGAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tertanganinya Kerawanan Pangan	2	Kelurahan	255.704.839	29.600.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	5	Laporan	255.704.839	29.600.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Presentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	82	Persen	2.110.172.064	815.079.200	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar	100	%	2.110.172.064	815.079.200	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	12	Dokumen	447.000.000	30.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.05.2.01.0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	100	Dokumen	265.000.087	85.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	3	Dokumen	1.148.171.977	550.079.200	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	5	Dokuman	250.000.000	150.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.11.1.03.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				116.477.859.006	139.437.685.787	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				116.477.859.006	139.437.685.787	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00	Persen	41.542.867.032	42.233.128.964	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00	Persen			
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00	Persen			
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.00	Dokumen	68.413.070	19.053.860	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	31.720.634	3.029.595	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	2.678.100	2.613.826	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	2.543.100	2.853.032	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	2.378.100	2.613.826	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	2.543.100	2.853.032	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan	26.550.036	5.090.549	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4.00	Dokumen	17.143.623.270	17.807.734.943	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Persentase administrasi Keuangan SKPD	100.00	Persen			
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	Orang/bulan	15.386.946.000	15.879.041.318	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	408.578.970	472.959.800	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	1.341.390.100	1.448.701.525	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	2.661.000	3.000.265	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan	2.548.600	2.180.345	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	1.498.600	1.851.690	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100.00	Persen	2.037.984.143	1.817.842.843	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	45.650.000	50.215.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22	Paket	534.895.147	125.558.400	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	Paket	111.330.919	99.518.100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	59.254.700	46.702.700	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	Dokumen	2.281.938	2.512.400	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	135.000.000	148.351.500	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	413.712.990	443.339.468	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8	Dokumen	735.858.449	901.645.275	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00	Persen	1.023.217.308	993.600.292	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	820.177.308	770.256.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	203.040.000	223.344.292	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100.00	Persen	21.269.629.241	21.594.897.026	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	Unit	160.471.000	176.518.100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	310	Unit	20.209.584.460	20.555.898.926	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	16	Unit	1.291.507	250.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200	Unit	250.000.000	275.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	Unit	648.282.274	337.480.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase terlaksananya Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100.00	Persen	566.159.024	712.314.700	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya penguatan, perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	100.00	Persen	366.159.024	402.774.700	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	2	Dokumen	210.877.000	231.964.700	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1	Dokuman	155.282.024	170.810.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1	dokumen	200.000.000	309.540.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1	Dokumen	200.000.000	309.540.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	30.00	Ha	5.140.013.861	6.478.221.248	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Cakupan peningkatan penataan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100.00	Persen			
		Persentase perubahan emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca	2.00	Persen			
		Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	89.00	Persen			
		Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	62.00	Persen			
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Emisi CO2	8274362.08	Kt CO2e	4.357.461.175	5.657.277.666	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	150	perusahaan			
		Persentase sumber daya air yang ditetapkan daya tampung beban pencemaran & mutu kelas air sungai	75	persen			
		Persentase terlaksananya kegiatan pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	100.00	Persen			
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	9	Dokumen	1.367.711.482	1.473.394.233	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	12	Dokumen	1.935.698.007	3.045.507.613	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	12	Dokumen	1.054.051.686	1.138.375.820	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Ketersediaan informasi publik bidang LH	2	jenis	314.332.835	305.901.746	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	8	Laporan	314.332.835	305.901.746	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Luasan Lahan yang terkonservasi	70	Ha	468.219.851	515.041.836	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.03.0009	Pelaksanaan rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	2	Dokumen	468.219.851	515.041.836	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Cakupan pengelolaan taman keanekaragamanhayati (kehati) di Kota Semarang	100.00	Persen	1.161.729.186	952.692.009	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan dan sarana prasarana keanekaragaman hayati yang tersedia	3.00	Jenis	1.161.729.186	952.692.009	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1	Dokumen	686.525.627	429.968.084	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	1	Unit	187.726.716	206.499.398	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2	Unit	287.476.843	316.224.527	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dalam pengolahan B3 dan limbah B3	58.00	Persen	378.480.513	439.968.979	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Ijin penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan	50.00	Perusahaan	289.259.497	341.825.862	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	Dokumen	204.235.097	248.299.022	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	40	Laporan	85.024.400	93.526.840	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan sarana prasarana pengumpulan limbah B3 yang tersedia	1	Jenis	89.221.016	98.143.117	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1	Dokumen	89.221.016	98.143.117	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan	100.00	Persen	723.917.835	796.309.620	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Persentase pembinaan dan pengawasan terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	85.60	Persen			
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan terkait izin lingkungan yang diterbitkan	2.00	Kegiatan	723.917.835	796.309.620	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan	100.00	Persen			
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	40	Dokumen	430.060.000	473.066.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	Laporan	293.857.835	323.243.620	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup	53.00	Persen	1.888.966.089	3.723.251.470	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	2.00	Kegiatan	1.888.966.089	3.723.251.470	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3	Dokumen	444.063.000	488.469.300	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	200	Lembaga	1.444.903.089	3.234.782.170	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan sekolah adiwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan	12.00	Persen	291.129.200	320.242.120	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penghargaan lingkungan yang diselenggarakan	2.00	Jenis	291.129.200	320.242.120	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	60	Entitas	291.129.200	320.242.120	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100.00	Persen	128.807.617	141.688.378	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah kasus lingkungan yang tertangani /ditindaklanjuti per-tahun	60.00	Kasus	128.807.617	141.688.378	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	50	Pengaduan	102.407.787	112.648.565	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10.2.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	1	Dokumen	26.399.830	29.039.813	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	71.00	Persen	64.655.788.649	83.639.868.299	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	28.00	Persen			
		Persentase volume sampah terangkut dari TPS ke TPA	91.50	Persen			
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase terlaksananya pelayanan pengelolaan persampahan	100.00	Persen	64.655.788.649	83.639.868.299	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	30	Kelompok	603.498.400	1.191.778.272	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	3	Dokumen	4.603.641.788	17.183.112.873	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	20	Unit	4.835.463.362	4.614.423.977	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	2	Dokumen	98.800.000	108.680.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	363	Ton	51.967.046.713	58.058.185.787	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	6	Laporan	1.009.988.386	823.349.390	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01.0021	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	50	Dokumen	1.537.350.000	1.660.338.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				21.215.594.269	24.349.764.140	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				21.215.594.269	24.349.764.140	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD	100.00	Persen	18.828.925.720	21.000.250.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00	Persen			
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00	Persen			
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00	Persen			
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100.00	Persen	58.055.100	12.450.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	21.421.800	1.950.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1.442.300	2.100.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.12.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1.442.300	2.100.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	1.442.300	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1.442.300	2.100.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	1.442.300	2.100.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	29.421.800	2.100.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaporan Keuangan SKPD	100.00	Persen	12.028.193.580	13.204.800.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78	Orang/bulan	11.810.318.000	13.000.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	213.263.880	200.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1.442.300	1.200.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	1.847.100	2.100.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	1.322.300	1.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan administrasi kepegawaian SKPD	100.00	Persen	15.300.000	27.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100	Orang	15.300.000	27.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	100.00	Persen	1.808.603.764	2.742.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	58.613.560	72.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	58.791.910	160.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	Paket	152.326.600	130.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	451.032.315	500.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	151.159.153	200.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	16.500.000	16.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	341.541.200	400.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	Dokumen	123.920.000	64.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	Dokumen	454.719.026	1.200.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00	Persen	351.051.730	660.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100	Unit	116.303.450	110.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40	Unit	234.748.280	550.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00	Persen	3.255.525.656	3.100.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	1.002.380.000	1.000.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	2.253.145.656	2.100.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset SKPD	100.00	Persen	1.312.195.890	1.254.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35	Unit	458.678.000	410.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	120	Unit	19.634.400	20.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	450	Unit	369.365.650	380.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18	Unit	352.566.000	360.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	111.951.840	84.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	74.00	Persen	1.384.500.753	2.718.461.400	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Persentase Perekaman KTP-el	99.50	Persen			
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	430000	Dokumen	1.066.781.960	2.584.461.400	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	6	Dokumen	7.072.800	4.461.400	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12	Laporan	789.179.360	880.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	322000	Dokumen	270.529.800	1.700.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk	100.00	Persen	50.630.000	92.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	10	Dokumen	50.630.000	92.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100	Persen	259.065.993	32.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	12	Dokumen	12.072.800	22.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	4	Laporan	246.993.193	10.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100.00	Persen	8.022.800	10.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.04.0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	12	Laporan	8.022.800	10.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan akta kelahiran	97.50	Persen	443.893.836	414.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	45450	Dokumen	349.213.196	376.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	45450	Dokumen	47.792.800	48.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	3	Layanan	276.447.596	290.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.01.0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	2	Paket	24.972.800	38.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100.00	Persen	86.357.840	30.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	12	Laporan	16.862.240	10.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	4	Laporan	69.495.600	20.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100.00	Persen	8.322.800	8.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.03.0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan	12	Laporan	8.322.800	8.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	100.00	Persen	468.364.800	157.052.740	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100.00	Persen			
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Cakupan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100.00	Persen	319.391.200	18.711.520	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12	Dokumen	299.645.600	12.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.01.0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	2	Laporan	19.745.600	6.711.520	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100.00	Persen	125.950.800	118.341.220	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.03.0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12	Laporan	11.772.800	20.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4	Laporan	6.147.800	33.379.700	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	10	Dokumen	13.647.800	14.961.520	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	10	Laporan	94.382.400	50.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100.00	Persen	23.022.800	20.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12	Laporan	23.022.800	20.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Daerah	100.00	Persen	89.909.160	60.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	100.00	Persen	89.909.160	60.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	2	Dokumen	89.909.160	60.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.14.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				20.652.936.318	19.436.758.269	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				20.652.936.318	19.436.758.269	
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD ((dukkb))	100.00	Persen	9.993.623.118	9.188.319.138	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD ((dukkb))	100.00	Persen			
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD (dukkb)	100.00	Persen			
2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100	%	73.428.300	27.778.300	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	32.703.200	4.651.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	2.683.100	3.432.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	2.479.800	3.432.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	2.683.100	3.432.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	2.479.800	3.432.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	30.399.300	9.399.300	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan SKPD	100	%	6.796.460.900	6.796.460.900	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36	Orang/bulan	6.534.064.000	6.534.064.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dokumen	924.100	924.100	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.14.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Laporan	1.419.000	1.419.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	259.680.000	259.680.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	373.800	373.800	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	100	%	678.867.204	755.624.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	19.024.746	21.507.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	17.412.933	62.313.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Paket	61.884.791	31.261.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	154.341.660	51.261.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	34.915.975	26.884.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	30.150.000	30.110.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	240.136.270	332.288.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	Dokumen	121.000.829	200.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	%	161.026.852	37.637.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	Unit	161.026.852	37.637.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100	%	504.809.226	604.107.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	131.135.742	145.551.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	373.673.484	458.556.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset SKPD	100	%	1.779.030.636	966.711.938	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	35.955.000	44.950.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	92	Unit	649.836.000	654.039.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	82	Unit	93.958.230	6.452.200	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	Unit	999.281.406	261.270.738	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0.50	Persen	921.774.750	1.035.048.329	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0.50	%	577.344.310	636.131.339	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.01.0018	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	4	Kegiatan	56.194.400	61.813.840	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.01.0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	5	Kegiatan	173.495.800	190.845.380	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.01.0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	12	Kegiatan	295.024.220	324.526.642	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1	Kegiatan	52.629.890	58.945.477	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0.50	%	344.430.440	398.916.990	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1	Dokumen	105.574.940	120.574.940	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12	Laporan	47.800.000	67.800.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12	Dokumen	183.435.500	201.779.050	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.02.0017	Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan	1	Dokumen	7.620.000	8.763.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan peserta KB Aktif	77.24	%	8.552.144.771	7.966.390.802	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Cakupan tingkat putus pakai alat kontrasepsi (DO)	11.00	%			
		PUS Unmeet need	8.04	Persen			
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan peserta KB Aktif	77.24	%	1.266.592.980	566.343.190	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	6	Dokumen	1.140.175.750	397.281.360	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	5	Organisasi	126.417.230	169.061.830	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan peserta KB Aktif	77.24	%	1.330.838.950	1.176.741.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	177	Orang	1.292.863.950	1.138.766.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	12	Laporan	37.975.000	37.975.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan PUS Unmeet need	8.04	%	3.819.993.531	4.157.377.922	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	6500	Orang	96.500.000	106.150.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	2	Laporan	19.150.000	21.065.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	35	Unit	2.394.702.379	2.725.705.613	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	14	Laporan	442.987.400	351.524.140	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	20	Orang	107.300.000	118.030.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	150	Laporan	635.003.752	698.118.169	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	80	Orang	124.350.000	136.785.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Cakupan Peserta KB Aktif	77.24	%	2.134.719.310	2.065.928.690	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	177	Kampung	2.134.719.310	2.065.928.690	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60.22	Persen	1.185.393.679	1.247.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60.22	%	855.011.051	897.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	7	Laporan	441.691.945	430.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang tersedia	30	Unit	12.280.000	12.500.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	1037	Orang	324.989.106	375.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA))	20	Laporan	76.050.000	79.500.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembanguan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60.22	%	330.382.628	350.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.02.0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	33	Laporan	330.382.628	350.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN				307.979.701.993	347.300.035.766	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				307.979.701.993	347.300.035.766	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100.00	Persen	66.388.602.519	82.241.820.000	DINAS PERHUBUNGAN
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	100.00	Persen			
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00	Persen			
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana SKPD	100.00	Persen			
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Dishub	100	persen	96.444.100	175.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	43.246.400	25.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	5.537.900	25.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	5.757.400	25.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	5.537.900	25.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	5.757.400	25.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	4.723.800	25.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Laporan	25.883.300	25.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Dishub	100	persen	14.495.468.400	20.421.666.514	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88	Orang/bulan	13.926.733.000	19.846.666.514	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	534.989.000	500.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	11.248.800	25.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	Laporan	11.248.800	25.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	11.248.800	25.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi pelayanan kepegawaian Dishub	100	persen	328.287.630	950.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	Unit	75.802.500	400.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	300	Paket	252.485.130	550.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dishub	100	persen	2.169.651.539	2.525.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	101.853.790	150.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	480.815.104	50.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	82.993.514	150.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	138.330.689	175.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	175.405.159	350.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	122.400.000	700.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	664.366.100	200.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	403.487.183	750.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Dishub	100	persen	1.051.324.620	2.320.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	Unit	614.590.800	200.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	2	Unit	72.600.000	200.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	Unit	218.452.529	800.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	100.833.000	200.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	Unit	44.848.291	920.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor Dishub	100	persen	5.669.193.312	1.639.814.751	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	48.000.000	60.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	1.283.278.800	1.079.814.751	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	4.337.914.512	500.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset Dishub	100	persen	4.844.232.918	3.986.704.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	Unit	39.950.000	100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	119	Unit	3.573.860.400	3.036.704.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	4	Unit	139.520.000	150.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	534.644.420	100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	107.538.500	500.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	Unit	448.719.598	100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan BLUD Trans Semarang	100	persen	37.734.000.000	50.223.634.735	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	37.734.000.000	50.223.634.735	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jml trayek BRT	14.00	trayek	241.591.099.474	265.058.215.766	DINAS PERHUBUNGAN
		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	65.51	Persen			
		Persentase pelanggaran lalu lintas angkutan umum	35	Persen			
		Persentase pengelolaan Parkir On the Street	90	Persen			
		Rasio ijin trayek per 10.000 jumlah penduduk	6.87	Rasio			
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pelaksanaan MRL	100	persen	1.792.848.990	400.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	14	Dokumen	1.792.848.990	400.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya perlengkapan jalan	100	persen	7.595.249.032	1.873.311.766	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	6	Unit	2.539.953.802	500.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	10	Unit	1.821.874.093	500.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1	Unit	2.597.460.978	117.361.766	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	50	Unit	635.960.159	755.950.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal	3	unit	1.569.842.148	1.200.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.03.0010	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	25	Orang	521.355.383	200.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	3	Unit	1.048.486.765	1.000.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Penyelenggaraan parkir	12	bulan	2.164.411.258	2.450.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12	Dokumen	635.445.718	1.900.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12	Laporan	1.528.965.540	550.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pelaksanaan pengujian kendaraan	12	bulan	2.434.750.085	6.708.137.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1	Unit	1.146.389.536	4.181.137.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1000	Dokumen	88.525.494	1.530.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	35	Unit	1.199.835.055	997.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jml kegiatan pengendalian dan penertiban lalu lintas	12	bulan	4.660.663.381	3.643.050.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12	Laporan	3.553.251.852	3.118.050.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12	Dokumen	1.002.010.345	450.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1	Laporan	105.401.184	75.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan Andalalin	1	tahun	62.250.000	225.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	16	Laporan	18.000.000	75.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	5	Laporan	44.250.000	150.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Pemantauan angkutan	12	bulan	674.473.680	100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	12	Laporan	674.473.680	100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan angkutan	100	persen	220.181.701.220	247.188.717.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	pendukung pelayanan BRT	100	persen			
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	Laporan	181.701.220	0	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	215	Unit	220.000.000.000	247.188.717.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan	3	kegiatan	202.649.830	370.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.10.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	202.649.830	370.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan	2	kegiatan	54.700.940	300.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	49.675.940	200.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.11.0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	5.025.000	100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.13	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan	2	kegiatan	113.892.910	400.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.13.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	43.246.500	200.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.13.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	70.646.410	200.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.15	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan	2	kegiatan	83.666.000	200.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.15.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Persetujuan Izin Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan.	1	Unit	14.796.000	100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.15.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	12	Dokumen	68.870.000	100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN				60.166.311.906	73.576.818.000	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				58.849.386.628	71.351.818.000	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD (Diskominfo)	100.00	Persen	18.912.838.296	21.651.818.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN (Diskominfo)	100	persen			
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD (Diskominfo)	100	Persen			
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD (Diskominfo)	100	Persen			
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	6	dokumen	78.341.075	29.500.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	32.363.522	5.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	5.018.199	5.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	4.727.379	4.500.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	5.018.199	5.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	4.727.379	4.500.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	26.486.397	5.500.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100	persen	14.800.948.299	17.987.318.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	103	Orang/bulan	14.382.415.000	17.474.318.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	405.600.000	500.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	4.600.839	4.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14	Laporan	4.478.140	4.500.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	3.854.320	4.500.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian SKPD	100	persen	415.967.598	300.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	160	Orang	415.967.598	300.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100	persen	1.160.122.228	1.195.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	190.909.040	50.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	132.691.960	60.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	36.496.447	60.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	54.788.704	75.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	14.966.724	25.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10	Dokumen	9.978.530	20.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	150	Laporan	150.138.653	185.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Laporan	221.095.314	220.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3	Dokumen	349.056.856	500.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan	100	persen	1.153.415.929	470.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	961.725.000	50.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	Unit	165.089.823	170.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	26.601.106	250.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100	persen	451.045.992	685.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	6.600.000	35.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	444.445.992	650.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100	persen	852.997.175	985.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	39.910.050	50.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	Unit	458.855.256	550.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2	Unit	50.000.000	85.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	Unit	122.273.929	150.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	Unit	181.957.940	150.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase penyebaran informasi ke masyarakat	100.00	Persen	9.611.328.662	9.700.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya informasi dan komunikasi publik	100	persen	9.611.328.662	9.700.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.02.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1	Dokumen	200.000.000	250.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.02.2.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	8	Dokumen	1.513.218.100	2.100.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	8	Dokumen	5.835.521.650	4.000.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	4	Dokumen	1.141.202.983	2.200.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.02.2.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	600	Orang	471.600.000	600.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	12	Dokumen	449.785.929	550.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Terselenggaranya pengelolaan E-Government	100.00	Persen	30.325.219.670	40.000.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	persen	26.583.724.598	35.100.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.03.2.01.0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	577	Domain	1.283.367.671	3.000.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.03.2.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6	Dokumen	1.773.727.028	2.100.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	10	Unit	23.526.629.899	30.000.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya infrastruktur TIK penunjang pelayanan publik dan pemerintahan	100	persen	3.741.495.072	4.900.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	40	Unit	2.011.561.710	2.550.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	4	Dokumen	800.000.000	1.100.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	8	Dokumen	738.311.522	950.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.03.2.02.0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	4	Dokumen	191.621.840	300.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				626.003.608	1.475.000.000	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100.00	Persen	626.003.608	1.475.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Semarang Satu Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi	100	persen	626.003.608	1.475.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	12	Dokumen	120.000.000	300.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.20.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	30	Orang	80.000.000	250.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	30	Dokumen	82.000.000	175.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.20.02.2.01.0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	50	Orang	105.000.000	0	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.20.02.2.01.0005	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	5	Unit	163.000.000	400.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.20.02.2.01.0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	30	Dokumen	76.003.608	350.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				690.921.670	750.000.000	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Terselenggaranya keamanan informasi pemerintahan daerah	100.00	Persen	690.921.670	750.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya penguatan manajemen resiko	100	persen	690.921.670	750.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12	Laporan	690.921.670	750.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.17.0.00.0.00.01.0000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO				25.509.465.294	26.420.329.000	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				25.509.465.294	26.420.329.000	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100	persen	12.285.617.086	14.769.329.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100	persen			
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100	persen			
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	9	dokumen	64.493.300	14.150.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	29.738.600	1.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	3.658.900	3.500.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	4.258.900	3.750.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	1.934.900	2.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	2.234.900	2.400.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	22.667.100	1.500.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3	dokumen	10.433.634.600	12.792.179.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100	persen			
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64	Orang/bulan	10.181.984.000	12.540.179.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10	Dokumen	250.080.000	250.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	673.400	1.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	Laporan	897.200	1.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100	persen	968.553.209	1.263.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	170.902.655	270.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	Paket	26.263.210	30.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20	Paket	48.222.030	75.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7	Paket	31.393.742	35.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	Dokumen	1.920.000	3.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	50	Laporan	50.000.000	50.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	Laporan	564.965.860	550.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	Dokumen	74.885.712	250.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	persen	44.890.037	120.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	Unit	23.647.700	60.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	21.242.337	60.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100	persen	318.660.000	125.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	318.660.000	125.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	100	persen	455.385.940	455.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	39.950.000	40.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24	Unit	370.250.840	350.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1	Unit	1.236.240	10.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30	Unit	43.948.860	55.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	3.00	Persen	160.941.690	245.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mengajukan ijin usaha simpan pinjam	15	koperasi	82.558.990	95.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25	Unit Usaha	82.558.990	95.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengajukan ijin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	2	koperasi	78.382.700	150.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.02.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25	Unit Usaha	78.382.700	150.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	50.00	Persen	666.228.580	250.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa yang mematuhi Regulasi Perkoperasian	100	koperasi	666.228.580	250.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	250	Unit Usaha	666.228.580	250.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi sehat	32.00	Persen	250.816.800	375.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha Simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya	68	persen	250.816.800	375.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	250	Unit Usaha	250.816.800	375.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	10.00	Persen	560.300.000	400.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan	1.00	Persen			
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Koperasi yang Terampil	75	persen	560.300.000	400.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	200	Orang	560.300.000	400.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	27	Persen	2.636.334.793	2.440.500.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Penguatan dan perlindungan Koperasi, Kemitraan, pendampingan kelembagaan, dan pendampingan usaha	50	persen	2.636.334.793	2.440.500.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	400	Unit Usaha	2.636.334.793	2.440.500.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	3.00	Persen	3.491.708.800	3.985.500.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	600	orang	3.491.708.800	3.985.500.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	100	Unit Usaha	230.000.000	245.500.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	200	Unit Usaha	1.483.683.800	2.100.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	200	Orang	468.025.000	490.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	200	Orang	1.310.000.000	1.150.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	20.00	Persen	5.457.517.545	3.955.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	100	orang	5.457.517.545	3.955.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	500	Unit Usaha	5.457.517.545	3.955.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				19.579.371.173	31.314.307.000	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				19.579.371.173	31.314.307.000	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00	Persen	14.225.614.506	23.618.159.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00	Persen			
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100.00	Persen			
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100.00	Persen			
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Dihasilkan	11	Dokumen	64.172.900	5.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	30.345.200	1.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1.830.100	500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1.830.100	500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	2.234.900	500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1.830.100	500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	1.830.100	500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	24.272.400	2.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100	%	7.990.407.000	21.508.486.472	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44	Orang/bulan	7.707.530.000	10.490.920.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	277.800.000	11.015.466.472	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1.821.600	700.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	Laporan	1.425.300	700.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	1.830.100	700.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Daerah	100	%	241.775.400	235.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	200	Unit	65.920.000	35.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100	Orang	175.855.400	200.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100	%	3.083.429.320	1.397.172.528	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1.246.133.167	250.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	116.602.655	60.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	45.487.472	125.772.528	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	48.610.400	1.400.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	829.900.000	590.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3	Dokumen	796.695.626	370.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100	%	1.960.228.976	85.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	865.264.976	40.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	1.094.964.000	45.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100	%	885.600.910	387.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	Unit	39.950.000	57.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34	Unit	443.600.000	240.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	150	Unit	12.107.880	40.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	190	Unit	389.943.030	50.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Penanam Modal yang Mendapat Fasilitas Investasi	3700.00	Penanam Modal	918.119.127	1.737.267.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas/insentif yang bisa diberikan kepada investor	5	Buah	568.119.127	1.250.185.917	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	Dokumen	371.004.027	707.820.920	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	5	Dokumen	197.115.100	542.364.997	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya peta potensi peluang investasi di kota semarang	2	Dokumen	350.000.000	487.081.083	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	50.000.000	267.081.083	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1	Dokumen	300.000.000	220.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	541.00	Investor	1.187.015.175	924.720.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Investasi	6	Kegiatan	1.187.015.175	924.720.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	6	Dokumen	1.097.015.175	624.720.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1	Dokumen	90.000.000	300.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Izin Terbit Sesuai SP	95.50	Persen	2.430.004.902	4.249.441.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SP	100	%	2.430.004.902	4.249.441.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	6	Dokumen	611.707.265	1.000.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2400	Pelaku Usaha	828.316.070	1.249.441.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	800	Pelaku Usaha	787.931.941	1.000.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	750	Kegiatan Usaha	202.049.626	1.000.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	2	Nilai	100.000.000	160.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kenaikan /penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah)	7	%	100.000.000	160.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	19	Kegiatan Usaha	100.000.000	160.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengembangan dan inovasi sistem informasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal	97.00	Persen	718.617.463	624.720.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan	100	%	718.617.463	624.720.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1	Dokumen	718.617.463	624.720.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.19.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				57.555.817.256	66.821.700.000	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				57.555.817.256	66.821.700.000	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Pemuda dan Olah Raga	100	persen	13.271.918.746	16.563.700.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Pemuda dan Olah Raga	100	persen			
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pemuda dan Olah Raga	100	persen			
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	8.00	Dokumen	101.000.000	50.700.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	35.000.000	12.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	7.000.000	7.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	5.000.000	8.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	5.000.000	6.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	7.000.000	700.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	7.000.000	7.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	35.000.000	10.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Keuangan	100	Persen	8.438.549.000	10.903.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50	Orang/bulan	8.038.309.000	10.500.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	366.240.000	370.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	4.000.000	4.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.19.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2	Dokumen	6.000.000	7.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	6.000.000	4.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	Dokumen	6.000.000	6.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	Laporan	6.000.000	6.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	6.000.000	6.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pendapatan SKPD	100	persen	90.000.000	90.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1	Dokumen	90.000.000	90.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100	persen	150.000.000	200.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100	Orang	150.000.000	200.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	100	Persen	1.491.839.113	1.587.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	25.000.000	30.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Paket	315.974.313	250.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	Paket	60.000.000	60.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15	Paket	60.000.000	60.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	55.000.000	60.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	8.940.000	12.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	60.000.000	65.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	706.924.800	800.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	200.000.000	250.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	9.00	Jenis	137.421.168	333.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	Unit	89.003.928	83.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6	Unit	48.417.240	250.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00	Persen	903.403.266	900.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	320.430.000	350.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	92.930.687	100.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	490.042.579	450.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset SKPD	100.00	Persen	1.959.706.199	2.500.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	36.255.000	40.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22	Unit	404.660.720	450.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5	Unit	7.272.000	10.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	1.511.518.479	2.000.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	40.00	Persen	3.068.762.000	2.503.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	10	kegiatan	1.526.762.000	1.431.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	300	Orang	716.397.000	800.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	400	Orang	230.365.000	165.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.02.2.01.0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	300	Orang	580.000.000	466.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Aktif OKP	1500.00	Orang	1.542.000.000	1.072.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.02.2.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	1000	Orang	831.000.000	272.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	5	Dokumen	711.000.000	800.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Atlet prestasi	1212.00	jumlah	38.815.136.510	45.255.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		Presentase terbangunnya Sarana dan Prasarana Olahraga	5	Lapangan			
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah sarana dan prasarana yang di kelola	6.00	jumlah	5.494.712.980	4.950.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	6	Dokumen	702.725.235	200.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	6	Unit	4.791.987.745	4.750.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan / EventKejuaraan Olahraga tingkat daerah, nasionaldan internasional	6.00	kegiatan	3.449.800.000	4.000.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.02.0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	3	Dokumen	1.514.900.000	1.800.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.02.0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	2	Dokumen	500.000.000	600.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	1000	Orang	1.434.900.000	1.600.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet yang dibina	1312.00	Orang	3.515.044.090	4.200.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.03.0002	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	7	Pelatda	2.250.000.000	2.500.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.03.0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	50	Orang	1.165.044.090	1.200.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.03.0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	100	Orang	100.000.000	500.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pengembangan organisasi olahraga	2.00	kegiatan	24.000.000.000	30.000.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.04.0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	56	Organisasi	24.000.000.000	30.000.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Sarana dan prasarana Olahraga yang dibangun	5.00	Lapangan	2.355.579.440	2.105.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	3	Dokumen	200.000.000	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.05.0002	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	2	Laporan	1.081.487.130	105.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.03.2.05.0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	10	Unit	1.074.092.310	2.000.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan Pembentukan karakter bagi anggota Pramuka Kota Semarang	50.00	Kegiatan	2.400.000.000	2.500.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Kegiatan Kepramukaan	50	Kegiatan	2.400.000.000	2.500.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	10	Laporan	2.400.000.000	2.500.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.22.3.26.0.00.01.0000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				50.215.966.932	0	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				12.083.729.058	0	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Kegiatan Seni Budaya	25.00	Persen	9.190.629.034	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Budaya	25	persen	1.463.500.000	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	10	Objek	1.463.500.000	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Seni Budaya	25	persen	5.690.629.034	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	7	Objek	5.690.629.034	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Pelaku Seni Budaya	25	persen	2.036.500.000	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	2600	Orang	2.036.500.000	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional	25.00	Persen	1.224.479.064	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Kegiatan Pembinaan Terhadap Sanggar/Kelompok Seni Budaya	25	persen	1.224.479.064	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.03.2.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standardisasi	629	Sertifikat	824.479.064	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	124	Lembaga	400.000.000	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Pelestarian Warisan Budaya	85.45	Persen	1.668.620.960	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	85.45	Persen	1.668.620.960	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	461	Objek	1.668.620.960	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				38.132.237.874	0	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD - disbudpar	100.00	Persen	18.575.249.000	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia - disbudpar	100.00	Persen			
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD - disbudpar	100.00	Persen			
		Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran SKPD - disbudpar	100.00	Persen			
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja-disbudpar	8	dokumen	52.518.400	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	29.357.600	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	283.800	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	Dokumen	413.300	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Dokumen	283.800	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	Dokumen	413.300	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	21.766.600	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan-disbudpar	100	persen	11.998.002.056	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74	Orang/bulan	11.599.895.000	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	397.435.656	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	223.800	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	Laporan	223.800	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	Dokumen	223.800	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian-disbudpar	100.00	Persen	328.600.000	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	600	Orang	250.000.000	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	74	Orang	78.600.000	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum-disbudpar	100	persen	1.498.676.486	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13	Paket	168.879.500	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	13	Paket	66.542.520	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	47	Paket	115.906.524	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	44.493.192	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	600	Laporan	400.000.000	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200	Laporan	550.000.000	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6	Dokumen	152.854.750	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah-disbudpar	100	persen	2.006.265.810	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	94	Unit	2.006.265.810	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah-disbudpar	100	persen	1.832.125.386	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	1.050.090.000	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	782.035.386	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah-disbudpar	100	persen	859.060.862	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31	Unit	315.569.720	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	Unit	334.395.442	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	Unit	209.095.700	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100.00	Persen	14.180.259.400	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kawasan Daya Tarik Wisata	1370783	orang	6.915.500.000	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1	Unit	6.915.500.000	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tata Kelola Destinasi Pariwisata	100	persen	7.098.920.660	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	79	Lokasi	654.266.260	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	6	Unit	6.359.000.000	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2	Laporan	85.654.400	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Usaha Pariwisata Yang Berkualitas	90	persen	165.838.740	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.02.2.04.0012	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	14	Laporan	165.838.740	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100.00	Persen	4.089.417.250	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100	persen	4.089.417.250	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	2	Dokumen	897.633.500	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.03.2.01.0006	Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	7	Kegiatan	1.841.783.750	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	16	Promosi	1.350.000.000	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	SDM Pariwisata	80.00	Persen	1.287.312.224	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Meningkatnya Kapasitas Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	80	persen	1.287.312.224	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.05.2.01.0006	Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	1200	Orang	1.287.312.224	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH				17.073.496.033	17.214.397.969	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				16.115.912.598	16.312.538.062	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00	Persen	13.492.177.408	13.633.315.183	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100.00	Persen			
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100	Persen			
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100	Persen			
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	8	Dok	68.847.700	156.140.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	34.364.000	6.500.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	Dokumen	1.613.800	3.500.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	7.849.400	69.570.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	25.020.500	76.570.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksana administrasi keuangan dengan baik dan benar	100	Persen	11.301.426.600	11.302.345.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	Orang/bulan	11.016.028.000	11.016.028.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	282.375.000	282.324.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1.340.800	1.996.500	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	1.682.800	1.996.500	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100	Persen	293.450.054	394.561.623	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	Paket	16.784.298	14.124.073	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	Paket	9.380.980	9.300.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	13.691.740	13.700.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	10.305.460	99.720.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	Dokumen	10.320.000	10.560.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan	15.700.000	8.775.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	129.661.000	116.163.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	Dokumen	87.606.576	122.219.550	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	Persen	165.944.304	88.500.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6	Unit	165.944.304	88.500.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100	Persen	870.705.480	753.714.280	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	254.491.200	160.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	616.214.280	593.714.280	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	Persen	791.803.270	938.054.280	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	35.955.000	80.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	Unit	485.703.000	658.600.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	Unit	81.803.670	44.454.280	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	188.341.600	155.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	1	Rasio	2.391.952.830	2.455.811.110	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya bahan bacaan dan sarana pendukung lainnya yang dibutuhkan	100	Persen	1.055.249.610	1.119.758.060	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.01.0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	3	Layanan	317.207.180	294.769.970	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	5	Perpustakaan	18.198.210	30.807.770	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.01.0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	100	Eksemplar	115.314.600	130.815.800	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5	Perpustakaan	104.170.180	104.986.310	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.01.0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5	Perpustakaan	30.930.400	32.341.350	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60	Orang	46.299.440	42.292.650	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	5	Layanan	25.166.340	25.133.120	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.01.0008	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan	200	Eksemplar	214.684.970	199.179.290	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	100	Eksemplar	119.849.790	145.064.640	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.01.0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12	Dokumen	63.428.500	114.367.160	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka meningkatkan minat membaca masyarakat	100	Persen	1.336.703.220	1.336.053.050	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	15	Lokus	122.560.580	128.069.450	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	5	Perpustakaan	194.095.630	163.420.660	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	5	Orang	926.773.720	949.407.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	5	Perpustakaan	15.081.710	17.054.960	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.02.2.02.0005	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	2	Orang	78.191.580	78.100.980	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Terlindungnya koleksi dan naskah kuno dari kerusakan	100.00	Persen	231.782.360	223.411.769	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Terawatnya koleksi naskah kuno milik daerah Kabupaten/Kota	100	Persen	72.248.200	88.852.639	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.03.2.01.0001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	2	Orang	35.315.500	41.031.800	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.03.2.01.0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	2	Eksemplar	36.932.700	47.820.839	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terolahnya koleksi budaya etnis nusantara	100	Persen	159.534.160	134.559.130	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.03.2.02.0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	2	Eksemplar	152.855.670	121.291.880	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.23.03.2.02.0002	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	2	Eksemplar	6.678.490	13.267.250	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				957.583.435	901.859.907	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Peningkatan sistem dan jaringan informasi kearsipan akan terintegrasi ke dalam sisye pemerin tahan berbasis elektronik	100	Persen	519.019.197	577.335.330	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Arsip arsip yang diarsipkan di depo penyimpanan yang sudah ditangani	100	Persen	165.807.361	188.710.254	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	100	Berkas	27.010.651	44.104.850	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	5000	Berkas	42.149.104	42.149.104	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	31	Laporan	96.647.606	102.456.300	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya arsip atau dokumen dengan baik arsip sesuai strandart yang ditetapkan	100	Persen	136.078.603	146.851.703	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.02.2.02.0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	250	Arsip	46.505.850	57.278.950	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	500	Arsip	89.572.753	89.572.753	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Adanya penarikan atau pendataan, penataan, dan pengelolaan arsip arsip in aktif unit kerja pemerintah kota semarang	100	Persen	217.133.233	241.773.373	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	100	Pengguna	38.846.000	42.875.790	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	31	Laporan	178.287.233	198.897.583	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase jumlah arsip musnah	100.00	Persen	390.045.572	314.037.677	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Pemusnahan arsip -arsip yang memenuhi syarat	100	Persen	67.133.690	67.133.690	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.03.2.01.0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	5000	Arsip	40.220.884	40.220.884	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.03.2.01.0002	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	2500	Berkas	26.912.806	26.912.806	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Persentase arsip yang terselamatkan akibat bencana berdasarkan NSPK	100	Persen	33.346.153	0	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.03.2.02.0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	500	Arsip	13.608.613	0	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.03.2.02.0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	500	Arsip	19.737.540	0	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Presentase arsip yang terselamatkan dari OPD yang digabung/dibubarkan	80	Persen	84.195.970	86.763.704	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	7	Daftar	19.831.900	19.831.900	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.03.2.03.0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	7	Arsip	19.956.280	19.831.900	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.03.2.03.0003	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	100	Arsip	23.300.890	25.304.090	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.03.2.03.0004	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	100	Arsip	21.106.900	21.795.814	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Dokumen atau arsip yang terdigitalisasi	80	Persen	138.853.259	89.107.020	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.03.2.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	250	Arsip	49.746.360	0	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.03.2.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	376	Arsip	89.106.899	89.107.020	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Persentase arsip hilang yang ditemukan kembali berdasarkan NSPK	80	Persen	66.516.500	71.033.263	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.03.2.05.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	500	Arsip	34.160.910	50.036.360	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.03.2.05.0002	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	500	Arsip	15.767.350	20.996.903	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.03.2.05.0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	500	Arsip	16.588.240	0	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	70	Persen	48.518.666	10.486.900	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Persentase usulan pengajuan penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan izin yang diberikan	70	Persen	48.518.666	10.486.900	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	5	SOP	38.031.766	0	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.24.04.2.01.0002	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	250	Arsip	10.486.900	10.486.900	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
3.25.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERIKANAN				12.326.649.576	13.857.560.000	
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				12.326.649.576	13.857.560.000	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Kapasitas SDM Dinas Perikanan	30.00	Orang	7.235.678.248	8.302.560.000	DINAS PERIKANAN
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD di Dinas Perikanan	100.00	Persen			
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD Dinas Perikanan	100.00	Persen			
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perikanan	100.00	Persen			
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen rencana kerja dan rencana anggaran Dinas Perikanan	8.00	Dokumen	54.000.000	55.900.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	30.500.000	31.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	500.000	600.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	500.000	600.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	500.000	600.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	500.000	600.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	21.500.000	22.500.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan Dinas Perikanan	100.00	%	5.682.203.000	6.250.660.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28	Orang/bulan	5.465.453.000	6.000.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	216.000.000	250.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	250.000	220.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan	250.000	220.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	250.000	220.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.05	Administrasi Pepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi pelayanan kepegawaian Dinas Perikanan	4.00	Kegiatan	34.629.600	46.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30	Orang	17.214.800	11.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45	Orang	17.414.800	35.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Perikanan	100.00	%	491.876.000	645.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	35.000.000	40.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	50.000.000	80.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	50.000.000	55.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24	Laporan	40.000.000	45.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	Laporan	245.876.000	275.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3	Dokumen	71.000.000	150.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3.00	Jenis	34.000.000	140.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	Unit	34.000.000	140.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00	%	425.175.828	600.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	200.000.000	220.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Laporan	85.540.000	80.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	139.635.828	300.000.000	DINAS PERIKANAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset Dinas Perikanan	100.00	%	513.793.820	565.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	45.000.000	45.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28	Unit	295.883.820	350.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	Unit	50.000.000	40.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	122.910.000	130.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	3113.69	ton	1.151.000.000	1.255.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah	Rekomendasi BBM untuk Nelayan	20	Kelompok	264.000.000	330.000.000	DINAS PERIKANAN
		Validasi Data Nelayan	1000	Nelayan			
3.25.03.2.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	260	Unit	264.000.000	330.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi tentang penangkapan ikan kepada nelayan	240.00	Orang	500.000.000	550.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	200	Orang	500.000.000	550.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pembinaan bakul dan nelayan TPI untuk peningkatan pengelolaan TPI	50	Orang	387.000.000	375.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	12	Layanan	387.000.000	375.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	3961.33	ton	2.573.752.000	2.800.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pelatihan Budidaya Ikan Dalam Ember	300	Orang	853.400.000	900.000.000	DINAS PERIKANAN
		Pelatihan Kolam Terpal	300	Orang			
		Pelatihan/sosialisasi budidaya ikan air tawar dalam pemberdayaan pembudidaya ikan	200.00	Orang			
		Pembuatan Pakan Ikan	40	Orang			
		Sosialisasi Hama dan Penyakit Ikan	40	Orang			
3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	20	Kelompok	853.400.000	900.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Tersedianya induk ikan	3	jenis	1.720.352.000	1.900.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Unit	986.352.000	1.300.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.04.2.04.0007	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	20	Orang	734.000.000	600.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Penurunan jumlah kasus pelanggaran peraturan perikanan	3	Kasus	350.000.000	400.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Pelatihan POKMASWAS	40.00	Orang	350.000.000	400.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.05.2.01.0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1	Dokumen	350.000.000	400.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1. Produksi ikan olahan	17631.86	ton	1.016.219.328	1.100.000.000	DINAS PERIKANAN
		2. Angka konsumsi ikan per kapita	40.19	Kg/kapita/tahun			
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Sosialisasi informasi usaha pengolahan dan pemasaran	80.00	Orang	273.219.328	300.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.06.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	4	Dokumen	273.219.328	300.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah peserta pelatihan pengolahan ikan	100.00	Orang	468.000.000	500.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	15	Unit Usaha	468.000.000	500.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pembinaan pedagang dalam peningkatan bahan baku ikan	40.00	Orang	275.000.000	300.000.000	DINAS PERIKANAN
3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	17000	Ton	275.000.000	300.000.000	DINAS PERIKANAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
3.27.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERTANIAN				33.590.911.872	38.732.123.000	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				33.590.911.872	38.732.123.000	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Pertanian	100.00	Persen	21.634.118.268	24.421.570.000	DINAS PERTANIAN
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Pertanian	100.00	Persen			
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Pertanian	100.00	Persen			
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan & evaluasi kinerja PD yang dihasilkan	30	dokumen	59.000.000	9.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	Dokumen	34.000.000	5.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22	Laporan	25.000.000	4.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan Keuangan Dinas Pertanian	4	dokumen	15.330.089.000	16.608.629.000	DINAS PERTANIAN
		Persentase Administrasi Keuangan Dinas Pertanian	100	%			
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	91	Orang/bulan	15.103.369.000	16.404.629.000	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	221.720.000	200.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	1.500.000	1.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	Laporan	2.000.000	2.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	1.500.000	1.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelaksanaan administrasi umum	100	%	790.102.151	765.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	60.000.000	40.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	244.500.000	240.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	30.000.000	35.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	9.660.000	10.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan	40.000.000	40.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	181.000.000	200.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8	Dokumen	224.942.151	200.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	%	105.636.876	400.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	21	Unit	33.336.952	300.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9	Unit	72.299.924	100.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100	%	1.623.497.680	1.723.266.000	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	400.000.000	400.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	1.223.497.680	1.323.266.000	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan aset Dinas Pertanian	100	%	3.725.792.561	4.915.675.000	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	39.950.000	40.315.000	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	66	Unit	549.097.726	575.360.000	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	210	Unit	251.744.835	300.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11	Unit	2.885.000.000	4.000.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	50857.23	ton	5.872.993.578	5.406.678.000	DINAS PERTANIAN
		Produksi hasil peternakan	36219.00	ton			
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah kelompok tani yang diawasi penggunaan sarana pertaniannya	30	kelompok	2.871.773.577	2.240.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	35	Laporan	555.527.200	990.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	64	Laporan	2.316.246.377	1.250.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kebun dinas yang produktif	68.75	%	2.595.298.801	2.566.678.000	DINAS PERTANIAN
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	6	Dokumen	2.595.298.801	2.566.678.000	DINAS PERTANIAN
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peternak yang memberikan ternak pakan tambahan	50	%	160.000.000	350.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	5	Laporan	160.000.000	350.000.000	DINAS PERTANIAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah ternak yang disebarakan untuk pengembangan populasi ternak	130	ekor	245.921.200	250.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	130	Ekor	245.921.200	250.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktivitas pertanian per ha per tahun	6.8	ton/ha	4.440.812.257	6.678.875.000	DINAS PERTANIAN
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/direhab	19	unit	4.440.812.257	6.678.875.000	DINAS PERTANIAN
3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1	Unit	140.000.000	500.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	15	Unit	3.741.813.322	5.378.875.000	DINAS PERTANIAN
3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	3	Unit	558.998.935	800.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-5.00	Persen	400.000.000	750.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah area/daerah yang ada kasus penyakit hewan menular	25	kelurahan	295.000.000	600.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	14	Laporan	295.000.000	600.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase bahan asal hewan dan produk asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis kesmavet	98	%	105.000.000	150.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	25	Laporan	105.000.000	150.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan	90.00	Persen	158.500.000	350.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok yg difasilitasi pengendalian & penanggulangan bencana pertanian terkait serangan OPT dan dampak perubahan iklim	10	kelompok	158.500.000	350.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	100	Ha	96.500.000	200.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	400	Ha	62.000.000	150.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelompok tani yang berada pada kelas madya dan utama	31.00	kelompok	1.084.487.769	1.125.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian	50	%	1.084.487.769	1.125.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10	Unit	395.114.000	300.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	25	Unit	631.451.569	750.000.000	DINAS PERTANIAN
3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	5	Unit	57.922.200	75.000.000	DINAS PERTANIAN
3.30.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERDAGANGAN				53.678.501.038	152.174.099.000	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				53.678.501.038	152.174.099.000	
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00	Persen	34.969.046.376	45.954.777.000	DINAS PERDAGANGAN
		Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00	Persen			
		Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100	Persen			
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	8	dokumen	63.976.800	32.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	31.993.600	8.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	Dokumen	5.491.600	12.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan	26.491.600	12.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kinerja administrasi pelaporan dan keuangan	100	persen	23.763.484.200	33.404.777.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	214	Orang/bulan	23.348.748.000	32.908.777.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	409.680.000	484.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1.685.400	4.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan	1.685.400	4.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	1.685.400	4.000.000	DINAS PERDAGANGAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase ketersediaan sarana prasarana perkantoran OPD	100	persen	1.247.251.694	2.225.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	10.000.000	10.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	107.251.694	500.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6	Paket	30.000.000	30.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	200.000.000	200.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	350.000.000	800.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan	200.000.000	185.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	350.000.000	500.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100	persen	243.243.682	100.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	Unit	243.243.682	100.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ketersediaan kebutuhan jasa kantor	100	persen	8.471.400.000	8.907.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	7.371.400.000	8.000.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	1.100.000.000	907.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	pemeliharaan sarana prasarana kantor	100	persen	1.179.690.000	1.286.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50	Unit	580.960.000	721.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50	Unit	20.000.000	16.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13	Unit	320.000.000	316.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	258.730.000	233.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelayanan pengurusan perizinan tepat waktu	100.00	Persen	186.156.000	200.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Prosentase pengurusan izin pedagang pasar dan PKL yang terlayani	100	persen	186.156.000	200.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.02.2.01.0001	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1800	Dokumen	186.156.000	200.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	22	pasar	15.129.797.000	102.550.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana prasarana perdagangan yang diperbaiki	24	pasar	8.908.106.000	96.500.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	50	Unit	1.803.906.000	89.000.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	50	Unit	7.104.200.000	7.500.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	jumlah sarana prasarana perdagangan yang terkendali, aman, tertib	52	pasar	6.221.691.000	6.050.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12	Dokumen	3.829.636.000	3.178.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12	Dokumen	2.392.055.000	2.872.000.000	DINAS PERDAGANGAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	3.99	Persen	338.078.500	150.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga	100	persen	338.078.500	150.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12	Laporan	338.078.500	150.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor non migas	1615736908.00	US\$	913.210.000	800.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	30	persen	913.210.000	800.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	10	Pelaku Usaha	450.000.000	800.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	10	Produk	463.210.000	0	DINAS PERDAGANGAN
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	81	Persen	1.003.378.162	1.219.322.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	81	persen	1.003.378.162	1.219.322.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1800	Unit	523.082.000	644.322.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	1	Orang	480.296.162	575.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Prosentase UMKM yang mendapat fasilitas promosi	30	Persen	1.138.835.000	1.300.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang mendapat fasilitas promosi	100	orang	1.138.835.000	1.300.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	30	UMKM	580.000.000	1.000.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	30	UMKM	558.835.000	300.000.000	DINAS PERDAGANGAN
3.31.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERINDUSTRIAN				16.144.548.213	30.128.736.726	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				16.144.548.213	30.128.736.726	
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Perindustrian	100.00	Persen	9.818.184.428	19.578.409.156	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di Hasilkan _ Dinas Perindustrian	9	Dokumen	66.651.370	33.040.180	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	31.356.200	4.712.400	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1.797.400	3.594.800	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	2.796.900	5.593.800	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	2.363.680	4.727.360	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	2.845.590	5.691.180	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Laporan	25.491.600	8.720.640	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Administrasi dan Pelaporan Keuangan Kantor Dinas Perindustrian	100	Persen	6.637.274.488	13.340.868.976	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35	Orang/bulan	6.393.277.000	12.786.554.000	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	233.400.000	533.120.000	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	Dokumen	7.722.128	15.444.256	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1.090.080	2.180.160	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	1.090.080	2.180.160	DINAS PERINDUSTRIAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
3.31.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	695.200	1.390.400	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Persentase Tersosialisasinya Perundang-undangan Dinas Perindustrian	100.00	Persen	110.000.000	220.100.000	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70	Orang	110.000.000	220.100.000	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Dinas Perindustrian	100	Persen	733.745.461	1.614.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16	Paket	27.000.000	54.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	23	Paket	40.000.000	80.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	68	Paket	125.000.000	250.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13	Paket	55.000.000	110.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	50.000.000	100.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	Laporan	182.545.461	500.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	Dokumen	254.200.000	520.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Perindustrian	100	Persen	168.862.709	300.000	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Unit	7.400.000	100.000	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	60.553.630	100.000	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	100.909.079	100.000	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Dinas Perindustrian	100	Persen	1.759.630.400	3.736.600.000	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	507.200.000	1.014.400.000	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7	Laporan	54.000.000	108.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	1.198.430.400	2.614.200.000	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset Dinas Perindustrian	100	Persen	342.020.000	633.500.000	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	39.950.000	72.800.000	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19	Unit	286.820.000	530.200.000	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	71	Unit	5.200.000	10.400.000	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	10.000.000	20.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	50.000	100.000	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertambahan Jumlah Sentra IKM	88.00	Persen	5.730.098.511	9.357.797.022	DINAS PERINDUSTRIAN
		Persentase Pertambahan IKM	0.50	Persen			
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Pertambahan IKM	20	IKM	5.730.098.511	9.357.797.022	DINAS PERINDUSTRIAN
		Jumlah Pertambahan Sentra IKM	1	Sentra IKM			
3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1	Dokumen	100.000.000	200.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	2	Dokumen	518.230.000	1.036.460.000	DINAS PERINDUSTRIAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	19	Dokumen	2.093.987.889	2.027.975.778	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	6	Dokumen	387.500.000	775.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3	Dokumen	2.304.000.000	4.665.600.000	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1	Dokumen	326.380.622	652.761.244	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif	4.00	Persen	258.000.000	516.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif	15	IKM	258.000.000	516.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	2	Dokumen	18.000.000	36.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	2	Dokumen	240.000.000	480.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya Data Informasi Industri	0.50	Persen	338.265.274	676.530.548	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	4	Persen	338.265.274	676.530.548	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	3	Dokumen	221.337.274	442.674.548	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	3	Dokumen	98.928.000	197.856.000	DINAS PERINDUSTRIAN
3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1	Dokumen	18.000.000	36.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN
4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH				205.902.531.465	223.348.478.991	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				205.902.531.465	223.348.478.991	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100	%	143.287.510.532	157.923.978.451	SEKRETARIAT DAERAH
		Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan elektronik	100	%			
		OPD yang melakukan Survei Kepuasan Masyarakat	43	OPD			
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Bagian Tata Usaha	100	%			
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Bagian Tata Usaha	100	%			
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran Bagian Tata Usaha	100	%			
		Peningkatan kemampuan ASN Bagian Tata Usaha	100	%			
		Prosentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	5	dokumen			
		Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	%			
		Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	100	%			
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Setda Kota Semarang yang lebih baik	100	Persen	58.026.250	33.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
		Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100	Persen			
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	43.689.850	20.000.000	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	3.658.900	3.500.000	BAGIAN KEUANGAN
4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	4.258.900	4.000.000	BAGIAN KEUANGAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	2.969.300	2.500.000	BAGIAN KEUANGAN
4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	3.449.300	3.000.000	BAGIAN KEUANGAN
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Setda yang lebih baik	100	%	37.944.761.400	39.210.619.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	240	Orang/bulan	37.051.610.000	38.300.619.000	BAGIAN KEUANGAN
4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	889.680.000	900.000.000	BAGIAN KEUANGAN
4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	785.800	7.000.000	BAGIAN KEUANGAN
4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	2.685.600	3.000.000	BAGIAN KEUANGAN
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan BMD	5	dokumen	1.655.545.298	1.040.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	Dokumen	83.545.298	60.000.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	Laporan	1.572.000.000	980.000.000	BAGIAN KEUANGAN
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Setda yang lebih baik	100	Persen	193.016.194	6.026.800.000	SEKRETARIAT DAERAH
		Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen			
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3	Paket	149.276.324	6.000.000.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100	Orang	43.739.870	26.800.000	BAGIAN KEUANGAN
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Setda yang lebih baik	100	Persen	32.410.946.043	33.049.757.951	SEKRETARIAT DAERAH
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran perangkat daerah	100	Persen			
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	900.151.541	1.300.000.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	705.466.151	1.000.000.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	748.404.859	700.000.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	9.526.550.000	9.526.550.000	BAGIAN TATA USAHA
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14	Laporan	19.309.585.551	19.323.207.951	BAGIAN TATA USAHA
4.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	Dokumen	1.220.787.941	1.200.000.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran perangkat daerah	100	Persen	1.471.232.890	4.750.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	Unit	347.707.000	3.000.000.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	66	Unit	211.332.487	350.000.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	59	Unit	912.193.403	1.400.000.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	Persen	13.219.841.133	13.578.636.500	SEKRETARIAT DAERAH
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen			
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	163.215.000	179.536.500	BAGIAN TATA USAHA
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	Laporan	9.403.219.632	9.000.000.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	1.755.100.000	1.755.100.000	BAGIAN TATA USAHA
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	Laporan	1.130.999.501	1.800.000.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	767.307.000	844.000.000	BAGIAN TATA USAHA

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	Persen	23.682.274.716	23.766.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	Unit	167.432.400	170.000.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	221	Unit	3.312.732.708	3.315.000.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1500	Unit	121.078.800	125.000.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14	Unit	16.167.000.000	16.000.000.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	740	Unit	2.834.363.768	2.889.000.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	910	Unit	1.079.667.040	1.267.000.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Operasional KDH dan WKDH	100	Persen	4.908.613.800	4.859.484.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Orang/Bulan	239.313.000	190.520.000	BAGIAN KEUANGAN
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	24	Paket	850.336.800	850.000.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Orang/Bulan	3.818.964.000	3.818.964.000	BAGIAN TATA USAHA
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Fasilitasi Rumah Tangga KDH dan WKDH	100	Persen	2.638.600.000	3.955.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	10	Paket	2.575.000.000	2.575.000.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1	Paket	63.600.000	1.380.000.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	88.35	Indeks	3.566.717.036	4.090.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
		Peningkatan Kualitas Laporan Kinerja OPD	50	Persen			
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1	Dokumen	283.773.876	350.000.000	BAGIAN ORGANISASI
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1	Laporan	2.409.928.150	2.800.000.000	BAGIAN ORGANISASI
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1	Dokumen	446.093.810	490.000.000	BAGIAN ORGANISASI
4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	20	Dokumen	426.921.200	450.000.000	BAGIAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Prosentase kegiatan keprotokol dan publikasi kebijakan serta kegiatan pimpinan daerah	100	Persen	21.537.935.772	23.564.681.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokol	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokol	12	Laporan	1.502.518.575	1.603.815.000	BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN PROTOKOL
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12	Laporan	12.715.340.674	13.923.706.000	BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN PROTOKOL
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12	Laporan	7.320.076.523	8.037.160.000	BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN PROTOKOL

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan	9.00	kegiatan	54.118.978.893	58.005.601.000	SEKRETARIAT DAERAH
		Fasilitasi, Kerjasama serta Hubungan Antar Lembaga, Pemerintah Kota Semarang dan Kepala Daerah	60.00	Persen			
		Indek Pelayanan Publik	123.00	Persen			
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Wilayah	100.00	Persen			
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Fasilitasi Partisipasi Masyarakat di Kota Semarang	100	Persen	2.675.832.280	3.080.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
		Terlaksananya Administrasi Pemerintahan Umum di Wilayah	100	Persen			
		Tertib Administrasi Pemerintahan di Wilayah	100	Persen			
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2	Dokumen	478.049.266	550.000.000	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2	Dokumen	631.049.466	650.000.000	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	6	Dokumen	1.476.733.548	1.750.000.000	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	15	Dokumen	90.000.000	130.000.000	BAGIAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksananya kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan	9	Kegiatan	38.837.965.862	37.500.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	13	Dokumen	32.151.500.000	29.500.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	11	Dokumen	6.022.087.162	6.750.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	7	Dokumen	664.378.700	1.250.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Tercapainya Penyusunan Produk Hukum Daerah, Terwujudnya Kota Ramah HAM dan Peduli HAM serta terpenuhinya Pendokumentasian Produk Hukum Daerah	100	Persen	4.850.440.068	7.525.601.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	565	Dokumen	392.496.387	2.939.200.200	BAGIAN HUKUM
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	55	Kasus	2.167.170.411	2.943.200.400	BAGIAN HUKUM
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	1000	Dokumen	2.290.773.270	1.643.200.400	BAGIAN HUKUM
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Peningkatan Kesepakatan MoU Pemerintah Kota Semarang	100	Persen	7.754.740.683	9.900.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	10	Dokumen	1.842.760.146	1.900.000.000	BAGIAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH
4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	5	Dokumen	5.911.980.537	8.000.000.000	BAGIAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa	100.00	persen	8.496.042.040	7.418.899.540	SEKRETARIAT DAERAH
		Prosentase peningkatan koordinasi perekonomian berbasis potensi unggulan lokal daerah	100.00	persen			
		Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa	100.00	persen			
		Tersedianya pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD	1	dokumen			
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Laporan Penyusunan kebijakan dan pengkoordinasi pelaksanaan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan lokal guna menunjang pertumbuhan perekonomian daerah	100	Persen	4.745.320.418	3.024.949.540	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	12	Dokumen	576.191.197	579.249.861	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12	Laporan	641.100.838	445.699.679	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	12	Dokumen	3.528.028.383	2.000.000.000	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Laporan hasil koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan secara periodik	100	Persen	909.428.150	1.100.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
		Pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD	1	Dokumen			
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1	Dokumen	163.862.860	250.000.000	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12	Laporan	584.232.740	625.000.000	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12	Laporan	161.332.550	225.000.000	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi koordinasi, evaluasi, pengelolaan dan pengadaan barang dan jasa	100	Persen	2.349.943.772	2.798.950.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12	Dokumen	1.399.684.940	1.753.950.000	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12	Dokumen	450.388.832	495.000.000	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	220	Orang	499.870.000	550.000.000	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	koordinasi, pemantauandan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan di bidang cukai	100	persen	491.349.700	495.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	5	Dokumen	491.349.700	495.000.000	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD				130.605.074.955	130.604.074.955	
4.02	SEKRETARIAT DPRD				130.605.074.955	130.604.074.955	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00	Persen	69.674.229.266	69.653.229.266	SEKRETARIAT DPRD
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100.00	Persen			
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100	Persen			
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100	Persen			
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertib penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan	12	bulan	82.424.800	86.424.800	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	39.063.200	39.063.200	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	3.033.800	3.033.800	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	3.033.800	3.033.800	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	8.316.600	8.316.600	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	3.033.800	3.033.800	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	3.033.800	3.033.800	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	22.909.800	26.909.800	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib penyusunan dokumen administrasi keuangan	100	%	7.559.354.210	7.559.354.210	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47	Orang/bulan	7.193.879.000	7.193.879.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	363.095.610	363.095.610	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1.055.000	1.055.000	SEKRETARIAT DPRD

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6	Laporan	1.324.600	1.324.600	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terlindungi	11	buah	70.000.000	70.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	7	Dokumen	70.000.000	70.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	50	orang	702.000.000	702.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	47	Orang	702.000.000	702.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100	%	5.461.509.145	5.436.509.145	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	Paket	75.000.000	50.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7	Paket	397.327.845	397.327.845	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	473.413.980	473.413.980	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6	Paket	373.222.280	373.222.280	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	310.814.800	310.814.800	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan	2.640.092.240	2.640.092.240	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	1.191.638.000	1.191.638.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran sarana dan prasarana aparatur	100	%	3.908.346.270	3.908.346.270	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4	Unit	2.899.836.689	2.899.836.689	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	55	Unit	620.800.902	620.800.902	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25	Unit	387.708.679	387.708.679	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran sarana dan prasarana aparatur	12	bulan	2.646.856.105	2.646.856.105	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	22.477.693	22.477.693	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	167.162.256	167.162.256	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	2.457.216.156	2.457.216.156	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100	%	2.206.407.760	2.206.407.760	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52	Unit	1.063.500.000	1.063.500.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	248	Unit	340.014.560	340.014.560	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	561.044.000	561.044.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	Unit	241.849.200	241.849.200	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tertib penyusunan dokumen administrasi keuangan DPRD	100	%	45.148.830.976	45.148.830.976	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50	Orang/Bulan	44.072.107.000	44.072.107.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	6	Paket	1.076.723.976	1.076.723.976	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Cakupan pelayanan administrasi DPRD	100	%	1.888.500.000	1.888.500.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	4	Paket	1.888.500.000	1.888.500.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD	17,00	dokumen	60.930.845.689	60.950.845.689	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Raperda yang diusulkan	18	Perda	13.136.600.600	13.136.600.600	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	17	Dokumen	13.136.600.600	13.136.600.600	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Prosentase peningkatan kapasitas DPRD	100	%	15.324.918.118	15.324.918.118	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	10	Orang	11.773.097.600	11.773.097.600	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12	Dokumen	2.675.575.300	2.675.575.300	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	6	Dokumen	876.245.218	876.245.218	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terserapnya aspirasi masyarakat	100	%	7.401.957.648	7.401.957.648	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	50	Dokumen	7.401.957.648	7.401.957.648	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	100	%	25.067.369.323	25.087.369.323	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12	Dokumen	22.022.793.955	22.022.793.955	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12	Dokumen	3.064.575.368	3.064.575.368	SEKRETARIAT DPRD

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				33.879.982.079	37.124.112.733	
5.01	PERENCANAAN				29.379.982.079	32.174.112.733	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100.00	Persen	14.831.182.079	16.284.432.733	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	100.00	Persen			
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00	Persen			
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00	Persen			
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Bappeda yang dihasilkan	12	Dokumen	131.100.000	134.920.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	59.300.000	59.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	7.000.000	7.700.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	8.200.000	8.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	5.200.000	5.720.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	6.200.000	6.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	45.200.000	47.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Bappeda	4	Dokumen	11.215.597.000	12.338.354.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Persentase Administrasi Keuangan Bappeda	100	Persen			
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66	Orang/bulan	10.869.677.000	11.956.654.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	343.800.000	378.180.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	600.000	660.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	Laporan	920.000	2.200.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
5.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	600.000	660.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Bappeda yang Berjalan Baik	3	Kegiatan	172.000.000	172.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	66	Orang	172.000.000	172.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100	Persen	2.294.725.079	2.519.665.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11	Paket	148.170.000	162.965.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	Paket	100.000.000	110.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18	Paket	90.000.000	99.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8	Paket	49.555.079	50.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	Laporan	85.000.000	93.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Laporan	819.000.000	900.900.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	1.003.000.000	1.103.300.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100	Persen	301.310.000	331.441.413	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	Laporan	12.360.000	13.596.413	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Laporan	288.950.000	317.845.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset Bappeda	100	Persen	716.450.000	788.052.320	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	80.000.000	88.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29	Unit	401.450.000	441.552.320	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	235.000.000	258.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Tataran Kota	100.00	Persen	4.450.000.000	4.781.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	100	Persen	3.200.000.000	3.465.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1	Berita Acara	300.000.000	275.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1	Berita Acara	100.000.000	110.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2	Berita Acara	650.000.000	715.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	800	Usulan	200.000.000	220.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	6	Dokumen	1.950.000.000	2.145.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase analisis data dan informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100	Persen	215.000.000	231.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1	Dokumen	110.000.000	121.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1	Buku	105.000.000	110.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah secara berkala	100	Persen	1.035.000.000	1.085.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2	Laporan	685.000.000	700.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5	Laporan	350.000.000	385.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	100.00	Persen	10.098.800.000	11.108.680.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100.00	Persen			
		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100.00	Persen			
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	Persen	2.320.000.000	2.552.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3	Dokumen	400.000.000	440.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1	Laporan	20.000.000	22.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8	Dokumen	1.100.000.000	1.210.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5	Laporan	800.000.000	880.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100	Persen	2.528.800.000	2.781.680.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	7	Dokumen	900.000.000	990.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1	Laporan	500.000.000	550.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	7	Dokumen	1.100.000.000	1.210.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1	Laporan	28.800.000	31.680.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	Persen	5.250.000.000	5.775.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4	Dokumen	2.450.000.000	2.695.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5	Laporan	550.000.000	605.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3	Dokumen	1.520.000.000	1.672.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2	Laporan	730.000.000	803.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				4.500.000.000	4.950.000.000	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase inovasi dan hasil kelitbangan yang diimplementasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	100.00	Persen	4.500.000.000	4.950.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100	Persen	300.000.000	330.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	4	Laporan	300.000.000	330.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan	100	Persen	800.000.000	880.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	10	Dokumen	800.000.000	880.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	100	Persen	1.900.000.000	2.090.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	10	Dokumen	950.000.000	1.045.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.05.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	10	Dokumen	950.000.000	1.045.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase fasilitasi dan koordinasi pengembangan inovasi dan teknologi	100	Persen	1.500.000.000	1.650.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1	Dokumen	800.000.000	880.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	2	Laporan	200.000.000	220.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1	Laporan	400.000.000	440.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1	Laporan	100.000.000	110.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				235.283.816.864	196.885.560.000	
5.02	KEUANGAN				235.283.816.864	196.885.560.000	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100.00	Persen	121.772.316.538	105.467.889.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	100.00	Persen			
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00	Persen			
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00	Persen			
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	8	dokumen	80.474.196	194.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen	56.433.796	65.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	4.520.900	18.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	5.270.900	25.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	5.382.900	25.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	5.270.900	26.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	3.594.800	35.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan BPKAD	100	persen	12.780.221.200	14.663.117.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81	Orang/bulan	12.314.924.000	13.846.117.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	464.400.000	810.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	448.600	3.500.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	448.600	3.500.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi pelayanan kepegawaian BPKAD	100	persen	100.451.560	687.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50	Orang	100.451.560	687.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran BPKAD	100	persen	2.569.312.261	3.230.216.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Paket	11.052.847	56.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket	928.994.766	358.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	Paket	42.656.813	68.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	Paket	94.996.867	91.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	23.414.517	17.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	2.986.211	45.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	66.253.880	222.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	659.402.800	1.600.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	14.985.000	57.881.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	Dokumen	724.568.560	715.335.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor BPKAD	100	persen	463.565.955	410.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	230	Unit	463.565.955	410.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor BPKAD	100	persen	104.775.694.647	84.601.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	Laporan	200.000	1.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	104.126.102.647	84.000.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	649.392.000	600.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset BPKAD	100	persen	1.002.596.719	1.682.556.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	39.910.050	46.041.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37	Unit	405.034.560	751.515.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50	Unit	4.035.960	80.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	16	Unit	42.359.099	55.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	416.697.359	400.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	Unit	94.559.691	350.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase realisasi dana transfer terhadap target dana transfer	100	%	109.943.877.102	83.805.971.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Persentase SILPA Terhadap APBD	1.02	Persen			
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	100	persen	3.617.292.344	12.259.317.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	Dokumen	192.176.774	0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2	Dokumen	173.882.641	800.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	51	Dokumen	57.124.455	800.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	51	Dokumen	61.150.803	600.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	51	Dokumen	26.601.834	700.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	51	Dokumen	3.475.207	700.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	Dokumen	617.203.129	800.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	Dokumen	476.188.789	800.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	12	Dokumen	1.563.008.487	900.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2	Dokumen	61.573.880	4.959.317.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2	Dokumen	82.796.382	50.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2	Dokumen	50.314.436	50.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	200	Orang	251.795.527	1.100.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penyerapan Anggaran	100	persen	1.994.754.000	8.533.121.399	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	754	Dokumen	394.328.000	800.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	408	Dokumen	313.897.000	800.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1	Dokumen	124.762.000	900.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	6	Dokumen	215.897.000	333.121.399	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	48641	Dokumen	155.612.000	1.000.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2	Laporan	183.836.000	1.000.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	17	Dokumen	160.296.000	1.200.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	14	Dokumen	144.254.000	1.200.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1200	Orang	301.872.000	1.300.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase OPD menyusun LK tepat waktu	100	persen	2.348.070.000	10.160.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	612	Laporan	46.300.000	700.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	12	Dokumen	171.900.000	800.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12	Laporan	318.750.000	1.000.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12	Laporan	404.500.000	800.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4	Dokumen	338.300.000	700.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3	Dokumen	24.800.000	800.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	6	Dokumen	116.150.000	900.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1	Dokumen	84.500.000	800.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1	Dokumen	268.270.000	900.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1	Dokumen	251.650.000	800.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	250	Orang	142.100.000	1.200.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	39	Lembaga	180.850.000	760.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase proses penyaluran bantuan Pemerintah Kota yang lancar	100	persen	101.983.760.758	52.853.532.601	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1	Laporan	20.771.660	26.532.601	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12	Laporan	101.962.989.098	52.827.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Legalitas Aset	90.24	Persen	3.567.623.224	7.611.700.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Managemen Aset	100	persen	3.567.623.224	7.611.700.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1	Dokumen	208.181.623	274.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2	Dokumen	55.791.462	138.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2	Dokumen	120.121.919	303.800.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	4	Laporan	394.000.000	461.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	4	Laporan	268.366.712	178.400.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	10	Laporan	1.332.909.269	4.600.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	4	Laporan	661.239.889	727.500.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	4	Laporan	75.946.030	168.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	12	Dokumen	350.880.808	400.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	150	Orang	100.185.512	361.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH				102.861.224.245	113.183.981.961	
5.02	KEUANGAN				102.861.224.245	113.183.981.961	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD-Bapenda	100.00	Persen	75.949.504.140	83.581.109.846	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN-Bapenda	100.00	Persen			
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD-Bapenda	100	Persen			
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD-Bapenda	100	Persen			
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8	Dokumen	105.529.500	121.082.450	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	48.526.124	53.977.610	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	6.163.400	6.779.740	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	6.163.400	6.779.740	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	6.628.200	7.291.020	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	6.417.300	7.059.030	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	31.631.076	39.195.310	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan SKPD	100	Persen	64.504.780.120	70.955.258.132	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	116	Orang/bulan	63.404.247.000	69.744.671.700	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	76	Dokumen	1.099.794.520	1.209.773.972	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	246.200	270.820	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	Laporan	246.200	270.820	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	246.200	270.820	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pendapatan SKPD	100	Persen	214.095.410	235.504.951	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1	Laporan	179.659.510	197.625.461	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Dokumen	34.435.900	37.879.490	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pelayanan Kepegawaian	100	Persen	710.968.435	782.065.279	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	243.788.435	268.167.279	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	46	Orang	467.180.000	513.898.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian pelaksanaan administrasi umum	100	Persen	2.400.563.687	2.672.076.247	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	Paket	74.136.240	81.549.864	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	45	Paket	100.749.370	110.824.307	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	90	Paket	160.324.477	176.356.925	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	25	Paket	265.653.000	292.218.300	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	Dokumen	12.500.000	13.750.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	72	Laporan	62.500.000	68.750.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	Laporan	774.210.750	851.631.825	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	136.368.495	181.461.535	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	70	Dokumen	814.121.355	895.533.491	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	Persen	2.813.796.610	3.095.176.271	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	608.531.170	669.384.287	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	Unit	754.671.923	830.139.115	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	Unit	1.445.549.367	1.590.104.304	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1	Unit	5.044.150	5.548.565	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100	Persen	2.944.032.568	3.238.234.925	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	120.000.000	132.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	676.685.440	744.353.084	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	168	Laporan	61.619.385	67.581.324	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	Laporan	2.085.727.743	2.294.300.517	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Aset SKPD	100	Persen	2.255.737.810	2.481.711.591	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	35.955.000	39.950.500	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	131	Unit	1.025.298.000	1.127.827.800	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	150	Unit	16.628.155	18.290.971	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	520	Unit	624.658.772	687.124.649	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	42	Unit	28.567.260	31.423.986	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	524.630.623	577.093.685	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10	Persen	26.911.720.105	29.602.872.115	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10	Persen	26.911.720.105	29.602.872.115	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	8	Dokumen	709.775.494	780.753.043	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	8	Laporan	1.254.139.532	1.379.533.485	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	10	Laporan	5.662.398.182	6.228.638.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12	Laporan	3.252.631.082	3.577.894.190	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	86000	Obyek Pajak	157.588.880	173.347.768	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12	Dokumen	5.144.590.334	5.659.049.367	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12	Layanan	3.343.159.255	3.677.475.181	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	10	Dokumen	537.935.816	591.729.398	BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12	Dokumen	5.857.940.620	6.443.734.682	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12	Dokumen	167.673.460	184.440.806	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	10	Dokumen	443.605.260	487.965.786	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	3	Laporan	380.282.190	418.310.409	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				33.683.275.137	40.852.673.606	
5.03	KEPEGAWAIAN				27.193.280.467	21.206.433.379	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kesesuaian dan ketepatan waktu penyajian dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan serta evaluasi kinerja perangkat daerah	100	Persen	18.326.575.631	20.152.830.000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Persentase peningkatan kemampuan ASN BKPP	100	Persen			
		Persentase ketersediaan sarana prasarana kantor yang berfungsi baik	100	Persen			
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP BKPP	82	Nilai	71.954.800	31.681.268	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	30.412.600	6.053.300	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	3.230.500	7.745.300	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	4.866.100	7.598.300	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	3.919.100	1.299.000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	5.270.900	2.598.100	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan	24.255.600	6.387.268	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yang berjalan baik	5	Kegiatan	12.944.011.600	14.427.042.600	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84	Orang/bulan	12.614.317.000	14.019.808.400	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	327.000.000	393.113.000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	673.400	5.639.300	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6	Laporan	785.800	4.358.000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	1.235.400	4.123.900	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang berjalan baik	1	Kegiatan	161.441.900	35.664.800	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	115	Orang	161.441.900	35.664.800	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah yang berjalan baik	8	Kegiatan	1.405.098.791	1.606.492.728	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	59.604.769	57.732.600	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	183.485.709	254.348.800	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	124.627.748	171.255.428	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	98.110.236	267.278.600	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	995.404	2.482.500	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	134.500.000	20.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	464.686.600	300.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	339.088.325	533.394.800	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berjalan baik	1	Kegiatan	224.333.144	498.518.204	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	Unit	224.333.144	498.518.204	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	3	Kegiatan	2.164.656.619	1.700.592.500	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	579.195.750	511.392.500	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	348.347.527	300.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	1.237.113.342	889.200.000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	4	Kegiatan	1.355.078.777	1.852.837.900	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	44.344.500	150.003.900	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33	Unit	562.834.580	532.294.000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	300	Unit	72.647.280	86.205.400	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	675.252.417	1.084.334.600	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah / dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	258.36	Persen	8.866.704.836	1.053.603.379	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Persentase keterisian jabatan JPT Pratama, administrasi, dan fungsional sesuai kualifikasi	100.00	Persen			
		Prosentase akurasi data kepegawaian	99.00	Persen			
		Persentase ASN yang tidak mendapatkan hukuman disiplin	99.00	Persen			
		Persentase ASN yang berkinerja baik sampai dengan sangat baik	81.50	Persen			
		Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	20.98	Persen			
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN yang berjalan baik	5	Kegiatan	2.505.245.184	798.717.897	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	3	Dokumen	57.418.049	30.245.276	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1	Dokumen	1.612.812.306	603.367.476	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	753	Dokumen	422.955.046	120.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2	Dokumen	197.105.563	40.105.145	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	9000	Dokumen	214.954.220	5.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah kegiatan mutasi dan promosi ASN yang berjalan baik	3	Kegiatan	2.181.906.700	35.096.201	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	350	Dokumen	556.698.900	7.596.201	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1300	Dokumen	363.160.800	10.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	300	Dokumen	1.262.047.000	17.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi ASN yang berjalan baik	4	Kegiatan	2.522.219.565	175.433.660	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	500	Orang	909.531.097	134.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	30	Orang	1.272.817.170	11.433.660	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	300	Orang	234.991.598	10.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	300	Orang	104.879.700	20.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur yang berjalan baik	5	Kegiatan	1.657.333.387	44.355.621	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	Dokumen	300.156.100	15.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	300	Orang	943.538.347	14.400.000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	900	Orang	299.747.580	9.150.897	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	12	Laporan	98.751.680	1.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	25	Dokumen	15.139.680	4.304.724	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				6.489.994.670	19.646.240.227	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat (struktural, teknis, fungsional), seminar, kursus dan sejenisnya	45	Persen	6.489.994.670	19.646.240.227	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi teknis yang berjalan baik	4	Kegiatan	1.989.994.670	18.301.274.227	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.04.02.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1	Dokumen	91.000.000	50.019.000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.04.02.2.01.0002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	3	Dokumen	308.494.670	91.976.600	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	306	Orang	1.400.000.000	18.102.357.027	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.04.02.2.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1	Dokumen	190.500.000	56.921.600	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah kegiatan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional yang berjalan baik	1	Kegiatan	4.500.000.000	1.344.966.000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	8	Laporan	4.500.000.000	1.344.966.000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT				27.561.067.642	31.439.693.840	
6.01	INSPEKTORAT DAERAH				27.561.067.642	31.439.693.840	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100.00	Persen	19.044.688.174	21.486.131.800	INSPEKTORAT
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	100.00	Persen			
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00	Persen			
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00	Persen			
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan (Inspektorat)	15	Dokumen	78.651.546	50.000.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	42.318.050	15.000.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	3.682.099	10.000.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	3.877.299	10.000.000	INSPEKTORAT

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	3.337.299	5.000.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	3.877.299	5.000.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	21.559.500	5.000.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD (Inspektorat)	14	Dokumen	13.013.345.512	15.311.000.000	INSPEKTORAT
		Persentase administrasi keuangan SKPD 100% (Inspektorat)	100	%			
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72	Orang/bulan	12.707.540.000	15.000.000.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	298.860.000	300.000.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	Dokumen	4.857.600	5.000.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1.530.912	5.000.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	Dokumen	557.000	1.000.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Diklat dan Bimtek peningkatan kemampuan ASN (Inspektorat)	100	%	1.952.326.000	3.000.000.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	66	Orang	1.179.746.000	2.000.000.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	300	Orang	772.580.000	1.000.000.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum (Inspektorat)	100	%	2.488.948.945	2.034.631.800	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	166.870.441	200.000.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	97.575.473	100.000.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6	Paket	145.269.465	200.000.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20	Dokumen	4.977.018	10.000.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	100	Laporan	151.950.000	200.000.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300	Laporan	876.839.000	964.631.800	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	Dokumen	264.156.238	110.000.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	30	Dokumen	781.311.310	250.000.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya fasilitas kedinasan, serta Peralatan dan Perlengkapan kantor (Inspektorat)	100	%	827.763.321	450.000.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4	Unit	169.819.134	200.000.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10	Unit	657.944.187	250.000.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor (Inspektorat)	100	%	10.140.000	15.000.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	10.140.000	15.000.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD (Inspektorat)	100	%	673.512.850	625.500.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	36.305.000	40.000.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36	Unit	444.030.000	500.000.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	140	Unit	10.530.800	10.000.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	125	Unit	94.950.280	50.000.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	45	Unit	87.696.770	25.500.000	INSPEKTORAT
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tingkat Leveling Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3.00	Leveling	3.797.522.358	4.569.350.000	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Terselenggarakannya Pengawasan Internal	100	%	3.227.518.158	3.919.350.000	INSPEKTORAT
		Persentase Tindak Lanjut Temuan	88.00	%			
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	48	Laporan	385.000.000	423.500.000	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	100	Laporan	723.500.000	795.850.000	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2	Laporan	498.778.300	600.000.000	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1	Laporan	79.090.000	100.000.000	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	15	Kesepakatan	1.122.612.649	1.500.000.000	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	100	Dokumen	418.537.209	500.000.000	INSPEKTORAT

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakannya pengawasan dengan tujuan tertentu	100	%	570.004.200	650.000.000	INSPEKTORAT
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2	Laporan	67.879.950	100.000.000	INSPEKTORAT
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100	Laporan	502.124.250	550.000.000	INSPEKTORAT
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Maturitas SPIP	3.06	Nilai	4.718.857.110	5.384.212.040	INSPEKTORAT
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase kebijakan yang bisa dimanfaatkan	100	%	445.956.400	484.212.040	INSPEKTORAT
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2	Rekomendasi	76.556.400	84.212.040	INSPEKTORAT
6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	3	Rekomendasi	369.400.000	400.000.000	INSPEKTORAT
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Indeks penerapan manajemen risiko	3.00	Indeks	4.272.900.710	4.900.000.000	INSPEKTORAT
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	60	perangkat daerah	895.608.800	1.000.000.000	INSPEKTORAT
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	51	perangkat daerah	504.506.280	600.000.000	INSPEKTORAT
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	6	Kegiatan	2.664.184.880	3.000.000.000	INSPEKTORAT
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	64	perangkat daerah	208.600.750	300.000.000	INSPEKTORAT
7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN				39.687.929.216	42.419.769.000	
7.01	KECAMATAN				39.687.929.216	42.419.769.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100	Persen	14.319.529.216	13.931.720.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100	Persen			
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD %	100	Persen			
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6	dokumen	63.534.100	31.000.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		Jumlah Dokumen pelaporan	2	dokumen			
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	29.536.400	0	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	2.107.300	6.000.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	3.488.900	5.000.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	2.107.300	5.000.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	3.488.900	5.000.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	548.100	5.000.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	22.257.200	5.000.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan SKPD	100	persen	12.455.948.000	12.169.070.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4	dokumen			
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67	Orang/bulan	12.096.005.000	11.748.970.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	358.260.000	402.720.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	785.800	6.000.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	Laporan	448.600	5.700.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	448.600	5.680.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi	100	persen	961.319.200	621.000.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	33.000.000	24.000.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	233.400.000	80.000.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	47.400.000	40.000.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	40.078.000	32.000.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	70.413.200	85.000.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	116.454.000	65.000.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	420.574.000	295.000.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	persen	100.600.000	350.000.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	Unit	100.600.000	350.000.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100	persen	239.350.000	190.650.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	121.500.000	145.650.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	117.850.000	45.000.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100	persen	498.777.916	570.000.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50	Unit	274.521.516	285.000.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	73.000.000	140.000.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	59.856.400	50.000.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	91.400.000	95.000.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	93	Persen	2.866.500.000	3.032.907.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1	angka	142.100.000	120.000.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	Dokumen	142.100.000	120.000.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	persen	1.735.300.000	1.959.514.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	1.135.300.000	1.209.514.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	60.000.000	75.000.000	KELURAHAN BARUSARI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	60.000.000	75.000.000	KELURAHAN BULUSTALAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	60.000.000	75.000.000	KELURAHAN LAMPER TENGAH
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	60.000.000	75.000.000	KELURAHAN LAMPER KIDUL
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	60.000.000	75.000.000	KELURAHAN LAMPER LOR
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	60.000.000	75.000.000	KELURAHAN PETERONGAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	60.000.000	75.000.000	KELURAHAN MUGASSARI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	60.000.000	75.000.000	KELURAHAN RANDUSARI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	60.000.000	75.000.000	KELURAHAN PLEBURAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	60.000.000	75.000.000	KELURAHAN WONODRI

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	persen	989.100.000	953.393.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan	989.100.000	953.393.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99	Persen	22.290.100.000	25.253.642.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3	kegiatan	11.945.500.000	14.771.842.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7	Lembaga Kemasyarakatan	172.000.000	124.500.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7	Unit	1.275.000.000	1.950.000.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	950.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN BARUSARI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14	Unit	950.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN BULUSTALAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9	Unit	950.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN LAMPER KIDUL
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6	Unit	950.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN LAMPER LOR
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9	Unit	950.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN LAMPER TENGAH
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8	Unit	950.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN MUGASSARI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	Unit	950.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN PETERONGAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6	Unit	950.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN PLEBURAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	Unit	950.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN RANDUSARI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	Unit	950.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN WONODRI
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8	Pokmas / Ormas	498.500.000
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8			Pokmas / Ormas	50.000.000	150.000.000	KELURAHAN BARUSARI
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5			Pokmas / Ormas	50.000.000	150.000.000	KELURAHAN BULUSTALAN
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10			Pokmas / Ormas	50.000.000	150.000.000	KELURAHAN LAMPER KIDUL
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10			Pokmas / Ormas	50.000.000	150.000.000	KELURAHAN LAMPER LOR
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8			Pokmas / Ormas	50.000.000	1.056.200.000	KELURAHAN LAMPER TENGAH
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10			Pokmas / Ormas	50.000.000	150.000.000	KELURAHAN PETERONGAN
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8			Pokmas / Ormas	50.000.000	150.000.000	KELURAHAN MUGASSARI
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10			Pokmas / Ormas	50.000.000	150.000.000	KELURAHAN PLEBURAN
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10			Pokmas / Ormas	50.000.000	0	KELURAHAN RANDUSARI
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9			Pokmas / Ormas	50.000.000	150.000.000	KELURAHAN WONODRI

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6	dokumen	10.344.600.000	10.481.800.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6	dokumen			
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	240.000.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyarakatan	916.400.000	916.400.000	KELURAHAN BARUSARI
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyarakatan	669.800.000	669.800.000	KELURAHAN BULUSTALAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyarakatan	849.800.000	830.000.000	KELURAHAN LAMPER KIDUL
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyarakatan	830.000.000	849.800.000	KELURAHAN LAMPER LOR
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyarakatan	1.092.200.000	1.092.200.000	KELURAHAN LAMPER TENGAH
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyarakatan	1.134.800.000	1.134.800.000	KELURAHAN MUGASSARI
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyarakatan	1.045.400.000	1.045.400.000	KELURAHAN PETERONGAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyarakatan	977.600.000	977.600.000	KELURAHAN PLEBURAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyarakatan	1.041.200.000	1.041.200.000	KELURAHAN RANDUSARI
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyarakatan	1.619.600.000	1.619.600.000	KELURAHAN WONODRI
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2	Laporan	40.800.000	65.000.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20	Persen	110.000.000	116.500.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	42	angka	110.000.000	116.500.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	110.000.000	116.500.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95	Persen	101.800.000	85.000.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	3	kegiatan	101.800.000	85.000.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60	Orang	101.800.000	85.000.000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN
7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN SEMARANG UTARA				46.854.246.693	47.002.342.000	
7.01	KECAMATAN				46.854.246.693	47.002.342.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100	Persen	13.390.191.093	11.294.336.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Persentase tercapainya kegiatan sarana dan prasarana	100	Persen			
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100	Persen			
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan - Kec. Semarang Utara	5	dokumen	62.931.400	14.499.358	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	35.463.900	5.999.358	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	2.537.900	2.000.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	463.900	2.500.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	2.537.900	2.000.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	463.900	2.000.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	21.463.900	0	KECAMATAN SEMARANG UTARA

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan SKPD - Kec. Semarang Utara	100	persen	12.192.747.400	10.578.236.642	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66	Orang/bulan	11.648.540.000	10.334.931.642	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	539.560.000	243.305.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1.537.900	0	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	2.145.600	0	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	963.900	0	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum - Kec. Semarang Utara	100	persen	583.690.000	308.500.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17	Paket	8.000.000	6.500.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16	Paket	430.000.000	10.000.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	30.000.000	23.000.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	3.824.000	6.000.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	48	Laporan	58.000.000	88.000.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14	Laporan	33.866.000	65.000.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6	Dokumen	20.000.000	110.000.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor - Kec. Semarang Utara	100	persen	186.000.000	160.000.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	186.000.000	160.000.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD - Kec. Semarang Utara	100	persen	364.822.293	233.100.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13	Unit	113.210.000	81.600.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14	Unit	123.781.800	45.000.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	26	Unit	67.280.493	67.500.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	60.550.000	39.000.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	93	Persen	3.299.030.600	3.515.576.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi pelayanan publik yang ada di Kecamatan dan Kelurahan - Kec. Semarang Utara	65	Angka	35.495.000	15.000.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5	Dokumen	35.495.000	15.000.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan - Kec. Semarang Utara	100	Persen	3.263.535.600	3.500.576.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	55.000.000	74.580.000	KELURAHAN BANDARHARJO
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	Laporan	2.803.535.600	2.854.246.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	51.000.000	74.500.000	KELURAHAN BULU LOR
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	53.000.000	74.990.000	KELURAHAN KUNINGAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	48.000.000	48.000.000	KELURAHAN DADAPSARI

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10	Laporan	43.000.000	74.790.000	KELURAHAN PANGGUNG KIDUL
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	58.000.000	74.850.000	KELURAHAN PANGGUNG LOR
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	46.000.000	74.990.000	KELURAHAN PLOMBOKAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10	Laporan	46.000.000	74.650.000	KELURAHAN PURWOSARI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	60.000.000	74.980.000	KELURAHAN TANJUNG MAS
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99	Persen	29.906.400.000	31.937.930.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan-Kec.Semarang Utara	321	Kegiatan	15.920.000.000	24.095.155.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4	Lembaga Kemasyarakatan	62.920.560	70.000.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15	Unit	1.125.000.000	1.509.800.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	23	Unit	2.663.000.000	1.100.000.000	KELURAHAN BANDARHARJO
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	Unit	1.384.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN BULU LOR
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13	Unit	1.152.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN DADAPSARI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16	Unit	1.456.000.000	1.146.400.000	KELURAHAN KUNINGAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	Unit	1.304.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN PANGGUNG KIDUL
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	Unit	950.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN PANGGUNG LOR
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15	Unit	1.187.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN PLOMBOKAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13	Unit	1.035.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN PURWOSARI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	27	Unit	2.839.000.000	1.100.000.000	KELURAHAN TANJUNG MAS
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas / Ormas	312.079.440	167.000.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas / Ormas	50.000.000	1.755.380.000	KELURAHAN BANDARHARJO
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN BULU LOR
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas / Ormas	50.000.000	1.460.000.000	KELURAHAN DADAPSARI
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas / Ormas	50.000.000	1.835.350.000	KELURAHAN KUNINGAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas / Ormas	50.000.000	976.500.000	KELURAHAN PANGGUNG KIDUL
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas / Ormas	50.000.000	2.365.375.000	KELURAHAN PANGGUNG LOR
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas / Ormas	50.000.000	1.202.550.000	KELURAHAN PLOMBOKAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas / Ormas	50.000.000	1.227.600.000	KELURAHAN PURWOSARI
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas / Ormas	50.000.000	2.129.200.000	KELURAHAN TANJUNG MAS

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Semarang Utara	50	Dokumen	13.986.400.000	7.842.775.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	250.000.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyarakatan	1.959.800.000	1.959.800.000	KELURAHAN BANDARHARJO
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyarakatan	1.557.200.000	1.557.200.000	KELURAHAN BULU LOR
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyarakatan	1.241.000.000	0	KELURAHAN DADAPSARI
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyarakatan	1.693.400.000	0	KELURAHAN KUNINGAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyarakatan	655.400.000	655.400.000	KELURAHAN PANGGUNG KIDUL
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyarakatan	2.318.600.000	2.318.600.000	KELURAHAN PANGGUNG LOR
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyarakatan	990.200.000	1.052.500.000	KELURAHAN PLOMBOKAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyarakatan	974.600.000	0	KELURAHAN PURWOSARI
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyarakatan	2.451.800.000	0	KELURAHAN TANJUNG MAS
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3	Laporan	17.400.000	49.275.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20	Persen	155.000.000	200.000.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelanggaran terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani - Kec. Semarang Utara	35	Angka	155.000.000	200.000.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	155.000.000	200.000.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95	Persen	103.625.000	54.500.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan - Kec. Semarang Utara	10	Angka	103.625.000	54.500.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	480	Orang	103.625.000	54.500.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN SEMARANG BARAT				62.176.378.028	63.270.778.023	
7.01	KECAMATAN				62.176.378.028	63.270.778.023	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100	persen	19.992.654.352	18.250.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100	persen			
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100	persen			
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	5.00	Dokumen	63.093.104	69.500.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	30.495.404	30.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1.599.900	2.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1.976.700	3.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	1.841.700	3.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1.976.700	2.500.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	1.599.900	2.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	23.602.800	27.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4.00	dokumen	17.995.696.000	16.361.500.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98	Orang/bulan	17.129.282.000	15.500.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	857.000.000	857.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1.121.400	1.500.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	Laporan	7.171.200	1.500.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	1.121.400	1.500.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu pelaksanaan administrasi umum	12.00	bulan	479.895.513	544.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	26.096.700	140.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	35.215.230	75.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	62.766.130	55.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6	Paket	35.946.674	34.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan	86.550.950	60.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	107.525.620	110.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	125.794.209	70.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00	persen	369.323.344	259.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	Unit	165.570.650	250.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	203.752.694	9.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00	persen	272.594.310	226.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	246.804.000	190.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	25.790.310	36.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100.00	persen	812.052.081	790.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	58	Unit	562.243.340	590.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	146.635.270	140.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	76.409.961	36.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	26.763.510	24.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	93	Persen	4.245.657.406	4.425.778.023	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan	2.00	angka	2.863.503.370	2.850.778.023	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	Dokumen	2.863.503.370	2.850.778.023	KECAMATAN SEMARANG BARAT

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1.00	Dokumen	1.361.537.866	1.550.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	321.537.866	500.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	65.000.000	65.000.000	KELURAHAN BOJONGSALAMAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	65.000.000	75.000.000	KELURAHAN BONGSARI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	65.000.000	65.000.000	KELURAHAN KALIBANTENG KIDUL
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	65.000.000	65.000.000	KELURAHAN CABEAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	65.000.000	65.000.000	KELURAHAN GISIKDRONO
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	65.000.000	65.000.000	KELURAHAN KALIBANTENG KULON
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	65.000.000	65.000.000	KELURAHAN KARANGAYU
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	65.000.000	65.000.000	KELURAHAN KRAPYAK
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	65.000.000	65.000.000	KELURAHAN KEMBANGARUM
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	65.000.000	65.000.000	KELURAHAN MANYARAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	65.000.000	65.000.000	KELURAHAN KROBOKAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	65.000.000	65.000.000	KELURAHAN SALAMAN MLOYO
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	65.000.000	65.000.000	KELURAHAN NGEMPLAK SIMONGAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	65.000.000	65.000.000	KELURAHAN TAWANGMAS
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	65.000.000	65.000.000	KELURAHAN TAMBAKHARJO
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	65.000.000	65.000.000	KELURAHAN TAWANGSARI
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00	persen	20.616.170	25.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5	Laporan	20.616.170	25.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99	Persen	37.849.776.170	40.485.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100	kegiatan	18.607.376.170	20.135.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4	Lembaga Kemasyarakatan	83.376.170	85.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16	Unit	1.050.000.000	1.200.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	Unit	950.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN BOJONGSALAMAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16	Unit	950.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN BONGSARI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8	Unit	950.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN CABEAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15	Unit	1.191.000.000	1.200.000.000	KELURAHAN GISIKDRONO
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9	Unit	950.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN KALIBANTENG KIDUL

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	Unit	950.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN KALIBANTENG KULON
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13	Unit	999.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN KARANGAYU
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15	Unit	1.171.000.000	1.200.000.000	KELURAHAN KEMBANGARUM
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8	Unit	950.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN KRAPYAK
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	Unit	1.170.000.000	1.200.000.000	KELURAHAN KROBOKAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	Unit	1.029.000.000	1.500.000.000	KELURAHAN MANYARAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16	Unit	994.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN NGEMPLAK SIMONGAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	Unit	950.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN SALAMAN MLOYO
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	Unit	950.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN TAMBAKHARJO
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8	Unit	1.160.000.000	1.200.000.000	KELURAHAN TAWANGMAS
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	Unit	950.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN TAWANGSARI
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	410.000.000	450.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	60.000.000	KELURAHAN BOJONGSALAMAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	60.000.000	KELURAHAN BONGSARI
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	60.000.000	KELURAHAN CABEAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	60.000.000	KELURAHAN GISIKDRONO
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	60.000.000	KELURAHAN KALIBANTENG KIDUL
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	200.000.000	KELURAHAN KALIBANTENG KULON
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	60.000.000	KELURAHAN KARANGAYU
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	60.000.000	KELURAHAN KEMBANGARUM
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	60.000.000	KELURAHAN KRAPYAK
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	60.000.000	KELURAHAN KROBOKAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	60.000.000	KELURAHAN MANYARAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	60.000.000	KELURAHAN NGEMPLAK SIMONGAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	60.000.000	KELURAHAN SALAMAN MLOYO
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	60.000.000	KELURAHAN TAMBAKHARJO
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	60.000.000	KELURAHAN TAWANGMAS
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	60.000.000	KELURAHAN TAWANGSARI

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	17.00	Dokumen	19.242.400.000	20.350.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	150.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	1.190.000.000	1.200.000.000	KELURAHAN BOJONGSALAMAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	1.252.400.000	1.300.000.000	KELURAHAN BONGSARI
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	556.400.000	600.000.000	KELURAHAN CABEAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	2.002.400.000	2.100.000.000	KELURAHAN GISIKDRONO
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	783.200.000	900.000.000	KELURAHAN KALIBANTENG KIDUL
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	974.600.000	1.000.000.000	KELURAHAN KALIBANTENG KULON
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	912.200.000	950.000.000	KELURAHAN KARANGAYU
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	2.022.200.000	2.100.000.000	KELURAHAN KEMBARANGUM
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	1.034.000.000	1.200.000.000	KELURAHAN KRAPYAK
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	1.784.000.000	1.800.000.000	KELURAHAN KROBOKAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyarakatan	1.880.600.000	2.000.000.000	KELURAHAN MANYARAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyarakatan	1.263.800.000	1.300.000.000	KELURAHAN NGEMPLAK SIMONGAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	740.600.000	800.000.000	KELURAHAN SALAMAN MLOYO
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	603.200.000	700.000.000	KELURAHAN TAMBAKHARJO
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	1.059.800.000	1.100.000.000	KELURAHAN TAWANGMAS
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	1.016.000.000	1.100.000.000	KELURAHAN TAWANGSARI
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2	Laporan	40.000.000	50.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20	Persen	14.041.500	20.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	95.00	persen	14.041.500	20.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	15.00	Angka			
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5	Laporan	14.041.500	20.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95	Persen	74.248.600	90.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	5.00	angka	74.248.600	90.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	20	Orang	74.248.600	90.000.000	KECAMATAN SEMARANG BARAT

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR				42.960.604.175	41.864.453.682	
7.01	KECAMATAN				42.960.604.175	41.864.453.682	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD(Kec.Semarang Timur)	100	Persen	15.175.543.481	14.042.932.983	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD(Kec.Semarang Timur)	100.00	Persen			
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD (Kec.SemarangTimur)	100	Persen			
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan - Kec. Smg Timur	6	dokumen	74.164.500	23.946.350	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Jumlah Dokumen pelaporan - Kec. Smg Timur	2	dokumen			
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	31.565.700	2.437.800	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	4.544.500	4.703.950	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	4.544.500	4.261.150	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	4.544.500	4.702.650	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	4.544.500	4.261.150	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	1.447.900	1.079.650	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	22.972.900	2.500.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD -Kec.Smg Timur	3	dokumen	13.160.027.400	12.523.082.633	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD - Kec. Smg Timur	100	Persen			
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71	Orang/bulan	12.626.334.000	11.988.717.523	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	528.560.000	528.560.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	3.186.000	3.848.278	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan	1.086.200	1.060.360	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	861.200	896.472	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum - Kec. Smg Timur	100	Persen	777.164.428	689.904.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	8.750.840	8.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket	157.479.505	200.500.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	45.688.590	49.268.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10	Paket	16.985.170	14.136.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	24.665.000	98.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	Laporan	274.210.000	120.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	Dokumen	249.385.323	200.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor - Kec. Smg Timur	100	Persen	36.136.400	50.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	Unit	36.136.400	50.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor - Kec. Smg Timur	100	Persen	525.372.419	320.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	269.599.756	160.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	255.772.663	160.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset Daerah - Kec. Smg Timur	100	Persen	602.678.334	436.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26	Unit	175.941.000	186.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	108.040.000	100.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11	Unit	213.771.470	120.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	104.925.864	30.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	93.00	Persen	3.166.742.614	3.200.020.699	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1.00	angka	67.846.980	68.250.120	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	Dokumen	67.846.980	68.250.120	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100.00	Persen	2.134.173.104	2.127.173.104	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	1.407.173.104	1.407.173.104	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	74.000.000	73.000.000	KELURAHAN BUGANGAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	71.000.000	69.000.000	KELURAHAN KARANGTEMPEL
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	68.000.000	67.000.000	KELURAHAN KARANGTURI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	68.000.000	67.000.000	KELURAHAN KEBONAGUNG
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	76.000.000	75.000.000	KELURAHAN KEMIJEN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	70.000.000	69.000.000	KELURAHAN MLATHARJO
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	74.000.000	73.000.000	KELURAHAN MLATIBARU
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	70.000.000	69.000.000	KELURAHAN REJOMULYO
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	84.000.000	83.000.000	KELURAHAN REJOSARI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	72.000.000	75.000.000	KELURAHAN SARIREJO
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100.00	Persen	964.722.530	1.004.597.475	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3	Laporan	964.722.530	1.004.597.475	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99.00	Persen	24.475.968.080	24.486.200.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	327.00	kegiatan	12.772.768.080	12.773.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	94	Lembaga Kemasyarakatan	65.000.000	65.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6	Unit	1.160.100.000	1.200.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8	Unit	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN BUGANGAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN KARANGTEMPEL
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN KARANGTURI

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7	Unit	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN KEBONAGUNG
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15	Unit	1.675.000.000	1.675.000.000	KELURAHAN KEMIJEN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN MLATIBARU
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8	Unit	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN MLATHARJO
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	Unit	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN REJOMULYO
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14	Unit	1.433.000.000	1.433.000.000	KELURAHAN REJOSARI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN SARIREJO
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	339.668.080	300.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN BUGANGAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN KARANGTEMPEL
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN KARANGTURI
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN KEBONAGUNG
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN KEMIJEN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN MLATIBARU
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN MLATHARJO
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN REJOMULYO
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN REJOSARI
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN SARIREJO
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang seharusnya	8	dokumen	11.703.200.000	11.713.200.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	137.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	1.319.000.000	1.319.000.000	KELURAHAN BUGANGAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	813.200.000	813.200.000	KELURAHAN KARANGTEMPEL
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	627.200.000	627.200.000	KELURAHAN KARANGTURI
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	615.800.000	615.800.000	KELURAHAN KEBONAGUNG
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	1.619.600.000	1.619.600.000	KELURAHAN KEMIJEN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	1.283.600.000	1.283.600.000	KELURAHAN MLATIBARU
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	869.600.000	869.600.000	KELURAHAN MLATHARJO
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	885.200.000	885.200.000	KELURAHAN REJOMULYO
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	2.443.400.000	2.443.400.000	KELURAHAN REJOSARI
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	1.049.600.000	1.049.600.000	KELURAHAN SARIREJO

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.03.2.03.0004	Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1	Laporan	50.000.000	50.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20.00	Persen	38.150.000	37.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	30.00	angka	38.150.000	37.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	38.150.000	37.000.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95.00	Persen	104.200.000	98.300.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	3.00	kegiatan	104.200.000	98.300.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200	Orang	104.200.000	98.300.000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR
7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH				51.037.006.039	54.538.031.000	
7.01	KECAMATAN				51.037.006.039	54.538.031.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD-Kec. SmgTgh	100.00	Persen	20.034.463.837	21.105.415.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD-Kec Smg Tgh	100	Persen			
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD-Kec Smg Tgh	100	Persen			
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan (Kec Smg Tengah)	20	dokumen	93.034.400	185.000.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	35.377.400	30.000.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	5.142.900	30.000.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	5.142.900	30.000.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	3.573.900	30.000.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	3.573.900	30.000.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Laporan	15.990.100	20.000.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	24.233.300	15.000.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD (kec Smg Tengah)	8	dokumen	19.013.761.600	18.162.915.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	Orang/bulan	18.270.221.000	16.861.970.940	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	734.170.000	1.265.944.060	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	3.598.600	10.000.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6	Laporan	4.498.200	15.000.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	1.273.800	10.000.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan Administrasi Umum (kec Smg Tengah)	100	Persen	229.950.417	907.500.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	7.500.000	20.000.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	16.450.417	500.000.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45	Paket	30.000.000	50.000.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	12.500.000	12.500.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	Laporan	120.000.000	125.000.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	43.500.000	200.000.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor (kec Smg Tengah)	100	Persen	270.000.000	450.000.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	140.000.000	200.000.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	130.000.000	250.000.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD (Kec Smg Tengah)	100	Persen	427.717.420	1.400.000.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50	Unit	323.328.700	750.000.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	25.000.000	600.000.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	79.388.720	50.000.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	93	Persen	3.689.542.202	4.197.366.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	0	Persen	20.000.000	87.504.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	Dokumen	20.000.000	87.504.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	Persen	2.556.063.236	2.911.462.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	1.506.063.236	1.844.462.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	70.000.000	71.000.000	KELURAHAN GABAHAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	70.000.000	71.000.000	KELURAHAN BANGUNHARJO
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	70.000.000	71.000.000	KELURAHAN BRUMBUNGAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	70.000.000	71.000.000	KELURAHAN JAGALAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	70.000.000	71.000.000	KELURAHAN KAUMAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	70.000.000	71.000.000	KELURAHAN KEMBANGSARI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	70.000.000	71.000.000	KELURAHAN KARANGKIDUL
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	70.000.000	71.000.000	KELURAHAN KRANGGAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	70.000.000	71.000.000	KELURAHAN PANDANSARI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	70.000.000	73.000.000	KELURAHAN MIROTO
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	70.000.000	71.000.000	KELURAHAN PEKUNDEAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	70.000.000	71.000.000	KELURAHAN PENDRIKAN LOR
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	70.000.000	71.000.000	KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	70.000.000	71.000.000	KELURAHAN SEKAYU
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	70.000.000	71.000.000	KELURAHAN PURWODINATAN
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	Persen	1.113.478.966	1.198.400.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2	Laporan	1.113.478.966	1.198.400.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	93	Persen	27.197.000.000	29.074.250.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	827	kegiatan	27.055.000.000	28.887.250.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9	Lembaga Kemasyarakatan	58.000.000	95.250.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6	Unit	1.042.000.000	1.718.220.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7	Unit	951.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN BANGUNHARJO
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	Unit	951.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN BRUMBUNGAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	951.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN GABAHAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8	Unit	951.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN JAGALAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13	Unit	951.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN KAUMAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	Unit	951.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN KARANGKIDUL
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	951.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN KRANGGAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7	Unit	951.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN KEMBANGSARI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8	Unit	952.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN MIROTO
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9	Unit	951.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN PEKUNDEAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	Unit	951.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN PANDANSARI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9	Unit	951.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5	Unit	951.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN PENDRIKAN LOR
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14	Unit	951.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN PURWODINATAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5	Unit	951.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN SEKAYU
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	400.000.000	776.380.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	606.400.000	606.400.000	KELURAHAN BANGUNHARJO
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	789.400.000	793.600.000	KELURAHAN BRUMBUNGAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	982.000.000	982.000.000	KELURAHAN GABAHAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	931.000.000	931.000.000	KELURAHAN JAGALAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	673.000.000	673.000.000	KELURAHAN KARANGKIDUL
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	512.800.000	512.800.000	KELURAHAN KAUMAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	766.600.000	770.800.000	KELURAHAN KEMBANGSARI
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	711.400.000	711.400.000	KELURAHAN KRANGGAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	907.000.000	907.000.000	KELURAHAN MIROTO
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	579.400.000	579.400.000	KELURAHAN PANDANSARI
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	786.400.000	786.400.000	KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	762.400.000	762.400.000	KELURAHAN PEKUNDE
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	950.800.000	950.800.000	KELURAHAN PENDRIKAN LOR
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	524.200.000	524.200.000	KELURAHAN SEKAYU
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	806.200.000	806.200.000	KELURAHAN PURWODINATAN
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	15	dokumen	142.000.000	187.000.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	127.000.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1	Laporan	15.000.000	60.000.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	14	Persen	33.600.000	70.000.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	30	angka	33.600.000	70.000.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	33.600.000	70.000.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	40	Persen	82.400.000	91.000.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2	kegiatan	82.400.000	91.000.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	45	Orang	82.400.000	91.000.000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN GUNUNG PATI				58.804.687.370	59.778.813.000	
7.01	KECAMATAN				58.804.687.370	59.778.813.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00	Persen	23.739.685.114	19.901.837.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100	Persen			
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100	Persen			
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat daerah yang dihasilkan	6	dokumen	62.805.700	41.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
		dokumen pelaporan	2	dokumen			
		Kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100	persen			
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	29.940.800	10.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	3.246.900	5.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	2.234.900	5.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	3.246.900	5.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1.020.500	5.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	448.600	3.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	22.667.100	8.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan SKPD	100	persen	20.269.667.800	16.965.457.757	KECAMATAN GUNUNG PATI
		Jumlah dokumen pelaporan keuangan SKPD	3	dokumen			
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100	persen			
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	93	Orang/bulan	19.449.922.000	16.175.457.757	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	818.400.000	775.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	448.600	5.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan	448.600	5.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	448.600	5.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu pelaksanaan administrasi umum	12	bulan	2.054.686.574	1.685.379.243	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	20.000.000	40.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	Paket	826.047.055	200.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	57.000.000	50.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	21.345.028	45.379.243	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	24.000.000	70.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	128.986.000	80.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10	Dokumen	977.308.491	1.200.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	persen	117.208.680	200.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	117.208.680	200.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100	persen	226.635.360	270.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	109.735.360	120.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Laporan	116.900.000	150.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah	100	persen	1.008.681.000	740.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38	Unit	218.601.000	290.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	471.600.000	200.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	90.000.000	100.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	228.480.000	150.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	93	Persen	4.321.397.256	3.952.576.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan kelurahan	1	angka	73.400.000	55.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	Dokumen	73.400.000	55.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	persen	2.525.186.886	2.665.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	1.396.186.886	1.460.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	68.000.000	75.000.000	KELURAHAN CEPOKO
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	69.000.000	75.000.000	KELURAHAN KALISEGORO
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	68.000.000	75.000.000	KELURAHAN JATIREJO
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	73.000.000	75.000.000	KELURAHAN GUNUNG PATI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	70.000.000	75.000.000	KELURAHAN MANGUNSARI

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	69.000.000	75.000.000	KELURAHAN KANDRI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	69.000.000	75.000.000	KELURAHAN NONGKOSAWIT
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	69.000.000	75.000.000	KELURAHAN NGIJO
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	70.000.000	75.000.000	KELURAHAN PATEMON
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	70.000.000	75.000.000	KELURAHAN PAKINTELAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	69.000.000	75.000.000	KELURAHAN PLALANGAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	74.000.000	75.000.000	KELURAHAN SADENG
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	71.000.000	75.000.000	KELURAHAN SEKARAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	70.000.000	75.000.000	KELURAHAN PONGANGAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	80.000.000	80.000.000	KELURAHAN SUKOREJO
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	70.000.000	75.000.000	KELURAHAN SUMURREJO
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100	persen	1.722.810.370	1.232.576.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3	Laporan	1.722.810.370	1.232.576.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99	Persen	30.586.330.000	35.694.400.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan	150	kegiatan	18.234.930.000	23.130.800.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6	Lembaga Kemasyarakatan	206.400.000	160.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8	Unit	1.211.130.000	2.795.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9	Unit	950.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN CEPOKO
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14	Unit	971.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN GUNUNGPATI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	950.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN JATIREJO
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8	Unit	950.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN KALISEGORO
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13	Unit	950.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN KANDRI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	950.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN MANGUNSARI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	Unit	950.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN NGIJO
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13	Unit	950.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN NONGKOSAWIT
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16	Unit	950.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN PAKINTELAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15	Unit	950.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN PATEMON
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14	Unit	950.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN PLALANGAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16	Unit	1.145.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN PONGANGAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14	Unit	950.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN SADENG
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17	Unit	950.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN SEKARAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14	Unit	1.228.000.000	1.228.000.000	KELURAHAN SUKOREJO
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14	Unit	950.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN SUMURREJO
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12	Pokmas / Ormas	323.400.000	653.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8	Pokmas / Ormas	50.000.000	175.000.000	KELURAHAN CEPOKO
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11	Pokmas / Ormas	50.000.000	175.000.000	KELURAHAN GUNUNGPATI
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8	Pokmas / Ormas	50.000.000	175.000.000	KELURAHAN JATIREJO
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8	Pokmas / Ormas	50.000.000	175.000.000	KELURAHAN KALISEGORO
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10	Pokmas / Ormas	50.000.000	175.000.000	KELURAHAN KANDRI
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10	Pokmas / Ormas	50.000.000	175.000.000	KELURAHAN MANGUNSARI
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9	Pokmas / Ormas	50.000.000	175.000.000	KELURAHAN NGIJO
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7	Pokmas / Ormas	50.000.000	175.000.000	KELURAHAN NONGKOSAWIT
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8	Pokmas / Ormas	50.000.000	175.000.000	KELURAHAN PAKINTELAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9	Pokmas / Ormas	50.000.000	175.000.000	KELURAHAN PATEMON
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10	Pokmas / Ormas	50.000.000	175.000.000	KELURAHAN PLALANGAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11	Pokmas / Ormas	50.000.000	669.800.000	KELURAHAN PONGANGAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8	Pokmas / Ormas	50.000.000	175.000.000	KELURAHAN SADENG
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8	Pokmas / Ormas	50.000.000	175.000.000	KELURAHAN SEKARAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12	Pokmas / Ormas	50.000.000	175.000.000	KELURAHAN SUKOREJO
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9	Pokmas / Ormas	50.000.000	175.000.000	KELURAHAN SUMURREJO
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	4	dokumen	12.351.400.000	12.563.600.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	200.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	440.000.000	450.000.000	KELURAHAN CEPOKO
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	1.015.400.000	1.040.400.000	KELURAHAN GUNUNGPATI
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	404.600.000	429.600.000	KELURAHAN JATIREJO
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	573.200.000	602.400.000	KELURAHAN KALISEGORO
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	591.800.000	616.800.000	KELURAHAN KANDRI
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	682.400.000	640.800.000	KELURAHAN MANGUNSARI
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	585.800.000	610.800.000	KELURAHAN NGIJO
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	627.200.000	627.200.000	KELURAHAN NONGKOSAWIT
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	635.600.000	660.600.000	KELURAHAN PAKINTELAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	858.200.000	858.200.000	KELURAHAN PATEMON

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	537.800.000	562.800.000	KELURAHAN PLALANGAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	651.200.000	676.200.000	KELURAHAN PONGANGAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	1.127.600.000	1.127.600.000	KELURAHAN SADENG
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	792.800.000	809.400.000	KELURAHAN SEKARAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	1.706.000.000	1.706.000.000	KELURAHAN SUKOREJO
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	744.800.000	744.800.000	KELURAHAN SUMURREJO
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2	Laporan	250.000.000	200.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20	Persen	38.025.000	110.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	4	angka	38.025.000	110.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3	Laporan	38.025.000	110.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95	Persen	119.250.000	120.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan ,Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2	kegiatan	119.250.000	120.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100	Orang	119.250.000	120.000.000	KECAMATAN GUNUNG PATI
7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN TUGU				32.370.394.980	28.551.798.262	
7.01	KECAMATAN				32.370.394.980	28.551.798.262	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD - Kec. Tugu	100.00	Persen	11.842.262.980	10.386.549.272	KECAMATAN TUGU
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD - Kec. Tugu	100	Persen			
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD - Kec. Tugu	100	Persen			
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan - Kec. Tugu	7	Dokumen	53.343.800	14.519.308	KECAMATAN TUGU
		Jumlah Dokumen Pelaporan - Kec. Tugu	4	Dokumen			
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	29.536.400	3.960.000	KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	383.300	1.309.110	KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	413.300	1.210.000	KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	383.300	1.210.000	KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	413.300	1.725.000	KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Laporan	447.600	1.777.698	KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	21.766.600	3.327.500	KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD - Kec. Tugu	3	Dokumen	9.293.296.400	8.824.247.299	KECAMATAN TUGU
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD - Kec. Tugu	100	Persen			
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53	Orang/bulan	8.938.565.000	8.441.185.615	KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	354.060.000	378.762.000	KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	223.800	1.252.272	KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan	223.800	1.583.312	KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	223.800	1.464.100	KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan pelaksanaan administrasi umum - Kec. Tugu	100	Persen	1.295.327.360	830.816.800	KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Paket	10.446.950	17.043.800	KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket	238.422.000	63.275.000	KECAMATAN TUGU

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	115.459.410	93.240.000	KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	21.141.000	19.965.000	KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan	134.332.000	132.000.000	KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6	Laporan	69.000.000	159.708.000	KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	Dokumen	706.526.000	345.585.000	KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor - Kec. Tugu	100	Persen	470.690.000	107.254.597	KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	Unit	470.690.000	107.254.597	KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor - Kec. Tugu	100	Persen	330.485.800	185.296.508	KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	234.000.000	98.746.508	KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7	Laporan	96.485.800	86.550.000	KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah - Kec. Tugu	100	Persen	399.119.620	424.414.760	KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	Unit	212.419.620	226.969.760	KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	86.700.000	87.550.000	KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	50.000.000	63.275.000	KECAMATAN TUGU
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	50.000.000	46.620.000	KECAMATAN TUGU
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE) - Kec. Tugu	93	Persen	2.154.210.000	2.895.042.000	KECAMATAN TUGU
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan - Kec. Tugu	4	Nilai	10.500.000	1.445.068.966	KECAMATAN TUGU
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	Dokumen	10.500.000	1.445.068.966	KECAMATAN TUGU
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan - Kec. Tugu	100	Persen	1.621.645.000	1.296.804.604	KECAMATAN TUGU
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	1.096.645.000	771.804.604	KECAMATAN TUGU
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	75.000.000	75.000.000	KELURAHAN JERAKAH
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	75.000.000	75.000.000	KELURAHAN KARANGANYAR
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	75.000.000	75.000.000	KELURAHAN MANGKANG KULON
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	75.000.000	75.000.000	KELURAHAN MANGKANG WETAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	75.000.000	75.000.000	KELURAHAN MANGUNHARJO
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	75.000.000	75.000.000	KELURAHAN RANDUGARUT
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	75.000.000	75.000.000	KELURAHAN TUGUREJO
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - Kec. Tugu	100	Persen	522.065.000	153.168.430	KECAMATAN TUGU
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan	522.065.000	153.168.430	KECAMATAN TUGU
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan - Kec. Tugu	99	Persen	18.210.681.600	15.135.206.990	KECAMATAN TUGU
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Tugu	297	Kegiatan	13.718.661.000	10.280.070.931	KECAMATAN TUGU
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	94	Lembaga Kemasyarakatan	59.924.000	64.147.270	KECAMATAN TUGU
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	22	Unit	1.299.950.000	1.181.395.000	KECAMATAN TUGU
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	950.000.000	1.100.000.000	KELURAHAN JERAKAH
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	1.648.000.000	1.100.000.000	KELURAHAN KARANGANYAR
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	1.921.000.000	1.100.000.000	KELURAHAN MANGKANG KULON
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	1.742.000.000	1.100.000.000	KELURAHAN MANGKANG WETAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	2.085.000.000	1.100.000.000	KELURAHAN MANGUNHARJO
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	1.576.000.000	1.100.000.000	KELURAHAN RANDUGARUT
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	1.446.000.000	1.100.000.000	KELURAHAN TUGUREJO
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	640.787.000	109.528.661	KECAMATAN TUGU
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	175.000.000	KELURAHAN JERAKAH
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	175.000.000	KELURAHAN KARANGANYAR
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	175.000.000	KELURAHAN MANGKANG KULON
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	175.000.000	KELURAHAN MANGKANG WETAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	175.000.000	KELURAHAN MANGUNHARJO
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	175.000.000	KELURAHAN RANDUGARUT
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	175.000.000	KELURAHAN TUGUREJO
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Tugu	27	Dokumen	4.492.020.600	4.855.136.059	KECAMATAN TUGU
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyarakatan	126.134.000	98.720.000	KECAMATAN TUGU
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	462.800.000	487.800.000	KELURAHAN JERAKAH
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	564.800.000	589.800.000	KELURAHAN KARANGANYAR
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	557.600.000	606.835.480	KELURAHAN MANGKANG KULON
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	902.000.000	927.231.510	KELURAHAN MANGKANG WETAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	699.200.000	726.200.000	KELURAHAN MANGUNHARJO
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	362.000.000	387.000.000	KELURAHAN RANDUGARUT
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	780.200.000	792.720.000	KELURAHAN TUGUREJO
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3	Laporan	37.286.600	238.829.069	KECAMATAN TUGU
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum - Kec. Tugu	20	Persen	75.540.000	35.000.000	KECAMATAN TUGU
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani - Kec. Tugu	2	Nilai	75.540.000	35.000.000	KECAMATAN TUGU
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	75.540.000	35.000.000	KECAMATAN TUGU
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional - Kec. Tugu	95	Persen	87.700.400	100.000.000	KECAMATAN TUGU
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan - Kec. Tugu	2	Kegiatan	87.700.400	100.000.000	KECAMATAN TUGU
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200	Orang	87.700.400	100.000.000	KECAMATAN TUGU

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN MIJEN				58.338.860.881	58.752.387.881	
7.01	KECAMATAN				58.338.860.881	58.752.387.881	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00	persen	22.347.815.281	22.768.592.281	KECAMATAN MIJEN
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD 100%	100.00	persen			
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100.00	persen			
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6	dokumen	67.204.000	67.171.000	KECAMATAN MIJEN
		Jumlah Dokumen Pelaporan	2	dokumen			
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	31.471.000	31.471.000	KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	4.381.000	3.940.000	KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	5.056.000	4.530.000	KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	1.480.000	1.700.000	KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1.345.000	1.897.000	KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	824.000	986.000	KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	22.647.000	22.647.000	KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4	dokumen	19.010.596.000	19.010.380.000	KECAMATAN MIJEN
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100	persen			
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	107	Orang/bulan	18.236.540.000	18.236.540.000	KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	770.760.000	770.760.000	KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	824.000	824.000	KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	Laporan	1.648.000	1.570.000	KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	824.000	686.000	KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100	persen	1.415.190.621	1.514.800.621	KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	Paket	10.947.000	10.947.000	KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	386.370.000	486.250.000	KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	42.270.000	42.000.000	KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	17.589.281	17.589.281	KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan	32.656.000	32.656.000	KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	129.151.000	129.151.000	KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8	Dokumen	796.207.340	796.207.340	KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	persen	235.977.999	235.977.999	KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	Unit	235.977.999	235.977.999	KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100	persen	323.356.661	323.356.661	KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	193.623.900	193.623.900	KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	129.732.761	129.732.761	KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	persen	1.295.490.000	1.616.906.000	KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34	Unit	173.710.000	173.710.000	KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	Unit	62.410.000	67.560.000	KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	Unit	1.000.102.000	1.000.102.000	KECAMATAN MIJEN
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	59.268.000	375.534.000	KECAMATAN MIJEN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	93	Persen	3.773.745.600	3.766.495.600	KECAMATAN MIJEN
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1	angka	191.478.000	191.478.000	KECAMATAN MIJEN
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9	Dokumen	191.478.000	191.478.000	KECAMATAN MIJEN
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	persen	2.280.737.600	2.273.487.600	KECAMATAN MIJEN
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	1.322.437.600	1.315.187.600	KECAMATAN MIJEN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	70.800.000	70.800.000	KELURAHAN CANGKIRAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	66.600.000	66.600.000	KELURAHAN BUBAKAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	79.200.000	79.200.000	KELURAHAN JATISARI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	69.000.000	69.000.000	KELURAHAN JATIBARANG
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	68.800.000	68.800.000	KELURAHAN MIJEN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	64.900.000	64.900.000	KELURAHAN KARANGMALANG
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	67.100.000	67.100.000	KELURAHAN KEDUNGPANE
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	67.300.000	67.300.000	KELURAHAN PESANTREN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	67.500.000	67.500.000	KELURAHAN NGADIRGO
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	65.700.000	65.700.000	KELURAHAN TAMBANGAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	66.400.000	66.400.000	KELURAHAN PURWOSARI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	63.900.000	63.900.000	KELURAHAN POLAMAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	75.200.000	75.200.000	KELURAHAN WONOLOPO
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	65.900.000	65.900.000	KELURAHAN WONOPULMON
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	persen	1.301.530.000	1.301.530.000	KECAMATAN MIJEN
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan	1.301.530.000	1.301.530.000	KECAMATAN MIJEN
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99	Persen	32.075.800.000	32.075.800.000	KECAMATAN MIJEN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	502	kegiatan	20.301.000.000	20.301.000.000	KECAMATAN MIJEN
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4	Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	50.000.000	KECAMATAN MIJEN
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14	Unit	1.275.000.000	1.275.000.000	KECAMATAN MIJEN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9	Unit	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN BUBAKAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN CANGKIRAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	1.943.000.000	1.943.000.000	KELURAHAN JATIBARANG
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN JATISARI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9	Unit	1.375.000.000	1.375.000.000	KELURAHAN KARANGMALANG
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	Unit	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN KEDUNGPANE
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	Unit	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN MIJEN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	Unit	1.415.000.000	1.415.000.000	KELURAHAN NGADIRGO

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14	Unit	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN PESANTREN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9	Unit	1.153.000.000	1.153.000.000	KELURAHAN POLAMAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	1.368.000.000	1.368.000.000	KELURAHAN PURWOSARI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16	Unit	1.654.000.000	1.654.000.000	KELURAHAN TAMBANGAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8	Unit	1.908.000.000	1.908.000.000	KELURAHAN WONOLOPO
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	Unit	1.535.000.000	1.535.000.000	KELURAHAN WONOPLUMBON
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	225.000.000	225.000.000	KECAMATAN MIJEN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN BUBAKAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN CANGKIRAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN JATIBARANG
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN JATISARI
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN KARANGMALANG
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN KEDUNGPANE
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN MIJEN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN NGADIRGO
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN PESANTREN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN POLAMAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN PURWOSARI
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN TAMBANGAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN WONOLOPO
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN WONOPLUMBON
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	18	dokumen	11.774.800.000	11.774.800.000	KECAMATAN MIJEN
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	127.000.000	KECAMATAN MIJEN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	549.200.000	549.200.000	KELURAHAN BUBAKAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	889.400.000	889.400.000	KELURAHAN CANGKIRAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	459.800.000	459.800.000	KELURAHAN JATIBARANG
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	2.120.000.000	2.120.000.000	KELURAHAN JATISARI
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	378.800.000	378.800.000	KELURAHAN KARANGMALANG
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	896.600.000	896.600.000	KELURAHAN KEDUNGPANE
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	991.400.000	991.400.000	KELURAHAN MIJEN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	1.008.200.000	1.008.200.000	KELURAHAN NGADIRGO

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	876.800.000	876.800.000	KELURAHAN PESANTREN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	306.800.000	306.800.000	KELURAHAN POLAMAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	533.600.000	533.600.000	KELURAHAN PURWOSARI
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	420.200.000	420.200.000	KELURAHAN TAMBANGAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	1.199.600.000	1.199.600.000	KELURAHAN WONOLOPO
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	607.400.000	607.400.000	KELURAHAN WONOPLUMBON
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2	Laporan	410.000.000	410.000.000	KECAMATAN MIJEN
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20	Persen	49.500.000	49.500.000	KECAMATAN MIJEN
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	72	angka	49.500.000	49.500.000	KECAMATAN MIJEN
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	15	Laporan	49.500.000	49.500.000	KECAMATAN MIJEN
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95	Persen	92.000.000	92.000.000	KECAMATAN MIJEN
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2	kegiatan	92.000.000	92.000.000	KECAMATAN MIJEN
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100	Orang	92.000.000	92.000.000	KECAMATAN MIJEN
7.01.0.00.0.00.09.0000	KECAMATAN GENUK				58.393.568.071	56.862.177.213	
7.01	KECAMATAN				58.393.568.071	56.862.177.213	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00	Persen	21.160.717.052	18.877.046.743	KECAMATAN GENUK
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100	Persen			
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100	Persen			
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan- Kecamatan Genuk	5	dokumen	78.185.700	17.123.018	KECAMATAN GENUK
		Jumlah Dokumen pelaporan Keuangan SKPD - di Kecamatan Genuk	2	dokumen			
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	34.912.400	3.767.280	KECAMATAN GENUK
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	2.422.900	2.413.202	KECAMATAN GENUK
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	3.022.900	2.603.975	KECAMATAN GENUK
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	5.205.900	1.205.886	KECAMATAN GENUK
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	5.205.900	1.205.875	KECAMATAN GENUK
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	2.675.900	3.850.000	KECAMATAN GENUK
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	24.739.800	2.076.800	KECAMATAN GENUK
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pelaporan keuangan SKPD - di Kecamatan Genuk	6	dokumen	18.555.988.400	17.746.136.754	KECAMATAN GENUK
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD - di Kecamatan Genuk	100	persen			
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	Orang/bulan	17.926.611.000	17.124.816.274	KECAMATAN GENUK
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	624.120.000	616.000.000	KECAMATAN GENUK
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	2.936.200	1.375.000	KECAMATAN GENUK
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	1.797.400	2.750.000	KECAMATAN GENUK
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	523.800	1.195.480	KECAMATAN GENUK
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum - di Kecamatan Genuk	100	persen	753.262.472	467.617.293	KECAMATAN GENUK
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9	Paket	71.868.920	13.339.117	KECAMATAN GENUK
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	238.965.794	136.950.000	KECAMATAN GENUK
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35	Paket	53.653.660	28.523.176	KECAMATAN GENUK
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	23.429.540	8.415.000	KECAMATAN GENUK

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan	67.050.000	45.540.000	KECAMATAN GENUK
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	131.528.000	124.850.000	KECAMATAN GENUK
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6	Dokumen	166.766.558	110.000.000	KECAMATAN GENUK
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor - di Kecamatan Genuk	100	persen	520.833.740	5.500.000	KECAMATAN GENUK
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	Unit	520.833.740	5.500.000	KECAMATAN GENUK
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor - di Kecamatan Genuk	100	persen	291.967.540	251.137.678	KECAMATAN GENUK
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	150.902.700	175.237.678	KECAMATAN GENUK
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	141.064.840	75.900.000	KECAMATAN GENUK
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan aset SKPD - di Kecamatan Genuk	100	persen	960.479.200	389.532.000	KECAMATAN GENUK
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47	Unit	320.093.060	330.132.000	KECAMATAN GENUK
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	182.877.000	14.300.000	KECAMATAN GENUK
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9	Unit	266.932.000	33.000.000	KECAMATAN GENUK
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	190.577.140	12.100.000	KECAMATAN GENUK
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	93	Persen	3.259.461.720	3.898.363.870	KECAMATAN GENUK
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan - di Kecamatan Genuk	1	angka	96.498.070	71.868.500	KECAMATAN GENUK
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7	Dokumen	96.498.070	71.868.500	KECAMATAN GENUK
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Genuk	100	persen	2.144.341.210	2.144.355.570	KECAMATAN GENUK
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	1.169.341.210	1.169.355.570	KECAMATAN GENUK
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	79.000.000	79.000.000	KELURAHAN BANGETAYU WETAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	81.000.000	81.000.000	KELURAHAN BANGETAYU KULON
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	76.000.000	76.000.000	KELURAHAN GEBANGSARI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	76.000.000	76.000.000	KELURAHAN BANJARDOWO
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	76.000.000	76.000.000	KELURAHAN KUDU
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	79.000.000	79.000.000	KELURAHAN GENUKSARI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	84.000.000	84.000.000	KELURAHAN KARANGROTO
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	72.000.000	72.000.000	KELURAHAN PENGGARON LOR
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	78.000.000	78.000.000	KELURAHAN SEMBUNGHARJO
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	70.000.000	70.000.000	KELURAHAN MUKTIHARJO LOR
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	67.000.000	67.000.000	KELURAHAN TERBOYO KULON
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	67.000.000	67.000.000	KELURAHAN TERBOYO WETAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	70.000.000	70.000.000	KELURAHAN TRIMULYO
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat- di Kecamatan Genuk	100	persen	1.018.622.440
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan	1.018.622.440	1.682.139.800	KECAMATAN GENUK

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99	Persen	33.761.200.869	33.998.095.600	KECAMATAN GENUK
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - di Kecamatan Genuk	236	kegiatan	18.482.305.144	18.449.755.600	KECAMATAN GENUK
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8	Lembaga Kemasyarakatan	127.638.515	73.975.000	KECAMATAN GENUK
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13	Unit	1.125.000.000	750.394.700	KECAMATAN GENUK
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15	Unit	1.151.000.000	1.151.000.000	KELURAHAN BANGETAYU KULON
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13	Unit	1.255.000.000	1.255.000.000	KELURAHAN BANGETAYU WETAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15	Unit	2.019.000.000	2.019.000.000	KELURAHAN BANJARDOWO
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9	Unit	1.092.000.000	1.092.000.000	KELURAHAN GEBANGSARI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17	Unit	1.392.000.000	1.392.000.000	KELURAHAN GENUKSARI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15	Unit	1.339.000.000	1.339.000.000	KELURAHAN KARANGROTO
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8	Unit	1.197.000.000	1.197.000.000	KELURAHAN KUDU
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13	Unit	1.078.000.000	1.078.000.000	KELURAHAN MUKTIHARJO LOR
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17	Unit	1.058.000.000	1.058.000.000	KELURAHAN PENGGARON LOR
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15	Unit	1.171.000.000	1.171.000.000	KELURAHAN SEMBUNGHARJO
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN TERBOYO KULON
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9	Unit	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN TERBOYO WETAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	1.133.000.000	1.133.000.000	KELURAHAN TRIMULYO
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12	Pokmas / Ormas	794.666.629	1.190.385.900	KECAMATAN GENUK
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN BANGETAYU KULON
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN BANGETAYU WETAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN BANJARDOWO
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN GEBANGSARI
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN GENUKSARI
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN KARANGROTO
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN KUDU
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN MUKTIHARJO LOR
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN PENGGARON LOR
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN SEMBUNGHARJO
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN TERBOYO KULON
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN TERBOYO WETAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN TRIMULYO

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - di Kecamatan Genuk	11	angka	15.278.895.725	15.548.340.000	KECAMATAN GENUK
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyarakatan	117.000.000	162.140.000	KECAMATAN GENUK
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12	Lembaga Kemasyarakatan	2.057.600.000	2.057.600.000	KELURAHAN BANGETAYU KULON
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12	Lembaga Kemasyarakatan	1.592.600.000	1.592.600.000	KELURAHAN BANGETAYU WETAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12	Lembaga Kemasyarakatan	1.214.000.000	1.214.000.000	KELURAHAN BANJARDOWO
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12	Lembaga Kemasyarakatan	1.214.000.000	1.214.000.000	KELURAHAN GEBANGSARI
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12	Lembaga Kemasyarakatan	1.663.400.000	1.663.400.000	KELURAHAN GENUKSARI
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12	Lembaga Kemasyarakatan	2.189.600.000	2.189.600.000	KELURAHAN KARANGROTO
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12	Lembaga Kemasyarakatan	1.299.200.000	1.299.200.000	KELURAHAN KUDU
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12	Lembaga Kemasyarakatan	580.400.000	580.400.000	KELURAHAN MUKTIHARJO LOR
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12	Lembaga Kemasyarakatan	838.400.000	838.400.000	KELURAHAN PENGGARON LOR
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12	Lembaga Kemasyarakatan	1.432.400.000	1.432.400.000	KELURAHAN SEMBUNGHARJO
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12	Lembaga Kemasyarakatan	240.200.000	240.200.000	KELURAHAN TERBOYO KULON
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12	Lembaga Kemasyarakatan	271.400.000	271.400.000	KELURAHAN TERBOYO WETAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12	Lembaga Kemasyarakatan	498.200.000	498.200.000	KELURAHAN TRIMULYO
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3	Laporan	70.495.725	294.800.000	KECAMATAN GENUK
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20	Persen	109.662.510	36.971.000	KECAMATAN GENUK
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penurunan Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani - di Kecamatan Genuk	26.5	persen	109.662.510	36.971.000	KECAMATAN GENUK
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	Laporan	109.662.510	36.971.000	KECAMATAN GENUK
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95	Persen	102.525.920	51.700.000	KECAMATAN GENUK
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan- di Kecamatan Genuk	6	angka	102.525.920	51.700.000	KECAMATAN GENUK
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	300	Orang	102.525.920	51.700.000	KECAMATAN GENUK
7.01.0.00.0.00.10.0000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR				33.815.043.611	36.977.926.000	
7.01	KECAMATAN				33.815.043.611	36.977.926.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100	Persen	13.639.308.611	13.829.821.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100	Persen			
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100	Persen			
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan	12	Dokumen	85.050.000	85.050.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	35.345.000	35.345.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	4.770.000	4.770.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	6.780.000	6.780.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	3.220.000	3.220.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	4.100.000	4.100.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	2.250.000	2.250.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	28.585.000	28.585.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100	Persen	12.362.561.000	12.366.311.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73	Orang/bulan	11.903.051.000	11.903.051.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	452.420.000	452.420.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	2.590.000	2.590.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan	2.250.000	6.000.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	2.250.000	2.250.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100	Persen	517.590.000	571.090.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9	Paket	5.925.000	5.925.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket	126.690.000	126.690.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	60.500.000	80.000.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6	Paket	14.935.000	14.935.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	14.000.000	14.000.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	173.040.000	173.040.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	Dokumen	122.500.000	156.500.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	Persen	80.070.000	80.070.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	Unit	80.070.000	80.070.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100	Persen	274.400.000	292.300.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	207.300.000	207.300.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	67.100.000	85.000.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100	Persen	319.637.611	435.000.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	Unit	165.000.000	165.000.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	70.722.611	150.000.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	45.000.000	60.000.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	38.915.000	60.000.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	95	Persen	2.875.855.000	2.972.055.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1	Angka	38.935.000	41.435.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	Dokumen	38.935.000	41.435.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100	Persen	1.646.920.000	1.740.620.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	1.067.920.000	1.067.920.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	70.000.000	70.000.000	KELURAHAN BENDAN DUWUR
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	70.000.000	70.000.000	KELURAHAN BENDAN NGISOR
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	70.000.000	90.000.000	KELURAHAN BENDUNGAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	80.000.000	88.000.000	KELURAHAN GAJAHMUNGKUR
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	71.000.000	84.700.000	KELURAHAN KARANGREJO
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	72.000.000	90.000.000	KELURAHAN LEMPONGSARI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	72.000.000	90.000.000	KELURAHAN PETOMPON
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	74.000.000	90.000.000	KELURAHAN SAMPANGAN
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	Persen	1.190.000.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan	1.190.000.000	1.190.000.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98	Persen	17.135.960.000	20.012.130.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	272	Kegiatan	9.573.760.000	16.615.730.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4	Lembaga Kemasyarakatan	51.040.000	62.500.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7	Unit	1.050.000.000	1.801.280.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8	Unit	950.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN BENDAN DUWUR
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13	Unit	950.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN BENDAN NGISOR
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	950.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN BENDUNGAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	Unit	963.000.000	963.000.000	KELURAHAN GAJAHMUNGKUR
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13	Unit	950.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN KARANGREJO
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	950.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN LEMPONGSARI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	Unit	950.000.000	100.000.000	KELURAHAN PETOMPON
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	950.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN SAMPANGAN
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	459.720.000	465.750.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	124	Pokmas / Ormas	50.000.000	720.200.000	KELURAHAN BENDAN DUWUR
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	122	Pokmas / Ormas	50.000.000	716.000.000	KELURAHAN BENDAN NGISOR
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	119	Pokmas / Ormas	50.000.000	703.400.000	KELURAHAN BENDUNGAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	123	Pokmas / Ormas	50.000.000	1.522.400.000	KELURAHAN GAJAHMUNGKUR
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	119	Pokmas / Ormas	50.000.000	783.200.000	KELURAHAN KARANGREJO

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	125	Pokmas / Ormas	50.000.000	858.800.000	KELURAHAN LEMPONGSARI
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	119	Pokmas / Ormas	50.000.000	829.400.000	KELURAHAN PETOMPON
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	120	Pokmas / Ormas	50.000.000	1.089.800.000	KELURAHAN SAMPANGAN
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya	4	Dokumen	7.562.200.000	3.396.400.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	174.000.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8	Lembaga Kemasyarakatan	678.200.000	703.200.000	KELURAHAN BENDAN DUWUR
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8	Lembaga Kemasyarakatan	674.000.000	0	KELURAHAN BENDAN NGISOR
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8	Lembaga Kemasyarakatan	658.400.000	0	KELURAHAN BENDUNGAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8	Lembaga Kemasyarakatan	1.669.400.000	1.669.400.000	KELURAHAN GAJAHMUNGKUR
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8	Lembaga Kemasyarakatan	756.200.000	0	KELURAHAN KARANGREJO
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8	Lembaga Kemasyarakatan	849.800.000	849.800.000	KELURAHAN LEMPONGSARI
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8	Lembaga Kemasyarakatan	814.400.000	0	KELURAHAN PETOMPON
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8	Lembaga Kemasyarakatan	1.134.800.000	0	KELURAHAN SAMPANGAN
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	8	Laporan	200.000.000	0	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20	Persen	83.150.000	83.150.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	30.00	Angka	83.150.000	83.150.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	83.150.000	83.150.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	90	Persen	80.770.000	80.770.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	14	Kegiatan	80.770.000	80.770.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100	Orang	80.770.000	80.770.000	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
7.01.0.00.0.00.11.0000	KECAMATAN TEMBALANG				65.831.788.734	62.315.494.000	
7.01	KECAMATAN				65.831.788.734	62.315.494.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00	Persen	19.939.835.067	15.225.194.000	KECAMATAN TEMBALANG
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100	Persen			
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100	Persen			
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokuman pelaporan - Kec Tembalang	3	dokumen	58.204.700	30.725.000	KECAMATAN TEMBALANG
		Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan - Kec Tembalang	6	dokumen			
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	29.300.000	1.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1.590.100	12.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	2.234.900	4.542.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	1.417.700	4.649.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1.830.100	4.434.000	KECAMATAN TEMBALANG

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	448.600	550.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	21.383.300	3.550.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan keuangan SKPD - Kec Tembalang	3	dokumen	15.842.264.600	13.374.863.000	KECAMATAN TEMBALANG
		Persentase administrasi keuangan SKPD - Kec Tembalang	100	persen			
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85	Orang/bulan	15.226.656.000	12.725.543.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	614.600.000	640.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	336.200	7.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan	336.200	1.160.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	336.200	1.160.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum - Kec Tembalang	100	persen	2.674.961.387	1.043.606.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11	Paket	50.339.593	15.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	1.392.689.624	200.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	26	Paket	26.660.407	40.106.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	9.866.213	40.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan	200.000.000	148.500.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	260.000.000	200.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3	Dokumen	735.405.550	400.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	%	89.170.380	100.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15	Unit	89.170.380	100.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor - Kec Tembalang	100	persen	496.000.000	199.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	237.000.000	134.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	259.000.000	65.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100	%	779.234.000	477.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28	Unit	155.214.000	177.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	520.000.000	200.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	50.000.000	50.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	54.020.000	50.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92	Persen	4.124.103.667	3.438.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan - Kec Tembalang	1	angka	309.500.000	100.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	Dokumen	309.500.000	100.000.000	KECAMATAN TEMBALANG

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan - Kec Tembalang	100	persen	2.575.358.592	2.336.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	1.480.358.592	1.320.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	87.000.000	80.000.000	KELURAHAN KEDUNGUMUNDU
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	82.000.000	80.000.000	KELURAHAN JANGLI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	83.000.000	80.000.000	KELURAHAN BULUSAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	89.000.000	80.000.000	KELURAHAN MANGUNHARJO
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	80.000.000	80.000.000	KELURAHAN KRAMAS
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	83.000.000	80.000.000	KELURAHAN ROWOSARI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	91.000.000	81.000.000	KELURAHAN SAMBIROTO
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	108.000.000	98.000.000	KELURAHAN METESEH
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	121.000.000	111.000.000	KELURAHAN SENDANGMULYO
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	94.000.000	80.000.000	KELURAHAN SENDANGGUWO
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	96.000.000	86.000.000	KELURAHAN TANDANG
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	81.000.000	80.000.000	KELURAHAN TEMBALANG
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat - Kec Tembalang	100	persen	1.239.245.075	1.002.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3	Laporan	1.239.245.075	1.002.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99	Persen	41.577.800.000	43.377.300.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan - Kec Tembalang	305	kegiatan	17.785.000.000	20.012.300.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6	Lembaga Kemasyarakatan	178.000.000	81.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7	Unit	1.275.000.000	2.856.400.000	KECAMATAN TEMBALANG
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9	Unit	950.000.000	1.046.000.000	KELURAHAN BULUSAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18	Unit	950.000.000	1.046.000.000	KELURAHAN JANGLI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	950.000.000	1.046.000.000	KELURAHAN KEDUNGUMUNDU
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	Unit	950.000.000	1.046.000.000	KELURAHAN KRAMAS
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15	Unit	950.000.000	1.046.000.000	KELURAHAN MANGUNHARJO
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	23	Unit	1.501.000.000	1.800.000.000	KELURAHAN METESEH
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	21	Unit	2.261.000.000	1.220.000.000	KELURAHAN ROWOSARI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	950.000.000	1.046.000.000	KELURAHAN SAMBIROTO
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15	Unit	1.309.000.000	1.422.000.000	KELURAHAN SENDANGGUWO
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20	Unit	1.901.000.000	2.040.900.000	KELURAHAN SENDANGMULYO
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15	Unit	1.635.000.000	1.740.000.000	KELURAHAN TANDANG

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9	Unit	950.000.000	1.046.000.000	KELURAHAN TEMBALANG
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	475.000.000	930.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN BULUSAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN KEDUNG MUNDU
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN JANGLI
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN KRAMAS
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN MANGUNHARJO
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN METESEH
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN ROWOSARI
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN SAMBIROTO
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN SENDANGGUWO
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN SENDANGMULYO
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN TANDANG
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN TEMBALANG
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec Tembalang	9	dokumen	23.792.800.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	110.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	956.000.000	969.000.000	KELURAHAN BULUSAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	10	Lembaga Kemasyarakatan	908.000.000	933.000.000	KELURAHAN JANGLI
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	1.439.600.000	1.464.600.000	KELURAHAN KEDUNG MUNDU
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	658.400.000	687.600.000	KELURAHAN KRAMAS
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	1.662.200.000	1.609.200.000	KELURAHAN MANGUNHARJO
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	3.840.800.000	3.840.800.000	KELURAHAN METESEH
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	1.174.400.000	1.174.400.000	KELURAHAN ROWOSARI
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	1.928.600.000	1.953.600.000	KELURAHAN SAMBIROTO
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	2.161.400.000	2.186.400.000	KELURAHAN SENDANGGUWO
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	5.183.600.000	5.183.600.000	KELURAHAN SENDANGMULYO
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	2.349.800.000	2.374.800.000	KELURAHAN TANDANG
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	803.000.000	828.000.000	KELURAHAN TEMBALANG
		7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3	Laporan	600.000.000

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20	Persen	60.000.000	200.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	35	Angka	60.000.000	200.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	60.000.000	200.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	75	Persen	130.050.000	75.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional bagi organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan - Kec Tembalang	3	kegiatan	130.050.000	75.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	150	Orang	130.050.000	75.000.000	KECAMATAN TEMBALANG
7.01.0.00.0.00.12.0000	KECAMATAN CANDISARI				32.172.395.692	33.441.457.000	
7.01	KECAMATAN				32.172.395.692	33.441.457.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00	Persen	10.864.115.794	10.481.954.000	KECAMATAN CANDISARI
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100	Persen			
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100	Persen			
		Persentase Perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100.00	Persen			
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan - Kec.Candisari	2	dokumen	77.106.200	55.250.000	KECAMATAN CANDISARI
		Jumlah Dokumen pelaporan - Kec.Candisari	100	persen			
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	31.636.400	7.750.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	3.556.200	7.750.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	4.098.900	7.750.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	4.034.900	7.750.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	4.098.900	7.750.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Laporan	2.660.000	3.750.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	27.020.900	12.750.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan SKPD - Kec.Candisari	100	persen	9.360.600.600	8.791.372.684	KECAMATAN CANDISARI
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD - Kec. Candisari	3	dokumen			
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53	Orang/bulan	8.973.962.000	8.306.872.684	KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	500	Dokumen	380.380.000	465.000.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	2.436.200	6.500.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	Laporan	2.548.600	6.500.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	1.273.800	6.500.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Cakupan pelaksanaan administrasi umum - Kec. Candisari	100	persen	636.487.709	597.500.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	21.898.990	75.000.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	Paket	156.074.214	87.500.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	52.967.990	67.500.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	12.886.192	7.500.000	KECAMATAN CANDISARI

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan	62.750.000	55.000.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	74.154.000	75.000.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	Dokumen	255.756.323	230.000.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor - Kec.Candisari	100	persen	2.989.241	20.000.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30	Unit	2.989.241	20.000.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor - Kec.Candisari	100	persen	319.876.204	210.781.271	KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	191.169.104	190.781.271	KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	128.707.100	20.000.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah - Kec.Candisari	100	persen	467.055.840	807.050.045	KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	Unit	183.979.620	517.240.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	190.000.000	199.810.045	KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	500	Unit	29.327.590	45.000.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	Unit	63.748.630	45.000.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	93	Persen	2.681.453.414	2.869.703.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan an kelurahan - Kec.Candisari	1	angka	22.300.000	200.000.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	Dokumen	22.300.000	200.000.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan - Kec.Candisari	100	persen	1.732.749.804	1.691.104.832	KECAMATAN CANDISARI
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	1.365.249.804	1.166.104.832	KECAMATAN CANDISARI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	51.800.000	75.000.000	KELURAHAN JATINGALEH
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	53.200.000	75.000.000	KELURAHAN CANDI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	58.100.000	75.000.000	KELURAHAN JOMBLANG
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	47.600.000	75.000.000	KELURAHAN KALIWIRU
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	50.400.000	75.000.000	KELURAHAN KARANGANYAR GUNUNG
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	56.000.000	75.000.000	KELURAHAN TEGALSARI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	50.400.000	75.000.000	KELURAHAN WONOTINGAL
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - Kec.Candisari	100	persen	926.403.610	978.598.168	KECAMATAN CANDISARI
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan	926.403.610	978.598.168	KECAMATAN CANDISARI

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Kecamatan Candisari)	100	Persen	18.483.988.920	19.939.800.000	KECAMATAN CANDISARI
		Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99	Persen			
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Candisari	80	kegiatan	9.115.753.970	18.314.800.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4	Lembaga Kemasyarakatan	33.875.460	25.000.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7	Unit	1.230.000.000	1.635.161.034	KECAMATAN CANDISARI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13	Unit	950.000.000	1.007.763.572	KELURAHAN CANDI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14	Unit	950.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN JATINGALEH
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	22	Unit	1.463.000.000	1.400.000.000	KELURAHAN JOMBLANG
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	950.000.000	1.032.763.572	KELURAHAN KALIWIRU
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	972.000.000	1.015.948.250	KELURAHAN KARANGANYAR GUNUNG
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17	Unit	996.000.000	1.028.763.572	KELURAHAN TEGALSARI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14	Unit	950.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN WONOTINGAL
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	270.878.510	373.363.224	KECAMATAN CANDISARI
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	1.340.000.000	KELURAHAN CANDI
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	1.180.000.000	KELURAHAN JATINGALEH
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	2.020.836.776	KELURAHAN JOMBLANG
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	623.000.000	KELURAHAN KALIWIRU
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	996.000.000	KELURAHAN KARANGANYAR GUNUNG
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	1.677.200.000	KELURAHAN TEGALSARI
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15	Pokmas / Ormas	50.000.000	959.000.000	KELURAHAN WONOTINGAL
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Candisari	6	kegiatan	9.368.234.950	1.625.000.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	0	KECAMATAN CANDISARI
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyarakatan	1.209.800.000	175.000.000	KELURAHAN JATINGALEH
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyarakatan	1.385.600.000	175.000.000	KELURAHAN CANDI
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyarakatan	2.280.200.000	175.000.000	KELURAHAN JOMBLANG
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyarakatan	545.000.000	175.000.000	KELURAHAN KALIWIRU
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyarakatan	1.005.800.000	175.000.000	KELURAHAN KARANGANYAR GUNUNG
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyarakatan	1.842.200.000	175.000.000	KELURAHAN TEGALSARI
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyarakatan	959.000.000	175.000.000	KELURAHAN WONOTINGAL
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2	Laporan	13.634.950	400.000.000	KECAMATAN CANDISARI

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20	Persen	53.268.650	100.000.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani - Kec.Candisari	42	angka	53.268.650	100.000.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	53.268.650	100.000.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95	Persen	89.568.914	50.000.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan - Kec.Candisari	2	kegiatan	89.568.914	50.000.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50	Orang	89.568.914	50.000.000	KECAMATAN CANDISARI
7.01.0.00.0.00.13.0000	KECAMATAN BANYUMANIK				52.367.810.941	55.279.000.000	
7.01	KECAMATAN				52.367.810.941	55.279.000.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00	Persen	18.269.516.930	18.696.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100.00	Persen			
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100	Persen			
		OPD yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	43.00	OPD			
		Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan elektronik	100.00	Persen			
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100	Persen			
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan Kec.Banyumanik	7	Dokumen	60.887.461	12.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
		Jumlah Dokumen pelaporan Kec.Banyumanik	2	Dokumen			
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	31.357.072	5.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1.000.000	1.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1.000.000	1.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	1.000.000	1.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1.000.000	1.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Laporan	2.490.600	1.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	23.039.789	2.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD Kec.Banyumanik	3	Dokumen	15.590.404.100	16.483.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD Kec.Banyumanik	100	persen			
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD Kec.Banyumanik	100	Persen			
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	93	Orang/bulan	15.003.488.000	15.900.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3	Dokumen	581.640.000	580.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1.758.700	1.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	1.758.700	1.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	1.758.700	1.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum Kec.Banyumanik	100	Persen	1.080.033.448	1.151.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7	Paket	14.911.219	1.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	44.840.524	580.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	Paket	60.000.000	70.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	23.000.000	25.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7	Laporan	6.500.000	95.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15	Laporan	303.765.000	230.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	Dokumen	627.016.705	150.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Kec.Banyumanik	100	Persen	653.674.466	300.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	Unit	653.674.466	300.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor Kec.Banyumanik	100	Persen	308.491.223	265.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	131.000.000	135.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Laporan	85.641.223	85.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	91.850.000	45.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Kec.Banyumanik	100	Persen	576.026.232	485.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27	Unit	246.170.000	235.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	279.856.232	190.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	30.000.000	30.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	20.000.000	30.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	93	Persen	2.978.844.011	3.047.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan Kec.Banyumanik	1	Angka	32.800.000	80.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	Dokumen	32.800.000	80.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Kec.Banyumanik	100	Persen	1.888.061.011	1.867.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	1.027.061.011	1.000.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	74.000.000	75.000.000	KELURAHAN BANYUMANIK
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	76.000.000	77.000.000	KELURAHAN GEDAWANG
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	79.000.000	80.000.000	KELURAHAN NGESREP
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	70.000.000	71.000.000	KELURAHAN JABUNGAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	77.000.000	78.000.000	KELURAHAN PEDALANGAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	82.000.000	83.000.000	KELURAHAN PADANGSARI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	89.000.000	90.000.000	KELURAHAN PUDAKPAYUNG
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	76.000.000	77.000.000	KELURAHAN SRONDOL KULON
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	87.000.000	88.000.000	KELURAHAN SRONDOL WETAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	78.000.000	74.000.000	KELURAHAN SUMURBOTO
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	73.000.000	74.000.000	KELURAHAN TINJOMOYO
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Kec.Banyumanik	100	Persen	1.057.983.000	1.100.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan	1.057.983.000	1.100.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99	Persen	30.928.850.000	33.306.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kec.Banyumanik	453	Kegiatan	13.735.500.000	15.766.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9	Lembaga Kemasyarakatan	46.500.000	90.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	200	Unit	1.050.000.000	1.080.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	Unit	950.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN BANYUMANIK
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14	Unit	950.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN GEDAWANG
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15	Unit	1.353.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN JABUNGAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	Unit	1.026.000.000	1.030.000.000	KELURAHAN NGESREP
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14	Unit	950.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN PADANGSARI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	950.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN PEDALANGAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16	Unit	1.267.000.000	1.300.000.000	KELURAHAN PUDAKPAYUNG
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	Unit	1.050.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN SRONDOL KULON
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	19	Unit	1.220.000.000	1.250.000.000	KELURAHAN SRONDOL WETAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	Unit	950.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN SUMURBOTO
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	Unit	973.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN TINJOMOYO
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12	Pokmas / Ormas	450.000.000	1.080.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9	Pokmas / Ormas	50.000.000	176.000.000	KELURAHAN BANYUMANIK
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16	Pokmas / Ormas	50.000.000	176.000.000	KELURAHAN GEDAWANG
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16	Pokmas / Ormas	50.000.000	176.000.000	KELURAHAN JABUNGAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16	Pokmas / Ormas	50.000.000	176.000.000	KELURAHAN NGESREP
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16	Pokmas / Ormas	50.000.000	176.000.000	KELURAHAN PADANGSARI
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16	Pokmas / Ormas	50.000.000	176.000.000	KELURAHAN PEDALANGAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16	Pokmas / Ormas	50.000.000	176.000.000	KELURAHAN PUDAKPAYUNG
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16	Pokmas / Ormas	50.000.000	176.000.000	KELURAHAN SRONDOL KULON
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16	Pokmas / Ormas	50.000.000	176.000.000	KELURAHAN SRONDOL WETAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16	Pokmas / Ormas	50.000.000	176.000.000	KELURAHAN SUMURBOTO

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16	Pokmas / Ormas	50.000.000	176.000.000	KELURAHAN TINJOMOYO
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Kec.Banyumanik	5	Dokumen	17.193.350.000	17.540.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	137.000.000	180.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	1.163.000.000	1.190.000.000	KELURAHAN BANYUMANIK
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	1.405.400.000	1.420.000.000	KELURAHAN GEDAWANG
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	749.000.000	780.000.000	KELURAHAN JABUNGAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	1.643.600.000	1.670.000.000	KELURAHAN NGESREP
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	1.968.200.000	2.000.000.000	KELURAHAN PADANGSARI
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	1.373.000.000	1.400.000.000	KELURAHAN PEDALANGAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	2.825.600.000	2.850.000.000	KELURAHAN PUDAKPAYUNG
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	1.401.200.000	1.430.000.000	KELURAHAN SRONDOL KULON
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	2.543.600.000	2.570.000.000	KELURAHAN SRONDOL WETAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	927.800.000	960.000.000	KELURAHAN SUMURBOTO
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	983.000.000	1.010.000.000	KELURAHAN TINJOMOYO
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1	Laporan	72.950.000	80.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20	Persen	50.400.000	55.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani Kec.Banyumanik	30	Angka	50.400.000	55.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	50.400.000	55.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95	Persen	140.200.000	175.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan Kec.Banyumanik	2	Kegiatan	140.200.000	175.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200	Orang	140.200.000	175.000.000	KECAMATAN BANYUMANIK
7.01.0.00.0.00.14.0000	KECAMATAN NGALIYAN				54.011.025.887	57.175.006.000	
7.01	KECAMATAN				54.011.025.887	57.175.006.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00	Persen	18.818.144.480	16.999.650.000	KECAMATAN NGALIYAN
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00	Persen			
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00	Persen			
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan - Kec. Ngaliyan	5.00	dokumen	74.884.400	25.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
		Jumlah Dokumen pelaporan - Kec. Ngaliyan	2.00	dokumen			
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	31.404.400	6.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	4.086.000	3.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	5.036.000	3.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	2.362.000	3.000.000	KECAMATAN NGALIYAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	3.012.000	3.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	2.449.600	4.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	26.534.400	3.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD - Kec. Ngaliyan	4.00	dokumen	14.764.412.000	12.216.203.000	KECAMATAN NGALIYAN
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD - Kec. Ngaliyan	100.00	persen			
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86	Orang/bulan	14.174.830.000	11.704.903.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	586.020.000	500.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1.224.800	4.300.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	Laporan	1.224.800	3.600.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	1.112.400	3.400.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum - Kec. Ngaliyan	100.00	persen	1.719.049.767	1.712.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	18.000.000	20.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket	1.008.873.340	750.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	43.062.299	60.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6	Paket	17.184.000	15.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	20.350.000	67.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	105.534.000	0	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	506.046.128	800.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor - Kec. Ngaliyan	100.00	persen	880.854.131	625.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	Unit	880.854.131	625.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor - Kec. Ngaliyan	100.00	persen	315.645.000	361.447.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	155.360.000	191.447.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	160.285.000	170.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD - Kec. Ngaliyan	100.00	persen	1.063.299.182	2.060.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24	Unit	156.503.340	210.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	260.000.000	800.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	246.795.842	150.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	400.000.000	900.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	93	Persen	3.004.622.328	4.125.756.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan - Kec. Ngaliyan	1.00	Angka	108.760.520	250.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	Dokumen	108.760.520	250.000.000	KECAMATAN NGALIYAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan	100.00	persen	1.651.852.202	2.600.756.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	1.001.852.202	1.600.756.000	KECAMATAN NGALIYAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	65.000.000	100.000.000	KELURAHAN BAMBANKEREP
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	65.000.000	100.000.000	KELURAHAN GONDORIYO
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	65.000.000	100.000.000	KELURAHAN BRINGIN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	65.000.000	100.000.000	KELURAHAN KALIPANCUR
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	65.000.000	100.000.000	KELURAHAN NGALIYAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	65.000.000	100.000.000	KELURAHAN PODOREJO
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	65.000.000	100.000.000	KELURAHAN WATES
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	65.000.000	100.000.000	KELURAHAN PURWOYOSO
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	65.000.000	100.000.000	KELURAHAN WONOSARI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	65.000.000	100.000.000	KELURAHAN TAMBAKAJI
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - Kec. Ngaliyan	100.00	persen	1.244.009.606	1.275.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan	1.244.009.606	1.275.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99	Persen	32.025.262.879	35.679.600.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan	236.00	kegiatan	13.608.665.499	31.027.200.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7	Lembaga Kemasyarakatan	58.943.690	55.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13	Unit	1.074.000.000	1.124.000.000	KELURAHAN BRINGIN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16	Unit	950.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN GONDORIYO
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	Unit	950.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN NGALIYAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	Unit	1.153.000.000	1.179.000.000	KELURAHAN PURWOYOSO
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15	Unit	1.253.000.000	1.303.000.000	KELURAHAN TAMBAKAJI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	21	Unit	1.933.000.000	1.461.000.000	KELURAHAN WONOSARI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13	Unit	950.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN BAMBANKEREP
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13	Unit	1.154.000.000	1.186.000.000	KELURAHAN KALIPANCUR
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13	Unit	950.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN PODOREJO
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14	Unit	1.034.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN WATES
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8	Unit	1.275.000.000	2.725.800.000	KECAMATAN NGALIYAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas / Ormas	50.000.000	2.484.200.000	KELURAHAN BRINGIN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas / Ormas	50.000.000	1.274.600.000	KELURAHAN GONDORIYO
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas / Ormas	50.000.000	1.577.000.000	KELURAHAN NGALIYAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas / Ormas	50.000.000	1.673.600.000	KELURAHAN PURWOYOSO
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas / Ormas	50.000.000	2.127.000.000	KELURAHAN TAMBAKAJI
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000	2.219.600.000	KELURAHAN WONOSARI
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas / Ormas	50.000.000	779.000.000	KELURAHAN BAMBANKEREP
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas / Ormas	50.000.000	1.224.200.000	KELURAHAN PODOREJO
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas / Ormas	50.000.000	2.051.200.000	KELURAHAN KALIPANCUR
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas / Ormas	50.000.000	863.000.000	KELURAHAN WATES
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3	Pokmas / Ormas	373.721.809	720.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan	8.00	dokumen	18.416.597.380
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	749.000.000	0	KELURAHAN BAMBANKEREP
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyarakatan	115.000.000	134.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	2.875.400.000	2.869.200.000	KELURAHAN BRINGIN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	1.374.200.000	1.399.200.000	KELURAHAN GONDORIYO
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	2.334.200.000	0	KELURAHAN KALIPANCUR
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	1.296.200.000	0	KELURAHAN PODOREJO
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	1.748.600.000	0	KELURAHAN NGALIYAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	1.878.800.000	0	KELURAHAN PURWOYOSO
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	2.394.200.000	0	KELURAHAN TAMBAKAJI
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	1.010.000.000	0	KELURAHAN WATES
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	2.513.600.000	0	KELURAHAN WONOSARI
		7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3	Laporan	127.397.380
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20	Persen	81.896.200	175.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani - Kec. Ngaliyan	30.00	Angka	81.896.200	175.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3	Laporan	81.896.200	175.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95	Persen	81.100.000	195.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan - Kec. Ngaliyan	3.00	kegiatan	81.100.000	195.000.000	KECAMATAN NGALIYAN
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200	Orang	81.100.000	195.000.000	KECAMATAN NGALIYAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.0.00.0.00.15.0000	KECAMATAN GAYAMSARI				32.917.700.142	33.328.614.628	
7.01	KECAMATAN				32.917.700.142	33.328.614.628	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00	Persen	11.842.642.928	11.608.876.400	KECAMATAN GAYAMSARI
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00	Persen			
		Persentase Kerja Administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00	Persen			
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	5	Dokumen	55.003.000	25.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
		Jumlah Dokumen Pelaporan	2	Dokumen			
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	29.223.800	6.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1.037.900	3.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	838.900	3.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	1.037.900	3.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1.257.400	3.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	223.800	4.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	21.383.300	3.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3	Dokumen	10.984.844.400	9.728.522.027	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	Orang/bulan	10.624.923.000	9.683.155.627	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	359.250.000	37.366.400	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	223.800	4.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	Laporan	223.800	2.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	223.800	2.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100	Persen	325.957.628	1.009.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	Paket	12.345.090	10.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	Paket	54.894.680	275.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	Paket	35.520.100	50.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6	Paket	10.169.309	14.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	100	Laporan	10.000.000	60.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	Laporan	83.430.000	200.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10	Dokumen	119.598.449	400.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	Persen	11.958.430	50.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	Unit	11.958.430	50.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100	Persen	176.541.360	176.154.373	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	154.296.000	126.154.373	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Laporan	22.245.360	50.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100	Persen	288.338.110	620.200.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	Unit	105.310.000	10.200.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	74.844.460	500.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	15.587.450	70.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	92.596.200	40.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	93	Persen	2.255.608.214	2.369.267.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	8	Angka	19.450.000	2.250.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	Dokumen	19.450.000	2.250.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	Persen	1.471.330.036	1.567.017.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	1.065.330.036	867.017.000	KECAMATAN GAYAMSARI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	65.000.000	100.000.000	KELURAHAN GAYAMSARI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	55.000.000	100.000.000	KELURAHAN PANDEAN LAMPER
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	55.000.000	100.000.000	KELURAHAN KALIGAWA
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	65.000.000	100.000.000	KELURAHAN SAMBIREJO
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	55.000.000	100.000.000	KELURAHAN SIWALAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	56.000.000	100.000.000	KELURAHAN SAWAH BESAR
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	55.000.000	100.000.000	KELURAHAN TAMBAKREJO
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	Persen	764.828.178	800.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan	764.828.178	800.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99	Persen	18.727.449.000	19.254.871.228	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	80	Angka	9.387.415.050	9.762.860.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5	Lembaga Kemasyarakatan	36.986.000	25.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9	Unit	1.275.000.000	1.200.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14	Unit	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN GAYAMSARI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14	Unit	1.218.000.000	950.000.000	KELURAHAN KALIGAWA
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9	Unit	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN PANDEAN LAMPER
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	1.169.000.000	950.000.000	KELURAHAN SAMBIREJO

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	950.000.000	950.000.000	KELURAHAN SAWAH BESAR
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	Unit	964.000.000	950.000.000	KELURAHAN SIWALAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	Unit	1.291.000.000	1.063.000.000	KELURAHAN TAMBAKREJO
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9	Pokmas / Ormas	233.429.050	724.860.000	KECAMATAN GAYAMSARI
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9	Pokmas / Ormas	50.000.000	150.000.000	KELURAHAN GAYAMSARI
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9	Pokmas / Ormas	50.000.000	150.000.000	KELURAHAN KALIGAWA
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9	Pokmas / Ormas	50.000.000	150.000.000	KELURAHAN PANDEAN LAMPER
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9	Pokmas / Ormas	50.000.000	150.000.000	KELURAHAN SAMBIREJO
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9	Pokmas / Ormas	50.000.000	150.000.000	KELURAHAN SAWAH BESAR
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9	Pokmas / Ormas	50.000.000	150.000.000	KELURAHAN SIWALAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9	Pokmas / Ormas	50.000.000	150.000.000	KELURAHAN TAMBAKREJO
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	768	Angka	9.340.033.950	9.492.011.228	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	174.000.000	KECAMATAN GAYAMSARI
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7	Lembaga Kemasyarakatan	1.354.400.000	1.379.400.000	KELURAHAN GAYAMSARI
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7	Lembaga Kemasyarakatan	1.506.200.000	1.515.600.000	KELURAHAN KALIGAWA
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7	Lembaga Kemasyarakatan	1.982.600.000	2.007.600.000	KELURAHAN PANDEAN LAMPER
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7	Lembaga Kemasyarakatan	1.096.400.000	1.121.400.000	KELURAHAN SAMBIREJO
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7	Lembaga Kemasyarakatan	1.147.400.000	1.172.400.000	KELURAHAN SAWAH BESAR
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7	Lembaga Kemasyarakatan	779.000.000	804.000.000	KELURAHAN SIWALAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7	Lembaga Kemasyarakatan	1.127.600.000	1.152.600.000	KELURAHAN TAMBAKREJO
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4	Laporan	219.433.950	165.011.228	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20	Persen	18.200.000	18.850.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	20	Angka	18.200.000	18.850.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	18.200.000	18.850.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95	Persen	73.800.000	76.750.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	6	Kegiatan	73.800.000	76.750.000	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50	Orang	73.800.000	76.750.000	KECAMATAN GAYAMSARI

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.0.00.0.00.16.0000	KECAMATAN PEDURUNGAN				61.420.879.401	67.222.508.675	
7.01	KECAMATAN				61.420.879.401	67.222.508.675	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD (Pedurungan)	100.00	Persen	18.940.208.588	20.476.908.675	KECAMATAN PEDURUNGAN
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD (Pedurungan)	100	Persen			
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD (Pedurungan)	100	Persen			
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan-Pedurungan	5	dokumen	71.097.200	90.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
		jumlah dokumen pelaporan-Pedurungan	2	dokumen			
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	27.808.000	60.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	3.921.900	5.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	3.921.900	6.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	3.246.900	4.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	3.246.900	5.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	2.154.400	5.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	26.797.200	5.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah dokumen pelaporan SKPD-Pedurungan	4	dokumen	17.062.986.000	17.646.908.675	KECAMATAN PEDURUNGAN
		persentase administrasikeuangan SKPD-Pedurungan	100	persen			
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	104	Orang/bulan	16.494.410.000	16.981.908.675	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	561.440.000	650.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	981.000	5.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	Laporan	5.324.000	5.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	831.000	5.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	cakupan pelaksanaan administrasi umum-Pedurungan	100	persen	923.574.256	1.390.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	25.000.000	30.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket	257.608.590	500.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	45.000.000	60.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	17.415.000	30.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	120.029.117	120.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	80.164.000	150.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	Dokumen	378.357.549	500.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor-Pedurungan	100	persen	171.557.832	200.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	171.557.832	200.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor-Pedurungan	100	persen	400.832.300	500.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	270.000.000	300.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Laporan	130.832.300	200.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	presentase pemeliharaan aset SKPD-Pedurungan	100	persen	310.161.000	650.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30	Unit	190.161.000	250.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	20.000.000	200.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	50.000.000	100.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	50.000.000	100.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	93	Persen	3.355.070.813	4.400.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan-Pedurungan	1	angka	109.735.000	200.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	Dokumen	109.735.000	200.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan-Pedurungan	100	persen	2.180.335.813	2.700.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	94.000.000	100.000.000	KELURAHAN MUKTHARJO KIDUL
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	90.000.000	100.000.000	KELURAHAN TLOGOSARI KULON
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	1.246.335.813	1.500.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	75.000.000	100.000.000	KELURAHAN GEMAH
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	75.000.000	100.000.000	KELURAHAN PALEBON
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	75.000.000	100.000.000	KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	75.000.000	100.000.000	KELURAHAN KALICARI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	75.000.000	100.000.000	KELURAHAN PEDURUNGAN LOR
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	75.000.000	100.000.000	KELURAHAN PENGGARON KIDUL
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	75.000.000	100.000.000	KELURAHAN PLAMONGANSARI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	75.000.000	100.000.000	KELURAHAN PEDURUNGAN TENGAH
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	75.000.000	100.000.000	KELURAHAN TLOGOMULYO
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	75.000.000	100.000.000	KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat-Pedurungan	100	persen	1.065.000.000	1.500.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2	Laporan	1.065.000.000	1.500.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan-Pedurungan	93	Persen	39.050.150.000	42.220.600.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan-Pedurungan	393	kegiatan	15.518.000.000	17.800.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6	Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	100.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15	Unit	1.710.000.000	2.000.000.000	KELURAHAN MUKTIHARJO KIDUL
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	1.084.000.000	1.100.000.000	KELURAHAN TLOGOMULYO
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6	Unit	1.000.000.000	2.500.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	Unit	1.083.000.000	1.100.000.000	KELURAHAN GEMAH
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8	Unit	950.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN KALICARI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	1.084.000.000	1.100.000.000	KELURAHAN PALEBON
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	Unit	997.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	Unit	950.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN PEDURUNGAN LOR
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8	Unit	950.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN PENGGARON KIDUL
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	Unit	1.029.000.000	1.100.000.000	KELURAHAN PLAMONGANSARI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13	Unit	1.681.000.000	1.700.000.000	KELURAHAN TLOGOSARI KULON
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	Unit	950.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14	Unit	950.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN PEDURUNGAN TENGAH
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas	50.000.000
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14			Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN TLOGOMULYO
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4			Pokmas / Ormas	450.000.000	500.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16			Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN KALICARI
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	21			Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN GEMAH
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	22			Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN PALEBON
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16			Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15			Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN PEDURUNGAN LOR
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	19			Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN PENGGARON KIDUL
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18			Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN PLAMONGANSARI
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20			Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN TLOGOSARI KULON
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	19			Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18			Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN PEDURUNGAN TENGAH

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya-Pedurungan	8	jenis	23.532.150.000	24.420.600.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	33	Lembaga Kemasyarakatan	4.002.800.000	4.500.000.000	KELURAHAN MUKTIHARJO KIDUL
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyarakatan	4.561.400.000	4.597.800.000	KELURAHAN TLOGOSARI KULON
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	150.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyarakatan	1.717.400.000	1.742.400.000	KELURAHAN GEMAH
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyarakatan	1.229.600.000	1.254.600.000	KELURAHAN KALICARI
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyarakatan	1.572.800.000	1.600.000.000	KELURAHAN PALEBON
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyarakatan	1.487.600.000	1.500.000.000	KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyarakatan	2.073.200.000	2.098.200.000	KELURAHAN PEDURUNGAN TENGAH
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyarakatan	1.331.600.000	1.352.400.000	KELURAHAN PEDURUNGAN LOR
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyarakatan	1.843.400.000	1.868.400.000	KELURAHAN PLAMONGANSARI
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyarakatan	787.400.000	796.800.000	KELURAHAN PENGGARON KIDUL
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyarakatan	1.866.200.000	1.900.000.000	KELURAHAN TLOGOMULYO
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	Lembaga Kemasyarakatan	908.000.000	1.000.000.000	KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
		7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1	Laporan	23.750.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum-Pedurungan	20	Persen	50.000.000	50.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	jumlah pelanggaran terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani-Pedurungan	30	angka	50.000.000	50.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	50.000.000	50.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional-Pedurungan	40	Persen	25.450.000	75.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional bagi organisasi kemasyarakatan , organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan-Pedurungan	2	kegiatan	25.450.000	75.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	150	Orang	25.450.000	75.000.000	KECAMATAN PEDURUNGAN
8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				97.338.097.480	16.440.484.000	
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				97.338.097.480	16.440.484.000	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00	Persen	6.813.370.840	7.066.233.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00	Persen			
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	100.00	Persen			
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00	Persen			
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	8	dokumen	62.160.000	10.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	29.874.000	3.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	2.108.000	850.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	2.640.000	850.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	2.108.000	850.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	2.235.000	850.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	1.073.000	1.800.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	22.122.000	1.800.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4	dokumen	5.101.157.000	5.828.506.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100	%			
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36	Orang/bulan	4.799.407.000	5.308.675.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	296.750.000	490.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	788.000	10.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan	3.766.000	12.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	446.000	7.831.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	100	%	29.984.000	35.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	55	Orang	29.984.000	35.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100	%	791.963.650	524.685.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	3.534.300	4.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	30.000.000	10.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	55.010.000	55.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10	Paket	14.052.300	25.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10	Dokumen	450.000	685.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
8.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	50	Laporan	90.075.400	50.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	Laporan	450.000.000	180.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5	Dokumen	148.841.650	200.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	%	92.531.190	62.410.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	Unit	31.230.000	15.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	61.301.190	47.410.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100	%	417.972.000	226.748.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	20.920.000	66.748.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	397.052.000	160.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100	%	317.603.000	378.884.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	35.955.000	48.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22	Unit	249.287.000	275.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10	Unit	6.750.000	10.884.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	Unit	25.611.000	45.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Indeks Pengamalan Pancasila	2.20	Indeks	3.697.335.640	1.662.446.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah kejadian perkelahiran antar pelajar dan warga yang terjadi di kota semarang selama satu tahun	2	kejadian	3.697.335.640	1.662.446.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	7	Dokumen	1.242.185.000	832.691.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	28	Dokumen	209.135.000	190.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1527	Orang	1.936.760.640	267.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	180	Orang	150.000.000	250.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4	Laporan	159.255.000	122.255.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Indeks Kebebasan Sipil	66.00	angka indeks	77.712.117.000	3.488.495.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Prosentase Partisipasi pemilih pada pemilu/pemilukada	70.00	Persen			
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Partisipasi politik masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	6500	laporan dan usulan	77.712.117.000	3.488.495.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	65	Dokumen	72.215.744.000	415.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	9	Dokumen	4.222.465.000	85.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100	Orang	77.263.000	2.638.495.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1000	Orang	1.010.000.000	115.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	65	Laporan	186.645.000	235.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Indeks Kinerja Ormas	58.00	indeks	2.670.653.000	1.248.620.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas Aktif	35	%	2.670.653.000	1.248.620.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	29	Dokumen	1.812.153.000	785.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	5	Dokumen	150.000.000	10.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	250	Orang	500.000.000	90.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2	Laporan	208.500.000	363.620.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Indeks kerukunan umat beragama	71.00	indeks	2.882.847.000	562.552.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	jumlah kejadian konflik sosial yang berlatar belakang suku, agama, ras dan antar golongan	1	kejadian	2.882.847.000	562.552.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	15	Dokumen	765.082.000	190.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU PERKIRAAN N+1 (Rp)	UNIT PELAKSANA
		URAIAN	TARGET	SATUAN			
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100	Orang	110.768.000	87.552.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	150	Orang	1.856.997.000	255.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3	Laporan	150.000.000	30.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Prosentase kemampuan analisa intelijen strategis terhadap gangguan ipolkesosbudhankam	83.00	Persen	3.561.774.000	2.412.138.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	jumlah demonstrasi/ unjuk rasa bersifat kekerasan	23	kejadian	3.561.774.000	2.412.138.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	200	Orang	913.960.000	900.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	200	Orang	422.764.000	900.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	377	Laporan	275.050.000	325.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	18	Dokumen	1.950.000.000	287.138.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JUMLAH					5.381.127.963.269	5.354.749.047.325	

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Ukuran tentang keberhasilan pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota dapat diukur diantaranya melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah dari setiap aspek dan fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

6.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH TAHUN 2024

Dalam rangka upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2024, maka ditetapkan target pada indikator kinerja utama daerah tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 6.1.
Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Semarang Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	84,40-86,00
2	Tingkat Kearifan Budaya Lokal	%	61,05
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,6-6,5
4	Angka Kemiskinan	%	4,00-3,82
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,7-6,5
6	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	(Juta Rp)	104,12
7	Persentase peningkatan Nilai Investasi	% (Juta Rp)	7 (27.362.089)
8	Persentase peningkatan kunjungan wisata	%	6
9	Indeks Demokrasi	indeks	72,8
10	Indeks Pembangunan Gender	indeks	95,80
11	Persentase penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban	%	9,90
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	indeks	56,06
13	Indeks Kinerja Sistem Infrastruktur	indeks	85
14	Persentase kawasan banjir dan rob terhadap luas wilayah keseluruhan	%	3,19
15	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	76,00
16	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	88,35
17	Opini BPK	Predikat	WTP

6.2. INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan indikator program prioritas pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kota Semarang, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 6.2.

Tabel 6.2.

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Semarang Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi		
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (Secara administrasi kependudukan)	%	0,35
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,7-6,5
3	Laju inflasi	%	2,4 ±1
4	Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB	%	28,84
5	Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	28,72
	Fokus Kesejahteraan Sosial		
6	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai indeks	84,00-86,00
a.	Pengeluaran per Kapita disesuaikan	Ribu Rp. /thn	16.000
b.	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	77,54
c.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,61
d.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	15,60
7	Angka Kemiskinan	%	4,00-3,82
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,6 – 6,5
9	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	99,97
	Fokus Seni Budaya dan Olah Raga		
10	Tingkat kearifan budaya lokal	%	61,05
B.	ASPEK PELAYANAN UMUM		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
1	Tingkat partisipasi warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (SPM)	%	100
2	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM)		
	a.Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100
	b.Tingkat partisipasi warga Negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	100
3	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM)	%	100
4	Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	65,50
5	Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	65,70

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target
6	Angka Partisipasi Kasar		
	a. PAUD (3-6 tahun)	%	81,75
	b. SD/MI	%	100
	c. SLTP/MTs	%	100
7	Angka Partisipasi Murni :		
	a. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	90
	b. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	80
8	Angka Putus Sekolah:		
	a. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,01
	b. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,03
9	Angka Kelulusan:		
	a. Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100
	b. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100
10	Angka Melanjutkan (AM):		
	a. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100
11	Fasilitas Pendidikan:		
	a. Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	96,5
	b. Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	99,3
12	Rasio Guru/Murid perkelas Rata-rata		
	a. Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	%	1:18
	b. Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	%	1:20:32
	c. Rasio guru/murid sekolah pendidikan menengah pertama	%	1:17
	d. Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah menengah pertama	%	1:17:30
13	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV		
	a. Jenjang PAUD	%	98,8
	b. Jenjang SD/MI	%	100
	c. Jenjang SMP/MTs	%	100
I.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	%	0,38
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kota yang terakreditasi	%	93,70
3	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar (SPM)	%	100
4	Pelayanan kesehatan ibu melahirkan sesuai standar (SPM)	%	100
5	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar (SPM)	%	100
6	Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar (SPM)	%	100
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar sesuai standar (SPM)	%	100
8	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sesuai standar (SPM)	%	100
9	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia sesuai standar (SPM)	%	100
10	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sesuai standar (SPM)	%	100
11	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus sesuai standar (SPM)	%	100
12	Pelayanan Kesehatan Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat sesuai standar (SPM)	%	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target
13	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis sesuai standar (SPM)	%	100
14	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar (SPM)	%	100
15	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	(per 100.000 kelahiran hidup)	71,32
16	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	/1000 KH	6,06
17	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	%	6,88
18	Nilai IKM Pelayanan Kesehatan RS	%	97,50
19	Nilai Kinerja BLUD Baik	Indeks	84,50 (A+)
I.03.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten/kota	%	96,78
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kabupaten/kota	%	99,41
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	84,20
4	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari. (SPM) (1 SR melayani 8 jiwa)	%	100
5	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (SPM)	%	92,86
6	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	94,00
7	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	%	64,6
8	Persentase luas sawah beririgasi	%	43
9	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	%	36,34
10	Persentase areal kawasan kumuh	%	36
11	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	%	28
I.04.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	%	100 (30 Unit)
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	%	100 (84 Unit)
3	Luas Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	%	64 (64% x 431,54 Ha = 276,192 Ha)
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah tidak layak huni)	Unit	1.000
5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	100 (10 perumahan)

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target
6	Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk	/1000 penduduk	19,28
I.05.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (SPM)	%	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	68
3	Indeks Resiko Bencana	%	109
4	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM)	%	100
5	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)	%	100
6	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)	%	100
7	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM)	%	100
8	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	%	88,57
I.06.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)	%	100
	a. Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100
	b. Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100
	c. Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100
	d. Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100
	a. Jumlah Korban Bencana Alam Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	%	100
	b. Jumlah Korban Bencana sosial yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan sosial	%	100
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	70
2	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama	%	58 (145 kasus)
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	7,80
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	0,011
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)	Rasio	12,84

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target
4	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100
5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	74,71
6	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	%	66,34
7	Rasio KDRT	Rasio	0,023
2.09.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		
1	Persentase cadangan pangan masyarakat	%	255,074
2	Persentase daerah rentan rawan pangan	%	3
3	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	89,1
4	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	82
2.10.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		
1	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	58
2	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	%	60
2.11.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	56,06
	a. Peningkatan Indeks Kualitas Air	poin	50,01
	b. Peningkatan Indeks Kualitas Udara	poin	74,00
	c. Peningkatan Indeks Kualitas lahan	poin	33,29
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota, meliputi: a. Persentase pengurangan timbulan sampah b. Persentase penanganan timbulan sampah	% %	28 71
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	%	85,80
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
1	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	74,00
2	Kepemilikan akta kelahiran	%	97,50
3	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian , akta perceraian, dan akta perkawinan dari peristiwa kematian, perceraian dan perkawinan yang dilaporkan	%	100
4	Pemanfaatan data kependudukan (Perjanjian Kerjasama)	%	100
5	Perekaman KTP elektronik	%	99,50
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
1	Persentase LPM aktif	%	100
2.14.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
1	Rata-rata jumlah anak per keluarga (TFR)	Rasio	2,00
2	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	8,04

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target
3	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	77,24
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		
1	Arus penumpang angkutan umum	Jumlah	16.010.382
2	Pengurangan jumlah titik atau ruas rawan macet	titik/ruas rawan macet	2
3	Kepemilikan KIR angkutan umum	jumlah	1990
2.16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100
2	Presentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/ kota	%	75,34
4	Persentase (%) perangkat daerah yang mengimplementasi/replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan Masterplan	%	100
5	Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan sesuai amanat UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	%	100
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
1	Persentase koperasi aktif	%	77
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	14
3	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	55
2.18.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	investor	541
2	Persentase peningkatan investasi	%	7
3	Nilai investasi	Rp (dlm juta)	27.362.089
2.19.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	Peningkatan prestasi olahraga	Medali Emas	51
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,95
3	Tingkat partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	0,043

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%	100
2	Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi	%	100
2.21.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	100
2	Peningkatan (%) SDM pengelola keamanan syber dan SPBE yang mengikuti peningkatan kompetensi dan bersertifikasi	%	80
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	85,45
2	Benda, Situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Buah	460
3	Register cagar budaya (pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Unit	461
4	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	Unit	12
5	Persentase Apresiasi terhadap Kesenian Lokal	%	36,66
2.23.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	48
2	Pengunjung perpustakaan per tahun	%	30
3	Indeks pembangunan literasi masyarakat	%	60
2.24.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang –Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	80
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	59
3	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	arsip	151.000
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		
1	Jumlah total produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: Perikanan Dalam Angka)	Ton	7.075,02
2	Konsumsi ikan	Kg/Kapita /thn	40,19
3	Produksi Ikan Olahan	Ton/ Tahun	17.631
4	Produksi perikanan tangkap (ton)	Ton/ tahun	3.113,69
5	Produksi perikanan budidaya (ton)	Ton/ tahun	3.961,33
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		
1	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/ kota	%	6 (4.116.057)
2	Tingkat hunian akomodasi	%	44,88

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target
3	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	19
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	ton/ha/tahun	6,38
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	5
3	Jumlah kawasan pertanian perkotaan (Kelurahan)	Kelurahan	147
4	Sentra produk unggulan pertanian (kawasan - komoditas)	Kawasan	6
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/ IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	66
2	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	86,0
3	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	69
4	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	90
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	%	0,50
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	100%
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan	%	10%
4	Sentra produk unggulan (kawasan - Logam)	Sentra	1
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	%	12,50%
4	UNSUR PENDUKUNG		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH		
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai indeks	76,00
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai indeks	88,35
3	Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai / Predikat	>76/BB
4	Nilai dan status kinerja Pemerintah Daerah (Nilai EKPPD)	Nilai	>3,47/ST
4.02	SEKRETARIAT DPRD		
1	Tersusun dan terintegrasinya program kerja DPRD dalam fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	%	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target
5	UNSUR PENUNJANG		
5.01.	PERENCANAAN		
1	Tersedianya Dokumen RPJPD dan RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA secara tepat waktu.	Dokumen	2
2	Tersedianya Dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA secara tepat waktu.	Dokumen	2
3	Kesesuaian Program di RPJMD dengan Program di RKPD tahunan	%	100
4	Kesesuaian Program di RKPD tahunan dengan Program di APBD tahunan	%	100
5.02	KEUANGAN		
1	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	54,57
2	Persentase Silpa terhadap APBD	%	1,02
5.03	KEPEGAWAIAN		
1	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai Indeks	83,50
2	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah / Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	258,36
3	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	20,98
4	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
1	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	4,18
2	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	85
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	100,00
2	Persentase perangkat daerah yang terfasilitasi dan melaksanakan inovasi daerah	%	41,18
3	Indeks Inovasi Daerah	Nilai Indeks	66
6	UNSUR PENGAWAS		
6.01	INSPEKTORAT DAERAH		
1	Indeks Penerapan Manajemen Resiko	Indeks	3,00
2	Tingkat Maturitas SPIP (Nilai)	Nilai	3,06
3	Opini BPK atas hasil laporan keuangan pemerintah daerah (opini)	Opini	WTP
4	Kapabilitas APIP	Leveling	3
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN		
1	Persentase Tingkat partisipasi masyarakat	%	94,29
2	Persentase partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Trantibum dan wawasan kebangsaan ditingkat kewilayahan	%	90,86
3	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima layanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	%	93
4	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	99

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
1	Indeks Demokrasi	Indeks	72,80
2	Indeks Pembumih Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK)	Indeks	74,00
C.	ASPEK DAYA SAING		
1.	Kemampuan Ekonomi Daerah		
1	PDRB per kapita berlaku	juta Rp	104,12
2	Nilai Ekspor	US\$	3.539.299.867,06
2.	Fasilitas Wilayah / Infrastruktur		
2.1	Aksesibilitas Daerah		
1	Rasio konektivitas kabupaten/ kota	Rasio	0,5876
2.2	Penataan Wilayah		
1.	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	45,35
2.	Kesesuaian tata ruang	%	100
3.	Fasilitas Iklim Berinvestasi		
3.1	Ketentraman dan Ketertiban		
1	Angka Kriminalitas	kejadian	1251
2	Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban	%	9,90
3.2	Kemudahan Perijinan		
1	Prosedur ijin terbit sesuai SP (sejak 2020: 174 jenis perijinan dari semula 52 jenis)	%	95,50
4.	Sumber Daya Manusia		
4.1	Kualitas Tenaga Kerja		
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	70,15
2	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	%	78
4.2	Rasio Ketergantungan Penduduk (Dt. Disdukcapil)	%	41,03

BAB VII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang tahun 2024 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026. Prioritas pembangunan tahun 2024 mengikuti prinsip *money follows program* dengan orientasi pada pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Penyusunan RKPD tahun 2024 juga dilakukan dengan melihat keselarasannya dengan prioritas nasional dan prioritas Provinsi Jawa Tengah. Dengan mengambil tema “Pemantapan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat yang Didukung oleh Penguatan Struktur yang Mendukung Keberlanjutan Daerah”. Sinergitas seluruh komponen masyarakat untuk bergerak bersama diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas kesehatan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19. Dokumen RKPD ini sekaligus juga menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024.

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn
Pembina Tingkat I
NIP. 196710231994012001